



**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**



**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG**

**TAHUN
2025**



**BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut RPD Kabupaten Bantaeng adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 – 2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2025.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahun 2025 Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini bahwa RKPD Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 - 2026 serta arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai :
 - a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - b. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung capaian target dan sasaran pembangunan Daerah;
 - c. sebagai dasar penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagai landasan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; dan
 - d. untuk melakukan penyusunan RKA bagi perangkat daerah lingkup pemerintah daerah.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD
Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII : PENUTUP

- (2) Uraian sistematika RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV
LAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. BUPATI BANTAENG,



ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,



MUH. RIVAI NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024 NOMOR 12



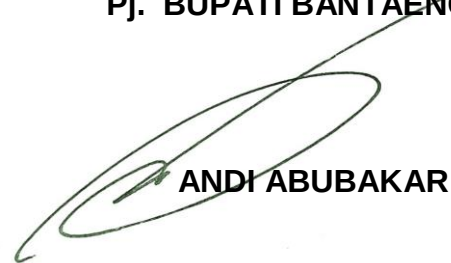
KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan langkah awal dari pembangunan daerah dengan merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 - 2026 dan mengacu pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKP Tahun 2025. Dokumen ini berisi beberapa pokok bahasan terkait pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 memiliki tantangan yang cukup kompleks dimana isu global yang menjadi isu nasional terkait beberapa transformasi pembangunan seperti transformasi social, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Memahami dinamika tersebut, tahun 2025 prioritas pembangunan harus memperhatikan kondisi permasalahan yang sedang terjadi, kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan pusat (Nasional) sehingga pembangunan daerah diharapkan mampu mendukung pencapaian pembangunan nasional di Tahun 2025 ini.

RKPD ini akan menjadi dasar penyusunan Renja-Perangkat Daerah dan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam upaya menciptakan sinergi antara perencanaan dan penganggaran, maka RKPD menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Pj. BUPATI BANTAENG



ANDI ABUBAKAR



DAFTAR ISI

BAB	I	PENDAHULUAN	I	1
	1.1	Latar Belakang	I	1
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I	5
	1.3	Hubungan Antar Dokumen	I	10
	1.4	Maksud dan Tujuan	I	13
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD	I	13
BAB	II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II	1
	2.1	Kondisi Umum Daerah	II	1
		2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II	2
		2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II	2
		2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II	5
		2.1.1.3. Demografi	II	12
		2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	16
		2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II	16
		2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial	II	27
		2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II	35
		2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II	35
		2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II	46
		2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan	II	57
		2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II	65
	2.2	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng	II	71
	2.3	Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD	II	113
	2.4	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II	120
	2.5	Capaian Pembangunan TPB/SDG's	II	123
	2.6	Permasalahan Pembangunan Daerah	II	128
	2.7	Isu Strategis Pembangunan Daerah	II	134
	2.8	Inovasi Pembangunan Daerah Bantaeng	II	150
BAB	III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III	1
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III	2
		3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah	III	2
		3.1.1.1 Prospek Perekonomian	III	2
		3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah	III	7
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III	20
		3.2.1. Aras Kebijakan Pendapatan Daerah	III	22
		3.2.2. Aras Kebijakan Belanja Daerah	III	26
		3.2.3. Aras Kebijakan Pembiayaan Daerah	III	32
		3.2.4. Kapasitas Riil Pendanaan Tahun 2025	III	34
		3.2.5. Anggaran Program Standar Pelayanan Minimal	III	35
BAB	IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV	1
	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantaeng	IV	1
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV	4
		4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV	4
		4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi	IV	6



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

	Sulawesi Selatan Tahun 2025		
	4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantaeng	IV	8
	4.3 Keselarasan Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bantaeng	IV	23
	4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV	36
BAB	V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V	1
	5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2025	V	1
	5.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	V	1
BAB	VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI	1
	6.1 Indikator Makro Pembangunan Daerah	VI	2
	6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	VI	2
	6.3 Indikator Kinerja Kunci	VI	4
	6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VI	49
	6.5 Capaian Pembangunan TPB/SDG's	VI	52
BAB	VII PENUTUP	VII	1
	7.1 Kaidah Pelaksanaan	VII	1
	7.2 Kesimpulan	VII	2



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Nama Sungai, Panjang Sungai dan Kecamatan Yang Dilintasi Kabupaten Bantaeng	II	3
Tabel II.2	Statistik Klimatologi Kabupaten Bantaeng Tahun 2023	II	4
Tabel II.3	Jumlah Penduduk, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2023	II	14
Tabel II.4	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bantaeng, Tahun 2019-2023	II	18
Tabel II.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bantaeng, Tahun 2019-2023	II	19
Tabel II.6	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	24
Tabel II.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bantaeng, Tahun 2019 – 2023	II	37
Tabel II.8	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bantaeng, Tahun 2019 – 2023	II	37
Tabel II.9	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023	II	38
Tabel II.10	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 – 2023	II	38
Tabel II.11	Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 – 2023	II	39
Tabel II.12	Indikator Pelayanan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 – 2023	II	41
Tabel II.13	Kondisi Pelayanan Ketertiban dan Ketentraman Umum di Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	42
Tabel II.14	Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	44
Tabel II.15	Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	45
Tabel II.16	Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu, Kabupaten Bantaeng Tahun 2023	II	47
Tabel II.17	Komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	49
Tabel II.18	Indeks Penyusun Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	50
Tabel II.19	Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	51
Tabel II.20	Indikator terkait Urusan Pertanahan Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	52
Tabel II.21	Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng, Tahun 2019 - 2023	II	53
Tabel II.22	Kondisi 3 (Tiga) Indikator LH Tahun 2019-2023	II	54
Tabel II.23	Fasilitas Perhubungan Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	55
Tabel II.24	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 – 2023	II	56
Tabel II.25	Perkembangan Investasi Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 – 2023	II	56
Tabel II.26	Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	58
Tabel II.27	Capaian Pembangunan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	59



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

Tabel II.28	Capaian Kinerja Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Tahun Kabupaten Bantaeng, 2019-2023	II	60
Tabel II.29	Capaian Pembangunan Perekonomian Sektor Perdagangan Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	60
Tabel II.30	Capaian Pembangunan Perekonomian Sektor Perindustrian Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	61
Tabel II.31	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	64
Tabel II.32	Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Orang/ Barang Pengguna Terminal Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	66
Tabel II.33	Surat Izin Usaha Yang Keluar Tahun 2019-2023	II	68
Tabel II.34	Waktu untuk Memproses Perizinan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2023	II	69
Tabel II.35	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023 Permendagri 86 Tahun 2017)	II	72
Tabel II.36	Capaian Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020) Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2023	II	106
Tabel II.37	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Kabupaten Bantaeng Tahun 2023	II	115
Tabel II.38	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (Renstra) Kabupaten Bantaeng Tahun 2023	II	117
Tabel II.39	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (Evaluasi RKPD 2023) Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 (masuk lampiran)	II	119
Tabel II.40	Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 – 2023 (Permendagri No. 59/2021)	II	120
Tabel II.41	Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 – 2023 (Permendagri No. 59/2021)	II	121
Tabel II.42	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bantaeng, 2019 – 2023 (Permendagri No. 59/2021)	II	122
Tabel II.43	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Bantaeng, 2019 – 2023 (Permendagri No. 59/2021)	II	122
Tabel II.44	SPM Urusan Ketentramandan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantaeng, 2019 – 2023 (Permendagri No. 59/2021)	II	122
Tabel II.45	Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 – 2023 Permendagri No. 59/2021)	II	122
Tabel II.46	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 dan 2023	II	123
Tabel II.47	Permasalahan Pembangunan Daerah dan Upaya Penyelesaiannya Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	II	130
Tabel II.48	Permasalahan Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	II	132
Tabel III.1	Capaian dan Target Indikator Ekonomi Makro Pembangunan Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional	III	12
Tabel III.2	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bantaeng, Tahun 2019-2023	III	14
Tabel III.3	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bantaeng	III	24



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

	Tahun 2022-2026 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 (Juta Rupiah)		
Tabel III.4	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022-2026 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 (Juta Rupiah)	III	31
Tabel III.5	Analisis Pembiayaan Kabupaten Bantaeng Tahun 2022-2026	III	33
Tabel III.6	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022-2026 (dalam Jutaan)	III	34
Tabel III.7	Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Pagu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022-2026 (dalam Jutaan)	III	35
Tabel III.8	Belanja Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	III	36
Tabel IV.1	Tujuan, Sasaran dan Target RPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	IV	2
Tabel IV.2	Target Indikator Makro Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	IV	4
Tabel IV.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025	IV	7
Tabel IV.4	Keterkaitan Isu, Permasalahan, Sasaran, Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	IV	10
Tabel IV.5	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	IV	12
Tabel IV.6	Keterkaitan Prioritas, tujuan, sasaran dan program prioritas Pembangunan Kabupaten Bantaeng 2025	IV	14
Tabel IV.7	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi di Sulawesi Selatan dan relevan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bantaeng	IV	24
Tabel IV.8.	Keselarasan Program Prioritas Kabupaten Bantaeng terhadap Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	IV	27
Tabel IV.9.	Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	IV	33
Tabel IV.10	Dukungan Kabupaten Bantaeng terhadap Program Pembangunan Prioritas Kawasan Pembangunan Bulukumba Tahun 2025	IV	34
Tabel IV.11	Sasaran Pembangunan Tematik Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	IV	36
Tabel V.1	Rincian Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Proyeksi Pagu Tahun 2025 (Jutaan Rupiah)	V	1
Tabel V.2	Program Prioritas Berserta Target Dan Pagu Anggaran Tahun 2025	V	4
Tabel V.3	Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kab. Bantaeng Tahun 2025	V	15
Tabel VI.1	Target Indikator Makro Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	VI	2
Tabel VI.2	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	VI	2
Tabel VI.3	Sasaran Pembangunan Tematik Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	VI	3
Tabel VI.4	Capaian dan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	VI	4
Tabel VI.5	Target Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020) Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	VI	40
Tabel VI.6	Target Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bantaeng 2025	VI	50
Tabel VI.7	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	VI	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	I	4
Gambar I.2	Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng	I	4
Gambar I.3	Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	I	11
Gambar I.4	Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran	I	12
Gambar II.1	Peta Administrasi Kabupaten Bantaeng	II	6
Gambar II.2	Peta Delineasi Kawasan Industri Bantaeng	II	8
Gambar II.3	Peta Sebaran Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Bantaeng	II	10
Gambar II.4	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bantaeng	II	11
Gambar II.5	Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bantaeng	II	12
Gambar II.6	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	13
Gambar II.7	Piramida Penduduk Kabupaten Bantaeng Tahun 2023	II	15
Gambar II.8	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bantaeng, 2018-2023 (Milyar Rupiah)	II	17
Gambar II.9	Kontribusi Struktur Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2023	II	21
Gambar II.10	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Bantaeng, 2019-2023 (Juta Rupiah)	II	22
Gambar II.11	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Juta Rupiah)	II	23
Gambar II.12	Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023 (Kondisi Maret)	II	25
Gambar II.13	Indeks Gini Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	26
Gambar II.14	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Bantaeng Dan Wilayah Sekitar Tahun 2023	II	27
Gambar II.15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2023	II	28
Gambar II.16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Tahun 2023	II	29
Gambar II.17	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	30
Gambar II.18	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	31
Gambar II.19	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2023	II	32
Gambar II.20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	33
Gambar II.21	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2023	II	34
Gambar II.22	Angka Melek Huruf (%) Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	36
Gambar II.23	Tingkat Kesempatan Kerja (%) Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	47
Gambar II.24	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantaeng Tahun	II	49



	2019-2023		
Gambar II.25	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2023	II	50
Gambar II.26	Nilai SAKIP (Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	62
Gambar II.27	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023	II	66
Gambar II.28	Jumlah Kasus Kriminalitas Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2022	II	68
Gambar II.29	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15+ Tahun) menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Bantaeng 2023	II	71
Gambar III.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2023, Target Pembangunan 2024 dan 2025	III	15
Gambar III.2	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2023, Target Pembangunan 2024 dan 2025 (Juta Rupiah)	III	17
Gambar III.3	Indeks Gini Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2023, Target Pembangunan 2024 dan 2025	III	18
Gambar III.4	Angka Kemiskinan Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2023, Target Pembangunan 2024 dan 2025	III	19
Gambar III.5	Tingkat Pengangguran Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2023, Target Pembangunan 2024 dan 2025	III	20
Gambar IV-1	Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025	IV	5
Gambar IV.2	Kerangka Perumusan Sasasan Dan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Bantaeng	IV	9
Gambar IV.3	Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	IV	23
Gambar IV.4	Keselarasan Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	IV	24



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR
12 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANTAENG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pembangunan, sangat menentukan kebijakan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat. Peran pemerintah daerah disini, bertindak sebagai fasilitator dan activator dalam pembangunan diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan SDM, Ekonomi, Sosial, dan lingkungan. Dengan berbagai potensi dan kekayaan Sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Bantaeng harus mampu mengelola dan memperkaya, sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah harus diselenggarakan dengan terarah, efektif, efisien dan tepat sasaran. Dengan demikian perlu adanya perumusan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Dalam Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) untuk jangka 20 Tahun, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka 5 Tahunan, dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk jangka tahunan. Secara beruntun RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD dalam 4 (empat) tahapan pembangunan tiap 5 Tahun. Begitu juga dengan RPJMD dilaksanakan melalui RKPD dalam 5 (lima) tahap pembangunan tiap 1 (satu) tahun. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja



Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan instruksi Menteri dalam negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, menyatakan bahwa penyusunan RKPD 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang berisi penjabaran tujuan, sasaran dan kebijakan Kabupaten Bantaeng yang penyusunannya berpedoman Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Bantaeng, dan Prioritas Pembangunan (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan dan RKP Tahun 2025. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Bantaeng 2025 merupakan pelaksanaan agenda pembangunan tahun ke 2 (kedua) dalam RPD Tahun 2024-2026. Dengan pelaksanaan pembangunan beberapa tahun sebelumnya, berbagai capaian pembangunan telah dapat dilihat dan dirasakan masyarakat Bantaeng. Capaian pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan ditahun mendatang. Dengan capaian yang sudah ada juga dapat menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja, dan sebagai dasar dalam memperbaiki kinerja dan mencapai capaian pembangunan yang ditargetkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 disusun berdasarkan pendekatan:

- 1) **Teknokratik**, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- 2) **Partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
- 3) **Politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD dengan memperhatikan pula pokok-pokok pikiran yang berasal dari DPRD; dan



- 4) **Atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan bottom-up (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas dari desa/kelurahan, kecamatan hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan.

Selanjutnya dalam penyusunan substansi RKPD Kabupaten Bantaeng tahun 2025 dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu

- 1) **Holistic-tematik**, perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan factor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) **Integrative**, dalam penyusunan RKPD 2025 dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan focus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan; dan
- 3) **Spasial**, penyusunan RKPD 2025 dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Menindaklanjuti Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 10, dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng menggunakan pendekatan holistic-tematik, integrative dan pendekatan spasial. Dengan pendekatan ini pembangunan diharapkan akan lebih terarah, tepat sasaran dan dapat dilaksanakan dengan maksimal melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan dari tiap OPD. Sehingga *output, outcome dan impact* yang dihasilkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026. Selanjutnya, rumusan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025 termasuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025. Selain itu, RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada tiap akhir tahun.

RKPD menjadi jembatan antara perencanaan strategis daerah dan Perangkat Daerah dan penganggaran tahunan. Selanjutnya, RKPD disusun melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal



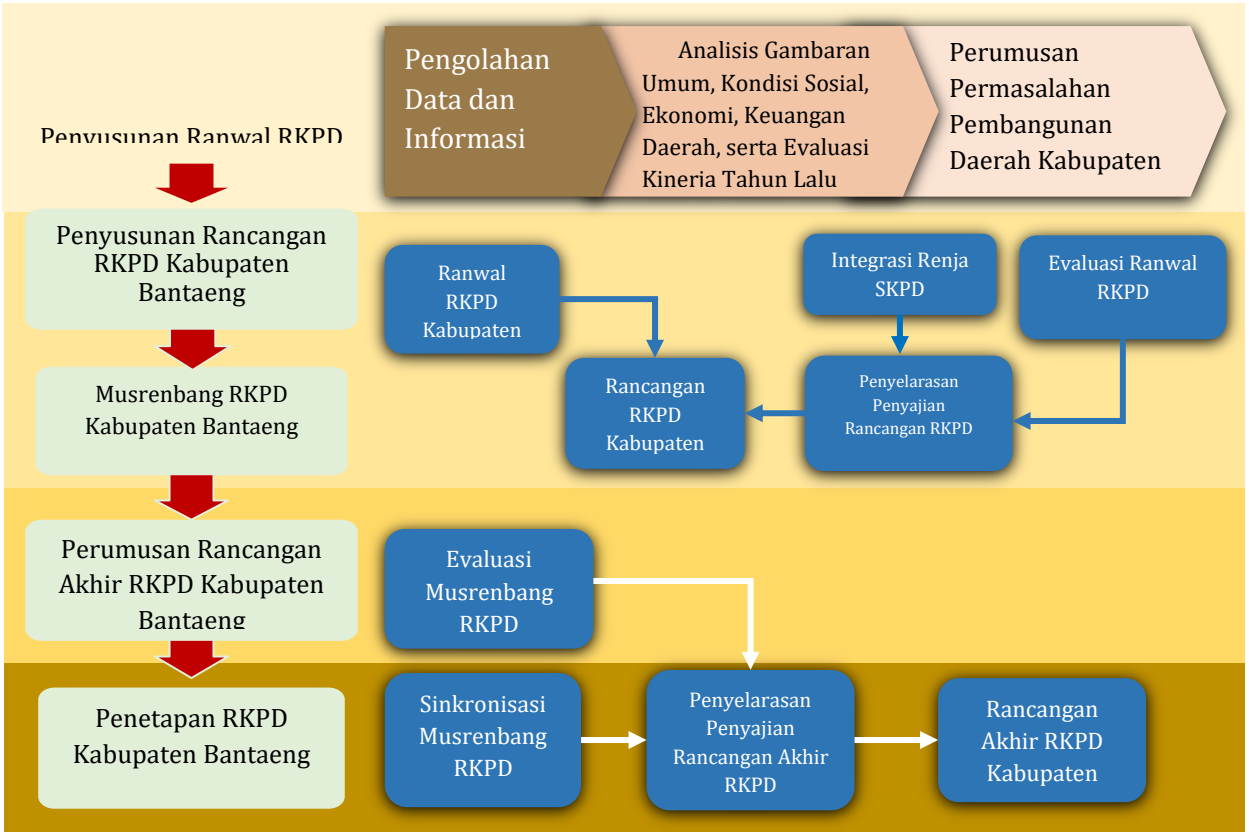
RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Dalam menyusun RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025, dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan, pada gambar sebagai berikut:

Gambar I. 1
Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025



Secara rinci tahapan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bantaeng disajikan pada gambar sebagai berikut.

Gambar I. 2
Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng





Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan perkembangan isu global, capaian pembangunan, permasalahan daerah serta kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng. Menindaklanjuti hal tersebut, maka sasaran, prioritas pembangunan dan program serta kegiatan pembangunan Kabupaten Bantaeng tahun 2025 akan berfokus pada pembangunan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng.

Dalam penyusunan RKPD 2025 Kabupaten Bantaeng harus mengimplementasikan dan melaksanakan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai bagian dari perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan dalam program dan kegiatan. Pemerintah daerah memiliki peran yang krusial dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) guna mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata. Melalui inisiatif lokal, pemerintah daerah dapat menyelaraskan kebijakan, program, dan proyek pembangunan dengan prinsip-prinsip TPB yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan memprioritaskan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga menjamin bahwa pembangunan mampu berkelanjutan hingga dapat dinikmati generasi mendatang. Oleh karena itu, penerapan TPB oleh pemerintah daerah menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan yang holistik dan berkesinambungan di tingkat lokal.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantaeng, RKPD menjadi urgensi dalam pelaksanaan perencanaan strategis antara dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (PD). Dengan RKPD 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan mampu menghasilkan capaian-capaian pembangunan yang optimal. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng dapat segera terwujud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara 2022 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Nomor 6775)
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta



Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);



24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-15-5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang



- Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
 47. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2024 – 2026.
 48. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
 49. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) dan
 53. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 8).

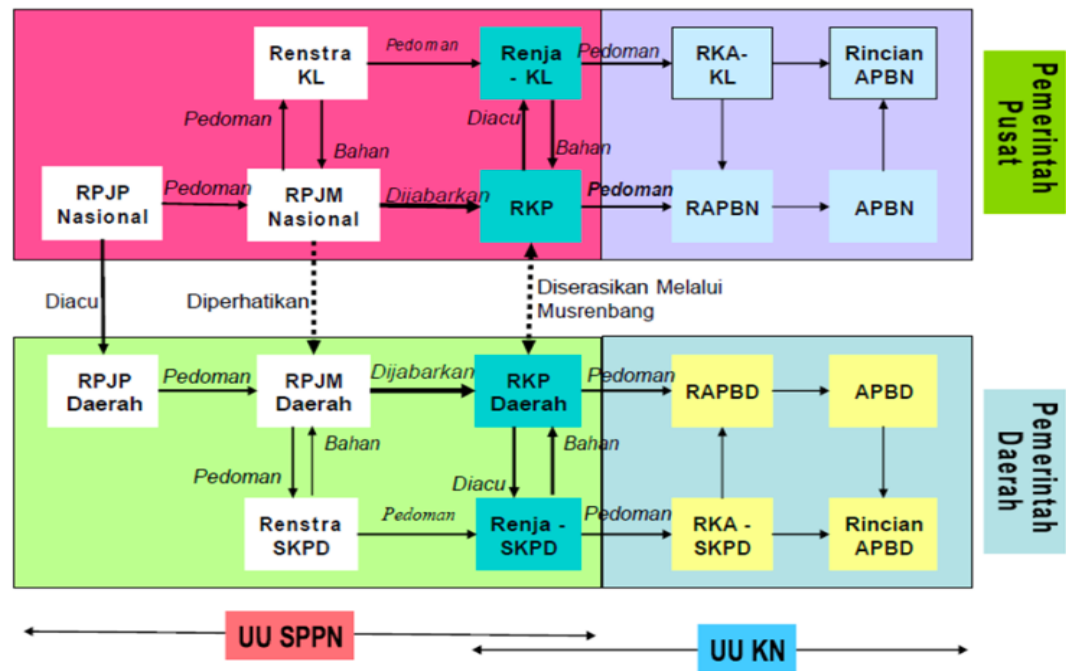
1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026, RTRW Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 – 2032, arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2025, dan Rancangan



RPJMN Tahun 2025-2045. Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar I. 3
Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025



Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2025 yang terkait dengan program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran. pembangunan, selain itu juga menyangkut penyelarasan, sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran, terutama dengan RPD, Renstra OPD, Renja OPD, dan RAPBD. Uraian hubungan antar dokumen perencanaan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut.

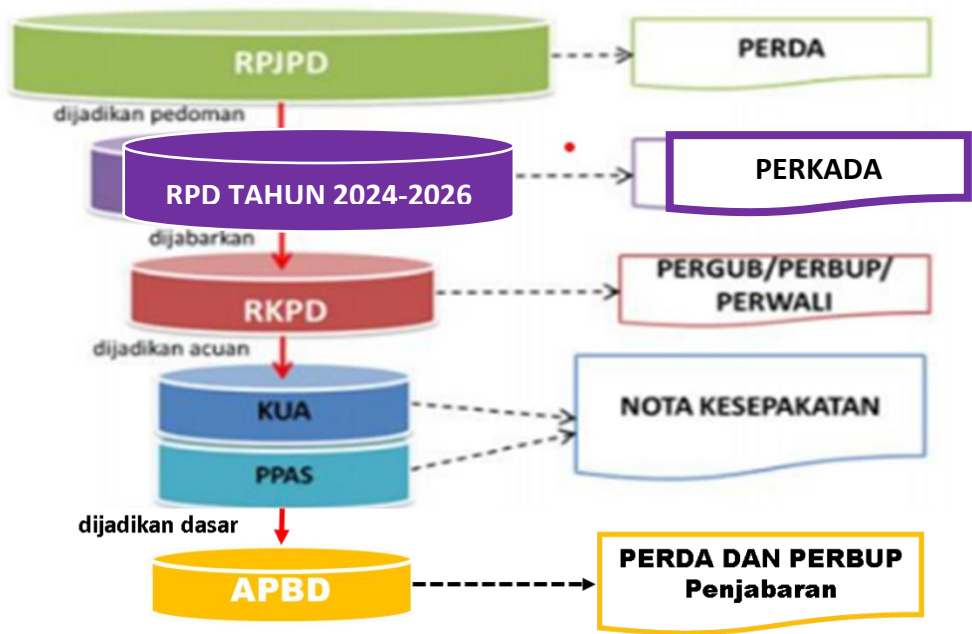
1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; serta



3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, RPD 2024-2026, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD, dan RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk Tahun 2024-2026. Selanjutnya RPD Tahun 2024-2026 dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. RKPD juga diserasikan dengan RKP yang diperoleh dari forum Musrenbang Nasional. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan Renja OPD dan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bantaeng.

Gambar I. 4
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah



1.4. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 1. Penjabaran dan pelaksanaan dari RPD Kabupaten Bantaeng 2024-2026;
 2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
 3. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- b. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025, yaitu:
 1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
 2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025;
 3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
 4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bantaeng.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan



RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPD serta Permasalahan pembangunan daerah.

BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan



capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. Penutup

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan Kabupaten Bantaeng pada tahun 2025 merupakan pembangunan periode kedua pada pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng periode 2024-2026. Pada pembangunan tahun 2025 ini diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah. Dalam upaya menyukseskan pembangunan daerah tersebut, maka dirumuskanlah berbagai kebijakan pembangunan di tahun 2025 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Kabupaten Bantaeng tahun 2024-2026 dengan beberapa perubahan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Sebagai salah satu wilayah administrasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi melimpah sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, potensi yang dimiliki Kabupaten Bantaeng akan dioptimalkan penggunaannya untuk melaksanakan pembangunan daerah yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025, maka perlu ditelaah kembali berbagai potensi daerah, termasuk capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun atau periode sebelumnya sebagai bentuk evaluasi dan pengendalian akan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Pembangunan Kabupaten Bantaeng tahun 2025 ini memiliki hierarki dalam implementasi setiap kebijakan yang diturunkan sehingga setiap program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan menjadi spesifik untuk mencapai target tertentu. Namun secara keseluruhannya, kebijakan yang ditetapkan secara terintegrasi berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan tahunan yang terangkum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 akan disusun untuk merealisasikan target pembangunan. Pada perencanaan pembangunan tahun 2025 tersebut, dirumuskan berbagai kebijakan untuk mengimplementasikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode berjalan. Oleh karena itu, selain dibutuhkan gambaran umum kondisi daerah, juga harus memperhatikan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, realisasi RPJMD, permasalahan hingga isu strategis pembangunan daerah.



2.1. KONDISI UMUM DAERAH

Data dan informasi pembangunan merupakan potret hasil pembangunan periode sebelumnya yang terangkum dalam gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bantaeng. Gambaran umum kondisi daerah terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut diturunkan menjadi fokus-fokus pembangunan daerah sebagai bagian dari capaian kinerja pembangunan daerah. Dalam menganalisis gambaran umum untuk peningkatan kualitas perencanaan RPD Bantaeng, maka indikator yang dianalisis merupakan indikator yang relevan dalam membentuk permasalahan dan kebijakan pembangunan daerah. Untuk memahami lebih lanjut berbagai potensi dan kinerja pembangunan tersebut, berikut gambaran umum Kabupaten Bantaeng dari berbagai aspek.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi merupakan informasi spasial dan mendasar dalam menganalisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bantaeng. Penjabaran aspek geografi dalam dokumen perencanaan pembangunan akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Bantaeng berperan pada pembangunan daerah baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah hingga identifikasi wilayah rawan bencana.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten dari 24 Kabupaten/Kota yang berada di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng mempunyai luas kurang lebih 39.097 ha dengan 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissapu, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kecamatan Pajukukang, Kecamatan Sinoa, Kecamatan Tompo Bulu, dan Kecamatan Uluere. Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba
Sebelah Timur	: Kabupaten Bulukumba
Sebelah Selatan	: Laut Flores
Sebelah Barat	: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto



b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak $\pm$ 120 km arah selatan Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi $5^{\circ}21'13''$ - $5^{\circ}35'26''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}51'42''$ - $120^{\circ}05'27''$ Bujur Timur. Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan wilayah daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai ke pegunungan sekitar Gunung Lompobattang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25 m sampai dengan ketinggian lebih dari 1.000 m di atas permukaan laut.

c. Topografi

Berada di kaki Gunung Lompobattang, Kabupaten Bantaeng memiliki Topografi yang terdiri dari daerah pantai, daratan, dan pegunungan. Wilayah daerah pesisir 59,33 km²atau sekitar 14,99% dengan kemiringan 0-2 meter, 168,75 km²atau sekitar 42,64% dari luas wilayahnya merupakan daratan yang landai dengan kemiringan 2-15 meter, 81,86 km²atau sekitar 20,68% dari luas wilayahnya merupakan daratan dengan kemiringan 15-40 meter sedangkan 83,80 km²atau sekitar 21,17% sisanya merupakan daerah daratan dengan kemiringan lebih dari 40 meter.

d. Hidrologi

Sebagai daerah dengan luas yang relatif terbatas atau hanya kurang lebih 0,8% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng hanya memiliki 11 sungai yang melintasi beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Adapun sungai dimaksud antara lain:

Tabel II.1
Nama Sungai, Panjang Sungai dan Kecamatan Yang Dilintasi
Kabupaten Bantaeng

Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)	Kecamatan yang Dilintasi
Pamosa	1,75	Pajukukang
Turung Asu	7,40	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang
Balang Sikuyu	10,80	Uluere, Sinoa, Bissappu
Panaikang	11,75	Uluere, Sinoa, Bissappu
Kalamassang	14,20	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang
Lemoa	14,45	Uluere, Bissappu
Kaloling	17,10	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang
Biangkeke	20,45	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang
Calendu	20,70	Uluere, Bantaeng
Bialo	43,30	Uluere, Tompobulu



Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)	Kecamatan yang Dilintasi
Nipa-Nipa	25,15	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 – 2042

e. **Klimatologi**

Letak geografi Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit pegunungan, lembah dataran dan pesisir pantai. Dengan dua musim dan perubahan iklim setiap tahunnya yang dikenal di daerah ini dengan nama musim barat antara bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan musim timur antara bulan April sampai bulan September.

Rata-rata suhu udara di Kabupaten Bantaeng berada pada range cukup tinggi dengan besaran 27,3⁰C-31,4⁰C. Udara di Kabupaten Bantaeng juga cukup lembab dengan rata-rata kelembaban udara mencapai 85,2 persen pada bulan Februari dan terendah mencapai 62,4 persen pada bulan September. Sedangkan tekanan udara berada pada kisaran 1.008,4 mb – 1.010,6 mb.

Iklim di Kabupaten Bantaeng tergolong iklim tropis basah. Curah hujan di Kabupaten Bantaeng cukup fluktuatif di setiap bulan dalam setahun. Jumlah hari hujan juga sangat ekstrim perbedaan antara musim penghujan dan musim kemarau dimana range hari hujan antara 1 hari hingga 25 hari. Adapun minimnya hari hujan pada beberapa bulan disebabkan karena adanya bencana El Nino.

Tabel II.2
Statistik Klimatologi Kabupaten Bantaeng Tahun 2023

Bulan	Rata-rata Suhu Udara (°C)	Rata-rata Kelembaban Udara (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Januari	27,30	84,60	3,70	1.008,60	798,80	25
Februari	27,30	85,20	3,50	1.008,80	1.094,70	25
Maret	28,10	82,40	3,50	1.009,70	317,00	20
April	28,70	82,90	2,90	1.008,40	372,70	19
Mei	29,60	76,30	3,00	1.009,60	54,80	9
Juni	29,10	81,00	3,00	1.009,50	96,30	10
Juli	29,00	78,20	3,40	1.010,00	41,10	7
Agustus	29,80	68,50	4,70	1.010,60	...	...
September	30,90	62,40	5,30	1.009,70	...	...



Bulan	Rata-rata Suhu Udara (°C)	Rata-rata Kelembaban Udara (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Oktober	31,40	65,80	5,50	1.010,10	2,50	1
November	29,90	78,80	4,20	1.008,80	283,00	15
Desember	29,20	82,20	3,60	1.009,30	270,20	22

Sumber Data : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2024

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

A. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bantaeng

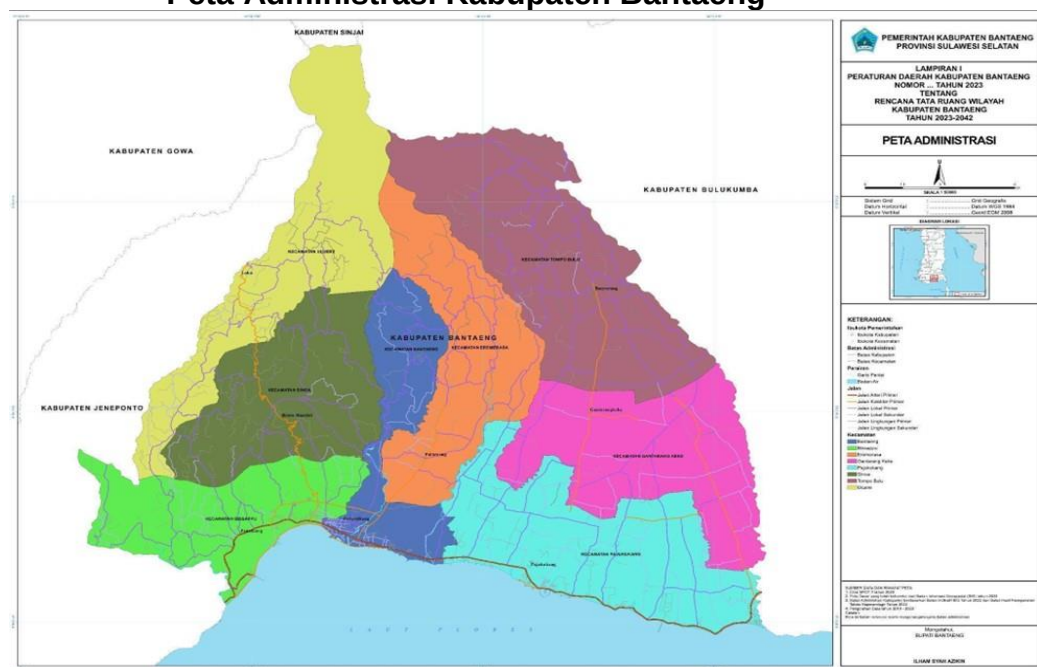
Identifikasi potensi pengembangan suatu wilayah dilakukan dengan metode penelaahan terhadap pusat-pusat pertumbuhan yang terdapat di wilayah tersebut. Pusat pertumbuhan ini dapat dijelaskan sebagai suatu area dengan tingkat pertumbuhan yang cepat, yang menjadi pusat pengembangan dan memiliki dampak signifikan pada wilayah sekitarnya. Dengan keberadaan pusat pertumbuhan, diharapkan mampu mempengaruhi kemajuan dan perkembangan wilayah di sekitarnya. Tujuan lain dari keberadaan pusat pertumbuhan adalah merangsang perekonomian masyarakat. Dengan pertumbuhan wilayah yang pesat dan perekonomian masyarakat yang kuat, diharapkan tingkat kesejahteraan wilayah dapat meningkat pada masa depan, melampaui kondisi ekonomi saat ini atau setidaknya setara dengan situasi ekonomi saat ini.

Secara teoritis, konsep pusat pertumbuhan atau *growth pole* dalam suatu wilayah merupakan suatu teori dalam bidang ekonomi regional yang membahas pola pertumbuhan ekonomi dalam titik/simpul geografis tertentu. Menurut teori ini, dalam suatu wilayah atau daerah, terdapat pusat pertumbuhan ekonomi yang berperan sebagai pendorong atau propeler bagi perkembangan ekonomi di sekitarnya. Pusat pertumbuhan ini mungkin muncul karena adanya investasi, inovasi, atau sektor ekonomi yang berkembang pesat di wilayah tersebut. Konsep pusat pertumbuhan wilayah menyatakan bahwa pusat pertumbuhan ini memiliki daya tarik dan kapabilitas untuk merangsang aktivitas ekonomi di sekitarnya. Teori ini mengajukan bahwa melalui investasi dan perkembangan di pusat pertumbuhan, dampak positif akan merembes ke daerah sekitarnya, menciptakan efek penyebaran (*spread effect*) dan efek ganda (*multiplier effect*) pada sektor dan wilayah lainnya.

Dalam rangka keterpaduan antara perencanaan pembangunan wilayah dengan dokumen perencanaan pembangunan, maka pengenalan terhadap pusat pertumbuhan di tingkat wilayah Kabupaten Bantaeng, dapat dilakukan dengan mengamati embrio pusat-pusat pertumbuhan yang secara umum telah menunjukkan ciri-ciri sebagai pusat pertumbuhan secara empiris. Selain itu, penilaian terhadap pusat pertumbuhan juga dapat merujuk sistem pusat dalam struktur hierarki penataan ruang serta penetapan kawasan strategis.

Oleh karenanya, tinjauan kedudukan Kabupaten Bantaeng perlu dilihat dari sudut pandang kepentingan kedudukannya secara nasional dan regional. Identifikasi kemudian dilanjutkan untuk meninjau pusat-pusat pertumbuhan dalam skala kewilayahan dalam batas administrasi Kabupaten Bantaeng.

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Letak Kabupaten Bantaeng adalah berada di bagian Selatan dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari wilayah Pulau Sulawesi. Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak $5^{\circ}21'13''$ - $5^{\circ}35'26''$ LS dan $119^{\circ}51'42''$ - $120^{\circ}05'27''$ BT, berjarak 120 km ke arah selatan dari Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Letak Kabupaten berbatasan di utara dengan Kabupaten Gowa dan Bulukumba, di timur dengan Bulukumba, selatan dengan Laut Flores, dan barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto.



Sumber: Perda RTRW Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 – 2042



Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041 bahwa dalam **Kabupaten Bantaeng memiliki peran sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Provinsi**. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Dalam menjalankan perannya sebagai PKL di lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, kriteria yang dipenuhi oleh Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut:

1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan
3. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal

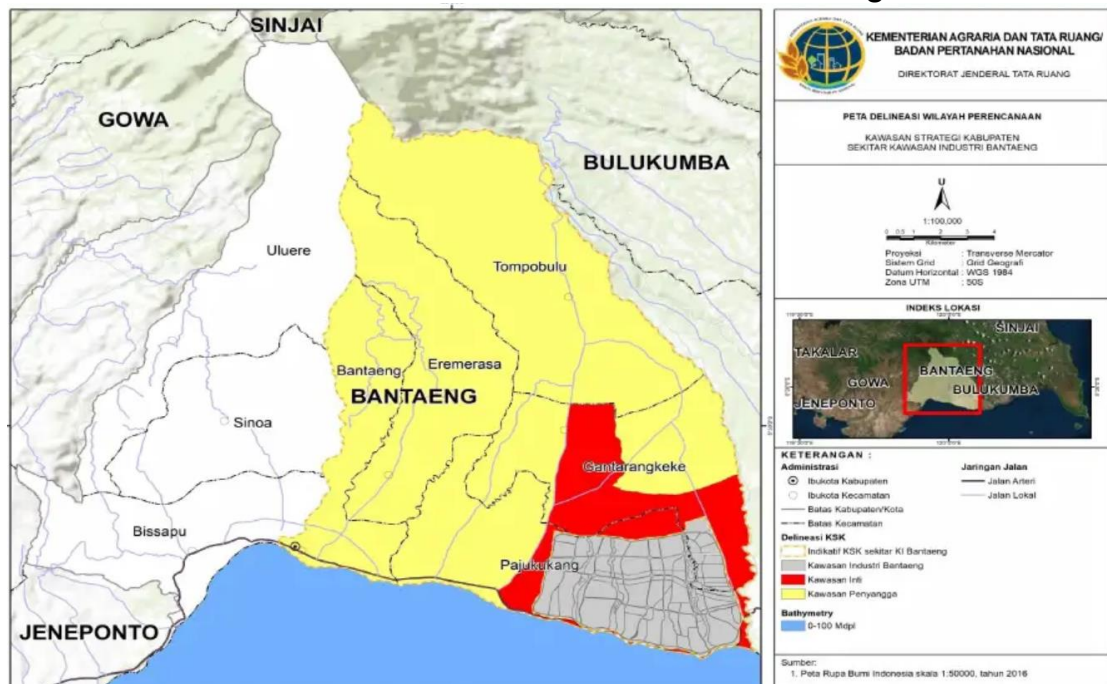
Dalam rangka upaya optimalisasi perannya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Provinsi, rencana pengembangan kawasan industri di wilayah Kabupaten Bantaeng yaitu **Kawasan Industri Bantaeng (KIBA)** Bulukumba, Papanloe, Kec. Pajukukang, merupakan salah satu pusat pertumbuhan yang dicanangkan di Kabupaten Bantaeng. Hal ini selaras dengan apa yang telah di amanatkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041 dimana wilayah Kabupaten Bantaeng memiliki fungsi sebagai **kawasan peruntukan industri** bersama dengan Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Takalar, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, dan Kota Pare Pare.

Adanya penyelenggaraan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) ini juga telah tertuang dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Bantaeng Tahun 2021 – 2041. Dalam regulasi tersebut tertulis bahwa luas wilayah Kawasan Industri Bantaeng adalah 3.252 Ha dengan pembagian sebagai berikut:



1. Luas wilayah darat adalah 3.151 Ha
2. Luas wilayah perairan adalah 101 Ha

Gambar II.2
Peta Delineasi Kawasan Industri Bantaeng



Sumber: Perda RTRW Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 – 2042

Adanya penyelenggaraan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) ini bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Industri Bantaeng yang produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Adapun untuk dapat mewujudkan tujuan penataan KIBA secara optimal, maka dilakukanlah pembagian sub pusat pelayanan atau Sub BWP. Pembagian wilayah KIBA adalah sebagai berikut:

1. Sub BWP A dengan luas 952 Ha terdiri atas rencana peruntukan kegiatan industri, pembangkit listrik, kilang minyak, IPAL, kolam retensi, dan Pelabuhan. Sub BWP A kemudian terbagi kembali dalam 8 blok.
2. Sub BWP B dengan luas 677 Ha terdiri atas rencana peruntukan kegiatan industri dan pergudangan. Sub BWP B terbagi menjadi 7 blok.
3. Sub BWP C dengan luas 566 Ha terdiri atas rencana kegiatan perkantoran, sarana pelayanan umum, industri, perdagangan dan jasa, TPA, IPA Air Minum, Pembuangan limbah padat, kolam retensi, dan rimba kota. Wilayah Sub BWP C terbagi menjadi 12 blok.
4. Sub BWP D dengan luas 956 Ha terdiri atas rencana peruntukan kegiatan industri, perumahan, perdagangan dan jasa, sarana



pelayanan umum, dan RTH. Wilayah Sub BWP D ini kemudian terbagi menjadi 3 blok.

Dengan peran Kabupaten Bantaeng sebagai PKL, Kabupaten Bantaeng menjadi pusat perkembangan industri di Provinsi Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan adanya pengembangan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Kabupaten Bantaeng dalam hirarki strukturnya ditekankan untuk menjadi sentra aktivitas industri yang diharapkan mampu melayani aktivitas perekonomian dalam Provinsi Sulawesi Selatan.

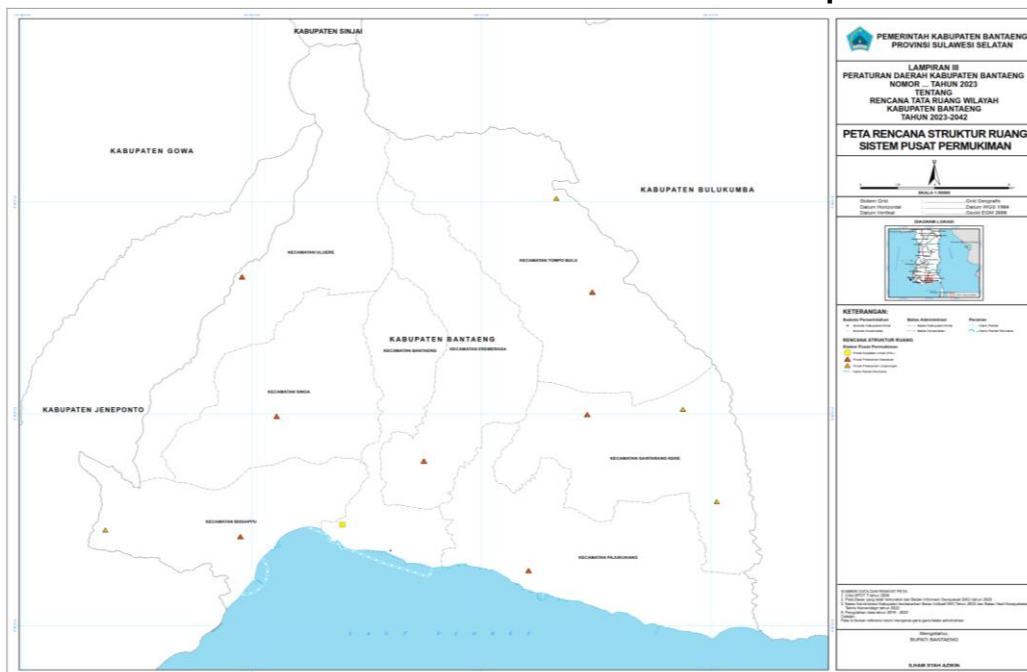
2. Pusat Pertumbuhan Kabupaten Bantaeng

Selain itu, dalam penetapan kawasan pusat pertumbuhan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng juga dapat dilihat berdasarkan pada hirarki sistem pusat permukiman yang ada di wilayah ini. Berdasarkan ketentuan normative dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 - 2042, pusat kegiatan yang diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Bantaeng terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terletak di Kecamatan Bantaeng
2. Pusat Pelayanan Kawasan yang terletak di:
 - a. Kecamatan Tompo Bulu
 - b. Kecamatan Sinoa
 - c. Kecamatan Bissappu
 - d. Kecamatan Uluere
 - e. Kecamatan Gantarang Keke
 - f. Kecamatan Pajukukang
 - g. Kecamatan Eremerasa
3. Pusat Pelayanan Lingkungan yang terletak di:
 - a. Kecamatan Bissappu
 - b. Kecamatan Tompo Bulu
 - c. Kecamatan Gantarang Keke



Gambar II.3
Peta Sebaran Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Bantaeng



Sumber: Rancangan Perda RTRW Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 – 2042

Selain adanya kawasan-kawasan yang teridentifikasi berdasarkan kedudukan struktur tata ruang tersebut, tinjauan terhadap pusat pertumbuhan juga dapat dikerucutkan pada adanya kawasan Strategis di Kabupaten Bantaeng.

Di Kabupaten Bantaeng sendiri terdapat 2 jenis Kawasan Strategis yaitu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Sedangkan kawasan strategis kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Bantaeng adalah:

1. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi merupakan **Kawasan agrowisata Bantaeng-Bulukumba-Sinjai**.

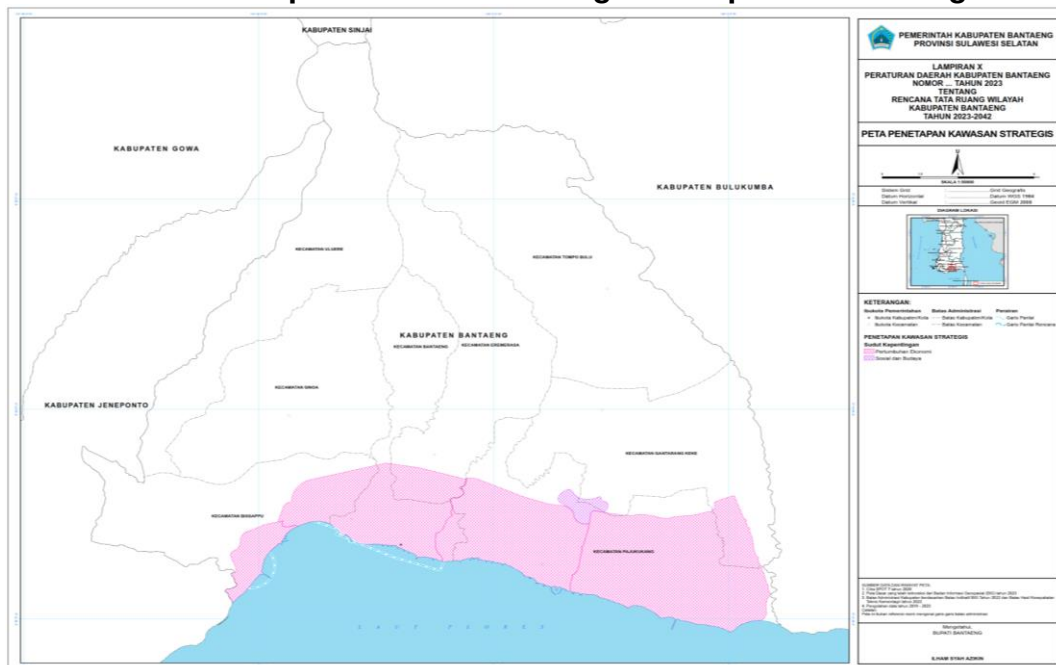


2. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup merupakan kawasan Lompobattang

Kawasan Strategis Kabupaten yang ada di wilayah Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut:

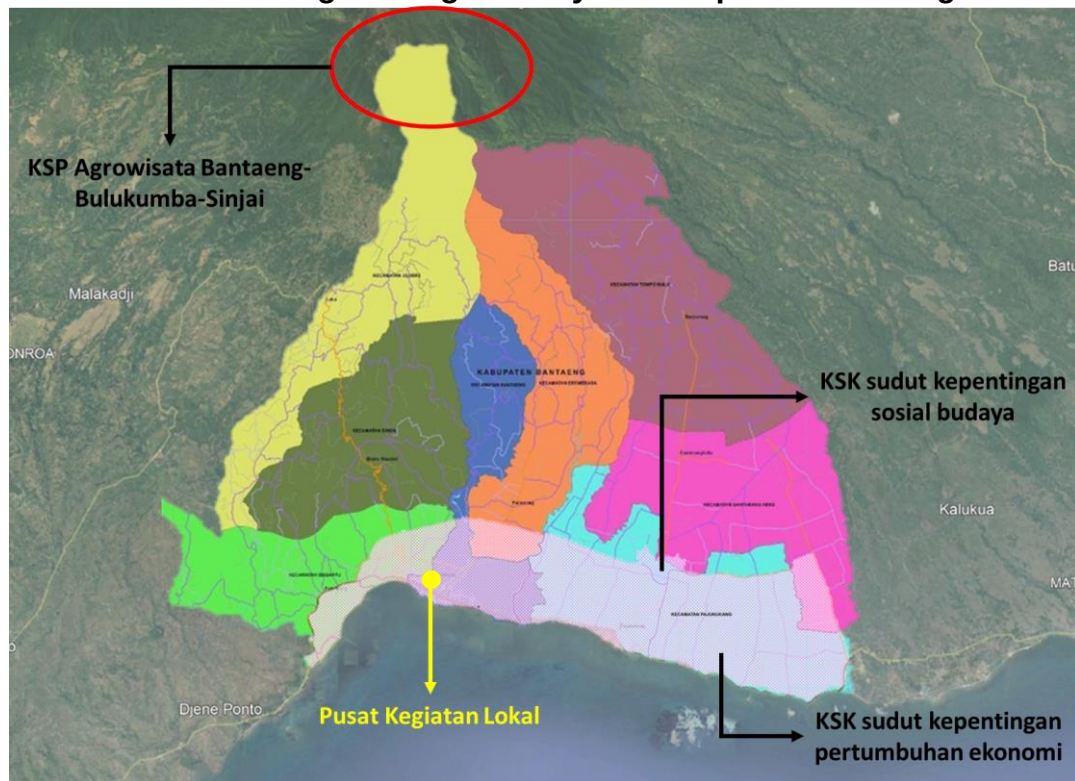
1. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
 - a. **kawasan kota baru Bantaeng** (*new Bantaeng*) di Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, dan Kecamatan Pajukukang;
 - b. **kawasan minapolitan** ditetapkan di Kecamatan Bissappu;
 - c. kawasan pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Eremerasa, dan Kecamatan Pajukukang; dan
 - d. **Kawasan Industri Bantaeng (KIBA)** Kecamatan Gantarang Keke dan Kecamatan Pajukukang.
2. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya merupakan kawasan pesta adat di Kecamatan Gantarang Keke dan Kecamatan Pajukukang.

Gambar II.4
Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bantaeng



Sumber: Perda RTRW Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 – 2042

Gambar II.5
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bantaeng



Sumber: Perda RTRW Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 – 2042

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa orientasi pengembangan Kabupaten Bantaeng jika dilihat dari aspek penataan ruang termasuk struktur ruang dan identifikasi kawasan strategis, secara umum bertumpu pada pengembangan **sektor pertanian, perikanan, industri serta perdagangan dan jasa**. Dari segi geografis, pusat pertumbuhan wilayah terfokus pada kawasan pusat perkotaan yang berlokasi di Kecamatan Bantaeng.

Berdasarkan analisis terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang tersedia, perencanaan pembangunan daerah harus memperhitungkan potensi pengembangan wilayah yang tersedia. Dari perspektif geografi-ekonomi, penataan ruang Kabupaten Bantaeng seharusnya mampu memanfaatkan potensi wilayah, terutama dalam sektor **pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa**. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif pada peningkatan pembangunan, khususnya dalam menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantaeng.

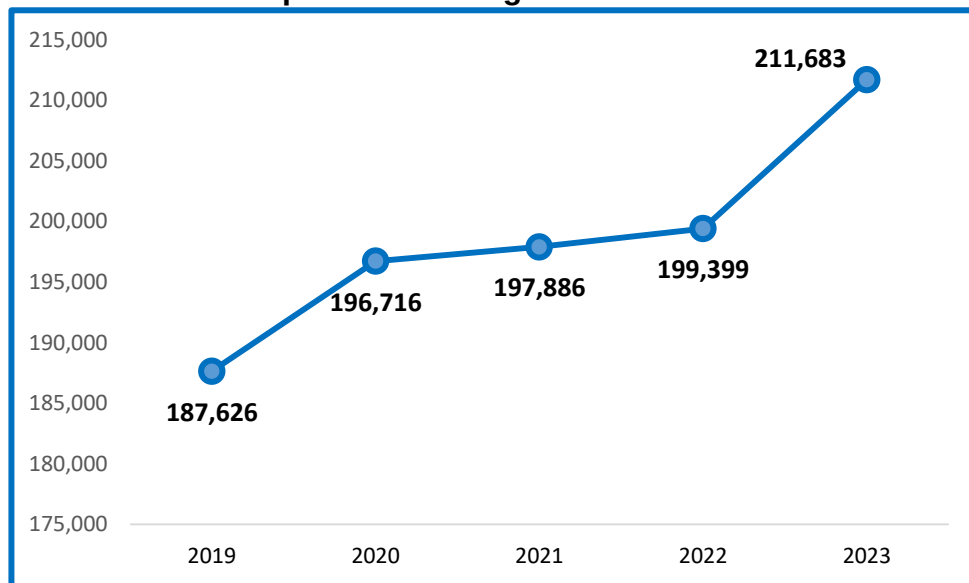
2.1.1.3. Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Penduduk suatu wilayah administrasi



merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Gambar II.6
Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng, Tahun 2024

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantaeng secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan Pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran serta meningkatkan mobilitas penduduk. Beberapa upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program Keluarga Berencana. Jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan secara konsisten dalam waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2023 jumlah penduduk mencapai 211.683 jiwa dengan pertumbuhan penduduk dari 2020-2023 sebesar 5,04 persen.



Tabel II.3
Jumlah Penduduk, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	Bissappu	37.243	17,60	1.134	97,21
2	Uluere	12.747	6,02	189	99,20
3	Sinoa	14.219	6,72	331	98,95
4	Bantaeng	41.059	19,40	1.423	98,53
5	Eremerasa	23.025	10,88	512	97,39
6	Tompobulu	26.172	12,37	340	94,89
7	Pajukukang	37.390	17,67	765	99,23
8	Gantarangeke	19.768	9,34	373	96,74
Kabupaten Bantaeng		211.623	100,00	535	97,74

Sumber Data : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2023

Secara administratif, Kabupaten Bantaeng terbagi atas 8 wilayah kecamatan dengan 21 kelurahan dan 46 desa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 sebanyak 211.623 jiwa yang terdiri dari laki-laki 104.602 jiwa dan perempuan 107.021 jiwa.

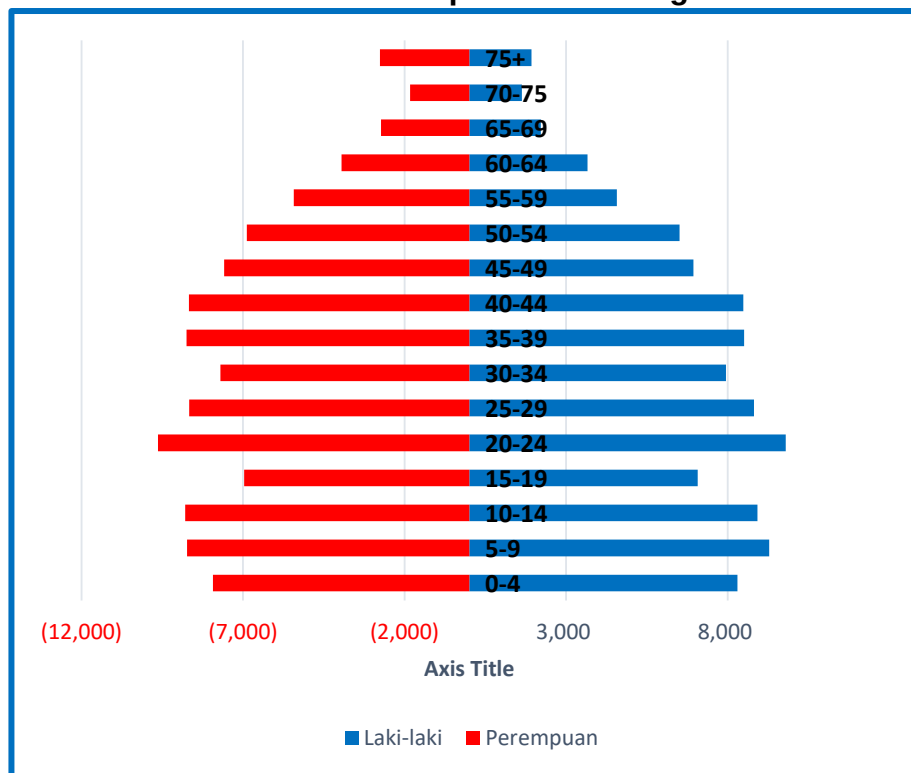
Sebagian besar penduduk Kabupaten Bantaeng berdomisili di Kecamatan Bantaeng yang merupakan Ibukota Kabupaten Bantaeng dengan jumlah penduduk sebesar 41.059 jiwa (19,40%). Jumlah tersebut sebanding dengan kepadatan penduduk sebesar 1.423 jiwa/km² yang mengindikasikan bahwa di setiap km² Kecamatan Bantaeng terdapat 1.423 penduduk yang menghuninya.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. *Sex ratio* Kabupaten Bantaeng sebesar 97,74 sehingga dapat dikatakan bahwa setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 97-98 penduduk laki-laki. Kecamatan dengan *sex ratio* tertinggi adalah Kecamatan Pajukukang dengan *sex ratio* sebesar 99,23, sedangkan kecamatan dengan *sex ratio* terendah adalah Tompobulu dengan *sex ratio* sebesar 94,89.

Dalam analisis demografi, terdapat analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk, yang dapat digunakan, baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana).



Gambar II.7
Piramida Penduduk Kabupaten Bantaeng Tahun 2023



Sumber Data : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2023 (diolah)

Jika dilihat dari persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur dalam bentuk piramida penduduk, penduduk Kabupaten Bantaeng yang berada pada usia muda cukup banyak, dimana pada umumnya masih memiliki ketergantungan tinggi, mengingat masih perlunya biaya pendidikan dan belum produktif dalam bekerja. Selain itu, penduduk usia anak-anak juga cukup tinggi yang mengindikasikan besarnya potensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Sehingga perlu adanya program yang mengarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan visi pembangunan (utamanya jangka panjang).

Jika dilihat dari angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bantaeng, maka terlihat bahwa rasio ketergantungan masyarakat Bantaeng sebesar 44,39. Angka ini mengindikasikan bahwa dari 100 orang penduduk yang memiliki usia produktif akan menanggung sebanyak 44-45 penduduk berusia non produktif baik usia muda maupun usia lanjut. Nilai angka ketergantungan yang di bawah 50 mengindikasikan bahwa Kabupaten Bantaeng telah memasuki masa jendela bonus demografi sebagai salah satu akselerator pembangunan jika dimanfaatkan kesempatan ini dengan optimal.



2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, serta seni budaya dan olahraga. Berikut penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng.

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Bantaeng utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Bantaeng. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Bantaeng antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

a. Pertumbuhan Ekonomi

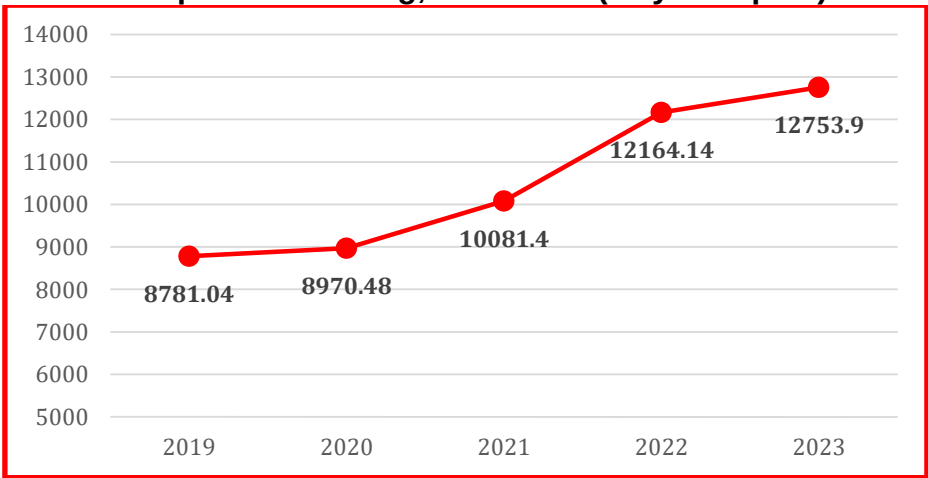
Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, *income* per kapita dan instrumen ekonomi lainnya dalam suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di



suatu daerah atau *region* dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak.

Relevansi data-data tersebut akan membantu pengambilan kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi perekonomian daerah sehingga pembangunan terarah. Angka PDRB dapat digunakan sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan sekaligus sebagai barometer untuk mengukur hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja pembangunan perekonomian di wilayah tersebut.

Gambar II.8
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Bantaeng, 2018-2023 (Milyar Rupiah)



Sumber Data: Kabupaten Bantaeng Dalam Angka Tahun 2024

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan secara signifikan di setiap tahunnya dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Kondisi ini terlihat dari gambar di bawah, dimana pada tahun 2019 Kabupaten Bantaeng memiliki nilai tambah produk bruto sebesar Rp.8.781,04 milyar meningkat tajam hampir mencapai 4 trilyun hingga sebesar Rp.12.753,9 milyar pada tahun 2022.

Sebagai wilayah agraris, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Bantaeng tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya, hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha tersebut terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan pembentukan PDRB Bantaeng. Kontribusi sektor lapangan usaha terbesar pada perekonomian Bantaeng pada tahun 2023 adalah



pertanian, kehutanan dan perikanan. Meskipun mengalami penurunan, namun masih mendominasi hingga mencapai 22,85 persen. sektor lain yang mendominasi perekonomian Bantaeng adalah sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan dengan kontribusi masing-masing 17,71 persen dan 17,27 persen. Sedangkan sektor lapangan usaha yang minim kontribusi terhadap perekonomian daerah adalah sektor jasa perusahaan (0,14%) dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,06%).

Tabel II.4
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Bantaeng, Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,5	28,37	27,08	23,72	22,85
B	Pertambangan dan Penggalian	3,4	3,63	3,5	3,21	3,59
C	Industri Pengolahan	7,70	6,91	9,76	18,47	17,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,11	0,18	0,34	0,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1	0,07	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	17,8	17,79	18,3	16,83	17,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,0	14,65	14,25	13,52	13,95
H	Transportasi dan Pergudangan	1,1	1,05	1,06	1,08	1,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,9	0,9	0,85	0,83	0,83
J	Informasi dan Komunikasi	2,2	2,49	2,37	2,13	2,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,2	2,41	2,34	2,11	2,00
L	Real Estate	4,6	4,85	4,54	4,06	4,26
M,N	Jasa Perusahaan	0,2	0,15	0,15	0,14	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,0	6,93	6,27	5,2	5,01
P	Jasa Pendidikan	5,0	5,2	4,84	4,24	4,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,5	3	2,97	2,69	2,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,6	1,49	1,48	1,38	1,37
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: Kabupaten Bantaeng Dalam Angka Tahun 2024

Salah satu tolak ukur pembangunan suatu daerah yaitu dengan mengamati laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat memang menjadi syarat utama atau indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung



dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga keberhasilan pembangunan daerah secara umum dapat terukur. Oleh karena itu, indikator ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ke depannya, baik dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi secara periodik maupun laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor lapangan usaha yang potensial.

Laju pertumbuhan ekonomi di Bantaeng mengalami fluktuasi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dengan pola perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dan 2023. Pada tahun 2019, angka pertumbuhan ekonomi Bantaeng mencapai 10,75 persen. Peningkatan ini tidak bertahan pada tahun 2020 dimana terjadi perlambatan yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 0,52 persen pada tahun 2020. Kondisi ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang menyerang di setiap sendi-sendi perekonomian dan berdampak negatif pada hampir seluruh sektor pembangunan daerah. Kemudian, sebagai hasil dari upaya penanganan dan pemulihan perekonomian daerah selama masa Pandemi COVID-19, maka pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dengan capaian 8,86 persen dan 15,45 persen yang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Setelah kondisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, terjadi perlambatan kembali pada perekonomian Bantaeng dimana pertumbuhan ekonomi melambat namun tetap tumbuh positif di angka 5,56 persen.

Tabel II.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Bantaeng, Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,5	-0,06	4,36	0,35	-2,33
B	Pertambangan dan Penggalian	5,0	6,41	6,22	4,6	14,12
C	Industri Pengolahan	68,8	-9,50	43,76	122,89	15,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	49,6	-2,36	69,30	127,79	22,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,9	3,70	0,11	4,17	5,85



Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
F	Konstruksi	8,0	0,23	11,04	4,6	6,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,7	-2,40	7,33	9,54	4,99
H	Transportasi dan Pergudangan	8,4	-4,19	6,79	12,86	8,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,2	5,06	4,72	14,95	2,63
J	Informasi dan Komunikasi	9,9	17,69	6,51	7,06	-1,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,7	8,08	6,15	1,52	-2,41
L	Real Estate	7,2	6,77	4,92	4,61	7,60
M,N	Jasa Perusahaan	6,6	-3,20	3,76	11,85	8,18
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,3	-0,84	0,83	-0,48	-0,42
P	Jasa Pendidikan	9,1	3,81	4,69	4,29	8,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,1	16,98	7,86	7,81	9,21
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,2	-8,82	9,06	9,16	2,88
Laju Pertumbuhan Ekonomi		10,75	0,52	8,86	15,45	5,56

Sumber Data : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka Tahun 2024

Pada tahun 2021 dan 2022, penanganan dan pemulihan dampak Pandemi terhadap perekonomian Bantaeng terus dilakukan. Progres positif dialami hampir seluruh kategori lapangan usaha dalam pergerakan bidang di sektor pembangunan masing-masing. Sebagai sektor yang terdampak cukup berat pada tahun 2020, kategori industri pengolahan mampu bangkit dari keterpurukan dengan capaian pertumbuhan ekonomi sektoral tahun 2022 mencapai 122,89 persen. Adapun pada sektor dominan lainnya yakni pertanian dan konstruksi memiliki pertumbuhan ekonomi sektoral sebesar 0,35 persen dan 4,6 persen di bawah pertumbuhan ekonomi Bantaeng.

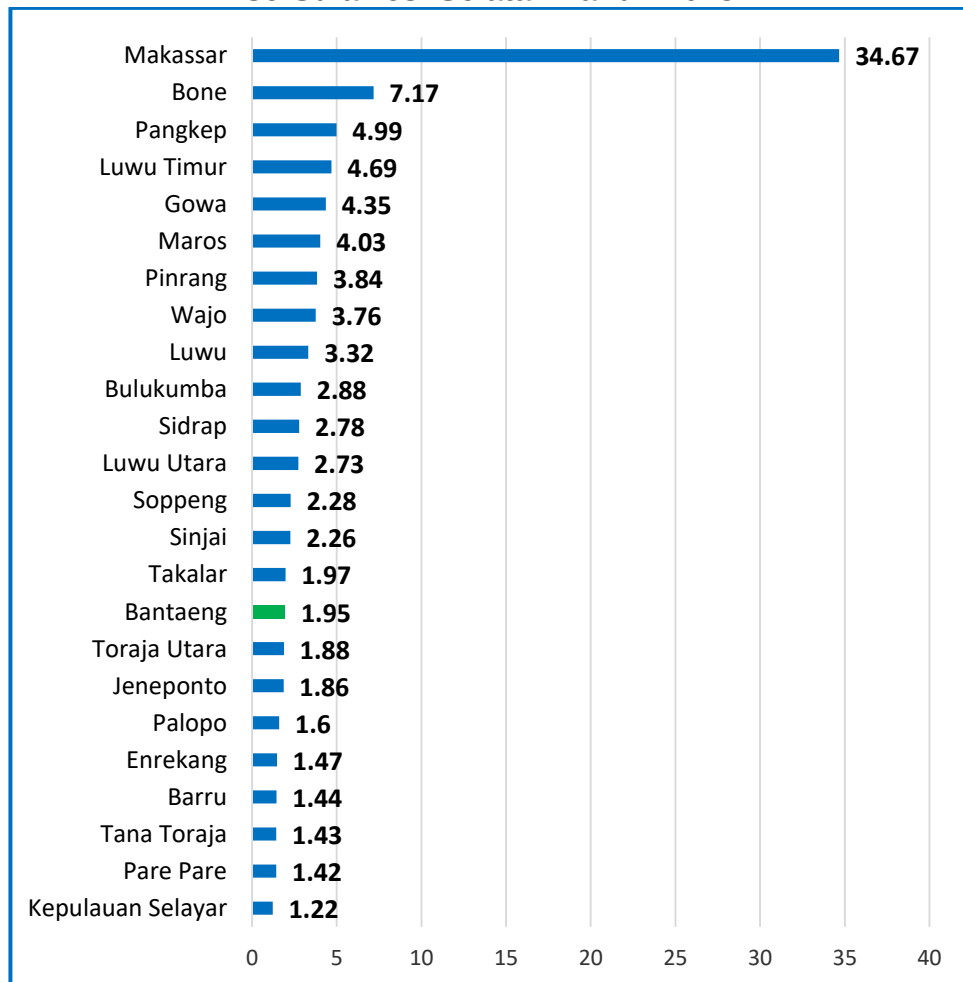
Adapun perlambatan terjadi di tahun 2023, dimana perekonomian Bantaeng hanya mampu tumbuh sebesar 5,56 persen. Perlambatan signifikan dikarenakan kontributor perekonomian yang dominan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi bahkan terjadi kontraksi seperti pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar -2,33 persen. Kondisi ini disusul dengan perlambatan cukup signifikan dari kategori industri pengolahan yang menjadi 15,91 persen pada tahun 2023 ini.

Daya saing perekonomian Bantaeng dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan masih tergolong minim.



Hal ini terlihat dari minornya dominasi struktur perekonomian Sulawesi Selatan yang terbentuk dari perekonomian Bantaeng. Terlihat kontribusi perekonomian Bantaeng terhadap Sulawesi Selatan hanya sebesar 1,95 persen berada di peringkat ke sembilan terbawah.

Gambar II.9
Kontribusi Struktur Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2024

b. PDRB per Kapita

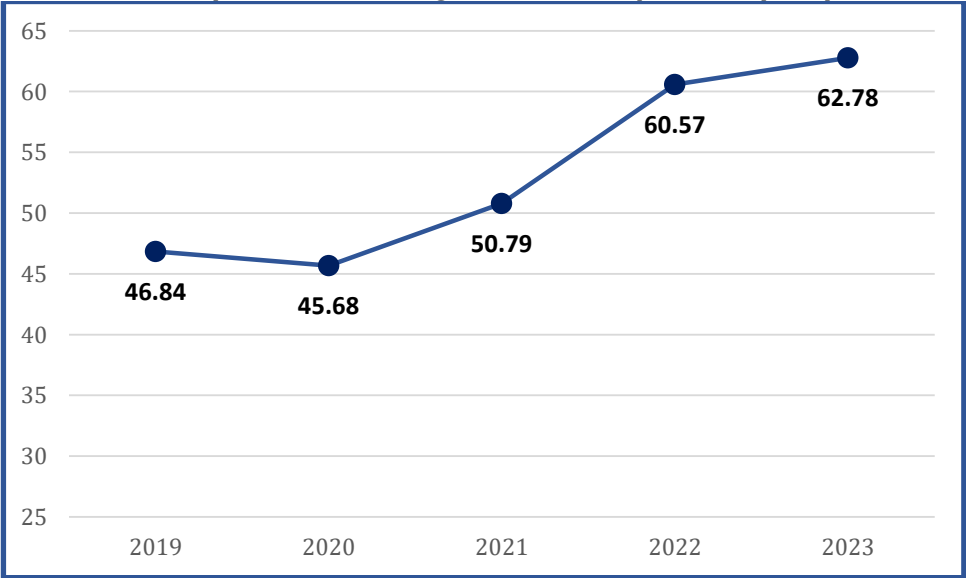
PDRB merupakan suatu gambaran perekonomian makro suatu wilayah yang identik dengan peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat berdasarkan PDRB per kapita, yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun



dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

PDRB per kapita di Bantaeng mengalami peningkatan signifikan yang mengindikasikan tingginya peningkatan PDRB yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2019, PDRB per kapita Bantaeng sebesar Rp.46,64 juta dan meningkat dalam waktu lima tahun sebanyak lebih dari 6 juta hingga mencapai Rp.62,78 juta pada tahun 2023.

Gambar II.10
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Kabupaten Bantaeng, 2019-2023 (Juta Rupiah)

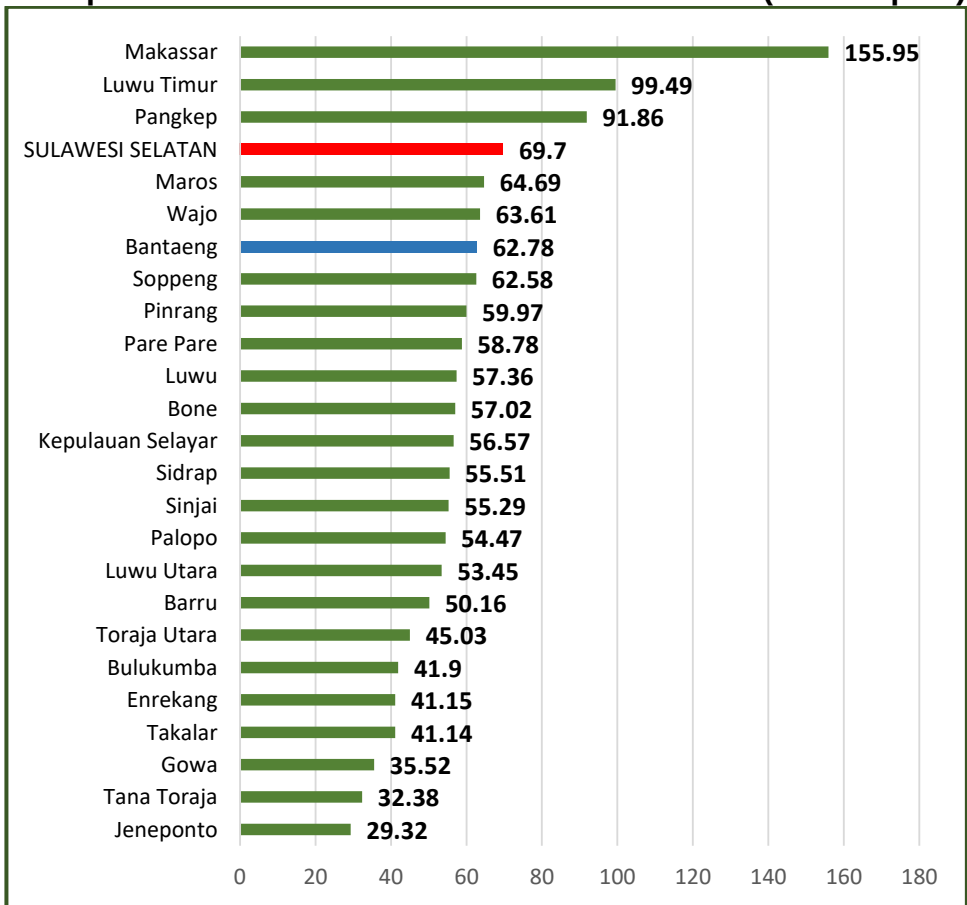


Sumber Data : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2024 (diolah)

Angka PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bantaeng memiliki capaian yang cukup rendah dibandingkan daerah sekitar, meskipun begitu, dikarenakan jumlah penduduknya yang tidak banyak dibanding yang lain, maka PDRB per Kapita pun juga memiliki angka yang cukup tinggi dibanding wilayah sekitar yakni mencapai 62,78 juta rupiah per kapita.



Gambar II.11
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Juta Rupiah)



Sumber Data : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2024 (diolah)

c. Angka Kemiskinan

Salah satu indikator berhasilnya Pemerintah yaitu ketika Pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Bantaeng mengalami fluktuasi dimana sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 9,18 persen. Angka kemiskinan Bantaeng pada tahun 2019 mencapai 9,03 persen mengalami penurunan secara kontinyu hingga tahun 2020 mencapai 8,95 persen. Adapun pada tahun 2021, angka kemiskinan mengalami kenaikan, khususnya karena pandemi COVID-19 pada gelombang kedua. Namun pada tahun 2022, sebagai hasil dari upaya pemulihan perekonomian daerah dan



penanganan COVID-19, angka kemiskinan dapat diturunkan kembali menjadi 9,07 persen, meskipun pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 9,18 persen.

Tabel II.6
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
		Jumlah (ribu)	Persentase		
2019	309.357	16,91	9,03	1,35	0,28
2020	340.890	16,84	8,95	0,97	0,18
2021	363.342	17,78	9,41	1,23	0,27
2022	394.116	17,22	9,07	1,32	0,38
2023	419.667	17,49	9,18	1,21	0,27

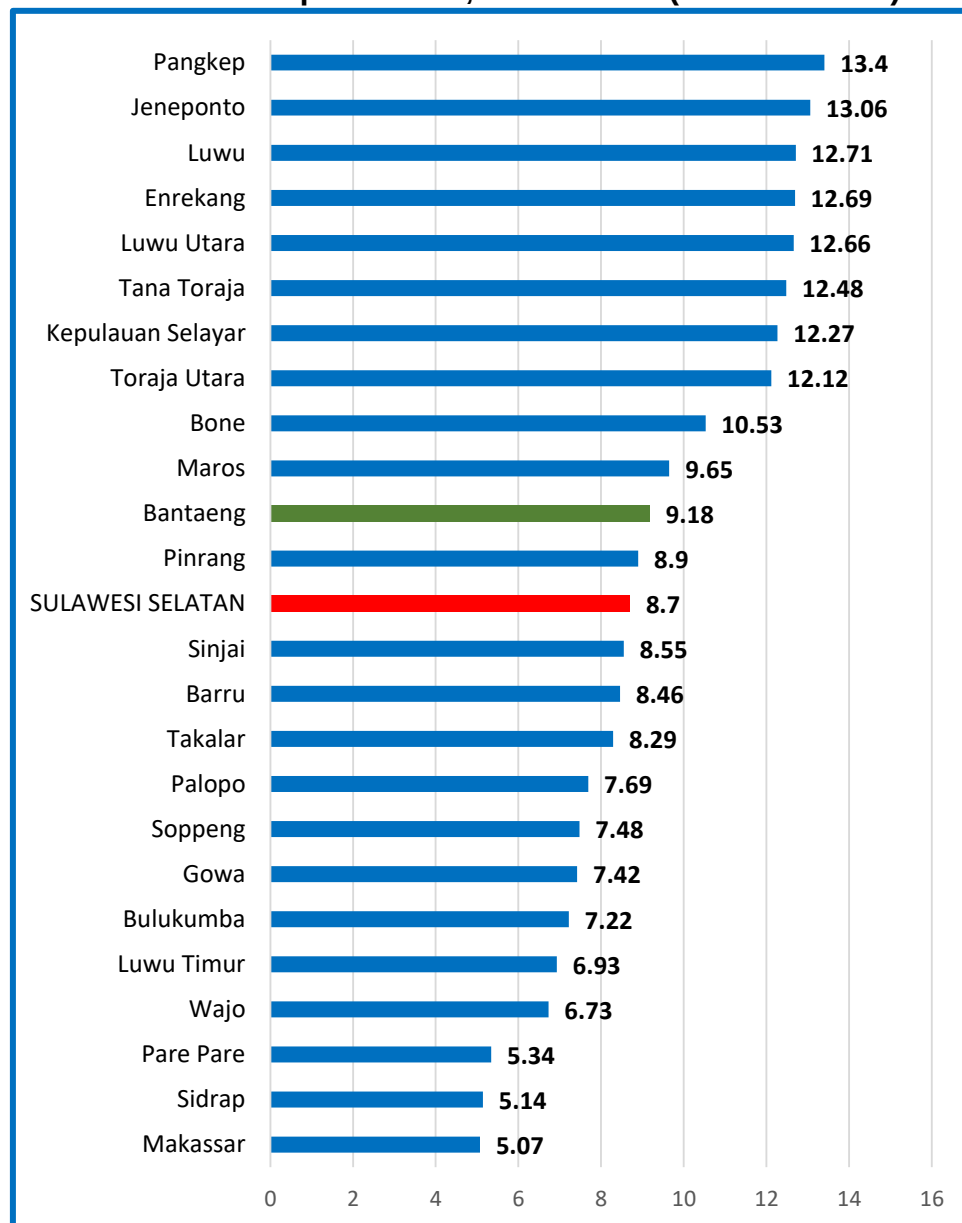
Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

Secara umum, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Bantaeng mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 menurun hingga mencapai 0,97 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 1,23 dengan peningkatan kembali di tahun 2022 mencapai 1,32. Adapun pada tahun 2023, angka kedalaman kemiskinan di Bantaeng mengalami penurunan kembali hingga mencapai 1,21. Angka ini mengindikasikan bahwa secara umum, kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap garis kemiskinan semakin menurun hingga tahun 2023.

Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantaeng masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Hal ini dibuktikan dengan angka kemiskinan di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2023 berada di atas angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 8,70 persen. Meskipun berada pada peringkat pertengahan, tingkat kemiskinan di Bantaeng mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini tentu saja menjadi perhatian bagi para stakeholder untuk terus mengupayakan program pengentasan kemiskinan baik dari sisi mutu maupun pemerataannya terlebih mandat presiden terkait pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024.



Gambar II.12
Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023 (Kondisi Maret)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

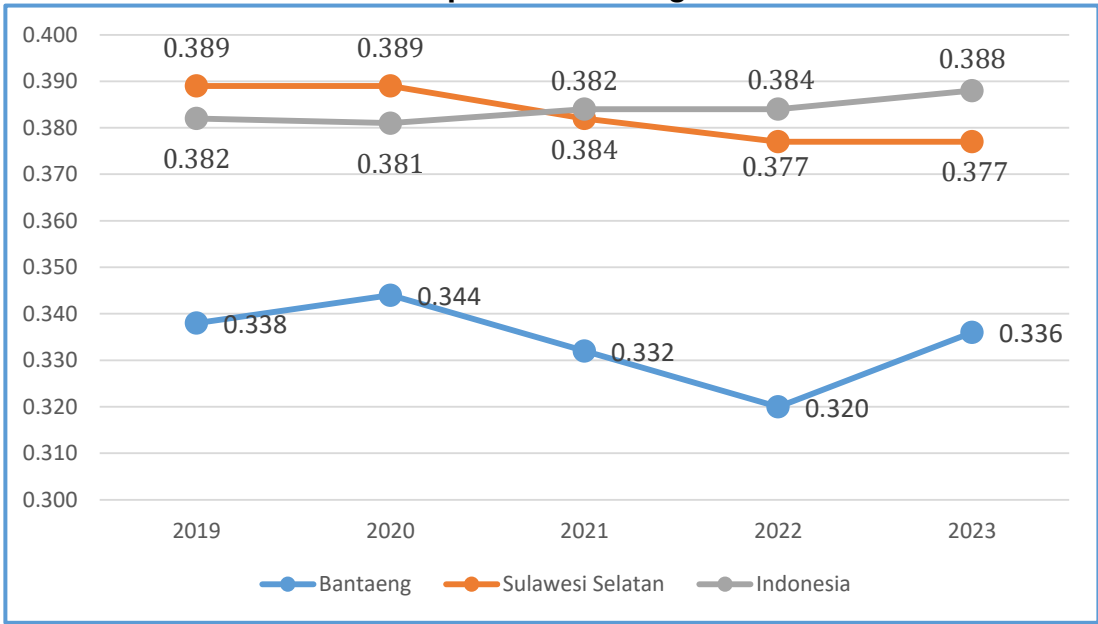
d. Indeks Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain kesempatan, kualitas pendidikan, dan lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini”, rasio ini menganalisis nilai dengan interpretasi



semakin mendekati nilai 1, maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Gambar II.13
Indeks Gini Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023

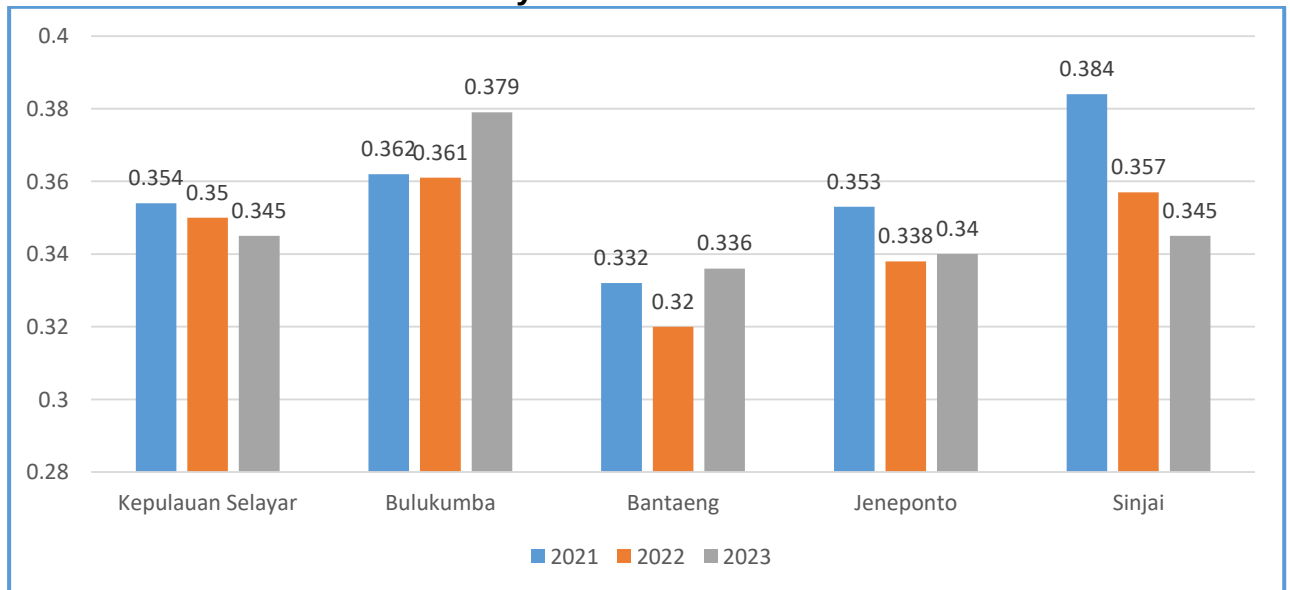


Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng, 2024

Pemerataan kesejahteraan di Bantaeng masih fluktuatif dan tergolong belum merata secara baik yang terlihat pada tingginya angka indeks gini sebesar 0,338 pada tahun 2019 dan meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 0,344 dikarenakan COVID-19, namun indeks gini mulai menurun di tahun 2021 mencapai 0,332 hingga tahun 2022 menjadi 0,320. Adapun pada tahun 2023, indeks gini mengalami kenaikan kembali menjadi 0,336 yang mengindikasikan semakin timpangnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantaeng.

Jika dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan, maka Indeks Gini Bantaeng lebih rendah dalam waktu lima tahun terakhir. Selain itu, jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota sekitarnya maka Indeks Gini Kabupaten Bantaeng lebih rendah yang mengindikasikan bahwa ketimpangan kesejahteraan masyarakat di Bantaeng lebih kecil dibandingkan wilayah sekitarnya.

Gambar II.14
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Bantaeng
Dan Wilayah Sekitar Tahun 2023



Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng, 2024

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan Bantaeng dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut analisis lebih lanjut dalam melihat fokus kesejahteraan sosial Bantaeng.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

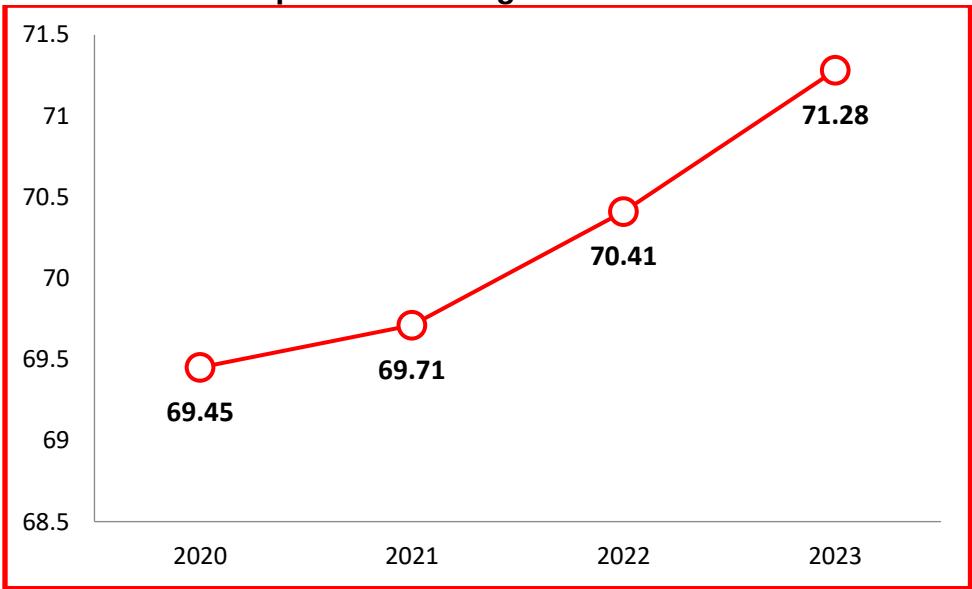
Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index (HDI)* yang diperkenalkan oleh *United Nations*



Development Programes (UNDP) sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan IPM, kita bisa melakukan analisis perbandingan pencapaian pembangunan manusia antarwilayah. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Gambar II.15
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2023



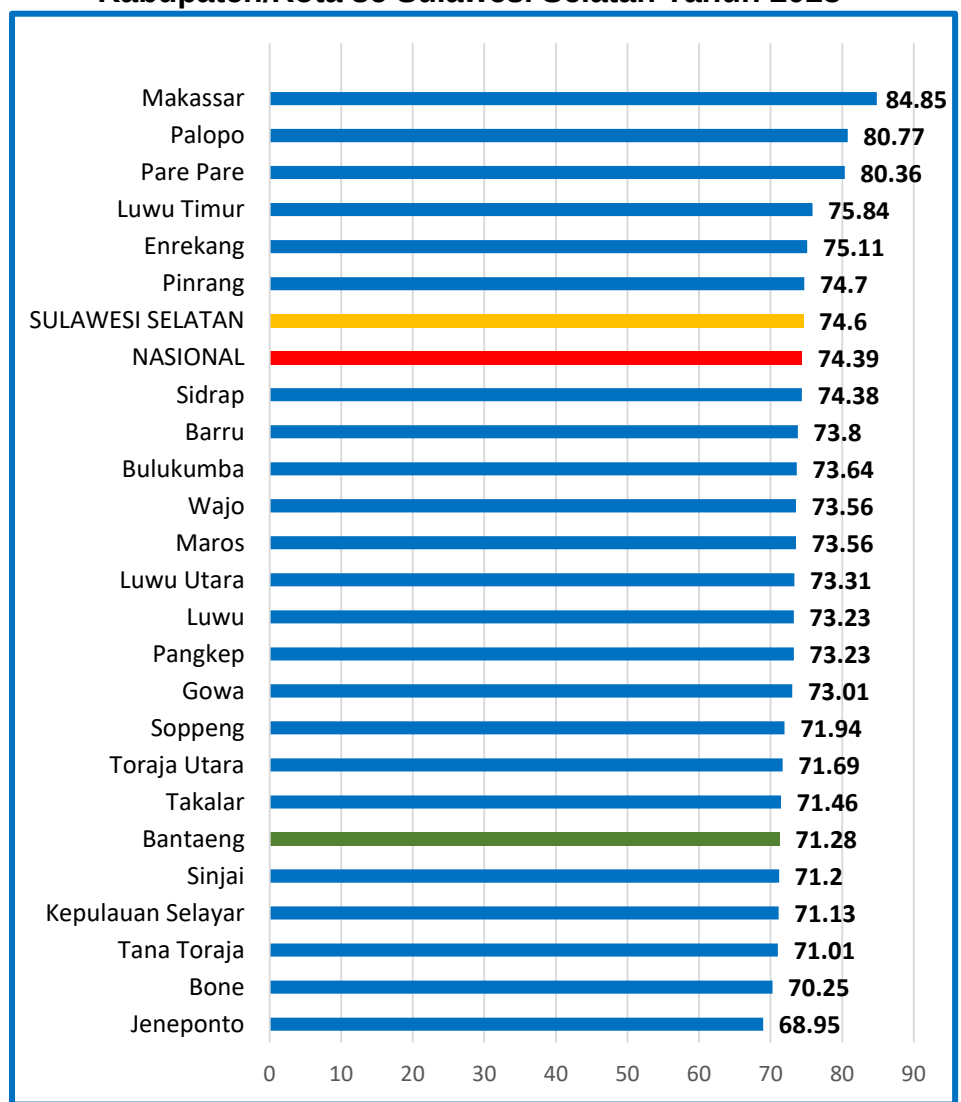
Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bantaeng mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai angka 71,28 pada tahun 2023. Capaian positif ini dikarenakan seluruh komponen penyusun IPM Bantaeng mengalami peningkatan secara kontinyu. Komponen pendidikan yakni angka rata-rata lama sekolah memiliki capaian selama 7,09 tahun dan harapan usia lama sekolah selama 12,53 tahun. Pada komponen kesehatan, capaian komponen IPM yakni angka harapan hidup memiliki progress sebesar 72,67 tahun dan komponen perekonomian yakni paritas daya beli memiliki capaian sebesar 12.304 ribu/tahun.



Jika dilihat dari perbandingan antar wilayah, IPM Bantaeng masih belum optimal dimana capaian 71,28 pada tahun 2023 masih cukup jauh dibandingkan dengan capaian Sulawesi Selatan (74,60) dan angka Nasional (74,39). Adapun peringkat Bantaeng berada pada urutan ke 19 diantara kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Kondisi ini tentu memerlukan perhatian khusus bagi pelaksana bidang pemerintahan khususnya pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM Bantaeng yang berkualitas.

Gambar II.16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

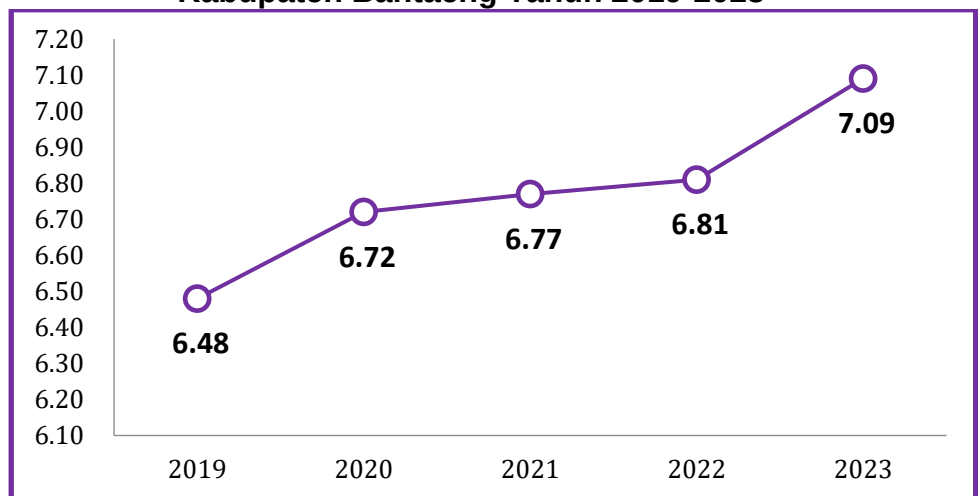
b. Pendidikan

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

- Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

Gambar II.17
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng 2024

Berdasarkan rata-rata lama sekolah, penduduk di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan kualitas pendidikan dari 6,48 tahun menjadi 7,09 tahun di tahun 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Bantaeng yang berumur 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan selama 7,09 tahun atau telah menduduki Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 2.

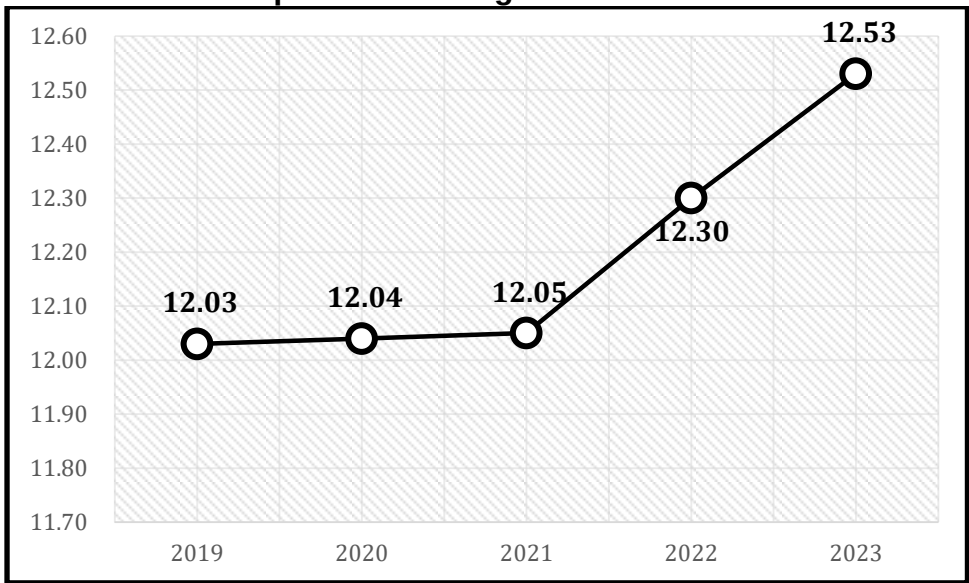
- Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator



sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Gambar II.18
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng, 2024

Peningkatan HLS terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2019 HLS sebesar 12,03 tahun dan pada 2023 meningkat hingga mencapai 12,53 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi normal, seseorang berumur 7 (tujuh) tahun ke atas diharapkan dapat bersekolah sampai dengan masuk awal pendidikan perguruan tinggi. Angka HLS Kabupaten Bantaeng masih dibawah Rata-rata angka Provinsi Sulawesi Selatan bahkan berada pada jajaran peringkat terbawah.

Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya sarana dan prasarana maupun infrastruktur sarana pendidikan di Kabupaten Bantaeng sehingga perlu adanya perhatian lebih dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses dan



kesempatan masyarakat dalam mengenyam pendidikan yang lebih baik.

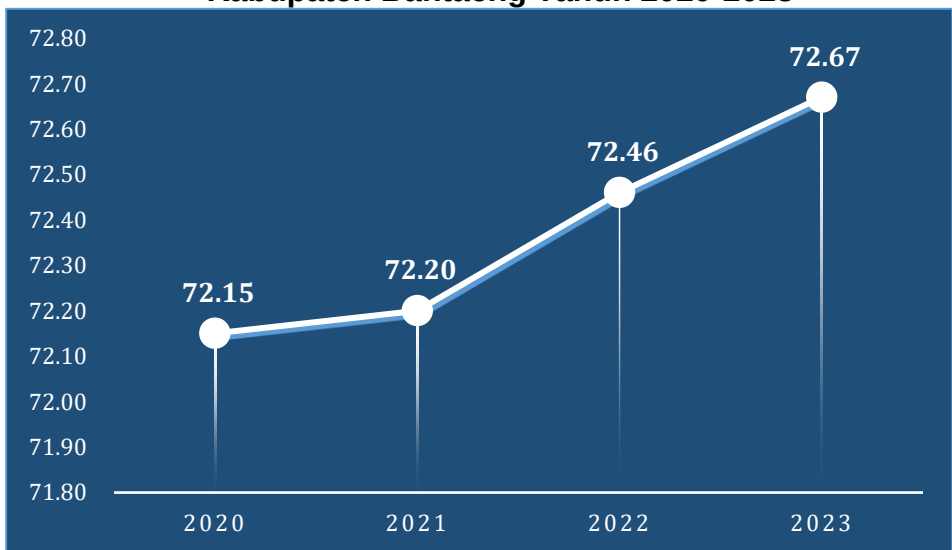
c. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Adapun pada tahun 2020-2023, angka harapan hidup mengalami perubahan penggunaan data yakni menggunakan metode baru hasil Long Form SP2020.

Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Bantaeng dalam kurun waktu 2020-2023 menunjukkan peningkatan dari sebesar 72,15 tahun pada tahun 2020 menjadi selama 72,67 tahun pada tahun 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa setiap bayi yang baru lahir pada tahun 2023 akan memiliki harapan hidup hingga mencapai kisaran usia 72-73 tahun.

Peran sektor kesehatan sangat mempengaruhi masyarakat sehingga perlu adanya upaya pemerintah secara serius untuk menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Gambar II.19
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2023



Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng 2023

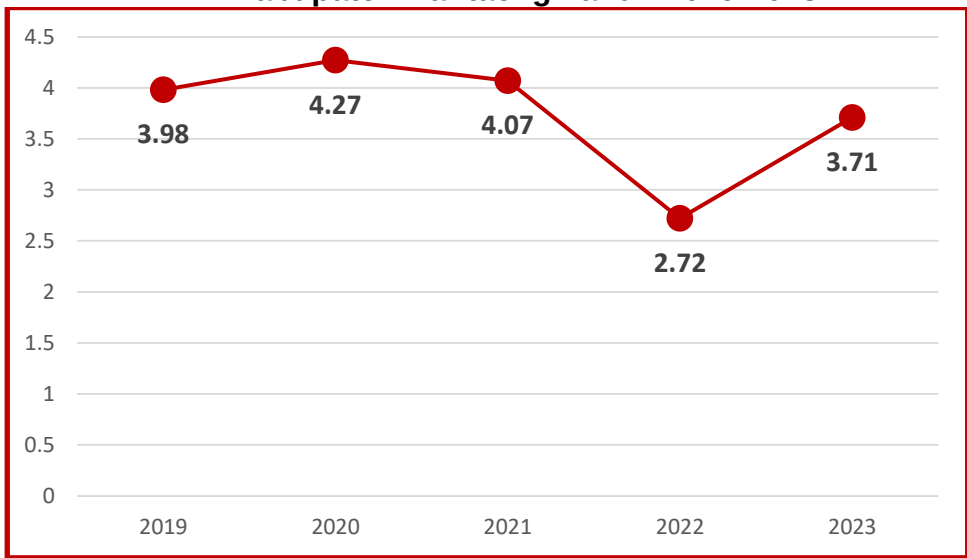


d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bantaeng memiliki *tren fluktuatif* naik turun dalam setiap periodenya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan.

Ketiadaan pekerjaan itu menurut BPS bisa karena sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta telah diterima bekerja, namun belum mulai bekerja. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran.

Gambar II.20
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2024

Perlu digarisbawahi bahwa pengangguran di Kabupaten Bantaeng mengalami kenaikan hingga mencapai 4,27 persen pada tahun 2020 dimana tahun tersebut merupakan terjadinya pandemi COVID-19. Namun pada tahun berikutnya, pengangguran mengalami penurunan cukup signifikan hingga mencapai 2,72 persen pada tahun 2022. Angka ini merupakan titik terendah tingkat pengangguran dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Namun pada tahun 2023, angka pengangguran kembali meningkat menjadi 3,71 persen.

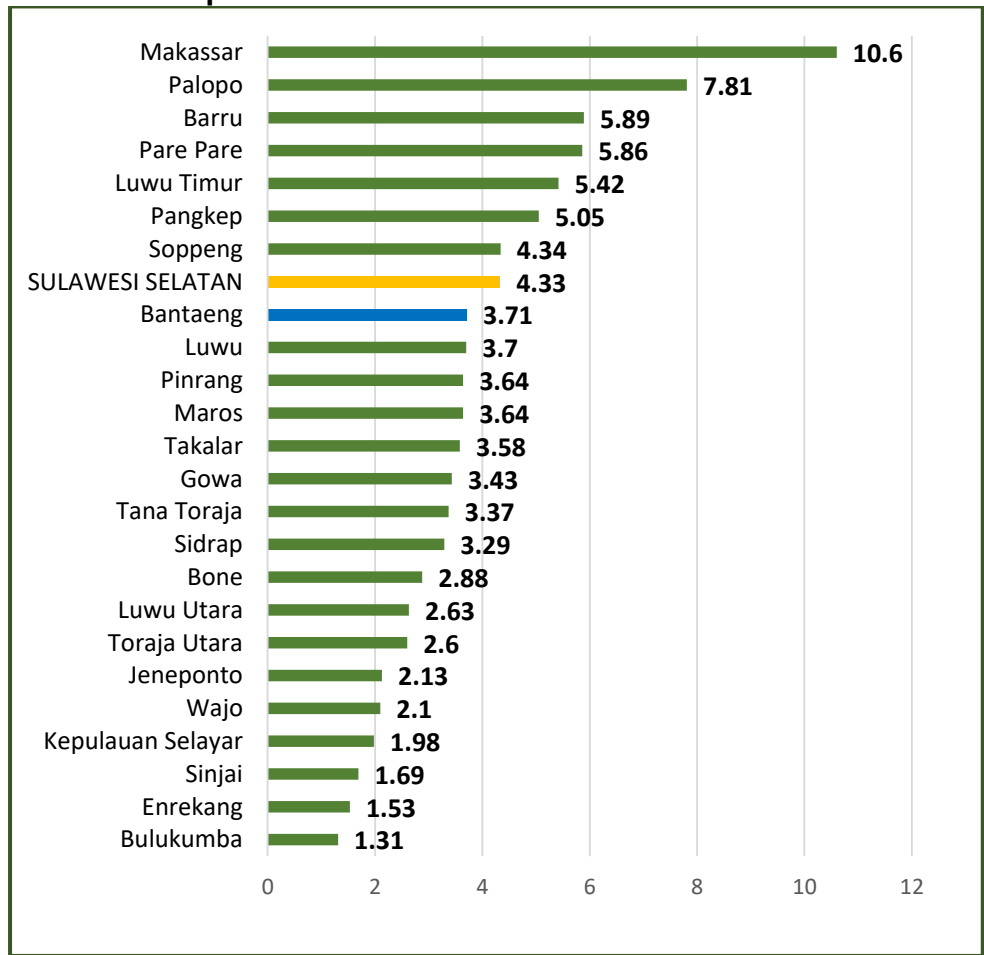
Kondisi fluktuasi dengan pola menurun pada angka pengangguran ini sangat terlihat dari meningkatnya penduduk



dengan status pekerjaan utama berusaha sendiri dimana pada tahun 2021 sebanyak 13 ribu penduduk dan meningkat pesat di tahun 2022 menjadi 18 ribu penduduk. Adapun pada tahun 2023, angka tersebut menurun menjadi 17,5 ribu jiwa. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dimana pada tahun 2022 mencapai 29 ribu jiwa dan menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 26 ribu jiwa. Kondisi ini juga terlihat dari melambatnya pertumbuhan perekonomian pada beberapa sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja cukup tinggi di Kabupaten Bantaeng, khususnya sektor pertanian.

Angka pengangguran di Bantaeng berada pada posisi pertengahan jika dibandingkan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Angka pengangguran provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 4,33 persen lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran Bantaeng yang sebesar 3,71 persen. Jika dilihat dari peringkatnya, pengangguran di Bantaeng berada di peringkat 8 tertinggi angka pengangguran se-Sulawesi Selatan.

Gambar II.21
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber Data : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2024



2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum dalam rumusan perencanaan pembangunan daerah ini mencakup bidang urusan pemerintahan yang terkait langsung dengan indikator kinerja utama pembangunan 2024-2026 atau yang memiliki daya ungkit tinggi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan wajib memiliki dua urusan dalam pembangunan daerah, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Adapun pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Bantaeng. Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut.

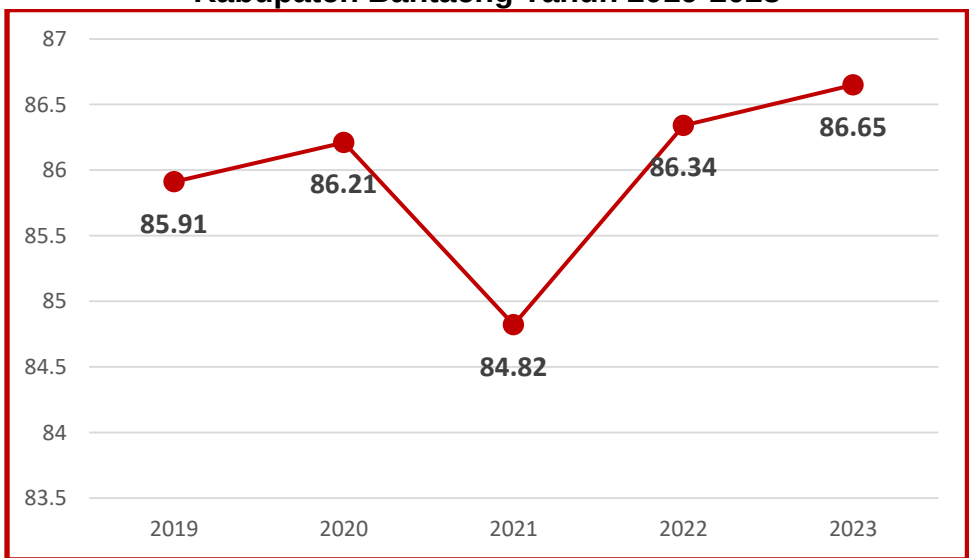


a. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 (lima belas) tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, khususnya yang ada di wilayah perdesaan.

Secara umum, terjadi fluktuasi angka melek huruf dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, dimana capaian angka melek huruf sempat berada di angka 87,88 persen dan menurun hingga mencapai 84,82 persen di tahun 2021. Namun pada tahun 2022 dan 2023, angka melek huruf meningkat kembali hingga mencapai 86,34 persen pada tahun 2022 dan 86,65 persen pada tahun 2023. Dalam hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan meningkatkan kemampuan membaca bagi masyarakat masih perlu dioptimalkan. Sehingga perlu adanya keseriusan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam sektor pendidikan, untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang lebih baik.

Gambar II.22
Angka Melek Huruf (%)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng, 2024

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Target dan realisasi indikator kinerja sasaran terjangkaunya dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah Angka



Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan sejumlah penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan formal tanpa melihat batasan umur usia sekolahnya.

APK SMP sederajat Kabupaten Bantaeng secara umum mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sedangkan APK SD sederajat secara umum mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Secara rinci, APK Kabupaten Bantaeng dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.7
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Bantaeng, Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	APK SD/MI	97,24	102,35	102,35	100,66	100,70
2	APK SMP/MTs	96,45	102,14	112,48	111,94	114,02

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng 2024

Target dan realisasi indikator kinerja sasaran tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang berkualitas dan relevan dengan memperhatikan inklusifitas baik pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Murni (APM) mengindikasikan jumlah penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan tertentu sesuai batasan usia sekolah.

APM Kabupaten Bantaeng secara umum mengalami peningkatan di setiap tahunnya baik SD maupun SMP sederajat. Secara rinci, APM Kabupaten Bantaeng dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.8
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Bantaeng, Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	APM SD/MI	95,39	100,69	99,98	97,44	86,27
2	APM SMP/MTs	90,43	93,99	97,06	96,75	74,18

Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng 2024

Jika diperbandingkan dengan angka provinsi Sulawesi Selatan menggunakan data BPS, maka terlihat capaian di Kabupaten Bantaeng cukup baik dimana APM maupun APK SD/MI di Kabupaten Bantaeng lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, APK SMP/MTs di Kabupaten Bantaeng juga lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan.



Tabel II.9
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

No	Indikator	Bantaeng		Sulawesi Selatan	
		APM	APK	APM	APK
1	SD/MI	86,27	100,70	97,89	106,65
2	SMP/MTs	74,18	114,02	81,35	87,15

Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

B. Kesehatan

Perkembangan bidang kesehatan suatu daerah menjadi salah satu tujuan pokok pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani. Terkait dengan hal tersebut, bidang kesehatan sendiri juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, hingga tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah.

Target Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI/MMR), Angka kematian Balita (AKB/CMR) dan Jumlah Balita Bawah Garis Merah (BGM) selalu mendapatkan perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng. Terlihat kasus kematian ibu dan balita mengalami kenaikan, namun angka kematian bayi memiliki pola penurunan. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam pelayanan kesehatan, agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dengan berkualitas.

Tabel II.10
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	kasus	1	5	2	0,6	0,3
2	Angka Kematian Balita per 1000 KH	kasus	2	0	0	0,9	0,3
3	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	kasus	2	3	2	91	97,3
4	Angka kelangsungan hidup bayi	%	100	100	100	99,4	99,7

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2022



C. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sarana infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan yang penting bagi sarana pendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan akses wilayah maka percepatan pembangunan terutama pelayanan terhadap masyarakat akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi infrastruktur pembangunan Kabupaten Bantaeng relatif dalam kondisi yang baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.11
Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase panjang jalan kondisi mantab (%)	%	64,32	76	77	68	64
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	%	92	92,79	93,41	93,41	93,41
3	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	85	86	86	86,05	86,5
4	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	74	74,5	76	68	68,45
5	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	60	62	63	64	64,5
6	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	50	60	62	62	62
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	74	74,5	67	67,5	68
8	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%	74	75	76	77	78
9	Prosentase Tersedianya 4 Layananan Data Infrastruktur	%	60	70	75	76	77
10	Prosentase Peningkatan Akuntabilitas kinerja	%	100	100	100	100	100
11	Persentase rumah tangga yang	%	Na	85*	40	68	69,81



No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	menempati hunian dengan akses air minum layak Jaringan Perpipaan (JP)						
12	Persentase rumah tangga yang menempati huniandengan akses air minum laya Jaringan Bukan Perpipaan (JBP)	%	Na	Na	20	16	16
13	Prosentase rumah tangga yang memiliki layanan SPAL Domestik	%	Na	85*	77	78	79
14	Prosentase luas genangan yang tertangani	%	Na	85*	Na	85	85
15	Prosentase Pengurangan Kawasan Kumuh	%	0,04	0,02	0,03	0,01	0,01
16	Rasio Panjang Jalan Kabupaten yang mendukung kawasan Strategis	%	100	100	100	100	100
17	Cakupan Pengelolaan Sungai, Pantai dan Irigasi	%	90	90	90	90	90
	PENATAAN RUANG						
18	Persentase luas RTH publik per luas wilayah kota	%	30	30	30	30	30
19	Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	%	30	30	30	40	40
20	Persentase bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB	%	75	75	75	75	75
21	Prosentase bangunan ber-IMB	%	6	6	6	7,5	9
22	Persentase Rencana Tata Ruang yang Di Tetapkan	%	30	30	30	40	40

Sumber Data : Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2022

Infrastruktur di Kabupaten Bantaeng yang telah dibangun diharapkan mampu memberikan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Jika melihat kondisi jalan di Kabupaten Bantaeng, maka masih terdapat jalanan yang belum optimal mengingat capaian panjang jalan dalam kondisi mantap hanya sebesar 64



persen dan angka ini menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini perlu mendapat perhatian bagi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sekaligus meningkatkan pengawasan penggunaan jalan agar kondisi jalanan yang rusak dapat diminimalisir. Selain itu, beberapa kondisi yang menurun juga perlu diperhatikan seperti sistem air limbah, sanitasi rumah tangga, hingga layanan air minum perpipaan.

D. Perumahan dan Permukiman

Salah satu infrastruktur dasar yang penting untuk dirasakan seluruh masyarakat Bantaeng adalah rumah layak huni. Rumah merupakan salah satu sarana tempat tinggal masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa perumahan rakyat dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng terdapat permasalahan masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni.

Rasio rumah layak huni di Kabupaten Bantaeng meningkat secara perlahan dimana pada tahun 2023 mencapai rasio 0,145 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun berkebalikan dengan permukiman layak huni dimana rasionya menurun sejak tahun 2021, dimana pada tahun terakhir (2023) mencapai 0,916.

Adapun secara rinci terkait perumahan masyarakat Bantaeng dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.12
Indikator Pelayanan Perumahan dan Permukiman
di Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,142	0,143	0,145	0,145	0,145
2	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,993	0,997	0,912	0,916	0,916
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	60,64	61,4	62,5	62,84	68.44
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	4,33	6,16	8,82	10,6	10.6
5	Persentase permukiman yang tertata	%	99,35	99,68	91,18	91,64	99.79
6	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,04	0,02	0,03	0,01	0.21



No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	64,08	82,52	16,9	83,3	50.23
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	5,09	10,49	9,51	9,42	9.42
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	39,39	39,39	45,45	45,45	45.45

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Pemukiman Tahun 2022.

E. Ketertiban dan Ketentraman Umum

Salah Satu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan daerah (Perda). Di Kabupaten Bantaeng pelayanan ini dilaksanakan oleh Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Secara umum, pencapaian ketertiban dan ketentraman umum di Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan baik dalam pengkondisian/penertiban peraturan daerah maupun dalam hal penanganan/tanggap bencana. Kondisi pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.13
Kondisi Pelayanan Ketertiban dan Ketentraman Umum
di Kabupaten Bantaeng Tahun 2019–2023

N o	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Org/RT	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	90	91,67	97,2	100	100
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	83,34	83,34	83,34	83.34	83.34
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	60,79	78,38	90,74	90.74	94.33



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

N o	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
5	Persentase Penegakan PERDA	%	92,5	99,95	97,12	100	100
6	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100	100	100
7	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban	%	54	100	100	100	100
8	Terlaksananya dukungan kelancaran pemilihan umum	%	100	100	100	100	100
9	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100	100	100
10	Persentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban	%	100	100	100	100	100
11	Persentase anggota linmas yang dapat diberdayakan untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	%	61	0	80,23	0	0
12	Persentase kejadian gangguan keamanan Pemilu yang tertangani oleh Linmas	%	0	0	0	0	0
13	Persentase bencana kebakaran yang tertangani	%	100	100	100	100	100
14	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan)	%	90	91,67	97,2	100	100
15	Indeks Resiko Bencana	Indeks	107,73	107,73	102,20	105,96	105,96
16	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	beda permen dagri	60*	60	60	100



N o	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
17	Persentase bencana kebakaran, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	%	beda permen dagri	60*	60	60	100

Sumber Data : Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022

F. Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Salah satu capaian yang menjadi kunci dalam pelayanan sosial demi pemeratakan kesejahteraan masyarakat adalah indikator Standar Pelayanan Minimal dimana Kabupaten Bantaeng memiliki capaian 100 persen yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.14
Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100,00	100	100	100	100
2	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100,00	100	100	100	100
3	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100,00	100	100	100	100
4	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	110,00	100	100	100	100



No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
5	Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	103,33	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, 2024

Tabel II.15
Capaian Indikator Urusan Sosial
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Fasilitas umum yang ramah divabel	%	18	48	65	88.50	65
2	Jumlah Divabel yang menerima pelayanan	%	17	41	66	90.50	95,75
3	Jumlah anak terlantar yang di rehabilitasi	%	24	48	65	85.50	95,75
4	Jumlah Lajut Usia terlantar yang direhabilitasi	%	20	40	60	80.00	95
5	Jumlah gelandangan dan pengemis yang di rehabilitasi	%	18	41	63	85.50	95,5
6	Jumlah Korban bencana alam/ sosial yang di rehabilitasi	%	18	41	64	87.00	95,5
7	Jumlah keluarga MBR yang ditingkatkan kualitas SDMnya	%	18	41	64	87.00	95,5
8	Jumlah fakir miskin yang di tingkatkan kesejahteraannya	%	23	47	64	84.50	95,5
9	Peningkatan Kualitas pemeliharaan fasilitas Taman Makam Pahlawan, Peningkatan Kualitas Peringatan Hari-hari besar kepahlawanan, Restorasi nilai-nilai kepahlawanan	%	18	41	64	87.00	95,5
10	Prosentase Jaminan Sosial Keluarga	%	17	42	67	92.00	96
11	Persentase pelayanan kesejahteraan sosial	%	18	48	66	90.00	96
12	Persentase rehabilitasi dan pembinaan sosial pada anak	%	24	48	66	87.00	96
13	Persentase rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia	%	20	40	60	80.00	95
14	Persentase pembinaan dan rehabilitas korban sosial	%	18	40	62	84.00	95
15	Cakupan perlindungan	%	18	41	64	87.00	95,5



No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	korban bencana alam						
16	Cakupan Ketersediaan rambu evakuasi dan papan informasi publik diwilayah berisiko bencana	-	3	10	15	21.00	15
17	Prosentase perlindungan dan jaminan sosial	%	60	60	60	80.00	95
18	Prosentase pemberdayaan sosial	%	60	60	60	80.00	95
19	Prosentase pelayanan rehabilitasi sosial	%	60	60	60	80.00	95
20	Prosentase penanganan korban bencana	%	60	60	60	80.00	95
21	Prosentase Kondisi TMP Baik	%	60	60	60	80.00	95

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, 2022

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan daerah yang wajib meskipun bukan merupakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Bantaeng. Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

a. Pendidikan Angkatan Kerja

Sebagian besar angkatan kerja yang merupakan penduduk produktif yang mampu bekerja di Kabupaten Bantaeng memiliki jenjang pendidikan Tidak Sekolah/Belum Tamat SD/Tamat SD sebanyak 63.012 jiwa dengan berstatus bekerja sebanyak 62.280 jiwa. Angka ini disusul oleh pekerja yang memiliki jenjang pendidikan SMA sebanyak 28.534 tenaga kerja.



Tabel II.16
Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan dan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu,
Kabupaten Bantaeng Tahun 2023

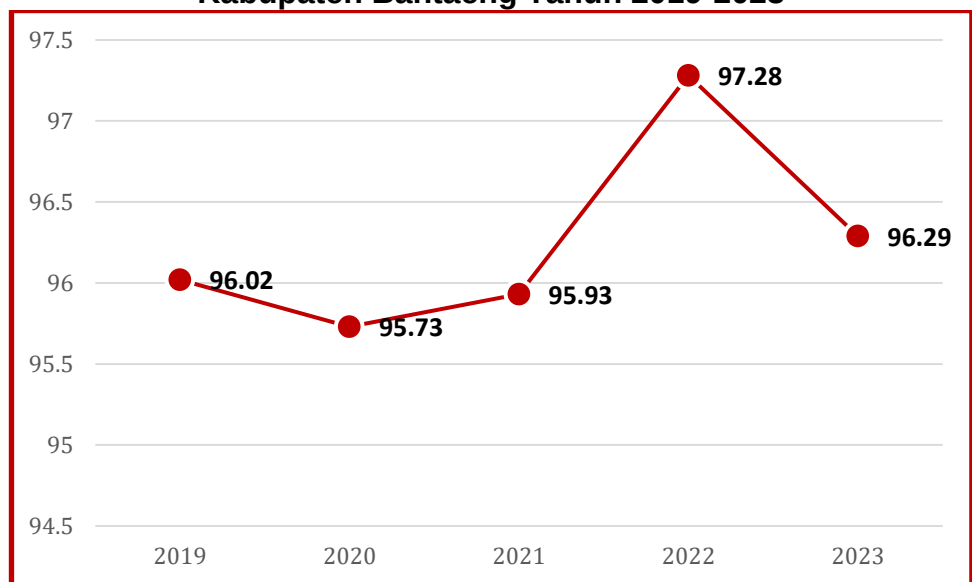
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja		
	Bekerja	Penganggura n	Jumlah Angkatan Kerja
Tidak Sekolah/Belum Tamat SD/Tamat SD	62.280	732	63.012
SMP	9.872	-	9.872
SMA	28.534	3.082	31.616
Perguruan Tinggi	13.856	602	14.458
Jumlah	114.542	4.416	118.958

Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng, 2024

b. Jumlah Penduduk yang bekerja

Jumlah Penduduk yang bekerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan hingga mencapai 97,28 persen dari angkatan kerja, dimana tahun sebelumnya sempat mencapai 95,73 persen dan 95,93 persen selama masa Pandemi COVID-19 tahun 2020 dan 2021. Baiknya progress pada tahun 2022 ini merupakan dampak pemulihan perekonomian dari Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bantaeng. Namun pada tahun berikutnya, terjadi penurunan penduduk berstatus bekerja dengan capaian 96,29 persen.

Gambar II.23
Tingkat Kesempatan Kerja (%)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

c. Jumlah Tenaga Kerja yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan



Untuk tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebanyak 480 orang dengan rincian peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) sebanyak 144 orang dan peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat (PBM) sebanyak 336 orang dan untuk tahun 2017, jumlah tenaga kerja yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebanyak 156 orang dengan rincian peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 96 orang dan peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat (PBM) sebanyak 60 orang. Sedangkan untuk tahun 2013-2017 belum ada tenaga kerja yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya disebabkan karena Kabupaten Bantaeng belum memiliki Balai Latihan Kerja.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

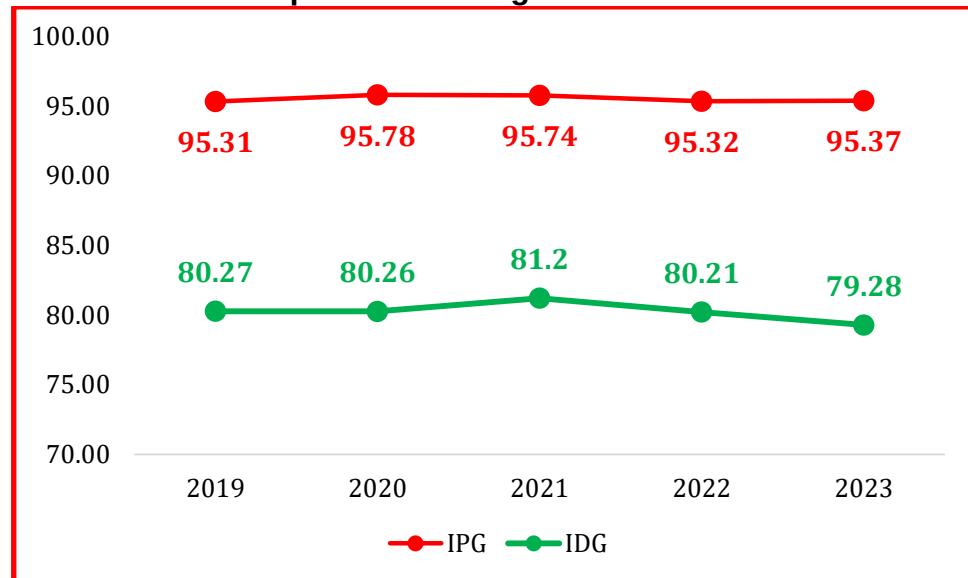
Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya.

Capaian pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantaeng mengalami sedikit fluktuasi dimana pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) Bantaeng tahun 2019 sebesar 95,31 dan meningkat 0,47 poin menjadi 95,78 pada tahun 2020. Namun di tahun 2021, terjadi penurunan sebesar 0,04 poin menjadi 95,74 dan menurun kembali di tahun 2022 menjadi 95,32. Pada tahun terakhir, terjadi kenaikan kembali IPG menjadi sebesar 95,37 pada tahun 2023.

Jika dilihat dari indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), maka terlihat fluktuasi dimana pada tahun 2019 sebesar 80,27 dan terjadi penurunan IDG sebanyak 0,01 poin menjadi 80,26 di tahun 2020. Namun pada tahun 2021, terjadi kenaikan kembali IDG menjadi 81,20. Adapun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan IDG dimana masing-masing capaian IDG sebesar 80,21 dan 79,28.



Gambar II.24
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS RI tahun 2024

Pada tahun 2021 dan 2022, indeks pembangunan gender mengalami penurunan. Kondisi ini secara umum disebabkan oleh semakin meningkatnya gap diantara beberapa komponen penyusun indeks pembangunan gender, khususnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang semakin memiliki gap cukup tinggi di setiap tahunnya. Selain itu, dari sisi kesehatan pada indikator angka harapan hidup juga semakin tinggi gapnya meskipun harapan hidup perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Secara rinci dalam kaitannya penyusunan IPG dan IDG, komponen penyusun kedua indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.17
Komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Harapan Hidup (Laki)	Tahun	68,40	68,45	68,45	68,72	69,17
	Angka Harapan Hidup (Perempuan)	Tahun	72,33	72,46	72,53	72,82	73,13
2	Harapan Lama Sekolah (Laki)	Tahun	11,81	11,82	11,83	12,10	12,40
	Harapan Lama Sekolah (Perempuan)	Tahun	12,37	12,38	12,4	12,43	12,66
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Laki)	Tahun	7,17	7,18	7,23	7,27	7,50
	Rata-Rata Lama Sekolah (Perempuan)	Tahun	6,41	6,69	6,74	6,75	7,03
4	Pengeluaran Perkapita	Juta/Rp	11937	12040	12.286	12.614	12.795



No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	(Laki)						
	Pengeluaran Perkapita (Perempuan)	Juta/Rp	9.315	9.326	9.452	9.683	9.835
5	Indeks Pembangunan Manusia (Laki)	%	69,48	70,40	70,69	71,42	72,30
	Indeks Pembangunan Manusia (Perempuan)	%	66,22	67,43	67,68	68,08	68,95
Indeks Pembangunan Gender (IPG)		-	95,31	95,78	95,76	95,32	95,37

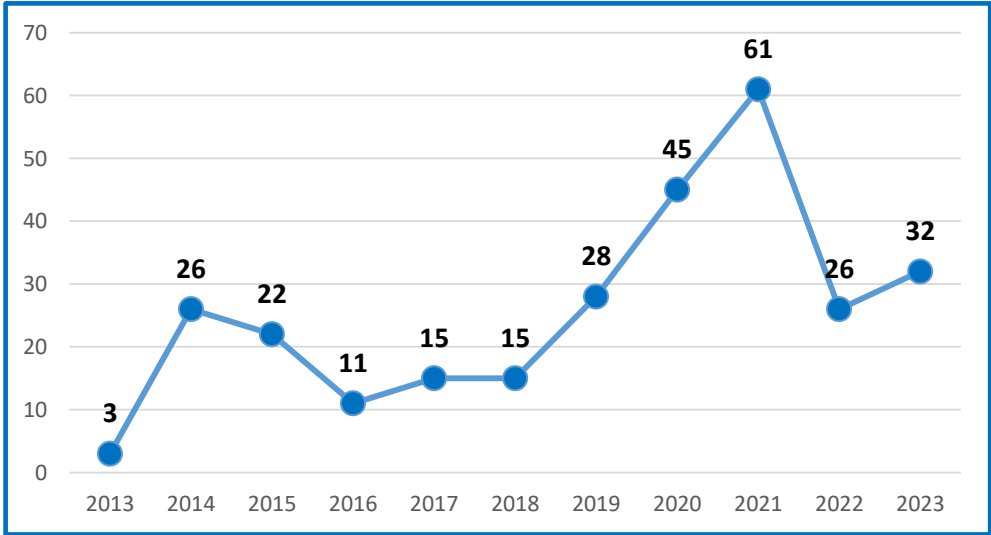
Sumber Data :BPS RI, 2023

Tabel II.18
Indeks Penyusun Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pemberdayaan Gender		-	80,53	80,27	80,26	81,20	79,28
1	Keterlibatan perempuan di parlemen	%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
2	Perempuan sebagai tenaga manajer, profesional administrasi, teknis	%	56,43	56,18	52,32	61,81	63,09
3	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	36,84	36,99	37,19	37,05	37,00

Sumber Data : BPS RI, 2023

Gambar II.25
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak
Dari Tindakan Kekerasan Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2023



Sumber Data : Dinas PMD,PP-PA tahun 2024

Jika menilik pada kasus terkait perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, maka terlihat fluktuasi kasus di setiap



tahunnya namun memiliki pola peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2013 sebanyak 3 kasus penyelesaian pengaduan dan meningkat menjadi 32 kasus pada tahun 2023. Peningkatan ini bisa mengindikasikan meningkatnya kesadaran perempuan terkait haknya dalam melaporkan tindak kekerasan yang merupakan fenomena gunung es dalam pembangunan.

C. Pangan

Kedaulatan Pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Ketahanan pangan merupakan kondisi dimana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Padi masih merupakan bahan pokok pangan bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bantaeng.

Secara umum, ketersediaan pangan mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 sebanyak 56,26 ton menurun menjadi 45,03 ribu ton di tahun 2023. Kondisi ini juga menjadikan pencapaian skor pola pangan harapan menurun dari 90,5 pada tahun 2019 menjadi 75,2 pada tahun 2023.

Tabel II.19
Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan pangan utama	Ribu ton	56,26	57,39	57,96	58,51	45,03
2	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	nilai	90,5	90,6	90,8	90,8	75,2

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan 2024

D. Pertanahan

Pemerintah Kabupaten Bantaeng, sebagai daerah otonom melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaanya.

Dalam penyelenggaraan urusan pertanahan permasalahan yang biasa terjadi di lapangan:



- a. Masih adanya permasalahan di bidang pertanahan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan dan senantiasa memberikan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan.
- b. Masih banyaknya permohonan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga perlu pengawasan lebih mendalam dalam hal perizinan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan peruntukan dan tata ruangnya.

Terlihat capaian pada urusan pertanahan dimana jumlah dan luas tanah bersertifikat mengalami kenaikan yang mengindikasikan semakin baiknya administrasi agrarian di Bantaeng. Lebih rinci, capaian urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.20 Indikator terkait Urusan Pertanahan Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023							
No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	40,99	46,4*	58,11	28,85	32,18
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	50*	0	0	0
3	Penyelesaian izin Lokasi	%	100	100*	100	100	100
4	Persentase sengketa tanah diselesaikan	%	72	76	42,9	100	100
5	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah dipenuhi	%	72	76	20	100	75
6	Persentase tanah kosong dikelola	%	72	76	0	0	0
7	Persentase tanah ditata sesuai penggunaan	%	72	76	0	0	0

Sumber : Data Pertanahan 2024



E. Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disusun agar mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut adalah melalui pengelolaan sampah. Pemerintah menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional. Pengelolaan sampah ini meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah, yang berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan.

Tabel II.21
Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantaeng, Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Sat	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase kinerja pengelolaan persampahan	%	20,72	60.31	57.05	62.00	62.86
2	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	17.56	21.31	20,18	25.70	26.06
3	Persentase cakupan area pelayanan	%	3.54	3.54	3.90	3.90	3.90
4	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	34.10	30.41	36,22	32.86	33.82
5	Persentase kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditangani	%	90	100	100	100	100
6	Persentase RTH yang dikelola	%	11,48	12,25*	12,25	12,25	12,25
7	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	%	90	100	100	100	100
8	Proposrsi Limbah B3 yang diolah sesuai Prosedur	%	90	100	85	85	90
9	Persentase MHA terkait PPLH yang diakui	%	0	0	0	0	0
10	Persentase Lembaga Masyarakat Peduli Lingkungan	%	90	100	100	100	100



No	Uraian	Sat	2019	2020	2021	2022	2023
11	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	%	90	100	100	100	100
12	Persentase kinerja pengelolaan persampahan Kab. Bantaeng	%	20,72	60.31	57.05	62.00	62.86
13	Persentase kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditangani	%	90	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas LH 2022

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan pengrusakan lingkungan sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya. Hal semacam ini akan menimbulkan beban kepada masyarakat dan pemerintah itu sendiri karena mereka juga yang akan menanggung beban pemulihannya. Terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggungjawab yang menuntut peran serta setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan yang bijaksana harus dilandasi wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

Kondisi lingkungan hidup suatu daerah dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun capaian IKLH tahun 2023 mengalami peningkatan cukup signifikan hingga mencapai 73,08.

Tabel II.22
Kondisi 3 (Tiga) Indikator LH Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Sat	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air	-	76,35	83.14	60	56	68.57
2	Indeks Kualitas Udara	-	94,72	94.11	94,38	95.61	94.76
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	73,47	29.33	32,55	32.55	40.72
IKLH		-	80,71	67.91	67.91	66.91	73.08

Sumber Data : Dinas LH Tahun 2024



F. Perhubungan

Sektor perhubungan mempunyai sasaran pembangunan untuk meningkatkan layanan publik terutama dalam hal penataan sistem transportasi dan peningkatan aksesibilitas masyarakat di pedesaan. Sasaran pembangunan tersebut, memiliki 2 (dua) indikator besar yakni *load factor* Penumpang Angkutan Umum Perkotaan dan Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi. Di Kabupaten Bantaeng sendiri, fasilitas perhubungan diupayakan untuk ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun secara jumlah. Di Bantaeng terdapat 1 terminal tipe B dan 3 terminal tipe C serta 1 pelabuhan laut. Namun capaian jumlah KIR mobil angkutan umum mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi sebanyak 1.443 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tabel II.23
Fasilitas Perhubungan
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023

No	Uraian	Sat	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Term. Tipe- B	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Term. Tipe C	Unit	3	3	3	3	3
3	Jumlah Uji Kir Mobil Angkutan Umum	Kali	2808	1796	2054	1.453	1.443
4	Rasio ijin trayek	Per 1.000	0	0,41	0,48	0,45	0,50
5	Jumlah Pelabuhan laut	unit	1	1	1	1	1
6	Pemasangan Rambu-rambu	buah	0	0	189	189	189

Sumber Data : Dinas Perhubungan 2024

G. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat, dalam perekonomian mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Meskipun belum sepenuhnya berkembang, namun koperasi di Kabupaten Bantaeng masih menunjukkan eksistensinya dalam meningkatkan pergerakan perekonomian mikro daerah. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Bantaeng mengalami penurunan yang menjadikan perlunya perhatian pada peningkatan kualitas koperasi sebagai upaya peningkatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bantaeng.



Tabel II.24
Persentase Koperasi Aktif
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase koperasi aktif	%	90	100	78	80	85

Sumber Data :Dinas Koperasi UKM 2022

H. Penanaman Modal

Iklim investasi di Kabupaten Bantaeng menunjukkan “*trend positif*”. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar Kabupaten Bantaeng untuk dapat menarik minat para investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor untuk turut memajukan perekonomian daerah. Kemudahan berinvestasi di Kabupaten Bantaeng tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk menyederhanakan pelayanan perijinan serta mengedepankan pelayanan yang bersih dan bebas pungli.

Terlihat secara umum terjadi penurunan perkembangan investasi daerah dimana pada tahun 2019 jumlah proyek berskala nasional sebanyak 11 proyek dan tahun 2023 hanya sebanyak 4 proyek. Kenaikan proyek berskala nasional ini tentu saja meningkatkan berbagai perkembangan investasi dan turunannya di Kabupaten Bantaeng.

Tabel II.25
Perkembangan Investasi
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 – 2023

URAIAN		SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	11	10	5	12	4
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	3.5 Trilyun	2,75 Trilyun	905.185.668 130	1.712.690.900 900	938.849.977 620
3	Rasio daya serap tenaga kerja	%	21% (Kenaikan)	10*	27% (Kenaikan)	20%	27,50%
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Milyar	96% (Kenaikan)	700 Milyar	67% (Kenaikan)	-79%	34%
5	Nilai Investasi	Milyar	3.5 Trilyun	2,75 Trilyun	905.185.668 130	1.712.690.900 900	938.849.977 620
6	Jumlah fasilitasi kerjasama investasi antar pemerintah	Kesepakatan	3	1*	4	3	6
7	Jumlah Investor Berskala	Perusahaan	13	15*	19	12	29



	URAIAN	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
	Nasional (PMDN/ PMA)						
8	Kajian pemetaan potensi sektor prioritas	Dokumen	0	2*	1	0	0
9	jumlah izin yang diterbitkan sesuai SOP	Izin	2263	6000*	3059	5631	7300
10	LPE PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	%	2.779,15	2.804,70	3.116,48	3.212,36	3.427,40

Sumber Data : PM dan PTSP 2022

I. Statistik

Di Kabupaten Bantaeng terdapat instansi vertikal yang khusus menangani penyediaan data dan informasi pembangunan, yakni Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. Setiap tahun, Badan Pusat Statistik Bantaeng mempublikasikan buku Bantaeng Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Bantaeng sebagai bagian tak terpisahkan dalam upaya perwujudan pembangunan daerah di setiap tahunnya.

J. Kebudayaan

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya.

Setiap Bangunan Cagar Budaya merupakan satu kesatuan filosofis dan sejarah yang dalam pelestariannya perlu dipertimbangkan sehingga ada keseimbangan arkeologis, historis dan kekhasan masing-masing kawasan cagar budaya. Cagar budaya di Bantaeng cukup melimpah dimana terdapat 40 bangunan cagar budaya dengan 5.637 benda cagar budaya. Selain itu terdapat 2 kawasan cagar budaya dan 35 situs cagar budaya. Pada kondisi tahun 2023, keseluruhan cagar budaya telah dilestarikan dan dikelola.

2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan merupakan urusan Pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Bantaeng.

A. Pariwisata

Pengembangan pariwisata daerah di Kabupaten Bantaeng terus dipacu pengembangannya, oleh karena itu pemanfaatan potensi



sumber daya alam untuk pengembangan pariwisata daerah menjadikan Kabupaten Bantaeng tampil sebagai destinasi kunjungan wisata. Obyek wisata yang dikembangkan mencakup obyek wisata pantai antara lain wisata kuliner Pantai Lamalaka, wisata kuliner Pantai seruni dan wisata bahari Pantai Marina Korong Batu, selain itu telah dikembangkan wisata agro pada kawasan zona III (pegunungan) termasuk kebun apel dan strawberi.

Kegiatan sektor pariwisata memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri. Selain itu diharapkan secara langsung sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha. Jika dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan, maka terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dibanding beberapa tahun sebelumnya dimana kunjungan wisatawan sebanyak 264.289 orang.

Tabel II.26
Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Jumlah Kunjungan Wisatawan				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	87.626	90.000*	70.687	259.030	264.289
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	240*	250*	193*	1.75	1.30
3	PAD sektor pariwisata	Juta Rp	765,81	612,65*	682,56	2.919,93	2.537,86

Sumber Data : Dinas Pariwisata Tahun 2022

Dari sekian banyak wisatawan yang menikmati fasilitas pariwisata di Bantaeng, lama kunjungan wisatawan mengalami penurunan secara rata-rata lama tinggal dimana pada tahun 2023 menjadi selama 1,30 hari. Adanya wabah covid-19 yang disertai dengan kebijakan pembatasan PPKM menyebabkan beberapa obyek wisata harus di tutup dan masyarakat enggan untuk bepergian. sehingga perlu adanya peningkatan daya tarik wisata sekaligus fasilitas penunjangnya.

Jika dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata, terjadi penurunan secara berkala dimana pada tahun pada tahun 2020 mencapai titik terendah dengan capaian 612,65 juta rupiah. Dampak Pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan berbagai sektor ekonomi, tak terkecuali sektor pariwisata. Namun adanya



pemulihan ekonomi di tahun 2023 menyebabkan kenaikan kembali geliat pariwisata daerah yang terlihat dari kenaikan PAD menjadi Rp. 2.537,86 juta.

B. Pertanian

Pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan diarahkan untuk meningkatkan produksi padi, palawija dan hortikultura. Peningkatan produksi padi dilakukan melalui program dalam bentuk insus dan inum serta ditunjang dengan pencetakan sawah baru dan peralatan yang memadai. Secara umum perekonomian daerah Kabupaten Bantaeng didominasi sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, selanjutnya sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan. Sedangkan pola tanam pertanian tanaman pangan adalah padi-padi-palawija.

Tabel II.27
Capaian Pembangunan Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	28,53	28,37	28,94	23,72	22,85
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	5,08	5,06	5,31	5,44	5,26
3	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	4,54	-0,06	4,36	0,35	-2,33

Sumber Data : Dinas Pertanian Tahun 2024 (na: data belum tersedia)

C. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bantaeng terletak dipinggir pantai dan berpotensi serta menguntungkan pada sub sektor perikanan, khususnya penangkapan ikan di laut. Potensi perikanan laut di Kabupaten Bantaeng masih memiliki peluang yang teramat besar untuk dioptimalkan. Namun potensi tersebut belum dioptimalkan sepenuhnya yang terlihat dari penurunan produksi perikanan hingga tahun 2023 mencapai 66,32 ribu ton meskipun pertumbuhan ekonomi sektor perikanan mencapai 6 persen. Meskipun begitu, pengelolaan komoditi perikanan ini dapat dioptimalkan untuk peningkatan perekonomian



masyarakat Kabupaten Bantaeng mengingat adanya potensi sumber daya alam bahari yang patut dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

Tabel II.28
Capaian Kinerja Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Tahun
Kabupaten Bantaeng, 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi perikanan	Ton	83,195	107.651	86,719	116,033,40	66,316
2	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	5.568,30	19,029	6.256,40	6.382,40	4.951,60
3	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	77.626,80	261.355	80.388	89.370	61.366
4	Konsumsi ikan	%	42,63	47,7	43,67	38,73	29,05
5	LPE subsektor perikanan	%	7,18	5	6	6	6

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2024

D. Perdagangan

Perdagangan memiliki dominasi pada struktur perekonomian Bantaeng yang cukup tinggi dengan kontribusi pembangunan perekonomian sebesar 13,95 persen. Kondisi ini juga semakin terlihat dengan pertumbuhan ekonomi sektoral yang cukup tinggi pula hingga mencapai 9,54 persen di tahun 2022 dan 4,99 persen pada tahun 2023. Adapun pada tahun 2020 perekonomian mengalami kontraksi, disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan sektor perdagangan sedikit bergejolak.

Tabel II.29
Capaian Pembangunan Perekonomian Sektor Perdagangan
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan speeda motor	%	15,0	14,65	14,25	13,52	13,95
2	Laju pertumbuhan ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan speeda motor	%	10,7	-2,40	7,33	9,54	4,99

Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng Tahun 2024



E. Perindustrian

Sebagai upaya peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor primer yang ada di Kabupaten Bantaeng, termasuk didalamnya peningkatan kualitas usaha mikro kecil khususnya industri mikro kecil, maka Kabupaten Bantaeng memiliki program kebijakan khusus dalam pengembangan perindustrian daerah. Upaya peningkatan kapasitas perindustrian juga terlihat dari adanya antusiasme masyarakat dalam mengelola barang dan jasanya sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih bernilai tinggi.

Kondisi ini terlihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi sektoral perindustrian yang mencapai 122,89 persen pada tahun 2022 dan melambat namun masih kategori cukup tinggi sebesar 15,91 persen pada tahun 2023. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kontribusi yang cukup signiifkan pada tahun 2022 dengan capaian kontribusi industri pengolahan sebesar 18,47 persen dan pada tahun 2023 menurun menjadi 17,27 persen.

Tabel II.30
Capaian Pembangunan Perekonomian Sektor Perindustrian
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan	%	7,70	6,91	9,76	18,47	17,27
2	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Industri Pengolahan	%	68,8	-9,50	43,76	122,89	15,91

Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng Tahun, 2024

F. Penunjang Urusan

a. Penyelenggaraan Pemerintah

Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng beserta seluruh elemen yang tergabung di dalamnya memiliki peran utama untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Dalam melaksanakan kinerja pemerintahan, setiap unsur Pemerintah Daerah memiliki tugas dan fungsi yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan baik dari segi capaian teknis maupun administrasi.

Reformasi birokrasi yang telah diupayakan untuk diimplementasikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mulai menampakkan hasil positif pada beberapa daerah, tak terkecuali Kabupaten Bantaeng. Pencapaian reformasi birokrasi



di Kabupaten Bantaeng memiliki progress yang positif dimana terjadi peningkatan dalam implementasi reformasi birokrasi di seluruh aparatur pemerintahan. Adapun pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 mencapai 58,89 dengan kategori CC.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan instrumen yang digunakan oleh Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan tersebut, disusun suatu laporan yang disebut LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan).

Gambar II.26
Nilai SAKIP (Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023



Sumber Data: Bagian Pemerintahan Setda Tahun 2023

Hasil dari nilai pelaporan SAKIP Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019, Kabupaten Bantaeng hanya mendapatkan nilai LAKIP 61,72 dengan predikat B dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 memiliki nilai SAKIP 63,28 (B). Capaian ini mengindikasikan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Kabupaten Bantaeng sudah baik pada level pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih



perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Selain dari LAKIP, dalam melihat kinerja Pemerintah dapat terlihat dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP sendiri adalah proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam mengevaluasinya, maka dirumuskan suatu indikator yakni Indeks Maturitas SPIP yang dapat melihat tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Pada tahun 2023, Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Bantaeng sudah mencapai level 3,105 sehingga masuk kategori terdefinisi. Beberapa catatan dari tim penilai menyebutkan bahwa sasaran tidak berorientasi hasil, indikator tidak spesifik dan relevan, target tidak SMART, pengendalian yang ada belum efektif, dan risiko kecurangan belum dikelola.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (penilaian mandiri) dimana SPBE merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun capaian Indeks SPBE Kabupaten Bantaeng pada tahun 2023 mencapai 3,04 dengan status kategori “Baik”. Belum optimalnya capaian indeks SPBE ini disebabkan karena penerapan arsitektur SPBE belum dilaksanakan secara maksimal.

b. Keuangan

Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi tidak bisa dilepaskan dari faktor keuangan daerah karena suatu Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu keuangan dapat menjadi kriteria dasar untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya



sendiri. Sementara itu, untuk dapat memiliki sendiri keuangan yang memadai daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula.

Dari uraian diatas, dapat diambil kata kunci bahwa keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Daerah mempunyai hak untuk mencari sumber pendapatan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan Pemerintah di daerah.

Salah satu kriteria dalam rencana program otonomisasi daerah adalah kemampuan daerah untuk mengumpulkan pendapatan sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi suatu daerah atau PAD merupakan indikator tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total APBD, maka semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Dalam melihat kinerja administrasi keuangan daerah, indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kinerja pengelolaan keuangan. Pada tahun 2021, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Bantaeng mencapai 74,726. Selain itu, indikator Opini BPK dapat memperlihatkan kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kabupaten Bantaeng telah meraih Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian” selama enam tahun berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2023.

Tabel II.31
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data: BPKD 2024



c. Pelayanan Publik

Dalam menjalankan kehidupan kesehariannya, masyarakat tidak akan pernah terlepas dari peran serta Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan. Berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan telah dilaksanakan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dapat dilihat dari Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bantaeng yang mencapai nilai 88,24 pada tahun 2023 yang artinya pelayanan Pemerintah termasuk dalam kategori “Baik”. Selain itu, indeks pelayanan publik dari Kemenpan RB juga mendapatkan nilai 3,05 dari interval 0-5. Adapun pada penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI mendapatkan nilai 81,79 di tahun 2023 ini.

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

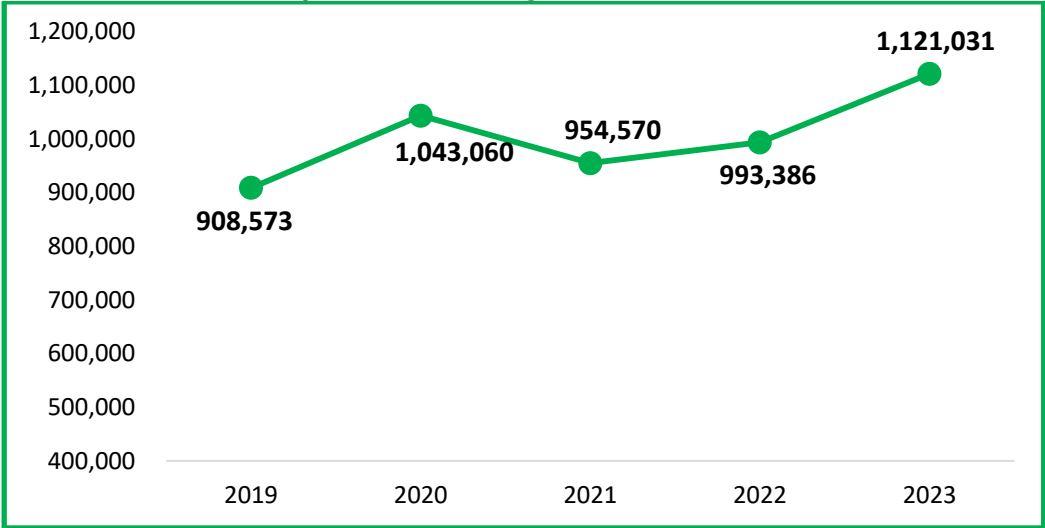
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Data menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Bantaeng mengalami perubahan cenderung meningkat dari Rp.908.573,-/bulan pada tahun 2019 menjadi Rp.1.121.031,-/bulan pada tahun 2023.



Gambar II.27
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng 2023

b. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Bantaeng. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap jumlah kendaraan semakin bertambah sehingga kepadatan kendaraan semakin bertambah. Pertumbuhan jumlah orang dan barang yang melalui terminal dari tahun ke tahun secara umum cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2023 berjumlah 273.510 orang dan 2.188,080 ton barang.

Tabel II.32
Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Orang/ Barang Pengguna Terminal
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio panjang jalan pe jumlah kendaraan (km/kend)	0,020	0,018	0,017	0,017	0,017
2	Jumlah orang melalui terminal per tahun	642.800	387.483	262.900	315.360	273.510
3	Jumlah barang melalui terminal per tahun	3.242.000	3.298.160	3.210.320	3.204.000	2.188.080

Sumber Data :Dinas Perhubungan 2024



c. Iklim Berinvestasi

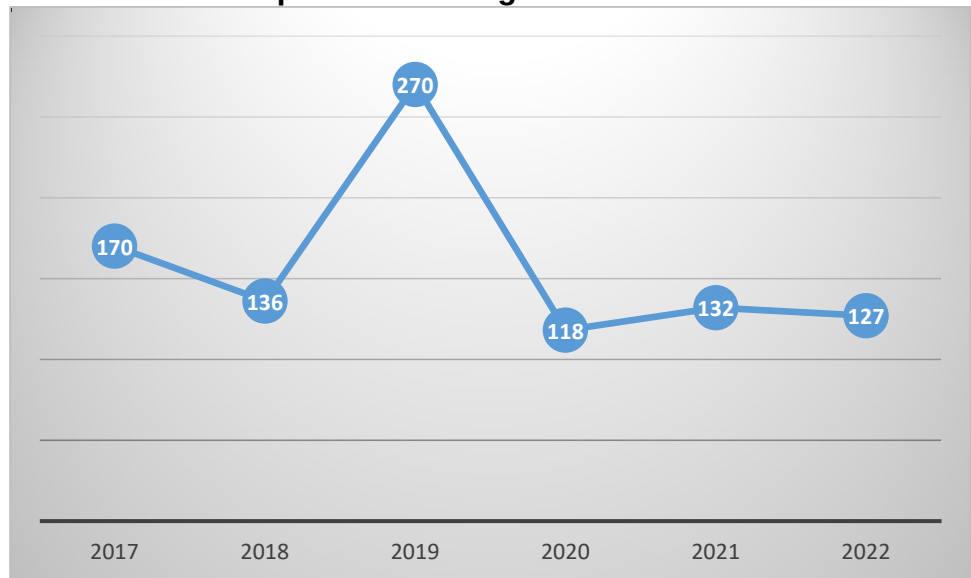
- **Keamanan dan Ketertiban**

Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Dari sisi keamanan dan ketertiban, menurunnya jumlah kriminalitas dan maupun pelanggaran perda K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kabupaten Bantaeng.

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Bantaeng, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Salah satu faktor penting juga adalah terkait minimalisir angka kriminalitas dimana kasus kejahatan masih sangat fluktuatif terjadi di Kabupaten Bantaeng.

Terjadi kenaikan kasus kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Bantaeng dalam kurun waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2015 terjadi sebanyak 122 kasus kriminalitas dan semakin meningkat hingga mencapai 270 kasus kriminalitas pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah tindak pidana mengalami penurunan kembali menjadi 118, namun meningkat pada tahun 2021 menjadi 132 kasus dan tahun 2022 sebanyak 127 kasus yang didominasi di Kecamatan Bissappu dan Bantaeng. Kenaikan ini tentu harus menjadi perhatian bagi kepolisian resort setempat dan juga pemerintah daerah dalam membina dan menyosialisasikan pentingnya kondusivitas wilayah bagi pembangunan daerah.

Gambar II.28
Jumlah Kasus Kriminalitas
Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2022



Sumber Data : Polres Bantaeng, 2023

*data termutakhir tahun 2022

- Perizinan

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan laju pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian.

Secara umum, terlihat adanya penurunan aktivitas perijinan usaha seperti kepengurusan SITU (Surat Izin Tempat Usaha), IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), maupun TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

Tabel II.33
Surat Izin Usaha Yang Keluar Tahun 2019-2023

Tahun	IMB	SITU	IUJK	SIUP	TDI	BBM	TDP	TDG
2019	507	193	30	241	12	-	33	4
2020	247	-	24	186	1	-	275	9
2021	573	-	14	108	11	-	1696	3
2022	Na	na	na	na	na	na	na	na
2023	Na	na	na	na	na	na	na	na

Sumber : Data PM dan PTSP Tahun 2022 (na: data belum tersedia)

Selain itu untuk meningkatkan jumlah investasi yang masuk kedalam Kabupaten Bantaeng, Telah dibuat beberapa Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha, yaitu:



1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032;
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.

Adapun Waktu yang diperlukan untuk mengurus perizinan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.34
Waktu untuk Memproses Perizinan
di Kabupaten Bantaeng Tahun 2023

No.	Nama Izin	Waktu
1.	Izin Operasional Pendidikan Non Farmal	5 Hari 1 Jam 30 Menit
2.	Izin Operasional Pendidikan SD,SMP dan Sederajat	2 Hari 1 Jam 28 Menit
3.	Izin Agreditasi Sekolah SD,SMP dan Sederajat	-
4.	Izin Operasional Pendidikan Non Farmal	5 Hari 1 Jam 30 Menit
5.	Izin Operasional Pendidikan SD,SMP dan Sederajat	2 Hari 1 Jam 28 Menit
6.	Izin Praktek Tenaga Kesehatan	-
	a. Prakter Dokter	3 Hari 1 Jam 50 Menit
	b. Praktek Bidang	3 Hari 1 Jam 20 Menit
	c. Praktek Perawat	3 Hari 1 Jam
7.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Layanan Kesehatan.	3 Hri 1 Jam 50 Menit
8.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D	5 Hari 1 Jam 29 Menit
9.	Izin Klinik	5 Hari 2 Jam
10.	Izin Apotek	3 Hari 2 Jam 25 Menit
11.	Izin Toko Obat	2 Hari 1 Jam 20 Menit
12.	Izin Toko Alat Kesehatan	4 Hari 1 Jam 10 Menit
13.	Izin Optikal	3 Hari 1 Jam 55 Menit
14.	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (IUMOT)	-
15.	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1	1 Hari 1 Jam 40 Menit
16.	Laik Higene Sanitasi	2 Hari 1 Jam 30 Menit
17.	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1	1 Hari 1 Jam 40 Menit
18.	Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	1 Hari 1 Jam 40 Menit
19.	Izin Produksi Makanan dan Minuman	3 Hari 1 Jam 30 Menit
20.	Izin Prinsip Daerah	4 Jam
21.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2 Hari 1 Jam 50 Menit
22.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	-
23.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)	4 Hari 1 Jam 30 Menit
24.	Izin Penggunaan pemanfaatan tanah	2 Jam 30 Menit
25.	Izin Pembangunan dan Pengembangan	2 Hari 1 Jam 50 Menit



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Nama Izin	Waktu
	Perumahan	
26.	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	2 Hari 1 Jam 50 Menit
27.	Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah	2 Hari 2 Jam
28.	Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing)	1 Hari 1 Jam 10 Menit
29.	Izin Lokasi	2 hari 1 jam 50 Menit
30.	Izin Membuka Tanah	-
31.	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah	2 jam 30 menit
32.	Izin Lingkungan	4 Jam
33.	Izin Penyimpanan Sementara LB3 (Limbah Bahan Berbahaya Beracun)	4 Jam
34.	Izin Trayek Lokal	1 hari 1 Jam 45 Menit
35.	Analisa Dampak Lalu Lintas	3 hari 1 Jam 30 Menit
36.	Izin Usaha Simpan Pinjam	2 Hari 2 jam
37.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	55 Menit
38.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	2 hari 1 jam 50 Menit
39.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 Hari 2 Jam
40.	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat (IPPR)	2 hari 2 jam
41.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	2 Hari 2 Jam
32.	Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)	2 Hari 2 Jam
43.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	5 Hari 1 jam 50 Menit
44.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	55 Menit
45.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	2 Hari 1 Jam 50 Menit
46.	Izin Usaha Perikanan (IUP) Bidang Pembudidayaan Ikan	2 Hari 2 Jam
47.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	3 Hari 1 Jam 30 Menit
48.	Izin Usaha Pertanian	2 Hari 2 Jam
49.	Izin Usaha Produksi Bibit Ternak dan Pakan	2 Hari 2 Jam
50.	Izin Usaha Tempat Pemeliharaan Hewan	2 Hari 2 Jam
51.	Izin Rumah Sakit Hewan	2 Hari 2 Jam
52.	Izin Pasar Hewan	2 Hari 2 Jam
53.	Izin Rumah Potong Hewan	2 Hari 2 Jam
54.	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	2 Hari 2 Jam
55.	Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	2 Hari 2 Jam 10 Menit
56.	Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) Kecil dan Menengah	2 Hari 2 Jam
57.	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	2 Hari 2 Jam
58.	Izin Pengembangan Kawasan Industri (IPKI)	2 Hari 2 Jam
59.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	-
60.	Izin Penelitian	4 Jam
61.	Persetujuan Pembuatan Andalin	-
62.	Pendaftaran Izin	10 Menit
63.	Pencetakan Izin	10 Menit
64.	Penomoran Izin	5 Menit

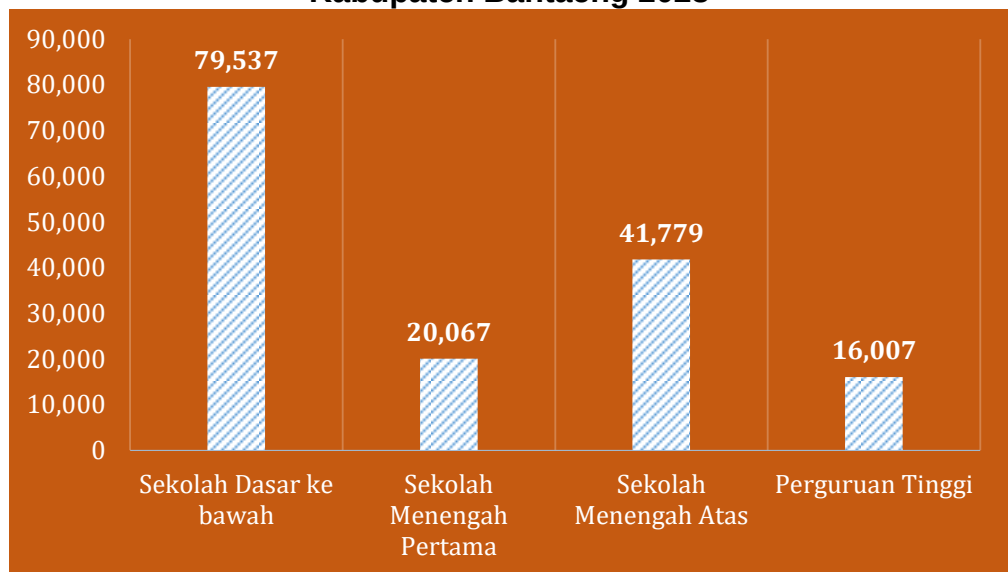
Sumber : Dinas PM dan PTSP



d. Aspek Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan usia kerja yang merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja baik sebagai angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja. Berdasarkan tabel di bawah, dapat dilihat bahwa kualitas penduduk usia kerjadi Kabupaten Bantaeng sampai dengan tahun 2023 ini didominasi penduduk dengan lulusan SD ke bawah (baik tidak sekolah maupun tidak lulus SD) yaitu berjumlah 79.537 Orang. Selain itu, penduduk yang sudah memiliki kualitas cukup memadai adalah penduduk yang memiliki pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi yakni sebanyak 16.007 orang. Jika melihat kondisi ini, maka perlu dilakukan berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan keterampilan kerja sebagai modal dalam persaingan pasar kerja.

Gambar II.29
Jumlah Penduduk Usia Kerja (15+ Tahun) menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Bantaeng 2023



Sumber : BPS Kabupaten Bantaeng, Tahun 2024

2.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Berikut indikator pembangunan daerah yang merupakan gambaran pembangunan Kabupaten Bantaeng berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan sebelumnya berdasarkan aspek pembangunan daerah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.



Tabel II.35
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023 (Permendagri 86 Tahun 2017)

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ASPEK KESEJAHTERAAN						
A	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI, SOSIAL SERTA BUDAYA DAN OLAAHRAGA						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	10,75	0,52	8,86	15,45	5,56
2	PDRB Per Kapita	Juta	46,84	45,68	50,79	60,57	62,78
3	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	%	9,03	8,95	9,41	9,07	9,18
4	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,98	4,27	4,07	2,72	3,71
5	Laju Inflasi (pendekatan dengan Bulukumba)	%	2,25	2,3	0,7	4,12	2,78
6	Indeks Gini	%	0,338	0,344	0,332	0,320	0,336
7	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	%	68,3	69,45	69,71	70,41	71,28
8	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	56	90,5	90,8	75,2	78,4
9	Penanganan daerah rawan pangan	Indeks	8	8	8	8	8
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	71,78	78,85*	70,71	73,14	75,58
11	Rasio penduduk yang bekerja	%	96,02	95,73	95,93	95,73	96,29
12	Angka melek huruf	%	85,91	86,21	84,82	86,34	86,65
13	Angka rata-rata lama sekolah	%	6,48	6,72	6,77	6,82	7,09
14	Harapan lama Sekolah	Tahun	12,03	12,04	12,05	12,3	12,53
15	Indeks Pendidikan	Indeks	55,02	55,84	56,4	56,87	58,44
16	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,42	72,15	72,2	72,46	72,67
17	Indeks Kesehatan	Indeks	77,57	80,23	80,31	80,71	81,03
18	Prevalensi balita gizi kurang	%	3,4	3,8	3,3	3,2	3,4
19	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	28,5	28,37	27,08	23,72	22,85
20	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	3,4	3,63	3,5	3,21	3,59
21	Kontribusi	%	7,7	6,91	9,76	18,47	17,27



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	Sektor Industri Pengolahan						
22	Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik	%	0,1	0,11	0,18	0,34	0,39
23	Kontribusi Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan	%	0,1	0,07	0,06	0,06	0,06
24	Kontribusi Sektor Konstruksi	%	17,8	17,79	18,3	16,83	17,71
25	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	%	15	14,65	14,25	13,52	13,95
26	Kontribusi SektorTransport asi dan Pergudangan	%	1,1	1,05	1,06	1,08	1,19
27	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	0,9	0,9	0,85	0,83	0,83
28	Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi	%	2,2	2,49	2,37	2,13	2,03
29	Kontribusi Sektor Jasa Keuangan	%	2,2	2,41	2,34	2,11	2
30	Kontribusi Sektor Real Estate	%	4,6	4,85	4,54	4,06	4,26
31	Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan	%	0,2	0,15	0,15	0,14	0,14
32	Kontribusi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	7	6,93	6,27	5,2	5,01
33	Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan	%	5	5,2	4,84	4,24	4,48
34	Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan	%	2,5	3	2,97	2,69	2,85
35	Kontribusi SektorJasa lainnya	%	1,6	1,49	1,48	1,38	1,37
36	Opini BPK terhadap hasil laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37	PDRB ADHB	milyar	8.781,04	8.970,48	10.081,40	12.164,14	12.753,90
38	PDRB ADHK	milyar	5.621,52	5.650,54	6.151,45	7.102,04	7.496,65



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
39	Paritas daya beli/ Pengeluaran Perkapita	Juta	11,592	11,632	11,829	12,133	12.340
40	Jumlah Penduduk	Jiwa	187,626	196,716	197,886	199,399	211,683
41	Pertumbuhan Penduduk	%	0,54	4,84	0,59	0,76	0,50
42	Penyelenggaraa n festival seni & budaya	Event	9	0	12	15	20
43	Sarana penyelenggaraa n seni dan budaya	Unit	4	4	4	4	4
44	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75,65	84	82,13	82,22	82,36
45	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	64,32	65,24*	67,51	69,43	70,21
46	Produksi sektor pertanian	Ton	91.702,00	73,405	69.880,00	70,388	72.688
II	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR						
1	PENDIDIKAN						
1	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	%	83,57	85,68	83,99	90,70	86,13
2	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	63,32	61,21	63,96	64,43	52,88
3	Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	%	42,64	30,60	49,10	46,17	19,34
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	97,24	102,35	102,35	100,66	100,70
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	95,39	100,69	99,98	97,44	86,27
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	96,45	102,14	112,48	111,94	114,02
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	90,43	93,99	97,06	96,75	74,18
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	114,72	100,69	110,36	111,9	100,69
9	Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	88,11	95,12	96,37	91,36	77,65
10	Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik	%	43,23	48,1	46,19	45,29	40,58



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
11	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,12	0	0,07	0,25	0
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	92,9	98,05	96,57	94,57	79,27
13	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,32	0	0,3	0,33	0,02
14	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	97,69	96,46	92,73	94,17	122,21
15	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	96,55	94,91	97,17	97,06	96,83
16	Jumlah kurikulum yang dikembangkan	Kurikulum	0,9	0,9*	1	1	1
17	Persentase tenaga pendidik dan kependidikan memenuhi standar	%	85,01	95,33	92,82	93,77	70,2
2	KESEHATAN						
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Rasio	1	5	2	0,6	0,3
2	Angka kelangsungan hidup bayi	%	100	100	100	0,6	0,3
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Rasio	2	0	0	0,9	0,3
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Rasio	6	15	5	4,5	0,3
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Rasio	2	3	2	91	97,3
6	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	1,81	1,94	2,44	23,4	21,8
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,004	0,004	0,009	0,009	0,009
9	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,0005	0,0003	0,0003	0,26	0,2
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0,002	0,002	0,006	0,34	0,46
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100
12	Cakupan pertolongan	%	98	100	100	100	105,9



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan						
13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	73,1	92,5	92,5	100	95,52
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	100,6	101	100	97,2	103,8
16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Rasio	0	0	0	0,009	0
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100	100
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100	100	100	100
19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	279	259	249	359	162
20	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	0	0	0	0	9,9
21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	90	89	100	100
22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	100	100	100	64	100
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
24	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	67,7	100
25	Angka kejadian Malaria	Kasus	-	-	-	0,1	0,1
26	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0	0	0
27	Proporsi anak	%	100	100	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat						
28	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	100	100	100	0,002	0,07
29	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100
30	Cakupan kunjungan bayi	%	99,3	99,3	100	100	100
31	Cakupan puskesmas	%	100	100	100	100	100
32	Cakupan pembantu puskesmas	%	100	100	100	28,35	28,35
33	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	92,7	94,1	100	100	99,7
34	Cakupan pelayanan nifas	%	96,9	102	100	100	105,7
35	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100
36	Cakupan pelayanan anak balita	%	63,7	78,1	100	100	99,1
37	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100
38	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	56,6	75,5	40,1	92,1	84,3
39	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100
40	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100
41	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
42	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100
43	Cakupan Sarana dan Prasarana yang Representatif	%	90	90	95	95	97
44	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Saranan Industri Rumah Tangga	%	90	90	100	100	100
45	Prevalensi Penyakit Menular Dapat di Tekan	%	95	100	100	100	100
46	Cakupan Saranan Pelayanan Memenuhi Standar	%	95	95	100	100	100
47	Cakupan Saranan Pelayanan kesehatan yang Representatif	%	90	90	100	100	100
48	Cakupan Obat dan Alkes terpenuhi di Sarana Pelayanan	%	90	90	100	100	100
49	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui yang Terlayani	%	100	100	100	100	100
50	Tercapainya prosentase sarana rumah sakit yang memadai	%	100	100	100	100	100
51	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	%	81	85	90	90	90
52	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM K	%	100	100	100	100	100
53	Persentase pemenuhan Farmasi, Alkes Dan Mamin	%	81	85	90	90	90
54	Persentase keberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	82	85	90	90	90
	RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu						
1	Cakupan Obat	%	90%	90%	100%	100%	100%



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	dan Alkes terpenuhi di Sarana Pelayanan						
2	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui yang Terlayani	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tercapainya prosentase sarana rumah sakit yang memadai	%	95,08%	97,97%	99,81%	100%	100%
4	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	%	95,50%	99,80%	99,40%	100%	100%
5	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM	%	99,85%	81,92%	93,50%	100%	100%
6	Persentase pemenuhan Farmasi, Alkes Dan Mamin	%	81	85	100	100	90
	RSUD BANYORANG						
1	Cakupan Obat dan Alkes Terpenuhi Di sarana Pelayanan	%	0	0	80,11	97	80,5
	Obat Vaksin		0	0	18,72%	0	0
	Alkes		0	0	97,45%	97,50	97,55
2	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil Dan Ibu Menyusui Yang Terlayani	%	0	0	72%	74	75
3	Tercapainya Presentase sarana rumah sakit yang memadai	%	0	0	73,47%	80	81,87
4	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan & upaya kesehatan Masyarakat	%	0	0	88,97%	89	89
5	Persentase peningkatan kapasitas SDM	%	0	0	26,02%	45	48
6	Persentase pemenuhan Farmasi, Alkes dan Mamin	%	0	0	55,02	57	59
3	PEKERJAAN UMUM						
1	Persentase	%	64,32	76	77	68	64



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	panjang jalan kondisi mantab (%)						
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	%	92	92,79	93,41	93,41	93,41
3	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	85	86	86	86,05	86,5
4	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	74	74,5	76	68	68,45
5	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	60	62	63	64	64,5
6	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	50	60	62	62	62
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	74	74,5	67	67,5	68
8	berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (Ha)	Ha	Na	Na	Na	Na	Na
9	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%	74	75	76	77	78
10	Prosentase Tersedianya 4 Layananan Data Infrastruktur	%	60	70	75	76	77
11	Prosentase Peningkatan Akuntabilitas kinerja	%	100	100	100	100	100
12	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak Jaringan Perpipaan (JP)	%	Na	85*	40	68	69,81
13	Persentase rumah tangga yang menempati	%	Na	Na	20	16	16



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	huniandengan akses air minum laya Jaringan Bukan Perpipaan (JBP)						
14	Prosentase rumah tangga yang memiliki layanan SPAL Domestik	%	Na	85*	77	78	79
15	Prosentase luas genangan yang tertangani	%	Na	85*	Na	85	85
16	Prosentase Pengurangan Kawasan Kumuh	%	0,04	0,02	0,03	0,01	0,01
17	Prosentase Bangunan Gedung Yang Memiliki IMB	%	Na	85*	Na	Na	Na
18	Prosentase Bangunan Gedung Yang Memiliki SLF	%	Na	Na	Na	Na	Na
19	Rasio Panjang Jalan Kabupaten yang mendukung kawasan Strategis	%	100	100	100	100	100
20	Cakupan Pengelolaan Sungai, Pantai dan Irigasi	%	90	90*	90	90	90
	PENATAAN RUANG						
21	Persentase luas RTH publik per luas wilayah kota	%	30	30	30	30	30
22	Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	%	30	30	30	40	40
23	Persentase bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB	%	75	75	75	75	75
24	Prosentase bangunan ber-IMB	%	6	6	6	7,5	9
25	Persentase Rencana Tata Ruang yang Di Tetapkan	%	30	30	30	40	40
4	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN						
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,142	0,143	0,145	0,145	145
2	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,993	0,997	0,912	0,916	916



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	60,64	61,4	62,5	62,84	68,44
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	4,33	6,16	8,82	10,6	10,6
5	Persentase pemukiman yang tertata	%	99,35	99,68	91,18	91,64	99,79
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,04	0,02	0,03	0,01	0,21
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	64,08	82,52	16,9	83,3	50,23
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	5,09	10,49	9,51	9,42	9,42
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	39,39	39,39	45,45	45,45	45,45
10	Jumlah wilayah perumahan/pemukiman sehat	%	33	33	33	92	92
11	Pemukiman yang tertata	%	99	99	2158,6	99,79	99,79
12	Persentase pemenuhan Perumahan	%	86	87*	2,44	87	87
13	Persentase pengelolaan kawasan Permukiman	%	86	87*	90	92	92
14	Persentase pengelolaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	%	86	87*	6,44	92	92
15	Persentase pemenuhan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	%	85	87*	90	92	92
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Org/RT	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
2	Tingkat penyelesaian	%	90	91,67	97,2	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan						
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	60,79	78,38	90,74	90.74	94,33
5	Persentase Penegakan PERDA	%	92,5	99,95	97,12	100	100
6	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100	100	100
7	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban	%	54	100	100	100	100
8	Terlaksananya dukungan kelancaran pemilihan umum	%	100	100	100	100	100
9	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100	100	100
10	Persentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban	%	100	100	100	100	100
11	Persentase anggota linmas yang dapat diberdayakan untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	%	61	0	80,23	0	0
12	Persentase kejadian gangguan keamanan Pemilu yang tertangani oleh Linmas	%	0	0	0	0	0
13	Persentase bencana kebakaran yang tertangani	%	100	100	100	100	100
14	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, kententraman,	%	90	91,67	97,2	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	dan Keindahan)						
15	Indeks Resiko Bencana	Indeks	107,73	107,73	102,20	105,96	105,96
16	Persentase bencana tertanggulangi	%	100	100	100	85,5	90
17	Persentase bidang dalam SKPD yang terlayani administrasi perkantoran	%	beda permenda gri	60*	60	60	100
18	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	beda permenda gri	60*	60	60	100
19	Persentase bencana kebakaran, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	%	beda permenda gri	60*	60	60	100
6	SOSIAL						
1	Jumlah Fasilitas umum yang ramah divabel	%	18	48	65	88.50	65
2	Jumlah Divabel yang menerima pelayanan	%	17	41	66	90.50	95,75
3	Jumlah anak terlantar yang di rehabilitasi	%	24	48	65	85.50	95,75
4	Jumlah Lajut Usia terlantar yang direhabilitasi	%	20	40	60	80.00	95
5	Jumlah gelandangan dan pengemis yang di rehabilitasi	%	18	41	63	85.50	95,5
6	Jumlah Korban bencana alam/ sosial yang di rehabilitasi	%	18	41	64	87.00	95,5
7	Jumlah keluarga MBR yang ditingkatkan kualitas SDMnya	%	18	41	64	87.00	95,5
8	Jumlah fakir miskin yang di tingkatkan kesejahteraannya	%	23	47	64	84.50	95,5
9	Peningkatan Kualitas pemeliharaan fasilitas Taman Makam Pahlawan, Peningkatan Kualitas Peringatan Hari-hari besar kepahlawanan,	%	18	41	64	87.00	95,5



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	Restorasi nilai-nilai kepahlawanan						
10	Prosentase Jaminan Sosial Keluarga	%	17	42	67	92.00	96
11	Persentase pelayanan kesejahteraan social	%	18	48	66	90.00	96
12	Persentase rehabilitasi dan pembinaan sosial pada anak	%	24	48	66	87.00	96
13	Persentase rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia	%	20	40	60	80.00	95
14	Persentase pembinaan dan rehabilitas korban sosial	%	18	40	62	84.00	95
15	Cakupan perlindungan korban bencana alam	%	18	41	64	87.00	95,5
16	Cakupan Ketersediaan rambu evakuasi dan papan informasi publik diwilayah berisiko bencana	-	3	10	15	21.00	15
17	Prosentase perlindungan dan jaminan sosial	%	60	60	60	80.00	95
18	Prosentase pemberdayaan sosial	%	60	60	60	80.00	95
19	Prosentase pelayanan rehabilitasi sosial	%	60	60	60	80.00	95
20	Prosentase penagnan korban bencana	%	60	60	60	80.00	95
21	Prosentase Kondisi TMP Baik	%	60	60	60	80.00	95
III	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR						
1	TENAGA KERJA						
1	Rasio angkatan kerja lulusan S1/S2/S3	Rasio	8,51%	7,32%	9,27%	3,70%	12,15%
2	Pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi	%	38,30%	29,70%	28,14%	0	0



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
3	Presentase Kegiatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	0	100%	50	100%	0
4	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	%	93,30%	48,67%	5,89%	87,85%	88,72%
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Nilai	95,31	95,78	95,76	95,35	95,37
2	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Nilai	80,27	80,26	81,20	80,21	Na
3	Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak (pratama, madya, nindya, utama, KLA)	Tingkat	Madya	Madya	Madya	Pratama	Pratama
4	persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	(27,7%) 10	(27,7%) 10	(18%) 6	(14%) 5	(14%) 5
5	jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan PUG	Desa/Kel	8	16	16	16	11
6	ratio perempuan & anak korban kekerasan termasuk TPPO	%	0,006	0,016	0,026	0,0076	9,34
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	Kasus	28	45	61	26	32
8	Cakupan keluarga yang mendapatkan layanan	Layanan	9	22	25	22	675
9	Cakupan PD yang mengelola Sistem data gender dan anak	%	92,7	97	25	97	97
10	Cakupan lembaga yang menyediakan layanan pemenuhan hak anak	%	5	20	20	97	97
11	Cakupan	%	72,9	76	76	61	61



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	lembaga yang melakukan PUG dan Pemberdayaan Perempuan						
3	PANGAN						
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	56	90,5	90,8	90,8	75,2
2	Konsumsi Energi (Kkal)	Kkal	1815	1822,3	1812,2	1812,2	1617,2
3	Sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan (sertifikat)	Sertifikat	1	14	2	2	5
4	Kategori Pengujian	Jenis	2	2	2	2	1
5	produk olahan pangan local	Produk	16	17	18	18	20
6	Cadangan beras pemerintah kabupaten	Ton	20	20	18,317,40	18.317.399	15.567.399
7	Analisis SKPG	Kecamatan	1	8	8	8	8
8	Rasio Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	Ton	56.263	57,388	57,962	58.513	45.029,783
9	Tersedianya Pangan local	Komoditi	7	7	7	7	4
10	Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan	Kecamatan	8	8	8	8	8
11	Stabilitas Harga pangan strategis (CV = Koefisien Keragaman)	Jumlah	CV 13,57	CV 12,53	CV 23,68	CV 23,68	CV 14,19
12	Terwujudnya swasembada dan stabilitas pangan di Kabupaten Bantaeng (3 ton/ha)	Ton/Ha	Na	3 Ton/Ha	13TON/Ha	1	1
13	Jumlah Desa yang Masuk dalam Kategori Mandiri Pangan	Desa	0	0	1	1	2
14	Terlaksananya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	%	99	100	100	100	100
15	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan	8	8	8	8	8
16	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan	penanganan	10	12	12	12	12



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
4	PERTANAHAN						
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	40,99	46,4*	58,11	28,85	32,18
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	50*	0	0	0
3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100*	100	100	100
4	Persentase sengketa tanah diselesaikan	%	72	76	42,9	100	100
5	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah dipenuhi	%	72	76	20	100	75
6	Persentase tanah kosong dikelola	%	72	76	0%	0	0
7	Persentase tanah ditata sesuai penggunaan	%	72	76	0%	0	0
5	LINGKUNGAN HIDUP						
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Nilai	76,35	83,14	60	56	68,57
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	µg/m3	94,72	94,11	94,38	95,61	94,76
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Nilai	73,47	29,33	32,55	32,55	40,72
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	85	80	90	19	75
8	Peningkatan	-	Na	0	0	0	0



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota						
9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100
11	Persentase kinerja pengelolaan persampahan	%	20,72	60,31	57,05	62	62,86
12	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	17,56	21,31	20,18	25,7	26,06
13	Persentase cakupan area pelayanan	%	3,54	3,54	3,9	3,9	3,9
14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	34,1	30,41	36,22	32,86	33,82
15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	%	75,22	75,22	75,22	75,52	73
16	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	80,71	67,91	67,91	66,91	73,08
17	Status pencemaran air sungai	Status	Cemar Ringan	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang
18	Status pencemaran udara	Status	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
19	Tutupan Lahan	Status	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
20	Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	Juta Ton	0,86	0,95*	1,04	1,13	1,22
21	Terintegrasinya RPPL dan KLHS dalam Rencana Pembangunan	%	90	100	100	100	100
22	Persentase kasus	%	90	100	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditangani						
23	Persentase RTH yang dikelola	%	11,48	12,25*	12,25	12,25	12,25
24	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	%	90	100	100	100	100
25	Proposrsi Limbah B3 yang diolah sesuai Prosedur	%	90	100	85	85	90
26	Persentase MHA terkait PPLH yang diakui	%	0	0	0	0	0
27	Persentase Lembaga Masyarakat Peduli Lingkungan	%	90	100	100	100	100
28	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	%	90	100	100	100	100
29	Persentase kinerja pengelolaan persampahan Kab. Bantaeng	%	20,72	60,31	57,05	62	62,86
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	93,32	99,42	100	97,77	98,99
2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	76,49	93,86	98,56	98,03	98,71
3	Rasio pasangan berakte nikah	%	12,8	14,18	15,2	52,51	53,72
4	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Dokumen	tersedia	tersedia*	Tersedia	tersedia	tersedia
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	KTP	Sudah	Sudah	Sudah	sudah	sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	93,32	99,42	100	97,77	98,99
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	76,49	93,86	98,56	98,03	98,71
8	% Terwujudnya Tertib Administrasi Pendaftaran penduduk	%	90	100	100	100	100
9	% Terwujudnya Tertib Administrasi pencatatan sipil	%	90	100	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
10	% Tersedianya Informasi Kependudukan yang lengkap, Akurat dan Up to date untuk Kepentingan Publik dan Pembangunan	%	90	100	100	100	100
11	Persentase profil kependudukan dikelola	%	90	100	100	100	100
7	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,54	0,53	0,51	0,59	0,50
2	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,4	2,03	1,75	2,12	1,99
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	100	100	100	100	100
4	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	74,63	72,77	72,61	72,33	72,66
5	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	%	41,7	50,31	36,14	36,16	37,77
6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,8	13,93	13,97	13,43	9,7
7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	6,53	8,6	11,22	12,38	73,12
8	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	83,89	60,86	56,76	56,78	56,86
9	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	87	68,78	60,72	60,74	60,92
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-	%	74,36	60,54	57,82	57,89	57,96



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	KB						
11	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	31	31	31	31	31
12	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	19	20	20	20	20
13	Penurunan Angka Kelahiran	%	5	5*	0,28	0,28	0,28
14	Penekanan Angka Kelahiran	%	5	5*	0,95	0,95	0,95
15	Prosentase partisipasi masyarakat dalam ketahanan keluarga	%	81	90*	22,25	22,25	22,25
8	PERHUBUNGAN						
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	642,8	387,483	262,9	315,36	273,51
2	Rasio izin trayek	Rasio	0	0,41	0,48	0,45	0,50
3	Jumlah Uji KIR angkutan umum	Trayek	2.808	1.796	2.054	1.453	1,443
4	Jumlah Pelabuhan Laut	Pelabuhan	1	1	1	1	1
5	Jumlah Terminal Bus Tipe B	Terminal	1	1	1	1	1
	Jumlah Terminal Bus Tipe C	Terminal	3	3	3	3	3
6	Persentase layanan angkutan darat	%	0,053	0,089	0,131	0,242	0,921
7	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	100	86	119	79,70	70,49
8	Pemasangan rambu – rambu	Jumlah	187	187	189	189	189
9	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,020	0,017	0,017	0,017	0,017
10	Jumlah orang terangkut angkutan umum	Orang	642800	387483	262900	315.360	273,51
11	Jumlah barang terangkut angkutan umum	Kg	3242000	3298160	3210320	3.204.000	2.188.080
12	Jumlah orang melalui dermaga :	Orang	201	544	445	450	550
13	Jumlah barang melalui dermaga :	Kg	285,11	801,55	308	661,6	104,1
14	Panjang jalan kondisi baik (Km)	Km	602159	602159	602159	602627	637878



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
15	Persentase Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang Terpasang dan Dalam Kondisi Baik	%	40%	60%	72,71%	66,55%	74,12%
16	Persentase Kelayakan Terminal Angkutan	%	40%	60%	80%	80%	70%
9	KOMUNIKASI DAN INFORMASI						
1	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Telah Terkoneksi Dengan Jaringan Internet	Spot	50/39	40	41	73	97
2	Penilaian Hasil evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik oleh PPID Pusat	Nilai	Peringkat 5 Besar tingkat Prov.	Peringkat 5 Besar Tk.Prov	Peringkat 1 Kategori Cukup Informatif Tk.Prov Sulsel	Tidak Informatif	Belum ada penilaian
3	Jumlah Ruang Publik dan OPD yang terkoneksi dengan jaringan internet	Lokasi	21	49	48	84	113
4	Persentase meningkatnya Pengetahuan dan Informasi Masyarakat	%	86	95	95	95	95
10	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
1	Persentase koperasi aktif	%	90	100	78,00%	80%	85%
2	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	90	100	16 (11%)	90	90
3	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	90	100	43 (30%)	33	33
4	Persentase Koperasi Dalam Keadaan Sehat	%	90	100	43 (30%)	33	33
5	Persentase Pendidikan dan Latihan bagi Koperasi	%	90	100	60%	47.8	47.8
6	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan	%	86	95	43 (30%)	33	33



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	terhadap Koperasi						
7	Persentase Pemberdayaan UMKM	%	86	95	110 UKM (100%)	28 UKM	28 UKM
8	Persentase Pengembangan UMKM	%	90	100	126 UKM (100%)	114 UKM	28 UKM
11	PENANAMAN MODAL						
1	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	11	10	5	12	4
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	3.5 Trilyun	2,75 Trilyun	905.185.668.130	1.712.690.900.900	938.849.977.620
3	Rasio daya serap tenaga kerja	%	21% (Kenaikan)	10*	27% (Kenaikan)	20%	27,50%
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Milyar	96% (Kenaikan)	700 Milyar	67% (Kenaikan)	-79%	34%
5	Nilai Investasi	Milyar	3.5 Trilyun	2,75 Trilyun	905.185.668.130	1.712.690.900.900	938.849.977.620
6	Jumlah fasilitasi kerjasama investasi antar pemerintah	Kesepa katan	3	1*	4	3	6
7	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Perusa haan	13	15*	19	12	29
8	Kajian pemetaan potensi sektor prioritas	Dokum en	0	2*	1	0	0
9	jumlah izin yang diterbitkan sesuai SOP	Izin	2263	6000*	3059	5631	7300
10	LPE PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	%	2.779,15	2.804,70	3.116,48	3.212,36	3.427,40
11	Kajian Pemetaan Potensi Sektor Prioritas, Profil Proyek yang siap Ditawarkan	%	0	80	50%	0	0
12	Jumlah Minat Investasi	%	61%	80	82%	84	84
13	jumlah izin yg diterbitkan sesuai SOP	%	100%	80	100%	100%	100%
14	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	0	80	11%	29%	76%
15	Cakupan Jumlah Izin yg diterbitkan	%	100%	80	100%	100%	100%



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
12	PEMUDA DAN OLAHRAGA						
1	Persentase wirausaha muda	%	Na	10%	10,33 %	12,20 %	14,15%
2	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	57	55	85	161	161
3	Cakupan pembinaan atlet muda	%	618	310	315	309	309
4	Jumlah atlet berprestasi	Orang	128	50	75	161	250
5	Jumlah prestasi olahraga	Orang	71	55	90	88	88
6	Terlaksananya fasilitas kegiatan pelatihan kepemudaan setiap tahun	Kegiatan	2	6	12	75	75
7	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	117	121	124	126	130
8	Jumlah Prasarana olahraga masyarakat dan pendidikan	Bangunan	27	31	33	33	33
9	% organisasi kepemudaan aktif	%	72%	80*	80%	80%	41%
10	Ratio prestasi olahraga pendidikan, olahraga unggulan dan olahraga rekreasi yang berprestasi ditingkat provinsi dan nasional	%	72%	80*	80%	80%	80%
11	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keprmuksaan	Kegiatan	0%	50 Kali	50 Kali	50 Kali	50 Kali
13	STATISTIK						
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Dokumen	Tersedia	Tersedia*	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Buku "PDRB Kabupaten Bantaeng"	Dokumen	Tersedia	Tersedia*	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Persentase tersedianya Data Statistik Daerah Yang Lengkap Dan Akurat	%	72%	80*	50%	40%	40%
14	PERSANDIAN						
1	Jumlah berita sandi yang diamankan	Dokumen	965	540*	1325	1182	1088
15	KEBUDAYAAN						
1	Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	%	92	92	94,74	95	95



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
2	Nilai Sejarah dan Karya Budaya yang dilaktualisasikan ke dalam Masyarakat	%	100	100	100	100	100
3	Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100
4	Persentase kebudayaan dikembangkan	%	72	80*	100	100	100
5	Persentase kesenian tradisional dilestarikan	%	72	80*	100	100	100
6	Persentase cagar budaya dikelola	%	72	80*	100	100	100
7	Persentase museum dikelola	%	72	80*	100	100	100
16	PERPUSTAKAAN						
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	90	80	90	90	90
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp	25	25,5	26	26	26
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Unit	1	1	1	1	1
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/ tahun	Org	8,697	9	9,8	9,9	4,1
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	9,533	10,915	10.924	10,924	10.934
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Org	1	1	1	1	1
7	Terlaksananya Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	75	80	85	90	90
17	ARSIP						
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	40	40	40	40	75
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiata n	4	4	4	4	4
3	SKPD yang melakukan Pengelolaan Administrasi Kearsipan Yang	%	6	6	6	85	85



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	Baik						
4	Jumlah Dokumen / Arsip Yang Bernilai Guna	%	136	136	491	95	95
5	Sarana dan Prasana Kearsipan dalam Kondisi Baik	%	5	5	5	80	80
6	Penggunaan Layanan Informasi Kearsipan	%	32	32	32	80	80
7	Bertambahnya Tenaga Kearsipan Yang Profesional	%	4	4	4	90	90
8	Persentase arsip dikelola	%	75	80	40	90	90
9	Persentase dokumen kearsipan diamankan	%	70	80	75	90	90
10	Persentase izin penggunaan arsip tercatat	%	70	80	70	90	90
	URUSAN PILIHAN						
1	PARIWISATA						
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	87,626	90.000*	70,687	259030	264289
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	240	250*	193	1,75	1,3
3	PAD sektor pariwisata	Juta Rp	765,81	612,65*	682,56	2.920.000.000	2.540.000.000
4	Persentase Kegiatan pada Program Pengembangan Desitinasi Pariwisata	%	16,67	17*	8	10	9
5	Persentase Kegiatan pada Program Kemitraan Pariwisata	%	11,11	20*	8	10	9
6	Jumlah objek wisata yang berdaya saing	Objek	2,7	3*	3	3	3
7	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	na	65.480*	70,687	259030	264289
8	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia / Kepariwisataaan	Kegiat an	4,5	5*	280	350	421
9	Rata-rata Lama Kunjungan	Hari	3,12	1,27	1,45	1,75	1,3
2	PERTANIAN						
1	Kontribusi sektor	%	28,53	28,37	28,94	23,72	22,85



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	pertanian/perkebunan terhadap PDRB						
2	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	2,91	2,93	2,32	2,32	2,32
3	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	950	1140	1161	0,24	0,24
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	113,68	113,68	113,68	54,38	52,58
5	Cakupan bina kelompok petani	-	950	1140	1161	725	410
6	LPE Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	4,54	5,24	2,84	0,35	0,35
7	Meningkatnya Produktifitas komoditas pertanian/perkebunan di Kabupaten Bantaeng (55 Ku/ha)	Ku/Ha	55	54	53,16	54,38	52,58
8	Terwujudnya ternak yang sehat dan bebas dari penyakit (90%)	%	90	91,24	92,25	56	29
9	Meningkatnya Populasi Ternak di Kabupaten Bantaeng (20%)	%	30	32	33	63	33
10	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Usaha Pertanian/Perkebunan yang berorientasi teknologi (10%)	%	25	30	25	46	24
11	Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing SDM Penyuluh Pertanian/Perkebunan (80%)	%	75	82	85,25	23,19	29,59
12	Meningkatnya Kemandirian dan Kapabilitas Petani (80%)	%	75,25	79,64	80,63	64,02	20
13	Meningkatnya Pangsa Pasar Produk Unggulan Pertanian/Perkebunan (30%)	%	28	34,25	39,71	41	44
14	Meningkatnya jaringan pemasaran hasil	%	28,32	34,25	39,71	39	39



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	produksi peternakan (30%)						
15	LPE subsektor pertanian tanaman pangan	%	1,01	1,01	1,18	0,28	0,28
16	Produktivitas Pertanian Per Hektar/Tahun	%	78,62	78,62	79,68	54,38	54,38
17	% Pembangunan Prasarana Pertanian	%	73,24	73,24	74,65	70	30
18	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang diberikan	%	68,45	68,45	69,36	70	75
19	% Penurunan Kejadian dan Jumlah kasus Penyakit Hewan Menular	%	78,36	78,36	79,84	0,05	0,1165
20	% Pengendalian Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Pertanian	%	77,93	77,93	78,64	38,26	38,26
21	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	%	79,26	79,26	78,64	0,021	0,021
22	Penerbitan Izin Usaha Pertanian	%	56	56	56	59	134
3	KEHUTANAN						
1	Luas Kawasan Hutan	Ha	5787	5787	5,787	5,787	5,787
2	Luas Hutan lindung	Ha	2731	2731	2,731	2,731	2,731
3	Luas Hutan Produksi terbatas	Ha	996	996	996	996	996
4	Luas Hutan Produksi biasa	Ha	2060	2060	2,06	2,06	2,06
5	Luas Hutan rakyat	Ha	na	na	na	na	Na
6	Luas Hutan kota	Ha	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
4	ENERGI DAN SDM						
1	Jumlah pelanggan pengguna listrik						
2	Rumah Tangga I	Pelang gan	46,631	49,086	52,185	54,443	57,51
3	Bisnis (B)	Pelang gan	1,776	2,159	2,606	3,054	3,544
4	Sosial (S)	Pelang gan	1,095	1,143	1,212	1,269	1,328
5	Pemerintah (P)	Pelang gan	445	485	516	531	546
6	Industri (I)	Pelang gan	13	15	18	20	24
5	PERDAGANGAN						
1	Ekspor Bersih	Rp	Na	na	na	na	na



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	Perdagangan						
2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	15	14,65	14,25	13,52	Na
3	Pasar Tradisional	Unit	na	na	0	Na	Na
4	Pasar Swalayan/ Supermarket/ Toserba	Unit	Na	Na	6	Na	Na
5	Persentase Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	%	Na	100	147 Rekomendasi (65%)	Na	Na
6	Persentase Sarana Perdagangan dalam Kondisi Baik	%	Na	85	86	86	Na
7	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	Na	85	12 Barang (85%)	35 Barang Pokok	35 Barang Pokok
8	Pengembangan Ekspor	%	Na	85	0%	Na	Na
9	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	%	Na	85	50 UTTP (6%)	`	Na
10	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	%	Na	85	0%	50,43	22,24
11	Laju pertumbuhan ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan speeda motor	%	10,7	-2,4	7,33	9,54	4,99
6	PERINDUSTRIAN						
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	7,7	6,91	9,76	18,47	17,27%
2	Persentase perencanaan dan Pembangunan Industri	%	77	85*	42,60%	6,84%	3,70%
3	Persentase Izin Usaha Industri tercatat	%	77	85*	0,44%	24,50%	2,91%
4	Persentase Informasi Industri Nasional	%	77	85*	0,20%	6,40%	3,70%
5	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Industri Pengolahan	%	68,8	-9,5	43,76	122,89	1.465,04
7	KELAUTAN DAN PERIKANAN						



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi perikanan	Ton	83,195	107.651	86,719	116,033,40	66,316
2	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	5.568,30	19,029	6.256,40	6.382,40	4.951,60
3	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	77.626,80	261.355	80,388	89,37	61.366
4	Konsumsi ikan	%	42,63	47,7	43,67	38,73	29,05
5	Cakupan bina kelompok nelayan	%	100	100	44,04%	84	97
6	Cakupan bina kelompok Pembudidaya	%	15,45	19,69	5,40%	175	175
7	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	42,9	57,4	2755,3	3.157,05	2.665,69
8	Jumlah Kelompok nelayan yang terlatih dan bersertifikat, jumlah kelompok pelaku usaha perikanan berbadan hukum/ koperasi/ SKT	Poktan	60	100	69	84	97
9	Jumlah pelaku usaha perikanan taat hukum	Orang	600	01:00	2026	4.029	4.273
10	Jumlah kelompok pelaku usaha yang mampu bankable	Kelompok	60	100	154	100	102
11	Tersedianya data base perikanan	Database	1	1	1	1	1
12	jumlah produksi olahan konsumsi	%	12,08	12,94	75,11	17,4	278
13	rata-rata pendapatan pembudidaya rumput laut	Rp	43.470.000	47.250.000	54.000.000	56.000.000	60.000.000
14	LPE subsektor perikanan	%	7,18	5	6	6	6
15	Jumlah kelompok pengawasan yang dibina (kelompok)	Kelompok	3,6	4	13	13	13
	LAYANAN URUSAN PENUNJANG						
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada*	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen	Ada/Tidak	Ada	Ada*	Ada	Ada	Ada



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKAD A						
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada*	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada*	Ada	Ada	Ada
5	Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat	1	1	1	1	1
6	Persentase Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Rata –rata Pencapaian Indikator Sasaran Peringkat Daerah	%	98,52	94,04%	94,04%*	94,04%	94,04%
8	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Predikat	B (61,72)	B	B*	B	B
9	Indeks Reformasi Birokrasi (penilaian mandiri)	Predikat	C	C	C*	C	CC
10	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah tepat waktu	%	90	100	100	100	100
11	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program	%	90	100	100	100	100
12	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	90	100	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
2	KEUANGAN						
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP*	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	%	100	100	100	100	100
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%			1,18		
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%			100		
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%			25,95	28	27,87
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	%			25,91	25	24,07
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%					
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	-			0,05		
9	Penetapan APBD	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
10	Jumlah Kasus Korupsi	Kasus	0	0	0	na	na
11	Meningkatnya rata-rata PAD setiap tahun	%		97	10,45	10,45	76,5
12	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	%		90	88,66	88,66	88,66
13	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		90	100	100	100
14	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	%		90	89,18	89,18	89,18
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,04 %	6,25 %	7,8 %	3,66 %	1,66 %
3	Persentase Pejabat ASN	%	6,68 %	6,76 %	7,24 %	11,06 %	2,44 %



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tructural						
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	33 Orang	34 Orang	33 Orang	33 Orang	33 Orang
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	146 Jabatan	680 Jabatan	474 Jabatan	453 Jabatan	453 Jabatan
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2018 Orang	2105 Orang	2560 Orang	2170 Orang	2204 Orang
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (penilaian mandiri)	Indeks	Terstandarisasi	Terstandarisasi	Terintegrasi dan Terukur	Terintegrasi dan Terukur	Terintegrasi dan Terukur
8	Persentase aparatur yang di bina dan dikembangkan	%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase pegawai yang memiliki Sertifikat diklat peningkatan kompetensi	%	48,91 %	52,60 %	65,69%	58,42 %	66,68 %
10	Persentase PNS yang mendapat melanjutkan pendidikan	%	3,27 %	6,07 %	6,59%	0,56 %	1,15 %
11	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian daerah	%	81%	85%	90%	90%	90%
12	Persentase sumber daya manusia yang telah mengikuti peningkatan komepetensi	%	63,79 %	68,87 %	78,06%	56,30 %	57,41 %
4	PENGAWASAN						
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	96,27	96,25	97,67	91,95	91,56
2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0	0	205	78
3	Persentase pengawasan	%	90*	90*	93,7	96,96	64,62
4	Persentase Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	%	90*	90*	97,6	96%	51%
5	Jumlah Temuan	Kasus	15	9	17	15	17



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	BPK						
5	SEKRETARIAT DEWAN						
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	5	5	5	5	5
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	5	5	5	5	5
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Dokumen	5	5	5	5	5
4	Jumlah rancangan perda yang ditetapkan bersama (Legislatif dan Eksekutif)	Perda	9	12	13	12	12
5	Persentase Layanan Anggota DPRD	%	100	100	100	100	100
6	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1	Presentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan	%	62,5	75	83,33	87	88



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
2	Prosentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah	%	30	40	50	60	70
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	908,573	1.043.060	954,57	993.386	999.287
2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	na	Na	427,088	450.000	456.000
3	Jumlah kriminalitas	kasus	270	118	132	127	110

Tabel II.36
Capaian Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2023

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2020	2021	2022	2023
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	96,98	80,59	92,39	6,715 (78,99)
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	116,24	100,22	118,67	20.541 (99,99)
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	93,99	99,39	84,18	93,99
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	22,26	98,39	99,88	31,34
b) Kesehatan						
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	15	15	0,16	15
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	1	1	50	1
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	107,21%	100%	100	118
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	102,22%	100%	100	116
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	104,58%	100%	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	78,13%	100%	100	100
7	Persentase anak usia	%	78,39%	100%	100	40,14



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2020	2021	2022	2023
	pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	44,87%	65,30%	81,19	58,62
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	58,71%	100%	100	94,18
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100%	100%	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100%	100%	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100%	100%	100	100
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	51,83%	91,82%	91,82	51,83
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	41,21%	82,72%	82,71	41,21
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	9,11%	86%	86,85	9,11
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	90,53%	83,50%	84,64	90,53
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	69,17%	83%	67.632	69,17
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100%	100%	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	65%	76,25%	69,01	65
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	45%	90%	90,74	45
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100%	100%	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2020	2021	2022	2023
d) Perumahan Rakyat						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	3,15%	0,04%	0,04%	0,04%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	0%	0,05%	0,07%	0,085%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	24,98%	16,90	43,50	50,23
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	0	37,50	37,25	37,15
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	36,38%	45,45	45,45	45,45
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	91,67%	100,00%	100%	100%
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	36,36%	100,00%	100%	100%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	0	132.084	202,482	0
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	49.334	189496	0
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	0	102	377	0
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15 menit	5.52 menit	9,96 menit	9,50
f) Sosial						
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100%	100,00%	100%	100%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100%	100,00%	100%	100%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Tenaga Kerja						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0%	100%	100%	100%
2	Persentase Tenaga Kerja	%	18,14%	28,14%	38,92%	94,24%



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2020	2021	2022	2023
	Bersertifikal Kompetensi					
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	1597,72%	21,95%	102,50%	102,50%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	3,30%	60%	55,38%	55,38%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	48,67%	82,02%	24,06%	50,60%
g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	84%	59,95%	36,34%	84
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,09%	0,053%	0,30%	0,09
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	19,60%	0,026%	0,01%	19,60
h) Pangan						
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	508%	0	413,20%	508
i) Pertanian						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100%	100	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100%	62,19	60	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100%	100	100	100
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanab Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0%	4,38	100	0
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0%	0	100	0
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	60%	100	100	60
j) Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	-	82,56	67,91	66,91	82,56
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	91,60%	95,86%	97,64%	91,60
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah	%	0%	30%	99,95%	0



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2020	2021	2022	2023
	Daerah Kab/Kota					
	k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	perekaman KTP elektronik	%	99,37%	99,58%	97,77%	99,37
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	15,56%	38,98%	41,87%	15,56
3	kepemilikan akta kelahiran	%	94,63%	99,31%	99,00	94,63
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian Kerjasama	%	16,22%	7	20,00%	16,22
	l) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	0%	0%	0%	0
2	Persentase peningkatan satatus desa mandiri'	%	66,66%	40%	50%	66,66
	m) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana					
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		59,92	1,71	1,67	59,92
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	86%	72,61	70,57	86
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	NA	13,97	16,82	0
	n) Perhubungan					
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	-	178	178,75	178,75	178,75
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	-	33,69%	0,65%	0,65	0,65
	o) Komunikasi dan Informatika					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	84%	82%	82%	82%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100%	100%	100	100
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	0%	100%	100	100
	p) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	30,81%	30%	31%	32%
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	1,42%	1,54%	1,00%	1,00%
	q) Penanaman Modal					
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	4,90%	22,6%	89,10%	64,20%
	r) Kepemudaan dan Olahraga					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,26%	13,21	14,38	0,26
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,37%	0,85	0,88	0,37
3	Peningkatan prestasi olahraga	medali	17	15	3	17



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2020	2021	2022	2023
s) Statistik						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100%	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100%	100%	100	100
t) Persandian						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	4,10%	81,80%	87	4,10
u) Kebudayaan						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	42,68%	100	52,44	42,68
v) Perpustakaan						
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	-	tdk ada survey	90	92	98
2	Indeks Pcmbangunan Literasi Masyarakat	-	0%	85	85	71
w) Kearsipan						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	442	405	500	520
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	Tidak Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan
Urusan Pilihan						
a) Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	92,536 ton	92.835,43	101,17	92.536
b) Pariwisata						
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-1%	600%	-78,57%	766,67%
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	-22,70%	182,96%	35,14%	-88,40%
3	Tingkat hunian akomodasi	%	9123,71%	11,03%	89,17%	9123,71
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,80%	0,85%	0,83%	0,80
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0	70,40%	1,66%	3,29%
c) Pertanian						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	5784,78%	5817%	5865%	5865%
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0,33%	0,44%	47.945.205	11,65%
d) Kehutanan						
e) Energi dan Sumber Daya Mineral						
1	Persentase perusahaan	%	0%	0	100	0



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2020	2021	2022	2023
	pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota					
f) Perdagangan						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	95,02%	78%	7,0%	95,02
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	30,84%	71%	23,00%	30,84
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	1,30%	8%	9%	1,30
g) Perindustrian						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	0,17%	30,11%	6,84%	0,41%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	0%	0%	0%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100%	100,00%	100,00%	24,50%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0%	0%	0%	0%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	0%	0%	0%	0%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
h) Transmigrasi						
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	-	0	0	0	0
a) Perencanaan dan Keuangan						
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	%	34,39%	12%	304.671.088	34,39
2	Rasio PAD	%	1.822.990.24%	12%	173.508.879	85,24
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	level 3	level 3	level 3	level 3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	level 2	level 3	level 3	level 2
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	83,78%	65%	716.962.011	83,78
6	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP
b) Pengadaan						
1	Persentase jumlah total proyek	%	0%	0%	0%	0%



No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi			
			2020	2021	2022	2023
	konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama					
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	6,53%	0,14%	9,45%	14,94%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	100,01%	26%	10906%	27,66%
c) Kepegawaian						
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	329%	274,06%	329,48%	400
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	ASN	5,33%	8,31%	21,74%	10
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	98,13%	30,86%	34,67%	100
d) Manajemen Keuangan						
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	121,77%	86%	646.358.676	100
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%		66%	529.654.012	100
3	Manajemen Aset	-	Ya	ya	100	Ya
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	0,12%	1,20%	11.693.838	0
e) Transparansi dan Partisipasi Publik						
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	102,15%	100%	72.731.685	100
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	83,33%	100%	100	100

2.3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya harus memiliki validitas dan akurasi serta ketepatan waktu sehingga setiap data dan informasi yang dikembangkan sebagai analisis dan evaluasi pembangunan menjadi relevan. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat



segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Evaluasi pembangunan daerah pada periode sebelumnya yang menjadi dasar perumusan perencanaan pembangunan tahunan adalah evaluasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan melalui indikator kinerjanya (outcome). Indikator kinerja yang dimaksud adalah variabel untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023. Selanjutnya, indikator kinerja inilah yang menjadi ujung tombak dalam evaluasi pembangunan daerah sekaligus penentu apakah pencapaian tujuan pembangunan daerah berhasil atau tidak.

Jika dibandingkan dengan target Rencana Kerja OPD, maka masih terdapat perangkat daerah dengan daya serap yang Sangat Rendah sebanyak 18 OPD dan berstatus Rendah sebanyak 2 OPD. Kondisi ini perlu diperhatikan sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasinya di masa mendatang. Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis OPD, maka pencapaian kinerja anggaran juga belum optimal dimana pencapaian kinerja anggaran masih banyak yang Sangat Rendah (15 OPD) dan Rendah (3 OPD). Berikut rincian tabel pencapaian kinerja anggaran pada masing-masing perangkat daerah.



Tabel II.37
Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Kabupaten Bantaeng Tahun 2023

No	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu dan Realisasi Anggaran 2023			
		Target Renja OPD	Realisasi	%	Predikat Kinerja Anggaran
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	310.674.492.832	109.408.691.220	35,22	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	119.770..306.552	34.561.205.815	28,86	Sangat Rendah
3	RSUD				
	RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu	118.194.661.932	57.109.047.722	48,32	Sangat Rendah
	RSUD Banyorang		4.650.237.216		
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	138.410.474.611	134.340.913.959	97,06	Sangat Tinggi
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.974.316.356	1.938.852.681	32,45	Sangat Rendah
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.191.450.570	9.690.197.600	95,08	Sangat Tinggi
7	Dinas Sosial	5.287.177.106	1.675.988.160	31,70	Sangat Rendah
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10.617.794.198	6.420.041.717	60,46	Rendah
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.452.039.061	8.729.144.662	92,35	Sangat Tinggi
10	Dinas Ketahanan Pangan	2.943.657.425	2.348.343.106	79,78	Tinggi
11	Dinas Lingkungan Hidup	12.556.290.850	5.347.612.783	42,59	Sangat Rendah
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.422.881.140	1.502.371.568	23,39	Sangat Rendah
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.093.059.450			
14	Dinas Perhubungan	6.462.560.389	2.210.586.145	34,21	Sangat Rendah
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7.248.625.561	6.231.641.954	85,97	Tinggi
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	7.217.830.487	2.224.770.277	30,82	Sangat Rendah
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.190.838.180	5.751.605.811	79,99	Tinggi
18	Dinas Pemuda Olahraga	9.029.420.001	3.029.125.280	33,55	Sangat Rendah
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.853.846.596			
20	Dinas Perikanan dan Kelautan	4.910.967.935	1.283.590.016	26,14	Sangat Rendah
21	Dinas Pariwisata	6.291.620.525	4.858.040.496	77,21	Tinggi



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu dan Realisasi Anggaran 2023			
		Target Renja OPD	Realisasi	%	Predikat Kinerja Anggaran
22	Dinas Pertanian	27.246.491.462	20.767.490.616	76,22	Tinggi
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.959.005.527	442.217.735	5,56	Sangat Rendah
24	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	14.964.187.275	41.138.289.886	274,91	Sangat Tinggi
25	Bappeda	6.850.881.176	2.882.897.493	42,08	Sangat Rendah
26	Badan Pengelola Keuangan Daerah	122.850.427.596	108.801.186.832	88,56	Tinggi
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.649.448.235	6.592.594.153	180,65	Sangat Tinggi
28	Sekretariat DPRD	27.162.743.190	6.245.866.206	22,99	Sangat Rendah
29	Sekretariat Daerah	43.195.896.225	22.915.681.030	53,05	Rendah
30	Inspektorat Daerah	9.447.634.072	9.021.129.415	95,49	Sangat Tinggi
31	Kecamatan Bantaeng	9.415.470.754	1.833.235.597	19,47	Sangat Rendah
32	Kecamatan Bissappu	8.155.282.940	2.819.028.066	34,57	Sangat Rendah
33	Kecamatan Tompobulu	4.849.961.535	13.431.939.652	276,95	Sangat Tinggi
34	Kecamatan Uluere	1.571.094.705	646.235.747	41,13	Sangat Rendah
35	Kecamatan Sinoa	1.658.629.075	1.658.629.075	100,00	Sangat Tinggi
36	Kecamatan Eremerasa	2.407.134.208	2.235.786.800	92,88	Sangat Tinggi
37	Kecamatan Pa'jukukang	1.901.746.460	1.901.746.460	100,00	Sangat Tinggi
38	Kecamatan GT Keke	3.415.458.778	790.573.151	23,15	Sangat Rendah



Tabel II.38
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (Renstra)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2023

No	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah		Target dan Realisasi Anggaran			
		Program	Kegiatan	Target Renstra OPD	Realisasi	%	Predikat Kinerja Anggaran
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	19	587.138.383.134	109.408.691.220	18,63	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	5	11	119.770.306.552	34.561.205.815	28,86	Sangat Rendah
3	RSUD						
	RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu	2	5	124.197.510.025	166.247.094.502	133,86	Sangat Tinggi
	RSUD Banyorang	3	7	13.778.862.500	4.650.237.216	33,75	Sangat Rendah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	21	230.650.163.810	134.033.453.114	58,11	Rendah
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9	20	16.057.950.000	14.497.607.383	90,28	Sangat Tinggi
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	16	34.081.803.035	26.097.054.596	76,57	Tinggi
7	Dinas Sosial	7	16	19.324.212.638	11.025.062.857	57,05	Rendah
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	6	14	13.538.270.000	19.761.037.865	145,96	Sangat Tinggi
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	14	32.473.409.549	22.168.875.939	68,27	Sedang
10	Dinas Ketahanan Pangan	5	14	21.807.378.285	7.969.450.936	36,54	Sangat Rendah
11	Dinas Lingkungan Hidup	11		51.287.866.667	31.654.953.721	61,72	Rendah
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	20	15.394.491.336	10.226.992.047	66,43	Sedang
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	10	6.806.693.233			
14	Dinas Perhubungan		12	8.848.702.647	2.210.586.145	24,98	Sangat Rendah



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

No	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah		Target dan Realisasi Anggaran			
		Program	Kegiatan	Target Renstra OPD	Realisasi	%	Predikat Kinerja Anggaran
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	14	68.121.573.125	6.231.641.954	9,15	Sangat Rendah
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	14	34	25.576.130.000	2.224.770.277	8,70	Sangat Rendah
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6	53	42.789.000.000	5.751.605.811	13,44	Sangat Rendah
18	Dinas Pemuda Olahraga			637.044.260.000	8.346.041.011	1,31	Sangat Rendah
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4					
20	Dinas Perikanan dan Kelautan	6	22				
21	Dinas Pariwisata	4	13	14.129.866.772	29.644.859.634	209,80	Sangat Tinggi
22	Dinas Pertanian	7	20	6.976.586.781	72.835.552.040	1044,00	Sangat Tinggi
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	25.738.592.329	442.217.735	1,72	Sangat Rendah
24	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	1	13	13.135.200.000	41.138.289.886	313,19	Sangat Tinggi
25	Bappeda	4		35.779.802.500	2.882.897.493	8,06	Sangat Rendah
26	Badan Pengelola Keuangan Daerah	4		3.712.535.767.626	225.182.863.386	6,07	Sangat Rendah
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	12	17	37.722.573.800	6.592.594.153	17,48	Sangat Rendah
28	Sekretariat DPRD	2	13	85.610.618.000	80.565.619.902	94,11	Sangat Tinggi
29	Sekretariat Daerah	3	20		73.580.606.798		
30	Inspektorat	3	11	10.833.951.696	38.276.202.020	353,30	Sangat Tinggi
31	Kecamatan Bantaeng	4	10	9.731.586.000	1.833.235.597	18,84	Sangat Rendah
32	Kecamatan Bissappu	7	13	28.219.844.493	2.819.028.066	9,99	Sangat Rendah
33	Kecamatan Tompobulu	5	10	17.606.144.680	13.431.939.652	76,29	Tinggi
34	Kecamatan Uluere	4	8	1.647.719.730	2.293.833.127	139,21	Sangat Tinggi
35	Kecamatan Sinoa	5	9	1.980.495.864	1.658.629.075	83,75	Tinggi



No	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah		Target dan Realisasi Anggaran			
		Program	Kegiatan	Target Renstra OPD	Realisasi	%	Predikat Kinerja Anggaran
36	Kecamatan Eremerasa	3	9	2.624.204.718	2.235.786.800	85,20	Tinggi
37	Kecamatan Pa'jukukang	5	11	2.523.737.500	1.901.746.460	75,35	Tinggi
38	Kecamatan GT Keke	5	11	4.656.619.900	4.368.615.110	93,82	Sangat Tinggi

Tabel II.39
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (Evaluasi RKPD 2023)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 (masuk lampiran)



2.4. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pada dasarnya, target dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal adalah 100 persen di setiap jenis pelayanan yang dilaksanakan. Pada sebagian besar jenis pelayanan sudah dilaksanakan hingga memiliki capaian Sangat Tinggi, namun masih terdapat pula sedikit indikator dengan capaian Sangat Rendah. Kondisi ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, khususnya pelayanan minimal yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundangan. Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bantaeng disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.40
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 – 2023 (Permendagri No. 59/2021)

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan Dasar						
1,1	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	95,35	96,92	99,99	99,38	100
1,2	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	-					
	Literasi SD		NA	NA	32,57	34,75	43,37
	Literasi SMP		NA	NA	52,61	54,56	55,18
2	Pendidikan kesetaraan						
2,1	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	22,26	31,34	99,88	100
2,2	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil	-					



No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Asesmen Nasional						
	Literasi Setara SD		NA	NA	32,57	34,75	43,37
	Literasi Setara SMP		NA	NA	52,61	54,56	55,18
3	Pendidikan Anak Usia Dini						
3,1	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	44,60	74,78	78,99	87,08	100

Tabel II.41
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 – 2023 (Permendagri No. 59/2021)

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	92,72	98,13	118	100	99,67
2	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	98,47	102	116	100	105,94
3	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	101,34	105	100	100	110,57
4	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	55,45	78	100	100	108,88
5	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	39,45	78	40,14	100	99,49
6	Jumlah warga negara usia produktif mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	29,00	45	58,62	81,19	97,49
7	Jumlah warga negara usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	39,18	59	94,18	100	97,22
8	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	99,59
9	Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapat pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	101,88
10	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	84,21
11	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	116,61	100	100	100	102,26
12	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100



Tabel II.42
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Bantaeng, 2019 – 2023 (Permendagri No. 59/2021)

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	78,00	80,90	83,50	84,65	86,00
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	55,20	56,00	57,17	67,57	68,00

Tabel II.43
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pemukiman dan Perumahan
Kabupaten Bantaeng, 2019 – 2023 (Permendagri No. 59/2021)

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	100	100	100	100
2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100	100	100	100	100

Tabel II.44
SPM Urusan Ketentramandan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantaeng, 2019 – 2023 (Permendagri No. 59/2021)

No.	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	11,3	6,05	0,6	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	3,59	3,59	61,23	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	6,3	6,3	72,13	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100

Tabel II.45
Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial
Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 – 2023 (Permendagri No. 59/2021)

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100,00	100,00	100,00	75,00	85
2	Jumlah anak telantar yang	Persen	100,00	100,00	100,00	75,00	85



No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
	memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti						
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100,00	100,00	100,00	75,00	85
4	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Persen	110,00	100,00	100,00	30,00	45
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	103,33	100,00	100,00	90,82	95

2.5. CAPAIAN PEMBANGUNAN TPB/SDG's

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan Dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. Dalam pelaksanaan *pembangunan* daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2025, maka berikut dijabarkan capaian pembangunan indikator TPB yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.46
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 dan 2023

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satu an	Kondisi Awal		Instansi Pelaksana
				2022	2023	
Tujuan SDGs 01 : MENAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN						
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Pusat Statistik (BPS)	%	9,03	8,26	Dinas Sosial.
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan .	Dinas Sosial	KP M	7,72	7,74	Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata.
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro						



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal		Instansi Pelaksana
				2022	2023	
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	%	117	118	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi pengguna metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 14-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	%	72,68	75	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
1.4.1.(d)	Indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Dinas PUPR	%	83,67	85	Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan.
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Dinas PUPR	%	88,01	90	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan
1.4.1.(h)	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	BPS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	97,12	74,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, Dinas PUPR.
Target 1.5 : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tahun	BPBD	%	61,62	61,78	BPBD, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian
Target 1.a : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumberdaya, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi						
1.a.1*	Proporsi sumberdaya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Dinas Sosial	%	20	20	Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Dinas Sosial	Rp	##### ####	Na	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan.
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN						
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun						
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Dinas Ketahanan Pangan	Kkal	1617,2	1619,3	Dinas Pertanian, Dinas



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal		Instansi Pelaksana
				2022	2023	
						Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas PUPR.
Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula						
2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan asi eksklusif	Dinas Kesehatan	%	64,5	64,56	Dinas Kesehatan
2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Dinas Ketahanan Pangan	%	75,2	78,4	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan.
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA						
Target 3.1 : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000						
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	%	240,6	97,3	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesmelahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan	%	100	100	Dinas Kesehatan
3.1.2 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	%	100	100	Dinas Kesehatan
Target 3.2 : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan angka kematian balita 25 per 1000						
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	%	2,4	0,3	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	%	2,1	0,3	Dinas Kesehatan
3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	%	2,4	0,3	Dinas Kesehatan
Target 3.3 : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya						
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	%	0,11	0,1	Dinas Kesehatan
Target 3.4 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan						
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	35,2	35,3	Dinas Kesehatan
Target 3.7 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional						
3.7.1 (b)	Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara modern	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	12,38	73,12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal		Instansi Pelaksana
				2022	2023	
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	BPS	%	36,01	37,77	Dinas Kesehatan
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR)	BPS	%	2,12	1,99	Dinas Kesehatan
Target 3.8 : Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang						
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	%	87,8	95	Dinas Kesehatan, BPJS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA						
Target 4.1 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif						
4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	111,94	114,02	Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, PUPR
Target 4.2 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar						
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	90,7	86,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD PPPA, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Target 4.6 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi di kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi						
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	97,84	96,8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PMD PPPA
4.6.1 (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 - 24 tahun, dan umur 15 - 59 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	97,06	96,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PMD PPPA
Target 4.c : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil						
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB yang bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	45,29	40,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN						
Target 5.6 : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development at the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut						
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Dinas Pengendalian Penduduk	%	13,92	9,7	Dinas Pengendalian Penduduk dan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal		Instansi Pelaksana
				2022	2023	
		dan KB				KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA						
Target 8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto pertahun di negara kurang berkembang						
8.1.1 (a)	PDRB	BPS	%	52,16	62,78	Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Dinas Pariwisata
Target 8.3 : Manggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreatifitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan						
8.3.1 (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	%	28,31	29,30	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
Target 8.9 : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal						
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Dinas Pariwisata	%	0,85	0,86	Dinas Pariwisata. Dinas PUPR
8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	OR	97412	264289	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR
Target 8.10 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua						
8.10.1 (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	%	24,72	24,93	Dinas Koperasi, Dinas Pertanian
TUJUAN 09 : INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR						
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI						
Target 9.2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	9,65	9,80	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal PTSP
9.2.1 (a)	Laju Pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	44,31	45,77	Dinas Koperasi, BPKD, Dinas Sosial
Target 9.3 : Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar						
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Dinas Tenaga Kerja dan	%	0	0	Dinas Koperasi, UKM dan



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal		Instansi Pelaksana
				2022	2023	
		Perindustrian				Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Sosial
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	0	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Sosial
TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN						
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA- DAN ANTAR NEGARA						
Target 10.1 : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional						
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Dinas Sosial	%	9,03	8,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas PMD PPPA
10.1.1 (b)	Jumlah desa mandiri	Dinas PMD, PP dan PA	%	11	21	Dinas PMD, PPPA, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Sosial
TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN						
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN						
Target 11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh						
11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	%	41,71	40,62	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal PTSP

2.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Berdasarkan analisa evaluasi hasil capaian pembangunan dalam kerangka sasaran implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantaeng, secara umum dapat diasumsikan bahwa pembangunan mengalami gejolak akibat adanya Pandemi COVID-19. Meskipun beberapa capaian pembangunan memiliki progress positif



dimana berbagai capaian pembangunan dapat terealisasi dengan baik, namun beberapa sektor terdampak COVID-19 yang menyebabkan target tidak tercapai. Selain itu, adanya gejolak ekonomi global karena kondisi geopolitik dampak peperangan Rusia Ukraina mengindikasikan adanya resesi ekonomi yang akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Isu ini juga harus segera diantisipasi agar tidak memberi dampak signifikan pada pembangunan Bantaeng.

Beberapa keberhasilan pembangunan terlihat dari cukup mendekatinya realisasi capaian pembangunan dengan target pembangunan yang telah dirumuskan pada awal periode pembangunan jangka menengah. Data-data yang terlihat menunjukkan beberapa indikator mengalami trend peningkatan baik pada indikator sasaran maupun indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah. Begitu juga sebaliknya, masih terdapat beberapa target pembangunan yang belum terwujud dan memiliki capaian jauh dari harapan. Oleh karena itu, kondisi ini akan menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya sebagai estafet untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Bantaeng.

Meskipun beberapa capaian memiliki rapor positif, namun setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu diiringi oleh permasalahan pembangunan baik permasalahan global maupun permasalahan khas di setiap daerah. Hal tersebut menjadi perlu sebagai bahan untuk melakukan berbagai antisipasi maupun minimalisasi dampak negatif dari permasalahan pembangunan meskipun dalam realitanya permasalahan pembangunan terkadang tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu atau dua periode pembangunan saja. Oleh karena itu, setiap rumusan perencanaan pembangunan mempunyai upaya-upaya dalam menyelesaikan permasalahan untuk mencapai target pembangunan sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berikut faktor penghambat (permasalahan pembangunan) beserta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasinya berdasarkan sasaran pembangunan Bantaeng.



Tabel II.47
Permasalahan Pembangunan Daerah dan Upaya Penyelesaiannya
Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2025	Permasalahan	Akar Masalah	Upaya-Upaya untuk Mencapai Target
Sasaran 1.2 Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berkualitas	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Minimnya ASN yang memiliki kompetensi dalam pengawasan dan pengendalian internal	• Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi • Peningkatan SDM yang memiliki kompetensi dalam pengawasan dan pengendalian internal
	Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya dalam sinkronisasi pertanggungjawaban dengan output	• Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis IT • Mewujudkan ASN yang profesional dan bertanggung jawab
Sasaran 2.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Pemerataan kualitas layanan kesehatan	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan akses serta infrastruktur kesehatan	• Peningkatan pemerataan layanan kesehatan yang inklusif • Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan
Meningkatnya kualitas pendidikan dan kepribadian masyarakat		Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan	Belum optimalnya kualitas layanan Pendidikan dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan	• Peningkatan pemerataan layanan pendidikan • Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
Sasaran 2.3 Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya peningkatan pendapatan masyarakat	Belum optimalnya jaminan perlindungan kesejahteraan masyarakat	• Peningkatan kualitas implementasi UMK dalam sistem pengupahan
	Pengendalian harga dan	Tingginya	Masih tingginya fluktuasi harga	



Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Kab.Bantaeng 2025	Permasalahan	Akar Masalah	Upaya-Upaya untuk Mencapai Target
	ketersediaan barang	potensi tenaga kerja berpendidikan rendah dan minim keterampilan	bahan kebutuhan pokok masyarakat	- tenaga kerja • Pemerataan kualitas pekerjaan di berbagai sektor lapangan usaha • Meningkatkan kualitas RTS penerima bansos
	Pengembangan desa sebagai komunitas yang maju dan mandiri		Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan desa	
Sasaran 3.1 Meningkatkan kapasitas sektor ekonomi unggulan daerah	Optimalisasi hilirisasi ekonomi dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah	Belum optimalnya kemampuan dan penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM	• Pengembangan usaha dan infrastruktur UKM serta industri • Peningkatan kualitas koperasi daerah
			Belum optimalnya pengembangan kawasan Industri Bantaeng	
	Pengembangan iklim investasi yang kondusif	Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan	Minimnya daya dukung daerah dalam menciptakan peluang investasi (iklim investasi)	• Meningkatkan kondusivitas iklim investasi daerah
Sasaran 3.2 Meningkatkan layanan aksesibilitas dan infrastruktur wilayah	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pembangunan berkelanjutan	Belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur jalan	• Pembangunan infrastruktur aksesibilitas (jalan, sarpras perhubungan, dan sebagainya) dan penunjang kehidupan masyarakat (perumahan layak, air bersih, sanitasi, dan sebagainya)
			Masih cukup tingginya panjang jalan dalam kondisi rusak	
			Belum optimalnya pelayanan sanitasi dan kebutuhan air baku (air minum, air industri)	

b. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berikut dijabarkan Permasalahan Pembangunan Penyelenggaraan sesuai dengan Bidang Urusan Daerah:



Tabel II.48
Permasalahan Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DASAR		
1	Pendidikan	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan daerah, khususnya terkait sarana dan prasarana
		Belum optimalnya kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan
2	Kesehatan	Belum optimalnya peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya kualitas prasarana jalan dan jembatan jalan
		Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bahaya banjir
		Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum dan pengelolaan air limbah
		Belum terlaksananya rencana pembangunan infrastruktur sesuai RTRW
4	Perumahan dan Pemukiman	Penanganan pemukiman kumuh belum optimal
		Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni
		Belum seluruh rumah tinggal memiliki sanitasi yang layak
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum	Belum optimalnya kesadaran aparaturnya pemerintah dan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Belum optimalnya wawasan masyarakat terkait kebangsaan dan politik
		Munculnya potensi konflik pada tahun politik
6	Sosial	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
		Minimnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana alam/sosial
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON- DASAR		
7	Tenaga Kerja	Masih kurangnya kesesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan (kesempatan kerja)
		Belum tingginya kompetensi dan kualitas tenaga kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah
		Minimnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan
9	Pangan	Belum optimalnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman
		Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan



No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan
10	Pertanahan	Masih minimnya fasilitasi pemerintah daerah dalam proses penerbitan sertifikat tanah warga
		Masih ditemukannya kasus konflik pertanahan/ sengketa tanah
11	Lingkungan Hidup	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
		Minimnya pengelolaan persampahan
12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil
		Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya peran lembaga pemberdayaan desa
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih belum optimal
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
15	Perhubungan	Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat terhadap peraturan lalu lintas menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas
		Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan perhubungan kurang memadai
16	Komunikasi dan Informasi	Belum optimalnya penggunaan layanan komunikasi dan informasi dalam pendistribusian informasi daerah
17	Koperasi dan Industri Kecil Menengah	Kurangnya daya saing KUMKM, khususnya sektor unggulan
		Menurunnya jumlah koperasi aktif
18	Penanaman Modal	Belum efektifnya promosi investasi
		Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menarik investor
19	Pemuda dan Olahraga	Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi dan kegiatan kepemudaan
		Kurangnya sarana dan prasarana olahraga
20	Statistik	Belum terimplementasinya Satu Data Bantaeng
21	Persandian	Mekanisme persandian yang belum berjalan secara optimal
22	Kebudayaan	Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur
23	Perpustakaan	Kurangnya tenaga ahli dan terampil perpustakaan (pustakawan, tenaga teknis dan penilai)
		Keterbatasan koleksi buku perpustakaan
24	Kearsipan	Masih terbatasnya aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah
		Kurangnya perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku



No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan
		Minimnya ketersediaan arsiparis
C. URUSAN PILIHAN		
25	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan sumber daya perikanan budidaya belum optimal
26	Pariwisata	Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata
		Belum optimalnya koordinasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
27	Pertanian	Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan
28	Perdagangan	Belum optimalnya pemasaran berbagai produk unggulan daerah
		Belum optimalnya daya saing produk unggulan Bantaeng
29	Perindustrian	Belum optimalnya pengembangan inovasi dan sarana prasarana penunjang industri
		Belum optimalnya fasilitas pemerintah daerah dalam peningkatan pembinaan IKM
D. URUSAN PENUNJANG		
30	Penelitian dan pengembangan	Belum diimplementasikannya secara konsisten dan menyeluruh inovasi yang dikembangkan di Bantaeng
31	Perencanaan	Belum optimalnya kualitas rumusan perencanaan pembangunan, sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah
32	Keuangan Daerah	Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Bantaeng
33	Kepegawaian	Masih rendahnya SDM ASN yang menempati jabatan sesuai dengan kompetensi
34	Pengawasan	Belum optimalnya fungsi sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
35	Sekretariat Dewan	Belum optimalnya pelayanan terhadap aktivitas dewan

2.7. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada pembangunan Kabupaten Bantaeng di tahun 2025, perlu adanya menelaah isu strategis terkini yang akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan, khususnya program dan kegiatan. Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat.



Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi dengan penjabaran isu strategis pada pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 sebagai berikut:

A. ISU STRATEGIS GLOBAL

Beberapa isu strategis Internasional yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantaeng seperti:

a. *Sustainable Development Goals/SDGs*

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut ***Sustainable Development Goals (SDGs)***. Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability, Economic*



Sustainability dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

b. Ancaman resesi ekonomi global

Resesi ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Kondisi saat ini, berbagai ancaman krisis ekonomi



global melanda di hampir seluruh negara tak terkecuali Indonesia. Salah satu penyebab yang mengemuka adalah adanya perang Ukraina dengan Rusia yang menyebabkan gejolak stabilitas politik global terjadi maupun konflik yang terjadi di Palestina.

Kondisi tersebut tersebut tidak hanya sebagai konflik bilateral antardua negara karena masalah perbatasan, khususnya perang Rusia dan Ukraina juga menimbulkan konflik regional yang membuat ekonomi Eropa mengalami krisis energi. Krisis tersebut terjadi karena pihak Rusia telah memangkas aliran gas alam ke daerah Eropa yang biasa digunakan untuk menggerakkan roda ekonomi di benua biru tersebut. Hal tersebut mengakibatkan banyak negara di Eropa mengalami krisis energi yang berujung pada naiknya nilai inflansi pada setiap negara yang ada di benua tersebut. Akibat dari krisis energi tersebut, harga gas alam dan minyak bumi dunia yang terus meningkat yang membuat harga BBM di Indonesia juga merangkak naik. Selain itu, peperangan tersebut juga mendorong kenaikan harga pangan dan bahan bakar di seluruh dunia. Kondisi ini akan menyebabkan ketatnya likuiditas negara-negara di Eropa. Sehingga, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju lebih lambat dari yang diperkirakan. Kondusivitas yang tidak menentu ini menjadikan investor berupaya bermain aman. Dampak bergejolaknya iklim investasi menyebabkan pertumbuhan penanaman modal melambat yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, tak terkecuali Kabupaten Bantaeng yang memiliki beberapa komoditas ekspor.

c. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang



pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika penjagaan atas jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

- 1) Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius;
- 2) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan;
- 3) Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
- 4) Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim; dan
- 5) Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui "*Katowice Climate Package*" yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Bantaeng.



d. *Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi*

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Indonesia diharapkan tidak hanya bertahan sebagai sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, di mana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara *video conference*. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

B. ISU STRATEGIS NASIONAL

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan



muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

C. ISU STRATEGIS DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah yang baik adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kondisi kekinian daerah yang memotret berbagai isu-isu strategis yang berkembang di dalam masyarakat dan pembangunan daerah.

a. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten yang menyusun RPD untuk tahun 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Bantaeng, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantaeng sampai tahun 2026 adalah

“Komunitas yang Mandiri Bernafaskan Nilai-Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal”

RPD Bantaeng tahun 2024-2026 merujuk pada pembangunan jangka panjang tahap keempat. Pada RPJM keempat, Program prioritas adalah program-program yang memanfaatkan momentum pembangunan yang berhasil dipicu pada 3 (tiga) tahapan pembangunan sebelumnya dan program-program untuk menyempurnakan kebutuhan pembangunan yang tidak sempat dirampungkan pada tahapan-tahapan pembangunan yang lalu sehingga visi Bantaeng didapat diwujudkan. Bantaeng sebagai komunitas yang mandiri di wilayah Selatan Sulawesi yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dapat diwujudkan. Pelaksanaan RPJD ke-4 (empat), yang merupakan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan periode terakhir pada RPJPD Tahun Tahun 2005-2025, Pemerintah Kabupaten Bantaeng harus berupaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024-2026 ini, perencanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng memiliki tujuan dan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam satuan Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak dapat dipisahkan. Implikasi



dari perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik akan memberikan pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel sehingga memberikan suasana kemasyarakatan yang sejahtera, adil dan merata, berkualitas berkesinambungan, serta harmonis, aman dan tentram. Impian dari seluruh Pemerintah Daerah, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Bantaeng ini perlu diupayakan melalui berbagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantaeng juga memberikan peluang dan kesempatan kepada aparatur birokrasi dan masyarakat untuk mengembangkan ide, gagasan, dan kreativitas dalam rangka menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk daerah, masyarakat, nusa, dan bangsa. Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah
- b. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT.

2. Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Fokus pembangunan SDM yang berkualitas adalah menciptakan manusia yang pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global

Secara umum, peningkatan kasus positif terus bertambah dimana akhirnya beberapa sektor cukup terdampak akibat mewabahnya pandemi COVID-19 ini, khususnya perekonomian rakyat yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bantaeng di masa pandemi ini terkena imbasnya yaitu dengan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, sehingga Pemerintah Kabupaten Bantaeng turut berperan dan bertanggungjawab untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan, terutama pada masyarakat miskin. Tujuan ini memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya taraf hidup keluarga
- b. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah
- d. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat



e. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

3. Meningkatkan Kualitas Perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan

Pada masa pandemi covid-19 ini masih berlangsung, langkah yang diambil Kabupaten Bantaeng adalah mengembangkan perekonomian yang prorakyat selain dengan pemulihan usaha menengah dan besar. Hal ini dimaksudkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah serta perekonomian sektor informal yang mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Bantaeng untuk segera pulih kembali. Kabupaten Bantaeng termasuk salah satu daerah yang terkena dampak nyata dari adanya Pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, laju pertumbuhan di kabupaten Bantaeng hanya mencapai kisaran 0,50 persen. Namun di tahun 2021 LPE kabupaten Bantaeng mencapai 8,86 persen. Kontribusi perekonomian Bantaeng terbesar adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor lain yang mendominasi perekonomian Bantaeng adalah sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Selain mengelola sektor-sektor unggulan secara optimal, pembangunan infrastruktur untuk mendukung sarana dan prasarana setiap kegiatan juga terus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Namun perlu digarisbawahi dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang berkualitas juga perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya implementasi perekonomian hijau pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang merupakan suatu konsep pengembangan perekonomian dengan memperhatikan lingkungan agar dapat berjalan beriringan dengan baik. Tujuan ini memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah
- b. Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata
- c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah

b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng 2012-2032

Dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bantaeng merumuskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032. RTRW Kabupaten Bantaeng ini adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan



penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, Pulau Sulawesi dan Propinsi Sulawesi Selatan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bantaeng. RTRW disusun untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Bantaeng yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pengembangan agropolitan dan minapolitan yang berbasis mitigasi bencana.

Beberapa kebijakan terkait penataan ruang Kabupaten Bantaeng meliputi:

- a. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam laut, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan;
- b. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian yang ramah lingkungan;
- d. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, berhasil guna terpadu dan ramah lingkungan;
- e. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana; dan
- f. Perwujudan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pada RTRW Kabupaten Bantaeng memiliki **Rencana Struktur Ruang Wilayah** seperti pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pada strukturwilayah pusat-pusat kegiatan terdiri dari 3 (tiga) pusat wilayah yakni:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Kawasan Perkotaan Bantaeng di Kecamatan Bantaeng.
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terdiri atas:
 - Kawasan Perkotaan Bonto Manai di Kecamatan Bisappu;
 - Kawasan Perkotaan Banyorang di Kecamatan Tompobulu; dan



- Kawasan Perkotaan Tanetea di Kecamatan Pa'jukukang.
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi pusat-pusat pemukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa yang terdiri atas:
 - Desa Bonto Maccini di Kecamatan Sinoa;
 - Desa Bonto Marannu di Kecamatan Ulu Ere;
 - Kelurahan Gantarangeke di Kecamatan Gantarangeke; dan
 - Desa Ulugalung di Kecamatan Eremerasa.

Pada sistem jaringan prasarana utama memiliki dua sistem yakni sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan transportasi laut. Pada sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:

- a. Sistem jaringan jalan dengan rincian jaringan jalan serta lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. Sistem jaringan perkeretaapian dengan rincian jaringan jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api.

Sedangkan pada sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayanan, dengan rincian:

- a. Tatanan kepelabuhan, terdiri atas:
 - pelabuhan pengumpan primer yaitu pelabuhan Kaili di Kecamatan Bantaeng;
 - pelabuhan pengumpan sekunder yaitu Pelabuhan Bantaeng di Mattoanging Kecamatan Bissappu dan Pelabuhan Ikan Birea di kecamatan Pa'jukukang; dan pelabuhan khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Alur pelayanan merupakan alur pelayanan laut yang terdiri atas:
 - alur pelayanan lokal, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan Bantaeng dengan pelabuhan pengumpan lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - alur pelayanan nasional, yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan Bantaeng dengan pelabuhan nasional.

Pada sistem jaringan prasarana lainnya memiliki 4 (empat) sistem yang terdiri atas:

- a. Sistem jaringan energi yang terdiri dari :
 - 1) Pembangkit tenaga listrik, dengan rincian:
 - Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kampung Bakara Kecamatan Pa'jukukang untuk mendukung kawasan industri, Dengan daya 1,16 MW; dan



- Rencana pengembangan prasarana energi Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH), dan Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan daya 25 (dua puluh lima) Kilowatt di Kecamatan Pa'jukukang, Gantarangeke, Tompobulu, Eremerasa, Bantaeng, Uluere, Sinoa, Bissapu yang merupakan pengembangan energi listrik yang memanfaatkan energi terbarukan.
- 2) Jaringan transmisi tenaga listrik, dengan rincian:
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 (seratus lima puluh) Kilovolt yang menghubungkan Gardu Induk di Kabupaten Jeneponto dengan Gardu Induk di Kabupaten Bulukumba; dan
 - Rencana Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dengan tegangan 1450 (seribu empat ratus lima puluh) Kilovolt yang menghubungkan Sengkang – Sinjai - Bulukumba – Bantaeng – Takalar – Makassar.
- b. Sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan teresterial dan jaringan satelit. Selain kedua sistem jaringan tersebut, sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Sistem jaringan sumber daya air ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri dari beberapa sistem yakni:
 - 1) Sistem pengelolaan persampahan;
 - 2) Sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - 3) Sistem jaringan drainase;
 - 4) Sistem jaringan air limbah; dan
 - 5) Jalur evakuasi bencana.

Pada RTRW Kabupaten Bantaeng memiliki Rencana Pola Ruang Wilayah yang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung pada rencana pola ruang wilayah terdiri atas:

- a. Kawasan hutan lindung yang merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.



- b. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- c. Kawasan rawan bencana alam; dan
- d. Kawasan lindung geologi.

Sedangkan pada kawasan budidaya terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. Kawasan peruntukan lainnya.

D. ISU STRATEGIS KABUPATEN BANTAENG

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis internasional, isu-isu strategis nasional, hingga isu-isu strategis regional, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kabupaten Bantaeng yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah tahun 2025. Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Kabupaten Bantaeng dijabarkan sebagai berikut :

a. Transformasi Pelayanan Publik Berbasis IT

Cukup tingginya Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) sebesar 81,29 merupakan hasil positif dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Bantaeng. Namun capaian tersebut, masih perlu diperbaiki dengan mewujudkan pelayanan publik yang prima, efektif, efisien dan berkualitas, khususnya dalam pelayanan dasar masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, transformasi pelayanan publik sudah menjadi suatu keniscayaan untuk diterapkan melalui berbagai inovasi dan juga improvisasi dalam memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik berkualitas.

Teknologi informasi hadir dalam mewujudkan transformasi pelayanan publik yang berkompeten dan mudah. Hal ini menjadi suatu adaptasi bagi unit pelaksana pelayanan publik guna menjawab kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Transformasi digital ini



nantinya diharapkan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan dengan cepat dan efisien. Selain itu, layanan ini juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan transparansi pelayanan sehingga terhindar dari kondisi yang tidak diharapkan seperti pungutan liar dan sebagainya.

b. Pemantapan SDM Maju, Berbudaya Dan Berdikari

Sebagai modal dasar pembangunan, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi suatu potensi besar dalam akselerasi pencapaian tujuan pembangunan yang didasarkan pada kualitas dan pemerataan kesejahteraan sosial. Masih minimnya capaian **Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,28** pada tahun 2023, menjadikan Kabupaten Bantaeng wajib meningkatkan capaian-capaian pembangunan, khususnya pelayanan dasar masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Capaian pendidikan dan kesehatan yang masih memerlukan peningkatan, menjadikan perencanaan pembangunan wajib memerhatikan kedua urusan tersebut, tanpa mengindahkan urusan pembangunan yang lain. Pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam pemeratakan seluruh layanan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Bantaeng.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat Bantaeng, khususnya angkatan kerja, menjadikan pemerataan layanan pendidikan sebagai prioritas bagi stakeholder beserta perangkat daerah penunjangnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya koordinasi dan inovasi dalam perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya penggunaan teknologi informasi yang mempermudah setiap aktivitas pembangunan selama ini.

Dari sisi kesehatan, pembangunan kesehatan di Bantaeng sudah menunjukkan hasil positif, namun untuk lebih mengoptimalkan kualitas SDM dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, maka peningkatan layanan kesehatan harus terus ditingkatkan. Berbagai kasus penanganan kesehatan khusus harus menjadi salah satu fokus kebijakan kesehatan dalam perencanaan pembangunan ke depan seperti stunting/gizi buruk,



kematian ibu dan bayi, hingga peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan.

c. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Saat ini, pemerintah pusat memiliki fokus dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang mencapai USD 1,9 PPP (*purchasing power parity*). Kondisi ini menyebabkan pemerintah memberikan intervensi kepada rumah tangga yang mengalami kemiskinan ekstrem supaya maju dan bertumbuh melalui berbagai program seperti subsidi, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem, hingga program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas kapasitas ekonomi keluarga.

Kabupaten Bantaeng memiliki tugas untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem dalam beberapa tahun mendatang. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik, **Kabupaten Bantaeng memiliki persentase kemiskinan sebesar 9,18 persen penduduk miskin**. Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan termasuk didalamnya pengentasan kemiskinan ekstrem dengan beberapa strategi yang dilakukan yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial dan subsidi, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan cara membangun infrastruktur pelayanan dasar. Untuk membantu riset di Kabupaten Bantaeng sendiri menerapkan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dengan melibatkan kaum perempuan, disabilitas, warga miskin dalam diskusi untuk menjaring informasi tentang hambatan dan harapan tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng.

d. Antisipasi Resesi Ekonomi Dalam Pembangunan Berbasis Ekonomi Unggulan Daerah

Pembangunan perekonomian di Bantaeng sudah memiliki modal berupa pertumbuhan ekonomi yang cukup baik bahkan menempati urutan pertama se Sulawesi Selatan dengan capaian 15,45 persen pada tahun 2022, meskipun mengalami perlambatan di tahun 2023 menjadi 5,56 persen. Kondisi ini tentu saja harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai upaya antisipasi adanya resesi ekonomi akibat gejolak global. Kondisi ini diperkirakan akan menunjukkan kelesuan ekonomi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara global akan berkontraksi.

Resesi ekonomi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan



keuntungan perusahaan. Selain karena meningkatnya harga-harga secara tajam sehingga menyebabkan ekonomi menjadi stagnan atau dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi, resesi ekonomi juga bisa terjadi karena turunnya harga-harga atau deflasi. Situasi ini disebut bisa membuat ekonomi ke depan masih sulit untuk diperkirakan perkembangannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bantaeng harus memiliki upaya preventif dalam mengantisipasi dampak negatif dari resesi ekonomi sehingga perlu adanya program pembangunan yang meningkatkan ketahanan ekonomi kerakyatan, khususnya komoditas ekonomi unggulan daerah. Kondisi ini juga harus memerhatikan dengan situasi politik dan keamanan di tanah air yang cenderung memanas menjelang Pemilihan Umum (pemilu) juga harus dijaga agar tidak kontra produktif terhadap perekonomian. Sehingga kondusivitas dan iklim investasi yang pro-investasi harus dijaga kestabilannya agar mampu menopang perekonomian Bantaeng ke depan.

e. Perekonomian Hijau Sebagai Alternatif Pembangunan Berkelanjutan

Sumber daya alam dan lingkungan hidup, selain sebagai modal pembangunan juga merupakan penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

Penerapan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan, menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Beberapa alternatif dalam pelestarian lingkungan hidup seperti menjaga dan melestarikan sumber daya air, mitigasi bencana alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik.

Sebagai wilayah yang memiliki struktur ekonomi dominan pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, tentu saja dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam tersebut perlu adanya pengawasan yang melekat agar tidak berpotensi merusak lingkungan hidup. Selain itu



juga semakin berkembangnya industri pengolahan di Bantaeng akan meningkatkan potensi kerusakan lingkungan hidup jika pengelolaan limbahnya tidak dilakukan secara baik.

2.8. INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH BANTAENG

Inovasi (atau juga disebut reka baru) dapat diartikan sebagai suatu proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Sehingga inovasi dalam pembangunan mengindikasikan sesuatu hal baru baik dari sistem, tata kelola hingga implementasi dalam mewujudkan pembangunan di suatu wilayah, dalam hal ini di Kabupaten Bantaeng. Adapun inovasi pembangunan ini seyogyanya memiliki dampak dalam akselerasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya dalam menyejahterakan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik.

1. CETAR” (Cek Tekanan Darah Rutin)

Inovasi “ CETAR” (Cek Tekanan Darah Rutin) dikembangkan karena rendahnya kesadaran masyarakat penderita hipertensi untuk berobat secara rutin. Penyebab utama karena kurangnya informasi dan malasnya pasien hipertensi yang tidak memiliki keluhan untuk berobat. Inovasi ini memudahkan tenaga kesehatan, aparat pemerintah desa dan lintas sektor untuk memberikan pelayanan hipertensi. Inovasi ini sesuai dengan target SDGs yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan ke 6 yaitu hipertensi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantaeng yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia, Akses Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar.

Inovasi CETAR melalui 3 tahapan yaitu:

1. Memberikan kartu kontrol pengobatan yang memberikan informasi yang mengenai identitas pasien dan catatan pemeriksaan pasien untuk digunakan memonitor pasien pada kunjungan selanjutnya
2. Mengadakan pelayanan kesehatan khusus pasien hipertensi di Posbindu untuk memantau keadaan penderita hipertensi
3. Mengadakan Senam Prolanis dan edukasi hipertensi

Inovasi CETAR berdampak pada penderita hipertensi. Jumlah penderita yang teridentifikasi sebelum inovasi sebanyak 120 orang, namun setelah implementasi inovasi ditemukan 183 orang di tahun 2021, tahun 2022 ditemukan 204 orang. Sehingga angka kontak tenaga kesehatan menjadi tinggi. Selain itu inovasi ini juga meningkatkan kepatuhan minum obat



karena penderita teratur minum obat anti hipertensi sehingga kecacatan akibat komplikasi seperti stroke dan penyakit jantung dapat diminimalisir.

Tujuan inovasi CETAR adalah :

1. Meningkatkan kesadaran penderita hipertensi untuk berobat teratur yang berimplikasi pada meningkatnya angka kontak tenaga kesehatan dengan penderita.
2. Status kesehatan penderita hipertensi terpantau oleh tenaga kesehatan.
3. Penderita hipertensi dapat berobat secara rutin di fasilitas kesehatan

2. DEKAP BAYI

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan (Kemenkes 2017).

Permasalahan yang ditemui di PKM Campagaloë terkait pelayanan imunisasi dasar lengkap pada bayi adalah rendahnya cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL). Capaian IDL sebelum pandemi bulan Januari sampai Maret 2020 mencapai target.

Setelah pandemi, cakupan capaian pelayanan IDL pada bayi menurun. Pada bulan April sampai Juli 2020 cakupan IDL Puskesmas Campagaloë sebanyak 70 orang (43%), di mana target yang harus dicapai adalah 95 persen, terjadi kesenjangan capaian 52 persen.

Dengan adanya inovasi DEKAP BAYI ini semua sasaran terjangkau sehingga pada bulan Agustus sampai Desember 2020 IDL sudah mencapai target yaitu 154 orang (95%). Bulan Januari sampai Desember 2021 capaian IDL sebanyak 163 orang (100%), dan tahun 2022 capaian Imunisasi dasar Lengkap (IDL) sebanyak 121 orang (100%).

Capaian tersebut dapat diraih berkat strategi yang diterapkan oleh PKM Campagaloë berupa Pelayanan imunisasi dengan cara kunjungan ke rumah sasaran sesuai jadwal posyandu yang telah ditetapkan. Adanya kerjasama dari lintas program dan dukungan lintas sektor serta komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf PKM Campagaloë.

Tujuan Inovasi DEKAP BAYI :

1. Meningkatkan layanan sasaran Imunisasi Dasar Lengkap posyandu dengan sistem kunjungan rumah
2. Menyediakan akses layanan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi melalui kunjungan rumah.



3. Meningkatkan cakupan layanan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi dalam masa pandemi Covid-19
4. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan layanan imunisasi dengan program Kehatan Ibu dan Anak (KIA), Gizi, Surveilans dan Promkes.

3. INOVASI PA'BALLETA (Pelayanan Obat Eksklusif dan Terintegrasi)

Pelayanan farmasi merupakan bagian penting dari sistem pelayanan rumah sakit. Instalasi farmasi melayani pasien termasuk penyakit kronis. Tantangan dalam memberikan pelayanan pasien kronis, yaitu ketidakpatuhan pasien kronis dalam mengonsumsi obat harian, serta adanya pasien yang datang sebelum jadwal kontrol yang seharusnya. Hal ini berdampak terhadap kesembuhan pasien dan kerugian yang ditanggung rumah sakit. Selain itu, pasien juga sulit mendapatkan informasi tentang obat yang dikonsumsi.

Inovasi Pelayanan Obat Eksklusif dan Terintegrasi (PA'BALLETA) hadir untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut. Ada enam layanan unggulan yang memberikan kemudahan dalam pelayanan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya layanan pengobatan kepada pasien kronis.

Layanan tersebut terdiri dari tempat pelayanan obat khusus bagi pasien kronis, layanan pasien iterasi obat tanpa kontak, tim pengantaran obat pasien kronis, penyediaan notifikasi pengingat minum obat, *call center* farmasi, dan media informasi waktu tunggu pelayanan obat.

Inovasi PA'BALLETA telah berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan farmasi, khususnya pada apotek rawat jalan yaitu telah berhasil menurunkan ketidakpatuhan pasien dalam melakukan kontrol obat dari 5,12% tahun 2019, 4,18% tahun 2020, 3,90% tahun 2021, dan 2,45% tahun 2022.

Jumlah kerugian yang ditanggung oleh rumah sakit juga berhasil diturunkan dari Rp 37.945.121 tahun 2019 dan Rp 31.692.343 tahun 2020 menjadi Rp 5.023.196 tahun 2021 dan Rp 2.911.919 tahun 2022.

Inovasi PA'BALLETA bertujuan:

1. Meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat sesuai aturan.
2. Menurunkan kerugian rumah sakit karena harus menanggung biaya obat yang tidak terkirim.



4. JEDAR SASKIA (Jemput Dan AntaR SASaran Kesehatan Ibu dan Anak)

Inovasi JEDAR SASKIA atau Jemput dan Antar Sasaran Kesehatan Ibu dan Anak, hadir karena tingginya jumlah ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) dan tidak adanya persalinan yang dilakukan pada fasilitas kesehatan. Pada umumnya setiap ibu hamil dan ibu bersalin yang tidak memeriksakan kehamilan maupun kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan bukan disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya pemeriksaan kesehatan, namun banyak diantaranya terkendala status ekonomi yang kurang serta akses ke fasilitas kesehatan yang jauh.

Inovasi ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi setiap sasaran baik ibu hamil KEK maupun ibu bersalin. Setiap ibu hamil KEK dijadwalkan melakukan konsultasi dengan dokter ahli gizi di Unit Pelayanan Gizi Terpadu dengan sistem jemput antar sasaran. Selain itu, semua ibu hamil yang akan memasuki proses persalinan dijemput untuk kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan, memperoleh pelayanan persalinan hingga akhirnya diantarkan kembali ke rumahnya tanpa dibebankan biaya apapun.

Inovasi ini memberi dampak yang sangat positif khususnya bagi ibu hamil yang tinggal pada daerah pegunungan dan ibu dengan status ekonomi kurang. Dengan adanya sistem jemput antar sasaran, akses jalan yang sulit dan terjal serta besaran biaya yang harus dikeluarkan tidak lagi menjadi faktor penghambat untuk menempuh fasilitas pelayanan kesehatan.

Inovasi JEDAR SASKIA hadir dengan tujuan:

1. Membantu dan memfasilitasi ibu hamil KEK dan ibu bersalin, agar memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
2. Menurunkan jumlah ibu hamil KEK
3. Mewujudkan 100% persalinan faskes sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) guna meminimalisir berbagai resiko yang mungkin terjadi jika kekurangan energy kronik pada ibu hamil tidak segera tertangani dan persalinan tidak dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada Bayi Baru Lahir.



5. MOLEN BANTING (Mendampingi Online Balita Stunting)

UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu diresmikan pada tanggal 2 maret 2021 berperan sebagai wadah dinas melaksanakan fungsi proses interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat secara optimal dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bantaeng. Sesuai SK Kepala UPT Gizi nomor 5 tanggal 25 maret 2021 Tentang Penetapan Inovasi Molen Banting Kabupaten Bantaeng.

Kesulitan mengevaluasi kembali status gizi balita yang datang ke UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu memunculkan solusi mendekatkan pelayanan kepada sasaran balita stunting, gizi kurang, dan gizi buruk yang berkunjung ke poli gizi secara online.

Pelayanan konseling *offline* dan *online* dilakukan kolaborasi antara dokter umum, nutrisionis, bidan, dan perawat. Petugas kesehatan mengevaluasi status gizi dan kesehatan balita. Sarana yang digunakan dalam inovasi adalah grup *WhatsApp group*, dengan mendampingi ibu balita melakukan Pemberian Makanan Bagi Anak (PMBA), perawatan kesehatan balita sehingga meningkatkan kunjungan ulang balita yang rawat jalan dievaluasi, meningkatkan status gizi balita yang telah menjalani rawat jalan. Sarana *WhatsApp group* digunakan dengan alasan sudah banyak Ibu Balita memiliki HP dengan aplikasi WhatsApp, cepat menyebarkan informasi, biaya murah terjangkau bagi ibu balita untuk melakukan konsultasi dengan petugas, tidak dibatasi oleh waktu dan jarak, memudahkan penggunaanya serta sesuai dengan masalah sumber daya yang ada pada keluarga.

Tujuan Inovasi Molen Banting:

1. Meningkatkan jumlah balita yang berkunjung ulang ke UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu.
2. Meningkatkan status gizi dan kesehatan anak stunting, gizi kurang, dan gizi buruk yang rawat jalan untuk dievaluasi.
3. Berkontribusi pada penurunan angka stunting di Kabupaten Bantaeng sesuai target yang diharapkan menjadi 14% pada tahun 2024.

6. PEDULI KASI (Kampung ASI)

Kondisi yang terjadi diwilayah kerja Puskesmas Loka, Persentase ASI Eksklusif Tahun 2019 sebanyak 66.05%. Walaupun mencapai target indikator kinerja gizi tahun 2019, namun ada kurang lebih 30% bayi yang tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh



ASI Eksklusif. Dari Hasil Analisis situasi balita stunting di wilayah kerja Puskesmas loka pada tahun 2020, Asi eksklusif mempengaruhi kejadian stunting sebanyak 84.74%. Persentase balita stunting pada tahun 2020 sebanyak 44% yang artinya hampir setengah balita di wilayah kerja Puskesmas Loka mengalami kejadian stunting.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Puskesmas Loka melahirkan gagasan berupa ide solusi yang diberi nama Peduli KASI (Peduli Kampung ASI). Dengan adanya Inovasi Peduli KASI yang dikembangkan dengan 1 pohon katuk untuk 1 ibu hamil, dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pemberian ASI Eksklusif dan mampu mencegah terjadinya kejadian stunting. Tanaman katuk yang diberikan dapat menjadi *booster* ASI. Inovasi ini dapat meningkatkan persentase ASI Eksklusif menjadi 76.90 % dan menurunkan menjadi 33.46%.

Inovasi Peduli KASI dalam implementasinya, melibatkan lintas program yaitu bidan desa, bidan dusun, promkes. dan lintas Sektor yaitu Pemerintah desa, Penyuluh pertanian. Keberlanjutan inovasi Peduli Kampung ASI hingga saat ini masih terus berlangsung dan telah dikembangkan ke semua desa di wilayah kerja Puskesmas Loka

Tujuan dan Kelompok Sasaran Masyarakat :

Inovasi Peduli KASI merupakan Inovasi yang bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pemberian ASI Eksklusif dan meningkatkan capaian ASI Eksklusif menjadi 100% sehingga dapat mencegah sejak dini terjadinya stunting pada anak.

Kelompok Peduli ASI yang memantau ibu hamil dan tanaman katuk yang diberikan kepada sasaran, merupakan kelompok masyarakat yang peduli dengan pemberian ASI Eksklusif.

Sedangkan tanaman katuk diberikan kepada semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja Puskesmas Loka, sehingga ibu menyusui nantinya dapat mandiri meningkatkan produksi ASI dengan pangan lokal, salah satunya dengan cara mengonsumsi daun katuk.

7. PELIPUR LARA (Pelayanan Paripurna Lansia Sejahtera)

Puskesmas Dampang memiliki lansia berjumlah 630 orang, di mana sebagian besar lansia bermasalah dengan kesehatannya. Di Puskesmas Dampang jumlah kunjungan lansia yang berobat masih kurang, hanya sekitar 189 orang (30%) dari jumlah lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Dampang, dimana terdapat sebanyak 208 orang lansia yang beresiko dan 422 orang yang tidak beresiko. Selain



itu, tingkat pengetahuan keluarga lansia tentang kesehatan masih kurang.

Adapun strategi yang akan dilakukan tim PELIPUR LARA dalam rangka pelayanan paripurna bagi lansia adalah. Pemeriksaan kesehatan di faskes berupa pengecekan tanda tanda vital pemberian obat atau terapi sesuai dengan keluhan atau penyakit para lansia. Posyandu lansia dilakukan selain pemeriksaan kesehatan, juga diberikan penyuluhan dan edukasi tentang pola hidup sehat para lansia. Kunjungan ke rumah lansia, dilakukan pemeriksaan kesehatan dasar apabila tidak dapat ditangani di rumah, maka dianjurkan untuk ditindak lanjuti oleh dokter di Faskes.

Edukasi keluarga atau pendamping lansia berupa pertemuan yang dilakukan satu kali sebulan, memberikan pengetahuan tentang pola hidup sehat lansia, kepatuhan minum obat, pola diet.

Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan terjadi perubahan, dengan meningkatnya jumlah kunjungan lansia yang memeriksakan kesehatan, kemudian dengan kegiatan edukasi juga memberikan dampak yang baik, karena telah meningkatkan pengetahuan keluarga atau pendamping lansia tentang pola hidup sehat lansia.

Berikut ini adalah tujuan dari Inovasi PELIPUR LARA

1. Meningkatkan jumlah kunjungan lansia yang memeriksakan kesehatan di Pelayanan Kesehatan
2. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pasien, keluarga atau pendamping lansia tentang masalah kesehatan.
3. Pengadaan kartu kontrol pemeriksaan (Kartu Pesan Baik)

8. PELITA ASUH

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan dukungan dari berbagai bidang. Puskesmas berperan penting dalam memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Permenkes Nomor 23 tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi perseorangan maupun masyarakat pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi, yang dimaksud kelompok rawan gizi yaitu bayi, balita, ibu hamil dan lansia.

Puskesmas Bissappu adalah salah satu Puskesmas yang terletak di Kecamatan Bissappu, Kelurahan Bonto Lebang Kabupaten Bantaeng.



Keadaan alam di Wilayah Puskesmas Bissappu merupakan daerah yang cocok untuk lahan pertanian seperti persawahan dan perkebunan, sehingga penduduk yang bertempat tinggal dominan bergerak di sektor pertanian. Permasalahan gizi yang sering dijumpai yaitu terdapat balita dengan status gizi kurang.

Inovasi PELITA ASUH atau adalah kumpulan dari gagasan ide oleh petugas kesehatan di Puskesmas Bissappu. Setelah inovasi diimplementasikan berdampak pada perubahan status gizi balita. Jumlah balita yang memiliki gizi kurang yang teridentifikasi sebelum inovasi sebanyak 72 orang. Namun, setelah implementasi inovasi tahun 2021 dilakukan terjadi penurunan balita *underweight* sampai tahun 2022 sebanyak 25 orang. Monitoring dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan inovasi.

Tujuan inovasi ini adalah:

1. Meningkatkan status gizi balita
2. Menurunkan prevalensi balita gizi kurang
3. Menurunkan prevalensi berat badan kurang
4. Menurunkan prevalensi stunting

9. PETISI PEDULI REMATRI (Pemantauan Sistem Online dan Offline Peduli Remaja Putri)

Pemantauan Sistem *Online* dan *Offline* Peduli Remaja Putri (Petisi Peduli Rematri/PPR) dikembangkan oleh Puskesmas Labbo karena rendahnya jumlah remaja putri yang mendapatkan layanan kesehatan, serta kurang disiplin dalam minum obat Tablet Tambah Darah (TTD). Tidak ada data remaja putri baik yang di sekolah maupun yang putus/tidak sekolah sehingga kurang menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan. Inovasi ini memudahkan tenaga kesehatan, aparat pemerintah desa, lintas sektor memantau kesehatan remaja putri karena bukan hanya dilakukan dengan kunjungan rumah tetapi juga dipantau melalui *chat* WA atau telepon.

Inovasi PPR berdampak pada kelompok remaja putri, karena kelompok ini merupakan kelompok yang kurang mendapatkan akses pelayanan kesehatan, sementara mereka adalah calon ibu yang nanti melahirkan generasi penerus bangsa.

Jumlah remaja putri yang terpantau kesehatannya sebelum inovasi sebanyak 15 orang (2020), setelah implementasi inovasi dipantau 49 orang (2021), dan 65 orang (2022). Dan tentunya akan semakin meningkat di tahun berikutnya.



Inovasi PPR sangat sesuai dengan kategori 1 yaitu Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan. Inovasi ini menjadikan akses pelayanan kesehatan merata bagi semua kalangan masyarakat khususnya remaja putri yang merupakan kelompok usia yang harus mendapat perhatian lebih. Diharapkan remaja putri rutin mengonsumsi TTD dan vitamin agar asupan nutrisi tercukupi serta memeriksakan kesehatan secara berkala. Tujuan inovasi PPR adalah:

1. Meningkatkan angka kontak tenaga kesehatan dengan remaja putri
2. Status kesehatan remaja putri terpantau oleh tenaga kesehatan baik melalui sistem online maupun sistem offline melalui kunjungan rumah dan kunjungan ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerja puskesmas.
3. Meningkatnya derajat kesehatan pada remaja putri dalam hal persiapan menjadi calon ibu di masa depan
4. Lintas sektor mengetahui serta ikut memantau kesehatan remaja putri di wilayahnya.

10. POSYANDU SORE

Posyandu adalah suatu Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat, di mana salah satu tujuan pelaksanaan posyandu adalah sasaran yang datang di posyandu lebih 80 persen dari jumlah sasarannya. Kenyataannya di posyandu Butta toa BTN Arakeke, sasaran yang datang pada hari posyandu sangat sedikit karena di pagi hari, orangtua bayi/balita sedang berada ditempat kerja masing-masing karena sebahagian besar adalah ASN dan karyawan swasta, sehingga tidak memiliki kesempatan membawa anaknya ke posyandu.

Atas kesepakatan petugas puskesmas, kader posyandu dan opini warga, maka pelaksanaan posyandu dipindahkan ke sore hari dengan harapan orang tua bayi/balita sudah kembali dari tempat kerjanya dan dapat membawa anaknya ke posyandu.

Sebelum inovasi “POSYANDU SORE” diimplementasikan, telah dilakukan sosialisasi secara internal staf Puskesmas Lasepang agar inovasi ini di dukung oleh semua lintas program yang ada, sosialisasi kepada lintas sektor, kader posyandu melalui lokmin lintas sektor, untuk warga penerima manfaat, sosialisasi dilakukan dengan mengunjungi rumah sasaran dan diumumkan melalui mimbar Mesjid.

Setelah inovasi berjalan, jumlah sasaran yang datang ke posyandu meningkat signifikan sehingga target yang diharapkan tercapai.

Untuk keberlanjutan inovasi dilakukan beberapa strategi; strategi



institusional berupa regulasi, SK dan MOU. Strategi sosial berupa kolaborasi, partisipasi pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan inovasi dan strategi managerial dengan meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat di posyandu.

Tujuan inovasi ini yaitu :

Berangkat dari latar belakang tersebut maka Inovasi POSYANDU SORE digagas, diinisiasi dan diterapkan dengan tujuan agar jumlah sasaran yang hadir di posyandu bisa mencapai target, sehingga dengan sendirinya strata posyandu dapat meningkat dari yang awalnya strata Pratama bisa meningkat menjadi Purnama ataupun Mandiri dan semua sasaran dapat terlayani serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dapat terlaksana dengan baik.

11. SAMAWAKI (Sistim Aplikasi Menikah Bawa Pulang KK, KTP dan Buku Nikah)

Inovasi SAMAWAKI adalah solusi yang dikembangkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bantaeng untuk mengatasi permasalahan perkawinan yang belum tercatat pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan perilaku masyarakat yang kadangkala setelah menikah nanti sudah terdesak (terkadang sudah di meja operasi) baru mengurus dokumen kependudukannya. Tujuannya memberikan pelayanan yang memudahkan dan membahagiakan masyarakat yang akan menikah. Inovasi ini berkolaborasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.

Inovasi SAMAWAKI dilakukan melalui layanan One Stop Service artinya pasangan menikah hanya mendaftarkan pernikahannya di KUA dan pada waktu pernikahan pasangan menikah akan mendapatkan 5 dokumen Kependudukan (3 Kartu Keluarga, 2 KTP) dan 2 Buku Nikah dari KUA.

Status **kawin belum tercatat** berimplikasi terhadap istri, suami, dan anak, salah satunya yaitu suami dan istri dianggap sudah kawin tetapi belum tercatat karena tidak ada buku nikah sehingga diperlukan bukti pendukung lain seperti SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) sebagai dokumen untuk menjadi pegangan bagi Dinas Dukcapil dalam penerbitan Akta kelahiran anak dari pasangan tersebut.

Dampak dari inovasi SAMAWAKI terlihat pada penurunan jumlah kawin belum tercatat di Kabupaten Bantaeng yaitu tahun 2020 sebanyak **53.770**, kemudian di tahun 2021 menjadi **50.776** dan di tahun 2022 sebanyak **46.240 orang** Sehingga terlihat trend penurunan



jumlah kawin belum tercatat setelah adanya inovasi SAMAWAKI.

Inovasi SAMAWAKI sangat sesuai dengan kategori Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan. Ini memberikan akses layanan penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan merata bagi semua kalangan masyarakat, khususnya bagi pasangan yang akan menikah. Inovasi ini memungkinkan pasangan pengantin untuk menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan dokumen kependudukan sekaligus ketika mereka menikah, sehingga mengurangi masalah administrasi di kemudian hari dan biaya.

12. SENYUMAN ABIKU (Sehat Nyaman dan Aman Anakku Bebas Stunting dan Gizi Kurang)

Stunting adalah gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan anak tidak mencapai pertumbuhan yang sesuai usianya. Gizi kurang adalah suatu keadaan dimana kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu.

Inovasi SENYUMAN ABIKU (sehat, nyaman dan aman anakku bebas stunting dan gizi kurang) ini selaras dengan kategori pemberdayaan masyarakat karena kehidupan sehat sejahtera dan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, pelayanan kesehatan, edukasi dan penyuluhan khususnya masyarakat Kecamatan Sinoa.

Data program gizi Puskesmas Sinoa jumlah gizi kurang tahun 2020 (30 orang) tahun 2021 (28 orang), tahun 2022 (25 orang) dan stunting tahun 2020 (20 orang), tahun 2021 (18 orang), tahun 2022 (15 orang) dan khususnya Desa Bonto Tiro kasus balita gizi kurang tahun 2020 (9 orang), tahun 2021 (7 orang), tahun 2022 (6 orang) dan stunting tahun 2020 (8 orang), tahun 2021 (6 orang), tahun 2022 (6 orang).

Memantau pertumbuhan dan perkembangan balita yang ditimbang di posyandu untuk mengetahui status gizi balita. Adanya perhatian pemerintah setempat dengan balita yang mengalami gizi kurang dan stunting dengan mengalokasikan dana desa dengan pemberian PMT, pemberian multivitamin, pemberian bibit kepada sasaran dan adanya konvergensi desa terhadap penanganan gizi kurang dan stunting.

Tujuan inovasi adalah :

1. Menurunkan jumlah balita kasus stunting dan gizi kurang.
2. Meningkatkan pengetahuan orang tua tentang pola asuh dan pola makan balita.



3. Meningkatkan pengetahuan orang tua tentang pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan gizi.

13. PANDORA GESIT (Penggalian Donor Darah Terintegrasi)

Dasar hukum Lahirnya inovasi Pandora Gesit berdasarkan amanat : (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan

Masalah Inovasi ini lahir dari kondisi yang ada di RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu yang memiliki masalah penyediaan stok darah, dimana jumlah stok darah di rumah sakit tidak memenuhi jumlah permintaan darah yang meningkat. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) seringkali mengalami kondisi kritis, yaitu minimnya persediaan darah aman yang dibutuhkan masyarakat. Akibatnya rumah sakit mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akan transfusi darah.

Karena masih kurangnya stok darah yang bisa disediakan oleh UTDRS untuk melayani permintaan pasien, sehingga keluarga pasien harus mencari pendonor sendiri untuk mendonorkan darahnya, hal ini menyulitkan bagi keluarga pasien dalam mencari pendonor pengganti.

Ide solusi PANDORA GESIT adalah inovasi dari RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng. PANDORA GESIT adalah singkatan dari Penggalian Donor Darah Terintegrasi. PANDORA GESIT merupakan upaya untuk menjamin ketersediaan darah transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan khususnya di RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng.

Inovasi PANDORA GESIT merupakan solusi atas masalah kekurangan persediaan darah di Unit Transfusi Darah RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng. Inovasi ini diimplementasikan sejak tahun 2021 dengan melibatkan instansi-instansi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Puskesmas, Sekolah, Organisasi Masyarakat dan Tempat Ibadah. Dalam pelaksanaannya, inovasi ini didukung oleh tenaga-tenaga terlatih dan dilengkapi dengan fasilitas/sarana prasarana pendukung.

Hasil Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa output dari inovasi terlihat dari semakin meningkatnya jumlah kemitraan dan jumlah relawan pendonor dari tahun ke tahun, sehingga kebutuhan darah di



RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu dapat terpenuhi untuk masyarakat di Kabupaten Bantaeng maupun kabupaten sekitar yaitu, Kabupaten Bulukumba, Jeneponto dan Selayar.

Hasil capaian inovasi PANDORA GESIT setelah diimplementasikan yaitu pada tahun 2021 kebutuhan darah sebesar 2.382 kantong darah dengan ketersediaan stok darah sebesar 2.595 yang berarti kebutuhan darah telah terpenuhi bahkan melebihi permintaan. Mitra PANDORA GESIT juga telah mencapai 54 mitra dengan jumlah pendonor mitra sebanyak 2.172 pendonor. PANDORA GESIT telah berhasil meningkatkan jumlah pendonor sukarela sebanyak 287 pendonor dan menurunkan jumlah pendonor pengganti menjadi 177 pendonor. Selain itu, jumlah relawan on call yang menjadi layanan unggulan PANDORA GESIT jumlahnya turut meningkat yaitu sebanyak 32 orang relawan.

Sejak Tahun 2021, UTDRS terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon pendonor sehingga keterlibatan berbagai pihak terhadap inovasi ini semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah kemitraan dan jumlah relawan pendonor dari tahun ke tahun, sehingga kebutuhan darah di RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu dapat terpenuhi untuk masyarakat di Kabupaten Bantaeng maupun kabupaten sekitar yaitu, Kabupaten Bulukumba, Jeneponto dan Selayar.

Keunikan Inovasi PANDORA GESIT memiliki keunikan yaitu: (1). Adanya Kerjasama dengan pihak lain, tidak terbatas pada instansi-instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng, tetapi juga melibatkan Organisasi Masyarakat seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid. (2). Dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, setiap tahun dibuat jadwal rutin untuk setiap lokasi penggalangan donor darah. (3). Ada relawan On Call yang siap melakukan donor darah sewaktu-waktu diperlukan, relawan On Call ini lahir dari hasil edukasi dan adanya inisiatif relawan yang ingin memberikan pengabdian. Setiap relawan diberikan reward berupa sertifikat, dan akan ada notifikasi pengingat kepada relawan yang akan mengingatkan waktu untuk melakukan donor darah rutin.

Tahapan Inovasi ini dimulai dari tahapan persiapan yang meliputi persiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, sosialisasi dan edukasi, dan kerjasama dengan mitra.

Tahapan implementasi yaitu pelaksanaan kegiatan penggalangan donor darah secara rutin dan berkelanjutan dengan melibatkan mitra dan



relawan On Call.

Tahapan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengadakan evaluasi internal dan eksternal setiap

6 (enam) bulan, dengan melibatkan tim kerja, mitra, dan seluruh pihak yang terkait dengan inovasi ini.

Gagasan inovasi PANDORA GESIT lahir untuk menjamin ketersediaan darah transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan khususnya di RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng.

Adapun tujuan inovasi daerah ini adalah :

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan darah transfusi.
2. Memfasilitasi para masyarakat yang ingin berdonor darah.

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023

Indikator dan Target Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mengacu pada Sasaran RKPD

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																								
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	90	48,510,201,330	90.00	19,274,143,418	90.00	73,440,689,813	15.45	12,611,009,370	1.96	1,440,055,770					17.42	14,051,065,140	107.42	33,325,208,558	119.35	68.70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Pendidikan Dasar	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	90	21,218,030,485	90.00	8,064,162,228	90.00	34,952,694,454	23.22	9,017,329,370	1.21	421,885,400					24.43	9,439,214,770	114.43	17,503,376,998	127.14	82.49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah	90	103,539,117			90.00	350,073,653	-								-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Terbangunnya Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	90	10,771,877,564			90.00	5,840,503,888	-								-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terehabilitasinya Sedang/Berat Ruang Kelas	90	2,404,459,236	90.00	2,867,681,000	90.00	3,775,609,407	-								-	-	90.00	2,867,681,000	100.00	119.27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terehabilitasinya Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	90	164,296,484	90.00	217,408,000	90.00	280,000,000	-								-	-	90.00	217,408,000	100.00	132.33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah							102,120,856									-	-					
		Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah							353,250,450									-	-					
		Pengadaan Mebel Sekolah							1,260,230,500			23.01	289,999,500					23.01	289,999,500					
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya Perlengkapan Sekolah Untuk Peserta Didik	90	1,655,000,000	90.00	1,600,626,500	90.00	3,123,462,500	0.58	20,197,700							0.58	20,197,700	90.58	1,620,824,200	100.65	97.93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	90	219,398,286	90.00	2,787,252,000	90.00	782,131,200	-								-	-	90.00	2,787,252,000	100.00	1,270.41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar dan Ujian Sekolah	90	1,683,762,245	90.00	286,859,300	90.00	876,612,000	-	3.16	27,720,000						3.16	27,720,000	93.16	314,579,300	103.51	18.68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan dan tingkat Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Monitoring,Evaluasi Tingkat SD	90	222,348,952			90.00	20,000,000	-	30.00	6,000,000						30.00	6,000,000	30.00	6,000,000	33.33	2.70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaat Minat,Bakat dan Kreatifitas Siswa	Terlaksananya Lomba MIPAS Kreatifitas SD/MI	90	1,427,817,422	90.00	304,335,428	90.00	165,000,000	9.73	17,834,150	50.71	83,675,900					60.44	101,510,050	150.44	405,845,478	167.16	28.42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah SD/MI	90	2,381,055,545			90.00	15,000,000	-	40.00	6,000,000						40.00	6,000,000	40.00	6,000,000	44.44	0.25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terbayarnya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	90	184,475,634			90.00	18,008,700,000	44.87	8,979,297,520	0.05	8,490,000					44.92	8,987,787,520	44.92	8,987,787,520	49.91	4,872.07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90	16,237,972,721	90.00	8,338,908,230	90.00	17,319,453,750	18.67	3,593,680,000	2.42	465,293,900			21.09	4,058,973,900	111.09	12,397,882,130	123.44	76.35		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pembangunan Laboratorium SMP						90.00	979,578,000	-						-	-		-					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah						90.00	1,305,779,650	-						-	-		-					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terehabilitasinya Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	90	890,190,275	90.00	4,101,617,810	90.00	2,195,531,850	-						-	-	90.00	4,101,617,810	100.00	460.76		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terehabilitasinya Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	90	147,682,601	90.00	289,073,410	90.00	260,008,600	-						-	-	90.00	289,073,410	100.00	195.74		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Terehabilitasinya Sedang/Berat Laboratorium Sekolah	90	125,241,115			90.00	439,009,600	-						-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terehabilitasinya Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	90	251,560,000			90.00	107,672,000	-						-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Mebel Sekolah						90.00	345,727,950	-						-	-		-					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya Perlengkapan Sekolah Untuk Peserta Didik Baru	90	9,301,923,396	90.00	3,520,323,670	90.00	2,698,306,500	-	0.74	19,944,200				0.74	19,944,200	90.74	3,540,267,870	100.82	38.06		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar dan Ujian Sekolah	90	1,177,292,227	90.00	420,747,630	90.00	460,423,900	-	83.33	383,689,700				83.33	383,689,700	173.33	804,437,330	192.59	68.33		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Monitoring,Evaluasi Tingkat SMP	90	147,406,249			90.00	15,000,000	-						-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaat Minat,Bakat dan Kreatifitas Siswa	Terlaksananya Lomba MIPAS Kreatifitas SMP/MTs	90	628,747,723	90.00	7,145,710	90.00	110,000,000	-	56.05	61,660,000				56.05	61,660,000	146.05	68,805,710	162.28	10.94		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah SMP/MTs	90	1,725,585,684			90.00	10,000,000	-						-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Terbayarnya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	95	1,842,343,451			90.00	8,392,415,700	38.54	3,593,680,000	-				38.54	3,593,680,000	38.54	3,593,680,000	40.57	195.06		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Nonformal	95	8,851,905,594	90.00	2,871,072,960	90.00	15,419,441,609	-	-	3.57	549,876,470			3.57	549,876,470	93.57	3,420,949,430	98.49	38.65		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terbangunnya Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	90	827,500,000	90.00	400,000,000	90.00	3,338,326,698	-	2.70	90,272,500				2.70	90,272,500	92.70	490,272,500	103.00	59.25		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terbangunnya Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah PAUD	90	489,856,681			90.00	2,382,224,996	-	0.73	17,311,730				0.73	17,311,730	0.73	17,311,730	0.81	3.53		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terehabilitasinya Sedang/Berat Gefung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	90	268,110,000			90.00	1,373,957,963	-						-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Mebel PAUD						90.00	540,000,000	-						-	-			-				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Tersedianya Perlengkapan Sekolah	90	5,286,287,798	90.00	1,629,318,760	90.00	2,025,688,000	-	0.39	7,839,800			0.39	7,839,800	90.39	1,637,158,560	100.43	30.97			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	90	219,398,286	90.00	841,754,200	90.00	759,434,632	-					-	-	90.00	841,754,200	100.00	383.66			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	90	181,460,522			90.00	912,982,600	-					-	-	-	-	-	-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah PAUD	Terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah PAUD	90	147,277,904			90.00	1,160,626,720	-	37.43	434,452,440			37.43	434,452,440	37.43	434,452,440	41.59	294.99			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terbayarnya Pengelolaan Dana BOP PAUD	90	1,432,014,403			90.00	2,926,200,000	-					-	-	-	-	-	-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	90	2,202,292,530	-	90.00	5,749,100,000	-	-	0.05	3,000,000			0.05	3,000,000	0.05	3,000,000	0.06	0.14			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manjemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah NonFormal	90	770,278,127			90.00	2,200,000,000	-	0.14	3,000,000			0.14	3,000,000	0.14	3,000,000	0.15	0.39			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terbayarnya Pengelolaan Dan BOP NonFormal/Kesetaraan	90	1,432,014,403			90.00	3,549,100,000	-					-	-	-	-	-	-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Meningkatnya Kualitas/Mutu Layanan Pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum yang dikembangkan	95	114,575,716			90.00	405,000,000	33.31	149,900,000	3.83	15,530,000			37.15	165,430,000	37.15	165,430,000	39.10	144.38			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Meningkatkan Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar					90.00	185,000,000	72.92	149,900,000	8.39	15,530,000			81.32	165,430,000	81.32						
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						90.00	185,000,000	72.92	149,900,000	8.39	15,530,000			81.32	165,430,000							
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Meningkatkan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini/NonFormal	90	114,575,716			90.00	220,000,000	-	-				-	-	-	-	-	-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal	Guru PAUD/NonFormal yang Mengikuti Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal	90	114,575,716			90.00	220,000,000	-					-	-	-	-	-	-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Meningkatnya Kualitas/Mutu Layanan Pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Memenuhi Standar Kualifikasi S1/DIV dan Bersertifikasi Pendidik	90	24,267,948,161			90.00	6,107,365,562	-	-	12.01	733,551,790			12.01	733,551,790	12.01	733,551,790	13.35	3.02			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik Pada Satuan Pendidikan	90	24,267,948,161			90.00	6,107,365,562	-	-	12.01	733,551,790			12.01	733,551,790	12.01	733,551,790	13.35	3.02			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan	Guru Pada Satuan Pendidikan	90	19,733,090,744			90.00	2,052,220,900	-		19.71	404,420,500			19.71	404,420,500	19.71	404,420,500	21.90		2.05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD dan Pendidikan	Guru Pada Satuan Pendidikan	90	4,534,857,417			90.00	4,055,144,662	-		8.12	329,131,290			8.12	329,131,290	8.12	329,131,290	9.02		7.26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang Dilestarikan	90	152,289,376			90.00	1,845,978,500	6.68	136,915,000	0.21	4,400,000			6.89	141,315,000	6.89	141,315,000	7.66		92.79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Pelaku Budaya	90	152,289,376			90.00	1,845,978,500	6.68	136,915,000	0.21	4,400,000			6.89	141,315,000	6.89	141,315,000	7.66		92.79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terpeliharanya Objek Tradisi Budaya	90	152,289,376			90.00	1,845,978,500	6.68	136,915,000	0.24	4,400,000			6.91	141,315,000	6.91	141,315,000	7.68		92.79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang DiLestarikan	90	884,222,676			90.00	658,684,300	5.40	39,510,900	69.37	507,714,677			74.77	547,225,577	74.77	547,225,577	83.08		61.89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pembinaan Kesenian Masyarakat	90	884,222,676			90.00	658,684,300	5.40	39,510,900	69.37	507,714,677			74.77	547,225,577	74.77	547,225,577	83.08		61.89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Pelaku Organisasi dan Komunitas Seni yang Berkarya	90	884,222,676			90.00	658,684,300	5.40	39,510,900	77.08	507,714,677			82.48	547,225,577	82.48	547,225,577	91.64		61.89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6	Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola	90	267,881,114			90.00	40,000,000	-	-	7.50	3,000,000			7.50	3,000,000	7.50	3,000,000	8.33		1.12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Peringkat Penetapan Cagar Budaya Kab/Kota	90	267,881,114			90.00	40,000,000	-	-	7.50	3,000,000			7.50	3,000,000	7.50	3,000,000	8.33		1.12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penetapan Cagar Budaya	Cagar Budaya Yang dilestarikan	90	267,881,114			90.00	40,000,000	-	-	7.50	3,000,000			7.50	3,000,000	7.50	3,000,000	8.33		1.12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
7	Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang dikelola	90				90.00	691,960,900	13.65	104,966,300	1.07	8,217,200			14.72	113,183,500	14.72	113,183,500	16.36		#DIV/0!	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengelolaan Museum Kab/Kota	90				90.00	691,960,900	13.65	104,966,300	1.07	8,217,200			14.72	113,183,500	14.72	113,183,500	16.36		#DIV/0!	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		90				90.00	691,960,900	13.65	104,966,300	1.19	8,217,200			14.84	113,183,500	14.84	113,183,500	16.49		#DIV/0!	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
8		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terciptanya Pelayanan Urusan Pemerintahan Dengan Baik	95	512,941,264,761	90.00	445,539,220	90.00	227,484,813,757	13.54	34,230,962,206		59,422,958,007			13.54	93,653,920,213	103.54	94,099,459,433	108.99		18.35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	95	880,622,455	90.00	117,966,610	90.00	80,000,000	26.76	23,790,000	27.87	24,777,700			54.64	48,567,700	144.64	166,534,310	152.25		18.91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90	383,047,036			90.00	30,000,000	35.70	11,900,000	22.03	6,610,100			57.73	18,510,100	57.73	18,510,100	64.15		4.83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Tersedianya Laporan DPA - SKPD	90	497,575,419	90.00	117,966,610	90.00	20,000,000	-	-	42.14	8,428,800			42.14	8,428,800	132.14	126,395,410	146.83		25.40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									I		II		III		IV								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD			90.00	30,000,000	35.67	11,890,000	32.46	9,738,800					68.13	21,628,800						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Pelaporan Adminstrasi Keuangan Negara	90.00	508,555,973,562	90.00	32,493,300	90.00	225,460,362,139	13.60	34,078,846,851	23.68	59,328,855,310			37.29	93,407,702,161	127.29	93,440,195,461	141.43	18.37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	95	507,910,757,959			95.00	225,367,646,689	14.36	34,054,258,351	26.31	59,295,167,560			40.67	93,349,425,911	40.67	93,349,425,911	42.81	18.38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD	90	515,196,403			90.00	50,040,150	22.55	12,536,500	26.24	13,130,650			48.79	25,667,150	48.79	25,667,150	54.21	4.98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	90	130,019,200	90.00	32,493,300	90.00	21,095,100	25.60	6,000,000	71.56	15,095,100			97.16	21,095,100	187.16	53,588,400	207.95	41.22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun					100.00	21,580,200	28.04	6,052,000	25.31	5,462,000			53.35	11,514,000	53.35	11,514,000	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Administasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	90.00	151,914,899			90.00	27,124,500	30.77	9,272,900	8.85	2,400,000			39.62	11,672,900	39.62	11,672,900	44.02	7.68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen dan Data Aset	90	151,914,899			95.00	27,124,500	32.48	9,272,900	8.85	2,400,000			41.33	11,672,900	41.33	11,672,900	45.92	7.68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						90.00	27,631,500	45.34	13,921,400		-			45.34	13,921,400	45.34	13,921,400	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pendataan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terciptanya Pelayanan Urusan Pemerintahan Dengan Baik					90.00	27,631,500	45.34	13,921,400					45.34	13,921,400	45.34	13,921,400	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	90.00	1,334,245,797	90.00	134,619,950		519,452,200	11.62	60,370,000	70.98	42,850,000			82.60	103,220,000	172.60	237,839,950	191.78	17.83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	90	29,923,085	90.00	2,869,950	95.00	5,268,200	-						-	-	90.00	2,869,950	100.00	9.59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	90	56,799,600	90.00	7,200,000	95.00	9,600,000	23.75	2,400,000					23.75	2,400,000	113.75	9,600,000	126.39	16.90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya Perjalanan Dinas	90	1,247,523,112	90.00	124,550,000	95.00	504,584,000	10.91	57,970,000	8.49	42,850,000			19.41	100,820,000	109.41	225,370,000	121.56	18.07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							205,420,100	-	-		-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terciptanya Pelayanan Urusan Pemerintahan Dengan Baik					90.00	205,420,100	-						-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	90	1,395,336,334	11.50	160,459,360	90.00	892,415,918	3.53	35,051,055	1.86	18,474,997			5.40	53,526,052	16.90	213,985,412	18.78	15.34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	90	1,048,123,019	90.00	160,459,360	95.00	190,671,698	15.41	30,924,355	9.69	18,474,997			25.10	49,399,352	115.10	209,858,712	127.89	20.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa Pelayanan Umum	90	347,213,315			95.00	701,744,220	0.56	4,126,700					0.56	4,126,700	0.56	4,126,700	0.62	1.19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	90	623,171,714			90.00	505,459,000	1.73	9,710,000	1.11	5,600,000			2.84	15,310,000	2.84	15,310,000	3.15	2.46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	90	623,171,714			95.00	42,130,000	21.90	9,710,000	11.63	4,900,000			33.53	14,610,000	33.53	14,610,000	37.25	2.34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						95.00	6,010,000	-		11.65	700,000					11.65	700,000					
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						95.00	457,319,000	-								-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
JUMLAH KESELURUHAN				90	587,138,383,134	90.00	19,719,682,638	90.00	310,674,492,832	13.69	47,273,263,776	18.00	62,135,427,444					31.69	109,408,691,220	50.27	129,015,190,358			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																								
DINAS KESEHATAN																								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																								
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		28,130,549,838			28,130,549,838	19.57	5,505,086,207	25.15	7,074,077,599												Dinas Kesehatan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		80,019,000			80,019,000	29.34	23,480,000	6.50	5,202,200												Dinas Kesehatan
		Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan)	95	80,019,000		95	80,019,000	29.34	23,480,000	6.50	5,202,200	0.0		0.0	35.8	28,682,200							Dinas Kesehatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		26,220,500,338			26,220,500,338	19.64	5,149,322,188	26.08	6,837,109,766	0.0		0.0	45.7	11,986,431,954							Dinas Kesehatan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN (Bulan)	90	26,011,700,338		90	26,011,700,338	19.60	5,097,244,388	26.12	6,793,006,566	0.0		0.0	45.7	11,890,250,954							Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD (Bulan)	90	208,800,000		90	208,800,000	24.94	52,077,800	21.12	44,103,200	0.0		0.0	46.1	96,181,000							Dinas Kesehatan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		81,000,000			81,000,000	19.44	15,750,000	22.84	18,500,000	0.0		0.0	42.3	34,250,000							Dinas Kesehatan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	90	81,000,000		90	81,000,000	19.44	15,750,000	22.84	18,500,000	0.0		0.0	42.3	34,250,000							Dinas Kesehatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		497,888,000			497,888,000	13.66	67,987,883	5.77	28,710,000	0.0		0.0	19.4	96,697,883							Dinas Kesehatan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Administrasi Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	90	35,638,000		90	35,638,000	7.91	2,818,000	0.00	-	0.0		0.0	7.9	2,818,000							Dinas Kesehatan
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Administrasi Dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	90	200,000,000		90	200,000,000	0.00	-	0.00	-	0.0		0.0	0.0	-							Dinas Kesehatan
		Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan	Jumlah Administrasi Bacaan Dan Peralihan Perundang Undangan (Bulan)	100	12,000,000		100	12,000,000	48.75	5,850,000	0.00	-	0.0		0.0	48.8	5,850,000							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Administrasi Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bulan)	100	250,250,000		100	250,250,000	23.70	59,319,883	11.47	28,710,000	0.0		0.0	35.2	88,029,883							Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		648,532,500			648,532,500	19.74	128,002,316	20.72	134,364,133	0.0		0.0	40.5	262,366,449							Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Administrasi Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik (Bulan)	100	284,055,000		100	284,055,000	23.38	66,406,360	14.45	41,037,877	0.0		0.0	37.8	107,444,237							Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Administrasi Kebersihan Kantor (Bulan)	100	364,477,500		100	364,477,500	16.90	61,595,956	25.61	93,326,256	0.0		0.0	42.5	154,922,212							

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		602,610,000				602,610,000	20.00	120,543,820	8.33	50,191,500	0.0		0.0		28.3	170,735,320					Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (Bulan)	100	602,610,000			100	602,610,000	20.00	120,543,820	8.33	50,191,500	0.0		0.0		28.3	170,735,320					Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			89,943,756,714				89,943,756,714	7.39	6,647,788,500	16.29	14,650,054,009	0.0		0.0		23.7	21,297,842,509					Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan		7,267,724,650				7,267,724,650	0.00	-	0.27	19,269,600	0.0		0.0		0.3	19,269,600					Dinas Kesehatan
		Rehabilitasi & Pemeliharaan Puskesmas		100	163,679,950			100	163,679,950	0.00	-	0.00	-	0.0		0.0		0.0	-					
		Rehabilitasi & Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		100	222,845,700			100	222,845,700	0.00	-	0.00	-	0.0		0.0		0.0	-					Dinas Kesehatan
		Pengadaan Prasarana & Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100	3,881,199,000			100	3,881,199,000	0.00	-	0.00	-	0.0		0.0		0.0	-					Dinas Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100	1,000,000,000			100	1,000,000,000	0.00	-	0.00	-	0.0		0.0		0.0	-					Dinas Kesehatan
		Pengadaan Obat Vaksin		100	1,000,000,000			100	1,000,000,000	0.00	-	1.93	19,269,600	0.0		0.0		1.9	19,269,600					Dinas Kesehatan
		Pengadaan Bahan Habis Pakai		100	1,000,000,000			100	1,000,000,000	0.00	-	0.00	-	0.0		0.0		0.0	-					Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			82,676,032,064				82,676,032,064	8.04	6,647,788,500	17.70	14,630,784,409	0.0		0.0		25.7	21,278,572,909					Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		100	113,000,000			100	113,000,000	0.00	-	85.65	96,788,000	0.0		0.0		85.7	96,788,000					Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			13,000,000				13,000,000	22.69	2,950,000	0.00	-	0.0		0.0								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			13,000,000				13,000,000	22.69	2,950,000	0.00	-	0.0		0.0								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			13,000,000				13,000,000	8.47	1,100,500	67.69	8,799,500	0.0		0.0								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		100	13,000,000			100	13,000,000	0.00	-	30.77	4,000,000	0.0		0.0		30.8	4,000,000					Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			213,000,000				213,000,000	0.94	2,000,000	95.77	203,999,500	0.0		0.0								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			213,000,000				213,000,000	0.00	-	95.01	202,363,500	0.0		0.0								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi		100	13,000,000			100	13,000,000	0.00	-	0.00	-	0.0		0.0		0.0	-					Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus		100	113,000,000			100	113,000,000	1.77	2,000,000	92.04	103,999,909	0.0		0.0		93.8	105,999,909					Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		100	213,000,000			100	213,000,000	0.94	2,000,000	25.12	53,498,000	0.0		0.0		26.1	55,498,000					Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		100	13,000,000			100	13,000,000	4.62	600,000	48.46	6,300,000	0.0		0.0		53.1	6,900,000					Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV		100	213,000,000			100	213,000,000	0.28	600,000	3.37	7,181,400	0.0		0.0		3.7	7,781,400					Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		100	717,029,600			100	717,029,600	6.96	49,939,500	14.55	104,307,000	0.0		0.0		21.5	154,246,500					

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
8		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		100	13,000,000			100	13,000,000	0.00	-	52.38	6,810,000	0.0		0.0		52.4	6,810,000			Dinas Kesehatan		
9		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		90	113,000,000			90	113,000,000	0.00	-	0.00	-	0.0		0.0		0.0	-			Dinas Kesehatan		
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan		100	363,000,000			100	363,000,000	2.81	10,200,000	56.84	206,320,000	0.0		0.0		59.6	216,520,000			Dinas Kesehatan		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular & Tidak Menular		100	433,000,000			100	433,000,000	0.69	3,000,000	21.84	94,587,000	0.0		0.0		22.5	97,587,000			Dinas Kesehatan		
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		100	45,995,176,395			100	45,995,176,395	13.35	6,140,848,500	24.46	11,251,274,500	0.0		0.0		37.8	17,392,123,000			Dinas Kesehatan		
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		100	813,000,000			100	813,000,000	0.00	-	75.31	612,281,600	0.0		0.0		75.3	612,281,600			Dinas Kesehatan		
		Operasional Pelayanan Puskesmas		90	30,376,526,069			90	30,376,526,069	0.00	-	4.10	1,246,574,500	0.0		0.0		4.1	1,246,574,500			Dinas Kesehatan		
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		90	2,670,300,000			90	2,670,300,000	15.96	426,200,000	15.44	412,300,000	0.0		0.0		31.4	838,500,000			Dinas Kesehatan		
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		100	13,000,000			100	13,000,000	0.00	-	60.77	7,900,000	0.0		0.0		60.8	7,900,000			Dinas Kesehatan		
	10		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini & Respon Wabah		100	13,000,000			100	13,000,000	26.15	3,400,000	11.54	1,500,000	0.0		0.0		37.7	4,900,000			Dinas Kesehatan	
12		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDMK			1,457,000,000				1,457,000,000	16.32	237,750,000	16.55	241,150,000	0.0		0.0		32.9	478,900,000			Dinas Kesehatan		
		Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKP dan UKM di wilayah kab/Kota			1,457,000,000				1,457,000,000	16.32	237,750,000	16.55	241,150,000	0.0		0.0		32.9	478,900,000					
		Pemenuhan Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar		100	1,372,000,000			100	1,372,000,000	16.32	223,950,000	16.15	221,550,000	0.0		0.0		32.5	445,500,000					
		Pembinaan dan Pengawasan SDMK		100	85,000,000			100	85,000,000	16.24	13,800,000	23.06	19,600,000	0.0		0.0		39.3	33,400,000					
		PROGRAM PERSEDIAAN FARMASI, ALKES & MAMIN			13,000,000				13,000,000	13.85	1,800,000	0.00	-	0.0		0.0		13.8	1,800,000					
		Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil pemeriksaan Pos Market pada produksi dan produk makanan dan minuman industri RT			13,000,000				13,000,000	13.85	1,800,000	0.00	-	0.0		0.0		13.8	1,800,000					
		Pemeriksaan Post market pada produk makanan - minuman industri RT yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan		100	13,000,000			100	13,000,000	13.85	1,800,000	0.00	-	0.0		0.0		13.8	1,800,000					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			226,000,000				226,000,000	0.00	-	90.08	203,579,500	0.0		0.0		90.1	203,579,500					
		Pelaksanaan sehat dalam rangka promotik preventif Tingkat Daerah Kab/Kota			226,000,000				226,000,000	0.00	-	90.08	203,579,500	0.0		0.0		90.1	203,579,500					
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			213,000,000				213,000,000	0.00	-	93.89	199,984,500											
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan & Gerakan Hidup Bersih & Sehat		100	13,000,000			100	13,000,000	0.00	-	27.65	3,595,000	0.0		0.0		27.7	3,595,000					
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program					119,770,306,552	119,770,306,552					10.35	12,392,424,707	18.51	22,168,861,108	0.0	-	0.0	-	28.9	34,561,285,815				
					Rata - Rata Capaian Kinerja (%)					10.34682557										29				
					Predikat Kinerja																			
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
RSUD Prof.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU																								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
				5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
	MembaiKnya Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya prosentase administrasi perkantoran																						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji Pegawai	100	17,347,319,000	94.26	14,472,012,932	96.73	16,309,040,979	19.76	3,350,325,144	48.00	8,136,593,792	-	0	-	0	48.00	8,136,593,792	142.26	22,608,606,724	142	130.33	RSUD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening atas pemakaian telepon,air dan listrik	100	2,002,000,000	94.10	1,868,893,187	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	94.10	1,868,893,187	94	93.35	RSUD	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya atas perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi	100	88,000,000	62.06	57,929,499	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	62.06	57,929,499	62	65.83	RSUD	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan Kesehatan yang berku	100	85,000,000,000	115.08	74,804,265,501	113.56	96,524,107,552	40.44	24,266,142,003	81.62	48,972,453,930	-	0	-	0	81.62	48,972,453,930	196.70	123,776,719,431	197	145.62	RSUD	
	Tersedianya Sarana Peralatan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya prosentase sarana rumah sakit yang memadai																						
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan jumlah kunjungan pa	100	19,760,191,025	99.81	17,934,945,661	92.80	5,361,513,401	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	99.81	17,934,945,661	100	90.76	RSUD	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																									
Predikat Kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
RSUD BANYORANG																									
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	70%	7,797,580,675	-		-	14,28	Rp	794,965,041	30,03	Rp	1,835,645,802	54,94	Rp	3,058,220,034	91,97	Rp	4,013,205,557		2,630,610,843		526,122,169	RSUD Banyorang
2		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persentase capaian perencanaan yang tersusun dalam renstra, renja, RAK, dan DPA perangkat daerah	75%	100,000,000	-	-	-		Rp	2,771,000,000		Rp	7,574,300,000	61,85	Rp	13,401,600,000	76,76	Rp	16,630,600,000		10,345,300		2,069,060	RSUD Banyorang
3		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dok	20,000,000															-	-	-	-	RSUD Banyorang	
4		Kordinasi dan penyusunan dokumen RAK SKPD	jumlah dokumen RAK	1 Dok	50,000,000	-	-	-	13,72	Rp	2,025,400,000	40,82	Rp	6,025,700,000	75,56	Rp	11,152,000,000	95,43	Rp	14,083,200,000		8,051,100		1,610,220	RSUD Banyorang
5		Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan realisasi	1 Dok	30,000,000	-	-	-	10,79	Rp	745,600,000	22,41	Rp	1,548,600,000	32,57	Rp	2,249,600,000	36,88	Rp	2,547,400,000		2,294,200		458,840	RSUD Banyorang
6		Administrasi keuangan perangkat daerah	tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	70%	4,294,935,925					Rp	579,063,061		Rp	1,379,594,288	52,92	Rp	2,267,334,020	97,20	Rp	2,975,866,823		1,958,657,349		391,731,470	RSUD Banyorang
7		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	58 org	4,219,935,925	-	-	-	13,44	Rp	570,240,961	32,12	Rp	1,362,882,588	52,78	Rp	2,239,127,020	97,23	Rp	2,935,294,423		1,933,123,549		386,624,710	RSUD Banyorang
8		pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	jumlah jasa pengelola keuangan	12 Dok	30,000,000	-	-	-	19,44	Rp	1,740,400,000	38,88	Rp	3,480,900,000	66,61	Rp	5,961,900,000	96,25	Rp	8,615,000,000		5,221,300		1,044,260	RSUD Banyorang
9		kordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	jumlah kordinasi dan penyusunan laporan keuanhgan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 Lap	45,000,000	-	-	-	21,58	Rp	7,081,700,000	40,33	Rp	13,230,800,000	67,82	Rp	22,245,100,000	94,64	Rp	31,957,400,000		20,312,500		4,062,500	RSUD Banyorang
10		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	tersedianya laporan barang milik daerah	80%	90,000,000					Rp	3,387,000,000		Rp	5,630,400,000	63,40	Rp	8,826,400,000	93,62	Rp	13,034,400,000		9,017,400		1,803,480	RSUD Banyorang
11		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	jumlah barang milik daerah	12 Lap	90,000,000	-	-	-	24,32	Rp	3,387,000,000	40,44	Rp	5,630,400,000	63,40	Rp	8,826,400,000	93,62	Rp	13,034,400,000		9,017,400		1,803,480	RSUD Banyorang
12		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah		30,000,000					Rp	-		Rp	-		Rp	-			-		-	-	RSUD Banyorang	
13		Pengadaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	jumlah aparatur yang dipasilitasi administrasi kepegawaian																	-		-	-	RSUD Banyorang	
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Lap	30,000,000																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				5	6	7	8		9		10		11		12	13= 6 + 12				14 = 13/5x100%			15					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	
14		kordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	jumlah laporan administrasi kepegawaian															-		-		-	RSUD Banyorang					
15		Administrasi umum perangkat daerah	terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	75%	753,000,000					Rp	22,389,200.00		Rp	64,349,300.00		Rp	186,777,500	93.05	Rp	208,819,500		86,738,500		86,738,500		17,347,700	RSUD Banyorang	
16		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 Pkt	110,000,000	-		-	21,14	Rp	11,589,200.00	47,08	Rp	25,809,300.00	64,25	Rp	35,217,500.00	95,56	Rp	52,379,500.00		37,398,500		37,398,500		7,479,700	RSUD Banyorang	
17		penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 pkt	198,000,000										100	Rp	71,700,000.00		100	Rp	71,700,000.00		-		-	-	RSUD Banyorang	
18		penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	1 pkt	130,000,000													-		-		-	-	-	-	-	RSUD Banyorang	
19		penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 Dok	25,000,000	-		-										-		-		-	-	-	-	-	RSUD Banyorang	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1 Pkt	160,000,000																							
20		penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah perjadin	12 Lap	130,000,000	-		-	11,39	Rp	10,800,000.00	40,66	Rp	38,540,000.00	84,26	Rp	79,860,000.00	89,41	Rp	84,740,000.00		49,340,000		49,340,000		9,868,000	RSUD Banyorang	
21		pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	tersedianya barang milik daerah	80	920,000,000					Rp	-		Rp	-		Rp	-		-		-		-		-	-	-	RSUD Banyorang
22		Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Pkt	500,000,000													-		-		-		-	-	-	RSUD Banyorang	
23		pengadaan mebel	jumlah mebel yang tersedia	1 Pkt	120,000,000													-		-		-		-	-	-	RSUD Banyorang	
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Pkt	250,000,000																							
24		pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah pengadaan dan peralatan mesin lainnya	1 Pkt	50,000,000													-		-		-		-	-	-	RSUD Banyorang	
25		penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	cakupan pelayanan penunjang pemerintah	75%	760,000,000					Rp	171,708,780		Rp	328,365,400.00	64,48	Rp	500,857,400	86,81	Rp	691,250,620		500,074,180		500,074,180		100,014,836	RSUD Banyorang	
26		penyediaan jasa komonikasi,sumber daya air dan listrik	jumlah biaya tagihan telepon,air dan listrik	12 Bln	300,000,000	-		-	24,28	Rp	56,931,930.00	47,75	Rp	111,944,050.00	67,82	Rp	158,961,310	85,86	Rp	201,247,230		168,875,980		168,875,980		33,775,196	RSUD Banyorang	
27		penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah biaya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	60,000,000	-		-	10,37	Rp	4,098,000.00	21,82	Rp	8,623,000.00	30,94	Rp	12,223,000.00	53,10	Rp	22,598,000		12,721,000		12,721,000		2,544,200	RSUD Banyorang	
28		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah jasa kebersihan kantor	12 Bln	400,000,000	-		-	22,00	Rp	110,678,850	41,32	Rp	207,798,350.00	65,55	Rp	329,673,090	90,01	Rp	467,405,390		318,477,200		318,477,200		63,695,440	RSUD Banyorang	
29		pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	terpeliharanya barang milik daerah	80%	625,000,000					Rp	15,646,000.00		Rp	50,132,114.00	49,39	Rp	81,023,114.00	65,60	Rp	107,603,614		65,778,114		65,778,114		13,155,623	RSUD Banyorang	
30		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan yg tersedia	2 Unt	80,000,000	-		-	9,62	Rp	3,500,000.00	28,86	Rp	10,500,000.00	46,73	Rp	17,000,000.00	66,57	Rp	24,217,500.00		14,000,000		14,000,000		2,800,000	RSUD Banyorang	
31		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan yg tersedia	3 Unt	250,000,000				9,23	Rp	10,150,000.00	32,42	Rp	35,636,114.00	50,63	Rp	55,636,114.00	66,36	Rp	72,921,114.00		45,786,114		45,786,114		9,157,223	RSUD Banyorang	
32		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi gedung yg tersedia	1 Unt	85,000,000	-		-	11,23	Rp	1,996,000.00	22,49	Rp	3,996,000.00	47,21	Rp	8,387,000.00	58,91	Rp	10,465,000.00		5,992,000		5,992,000		1,198,400	RSUD Banyorang	
		Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unt	120,000,000																							
		Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unt	90,000,000																							
		Peningkatan layanan BLUD	Persentase layanan BLUD yang terlaksana	70%	165,000,000					Rp	-		Rp	-		Rp	-											
		Playanan dan penunjang BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unt Kerja	165,000,000																							
33		Penataan Organisasi	Persentase Cakupan Penataan Organisasi	80	59,644,750					Rp	-		Rp	-		Rp	-		-		-		-		-	-	-	RSUD Banyorang

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13= 6 + 12	13	14 = 13/5x100%	14	15	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
34		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang tersedia	12 Dok	59,644,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD Banyorang
35		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	70	5,746,281,825	-	-	7,55	Rp 339,620,979	26,61	Rp 1,196,561,394	33,97	Rp 1,526,953,524	61,61	Rp 4,679,383,934		1,536,182,373		1,536,182,373			307,236,475		RSUD Banyorang
36		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM Dan UKP	80	2,896,281,825	-	-	-	Rp 4,880,000.00		Rp 411,493,880.00	16,05	Rp 423,903,880	60,26	Rp 3,419,730,546		416,373,880		416,373,880			83,274,776		RSUD Banyorang
		Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	1 Unt	200,000,000																			
37		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan yang dilakukan	1 Unt	129,281,825			0,91	Rp 4,880,000.00	0,91	Rp 4,880,000.00	3,23	Rp 17,290,000.00	84,13	Rp 450,802,480		9,760,000		9,760,000			1,952,000		RSUD Banyorang
38		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas yang dilakukan	1 unt													-		-			-		RSUD Banyorang
		Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Unt	120,000,000																			
39		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang tersedia	75%	500,000,000	-	-	-		21,60	Rp 91,916,000.00	21,60	Rp 91,916,000.00	66,64	Rp 2,195,740,763		91,916,000		91,916,000			18,383,200		RSUD Banyorang
40		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang tersedia	1 Pkt	637,000,000	-	-	-							5,20	Rp 446,939,423		-		-		-		RSUD Banyorang
41		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan bahan habis pakai	1Pkt	700,000,000	-	-	-		33,25	Rp 287,941,880.00	33,26	Rp 287,941,880	29,40	Rp 287,941,880		287,941,880		287,941,880			57,588,376		RSUD Banyorang
		pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan	1 Unt	300,000,000																			
42		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan	1Unt	250,000,000												-		-			-		RSUD Banyorang
43		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan yang dilakukan	1 Unt	60,000,000					44,93	Rp 26,756,000.00	44,94	Rp 26,756,000.00	64,34	Rp 38,306,000.00		26,756,000		26,756,000			5,351,200		RSUD Banyorang
44		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	80	2,650,000,000	-	-	-	Rp 334,740,979.0		Rp 785,067,514.00	59,49	Rp 1,103,049,644	65,60	Rp 1,259,653,388		1,119,808,493		1,119,808,493			223,961,699		RSUD Banyorang
		Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	1 Unt	150,000,000																			
45		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk operasional rumah sakit	1 Dok	2,000,000,000	-	-	17,70	Rp 317,512,219	41,70	Rp 748,039,954.00	5862	Rp 1,051,429,554	64,96	Rp 1,208,033,298		1,065,552,173		1,065,552,173			213,110,435		RSUD Banyorang
46		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah anggaran yang dikeluarkan dalam persiapan dan pelaksanaan akreditasi rumah sakit	1 dok	500,000,000			28,48	Rp 17,228,760.00	61,21	Rp 37,027,560.00	85,34	Rp 51,620,090.00	85,34	Rp 51,620,090.00		54,256,320		54,256,320			10,851,264		RSUD Banyorang
48		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	75	200,000,000				Rp -		Rp -		Rp -				-		-			-		RSUD Banyorang
		pengelolaan data dan informasi kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	1 Dok	20,000,000																			
49		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah biaya dalam pengelolaan sistem informasi	1 Dok	30,000,000												-		-			-		RSUD Banyorang
50		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah pengadaan alat/perangkat sistem Informasi kesehatan dan jaringan internet	1 PKI	150,000,000												-		-			-		RSUD Banyorang
51		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		235,000,000	-	-	15,50	Rp 164,129,000	30,17	Rp 319,315,000.00	49,23%	Rp 520,978,700.00	72,44	Rp 766,605,800.00		483,444,000		483,444,000			96,688,800		RSUD Banyorang

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4																			15			
52		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		160,000,000	-	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-			-	-		-	RSUD Banyorang			
		Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	30 org	130,000,000																				
53		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan sumber daya manusia kesehatan	1 Dok	30,000,000	-	-											-	-		-	RSUD Banyorang			
54		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		75,000,000	-	-	Rp	164,129,000	30,17	Rp	319,315,000.00	49,23	Rp	520,978,700	72,44	Rp	766,605,800	483,444,000	483,444,000	96,688,800	RSUD Banyorang			
55		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengembangan mutu dan oeningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah	30 Org	75,000,000	-	-	15,50	Rp	164,129,000	30,17	Rp	319,315,000.00	49,23	Rp	520,978,700	72,44	Rp	766,605,800	483,444,000	483,444,000	96,688,800	RSUD Banyorang		
Predikat Kinerja										11,67%	Rp	1,298,715,020	30,14%	Rp	3,351,522,196	45,92	Rp	5,106,152,258	72,67	Rp	9,459,195,291				
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																							
3		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
4		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
5		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	100	600,000,000		80,670,750.00	4	2,900,300.00		8,467,900.00		20,566,600.00		43,932,550.00	4	75,867,350.00	4	75,867,350.00	4	13				
6			Dokumen Renja, PRK, RKA, DPA, DPPA	100												-	0.00	-	0.00	-					
7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja PD	100	145,000,000		45,115,250	5	2,304,000.00		1200000		7,766,700.00		26,915,650.00	5	38,186,350.00	5	38,186,350.00	5	26				
8		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD	100	750,000,000		45,115,250.00	8	3,795,000.00		7908900		5,484,000.00		13,180,000.00	8	30,367,900.00	8	30,367,900.00	8	4				
9		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					74,177,150.00	-								-	0.00	-	0.00						
10		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase tersedianya pembayaran gaji ASN	100	7,000,000,000		4,639,490,675.00	16	763,576,744.00		1,223,052,898.00		1,013,715,689.00		1,036,029,188.00	16	4,036,374,519.00	16	4,036,374,519.00	16	58				
11		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100			55,082,000.00	11	6,117,500.00		15,972,700.00		9,759,750.00		23,182,550.00	11	55,032,500.00	11	55,032,500.00	11					
12		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen		167,781,335											-	0.00	-	0.00						
13		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			341,500,000		14,983,760.00	-								-	0.00	-	0.00						
14		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Data Aset yang akuratsetiap tahunnya	100	148,500,000		14,983,760.00	16	2,373,300		2635600		10,068,400.00		11,709,400.00		26,786,700.00	-	26,786,700.00	-	18				

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	Rp	6	Rp	7	8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13= 6 + 12	Rp	14 = 13/5x100%	Rp	15
15	Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik dan aparatur	Administrasi Umum Perangkat Daerah			296,500,000				281,477,290.00	-							-	0.00	-	0.00	-			
16		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya mebeleur	100	55,000,000				75,051,290.00	90	67,837,400		25837400		67,837,400.00		67,837,400.00	90	229,349,600.00	90	229,349,600.00	90	417	
17			Tersedianya peralatan gedung kantor	100														-	0.00	-	0.00			
18			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100														-	0.00	-	0.00			
19		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	100	75,000,000				9,992,000.00	42	4,200,000.00		4200000		8,900,000.00		9,900,000.00	42	27,200,000.00	42	27,200,000.00	42	36	
20		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	100	1,345,328,000				146,434,000.00		82,699,200		19250000		132,999,006.00		146,004,506.00	-	380,952,712.00	-	380,952,712.00	-	28	
21		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	2,104,052,000				140,062,500.00	-								-	0.00	-	0.00	-	-	
22		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Air, Telepon, dan Listrik	100	525,000,000				85,074,000.00	33	28,267,239		5082193		45,520,345.00		55,766,630.00		134,636,407.00	-	134,636,407.00	-	26	
23		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya bahan/alat jasa kebersihan kantor	100	1,414,052,000				54,988,500.00		21,968,500		3750000		42,098,000.00		45,848,000.00	-	113,664,500.00	-	113,664,500.00	-	8	
24		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1,590,000,000				148,969,000.00	-								-	0.00	-	0.00	-	-	
25		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasionall	100	215,000,000				123,984,000.00	13	16,091,500		18439672		102,349,904.00		110,064,076.00		246,945,152.00	-	246,945,152.00	-	115	
26		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kerja	100	90,000,000													-	0.00	-	0.00	-	-	
27		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab rumah Dinas	100	700,000,000				24,985,000.00	-								-	0.00	-	0.00	-	-	
28			Rehab rumah gedung kantor	100														-	0.00	-	0.00			
29		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		100					14,693,282,269.00	-								-	0.00	-	0.00			
30		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	92,120,000,000				824,043,557.00	-								-	0.00	-	0.00			
31		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Tersedianya embung dan penampung air	100											180,985,500.00		2,610,532,668.00	-	2,791,518,168.00	-	2,791,518,168.00			
32		Pembangunan Tanggul Sungai	Tersedianya tanggul sungai	100	9,500,000,000				24,081,100.00	-			177968250		319,493,000.00		860,808,200.00	-	1,358,269,450.00	-	1,358,269,450.00			
33		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terlaksananya rehab embung	100														-	0.00	-	0.00			
34		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			68,429,000,000				13,869,238,712.00	-								-	0.00	-	0.00			
35		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersedianya jaringan irigasi	100	24,163,000,000				3,040,218,102.00	-			178970500		1,270,611,300.00		1,954,501,350.00	-	3,404,083,150.00	-	3,404,083,150.00			
36		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya rehab jaringan irigasi	100	12,702,000,000				7,928,528,210.00	-			179027500		2,835,839,850.00		7,849,594,650.00		10,864,462,000.00	-	10,864,462,000.00			
37		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi	100	6,000,000,000				2,900,492,400.00	-			1199782000		1,856,583,200.00		2,134,754,950.00		5,191,120,150.00	-	5,191,120,150.00			
38		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		100					16,435,711,968.00	-								-	0.00	-	0.00			
39		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		100	44,650,000,000				16,435,711,968.00	-								-	0.00	-	0.00			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				5	6	7	8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15											
40	Meningkatnya kualitas jalan dan jaringan Pendukung	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tersedianya spam	100	6000000000			5,760,504,428.00	-							-	0.00	-	0.00						
41		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya spam	100	1800000000			654,688,600.00	-					450,558,591.00	2,205,779,996.00	-	2,656,338,587.00	-	2,656,338,587.00						
42		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan spam	100	6000000000			10,020,518,940.00	-							-	1,746,255,000.00	-	1,746,255,000.00						
43		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan spam	100	6000000000						567533200	567,533,200.00	3,965,965,575.00	6,510,517,202.00	10,760,650,477.00	-	10,760,650,477.00								
44		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						9,239,698,689.00	-							-	0.00	-	0.00						
45		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				38,687,681,850		9,239,698,689.00	-							-	0.00	-	0.00						
46		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	tersedianya sarana pengelolaan air limbah			9,000,000,000		8,918,747,589.00	-					2,157,911,388.00	6,934,835,122.00	-	9,092,746,510.00	-	9,092,746,510.00						
47		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah			657,000,000		11,637,100.00	-					2,272,550.00	2,272,550.00	-	4,545,100.00	-	4,545,100.00						
48	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas permukiman	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Tersedianya pengelolaan air limbah	100	800,000,000											-	0.00	-	0.00						
49		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						14,799,036,546.00	-							-	0.00	-	0.00						
50		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				40,000,000,000		14,799,036,546.00	-							-	0.00	-	0.00						
51		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya sistem drainase	100	30,000,000,000			14,799,036,546.00	-				1071586350	5,356,839,948.00	11,204,826,963.00	-	17,633,253,261.00	-	17,633,253,261.00						
52		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						6,364,628,469.00	-							-	0.00	-	0.00						
53		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				45,000,000,000		6,364,628,469.00	-							-	0.00	-	0.00						
54		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrastuktur kawasan permukiman	100	45,000,000,000			6,364,628,469.00	-				127520450	2,710,811,207.00	4,762,608,434.00	-	7,600,940,091.00	-	7,600,940,091.00						
55		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						6,337,948,830.00	-							-	0.00	-	0.00						
56		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					6,337,948,830.00	-								-	0.00	-	0.00						
57		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan bangunan gedung daerah	100				6,261,098,830.00	-							-	2,541,196,860.00	-	2,541,196,860.00						
58		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		100	66,200,000,000			65,660,201,912.00	-					1,110,979,380.00	1,430,217,480.00	-	0.00	-	0.00						

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n - 2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				5	6	7	8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
59		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		100	66,200,000,000			65,660,201,912.00	-						-	0.00	-	0.00						
60		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kondisi jalan	100	350,000,000			640,051,250.00	-								36,059,000.00	-	36,059,000.00					
61	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi jalan	100	20,000,000,000			14,059,079,849.00	-		879289700			14,402,000.00		21,657,000.00	-	7,890,843,100.00	-	7,890,843,100.00				
62		Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya pemeliharaan jalan	100	24,000,000,000			49,439,637,913.00	-		7120556750			2,436,152,500.00		4,575,400,900.00	-	41,053,094,900.00	-	41,053,094,900.00				
63		Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya pemeliharaan jalan	100	4,000,000,000			1,521,432,900.00	39	600,000,000.00				8,809,757,700.00		25,122,780,450.00		3,178,599,900.00	-	3,178,599,900.00	-	79		
64		Pembangunan Jembatan	Terlaksananya pelebaran jalan	100	6,000,000,000										1,061,603,300.00		1,516,996,600.00							
65		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							855,552,560.00	-								-	0.00	-	0.00			
66		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			2,200,241,675			334,194,260.00	-								-	0.00	-	0.00				
67		Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	jasa konstruksi	100	524,074,525												-	0.00	-	0.00				
68		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga terampil konstruksi	100	718,013,650			197,266,260.00	-					25,421,260.00		200,253,260.00	-	225,674,520.00	-	225,674,520.00				
69		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi		673,153,500			56,928,000.00	-							15,070,000.00	-	73,358,200.00	-	73,358,200.00				
70		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			2,401,613,800			257,000,000.00	-								-	0.00	-	0.00				
71		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya perangkat pendukung jasa konstruksi		801,613,800													0.00	-	0.00				
72		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		100	660,000,000			398,931,650.00	-									0.00	-	0.00				
73		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksanya pengawasan dan evaluasi		558,647,000			12,000,000.00	-			101,425,000.00		146,463,300.00		261,358,300.00		509,246,600.00	-	509,246,600.00				
74		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			6,215,500,000													0.00	-	0.00				
75		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			4,305,000,000			268,931,650.00	-									0.00	-	0.00				
76		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan RT RW		300,000,000			118,931,650.00	-									25,834,400.00	-	25,834,400.00				
77	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan penataan ruang	100	450,000,000			100,000,000.00	-					12,917,200.00		12,917,200.00		41,002,500.00						
78		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Regulasi penataan ruang	100	55,000,000			50,000,000.00	-					20,501,250.00		20,501,250.00		25,000,000.00						
79		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1,012,000,000													0.00						
80		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi	100	40,000,000													0.00						
81		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Peningkatan peran masyarakat	100	972,000,000													0.00						

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
82		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100	338,500,000			100,000,000.00	-								0.00							
83		Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya sistem informasi penataan ruang	100	325,000,000			100,000,000.00	-				77,382,000.00	114,635,845.00	192,017,845.00									
84		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			560,000,000			30,000,000.00	-								0.00							
85		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya koordinasi penataan ruang		30,000,000			30,000,000.00	-				20,559,200.00	28,881,300.00	49,440,500.00									
86		Survey dan Pemetaan	Jumlah Peta analogi dan tematik untuk Kabupaten Bantaeng													0.00								
87		Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang		100												0.00								
88		Survey dan pemetaan		100												0.00								
								Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																
								Predikat Kinerja																
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																								
		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			7,257,950,000		8,018,367,678		3,874,316,356		516,606,240		639,019,241				1,155,625,481							
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	85%	3,012,950,000	85%	2,025,038,439	85%	2,405,095,222		376,661,306		479,947,593				856,608,899		2,877,043,638		0.955		DPKPP	
Meningkatnya tata kelola OPD		Perencanaan, Penanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Yang Baik	2dokumen	225,000,000	2dokumen	69,287,260	2dokumen	48,148,730		9,310,000		20,034,800				29,344,800		94,028,360		0.418			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang Disusun dan Ditetapkan	1dokumen	90,000,000	1dokumen	27,454,800	1dokumen	13,619,530		1,321,300		7,775,300				9,096,600		36,551,400					
		Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Terselesainya DPA	1dokumen	45,000,000	1dokumen		1dokumen	4,603,700		2,603,700		2,000,000											
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1dokumen	90,000,000	1dokumen	41,832,460	1dokumen	29,925,500		5,385,000		10,259,500				15,644,500		57,476,960					
		Administrasi Keuangan Peran	Laporan Keuangan SKPD yang	1dokumen	2,262,000,000	1dokumen	1,673,406,068	1dokumen	2,111,113,592		327,294,301		390,895,395				718,189,696		2,391,595,764		1.057			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai yang Terbavarkan	Jumlah Gaji dan Tunjangan Pegawai yang Terbavarkan	1 Tahun	2,200,000,000	1 Tahun	1,620,644,178	1 Tahun	2,072,151,012		316,284,321		381,445,095				697,729,416		2,318,373,594					
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan VerifikasiKeuangan SKPD	47 Dokumen	30,000,000	47 Dokumen	47,216,190	47 Dokumen	34,855,680		6,903,080		9,450,300				16,353,380		63,569,570					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1dokumen	32,000,000	1dokumen	5,545,700	1dokumen	4,106,900		4,106,900		-				4,106,900		9,652,600					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	85%	285,950,000	85%	176,778,960	85%	130,294,300		18,875,500		39,880,221				58,755,721		235,534,681		0.824			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	6 komponen	8,500,000	6 komponen	4,501,000	6 komponen	3,892,300		575,500		1,168,400				1,743,900		6,244,900					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	12 unit	14,000,000	12 unit	-	12 unit	-		-		-				-		-					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Penunjang Kegiatan	7 eksemplar	13,450,000	7 eksemplar	9,240,000	7 eksemplar	3,600,000		900,000		900,000				1,800,000		11,040,000					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	250,000,000	12 bulan	163,037,960	12 bulan	122,802,000		17,400,000		37,811,821				55,211,821		218,249,781					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85%	100,000,000	85%	-	85%	-		-		-				-		-		-		-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				5		6		7		8		9		10		11						12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4																					15			
		Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor	2 unit	100,000,000	2 unit	-	2 unit	-		-		-					-		-							
		Pengadaan Mebel			250,000,000	4 jenis	-	17 Unit	-		-		-					-		-							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor		400,000,000	2 jenis	-		-		-		-					-		-							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana Gedung Kantor			1 unit	-		-		-		-					-		-							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	85%	70,000,000	85%	56,813,541	85%	65,908,600		13,156,015		15,482,357					28,638,372		85,451,913			1.221				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Biaya Tagihan Listrik dan Air	2 rek	34,000,000	2 rek	22,782,941	2 rek	31,937,000		8,099,015		4,635,857					12,734,872		35,517,813							
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	16,000,000	12 bulan	12,115,000	12 bulan	11,030,000		207,000		4,480,000					4,687,000		16,802,000							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Gedung Kantor	1gedung	20,000,000	1gedung	21,915,600	1gedung	22,941,600		4,850,000		6,366,500					11,216,500		33,132,100							
		Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85%	70,000,000	85%	48,752,610	85%	49,630,000		8,025,490		13,654,820					21,680,310		70,432,920			1.006				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara	1 unit	70,000,000	1 unit	48,752,610	1 unit	49,630,000		8,025,490		13,654,820					21,680,310		70,432,920							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-	1 gedung	-		-		-					-		-									
2		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Perumahan Yang Layak Huni dan Sarana Dasar Bagi Masyarakat Miskin	80%	3,195,000,000	80%	386,229,229	80%	366,000,034		90,364,034		94,524,798				184,888,832		576,266,561			0.180	DPKPP				
	Meningkatnya akses warga terhadap ketersediaan rumah layak huni dan	Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya data rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten	80%	440,000,000	80%	49,722,090	80%	18,752,990		6,542,900		5,944,330				12,487,230		62,209,320			0.141					
		Identifikasi perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1dokumen	-	1dokumen	32,640,490	1dokumen	13,411,990		4,788,900		4,047,930				8,836,830		41,477,320								
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan-Lahan Potensial Lokasi Relokasi Perumahan	1dokumen	90,000,000	1dokumen	-	1dokumen	-		0		0				-		-								
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani	1dokumen	95,000,000	1dokumen	-	1dokumen	-		-		0				-		-								
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Penyediaan Data Tingkat Kerusakan Korban Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan	1dokumen	100,000,000	1dokumen	17,081,600	1dokumen	5,341,000		1,754,000		1,896,400				3,650,400		20,732,000								
		Pendataan dan Verifikasi Penerimaan Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Dokumen Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana Alam atau Relokasi Program Kabupaten	1dokumen	75,000,000	1dokumen	-	1dokumen	-		-		0				-		-		-						
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1dokumen	80,000,000	1dokumen	-	1dokumen	-		-		0				-		-		-						
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Sosialisasi Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota	70%	75,000,000	70%	-	-	-		-		0				-		-		-		-				
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	1sosialisasi	-	1sosialisasi	-	-	-		-		0				-		-		-						

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13= 6 + 12	Rp	14 = 13/5x100%	Rp	
1	2	3	4																		15			
	terjangkau	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terselenggaranya Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	1pelatihan	75,000,000	1pelatihan	-	-	-	-	0						-	-						
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Tersedianya rumah bagi korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50 Unit	2,500,000,000	50 Unit	-	9,699,400	1,748,100	2,851,100						4,599,200	4,599,200		0.002					
		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	5 unit	-	5 unit	-	9,699,400	1,748,100	2,851,100					4,599,200	4,599,200								
		Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Pembangunan Rumah Korban Bencana	10 unit	700,000,000	10 unit	-	-	-	0					-	-								
		Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan Rumah Khusus Beserta PSU Korban Bencana	325 unit	950,000,000	325 unit	-	-	-	0					-	-								
		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Penyediaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan	45%	850,000,000	45%	-	-	-	0					-	-								
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	Persentase terlaksananya pembinaan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Tumah Khusus	70%	-	70%	336,507,139	70%	332,399,144	79,799,034	82,854,868					162,653,902	509,458,041		#DIV/0!					
		Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Unit Bangunan Rusunawa yang Terkelola Dengan Baik	3rusun	-	3rusun	336,507,139	3rusun	332,399,144	79,799,034	82,854,868					162,653,902	499,161,041							
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	80%	180,000,000	80%	-	5,148,500	2,274,000	2,874,500					5,148,500	5,148,500								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi Perizinan dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1dokumen	180,000,000	1dokumen	-	5,148,500	2,274,000	2,874,500					5,148,500	5,148,500								
3		Program Kawasan Permukiman	Persentase Permukiman Yang Tertata	50%	1,050,000,000	50%	4,196,645,860	50%	659,360,450	7,583,500	20,507,850					28,091,350	979,881,660		0.933	DPKPP				
	Pengurangan luasan permukiman kumuh	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen Perencanaan Kelurahan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh	10dokumen	-	10dokumen	-	-	0		0					0%	-	-		#DIV/0!				
		Penyusunan dan/ atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1dokumen	-	1dokumen	-	-	0		0					-	-							
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Permukiman Yang Tertata	50%	300,000,000	50%	48,309,500	50%	17,858,400	2,154,600	2,859,300					5,013,900	53,323,400		0.178					
		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Pelatihan BKM Dan Penguatan KKP	9klp	-	9klp	48,309,500	9klp	17,858,400	2,154,600	2,859,300					5,013,900	53,323,400							
		Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Permukiman Yang Tertata	50%	300,000,000	50%	-	-	-	0					-	-								
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase berkurangnya permukiman kumuh pada kawasan permukiman kumuh	50%	750,000,000	50%	4,148,336,360	50%	641,502,050	5,428,900	17,648,550					23,077,450	926,558,260		1.235					
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design(DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen DED Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten	3dokumen	-	3dokumen	61,998,500	1dokumen	117,247,200	2,276,900	4,092,500					6,369,400	68,367,900							
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Unit Rumah Tidak Layak Huni		400,000,000		3,244,855,550	60 Unit	475,000,000	-	0				-									
		Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Persentase Terjalannya kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan PSU	50%	350,000,000	50%	841,482,310	50%	49,254,850	3,152,000	13,556,050					16,708,050	858,190,360							

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11			12		13= 6 + 12			14 = 13/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
4		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Perumahan dan Permukiman Kumuh	70%	-		-		-	K				K					-		-	#DIV/0!	DPKPP		
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		70%	-		-		-		0		0						-		-	#DIV/0!			
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) hektar	Jumlah Perbaikan Unit Rumah Tidak Layak Huni	68 unit	-		-		-		0		0						-		-				
5		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Terselenggaranya PSU Perumahan Permukiman	70%	-	70%	1,410,454,150	70%	443,860,650		41,997,400		44,039,000					86,036,400		5,780,453,037		#DIV/0!	DPKPP		
	Terwujudnya pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yag berbasis kelestarian lingkungan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersedianya PSU Perumahan	13 lokasi	-	13 lokasi	1,410,454,150	13 lokasi	443,860,650		41,997,400		44,039,000					86,036,400		5,780,453,037		#DIV/0!			
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	1dokumen	-	1dokumen	50,389,500	1dokumen	16,483,000		2,600,400		4,574,000					7,174,400		57,563,900					
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan dan Permukiman yang Menunjang Fungsi Hunian	13 lokasi	-	13 lokasi	1,360,064,650	13 lokasi	427,377,650		39,397,000		39,465,000					78,862,000		1,438,926,650					
							8,800,000,000		3,500,735,287		2,100,000,000		24,783,800		758,443,400			783,227,200		4,283,962,487					
6		Program Penyelesaian Sengketa Tanah	Jumlah Sengketa Tanah yang Difasilitasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah PEMDA	5 kasus	200,000,000	5 kasus	121,062,580	5 kasus	28,716,000		6,712,800		8,037,800					14,750,600		135,813,180		0.679	DPKPP		
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Tertanganinya sengketa tanah PEMDA secara litigasi/non litigasi	80%	200,000,000	80%	121,062,580	80%	28,716,000		6,712,800		8,037,800					14,750,600		135,813,180		0.679			
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terinventarisasinya Tanah-tana Pemerintah Daerah yang Dalam Sengketa Konflik dan Yang Berperkara	80%	-	80%	88,777,930	80%	14,736,000		3,756,000		3,000,000					6,756,000		95,533,930					
		Mediasi Penyelesaian Sengketa,Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Terselenggaranya Mediasi Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah PEMDA	80%	200,000,000	80%	32,284,650	80%	13,980,000		2,956,800		5,037,800					7,994,600		40,279,250					
7		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Terselaiskannya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	70%	8,000,000,000	70%	3,109,400,700	70%	2,028,194,000		9,523,400		741,849,000					751,372,400		3,860,773,100		0.483			
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya lahan untuk pembangunan	70%	8,000,000,000	70%	3,109,400,700	70%	2,028,194,000		9,523,400		741,849,000					751,372,400		3,860,773,100		0.483			
		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Pemberian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	35lokasi	-	5lokasi	3,074,974,500	5lokasi	2,012,564,000		6,223,400		738,099,000					744,322,400		3,819,296,900					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	70%	8,000,000,000	70%	34,426,200	70%	15,630,000		3,300,000		3,750,000					7,050,000		41,476,200					
8		Program Pengelolaan Tanah	Persentase Terdatanya dan Terkelolanya Tanah PEMDA	50%	-	50%	45,341,000	50%	15,980,000		4,000,000		3,600,000					7,600,000		52,941,000		#DIV/0!	DPKPP		
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase terinventarisasinya data inventaris tanah PEMDA beserta pemanfaatannya	70%	-	70%	45,341,000	70%	15,980,000		4,000,000		3,600,000					7,600,000		52,941,000		#DIV/0!			
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Tersedianya Data Inventarisasi Tanah PEMDA	1dokumen	-	1dokumen	45,341,000	1dokumen	15,980,000		4,000,000		3,600,000					7,600,000		52,941,000					

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11				12			13= 6 + 12		14 = 13/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
9		Program Penatagunaan Tanah	Terciptanya Penatagunaan Administrasi Pertanahan yang Handal	45%	600,000,000	45%	224,931,007	45%	27,110,000		4,547,600		4,956,600					9,504,200		234,435,207		0.391		DPKPP		
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten /Kota	Sertifikat dan Pengamanan Aset Tanah PEMDA	45%	600,000,000	45%	224,931,007	45%	27,110,000		4,547,600		4,956,600					9,504,200		234,435,207		0.391				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Per	Persentase Tersertifikasinya Kepemilikan dan Pengamanan Aset Tanah PEMDA	50%	-	50%	183,853,707	50%	14,530,000		3,700,000		3,000,000					6,700,000		190,553,707						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pel	Persentase Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	50%	600,000,000	50%	41,077,300	50%	12,580,000		847,600		1,956,600					2,804,200		43,881,500						
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																										
Predikat Kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja :																										
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																										
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																										
1		Urusan Wajib																								
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																								
	Terpeliharanya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat																									
		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan		100%	34,081,803,035	60%	16,406,856,996	20%	10,191,450,570	5%	2,219,202,853	5%	2,425,641,845	5%	2,354,406,759	5%	2,690,946,143	20%	9,690,197,600	80%	26,097,054,596	80%	76.57%	Satpol.PP dan Damkar		
		Program Penujng Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran	100%	11,858,832,189	60%	4,909,098,561	20%	4,523,325,270	5%	890,601,353	5%	1,052,364,498	5%	947,451,412	5%	1,210,037,060	20%	4,100,454,323	80%	9,009,552,884	80%	75.97%	Satpol.PP dan Damkar		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat	100%	104,685,500	60%	55,135,450	20%	54,346,200	5%	9,962,500	5%	6,284,350	5%	28,646,500	5%	8,887,000	20%	53,780,350	80%	108,915,800	80%	104.04%	Sekretariat		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	10 dokumen	43,294,600	6 dokumen	22,199,600	2 dokumen	11,850,200	1 dokumen	4,705,000	1 dokumen	5,384,350	0 dokumen	1,750,000	0 dokumen	-	2 dokumen	11,839,350	8 dokumen	34,038,950	80%	78.62%	Subbag. Program dan Pelaporan		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	10 dokumen	17,750,000	6 dokumen	10,372,000	2 dokumen	17,702,400	0 dokumen	-	1 dokumen	-	0 dokumen	16,146,500	1,120,000	17,266,500	2 dokumen	17,266,500	8 dokumen	27,638,500	80%	155.71%	Subbag. Program dan Pelaporan		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	5 dokumen	26,720,900	3 dokumen	16,723,850	1 dokumen	12,329,600	0 dokumen	2,171,500	0 dokumen	900,000	0 dokumen	3,590,000	0 dokumen	5,607,000	1 dokumen	12,268,500	4 dokumen	4,599,000	80%	17.21%	Subbag. Program dan Pelaporan		
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	25 dokumen	16,920,000	15 dokumen	5,840,000	5 dokumen	12,464,000	3 dokumen	3,086,000	0 dokumen	-	1 dokumen	7,160,000	1 dokumen	2,160,000	5 dokumen	12,406,000	20 dokumen	18,246,000	80%	107.84%	Subbag. Program dan Pelaporan		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun tepat	100%	9,772,082,838	60%	3,815,907,154	20%	3,539,542,980	5%	676,423,053	5%	899,745,648	5%	729,044,912	5%	945,625,260	20%	3,250,838,873	80%	7,066,746,027	80%	72.32%	Sekretariat		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan tunjangan	152 orang	9,726,460,838	152 orang	3,808,001,154	47 orang	3,528,380,780	47 orang	673,074,053	47 orang	896,702,648	46 orang	726,298,912	47 orang	943,720,260	47 orang	3,239,795,873	199 orang	7,047,797,027	131%	72.46%	Subbag. Keuangan		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang di-SPJ-kan	99 kegiatan	40,667,600	69 kegiatan	6,256,000	13 kegiatan	9,376,600	9 kegiatan	1,659,000	11 kegiatan	3,043,000	2 kegiatan	2,746,000	0 kegiatan	1,905,000	13 kegiatan	9,353,000	82 kegiatan	15,609,000	83%	38.38%	Subbag. Keuangan		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	5	4,954,200	3	1,650,000	1	1,785,600	1	1,690,000	0		0	-	0	-	1	1,690,000	4	3,340,000	80%	67.42%	Subbag. Keuangan	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase petaporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu dan akurat	100%	7,482,500	60%	2,750,000	20%	2,048,900	5%		5%	448,000	5%	-	5%	1,596,300	20%	2,044,300	80%	4,794,300	80%	64.07%	Sekretariat	
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan BMD	5	7,482,500	3	2,750,000	1	2,048,900	0		0	448,000	0			1,596,300	1	2,044,300	4	4,794,300	80%	64.07%	Subbag. Umum & Kepegawaian	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Prangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administasi ke-pegawaian	100%	694,221,000	0%	107,300,000	20%	2,382,000	5%	520,000	5%	404,000	5%	565,000	5%	889,500	20%	2,378,500	20%	109,678,500	20%	15.80%	Sekretariat	
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas Satpol PP dan Damkar beserta kelengkapannya	900	679,996,000	0	104,300,000	298		0		0	-		0	-	0	-	0		104,300,000	0%	15.34%	Subbag. Umum & Kepegawaian	
				stel		stel		stel		stel		stel		stel		stel		stel		stel				Subbag. Umum & Kepegawaian	
			Jumlah pakaian seragam olahraga anggota Satpol PP dan Damkar	600		0		0		0		0		0		0		0		0		0%	#DIV/0!	Subbag. Umum & Kepegawaian	
				stel		stel		stel		stel		stel		stel		stel		stel		stel				Subbag. Umum & Kepegawaian	
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah PNS yang teradministrasi	153	14,225,000	49	3,000,000	47	2,382,000	47	520,000	47	404,000	46	565,000		889,500	47	2,378,500	96	5,378,500	63%	37.81%	Subbag. Umum & Kepegawaian	
				orang		orang		orang		orang		orang		orang		orang		orang		orang					Subbag. Umum & Kepegawaian
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang terlayani pengadministrasian umumnya	100%	460,675,255	60%	211,786,500	20%	217,965,600	5%	87,351,000	5%	32,538,000	5%	28,431,000	5%	69,625,500	20%	217,945,500	80%	429,732,000	80%	93.28%	Sekretariat	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	44	9,936,590	28	6,278,800	3	3,251,100	1	450,000	1	500,000	1	500,000		1,801,000	3	3,251,000	31	9,529,800	70%	95.91%	Subbag. Umum & Kepegawaian	
				item		item		item		item		item		item		item		item		item					Subbag. Umum & Kepegawaian
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/ perlengkapan Kantor	49	36,573,765	16	17,912,000	8	8,414,500	3	800,000	1	1,388,000	3	2,841,000		3,382,500	8	8,411,500	24	26,323,500	49%	71.97%	Subbag. Umum & Kepegawaian			
		item		item		item		item		item		item		item		item		item					Subbag. Umum & Kepegawaian		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran	27	19,939,600	17	12,472,000	5	7,512,000	2		0	2,730,000	2	-		4,770,000	5	7,500,000	22	19,972,000	81%	100.16%	Subbag. Umum & Kepegawaian			
		exp		exp		exp		exp		exp		exp		exp		exp		exp					Subbag. Umum & Kepegawaian		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	175	394,225,300	105	175,123,700	35	198,788,000	18	86,101,000	12	27,920,000	1	25,090,000		59,672,000	35	198,783,000	140	373,906,700	80%	94.85%	Subbag. Umum & Kepegawaian	
				kali		kali		kali		kali		kali		kali		kali		kali		kali				Subbag. Umum & Kepegawaian	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemnerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	159,906,000	60%	59,795,000	20%	118,091,000	0%	-	0%	-	0%	8,600,000	0%	-	0%	8,600,000	60%	68,395,000	60%	42.77%	Sekretariat	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan	126 unit	159,906,000	54 unit	59,795,000	21 unit	118,091,000	0 unit				1 unit	8,600,000	0 unit		1 unit	8,600,000	55 unit	68,395,000	44%	42.77%	Subbag. Umum & Kepegawaian
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	133,199,396	60%	82,974,517	20%	58,353,590	5%	14,109,000	5%	13,842,000	5%	12,624,000	5%	15,487,000	20%	56,062,000	80%	139,036,517	80%	104.38%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	5000 lembar	8,063,150	3000 lembar	5,190,500	1000 lembar	5,397,000	232 lembar	894,000	427 lembar	1,535,000	201 lembar	1,086,000	120 lembar	1,853,500	980 lembar	5,368,500	3980 lembar	10,559,000	80%	130.95%	Subbag. Umum & Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa yang terbayarkan	15 rekening	111,681,351	9 rekening	69,330,017	3 rekening	49,354,190	3 rekening	12,295,000		11,230,000		10,607,000	12,966,500	3 rekening	47,098,500	12 rekening	116,428,517	80%	104.25%	Subbag. Umum &	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat/bahan kebersihan	75 item	13,454,895	45 item	8,454,000	10 item	3,602,400	3 item	920,000	2 item	1,077,000	3 item	931,000	2 item	667,000	10 kali	3,595,000	55 kali	12,049,000	73%	89.55%	Subbag. Umum & Kepegawaian
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	526,579,900	60%	573,449,940	20%	530,595,000	5%	102,235,800	5%	99,102,500	5%	139,540,000	5%	167,926,500	20%	508,804,800	80%	1,082,254,740	80%	205.53%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	35 unit	421,501,400	17 unit	542,310,940	23 unit	473,425,000	23 unit	102,235,800		91,351,000		112,658,500		146,084,500	23 unit	452,329,800	40 unit	994,640,740	114%	235.98%	Subbag. Umum & Kepegawaian
			Jumlah kendaraan Dinas yang dibayarkan perizinannya	65 unit		44 unit		13 unit		12 unit								12 unit		56 unit		86%		Subbag. Umum &
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin	58 unit	15,078,500	26 unit	8,405,000	7 unit	6,820,000			2 unit	1,750,000	2 unit	645,000	3 unit	3,752,000	7 unit	6,147,000	33 unit	14,552,000	57%	96.51%	Subbag. Umum &
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	5 unit	90,000,000	2 unit	22,734,000	3 unit	50,350,000	0 unit		1 unit	6,001,500	2 unit	26,236,500	0 unit	18,090,000	3 unit	50,328,000	5 unit	73,062,000	100%	81.18%	Subbag. Umum &
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%	12,417,646,997	60%	6,394,569,436	20%	3,176,092,900	5%	702,268,500	5%	786,030,805	5%	800,738,805	5%	844,913,673	20%	3,133,951,783	80%	9,528,521,219	80%	76.73%	Satpol,PP dan Damkar	
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	11,645,736,047	60%	6,309,942,236	20%	3,085,226,600	5%	698,430,000	5%	771,255,805	5%	781,759,805	5%	792,037,173	20%	3,043,482,783	80%	9,353,425,019	80%	80.32%	Bidang Tibum & Tranmas dan Bidang Linmas	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Jumlah pemantauan deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	156 kali	2,813,375,200	104 kali	1,128,045,000	24 kali	602,414,200			12 kali	117,585,000	7 kali	141,350,000	5 kali	135,555,000	24 kali	592,006,000	128 kali	1,720,051,000	82%	61.14%	Seksi Pencegahan	
		Jumlah pengamanan/pengawasan dan patroli siaga	20 kegiatan		12 kegiatan		4 kegiatan				0 kegiatan		2 kegiatan		4 dokumen		16 dokumen		80%					

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K
		Penyusunan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan apel siaga HUT Satpol PP	9 kegiatan		5 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan					1 kegiatan		1 kegiatan		6 kegiatan		67%			
		Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah operasi penertiban pelanggaran K3 (keterlibatan, ketertarikan dan keindahan)	325 kali	7,830,679,537	195 kali	5,077,612,136	52 kali	2,378,176,000	9 kali	580,845,000	17 kali	595,224,805	12 kali	582,419,805	4 kali	590,661,173	42 kali	2,349,150,783	237 kali	7,426,762,919	73%	94.84%	Seksi Ketertiban Umum
			Jumlah dokumen pelaporan transtibum	5 dokumen		3 dokumen		1 dokumen		0 dokumen						1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen		80%		
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Koordinasi	12 kali	49,200,000	4 kali	-	4 kali	4,470,900	0 kali		1 kali	590,000	0 kali		3 kali	3,860,000	4 kali	4,450,000	8 kali	4,450,000	67%	9.04%	Seksi Data dan Informasi
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah wilayah pemantauan peran serta Linmas	8 kecamatan	183,485,910	8 kecamatan	18,573,100	8 kecamatan	14,584,900		1,126,000	3 kecamatan	5 kecamatan	0 kecamatan	13,337,000	8 kecamatan	14,463,000	8 kecamatan	33,036,100	100%	18.00%	Seksi Bina Potensi Linmas		
			Jumlah anggota Linmas yang berpartisipasi dalam penanganan Pemilu	2440 orang		1220 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		1220 orang		50%						
			Jumlah dokumen pelaporan Linmas	5 dokumen		3 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		60%						
			Jumlah dokumen laporan pengamanan hasil pemilu	2 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50%						
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diklat	60 orang	340,365,400	0 orang	19,805,600	0 orang	25,610,400	0 orang		0 orang	23,448,000	0 orang	23,448,000	0 orang	23,448,000	0 orang	43,253,600	0%	12.71%	Seksi Pelatihan dan		
			Jumlah anggota Linmas yang mengikuti diklat pengembangan kapasitas anggota Satlinmas	1335 orang		355 orang		134 orang		0 orang		0 orang		134 orang		0 orang		489 orang		37%				
			Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap darurat	716 orang		366 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		366 orang		51%						
			Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan	400		0		30		0		0		30		0		30		28%				

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11				12			13= 6 + 12		14 = 13/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
			mengikuti penyusunan dan sosialisasi kelinmasan	orang		orang		orang		orang		orang		orang		orang		orang		orang						
		Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah operasi tranitibum terpadu	23 kali	222,630,000	13 kali	65,906,400	25 kali	59,970,200	0 kali	12 kali	13 kali	27,000,000	0 kali	59,965,000	38 kali	125,871,400	165%	56.54%					Seksi Kerjasama		
		Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	162 unit	143,500,000	100 unit		0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	-	-	0 unit	-	100 unit	-	62%	0.00%					Seksi Pencegahan Gangguan		
		Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang disusun	10 dokumen	30,750,000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	0 dokumen	-	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0%	0.00%					Seksi Pencegahan Gangguan Tranitibum		
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	30 kasus	31,750,000	0 kasus		5 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	-	-	0 kasus	-	0 kasus	-	0%	0.00%					Seksi Ketertiban Umum		
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase perda yang ditegakkan	100%	577,685,450	60%	84,627,200	20%	68,502,300	5%	3,838,500	5%	14,775,000	5%	18,979,000	5%	30,862,500	20%	68,455,000	80%	153,082,200	80%	26.50%		Seksi Penegakan Perda dan Perbup	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi/penyuluhan penegakan Perda dan Perbup	70 kali	122,734,400	20 kali	20,311,000	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	-		0 kali		20 kali	-	29%	16.55%					Seksi Penyuluhan		
		Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Perda dan Perbup	156 kali	235,990,950	52 kali	57,205,950	24 kali	48,502,300	6 kali	3,838,500	6 kali	8,150,000	6 kali	5,650,000	24 kali	48,501,000	76 kali	105,706,950	49%	44.79%			Seksi Pembinaan		
		Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penegakan Perda/Perbup	260 kali		156 kali		39 kali		17 kali	14 kali		7 kali	38 kali	194 kali	27,064,250	75%							Seksi Penegakan dan		
			Persentase kasus pelanggaran Perda yang dilimpahkan ke Pengadilan	10 %	218,960,100	0 %	7,110,250	0 %	20,000,000	0 %	0 %	0 %	6,625,000	0 %	13,329,000	0 %	19,954,000	0 dokumen		0 %			12.36%			
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri	Persentase jumlah PPNSD	12%	194,225,500	4%	-	22,364,000	0%	0%	-	0%	-	0%	22,014,000	0%	22,014,000	4%	22,014,000	33%	11.33%			Bidang Penegakan		
2				6		2		0		0		0		0		2		2						Seksi Penegakan dan Pembinaan PPNS		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PPNSD		194,225,500				22,364,000				-			22,014,000		22,014,000		22,014,000	33%	11.33%		
			orang			orang		orang		orang		orang		orang		orang		orang						
	Meningkatnya pengelolaan pelayanan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	Persentase bencana kebakaran, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan	100%	9,805,323,849	60%	5,103,188,999	20%	2,492,032,400	5%	626,333,000	5%	587,246,542	5%	606,216,542	5%	635,995,410	20%	2,455,791,494	80%	7,558,980,493	80%	77.09%	Satpol,PP dan Damkar
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan	100%	9,338,770,999	60%	5,079,611,499	20%	2,478,617,500	5%	626,333,000	5%	587,045,542	5%	595,515,542	5%	635,995,410	20%	2,444,889,494	80%	7,524,500,993	80%	80.57%	Bidang Pemadam Kebakaran
		Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pecegahan kesiapsiagaan	150 orang	152,500,000	50 orang	3,800,000	50 orang	7,241,300	0 orang		orang		50 orang	5,198,000	0 orang	-	50 orang	5,198,000	100 orang	8,998,000	67%	5.90%	Seksi Pencegahan Kebakaran
		Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian bahaya kebakaran	100 %	8,448,387,999	60 %	4,971,179,549	20 %	2,419,205,200	5 %	617,273,000	5 %	586,045,542	5 %	586,857,542	5 %	601,371,410	20 %	2,391,547,494	80 %	7,362,727,043	80 %	87.15%	Seksi Operasional Damkar dan Penyelamatan
		Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran dan non kebakaran	100 %	102,500,000	60 %	27,893,950	20 %	13,947,500	3 %	1,000,000	5 %	1,000,000			12 %	11,844,000	20 %	13,844,000	80 %	41,737,950	80 %	40.72%	Seksi Operasional Damkar dan Penyelamatan
		Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	100 %	102,500,000	0 %	-	0 %	-	0 %		0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0%	0.00%	Seksi Operasional Damkar dan Penyelamatan
		Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana yang terstandarisasi	20 unit	92,250,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit		0 unit	-	0 unit	-	0 unit		0 unit	-	0 unit	-	0%	0.00%	Seksi Sarana & Prasarana
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana pemadam serta alat perlindungan diri	74 unit	179,133,000	47 unit	59,633,000	16 unit	13,522,500	0 unit	-	unit		12 unit	4 unit	10,000,000	16 unit	10,000,000	63 unit	69,633,000	85%	38.87%	Seksi Sarana & Prasarana	
		Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah anggota Satgas Damkar yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	155,000,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang		0 orang	-	0 orang	-	0 orang		0 orang	-	0 orang	-	0%	0.00%	Seksi Pencegahan Kebakaran
		Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Alat/ Sistim Komunikasi dan informasi	46 unit	86,000,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit		0 unit	-	0 unit	-	0 unit		0 unit	-	0 unit	-	0%	0.00%	Seksi Sarana & Prasarana

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Perbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah MoU kerjasama antar daerah	4	20,500,000	0	17,105,000	2	24,701,000	1	8,060,000	0		0	3,460,000	1	12,780,000	2	24,300,000	2	41,405,000	50%	201.98%	Seksi Pencegahan Kebakaran
		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase inspeksi peralatan proteksi kebakaran	100%	15,250,000	0%	-	0%	-	0%		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0.00%	Bidang Pemadam Kebakaran
		Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah sarana prasarana proteksi kebakaran yang didata	50	10,250,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0.00%	Seksi Sarana & Prasarana
		Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah sarana prasarana proteksi kebakaran yang layak	25	5,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0.00%	Seksi Sarana & Prasarana
		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	51,250,000	0%	7,500,000	50%	1,014,900	13%	-	13%	201,000	12%	651,000	12%	-	50%	852,000	50%	8,352,000	50%	16.30%	Bidang Pemadam Kebakaran
		Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Persentase kasus/kejadian kebakaran yang diinvestigasi	100	51,250,000	0	7,500,000	100	1,014,900			50	201,000		651,000			100	852,000		8,352,000	100%	16.30%	Seksi Operasional Damkar dan Penyelamatan
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh informasi rawan bencana	100 %	351,877,850	0	16,077,500	50 %	12,400,000	50%	-		-	0	10,050,000		-	50%	10,050,000	0.5	26,127,500	#VALUE!	7.43%	Bidang Pemadam Kebakaran
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	600	107,227,850	200	16,077,500	30	12,400,000					30	10,050,000	0		30	10,050,000	230	26,127,500	38%	24.37%	Seksi Pencegahan Kebakaran
		Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Relawan yang di bina	268	107,300,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0.00%	Seksi Pencegahan Kebakaran

[illegible]

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5	6	7	8		9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
	Meningkatnya Kualitas Hidup Fakir Miskin dan PMKS Lainnya			100	1,961,710,834	85	634,459,380	20	461,565,430	6	27,608,830	6	119,820,800	0	-	0	-	12.50	147,429,630	97.50	781,889,010	97.50	39.86	
1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Tercapainya prosentase perlindungan dan jaminan sosial	100	1,482,105,001	85	620,691,880	20	400,985,430	6	27,608,830	6	99,335,800	0	-	0	-	12.50	126,944,630	97.50	747,636,510	97.50	50.44	
1.06.05.2.02		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya prosentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	1,482,105,001	85	620,691,880	20	400,985,430	6	27,608,830	6	99,335,800	0	-	0	-	12.50	126,944,630	97.50	747,636,510	97.50	50.44	
1.06.05.2.02.01		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	16	930,785,713	16	267,383,980	4	227,121,530.00	1	24,223,330.00	1	31,880,000	0	-	0	-	2.00	56,103,330	18.00	323,487,310	112.50	34.75	
1.06.05.2.02.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	60	226,133,200	48	353,307,900	12	173,863,900.00	3	3,385,500.00	3	67,455,800	0	-	0	-	6.00	70,841,300	54.00	424,149,200	90.00	187.57	
1.06.05.2.02.03		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan	8	376,436,088	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
1.06.05.2.02.04		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan	8	205,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
1.06.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Tercapainya prosentase pemberdayaan sosial	100	479,605,833	40	13,767,500	0	60,580,000	5	-	5	20,485,000	0	-	0	-	10.00	20,485,000	50.00	34,252,500	50.00	7.14	
1.06.06.03.2.01		Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Tercapainya persentase Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	100	102,500,000	0	-	20	53,580,000	5	-	5	20,485,000	0	-	0	-	10.00	20,485,000	10.00	-	10.00	0.00	
1.06.06.03.2.01.01		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Laporan	1	51,250,000	0	-	12	18,365,000.00	3	-	3	8,485,000	0	-	0	-	6.00	8,485,000	6.00	-	600.00	0.00	
1.06.06.03.2.02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan	Jumlah Laporan	1	51,250,000	0	-	12	35,215,000.00	3	-	3	12,000,000	0	-	0	-	6.00	12,000,000	6.00	-	600.00	0.00	
1.06.06.03.2.02.02		Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya prosentase Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	9,458,131	60	2,299,700	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	60.00	2,299,700	60.00	24.31	
1.06.06.03.2.02.02.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Laporan	60	9,458,131	36	2,299,700			0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	36.00	2,299,700	60.00	24.31	
1.06.06.03.2.03		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya prosentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100	367,647,703	40.16	11,467,800	0	7,000,000			0	-	0	-	0	-	0.00	-	40.16	-	40.16	0.00	
1.06.06.03.2.03.01		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	10	73,529,541	5.8	11,467,800			0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	5.80	11,467,800	58.00	15.60	
1.06.06.03.2.03.02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	10	73,529,541	5	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	5.00	-	50.00	0.00	
1.06.06.03.2.03.03		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	10	73,529,541	5	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	5.00	-	50.00	0.00	
1.06.06.03.2.03.04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	10	73,529,541	5	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	5.00	-	50.00	0.00	
1.06.06.03.2.03.05		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Laporan	10	73,529,541	5	-	12	7,000,000.00	3	-	3	-	0	-	0	-	6.00	-	11.00	-	110.00	0.00	
				100	6,302,034,682	74.67	2,666,724,200	33	1,599,654,200	8	79,484,100	0	232,864,300	0	-	0	-	8.33	312,348,400	83.00	2,979,072,600	83.00	47.27	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
										I		II		III		IV								
				5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.06.02.2.03.06		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Tercapainya prosentase pelayanan rehabilitasi sosial	100	4,864,487,193	140	2,045,897,750	60	1,170,935,000	15	-	0	137,505,000	0	-	0	-	15.00	137,505,000	155.00	2,183,402,750	155.00	44.88	
1.06.02.2.03.07		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Tercapainya prosentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	100	4,864,487,193	140	2,045,897,750	60	1,170,935,000	15	-	15	137,505,000	0	-	0	-	30.00	137,505,000	170.00	2,183,402,750	170.00	44.88	
1.06.04.2.01.0		Penyediaan Permakanan	Jumlah Laporan	60	2,360,496,164	48	638,221,600	12	757,510,000.00	3	-	3	39,110,000.00	0	-	0	-	6.00	39,110,000	54.00	677,331,600	90.00	28.69	
1.06.04.2.01.04		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Laporan	60	300,709,409	36	27,025,050					0	-	0	-	0	-	0.00	-	36.00	27,025,050	60.00	8.99	
1.06.04.2.01.06		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Laporan	60	148,286,034	36	18,793,900					0	-	0	-	0	-	0.00	-	36.00	18,793,900	60.00	12.67	
1.06.04.2.01.07		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Laporan	60	26,126,659	36	1,149,600					0	-	0	-	0	-	0.00	-	36.00	1,149,600	60.00	4.40	
1.06.04.2.01.08		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Laporan	60	26,126,659	36	5,512,350					0	-	0	-	0	-	0.00	-	36.00	5,512,350	60.00	21.10	
1.06.04.2.01.09		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Laporan	60	1,740,716,556	48	1,296,493,200	12	400,225,000.00	3	-	3	93,300,000.00	0	-	0	-	6.00	93,300,000	54.00	1,389,793,200	90.00	79.84	
1.06.04.2.01.10		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Laporan	60	91,553,644	48	26,958,100	12	13,200,000.00	3	-	3	5,095,000.00	0	-	0	-	6.00	5,095,000	54.00	32,053,100	90.00	35.01	
1.06.04.2.01.11		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Laporan	60	149,389,409	48	29,567,600	0	-			0	-	0	-	0	-	0.00	-	48.00	29,567,600	80.00	19.79	
1.06.04.2.01.12		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Laporan	60	21,082,659	36	2,176,350					0	-	0	-	0	-	0.00	-	36.00	2,176,350	60.00	10.32	
1.06.03.		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		100	20,500,000	0	-	0	-			0	-	0	-	0	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
1.06.03.2.01		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	100	20,500,000	0	-	0	-			0	-	0	-	0	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
1.06.03.2.01.01		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	Tercapainya prosentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	2	20,500,000	0	-					0	-	0	-	0	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Tercapainya Prosentase penanganan korban bencana	100	1,417,047,489	100	935,291,450	40	428,719,200	10	79,484,100	10	95,359,300	0	-	0	-	20.00	174,843,400	120.00	1,110,134,850	120.00	78.34	
1.06.06.2.01		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tercapainya prosentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	100	235,728,818	60	87,417,200					0	-	0	-	0	-	0.00	-	60.00	87,417,200	60.00	37.08	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
										I		II		III		IV								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.06.2.01.01		Penyediaan Permakanan	Jumlah Laporan	60	132,405,000	36	-			0	-	0	-	0	-	0.00	-	36.00	-	60.00	0.00			
1.06.06.2.01.02		Penyediaan Sandang	Jumlah Laporan	60	101,156,159	36	86,729,600			0	-	0	-	0	-	0.00	-	36.00	86,729,600	60.00	85.74			
1.06.06.2.01.03		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Laporan	60	2,167,659	36	687,600			0	-	0	-	0	-	0.00	-	36.00	687,600	60.00	31.72			
1.06.06.2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tercapainya prosentase Masyarakat siapsiaga terhadap Bencana di Kabupaten	100	1,181,318,671	140	847,874,250	80	428,719,200	20	79,484,100	20	95,359,300	0	-	0	40.00	174,843,400	180.00	1,022,717,650	180.00	86.57		
1.06.06.2.02.01		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Laporan	60	72,010,036	36	20,812,600			0	-	0	-	0	-	0.00	-	36.00	20,812,600	60.00	28.90			
1.06.06.2.02.02		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Laporan	60	1,109,308,636	48	827,061,650	12	428,719,200.00	3	79,484,100.00	3	95,359,300	0	-	0	6.00	174,843,400	54.00	1,001,905,050	90.00	90.32		
1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Kondisi TMP Baik	100	326,177,668	136.8	279,709,778	80	50,431,500	19	-	19	15,000,000	0	-	0	38.40	15,000,000	175.20	294,709,778	175.20	90.35		
1.06.07.2.01		KegiatanPemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tercapainya prosentase TMP Kabupaten dalam keadaan Baik	100	326,177,668	136.8	279,709,778	80	50,431,500	19	-	19	15,000,000	0	-	0	38.40	15,000,000	175.20	294,709,778	175.20	90.35		
1.06.07.2.01.01		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	5	154,277,360	3	129,408,300	1	-	0		0	-	0	-	0.00	-	3.00	129,408,300	60.00	83.88			
1.06.07.2.01.02		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	60	131,117,046	48	125,696,098	12	36,878,300.00	3	-	3	10,000,000.00	0	-	0	6.00	10,000,000	54.00	135,696,098	90.00	103.49		
1.06.07.2.01.03		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	60	40,783,262	48	24,605,380	12	13,553,200.00	3	-	3	5,000,000.00	0	-	0	6.00	5,000,000	54.00	29,605,380	90.00	72.59		
1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan PD	100	10,734,289,454	140	5,453,716,339	80	3,175,525,976	36	509,719,271	20	691,490,859	0	-	0	56.00	1,201,210,130	196.00	6,654,926,469	196.00	62.00		
1.06.01.2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyesusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	235,802,114	140	79,673,250	80	36,509,900	36	3,804,400	20	16,696,200	0	-	0	56.00	20,500,600	196.00	100,173,850	196.00	42.48		
1.06.01.2.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokuemn	15	63,429,719	12	20,121,050	3	8,720,100.00	2	1,627,100.00	1	2,830,800	0	-	0	3.00	4,457,900	15.00	24,578,950	100.00	38.75		
1.06.01.2.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	10	63,473,066	8	22,534,800	2	7,233,100.00	1	1,677,300.00	1	2,406,800	0	-	0	2.00	4,084,100	10.00	26,618,900	100.00	41.94		
1.06.01.2.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtliser Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	60	72,903,454	48	28,181,200	12	17,140,300.00	3	500,000.00	3	8,501,700	0	-	0	6.00	9,001,700	54.00	37,182,900	90.00	51.00		
1.06.01.2.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	15	35,995,876	12	8,836,200	3	3,416,400.00	3	-	0	2,956,900	0	-	0	3.00	2,956,900	15.00	11,793,100	100.00	32.76		
1.06.01.2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	100	7,736,170,059	140	4,443,122,868	80	2,675,452,812	30	445,964,614	17	603,168,831	0	-	0	46.90	1,049,133,445	186.90	5,492,256,313	186.90	70.99		
1.06.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan	60	7,526,647,343	48	4,370,538,668	12	2,649,127,112.00	3	444,164,614.00	3	592,464,131	0	-	0	6.00	1,036,628,745	54.00	5,407,167,413	90.00	71.84		
1.06.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan	60	183,454,063	48	61,442,000	12	23,452,500.00	3	1,800,000.00	3	7,831,500	0	-	0	6.00	9,631,500	54.00	71,073,500	90.00	38.74		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
				5	6	7	8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%																		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24														
1.06.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	25	26,068,653	20	11,142,200	5	2,873,200.00	5	-	0	2,873,200	0	-	0	-	5.00	2,873,200	25.00	14,015,400	100.00	53.76														
1.06.01.2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	48,586,330	140	26,506,850	80	9,000,000	20	750,000	20	3,000,000	0	-	0	-	40.00	3,750,000	180.00	30,256,850	180.00	62.27														
1.06.01.2.03.02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan	60	48,586,330	48	26,506,850	12	9,000,000.00	3	750,000	3	3,000,000	0	-	0	-	6.00	3,750,000	54.00	30,256,850	90.00	62.27														
1.06.01.2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1,083,478,627	140	237,328,700	80	90,554,000	20	13,794,000	0	18,630,000	0	-	0	-	20.00	32,424,000	160.00	269,752,700	160.00	24.90														
1.06.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan	60	11,155,752	48	5,768,700	12	3,604,000.00	3	3,604,000.00	3	0	0	-	0	-	6.00	3,604,000	54.00	9,372,700	90.00	84.02														
1.06.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan	60	42,369,600	48	10,240,000	12	6,000,000.00	3	1,000,000.00	3	1,000,000	0	-	0	-	6.00	2,000,000	54.00	12,240,000	90.00	28.89														
1.06.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	60	1,029,953,275	48	221,320,000	12	80,950,000.00	3	9,190,000.00	3	17,630,000	0	-	0	-	6.00	26,820,000	54.00	248,140,000	90.00	24.09														
1.06.01.2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	217,837,750	60	31,971,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	60.00	31,971,000	60.00	14.68														
1.06.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan	10	217,837,750	3	31,971,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	3.00	31,971,000	30.00	14.68														
1.06.01.2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	388,881,682	140	251,467,573	80	200,974,064	20	16,102,316	20	15,377,828	0	-	0	-	40.00	31,480,144	180.00	282,947,717	180.00	72.76														
1.06.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan	60	32,385,948	48	19,531,810	12	3,072,960.00	3	1,301,800.00	3	0	0	-	0	-	6.00	1,301,800	54.00	20,833,610	90.00	64.33														
1.06.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan	60	183,520,896	48	102,405,883	12	65,265,904.00	3	7,611,316.00	3	9,377,828	0	-	0	-	6.00	16,989,144	54.00	119,395,027	90.00	65.06														
1.06.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan	60	172,974,838	48	129,529,880	12	132,635,200.00	3	7,189,200.00	3	6,000,000	0	-	0	-	6.00	13,189,200	54.00	142,719,080	90.00	82.51														
1.06.01.2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	968,338,293	140	355,297,898	80	144,535,000	20	28,303,941	20	30,618,000	0	-	0	-	40.00	58,921,941	180.00	414,219,839	180.00	42.78														
1.06.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan	60	874,709,043	48	325,597,898	12	144,535,000.00	3	28,303,941.00	3	30,618,000	0	-	0	-	6.00	58,921,941	54.00	384,519,839	90.00	43.96														
1.06.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan	60	93,629,250	36	29,700,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	36.00	29,700,000	60.00	31.72														
1.06.01.2.13		Kegiatan Penataan Organisasi	Tertatanya Organisasi PD	100	55,194,601	140	28,348,200	80	18,500,200	20	1,000,000	20	4,000,000	0	-	0	-	40.00	5,000,000	180.00	33,348,200	180.00	60.42														
1.06.01.2.13.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	60	55,194,601	48	28,348,200	12	18,500,200.00	3	1,000,000	3	4,000,000	0	-	0	-	6.00	5,000,000	54.00	33,348,200	90.00	60.42														
Rata-rata capaian kinerja					104.34		9,349,074,697		48.00		5,287,177,106		13.84		616,812,201		10.52		1,059,175,959		-		-	-	-	24.36		1,655,503,160		128.70		10,993,110,057		128.70		42.31	
Predikat																			S		ST		ST														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																																					
				1 Jumlah Anggaran yang cukup																																	
				2 Regulasi yang jelas (SPM) PP no 2 dan Permensos No. 9																																	
				3 SDM sesuai dengan tupoksi +/- 50 %																																	
													1,675,988,160																								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%												
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
Faktor penghambat pencapaian kinerja				1. Regulasi berubah-ubah sementara dokumen perlu waktu untuk penyesuaian 2. SDM tidak sesuai dengan tupoksi +/- 50% 3.																				15	
Tindak lanjut yang di perlukan dalam triwulan berikutnya				1. Penyesuaian Anggaran Atas perubahan regulasi keuangan 2. Pelaksanaan Kegiatan Prioritas pengungkit Kinerja OPD 3.																					
Tindak lanjut yang di perlukan dalam RKPD berikutnya				1. Perlu Analisis Bobot Kinerja Fisik untuk setiap kegiatan pada OPD Sebagai Instrumen/ indikator dalam mengukur capaian 2. Perlu Indikatif anggaran yang realistis dan memiliki kepastian 3. Pemberian Indikatif KUA seharusnya mengacu pada skala prioritas berdasarkan beban Program Prioritas masing-masing OPD (ASB seharusnya menjadi alat ukur utama dalam menentukan besaran Biaya Output dalam penentuan besaran KUA Urusan, bukan belanja. sedangkan tolak ukur belanja adalah SSH, HPSK, dan SBU)																					
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN																									
1.	Terlaksananya operasional perkantoran OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							45	7,073,600	64,59	1,941,515,214												
		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD			-				45	7,073,600	50													
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	35	150,000,000	21	158,749,250	7	98,796,100	20	3,078,600	45	7,073,600	48	7,984,600	80	16,080,800	100	16,080,800	121	174,830,050	345.71	116.55	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang Diselesaikan tepat waktu										784,348,322	60,79	1,431,979,987										
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN Yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	60	2,500,000,000	36	3,393,984,125	12	1,651,879,350	3	368,205,348	6	404,045,774	9	1,418,696,987	12	1,835,675,563	12	1,835,675,563	48	5,229,659,688	80	209.19	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen keuangan Yang DiVerifikasi	15	25,000,000	12	32,882,900	3	14,400,000	5	2,400,000	15	6,273,600	18	6,536,500	20	14,936,500	58	30,146,600	70	63,029,500	466.67	252.12	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Tersusun	5	5,000,000	3	3,559,500	1	2,620,910	1	2,548,600	1	5,823,600	1	6,746,500	1	13,746,500	1	13,746,500	4	17,306,000	80.00	346.12	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah										5,306,600		5,306,600										
		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan yang rekonsiliasi barang Milik Daerah Pada SKPD	48	195,000,000	-	-	4	7,459,900	2	2,306,600	3	5,306,600	4	5,306,600	4	16,516,400	13	16,516,400	13	16,516,400	27.08	8.47	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor										228,415,119		2,145,800										
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan yang tersedia	100	7,000,000	60	6,094,450	20	4,095,150	10	540,600	30	1,264,100	40	2,145,800	45	3,747,000	45	3,747,000	105	9,841,450	105.00	140.59	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	30,000	50,000,000	-	-	20,000	9,200,000	5,000	1,350,500	10,000	1,480,500	15000	3,550,000	19,500	5,453,000	19,500	5,453,000	19,500	5,453,000	65.00	10.91	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	60	10,000,000	36	8,850,000	12	8,000,000	3	-	6	900,000	9	4,400,000	12	4,800,000	12	4,800,000	48	13,650,000	80.00	136.50	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi yang diikuti oleh ASN	60	500,000,000	36	419,792,100	12	250,000,000	40	130,844,360	80	221,615,519	82	330,432,627	100	350,836,000	100	350,836,000	136	770,628,100	226.67	154.13	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV										
					5	6		7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%					15				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD						10	1,355,000	40	3,155,000	45	3,400,000	45	8,075,000	45	8,075,000							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-					0													
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin lainnya	18	210,000,000	8	82,075,480	6	52,454,000	-	-		0		-	100	7,430,000	100	7,430,000	108	89,505,480	600.00	42.62	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah			-		-		-	-		57,135,900		88,002,100									
		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik,air dan komunikasi yang dibayarkan	60	47,000,000	36	40,554,487	12	24,006,480	3	18,118,500	6	35,181,500	9	56,916,500	12	71,802,600	12	71,802,600	48	112,357,087	80.00	239.06	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	10,000,000	12	17,707,950	75	6,046,500	2	2,950,000	4	3,900,000	3	4,900,000	5	9,000,000	5	9,000,000	17	26,707,950	170.00	267.08	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	25,000,000	36	54,989,825	12	22,053,945	3	5,778,400	6	18,054,400	9	26,185,600	12	46,969,600	12	46,969,600	48	101,959,425	80.00	407.84	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik										44,043,500		64,313,500									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara dan pajaknya terbayarkan	6	140,000,000	2	187,809,825	2	87,401,800	3	18,881,500	6	39,163,500	9	58,433,500	12	74,882,500	12	74,882,500	14	262,692,325	233.33	187.64	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1	300,000,000	2	153,037,250	1	215,052,472	3	600,000	6	4,280,000	9	4,280,000			9	4,280,000	11	157,317,250	1100	52.44	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya		12	4,270,000	12	4,270,000	12	4,270,000	6	4,270,000	6	600,000	9	1,600,000	12	4,270,000	12	4,270,000	24	8,540,000	200		
		Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja										145,658,050		1,024,429,300									
		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mengikuti Pelatihan										145,658,050		1,024,429,300									
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah peserta Pelatihan yang Lulus	150	1,500,000,000	90	326,715,300	100	7,436,300	32	105,620,550	100	145,658,050	192	1,024,429,300	192	1,820,291,700	192	1,820,291,700	282	2,147,007,000	188.00	143.13	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan										38,159,000											
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar kerja										17,843,900		17,843,900									
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Keberadaan Bursa Kerja Terhadap Pencari kerja	750	190,000,000	361	171,777,700	150	61,070,100	2,466	8,713,000	2,500	17,843,900	4,732	17,843,900	5,400	55,643,900	5,400	55,643,900	5,761	227,421,600	768.13	119.70	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Pasar kerja								20,316,000		24,916,000											
		Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Keberadaan Bursa Kerja Terhadap Pencari kerja	750	600,000,000	-	-	150	61,070,100	66	13,816,000	40	20,316,000	40	24,916,000	42	36,606,000	42	36,606,000	42	36,606,000	5.60	6.10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Program Hubungan Industrial	Persentase Hubungan Antara Pengusaha dan pekerja			-	-	-	-	-	-		60,607,129											
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	jumlah perjanjian yang disepakati bersama antara pengusaha dan pekerja			-	-	-	-	-	-		28,151,469		33,935,660									
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Penunahan	jumlah tenaga kerja yang terdata dan menjadi peserta bpjs	3,000	300,000,000	1,031	149,260,450	1,000	55,694,700	200	11,078,600	700	28,151,469	720	28,151,469	720	42,916,469	720	42,916,469	1,751	192,176,919	58.37	64.06	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	persentase perselisihan antara pekerja dan pengusaha						-		-		11,545,800	2	11,545,800	2	13,305,800							
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditangani	80	185,000,000	57	120,575,150	10	104,686,850	1	12,834,360		20,909,860	80	22,389,860	95	37,819,860	95	37,819,860	152	158,395,010	190.00	85.62	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Perencanaan dan Pembangunan Industri			-	-	-	-	-	-		995,938,525											
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan industri			-	-	-	-	-	-		995,938,525		1,210,302,225									
		Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan , Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perwilayahan Industri	80	800,000,000	71	4,632,535,106	10	334,240,811	5	130,169,800	8	143,038,825	9	155,740,125	9	185,740,125	9.00	185,740,125	80	4,818,275,231	100.00	602.28	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Tersedianya biaya operasional sentra IKM	60	10,000,000	-	-	12	3,715,573,740	3	28,927,100	6	49,907,600	9	49,907,600	12	100,307,600	12.00	100,307,600	12	100,307,600	20.00	1,003.08	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Industri yang melibatkan peran serta masyarakat	150	5,500,000,000	72	3,383,850,300	10	3,715,573,740	50	406,040,000	100	802,992,100	120	1,004,654,500	150	1,449,959,800	150.00	1,449,959,800	222	4,833,810,100	148.00	87.89	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Industri yang terdpat di akun SIINAS													0%		-	-					

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13= 6 + 12	Rp	14 = 13/5x100%	Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota											13,436,600		22,846,600			0%		-	-			
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						-	-	-	-		13,436,600		22,846,600			0%		-	-			
		Fasilitasi pemenuhan komitmen IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	48	275,000,000	-	-	2,200	104,711,250	15	8,227,600	40	13,436,600	43	22,846,600	50	31,293,500	50	31,293,500	50	31,293,500	104.17	11.38	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																								
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					32,473,409,549		13,018,409,427		9,452,039,061		1,009,290,413		1,901,147,505		3,528,051,309		2,290,655,435		8,729,144,662		22,168,875,939			
I. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					8,182,730,600		2,986,888,960		1,778,355,000		113,300,000		510,778,900		425,447,300		468,983,400		1,518,509,600		4,505,398,560			
1. Meningkatkan kualitas hidup anak & perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	Tingkat Capaian APE (Pratama, Madya, Nindya,	194	4,170,090,000	142	1,791,146,760	11,497	1,068,299,500	0	113,300,000	0	468,577,100	0	267,961,800	0	185,861,400	0	1,035,700,300	142	2,826,847,060	73	68	DPMDPPPA	
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	Cakupan lembaga yang melakukan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	103	985,700,000	51	290,383,500	36	219,799,500	0	-	0	200,000,100	0	1,330,000	0	18,469,400	0	219,799,500	51	510,183,000	50	52	DPMDPPPA	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	6	200,000,000	6	-	6	200,000,100	0	-	6	200,000,100	0	-	0	-	6	200,000,100	12	200,000,100	200	100	DPMDPPPA	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG	Jumlah PD yang menerapkan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG	36	485,700,000	10	258,441,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10	258,441,000	28	53	DPMDPPPA	
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan	67	300,000,000	41	31,942,500	26	19,799,400	0	-	0	-	4	1,330,000	4	18,469,400	4	19,799,400	45	51,741,900	67	17	DPMDPPPA	
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	Cakupan perempuan yang berpartisipasi dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	91	3,184,390,000	91	1,500,763,260	67	848,500,000	16	113,300,000	17	268,577,000	17	266,631,800	17	167,392,000	67	815,900,800	158	2,316,664,060	174	73	DPMDPPPA	
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	67	3,184,390,000	67	1,500,763,260	67	848,500,000	16	113,300,000	17	268,577,000	17	266,631,800	17	167,392,000	67	815,900,800	134	2,316,664,060	200	73	DPMDPPPA	
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	184	2,710,504,000	0	909,574,700	21	492,459,300	0	-	8	4,602,000	8	145,085,300	8	115,585,800	21	265,273,100	21	1,174,847,800	11	43	DPMDPPPA	
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Cakupan jumlah pengaduan yang dilayani	234	2,710,504,000	119	909,574,700	61	492,459,300	0	-	20	4,602,000	21	145,085,300	20	115,585,800	61	265,273,100	180	1,174,847,800	77	43	DPMDPPPA	
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan	184	1,360,504,000	93	409,817,000	50	438,800,000	0	-	0	-	28	135,910,300	22	75,703,500	50	211,613,800	143	621,430,800	78	46	DPMDPPPA	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	50	1,350,000,000	26	499,757,700	11	53,659,300	0	-	4	4,602,000	2	9,175,000	5	39,882,300	11	53,659,300	37	553,417,000	74	41	DPMDPPPA
		Proram Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan PD yang mengelola Sistem data gender dan anak	103	490,602,600	103	40,036,500	1	17,596,200	0	-	0	-	0	-	1	17,536,200	1	17,536,200	104	57,572,700	101	12	DPMDPPPA
		Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan	Cakupan jumlah PD yang melakukan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender & anak	103	490,602,600	103	40,036,500	1	17,596,200	0	-	0	-	0	-	1	17,536,200	1	17,536,200	104	57,572,700	101	12	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan	Jumlah PD yang melakukan penyajian dan pemanfaatan sistem data gender & anak	103	490,602,600	103	40,036,500	1	17,596,200	0	-	0	-	0	-	0	17,536,200	0	17,536,200	103	57,572,700	100	12	DPMDPPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan lembaga yang menyediakan layanan	67	811,534,000	21	246,131,000	21	200,000,000	0	-	5	37,599,800	1	12,400,200	15	150,000,000	21	200,000,000	21	446,131,000	31	55	DPMDPPPA
		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha/Kewirausahaan	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang melakukan PHA	46	190,119,000	46	43,535,000	8	150,000,000	0	-	0	-	0	-	8	150,000,000	8	150,000,000	54	193,535,000	117	102	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak	67	150,000,000	0	-	67	150,000,000	0	-	0	-	0	-	67	150,000,000	67	150,000,000	67	150,000,000	100	100	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang melakukan pelembagaan	46	190,119,000	8	43,535,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8	43,535,000	17	23	DPMDPPPA
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Jumlah lembaga/PD yang mendapatkan fasilitasi penguatan dan pengembangan	48	621,415,000	6	202,596,000	8	50,000,000	0	-	4	37,599,800	4	12,400,200	4	-	6	50,000,000	12	252,596,000	25	41	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	2	50,000,000	0	-	2	50,000,000	0	-	1	37,599,800	1	12,400,200	1	-	1	50,000,000	1	50,000,000	50	100	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Jumlah Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	2	239,065,000	1	118,946,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	118,946,000	50	50	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Konvensi hak anak (Jumlah PD yang mengarusutamakan kebutuhan anak dalam perencanaan)	36	382,350,000	5	83,650,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5	83,650,000	14	22	DPMDPPPA
II.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				24,290,678,949		10,031,520,467		7,673,684,061		895,990,413		1,390,368,605		3,102,604,009		1,821,672,035		7,210,635,062		17,663,477,379			
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMDPPPA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi		13,652,707,540		5,386,296,339		2,817,648,905		513,235,522		682,851,933		711,512,161		587,710,260		2,495,309,876		7,881,606,215			DPMDPPPA
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Cakupan dokumen perencanaan, penganggaran	10	304,406,300	4	111,049,500	1	40,000,000	1	5,320,000	1	11,590,700	1	10,717,600	1	12,357,200	2	39,985,500	6	151,035,000	60	50	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	104,010,100	2	44,749,000	1	20,000,000	1	2,883,000	1	6,490,000	1	4,253,000	1	6,371,000	2	19,997,000	4	64,746,000	100	62	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3	86,767,500	2	22,260,000	1	10,000,000	1	530,000	1	2,990,600	1	3,664,600	1	2,803,600	2	9,988,800	4	32,248,800	133	37	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	3	113,628,700	1	44,040,500	1	10,000,000	1	1,907,000	1	2,110,100	1	2,800,000	1	3,182,600	2	9,999,700	3	54,040,200	100	48	DPMDPPPA
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan dokumen administrasi keuangan	12	11,422,357,700	12	4,784,161,722	12	2,501,254,505	3	454,809,309	3	607,265,753	3	635,796,669	3	494,857,952	6	2,192,729,683	18	6,976,891,405	150	61	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	11,112,357,700	35	4,688,388,472	35	2,466,254,505	35	446,743,009	35	598,668,253	35	629,151,969	35	483,222,452	35	2,157,785,683	70	6,846,174,155	194	62	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengendalian Biaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengendalian Biaya	36	250,000,000	24	81,106,750	12	25,000,000	3	5,759,300	3	6,194,100	3	4,117,700	3	8,872,900	3	24,944,000	27	106,050,750	75	42	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	3	60,000,000	1	14,666,500	1	10,000,000	1	2,307,000	1	2,403,400	1	2,527,000	1	2,762,600	2	10,000,000	3	24,666,500	100	41	DPMDPPPA
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan dokumen yang difasilitasi administrasi	5	54,999,950	4	20,441,250	1	7,000,000	1	1,660,000	1	1,726,950	1	1,434,300	1	2,177,950	2	6,999,200	6	27,440,450	120	50	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	5	54,999,950	4	20,441,250	1	7,000,000	1	1,660,000	1	1,726,950	1	1,434,300	1	2,177,950	4	6,999,200	8	27,440,450	160	50	DPMDPPPA

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV				13= 6 + 12			14 = 13/5x100%	
				5		6		7		8		9		10		11				12			15	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Aparatur DPMDPPPA yang difasilitasi	108	1,083,411,000	36	233,122,305	12	131,179,600	3	24,529,500	3	37,977,599	3	34,024,780	3	34,637,600	3	131,169,479	39	364,291,784	36	34	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Perangkat Daerah	5	27,500,000	4	8,336,000	1	5,007,600	1	789,500	1	1,077,600	1	1,212,300	1	1,927,600	1	5,007,000	5	13,343,000	100	49	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	18	39,509,000	6	19,509,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6	-	12	19,509,000	67	49	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SWPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SWPD	108	1,016,402,000	36	205,277,305	12	126,172,000	3	23,740,000	3	36,899,999	3	32,812,480	3	32,710,000	12	126,162,479	48	331,439,784	44	33	DPMDPPPA
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	5	274,297,090	4	94,835,477	1	68,213,000	1	11,566,713	0	10,040,931	0	10,849,312	0	24,356,058	6	56,813,014	10	151,648,491	200	55	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	194,988,000	4	59,399,477	1	46,610,400	1	9,107,713	1	7,561,131	1	8,387,612	1	10,788,458	3	35,844,914	7	95,244,391	140	49	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	79,309,090	4	35,436,000	1	21,602,600	1	2,459,000	1	2,479,800	1	2,461,700	1	13,567,600	3	20,968,100	7	56,404,100	140	71	DPMDPPPA
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Cakupan barang milik daerah yang difasilitasi	5	513,235,500	5	142,686,085	5	70,001,800	5	15,350,000	5	14,250,000	5	18,689,500	5	19,323,500	3	67,613,000	8	210,299,085	160	41	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5	513,235,500	5	142,686,085	5	70,001,800	5	15,350,000	5	14,250,000	5	18,689,500	5	19,323,500	3	67,613,000	8	210,299,085	160	41	DPMDPPPA
3.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Program Penataan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penataannya	46	3,202,284,409	46	1,571,932,668	46	971,673,456	46	223,145,792	46	225,853,872	46	150,569,248	46	301,950,920	46	901,519,832	92	2,473,452,500	200	77	DPMDPPPA
		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan penataan	46	3,202,284,409	46	1,571,932,668	46	971,673,456	46	223,145,792	46	225,853,872	46	150,569,248	46	301,950,920	46	901,519,832	92	2,473,452,500	200	77	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	46	3,202,284,409	46	1,571,932,668	46	971,673,456	46	223,145,792	46	225,853,872	46	150,569,248	46	301,950,920	46	901,519,832	92	2,473,452,500	200	77	DPMDPPPA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan jumlah desa yang difasilitasi administrasi pemerintahan desanya	46	3,739,777,650	46	421,321,850	46	2,513,980,100	46	38,487,099	46	115,620,700	46	1,688,401,800	46	611,911,355	46	2,454,420,954	92	2,875,742,804	200	77	DPMDPPPA
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan jumlah desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desanya	46	3,739,777,650	46	421,321,850	46	2,513,980,100	46	38,487,099	46	115,620,700	46	1,688,401,800	46	611,911,355	46	2,454,420,954	92	2,875,742,804	200	77	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan	5	170,000,000	4	36,621,200	1	18,001,800	1	1,699,500	1	5,054,000	1	2,977,000	1	-	4	9,730,500	8	46,351,700	160	27	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	5	539,999,850	4	155,877,950	1	50,005,200	1	4,399,000	1	12,230,000	1	11,807,000	1	20,074,000	4	48,510,000	8	204,387,950	160	38	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan	46	2,430,165,900	21	-	25	2,430,165,900	7	31,341,099	8	93,960,200	8	1,666,120,800	8	590,598,355	31	2,382,020,454	52	2,382,020,454	113	98	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	46	225,772,000	46	35,018,200	46	15,807,200	46	1,047,500	46	4,376,500	46	7,497,000	46	1,239,000	46	14,160,000	92	49,178,200	200	22	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Jumlah anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	634	373,839,900	0	193,804,500	138 orang	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	193,804,500	0	52	DPMDPPPA
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	Cakupan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat	67	7,435,687,000	67	3,073,291,460	67	1,370,381,600	67	121,122,000	67	366,042,100	67	552,120,800	67	320,099,500	67	1,359,384,400	134	4,432,675,860	200	60	DPMDPPPA
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	67	7,435,687,000	67	3,073,291,460	67	1,370,381,600	67	121,122,000	67	366,042,100	67	552,120,800	67	320,099,500	67	1,359,384,400	134	4,432,675,860	200	60	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	5	174,401,800	4	51,871,350	1	14,997,700	1	2,242,000	1	3,175,500	1	6,735,300	1	2,832,000	4	14,984,800	8	66,856,150	160	38	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	5	1,215,000,000	4	174,852,500	1	29,383,900	1	2,601,000	1	8,545,400	1	16,850,000	1	-	4	27,996,400	8	202,848,900	160	17	DPMDPPPA

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	67	190,000,000	67	64,308,610	67	20,000,000	67	2,940,000	67	5,460,000	67	8,180,000	67	3,420,000	67	20,000,000	134	84,308,610	200	44	DPMDPPPA
		Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam	Jumlah pelaku/keompok usaha ekonomi masyarakat berbasis dusun & RW yang telah memperoleh fasilitas &	450	5,856,285,200	300	2,782,259,000	150	1,306,000,000	150	113,339,000	150	348,861,200	150	520,355,500	150	313,847,500	150	1,296,403,200	450	4,078,662,200	100	70	DPMDPPPA
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :				1. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Adanya kerjasama yang baik antara perangkat daerah terkait lembaga P2TP2A 3. Terbenkunya organisasi kemasyarakatan di Desa/kel 4. Pemberian ruang kepada lembaga ekonomi masyarakat dalam mengembangkan usahanya 5. Pemberian ruang kepada lembaga kemasyarakatan di desa/kel 6. Kebijakan pemerntah untuk penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas aparatur																				
Faktor penghambat keberhasilan kinerja :				1. Pelaksanaan perencanaan dan penganggran responsif gender belum optimal 2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan perencanaan dan penganggran responsif gender 3. Adanya adat budaya yang kurang mendukung upaya pencegahan pernikahan usia anak 4. Belum optimalnya prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam mengali potensi ekonomi desa 5. Belum optimalnya SDM pengelola kelembagaan masyarakat 6. Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya") :				1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2. Meningkatkan implementasi kabupaten layak anak 3. Penguatan kelembagaan PUG yang aktif 4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 5. Penciptaan komunitas usaha 6. Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya") :				1. Meningkatkan kualitas hidup anak dan pemberdayaan perempuan 2. Meningkatkan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan 3. Meningkatkan kualitas pembangunan desa																				
DINAS KETAHANAN PANGAN																								
2091	1. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		769	10,406,408,634	147	2,241,936,491	175	2,372,794,225	29	284,977,740	27	600,058,974	27	546,439,836	29	422,399,156	148	1,853,875,706	259	4,095,812,197	34	39	
2090 12.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63	724,155,663	13	57,026,160	7	43,909,900	3	12,519,300	3	3,800,000	3	10,685,500	4	16,435,100	13	43,439,900	26	100,466,060	41	14	
2090 12.0 101		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan)	1	50,337,712	1	33,759,900	3	28,964,500		9,149,400		800,000		5,110,000	1	13,435,100	1	28,494,500	2	62,254,400	200	124	
2090 12.0 106		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	12	71,309,700	12	23,266,260	4	14,945,400	3	3,369,900	3	3,000,000	3	5,575,500	3	3,000,000	12	14,945,400	24	38,211,660	200	54	
2090 12.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	116	6,565,663,428	25	1,937,650,900	35	2,059,527,525	8	234,300,547	6	538,533,642	6	447,152,906	6	343,579,483	26	1,563,566,578	51	3,501,217,478	44	53	
2090 12.0 201	2. Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JumlahOrang yang ,menerima gaji dan tunjangan (Bulan)	12	1,993,829,000	12	1,904,078,500	30	2,041,737,825	3	231,966,847	3	531,175,142	3	443,317,906	3	339,316,983	12	1,545,776,878	24	3,449,855,378	200	173	
2090 12.0 203		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian (Verifikasi Keuangan SKPD (Kali)	12	21,874,250	12	29,572,400	1	16,082,000	3	626,000	3	7,358,500	3	3,835,000	3	4,262,500	12	16,082,000	24	45,654,400	200	209	
2090 12.0 205		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	2	20,117,500	1	4,000,000	4	1,707,700	2	1,707,700		-		-		2	1,707,700	3	5,707,700	150	28		
2090 12.0 207		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran (Laporan)	2	9,265,350	0	-	0	-				-		-		0	-	0	-	0	-	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
209012.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65	296,060,065	12	8,030,600	12	8,801,700	3	600,000	3	-	3	5,260,000	3	2,941,700	12	8,801,700	24	16,832,300	37	6	
209012.0301		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	20,000,000	0	-	0	-						-		-	0	-	0	-	0	-	
209012.0304		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Kali)	12	25,362,274	12	8,030,600	12	8,801,700	3	600,000	3		3	5,260,000	3	2,941,700	12	8,801,700	24	16,832,300	200	66	
209012.0305		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	25,000,000		-		-								-	0	-	0	-	0	-	
209012.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40	153,963,451	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	
209012.0511		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelatihan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Kali)	8	7,350,451	0	-	0	-						-		-	0	-	0	-	0	-	
209012.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	240	1,507,204,964	48	127,593,251	82	153,081,700	3	19,599,879	3	30,754,757	3	47,934,407	3	37,745,363	48	136,034,406	60	263,627,657	25	17	
209012.0601		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Administrasi Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor (Kali)	12	11,284,691	12	2,156,000	0	-								-	12	-	12	2,156,000	100	19	
209012.0602		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor (Kali)	12	4,137,060	12	11,993,800	1	6,136,700								-	12	-	12	11,993,800	100	290	
209012.0606		Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan yang disediakan (Kali)	12	1,974,368	12	6,840,000	1	6,840,000				4,170,000				-	12	4,170,000	12	11,010,000	100	558	
209012.0609		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	12	52,813,235	12	106,603,451	80	140,105,000	3	19,599,879	3	26,584,757	3	47,934,407	3	37,745,363	12	131,864,406	24	238,467,857	200	452	
209012.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120	457,099,822	24	39,222,100	36	50,363,400	6	8,568,914	6	12,208,310	6	13,529,936	6	10,699,043	24	45,006,203	48	84,228,303	40	18	
209012.0802		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik (Kali)	12	15,732,978	12	16,514,400	24	20,488,800	3	4,799,314	3	4,067,010	3	3,975,236	3	5,034,043	12	17,875,603	24	34,390,003	200	219	
209012.0804		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kali)	12	28,070,201	12	22,707,700	12	29,874,600	3	3,769,600	3	8,141,300	3	9,554,700	3	5,665,000	12	27,130,600	24	49,838,300	200	178	
209012.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125	702,261,241	25	72,413,480	3	57,110,000	6	9,389,100	6	14,762,265	6	21,877,087	7	10,998,467	25	57,026,919	50	129,440,399	40	18	
209012.0901		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kali)	12	19,163,025	12	50,913,600	1	47,630,000	3	9,389,100	3	13,301,265	3	13,897,087	3	10,998,467	12	47,585,919	24	98,499,519	200	514	
209012.0902		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan (Kali)	12	19,278,169	12	1,500,000	1	1,500,000	3		3	1,461,000	3		3	-	12	1,461,000	24	2,961,000	200	15	
209012.0909		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	80,999,999	1	19,999,880	1	7,980,000						7,980,000	1	-	1	7,980,000	2	27,979,880	200	35	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
20902		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Desa yang Masuk dalam Kategori Mandiri Pangan	30	564,136,967	1	2,350,000,000	3	3,850,000	0	-	0	0	0	-	-	-	2	1,150,000	3	2,351,150,000	10	417	
209022.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang tersedia	30	564,136,967	1	2,350,000,000	3	3,850,000						-		-	2	1,150,000	3	2,351,150,000	10	417	
2090220101		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia di Setiap Desa (Unit)	3	50,855,000	1	2,350,000,000	0	-								-	0	-	1	2,350,000,000	33	4,621	
2090220103		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (Unit)	Jumlah infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (Unit)	2	30,250,000	0		3	3,850,000		-		1,150,000		2			2	1,150,000	2	1,150,000	100	4	
20903		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	495	7,308,096,913	61	932,515,635	69	391,462,600	3	15,392,000	3	51,862,300	-	212,823,300	26	42,436,100	60	322,513,700	121	1,255,029,335	24	17	
209032.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	242	3,128,753,200	31	111,445,650	23	73,560,000	3	7,440,800	3	30,589,300		20,959,900		8,504,100	34	67,494,100	65	178,939,750	27	6	
209032.0101		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Kali)	12	15,000,000	0	-	0	-								-	0	-	0	-	0	-	
209032.0102		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia (Varietas)	8	10,526,500	8	37,707,650	8	30,251,600		2,687,300		11,099,300		8,780,000	8	6,415,000	8	28,981,600	16	66,689,250	200	634	
209032.0103		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Kali)	6	13,450,500	3	1,779,300	6	5,949,000						1,164,000	6	-	6	1,164,000	9	2,943,300	150	22	
209032.0104		Pemantau Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantau Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Laporan)	12	21,208,000	12	38,389,800	1	27,253,500	3	3,703,500	3	15,825,000	3	6,825,000	3	900,000	12	27,253,500	24	65,643,300	200	310	
209032.0105		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Pengembangan Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan (Kali)	12	55,450,500	0	-	0	-								-	0	-	0	-	0	-	
209032.0106		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (Unit)	8	51,504,000	8	33,568,900	8	10,105,900		1,050,000		3,665,000		4,190,900	8	1,189,100	8	10,095,000	16	43,663,900	200	85	
209032.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota	103	1,392,403,581	20	18,949,800	20	6,855,200	0	-	-	-	-	-	-	505,200	0	505,200	20	19,455,000	19	1	
209032.0202		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Kebutuhan Pangan Lokal (Laporan)	1	19,435,400	0	-	0	-									0	-	0	-	0	-	
209032.0203		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah cadangan pangan masyarakat (Ton)	20	75,100,000	20	18,949,800	20	6,855,200							505,200	0	505,200	20	19,455,000	100	26		
209032.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun	150	2,786,940,132	10	802,120,185	26	311,047,400	0	7,951,200	-	21,273,000	-	191,863,400	26	33,426,800	26	254,514,400	36	1,056,634,585	24	38	
209032.0401		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun (Laporan)	5	200,845,000	5	34,574,000	1	34,041,500		3,831,200		2,465,000		21,283,400	1	2,756,900	1	30,336,500	6	64,910,500	120	32	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
				5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%			15
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
209032.0402		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Kelompok)	25	288,211,500	5	767,546,185	25	277,005,900		4,120,000		18,808,000		170,580,000	25	30,669,900	25	224,177,900	30	991,724,085	120	344		
209032.0403		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun (Kali)	1	157,031,560	0	-	0	-						-		-	0	-	0	-	0	-		
20904		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	29	1,474,038,458	1	87,271,000	1	146,544,500	0	2,983,500	-	104,296,000	-	16,650,000	1	20,330,000	1	144,259,500	2	197,334,449	7	13		
209042.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	5	1,093,135,619	1	87,271,000	1	146,544,500	0	2,983,500	-	104,296,000	-	16,650,000	1	20,330,000	1	144,259,500	2	197,334,449	40	18		
209042.0101		Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentangan Pangan (Laporan)	Jumlah Analisis Peta Kerawanan dan Kerentangan Pangan (Laporan)	1	1,093,135,619	1	53,074,949	1	146,544,500		2,983,500		104,296,000		16,650,000	1	20,330,000	1	144,259,500	2	197,334,449	200	18		
209042.02		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	24	380,902,839	0	-	0	-								0	-	0	-	0	-	-		
209042.0201		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota (Kali)	8	210,000,000	0	-	0	-						-		-	0	-	0	-	0	-		
20905		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan	143	2,054,697,314	18	43,580,755	5	29,006,100	0	780,000	-	1,575,100	-	17,629,100	-	6,560,000	5	26,544,200	23	70,124,955	16	3		
209052.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	143	2,054,697,314	18	43,580,755	5	29,006,100	0	780,000	-	1,575,100		17,629,100		6,560,000	5	26,544,200	23	70,124,955	16	3		
209052.0101		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	Jumlah Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten (Varietas)	13	43,754,235	13	20,730,805	0	-								-	0	-	13	20,730,805	100	47		
209052.0102		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota (Sertifikasi)	8	127,450,000	0	-	0	-								-	0	-	0	-	0	-		
209052.0104		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota (Kec)	8	128,330,530	0	-	0	-								-	0	-	0	-	0	-		
209052.0105		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan (Unit)	5	194,350,000	5	22,849,950	5	29,006,100		780,000		1,575,100		17,629,100	5	6,560,000	5	26,544,200	10	49,394,150	200	25		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				1466												253216		40828							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RRPD berikutnya :																									
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																									
	Meningkatnya perlindungan lingkungan dan sumber daya alam	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	1,450,000,000	60%	240,619,000	60%	200,510,500		19,535,443		19,296,000		-		-	0%	38,831,443	100%	279,450,443	100%	19%		
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kab. Bantaeng yang ditetapkan	1	600,000,000	1	240,619,000		-		-		-		-		-		1.00	240,619,000	100%	40%			
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Tahapan Penetapan RPPLH yang dilaksanakan	1	600,000,000	1	240,619,000										-	1.00	240,619,000	100%	40%				
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang dibuat dan divalidasi	4	850,000,000	-	4	200,510,500		19,535,443		19,296,000		-		-			38,831,443		38,831,443	0%	5%		
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	6	250,000,000	-											-	-		-	0%	0%			
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD yang dibuat dan dilaksanakan	1	600,000,000	-	1	200,510,500	0.25	19,535,443	0.25	19,296,000				0.50	38,831,443	0.50	38,831,443	50%	6%				

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
				5	6	7	8	9	10	I		II		III		IV			12		13= 6 + 12			14 = 13/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditangani	100%	4,035,000,000	100%	5,478,714,030	100%	923,977,730	100%	202,072,950		266,576,300		-		-	100%	468,649,250	100%	5,947,363,280	100%	147%		
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumah Sumber Pencemaran dan Kerusakan yang dapat dicegah	35	2,895,000,000	20	5,326,113,732	15	744,008,600	2	178,152,950		221,850,600		-		-	2	400,003,550	22	5,726,117,282	63%	198%		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Sungai, Pesisir Laut dan Lokasi udara Embien yang ditetapkan status mutunya	11	1,065,000,000	14	814,282,532	11	395,947,400	-	88,301,300		104,885,000				-	193,186,300	14	1,007,468,832	127%	95%			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	2	300,000,000	3	72,721,950	1	55,581,500	1	11,992,300		13,743,500				1	25,735,800	4	98,457,750	200%	33%			
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Pencemar yang diuji	12	1,530,000,000	12	3,287,655,048	12	292,479,700	3	77,859,350	5	103,222,100				8	181,081,450	20	3,468,736,498	167%	227%			
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pencemaran/kerusakan yang dicegah	70%	100,000,000	50%	1,112,048,000	70%	33,315,400		7,918,000		8,121,900		-		-	-	16,039,900	50%	1,128,087,900	71%	1128%		
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang Tersedia	1	100,000,000	1	1,112,048,000	0	33,315,400		7,918,000		8,121,900				-	16,039,900	1	1,128,087,900	100%	1128%			
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Cakupan Rehabilitasi Lahan	70%	1,040,000,000	58%	255,188,500	12%	146,653,730		16,002,000		36,603,800		-		-		52,605,800	58%	307,794,300	83%	30%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Sumber Pencemar yang ditangani	3	370,000,000	2	45,820,600	1	56,905,930	1	402,000		9,127,200				1	9,529,200	3	55,349,800	100%	15%			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Kritis	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis	3	670,000,000	2	146,185,900	1	89,747,800	1	15,600,000		27,476,600				1	43,076,600	3	189,262,500	100%	28%			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rasio Tingkat Ketaatan Pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	26%	627,500,000	25%	188,716,665	26%	108,948,700		15,361,100		21,434,670		-		-		36,795,770	25%	225,512,435	96%	36%		
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan dan Izin PPLH yang	18	627,500,000	9	325,595,165	9	108,948,700	5	15,361,100		21,434,670		-		-	5	36,795,770	14	362,390,935	78%	58%		
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai	18	155,500,000	3	31,618,600	7	50,359,800	1	6,577,100		9,464,600				1	16,041,700	4	47,660,300	22%	31%			
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi Ketaatannya terhadap izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	18	472,000,000	43	157,098,065	7	58,588,900	5	8,784,000	19	11,970,070				24	20,754,070	67	177,852,135	372%	38%			
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	165,000,000	100%	52,381,000	100%	35,549,960	25%	6,240,100	25%	7,227,800		-		-	50%	13,467,900	100%	65,848,900	100%	40%		
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah rekomendasi tindakan/ kasus/perkara LH yang ditangani	6	165,000,000	11	83,429,500	2	35,549,960	4	6,240,100	2	7,227,800		-		-	6	13,467,900	17	96,897,400	283%	59%		
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang ditangani	6	165,000,000	15	52,381,000	2	35,549,960	4	6,240,100	2	7,227,800				6	13,467,900	21	65,848,900	350%	40%			
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH	Proporsi Limbah B3 yang diolah sesuai Prosedur	30%	525,500,000	30%	85,916,900	30%	44,792,500	30%	4,426,000		4,620,000		-		-	30%	9,046,000	30%	94,962,900	100%	18%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang	60%	285,500,000	22%	67,302,300	23%	26,237,500	22%	2,308,000	22%	2,250,000	-	-	22%	4,558,000	22%	71,860,300	37%	25%				
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Pemukiman	Jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diverifikasi	14	285,500,000	22	67,302,300	12	26,237,500	3	2,308,000	4	2,250,000			7	4,558,000	29	71,860,300	207%	25%				
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Pengumpul/Pengangkut Limbah	50%	240,000,000	50%	18,614,600	50%	18,555,000		2,118,000		2,370,000	-	-	-	4,488,000	50%	23,102,600	100%	10%				
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi pemenuhan izin pengumpulan limbah B3	10	110,000,000	3	18,614,600	3	18,555,000	1	2,118,000		2,370,000			1	4,488,000	4	23,102,600	40%	21%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Limbah B3 yang diangkut keluar daerah	50	130,000,000	-										-	-	-	-	0%	0%				
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA terkait PPLH yang diakui		110,000,000	-		-		-		-				-	-	-	-	0%	0%				
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan	4	110,000,000	-		-		-		-				-	-	-	-	0%	0%				
		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah MHA terkait PPLH yang diakui	4	110,000,000	-										-	-	-	-	0%	0%				
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH		350,000,000		72,568,600	20%	51,829,100		6,092,500		38,312,300			-	-	-	44,404,800		116,973,400		33%		
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan dan penyuluhan	25%	350,000,000		72,568,600	20%	51,829,100		6,092,500		38,312,300			-	-	-	44,404,800		116,973,400		0%	33%	
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	250,000,000	1	72,568,600	3	72,600,000		6,092,500	1	38,312,300				1	44,404,800	2	116,973,400	200%	47%			
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Penyuluhan Lingkungan Hidup	1	100,000,000	-										-	-	-	-	0%	0%				
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	20	1,467,000,000		712,284,707	15%	195,127,400		53,630,372		71,065,600			-	-	-	124,695,972		836,980,679		0%	57%	
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	36	1,467,000,000	12	712,284,707	12	195,127,400		53,630,372	8	71,065,600			-	-	8	124,695,972	20	836,980,679	56%	57%		
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Penilaian Kinerja dalam PPLH	5	1,467,000,000	3	712,284,707	2	195,127,400		53,630,372	1	71,065,600				1	124,695,972	4	836,980,679	80%	57%			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah	22.50%	17,263,200,000	51.26%	9,933,078,731	22.00%	5,181,830,900		1,158,270,943	57.05	1,203,681,800			-	-	57.05	2,361,952,743	51.26%	12,295,031,474	228%	71%		
		Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah yang dikelola	22.50%	17,263,200,000	51.26%	9,933,078,731	21.50%	5,181,830,900		1,158,270,943	58.56	1,203,681,800			-	-	58.56	2,361,952,743	51.26%	12,295,031,474	228%	71%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kab/Kota	Jumlah Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kab/Kota yang tersusun	2	350,000,000	1	152,412,274										-	-	1	152,412,274	50%	44%		
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembalasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase Pengurangan Sampah Melalui 3R	10.50	300,200,000	25.70%	150,872,250										-	-	25.70%	150,872,250	2%	50%		
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang masuk ke Pemrosesan Akhir Sampah Satuan : Ton	24,000	15,913,000,000	19,188	9,589,496,507	8,000	5,157,608,000	1,890	1,153,502,043	1980	1,185,827,200				3,870	2,339,329,243	23058	11,928,825,750	96%	75%		
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengolah Sampah	6	400,000,000	3	40,297,700	3	24,222,900		4,768,900	3	17,854,600				3	22,623,500	6	62,921,200	100%	16%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jenis Sarana Yang di Sediakan	2	100,000,000	-											-	-	-	-	0%	0%		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan di TPA	2	550,000,000	-											-	-	-	-	0%	0%		
						-											-	-	-	-				
	Meningkatnya Pengelolaan RTH	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tingkat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	14.67%	13,732,500,000	10%	3,569,557,641	14%	2,272,583,600	10%	369,194,486	10%	423,029,800		-	-	10%	792,224,286	10%	4,361,781,927	68%	32%		
		Pengelolaan Keanekaragaman	Jumlah Keanekaragaman Hayati	14.67%	13,732,500,000	10%	3,569,557,641	14%	2,272,583,600	10%	369,194,486	10%	423,029,800		-	-	10%	792,224,286	10%	4,361,781,927	68%	32%		
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH Terhadap Luas Wilayah Perkotaan yang Dikelola	32.00%	12,982,500,000	10%	2,836,951,505	14%	1,461,994,000	10%	182,572,286	10%	201,806,400				10%	384,378,686	10%	3,221,330,191	31%	25%		
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Taman Kehati yang dikelola	9	750,000,000	14	732,606,136	15	810,589,600	15	186,622,200	15	221,223,400				15	407,845,600	15	1,140,451,736	167%	152%		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran/nya	100%	11,562,166,667	100%	5,973,503,664	100%	3,541,140,460	0.25	616,341,320	0.25	841,203,299		-	-	0.50	1,457,544,619	100%	7,431,048,283	100%	64%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	100%	127,500,000	100%	69,933,700	100%	37,478,400	25%	9,265,200	25%	11,016,500		-	-	50%	20,281,700	100%	90,215,400	100%	71%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan (Rencana Perangkat Daerah)	6	36,000,000	5	17,204,800	2	8,531,800	1	3,265,200	1	3,555,600				2	6,820,800	7	24,025,600	117%	67%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang dihasilkan (RKA SKPD)	12	39,000,000	8	21,897,500	4	13,661,000	2	3,000,000		3,662,000				2	6,662,000	10	28,559,500	83%	73%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja, LKJ, LKPJ yang dihasilkan	78	52,500,000	52	30,831,400	26	15,285,600	12	3,000,000	6	3,798,900				18	6,798,900	70	37,630,300	90%	72%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%	9,289,000,000	100%	4,955,193,517	100%	2,909,944,200	25%	524,796,698	25%	702,372,800		-	-	50%	1,227,169,498	100%	6,182,363,015	100%	67%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	36	9,197,000,000	24	4,915,833,017	12	2,888,445,200	3	515,215,398	3	698,529,800				6	1,213,745,198	30	6,129,578,215	83%	67%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelayanan Administrasi Keuangan	36	56,000,000	24	27,937,500	12	14,916,600	3	3,000,000	3	3,843,000				6	6,843,000	30	34,780,500	83%	62%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3	15,000,000	2	11,423,000	1	6,582,400	1	6,581,300						1	6,581,300	3	18,004,300	100%	120%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	26	21,000,000	-												-	-	-	0%	0%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada	100%	26,500,000	100%	-	100%	4,410,800	25%	744,900	25%	1,413,000		-	-	50%	2,157,900	100%	2,157,900	100%	8%		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan RKB	2	11,000,000	-												-	-	-	0%	0%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pencatatan dan Pembukuan Barang dan Aset	24	15,500,000	12	-	12	4,410,800	3	744,900	3	1,413,000				6	2,157,900	18	2,157,900	75%	14%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang dilayani	100%	246,646,667	-		-	-				-		-	-		-	-	-	0%	0%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	100	40,000,000	-												-	-	-	0%	0%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5	Rp	6	Rp	7	8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp
1	2	3	4	5	Rp	6	Rp	7	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Perundang-undangan yang disosialisasikan	1	146,646,667		-												-		-	0%	0%	
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dikirim	4	60,000,000		-												-		-	0%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	727,520,000	100%	314,523,894	100%	210,737,000	25%	30,554,533	25%	64,082,434		-		-		94,636,967	100%	409,160,861	100%	56%	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	3	7,900,000	2	4,699,850	1	3,465,800				560,000					-	560,000	2	5,259,850	67%	67%	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Diadakan dan Dipelihara	3	36,000,000	3	12,890,000											-	-	3	12,890,000	100%	36%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fotocopy Dokumen/Laporan/Spanduk	36	14,520,000	24	4,929,500	12	5,500,000		280,000		935,000					-	1,215,000	24	6,144,500	67%	42%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Koran dan Majalah	36	57,000,000	19	28,700,000	12	9,000,000	3	3,000,000	3	4,500,000					6	7,500,000	25	36,200,000	69%	64%	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan Minum Rapat dan Tamu	3	51,100,000	2	32,950,700	1	18,000,000	0.25	2,700,000	0.25	4,800,000					0.50	7,500,000	2.50	40,450,700	83%	79%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	3	451,000,000	2	218,353,844	1	161,792,000	0.25	22,574,533	0.25	48,894,534					0.50	71,469,067	2.50	289,822,911	83%	64%	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	110,000,000	1	12,000,000	1	12,979,200		2,000,000		4,392,900						6,392,900	1	18,392,900	50%	17%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase sarana dan prasarana aparatur memadai	33%	177,500,000	32%	73,442,500	33%	21,539,700		-		-		-		-		-	32%	73,442,500	97%	41%	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan	2	70,000,000		-												-		-	0%	0%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler kantor yang diadakan	9	37,500,000	5	31,742,500						-					-	-	5	31,742,500	56%	85%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan	6	70,000,000	6	41,700,000	4	21,539,700				-					-	-	6	41,700,000	100%	60%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Administrasi	33%	459,500,000	100%	289,589,475	100%	229,291,700	25%	38,019,989	25%	41,183,735			-	-		79,203,724		368,793,199	0%	80%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	278,000,000	24	156,504,471	12	147,280,000	3	18,744,789	3	19,641,135					6	38,385,924	30	194,890,395	83%	70%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	181,500,000	24	133,085,004	12	82,011,700	3	19,275,200	3	21,542,600					6	40,817,800	30	173,902,804	83%	96%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik	33%	508,000,000	25%	270,820,578	29%	127,738,660	30%	12,960,000	31%	21,134,830		-		-	1	34,094,830	86%	304,915,408	261%	60%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diselesaikan Pajaknya	3	300,000,000	2	152,533,153	1	60,133,660	0.25	9,299,500	0.25	15,075,830					0.50	24,375,330	2.50	176,908,483	83%	59%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	78,000,000	2	28,191,475	1	41,000,000	0.25	3,390,500	0.25	3,509,000						6,899,500	2	35,090,975	67%	45%	
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	2	10,000,000		-												-		-	0%	0%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Kantor	3	30,000,000	2	10,070,000	1	10,930,000	0.25	270,000	0.25	2,550,000						2,820,000	2	12,890,000	67%	43%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	2	90,000,000	2	80,025,950	2	15,675,000										-	2	80,025,950	100%	89%	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)										Predikat Kinerja													81%	
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja : Adanya dukungan kebijakan dan anggaran pada beberapa program strategis																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Rendahnya keberhasilan kinerja karena tidak adanya batasan anggaran dan kegiatan dalam penyusunan Renstra SKPD sehingga ketersediaan anggaran tiap tahun tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran yang direncanakan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Agar memprioritaskan program yang capaiannya masih rendah dalam RKPD berikutnya																								
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							I		II		III		IV										
							8	9	10	11													
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
X.X X.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan		9,428,271,736		4,601,428,465		4,149,768,200		606,554,785		734,651,973		-		-		1,341,206,758		5,942,635,223		63
X.X X.01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu		99,528,150		31,528,150		44,000,000		5,017,100		2,516,000		-		-		7,533,100		39,061,250		39
X.X X.01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang diselesaikan tepat waktu	2	10,500,000		3,000,000		5,500,000		3,037,000		-		-		-		3,037,000		6,037,000		57.4952381
X.X X.01 2.01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang diselesaikan tepat waktu	1	10,500,000		-		5,500,000		-		-		-		-		-		-		0
X.X X.01 2.01 03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang diselesaikan tepat waktu	1	10,500,000		-		5,500,000		-		-		-		-		-		-		0
X.X X.01		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun tepat waktu	1	10,500,000		3,000,000		5,500,000		-		-		-		-		-		3,000,000		28.57142857
X.X X.01 2.01 05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang diselesaikan tepat waktu	1	10,500,000		3,000,000		5,500,000		-		-		-		-		-		3,000,000		28.57142857
X.X X.01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	1	36,528,150		19,528,150	1	11,000,000		1,054,400		1,325,900		-		-		2,380,300		21,908,450		60
X.X X.01 2.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan yang diselesaikan tepat waktu Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	10,500,000		3,000,000		5,500,000		925,700		1,190,100		-		-		2,115,800		5,115,800		48.72190476
X.X X.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan dokumen administrasi keuangan		7,419,951,550		3,672,136,029		2,713,504,200		349,685,798		496,720,223		-		-		846,406,021		4,518,542,050		61
X.X X.01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	12	7,341,857,200		3,637,684,679	12	2,677,204,200		341,682,698		491,547,093		-		-		833,229,791		4,470,914,470		61
X.X X.01 2.02 03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	12	10,500,000		3,000,000		5,500,000		908,000		441,200		-		-		1,349,200		4,349,200		41
X.X X.01 2.02 04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan fungsional yang diselesaikan tepat waktu	12	10,500,000		3,000,000		5,500,000		738,700		685,400		-		-		1,424,100		4,424,100		42
X.X X.01 2.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan tepat waktu	1	7,835,000		3,235,000	1	3,300,000		1,699,800		-		-		-		1,699,800		4,934,800		63
X.X X.01 2.02 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang diselesaikan tepat waktu	12	49,259,350		25,216,350	12	22,000,000	12	4,656,600		4,046,530		-		-		8,703,130		33,919,480		69
X.X X.01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan dokumen administrasi barang milik daerah pada SKPD		31,500,000		6,500,000		16,500,000		2,613,000		2,174,230		-		-		4,787,230		11,287,230		36

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
X.X X.01 2.03 01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang SKPD	1	10,500,000	2,000,000		5,500,000	1,999,900	-	-	-	1,999,900	3,999,900	38								
X.X X.01 2.03 05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan barang milik daerah pada SKPD yang diselesaikan tepat waktu	12	10,500,000	2,000,000		5,500,000	613,100	506,800	-	-	1,119,900	3,119,900	30								
X.X X.01 2.03 07		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan pemanfaatan barang milik daerah pada SKPD yang diselesaikan tepat waktu	1	10,500,000	2,500,000		5,500,000	-	1,667,430	-	-	1,667,430	4,167,430	40								
X.X X.01 2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Aparatur yang difasilitasi administrasi kepegawaiannya		52,500,000	9,984,000		27,500,000	3,341,630	1,710,800	-	-	5,052,430	15,036,430									
X.X X.01 2.05 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah aparatur yang difasilitasi pakaian dinas dan atributnya	39	31,500,000	-		16,500,000	-	-	-	-	-	-	0								
X.X X.01 2.05 03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah aparatur yang difasilitasi administrasi kepegawaiannya	39	10,500,000	5,000,000		5,500,000	1,812,800	574,500	-	-	2,387,300	7,387,300	70								
X.X X.01 2.05 04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	12	10,500,000	4,984,000		5,500,000	1,528,830	1,136,300	-	-	2,665,130	7,649,130	73								
X.X X.01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelayanan administrasi umum		626,268,650	359,726,880		226,240,000	44,936,068	38,783,999	-	-	83,720,067	443,446,947	71								
X.X X.01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang difasilitasi peralatan penerangan dan kelistrikan kantor	12	11,972,650	3,722,650	12	5,500,000	919,000	440,000	-	-	1,359,000	5,081,650	42								
X.X X.01 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	104,462,000	62,462,000	15	22,000,000	-	-	-	-	-	62,462,000	60								
X.X X.01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	40000	10,500,000	-		5,500,000	-	-	-	-	-	0									
X.X X.01 2.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3	18,720,000	7,130,000	3	6,240,000	-	-	-	-	-	7,130,000	38								
X.X X.01		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	120	31,500,000	-		16,500,000	-	-	-	-	-	-	0								
X.X X.01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang dihadiri	100	438,614,000	286,412,230	100	165,000,000	44,017,068	38,343,999	-	-	82,361,067	368,773,297	84								
X.X X.01 2.06 10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	50	10,500,000	-		5,500,000	-	-	-	-	-	0									
X.X X.01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah yang diadakan		557,500,000	160,719,222		278,167,300	-	-	-	-	-	160,719,222	29								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab						
				5		6		7		8		9		10		11						12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
X.X X.01 2.07 01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	1	10,500,000	-	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
X.X X.01 2.07 02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedinya kendaraan dinas operasional atau lapangan	1	10,500,000	-	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
X.X X.01 2.07 05		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	2	21,000,000	-	-	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
X.X X.01 2.07 06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor	2	500,000,000	-	160,719,222	250,667,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,719,222	-	32					
X.X X.01 2.07 09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
X.X X.01 2.07 10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dn prasarana gedung kantor yang disediakan	1	10,500,000	-	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
X.X X.01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	-	387,327,386	-	218,553,434	750,356,700	-	180,741,439	-	177,306,971	-	-	-	-	-	358,048,410	-	576,601,844	-	149					
X.X X.01 2.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	1	244,803,236	-	130,390,464	1	88,000,000	17,734,000	-	16,348,112	-	-	-	-	-	34,082,112	-	164,472,576	-	67					
X.01 2.08 03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	25	37,700,000	-	14,800,000	25	26,100,000	5,520,000	-	5,650,000	-	-	-	-	-	11,170,000	-	25,970,000	-	69					
X.X X.01		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan	3	104,824,150	-	73,362,970	3	636,256,700	157,487,439	-	155,308,859	-	-	-	-	-	312,796,298	-	386,159,268	-	368					
X.X X.01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharannya	-	253,696,000	-	142,280,750	93,500,000	-	20,219,750	-	15,439,750	-	-	-	-	-	35,659,500	-	177,940,250	-	70					
X.X X.01 2.09 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dines Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi	10	153,930,000	-	97,763,500	10	55,000,000	14,503,500	-	11,400,000	-	-	-	-	-	25,903,500	-	123,667,000	-	80					
X.X X.01 2.09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi	2	73,750,000	-	39,501,250	2	27,500,000	5,716,250	-	4,039,750	-	-	-	-	-	9,756,000	-	49,257,250	-	67					
X.X X.01 2.09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang difasilitasi pemeliharannya	1	15,516,000	-	5,016,000	1	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,016,000	-	32					
X.X X.01 2.09 10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang difasilitasi pemeliharannya	1	10,500,000	-	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
####		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5,966,219,600	-	4,123,192,014	2,273,112,940	-	62,691,850	-	98,472,960	-	-	-	-	-	161,164,810	-	4,284,356,824	-	72					
####		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi Pendaftaran penduduk		3,919,888,700	-	1,891,234,464	1,316,016,560	-	14,343,820	-	9,295,330	-	-	-	-	-	23,639,150	-	1,914,873,614	-	49					

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.12.02.2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan layanan pendaftaran penduduk		2,182,200,850		864,776,664		727,516,560		10,434,930		6,873,530		-		-		17,308,460		882,085,124	40	
2.12.02.2.01.0		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Data Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12	54,679,700		37,679,700	12	22,000,000		-		-		-		-		-		37,679,700	69	
2.12.02.2.01.0		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekaman dan penerbitan KTP Elektronik	4727	43,600,000		43,488,700	4159	18,237,800		4,624,700		2,715,500		-		-		7,340,200		50,828,900	117	
2.12.02.2.01.0			Jumlah penerbitan KIA	29350				9478															
2.12.02.2.01.0		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah petugas Pelayanan Adminiduk	50	201,882,150		173,695,450	50	21,778,760		5,810,230		4,158,030		-		-		9,968,260		183,663,710	91	
2.12.02.2.01.0			Jumlah layanan online terkait pendaftaran penduduk	10560				7920															
2.12.02.2.01.0		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen yang Tercatat dan Diterbitkan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	6050	1,858,759,800		598,160,514	5000	660,000,000		-		-		-		-		-		598,160,514	32	
2.12.02.2.01.0		Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk	8	23,279,200		11,752,300	8	5,500,000		-		-		-		-		-		11,752,300	50	
2.12.02.2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan pendaftaran penduduk		1,664,187,850		1,026,457,800		550,000,000		3,908,890		2,421,800		-		-		6,330,690		1,032,788,490	62	
2.12.02.2.02.0		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Blangko dan Alat Cetak Dokumen Kependudukan yang Tersedia	30000	1,664,187,850		1,026,457,800	35000	550,000,000		3,908,890		2,421,800		-		-		6,330,690		1,032,788,490	62	
2.12.02.2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan Pelayanan Terkait Pendaftaran Penduduk		63,000,000		-		33,000,000		-		-		-		-		-		-	0	
2.12.02.2.03.0		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah masyarakat yang terlayani atas peristiwa kependudukan	5000	21,000,000		-		11,000,000		-		-		-		-		-		-	0	
2.12.02.2.03.0		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	80	42,000,000		-		22,000,000		-		-		-		-		-		-	0	
2.12.02.2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Meningkatnya Tata Kelola Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Pendaftaran Penduduk		10,500,000		-		5,500,000		-		-		-		-		-		-	0	
2.12.02.2.04.0		Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan yang diselesaikan tepat waktu	12	10,500,000		-		5,500,000		-		-		-		-		-		-	0	
####		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi pencatatan sipil		689,293,200		1,170,272,700		186,052,200		17,769,200		13,556,400		-		-		31,325,600		1,201,598,300	174	
2.12.03.2.04		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan layanan pencatatan sipil		236,758,000		315,479,900		87,052,200		14,651,500		10,531,100		-		-		25,182,600		340,662,500	144	
2.12.03.2.01.0		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah kepemilikan Akte Kelahiran usia 0 - 18 tahun	2000	21,000,000		84,893,400		24,879,800		5,133,400		5,600,000		-		-		10,733,400		95,626,800	455	
2.12.03.2.01.0		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelaksanaan pelayanan keliling dan pelayanan hari libur	144	215,758,000		230,586,500	144	62,172,400		9,518,100		4,931,100		-		-		14,449,200		245,035,700	114	
2.12.03.2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Meningkatnya koordinasi mengenai kebijakan kependudukan		431,535,200		854,792,800		88,000,000		3,117,700		3,025,300		-		-		6,143,000		860,935,800	200	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
2.12.03.2.02.02		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dalam pengelolaan pembinaan kerjasama terkait layanan adminduk	5	231,144,000	189,144,000	5	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,144,000	-	-	-	82		
2.12.03.2.02.04		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan layanan pendaftaran peristiwa kependudukan dan peristiwa penting	12	62,893,050	612,150,650	12	22,000,000	3,117,700	3,025,300	-	-	-	6,143,000	618,293,650	-	983							
2.12.03.2.02.06		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	80	42,000,000	-	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0							
2.12.03.2.02.10		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kelurahan/Desa yang dikunjungi dalam rangka Dukcapil Menyapa Masyarakat	67	95,498,150	53,498,150	67	22,000,000	-	-	-	-	-	53,498,150	-	56								
2.12.03.2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Meningkatnya Tata Kelola Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Pencatatan Sipil	-	21,000,000	-	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0								
2.12.03.2.03.01		Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan yang diselesaikan tepat waktu	12	21,000,000	-	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0								
####		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Tersedianya Informasi Kependudukan yang lengkap, Akurat dan Up to date untuk Kepentingan Publik dan Pembangunan	-	1,257,580,000	1,029,196,900	726,016,850	27,832,130	72,732,930	-	-	-	-	100,565,060	1,129,761,960	-	90							
2.12.04.2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Tercapainya akurasi data kependudukan yang akurat	-	262,522,450	244,868,950	52,776,700	9,443,000	6,629,900	-	-	-	-	16,072,900	260,941,850	-	99							
2.12.04.2.01.01		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang disajikan berdasarkan jenis layanan	5	212,484,950	231,761,950	5	36,276,700	9,443,000	6,629,900	-	-	-	16,072,900	247,834,850	-	117							
2.12.04.2.01.02		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
			Jumlah OPD yang mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan	15	50,037,500	13,107,000	6	16,500,000	-	-	-	-	-	13,107,000	-	26								
2.12.04.2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemenuhan kebutuhan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	10,500,000	26,532,200	26,532,130	-	12,446,530	-	-	-	-	12,446,530	38,978,730	-	371							
2.12.04.2.02.01		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelaksanaan pertemuan terkait Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk	12	10,500,000	26,532,200	26,532,130	-	12,446,530	-	-	-	-	12,446,530	38,978,730	-	371							
2.12.04.2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Tercapainya koordinasi (bottom up top down) atas koordinasi kependudukan	-	344,057,550	607,795,750	311,208,020	18,389,130	53,656,500	-	-	-	-	72,045,630	679,841,380	-	198							

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
2.12.04.2.03.01		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelaksanaan pertemuan korduk capil secara berkala	12	257,898,000	533,775,800	12	242,693,160	14,766,230	51,271,600	-	-	66,037,830	599,813,630	233									
2.12.04.2.03.02		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang mengakses data kependudukan	37	10,500,000	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
2.12.04.2.03.03		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40	10,500,000	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
2.12.04.2.03.06		Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah PKS dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	2	10,500,000	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
2.12.04.2.03.07		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Kelurahan/Desa yang dikunjungi dalam rangka Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	67	10,500,000	64,959,700	35,514,860	3,622,900	2,384,900	-	-	-	-	6,007,800	70,967,500	676								
2.12.04.2.03.08		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah data yang disajikan secara berkala	14	44,159,550	9,060,250	14	16,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,060,250	21			
2.12.04.2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Meningkatnya SDM aparat kependudukan		640,500,000	150,000,000	335,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000	23				
2.12.04.2.04.02		Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah pelaksanaan pertemuan mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	12	10,500,000	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
2.12.04.2.04.03		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas adminduk	60	630,000,000	150,000,000	330,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000	24				
####		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Terwujudnya Profil Kependudukan Kabupaten/Kota		99,457,700	32,487,950	45,027,330	2,746,700	2,888,300	-	-	5,635,000	38,122,950	38										
2.12.05.2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Terwujudnya informasi yang dapat diakses		99,457,700	32,487,950	45,027,330	2,746,700	2,888,300	-	-	5,635,000	38,122,950	38										
2.12.05.2.01.01		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah buku agregat kependudukan yang diterbitkan	100	51,225,950	26,256,200	100	23,027,330	2,746,700	2,888,300	-	-	5,635,000	31,891,200	62									
2.12.05.2.01.02		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah profil kependudukan yang diterbitkan	1	48,231,750	6,231,750	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,231,750	13				
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								
Faktor pendukung keberhasilan Kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian Kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat daerah Kabupaten/Kota berikutnya																								
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																								
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Bidang dalam SKPD yang terkayani Administrasi Perkantornnya	100%	2,320,754,373	2,194,083,450	-	2,255,472,100	447,133,477	535,115,506	570,395,400	494,989,212												

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5	6	7	8	9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4							I		II		III		IV								15	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Laporan Realisasi dan Evaluasi Kinerja	100%	27,765,800		27,969,000		27,765,800		7,249,065		7,552,400		6,628,700		6,303,300								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	27,765,800	100%	27,969,000	100%	27,765,800		7,249,065		7,552,400		6,628,700		6,303,300								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	100%	1,941,435,073		1,861,374,050		1,872,097,600		348,351,820		459,037,241		482,755,857		383,449,315								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	1,907,882,664	97%	1,834,143,300	100%	1,843,334,300		340,628,096		445,761,831		479,838,657		373,871,515								
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	17,663,860	100%	20,379,550	100%	16,763,400		3,049,000		7,635,360		2,400,000		4,521,400								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	15,888,549	100%	6,851,200	100%	11,999,900		4,674,724		5,640,050		517,200		5,056,400								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Bidang dalam SKPD yang terlayani pengadministrasian umumnya	100%	134,312,800		120,110,000		123,070,250		57,771,029		27,414,900		44,191,140		4,706,300								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1,081,200	100%	850,000	100%	935,000		108,120		360,400		-		540,600								
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	3,960,000	100%	3,600,000	100%	3,960,000		636,000		633,000		1,389,000		1,302,000								
		Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	129,271,600	100%	115,660,000	100%	118,175,250		57,026,909		26,421,500		42,802,140		2,863,700								
		Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	72,111,700		86,664,400		87,597,950		15,676,563		17,639,965		16,455,203		17,685,097								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	35,932,000	80%	24,876,000	100%	24,998,400		7,978,763		7,861,965		8,992,803		7,723,697								
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	8,047,700	100%	7,300,000	100%	7,852,950		3,200,700		1,923,900		500,000		2,374,200								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	28,132,000	100%	54,488,400	100%	54,746,600		4,497,100		7,854,100		6,962,400		7,587,200								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	145,129,000		97,966,000		144,940,500		18,085,000		23,471,000		20,364,500		82,845,200								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lainannya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	65,039,000	99%	94,666,000	100%	74,295,500		16,485,000		20,271,000		17,964,500		10,026,000								
		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	80,090,000	100%	3,300,000	100%	70,645,000		1,600,000		3,200,000		2,400,000		72,819,200								
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan Angka Kelahiran	100%	633,599,900		108,685,000		616,103,600		0		29,299,900		247,381,367		158,833,500								
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota yang dikelola	100%	633,599,900	100%	108,685,000		616,103,600		0		29,299,900		247,381,367		158,833,500								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2	113,400,000	100%	80,575,000	100%	49,718,600				46,181,367	5,933,500										Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	520,199,900	100%	28,110,000	100%	566,385,000			29,299,900	201,200,000	152,900,000										
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Penekanan Angka Kelahiran	100%	2,845,437,360		4,368,264,511		3,446,455,750	0		1,058,347,500	526,515,635	1,059,832,700										
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	489,199,800		732,524,200		488,800,000	0		145,538,900	51,591,100	198,890,800										
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rekorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	104,000,000			100%	164,800,000			8,640,000	10,600,000	16,995,000										
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	385,199,800	100%	732,524,200	100%	324,000,000			136,898,900	40,991,100	181,895,800										
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Presentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100%	1,550,798,800		1,543,312,200		1,380,415,000	0		523,045,500	436,700,635	565,224,000										
		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12	627,999,000	100%	632,533,700	100%	378,000,000			328,174,000	124,243,535	150,185,000										
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100	922,799,800	100%	910,778,500	100%	1,002,415,000			194,871,500	312,457,100	415,039,000										
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100%	579,438,760		1,679,888,111		1,370,240,750	0		378,963,100	38,223,900	80,517,900										
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100	564,294,860	100%	569,577,111	100%	192,563,800			378,963,100	23,080,000	80,517,900										
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	10	15,143,900	100%	1,110,311,000	100%	1,177,676,950				15,143,900	-										
		Pemberdayaan dan Peningkatan peran Serta Organisasi Kemsyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesrtaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan peran Serta Organisasi Kemsyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesrtaan Ber-KB	100%	226,000,000		412,540,000		207,000,000	0		10,800,000	-	215,200,000										

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3,471,932,600	100%	2,463,876,203	100%	3,120,031,128	25%	655,942,393	25%	490,962,099	0%	-	0%	-	50%	1,146,904,492	150%	3,610,780,695	150%	104%
		Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset	100%	95,000,000	100%	35,297,950	100%	39,425,430	25%	6,130,000	25%	12,174,830	0%	-	0%	-	50%	18,304,830	150%	53,602,780	150%	56%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Penggantian Komponen Peralatan Listrik	100%	9,840,000	100%	2,444,500	100%	2,976,300	0%	-	25%	446,200	0%	-	0%	-	25%	446,200	125%	2,890,700	125%	29%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang - undangan	100%	20,700,000	100%	3,750,000	100%	5,550,000	0%	-	35%	615,000	0%	-	0%	-	35%	615,000	135%	4,365,000	135%	21%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	100%	195,000,000	100%	128,374,690	100%	112,146,000	25%	21,837,452	25%	37,639,132	0%	-	0%	-	50%	59,476,584	150%	187,851,274	150%	96%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik, Air dan Telepon	100%	55,200,000	100%	14,011,045	100%	29,020,584	25%	7,943,870	25%	3,994,749	0%	-	0%	-	50%	11,938,619	150%	25,949,664	150%	47%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Upah Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor	100%	30,000,000	100%	33,478,040	100%	52,865,200	25%	10,364,400	25%	15,597,600	0%	-	0%	-	50%	25,962,000	150%	59,440,040	150%	198%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	69,000,000	100%	54,813,890	100%	52,630,000	25%	6,750,000	25%	13,450,000	0%	-	0%	-	50%	20,200,000	150%	75,013,890	150%	109%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	731,000,000	100%	43,225,840	100%	49,630,000	25%	5,000,000	25%	10,716,000	0%	-	0%	-	50%	15,716,000	150%	58,941,840	150%	8%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	100%	40,250,000	100%	6,630,000	100%	6,830,000	25%	255,500	25%	2,794,000	0%	-	0%	-	50%	3,049,500	150%	9,679,500	150%	24%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi yang Aman, Nyaman dan Lancar																						
		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelayakan Terminal Angkutan																				
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																					
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampu Penerangan Jalan Umum	80%	321,000,000	80%	413,276,500	80%	1,101,964,647	0%	-	20%	4,266,000	0%	-	0%	-	20%	4,266,000	100%	417,542,500	125%	130%
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Rmabu, Traffic Light dan Lampu Jalan	80%	1,002,750,000	80%	905,021,169	80%	495,696,900	20%	11,347,300	20%	239,298,200	0%	-	0%	-	40%	250,645,500	120%	1,155,666,669	150%	115%
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C																					
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Meningkatnya Operasional Pengoperasian Terminal	70%	919,571,500	70%	224,922,200	80%	187,231,700	20%	46,340,400	20%	47,138,500	0%	-	0%	-	40%	93,478,900	110%	318,401,100	157%	35%
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																					
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Berupa Kartu Uji dan Tanda Uji	80%	215,000,000	80%	170,220,041	80%	147,149,400	20%	21,311,950	20%	37,359,770	0%	-	0%	-	40%	58,671,720	120%	228,891,761	150%	106%
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																					

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4																				15	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	70%	889,000,000	70%	681,780,400	80%	873,666,000	20%	217,916,000	20%	149,472,600	0%	-	0%	-	40%	367,388,600	110%	1,049,169,000	157%	118%	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																						
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kapal Pelayaran Rakyat	100%	690,000,000	100%	221,123,200	80%	157,852,400	20%	14,800,000	20%	105,299,400	0%	-	0%	-	40%	120,099,400	140%	341,222,600	140%	49%	
							5,418,224,668		6,462,560,389															
Rata - Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja																		42.78%	2,210,586,145	135.00%	7,628,810,813	146.63%	72.91%	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																								
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	12,737,363,200	100%	4,466,172,040	100 %	2,644,441,581	32.42	409,535,178	59.30	954,310,065	79.04	1,497,999,254	94.61	1,985,318,750	94.61	1,985,318,750	47.81	6,451,490,790	47.81	51%	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya penyusunan laporan kegiatan OPD	100%	146,295,700	100%	50,666,300	100 %	16,517,100	23.00	1,650,000	37.00	4,596,600	75.00	5,301,400	100.00	17,475,400	100.00	17,475,400	50.50	68,141,700	50.50	47%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100%	8,218,567,500	100%	3,754,932,010	100 %	2,254,497,705	47.08	363,872,908	68.33	834,279,196	83.97	1,313,265,485	100.00	1,693,933,030	100.00	1,693,933,030	50.50	5,448,865,040	50.50	66%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi barang Milik Daerah pada OPD	100%	51,250,000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis untuk Pengembangan SDM Aparatur	75%	428,500,000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran dan persuratan	100%	1,180,500,000	99%	227,450,910	100 %	126,133,700	44.00	16,939,270	112.50	49,114,269	135.00	85,391,269	100.00	143,215,620	100.00	143,215,620	50.49	370,666,530	50.49	31%	
		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	terpenuhinya Kebutuhan Barang dalam menunjang Urusan OPD	95%	1,555,750,000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan operasional Dinas secara optimal	100%	442,750,000	100%	81,278,420	100 %	70,010,660	23.00	7,033,000	47.00	26,819,100	53.22	37,430,000	84.50	59,953,600	84.50	59,953,600	42.75	141,232,020	42.75	32%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan operasional Dinas secara optimal	100%	713,750,000	100%	351,844,400	100 %	177,282,416	25.00	20,040,000	31.67	39,500,900	48.00	56,611,100	88.57	70,741,100	88.57	70,741,100	44.78	422,585,500	44.78	59%	
	Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mendukung pelayanan publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Informasi, Komunikasi Publik dan Pengaduan Masyarakat secara Elektronik	100%	15,114,215,400	100%	4,133,418,500	100 %	1,817,963,800	41.60	247,894,000	60.00	916,054,400	76.00	1,270,841,600	97.78	1,890,143,100	97.78	1,890,143,100	49.39	6,023,561,600	49.39	40%	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	100%	15,114,215,400	100%	4,133,418,500	100 %	1,817,963,800	41.60	247,894,000	60.00	916,054,400	76.00	1,270,841,600	97.78	1,890,143,100	97.78	1,890,143,100	49.39	6,023,561,600	49.39	40%	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik	3.60	35,839,575,000	2.29	3,699,205,076	2 Indeks	2,718,246,850	20.00	107,307,670	37.00	791,585,970	60.00	1,521,689,820	100.00	2,288,457,420	100.00	2,288,457,420	51.14	5,987,662,496	14.21	17%	
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Saluran Data/Informasi yang tepat, cepat dan akurat	100%	20,613,387,500	78%	221,706,896	60 %	33,173,000	20.00	6,174,200	37.00	11,917,400	60.00	16,530,400	100.00	33,310,100	100.00	33,310,100	50.39	255,016,996	50.39	1%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
				5	6	7	8	9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4																					15
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas tata kelola penyelenggaraan e-Government daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	100%	15,226,187,500	90%	3,477,498,180	80 %	2,685,073,850	26.00	101,133,470	48.00	779,668,570	84.80	1,505,159,420	100.00	2,255,147,320	100.00	2,255,147,320	50.45	5,732,645,500	50.45	38%	
2	Terwujudnya ketersediaan data statistik yang berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase tersedianya Data Statistik Daerah Yang Lengkap Dan Akurat	85%	1,535,250,000	63%	94,725,850	40 %	33,999,800	50.00	5,639,100	65.00	10,839,100	90.00	29,875,400	100.00	33,898,400	100.00	33,898,400	50.31	128,624,250	59.19	8%	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan data statistik daerah yang lengkap dan akurat	85%	1,535,250,000	63%	94,725,850	40 %	33,999,800	50.00	5,639,100	65.00	10,839,100	90.00	29,875,400	100.00	33,898,400	100.00	33,898,400	50.31	128,624,250	59.19	8%	
3	Terwujudnya aplikasi yang aman	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Komunikasi daerah yang Memanfaatkan Persandian	100%	2,895,169,525	69%	225,895,600	40 %	33,973,530	28.00	7,916,084	52.50	14,439,084	75.00	23,079,184	100.00	33,824,284	100.00	33,824,284	50.34	259,719,884	50.34	9%	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi	100%	2,252,363,908	97%	184,774,550	100 %	25,588,430	20.00	4,906,384	45.00	10,229,384	75.00	18,216,784	100.00	25,460,684	100.00	25,460,684	50.48	210,235,234	50.48	9%	
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengamanan berita dan informasi	100%	642,805,618	100%	41,121,050	100 %	8,385,100	36.00	3,009,700	60.00	4,209,700	75.00	4,862,400	100.00	8,363,600	100.00	8,363,600	50.50	49,484,650	50.50	8%	
					68,121,573,125		12,619,417,066		7,248,625,561		778,292,032		2,687,228,619		4,343,485,258		6,231,641,954		6,231,641,954		18,851,059,020			
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja : Ada beberapa pekerjaan kerjasama dengan pihak ketiga yang tetap berjalan walaupun belum dilakukan pembayaran sampai akhir tahun anggaran (Utang Belanja)																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Kemampuan keuangan yang tdk memadai sehingga ada belanja yang batal dilakukan agar tidak menjadi beban di tahun anggaran berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN																								
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD		40,000,000		10,371,000		15,313,900	16%	2,400,000	43%	6,543,900.00	0%		0%		58%	8,943,900	58%	19,314,900.00	12%	3,862,980.00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Pokok yang disusun		45,000,000																			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Pokok yang disusun tepat waktu		35,000,000																			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Pokok yang disusun tepat waktu		35,000,000																			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun tepat waktu		35,000,000																			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja PD	100%	40,000,000	100%	31,245,000.00		16,005,500	25%	3,990,600	25%	4,000,000	0%		0%		50%	7,990,600	150%	39,235,600.00	30%	7,847,120.00	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD		40,000,000		0												0%	-	0%	-		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu				0												0%	-	0%	-		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3,000,000,000	83%	4,339,885,661	100%	3,023,674,187	15%	459,217,144	20%	593,807,341	0%		0%		35%	1,053,024,485	118%	5,392,910,146.00	24%	1,078,582,029.20	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		25,000,000														0%		0%	-		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	100%	30,000,000	100%	22,001,800.00	1	13,457,600	23%	3,049,600	24%	3,228,000	0%		0%		47%	6,277,600	147%	28,279,400.00	29%	5,655,880.00	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		25,000,000															0%		0%	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1	20,000,000	1	11,075,800.00	1	3,356,600	100%	3,356,600	0%						100%	3,356,600	200%	14,432,400.00	40%	2,886,480.00	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		25,000,000															0%		0%	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran yang tersusun		35,000,000															0%		0%	-	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		25,000,000															0%		0%	-	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan																	0%		0%	-	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Rencana Kebutuhan Barang milim daerah SKPD		30,000,000															0%		0%	-	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang dikelola		30,000,000															0%		0%	-	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		30,000,000															0%		0%	-	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		30,000,000															0%		0%	-	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi Barang milik daerah pada SKPD		35,000,000															0%		0%	-	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen barang milik daerah Perangkat Daerah		40,000,000															0%		0%	-	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		30,000,000															0%		0%	-	
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																	0%		0%	-	
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		30,000,000															0%		0%	-	
		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		30,000,000															0%		0%	-	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		30,000,000															0%		0%	-	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		30,000,000															0%		0%	-	
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah		30,000,000															0%		0%	-	
		Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		30,000,000															0%		0%	-	
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Retrebusi Daerah		55,000,000															0%		0%	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Kepegawaian pada Perangkat Daerah			0														0%	-	0%	-	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		30,000,000															0%		0%	-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia		30,000,000															0%		0%	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dikelola administrasi kepegawaianya		30,000,000													0%		0%	-	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		30,000,000													0%		0%	-	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring dan Penilaian Kinerja Pegawai		30,000,000													0%		0%	-	
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegai yang Pensiun		30,000,000													0%		0%	-	
		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		30,000,000													0%		0%	-	
		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang Pindah Tugas		30,000,000													0%		0%	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi		150,000,000													0%		0%	-	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Pertauran Perundang-undangan		40,000,000													0%		0%	-	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan		75,000,000	0		0		-								0%	-	0%	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			0												0%	-	0%	-	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang tersedia		30,000,000	4054000		2,836,200	0%	100%	2,836,200			100%	2,836,200			100%	6,890,200.00	20%	1,378,040.00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		35,000,000													0%		0%	-	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		50,000,000													0%		0%	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia		50,000,000													0%		0%	-	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan		25,000,000													0%		0%	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	25,000,000	73%	20,165,000.00	4,680,000	85%	4,000,000	11%	500,000	0%	0%	96%	4,500,000	169%	24,665,000.00	34%	4,933,000.00		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material		20,000,000													0%		0%	-	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi		60,000,000													0%		0%	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Perjalanan Dinas	12	550,000,000	100%	337,326,119.00	93,856,000	28%	26,570,000	29%	26,805,000	0%	0%	57%	53,375,000	157%	390,701,119.00	31%	78,140,223.80		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Yang tersedia		50,000,000													0%		0%	-	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		42,500,000													0%		0%	-	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0												0%	-	0%	-	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan		600,000,000													0%		0%	-	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas		70,000,000													0%		0%	-	
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Peralatan Besar		50,000,000													0%		0%	-	
		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan darat Tak Bermotor		40,000,000													0%		0%	-	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel		25,000,000													0%		0%	-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peratalan Mesin Lainnya yang diadakan	2	80,000,000	100%	49,695,100.00		1						0%	-	100%	49,695,100.00	20%	9,939,020.00		
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan		50,000,000													0%		0%	-	
		Pengadaan Aset Tak Berwujud Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya yang diadakan		35,000,000													0%		0%	-	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumah Pengadaan Gedung		50,000,000													0%		0%	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV								
				5		6		7		8		9		10		11			12	13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia		70,000,000													0%		0%		-		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung Kantor		70,000,000													0%		0%		-		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintahan				0											0%	-	0%		-		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar		6,500,000													0%		0%		-		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	150,000,000	63%	122,273,013.00		114,260,000	14%	16,053,982	13%	15,285,210	0%		0%		27%	31,339,192	91%	153,612,205.00	18%	30,722,441.00	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		70,000,000															0%		0%	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	120,000,000	100%	135,437,898.00		62,046,700	22%	13,536,100	22%	13,400,000	0%		0%		43%	26,936,100	143%	162,373,998.00	29%	32,474,799.60	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0											0%	-	0%		-		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya pajak kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1	49,630,000	99%	98,950,103.00		49,630,000	22%	10,768,500	25%	12,250,000	0%		0%		46%	23,018,500	146%	121,968,603.00	29%	24,393,720.60	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya pajak kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	5	70,000,000	0.527785635	78906271	5	39,820,000	20%	7,990,000	33%	12,965,500	0%		0%		53%	20,955,500	105%	99,861,771.00	21%	19,972,354.20	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		35,000,000													0%		0%		-		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		22,500,000													0%		0%		-		
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel		25,000,000													0%		0%		-		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	32	25,000,000	99%	10,250,000.00		2,220,000	0%		-		0%		0%		0%	-	99%	10,250,000.00	20%	2,050,000.00	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang terpelihara		30,000,000															0%		0%	-	
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang terpelihara		20,000,000															0%		0%	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	250,000,000	95%	30,477,000.00	1	2,906,300	0	0	100%	2,906,300	0%			100%	2,906,300	195%	33,383,300.00	39%	6,676,660.00		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		30,000,000													0%		0%		-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		40,000,000													0%		0%		-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		40,000,000													0%		0%		-		
	Meningkatnya Keaktifan, kinerja dan Produktivitas Koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam															0%		0%		-		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4																					15
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	0%		0%	-	
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		85,000,000															0%		0%	-	
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	0%		0%	-	
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		80,000,000															0%		0%	-	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Diawasi dan Diperiksa																	0%		0%	-	
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota																	0%		0%	-	
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		100,000,000															0%		0%	-	
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		100,000,000															0%		0%	-	
	Meningkatnya Keaktifan, kinerja dan Produktivitas Koperasi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPI/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Kriteria Sehat			0														0%	-	0%	-	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			0														0%	-	0%	-	
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPI/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPI/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Kop	200,000,000	75%	51,336,800.00	30	20,249,900	0%		38%	7,789,900	0%		0%		38%	7,789,900	114%	59,126,700.00	23%	11,825,340.00	
		Penghargaan Kesehatan KSPI/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Kesehatan KSPI/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Kop	200,000,000	45%	75,195,850.00	30	41,040,000	0%		21%	8,425,000.00	0%		0%		21%	8,425,000	66%	83,620,850.00	13%	16,724,170.00	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab							
				5		6		7		8		9		10		11				12			13= 6 + 12		14 = 13/5x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15					
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi Aktif Yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian				0													0%	-	0%	-						
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola dan Pengurus Koperasi Yang Dilatih				0													0%	-	0%	-						
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	25 Kop		500,000,000		100%		812,845,350.00			462,407,000			22%		102,083,500	0%		0%		22%	102,083,500	122%	914,928,850.00	24%	182,985,770.00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Koperasi				0													0%	-	0%	-						
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0													0%	-	0%	-						
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Kop		200,000,000		83%		31,201,250.00										83%		31,201,250.00	17%	6,240,250.00					
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan UMKM Yang di Berdayakan				0													0%	-	0%	-						
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				0													0%	-	0%	-						
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			350,000,000		94%		498,354,950			150,000,000			0%		0%		0%	-	94%	498,354,950.00	19%	99,670,990.00				
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro			300,000,000				196,845,000			96%		189,191,800	0%		0%		96%	189,191,800	96%	189,191,800.00	19%	37,838,360.00				
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UKM Yang Difasilitasi Perizinan	10 UKM		270,000,000		81%		190,113,500.00								0%	-	81%	190,113,500.00	16%	38,022,700.00						
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2 Kali		400,000,000		87%		596,819,000.00	75 ukm		459,179,700	17%	76,469,700	24%		110,700,000	0%		0%		41%	187,169,700	128%	783,988,700.00	26%	156,797,740.00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			500,000,000		0												0%	-	0%	-						
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah UKM Yang Mengikuti Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	25 UKM			199,922,376			200,000,000	0%		95%		190,806,500	0%		0%		95%	190,806,500	95%	390,728,876.00	19%	78,145,775.20				
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Terfasilitasi Pengembangan USaha				0													0%	-	0%	-						
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				0													0%	-	0%	-						

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah yang Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	64 UKM	5,500,000,000	80%	6,426,714,350.00	95%	790,650,000	1.6%	12,690,000	2%	15,680,000	0.0%		0%		4%	28,370,000	83%	6,455,084,350.00	17%	1,291,016,870.00	
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					0											0%	-	0%	-			
		Perdagangan					0											0%	-	0%	-			
	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi Perizinan Pelaku Usaha Yang Terfasilitasi															0%		0%	-			
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan															0%		0%	-			
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	250 Reko	200,000,000	42%	86,783,450.00	95%	27,846,700	2%	600,000	59%	16,351,100	0		0		61%	16,951,100	102%	103,734,550.00	20%	20,746,910.00	
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang															0%		0%	-			
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Tanda Daftar Gudang	3 TDG	150,000,000	0.546682412	33092450	3 TDG	44,043,600	22%	9,837,900	29%	12,565,600	0%		0%		51%	22,403,500	106%	55,495,950.00	21%	11,099,190.00	
		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba															0%		0%	-			
		Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Secara Elektronik		40,000,000													0%		0%	-			
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		40,000,000													0%		0%	-			
		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba															0%		0%	-			
		Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Tersedianya Sistem Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Secara Elektronik		40,000,000													0%		0%	-			
		Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba		40,000,000													0%		0%	-			
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat															0%		0%	-			
		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		70,000,000													0%		0%	-			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5	6	7	8	I		II		III		IV		12	13= 6 + 12			14 = 13/5x100%				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																	0%		0%	-	
		Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pemantauan Penyimpanan Bahan Berbahaya		150,000,000															0%		0%	-	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Pemantauan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2		120,000,000															0%		0%	-	
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		85,000,000															0%		0%	-	
		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)																	0%		0%	-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		80,000,000															0%		0%	-	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan Sarana Perdagangan Dalam Keadaan Baik																	0%		0%	-	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan sarana Perdagangan dan Yang Dikelolah																	0%		0%	-	
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan dibangun/Revitalisasi	1 Unit	2,000,000,000	40%	900,437,188.00	95%	965,995,900	1%	7,736,100	2%	16,521,100	0%		0%		3%	24,257,200	42%	924,694,388.00	8%	184,938,877.60	
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7 Pasar	650,000,000	83%	504,692,070.00	95%	227,400,000	1%	2,000,000	35%	80,113,900.00	0%		0%		36%	82,113,900	119%	586,805,970.00	24%	117,361,194.00	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya																	0%		0%	-	
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		300,000,000															0%		0%	-	
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		80,000,000															0%		0%	-	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan Harga Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting																	0%		0%	-	
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan/Pengecekan Ketersediaan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Agen																	0%		0%	-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan/Pengecekan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		150,000,000															0%		0%	-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pemanauan Peningkatan Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		90,000,000															0%		0%	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Paket Murah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 8 Kecamatan		500,000,000													0%		0%	-			
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota															0%		0%	-			
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga Barang dan Kebutuhan Penting Lainnya Tingkat Distributor	12 Bapak	120,000,000	52%	191,061,150.00	95%	135,485,300	63%	85,995,100	12%	16,904,300.00	0%		0%		76%	102,899,400	128%	293,960,550.00	26%	58,792,110.00	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pengendalian Harga Barang dan Kebutuhan Penting Lainnya Pada Pasar Rakyat		130,000,000													0%		0%	-			
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		80,000,000													0%		0%	-			
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															0%		0%	-			
		Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		80,000,000													0%		0%	-			
		Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pemantauan Ketersediaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		150,000,000													0%		0%	-			
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pemantauan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		90,000,000													0%		0%	-			
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pengembangan Ekspor															0%		0%	-			
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															0%		0%	-			
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		200,000,000													0%		0%	-			
		Pameran Dagang Nasional	Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional		600,000,000													0%		0%	-			
		Pameran Dagang Lokal	Pelaksanaan Pameran Dagang Lokal		100,000,000													0%		0%	-			
		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Pelaksanaan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		100,000,000													0%		0%	-			
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Peningkatan Citra Produk Ekspor		100,000,000													0%		0%	-			
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		75,000,000													0%		0%	-			
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen															0%		0%	-			
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan															0%		0%	-			
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP Yang Bertanda Tera Sah Pada Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1 Unit	850,000,000	0.152271112	674,221,023.00	95%	52,624,400	0.0%		32%	16,848,800.00	0%		0%		32%	16,848,800	51%	691,069,823.00	10%	138,213,964.60	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%			15		
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pasar/Pedagang Yang diawasi/diberikan Penyuluhan Metrologi Legal		90,000,000													K	Rp	K	Rp	0%		0%	-		
		Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Penyidikan Metrologi Legal		60,000,000																		0%		0%	-	
		PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha Yang Terfasilitasi dalam Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri																				0%		0%	-	
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																				0%		0%	-	
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		700,000,000																		0%		0%	-	
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		700,000,000																		0%		0%	-	
		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		300,000,000																		0%		0%	-	
JUMLAH					25,576,130,000	21	8,360,052,016	76	7,217,830,487	5	746,261,326	9	1,478,508,951	-	-	-	-	14	2,224,770,277	35	18,799,674,799	7	3,759,934,960	-			
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)						78%		541%		19%		33%						46%		20%		4%					
Predikat Kinerja																											
A Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																											
B Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																											
C tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
D tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya																											
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																											
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
2		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP																									
2	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur penanaman modal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26,879,000,000		12,212,111,270		4,533,313,010		645,967,271		963,358,938		866,447,848		1,077,439,328		3,553,213,385		15,739,524,655					DPMPPTSP	
2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% capaian perencanaan yg tersusun dalam Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	95	1,650,000,000		142,654,300		59,701,500		22,140,500		21,375,900		4,500,000		8,850,000		56,866,400		199,520,700						
2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan IKU	5	325,000,000	3	26,782,300	1	10,000,000	1	10,000,000	-	-	-	-	-	-	1	10,000,000	4	36,782,300	80	11.32				
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	5	500,000,000	3	48,290,000	1	20,950,000	-	4,640,500	-	10,309,400	-	3,000,000	1	2,000,000	1	19,949,900	4	68,239,900	80	13.65				
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Rka Perubahan	20	325,000,000	8	50,082,000	4	22,751,500	1	1,500,000	1	11,066,500	1	1,500,000	1	6,850,000	4	20,916,500	12	70,998,500	60	21.85				
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJ, Perjanjian Kinerja	5	500,000,000	2	17,500,000	1	6,000,000	1	6,000,000	-	-	-	-	-	-	1	6,000,000	3	23,500,000	60	4.70				
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi Keuangan Daerah	95	13,835,000,000		4,504,490,341		2,579,929,240		425,634,375		575,300,660		583,043,800		466,958,856		2,050,937,691		6,555,428,032						
2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya dokumen administrasi Gaji dan Tunjangan	60	12,900,000,000	36	4,422,087,341	12	2,512,202,740	3	414,731,675	3	541,211,160	3	570,809,600	3	460,958,856	12	1,987,711,291	48	6,409,798,632	80	49.69				
2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa pengelola keuangan SKPD	60	340,000,000	36	57,733,000	12	23,138,500	3	3,600,000	3	9,158,300	3	5,280,200	3	2,400,000	12	20,438,500	48	78,171,500	80	22.99				

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV								
										5	6	7	8	9	10	11	12						13= 6 + 12	14 = 13/5x100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen	5	250,000,000	0	-	1	6,741,000	-	-	-	4,941,000	-	900,000	1	600,000	1	6,441,000	1	6,441,000	-	-	
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5	95,000,000	3	24,670,000	1	12,335,000	1	2,802,700	-	9,532,200	-	-	-	-	1	12,334,900	4	37,004,900	80	38.95	
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	5	250,000,000	0	-	1	25,512,000	1	4,500,000	-	10,458,000	1	6,054,000	-	3,000,000	2	24,012,000	2	24,012,000	40	9.60	
2		Administrasi Barang Milik daerah Perangkat Daerah	Tersedianya sarana umum	85	319,000,000	-	-	-	90,536,000	-	21,000,000	-	25,936,000	-	21,000,000	-	21,600,000	-	89,536,000	-	89,536,000	-	-	
2		Pengamanan Barang Milik daerah	Jumlah Barang Milik daerah	12	240,000,000	0	-	12	74,990,000	3	18,000,000	3	19,390,000	3	18,000,000	3	19,600,000	12	74,990,000	-	74,990,000	-	-	
2		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik daerah	10	79,000,000	0	-	2	15,546,000	1	3,000,000	-	6,546,000	-	3,000,000	1	2,000,000	2	14,546,000	-	14,546,000	-	-	
2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya sarana umum	85	-	-	-	-	36,908,900	-	6,008,900	-	3,300,000	-	4,050,000	-	6,121,000	-	19,479,900	-	19,479,900	-	-	
2		Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Pegawai	170	105,000,000	0	-	35	36,908,900	26	6,008,900	26	3,300,000	26	4,050,000	26	6,121,000	104	19,479,900	-	19,479,900	-	-	
2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana umum	85	1,415,000,000	280,256,364	-	-	389,355,100	-	41,075,250	-	61,065,999	-	118,927,855	-	97,242,869	-	318,311,973	-	572,768,337	-	-	
2		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	75	80,000,000	49	25,000,000	49	29,972,100	10	3,971,500	10	7,320,000	19	12,480,000	6	5,109,000	45	28,880,500	94	53,880,500	125	67.35	
2		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	50	30,000,000	0	-	20	21,808,000	-	-	15	3,000,000	1	10,800,000	4	12,000,000	20	25,800,000	-	-	-	-	
2		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	200	1,305,000,000	120	255,256,364	120	337,575,000	10	37,103,750	30	50,745,999	30	95,647,855	30	80,133,869	100	263,631,473	220	518,887,837	110	39.76	
2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersedian sarana dan prasarana aparatur	90	750,000,000	48	2,639,127,750	-	182,224,280	-	-	-	131,658,480	-	-	-	34,105,500	-	165,763,980	-	2,804,891,730	-	-	
2		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yg tersedia	50	750,000,000	36	854,222,500	36	27,737,100	-	-	-	17,402,100	-	-	12	10,335,000	12	27,737,100	48	881,959,600	96	117.59	
2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	-	-	12	1,784,905,250	12	154,487,180	-	-	-	114,256,380	-	-	3	23,770,500	3	138,026,880	15	1,922,932,130	-	-	
2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pelayanan penunjang pemerintahan	90	3,369,000,000	572	842,672,958	-	706,345,990	-	105,820,586	-	93,808,902	-	111,601,193	-	119,573,753	-	430,804,434	-	1,273,477,392	-	-	
2		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	550	117,000,000	500	23,922,000	110	7,816,900	110	7,816,900	-	-	-	-	-	14,745,000	110	22,561,900	610	46,483,900	111	39.73	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan, telepon, air dan listrik	60	2,395,000,000	36	484,464,758	36	441,420,000	3	53,683,526	3	42,850,602	3	51,368,363	3	59,252,653	12	207,155,144	48	691,619,902	80	29	
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	60	857,000,000	36	334,286,200	36	257,109,090	3	44,320,160	3	50,958,300	3	60,232,830	3	45,576,100	12	201,087,390	48	535,373,590	80	62.47	
2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersedian sarana dan prasarana aparatur	95	5,541,000,000	-	3,782,909,557	-	482,612,000	-	18,287,660	-	50,912,997	-	23,325,000	-	322,987,350	-	415,513,007	-	4,198,422,564	-	-	
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan yg tersedia	95	600,000,000	86%	153,028,253	86%	105,212,000	14	15,087,660	35	22,782,997	17	18,415,000	21	22,635,350	87	78,921,007	88	231,949,260	92	38.66	
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin yg tersedia	95	390,000,000	86%	26,560,000	86%	24,400,000	13	3,200,000	47	8,375,000	17	4,200,000	9	7,660,000	86	23,435,000	87	49,995,000	91	12.82	
2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung yg tersedia	90	4,551,000,000	81%	3,603,321,304	81%	353,000,000	-	-	5	19,755,000	1	710,000	82	292,692,000	88	313,157,000	1	3,916,478,304	1	86.06	
2		Penataan Organisasi	-	5	-	3	20,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	26,000,000	-	-		
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan kinerja yg tersusun	5	-	3	20,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	-	-	-	-	-	-	1	6,000,000	4	26,000,000	80	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
				5	6	7	8	I		II		III		IV		12	13= 6 + 12			14 = 13/5x100%				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
2	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal yang berdaya saing	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kajian pemetaan potensi sektor prioritas, profil proyek yg siap ditawarkan		4,110,000,000		270,864,950		333,252,050		30,152,800		68,254,030		94,836,660		33,302,960		226,546,450		455,735,800			
2		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian insentif/ fasilitas	90	2,000,000,000		43,780,000		140,572,590		14,664,300		22,871,630		32,726,660		11,380,000		81,642,590		83,746,990			
		Penetapan Kebijakan daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah pemberian insentif/ fasilitas	90	1,000,000,000	0%	-	85%	73,770,600	12	8,921,800	32	15,313,800	33	15,440,000	-	2,000,000	77	41,675,600	-	-			
2		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah pemberian insentif/ fasilitas	90	1,000,000,000	86%	43,780,000	85%	66,801,990	8	5,742,500	19	7,557,830	35	17,286,660	-	9,380,000	62	39,966,990	63	83,746,990	70	8.37	
2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunya peta potensi Kab. Banteng	90	2,110,000,000	170	227,084,950		192,679,460		15,488,500		45,382,400		62,110,000		21,922,960		144,903,860		371,988,810			
2		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUP	90	1,110,000,000	86%	90,918,350	85%	102,646,960	7	7,844,000	25	18,520,000	40	37,650,000	8	14,192,960	80	78,206,960	81	169,125,310	90	15.24	
2		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi dan peluang usaha	90	1,000,000,000	86%	136,166,600	85%	90,032,500	8	7,644,500	38	26,862,400	33	24,460,000	2	7,730,000	81	66,696,900	82	202,863,500	91	20.29	
2	Meningkatnya daya tarik, minat investasi penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah minat Investasi		3,700,000,000		980,064,408		1,067,266,400		98,587,400		266,640,000		484,726,700				1,029,435,805		2,009,500,213			
2		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi kerjasama investasi antar pemerintah dan dunia usaha baik dalam dan luar negeri	90	3,700,000,000		980,064,408		1,067,266,400		98,587,400		266,640,000		484,726,700		179,481,705		1,029,435,805		2,009,500,213			
2		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran investasi	90	3,700,000,000	10%	980,064,408	75%	1,067,266,400	9	98,587,400	34	266,640,000	45	484,726,700	10	179,481,705	98	1,029,435,805	98	2,009,500,213	109	54.31	
2	Terpenuhinya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima dan responsif	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah izin yg diterbitkan sesuai SOP		4,350,000,000		722,336,510		509,184,960		67,936,400		103,106,900		103,524,412		83,534,600		358,102,312		1,080,438,822			
2		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin yg diterbitkan sesuai SOP, indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan	90	4,350,000,000	14,179	722,336,510		509,184,960		67,936,400		103,106,900		103,524,412		83,534,600		358,102,312		1,080,438,822			
2		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	terlaksananya administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan	10,000	2,350,000,000	7064	578,810,037	2000	401,989,630	786	57,940,900	728	90,175,500	1,505	88,186,382	1,012	74,188,400	4,031	310,491,182	11,095	889,301,219	111	37.84	
2		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan	8	500,000,000	24	30,679,400	8 Kec	30,111,630	-	2,816,500	2	5,246,500	3	8,546,330	3	3,409,600	8	20,018,930	32	50,698,330	400	10.14	
2		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terselesaikanya pengaduan penanaman modal	50	500,000,000	27	67,301,173	10 pengaduan	45,696,700	-	4,575,500	3	3,929,100	-	3,586,100	-	3,452,000	3	15,542,700	30	82,843,873	60	16.57	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II		III								
				5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13= 6 + 12	Rp	14 = 13/5x100%	Rp	
1	2	3	4																					
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	10000	1,000,000,000	7064	45,545,900	2000 izin dan non izin	31,387,000	786	2,603,500	728	3,755,800	1,505	3,205,600	1,012	2,484,600	4,031	12,049,500	11,095	57,595,400	111	5.76	
2	Meningkatnya realisasi investasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkat kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal		3,000,000,000		1,111,125,600		715,845,700		44,999,523		131,357,276		91,205,000		291,442,500		559,004,299		1,670,129,899			
2		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		3,000,000,000		1,111,125,600		715,845,700		44,999,523		131,357,276		91,205,000		291,442,500		559,004,299		1,670,129,899			
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya laporan realisasi investasi PMDN dan PMA	150	1,000,000,000	197	220,698,800	25	95,846,100	-	7,683,500	-	11,487,200	127	18,450,000	347	1,800,000	474	39,420,700	671	260,119,500	447	26.01	
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yg akan diberikan pembinaan PM	150	1,000,000,000	180	555,202,400	25 Perusahaan	399,999,700	-	34,316,023	120	112,710,476	-	13,155,000	180	166,697,700	300	326,879,199	480	882,081,599	320	88.21	
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yg diawasi atas kepatuhan perusahaan dan jumlah perusahaan yg telah difasilitasi terkait masalah yg dihadapi	150	1,000,000,000	252	335,224,400	25 Perusahaan	219,999,900	-	3,000,000	-	7,159,600	127	59,600,000	347	122,944,800	474	192,704,400	726	527,928,800	484	52.79	
2	Terpenuhinya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima dan responsif	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan jumlah izin yg diterbitkan		750,000,000		120,508,200		31,976,060		5,064,830		4,049,900		9,654,200		6,534,630		25,303,560		145,811,760			
2		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data perizinan dan non perizinan	90	750,000,000		120,508,200		31,976,060		5,064,830		4,049,900		9,654,200		6,534,630	83	25,303,560	83	145,811,760	17	19.44	
2		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya data perizinan dan non perizinan	90	750,000,000	86%	120,508,200	80%	31,976,060	15	5,064,830	28	4,049,900	30	9,654,200	10	6,534,630	83	25,303,560	84	145,811,760	93	19.44	
JUMLAH					42,789,000,000		15,417,010,938		7,190,838,180	12	892,708,224	21	1,536,767,044	23	1,650,394,820		1,077,439,328	80	5,751,605,811	49	21,101,141,149	10	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)				Predikat Kinerja																				
faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA PD Kab. Bantaeng berikutnya :																								
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																								
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Peresentase bidang dalam SKPD yang dilayani Administrasi Perkantornya																					
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Laporan RKA _SKPD				27,272,860		3,825,300		6,566,600					6,566,600		6,566,600			1,313,320	Dispora		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan Kinerja SKPD		142,960,130,000	1 Dok	16,782,280	12	16,083,290		3,221,800		4,428,300			4,428,300			21,210,580		4,242,116	Dispora		
		Penyediaan Gaji dan tunjangan	Alokasi gaji dan tunjangan ASN		17,579,130,000	12 Bulan	1,719,543,300	100	1,899,517,022		319,525,775		410,761,188			410,761,188		2,130,304,488		426,060,898	Dispora			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					15,202,460		1,769,200		3,798,530					3,798,530		3,798,530		759,706	Dispora			
		Koordinasi dan peyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya laporan akhir tahun	1PAKET	275,000,000	12 Bln	5,228,300	1	11,382,500		11,292,500							5,228,300		1,045,660	Dispora			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
				5	6	7	8		9		10		11											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K							
1	2	3	4																					15
		Kordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulananan /Triwulan/ Semesteran SKPD	Penyusunan LaporanKeuangan OPD keuangan dan pembiayaan dan jasa penyusunan administrasi Keuangan OPD	3 DOK	390,000,000,000	15,688,100	3	15,286,190	3,108,930	3,740,200							3,740,200		19,428,300			3,885,660	Dispora	
		Penyediaan Komponen Istalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Tersediahnya komponen peralatan listrik dan elektronik					10,175,400	1,499,200										-			-	Dispora	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa koran/harian umum		15,000,000	3 Exp	3,600,000	36	3,600,000	900,000							900,000		4,500,000			900,000	Dispora	
		Penyediaan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsultasi dalam daerah dan luar daerah/ provinsi	1 Paket	1,000,000,000		106,924,000	50	130,551,000	19,479,000							31,335,000		138,259,000			27,651,800	Dispora	
		Pengandaan kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan Perizinan kendaran dinas Ooerasional					33,892,000															Dispora	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Penyediaan dan pembiayaan jasa listrik dan Wifi kantor		20,000,000	12 Bln	1,719,311	4	18,484,970	1,221,887							1,665,557		3,384,868			676,974	Dispora	
		Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Penyediaan dan pembiayaan jasa pelayanan umum dan jasa lainnya		595,000,000	12 Bln	38,865,570	8	52,483,930	10,050,000							12,959,616		51,825,186			10,365,037	Dispora	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	400,000,000	1 Unit	49,086,000	1	44,065,000	5,942,200							13,199,000	1 Unit	62,285,000			12,457,000	Dispora	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersediahnya perlatan kerja kantor					1,500,000															Dispora	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersediahnya barang/ alat kelengkapan gedung kantor					10,070,000															Dispora	
		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi pemuda yang Berjasa dan atau Berprestasi	Terpublikasinya hasil karya pemuda di kabupaten Bantaeng					249,494,800															Dispora	
		Penyelenggraan Seleksi Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	tesediahnya pasukan Paskibraka setiap tahun					1,000,375,000	233,115,800	229,869,900							229,869,900		229,869,900			45,973,980	Dispora	
		Peningkatan Fasilitas Pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/kota	Terbinanya pemuda dan Organisasi Kepemudaan	1 Keg.	36,000,000,000	6 Keg	386,635,900	6 keg	151,785,600										386,635,900			77,327,180	Dispora	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten /Kota	Konsistensi sarana/prasarana olahraga di bantaeng yang layak pakai	100%	14,000,000,000	5 Venue	397,153,700	5	2,299,999,820	104,742,220							22,750,000		419,903,700			83,980,740	Dispora	
		Penyelenggraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat kabupaten/ kota	Jumlah atlit Berbakat yang dihasilkan dari Berbagai Event		6,300,000,000	1 Keg	395,843,050	100	200,000,000	2,391,900									395,843,050			79,168,610	Dispora	
		partisipasi dan keikutsertaan Dalam kegiatan kepemudaan	Keikutsertaan Dalam kegiatan Kepramukaan di tingkat Provinsi dan Nasional		11,700,000,000		315,423,110	4 Kali	200,000,000	1,349,300							174,935,000		490,358,110			98,071,622	Dispora	
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota	Pengembangan kejuaraan Olahraga					32,000,000															Dispora	
		Pengembangan Oraganisasi keolahragaan	Jumlah Atlit Berprestasi yang di utus pada Kejuaraan Tingkat Provinsi dan nasional		4,500,000,000		1,549,000,000	2	2,339,782,989										1,549,000,000			309,800,000	Dispora	
		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	JumlahOraganisasi keOlahraagaan yang di bina di Tingkat Daerah		11,700,000,000		315,423,110	4 Kali	293,688,030	2,118,782,989							2,118,782,989		2,434,206,099			486,841,220	Dispora	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								
Faktor pendukung keberhasilan Kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian Kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwuan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat daerah Kabupaten/Kota berikutnya																								
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																								
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	100				9,166,500	100	1,369,600	9,166,500													Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Koodinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA					7,531,200	100	1,100,900		7,531,200													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja					20,950,900	48	4,715,900		9,966,100													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan setiap Bulannya selama 1 Tahun	90				1,919,860,016	39	298,262,542		749,009,584													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	90				24,077,500	49	5,181,500		11,889,300													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	90				6,627,400	100	795,900		6,627,400													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Listrik					3,539,600	72	-		2,539,600													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Peserta Kunjungan					4,800,000	71	1,400,000		3,400,000													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang Diikuti	90				104,166,000	43	17,500,000		45,141,510													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan yang Dibayarkan Setiap Bulannya selama 1 Tahun	90				31,247,400	42	6,616,200		13,270,550													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non ASN yang dibayarkan Setiap Bulannya selama 1 Tahun	90				44,682,280	43	8,000,000		19,333,800													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dimes Jabatan	JumLah Kendaraan Roda 4 yang dipelihara	90				51,130,000	49	8,688,300		25,076,250													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	90				6,640,000	43	-		2,880,000													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor yang dipelihara	90				17,974,000	-	-		-													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN																									
6	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	90				263,472,600	19	22,777,500		49,713,900													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasa di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan					100,000,000	51	9,935,300		51,189,400													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota					137,581,200	-	-		-													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP																									
8	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang diawasi	90				14,500,100	37	1,095,600		5,356,800													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP																								
9	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dipulihkan Akibat Bencana	90				26,450,900	39	3,264,300	10,224,000													Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan
10	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan,n Desa/Kelurahan	Pendampingan dan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Kabupaten/Kota	90				20,399,900	63	5,587,500	12,865,600													Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan
11	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlaksananya Penilaian dan penetapan autensittitas Arsip Statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan Arsip	90				39,049,100	25	4,960,700	9,878,200													Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan
								2,853,846,596	37	401,251,742	1,045,059,694													
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN																								
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (ton)	261334.84	-				87,975	1,274,088,581	-	48,797,500	-	258,760,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen usaha perikanan budidaya yang terbit (dokumen)	0	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah dokumen persyaratan penerbitan izin usaha perikanan budidaya (dokumen)	0	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah pelayanan penerbitan izin usaha perikanan budidaya (orang)	0	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah pembudidaya yang diberdayakan (kelompok)	90	-				30	357,256,900		2,963,000		72,240,100		-		-		-		-		-	#DIV/0!
3	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah usaha budidaya yang diasuransikan (orang)	1500	-				1500	357,256,900	-	2,963,000	-	72,240,100	-	-		-		-		-		-	#DIV/0!
3	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	jumlah revitalasi kelompok pembudidaya (Kelompok)	120	-				40	-		-		-		-		-		-		-		-	#DIV/0!
		jumlah pembentukan kelompok pembudidaya ikan kecil	130	-				40			-		-		-		-		-		-		-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II		III		IV		12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15				
							5	6	7	8	9	10	11									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendidikan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok pembudidaya yang terfasilitasi bantuan pendanaan/ bantuan pembiayaan/ kemitraan usaha (kelompok)	28	-			13	-		-		-		-		-		-			
	3	Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta	Jumlah pembudidaya yang dibina (orang)	225	-			75	-		-		-		-		-		-		#DIV/0!	
			Jumlah sosialisasi penerima bantuan pemerintah (orang)	150			50															
	3	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil yang terbit (dokumen)	0	-			-	-		-		-		-		-		-		-	
	3	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPK) (Dokumen)	0	-			-	-		-		-		-		-		-			
	3	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPK) (dokumen)	0	-			-	-		-		-		-		-		-			
	3	Kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Persentase Pengelolaan pembudidayaan ikan	45	-			15	916,831,681		45,834,500		186,520,475		-		-		-		-	
	3	Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota	Jumlah rebusk pembudidaya (orang)	400	-			0	5,150,000	-	154,000		308,000		-		-		-		#DIV/0!	
			Jumlah data statistik perikanan budidaya (Dokumen)	3			1		-													
	3	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota	Jumlah prasarana perikanan budidaya (Unit)	16	-			1	45,288,000	-	22,100,000		2,100,000		-		-		-		#DIV/0!	
	3	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan (Unit)	13	-			5	734,301,435	-	1,447,000		164,070,175		-		-		-		#DIV/0!	
	3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan kesehatan ikan (Pemantauan)	0	-			0	-		-		-		-		-		-			
	3	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembinaan/ pemantauan pembudidaya ikan (kali)	10	-			5	-		-		-		-		-		-			
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah lahan budidaya yang dilindungi (Ha)					0	-		-		-		-		-		-			
	3	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan ikan di Darat	Jumlah produksi benih ikan unggul (ekor)	3,966,498	-			1,370,087	132,092,246		22,133,500		20,042,300		-		-		-		#DIV/0!	
	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (Ton)	19094.13	-			6500	667,897,570	-	13,822,300	-	110,104,800		-	-	-	119,927,100	119,927,100	-	#DIV/0!	
	3	Kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai , danau, waduk, rawa dan genangan air lainnyayang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengelolaan penangkapan ikan (Persen)	30	-			10	299,086,770	-	2,000,000		2,000,000		-		-		-		#DIV/0!	
	3	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data statistik perikanan tangkap (Dokumen)	0	-			0	-		-		-		-		-		-			
	3	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Jumlah prasarana perikanan tangkap (Unit)	2	-			2	299,086,770	-	2,000,000		2,000,000		-		-		-			
	3	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah sarana perikanan tangkap (Unit)	51	-			17	-		-		-		-		-		-		#DIV/0!	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11				12			13= 6 + 12		14 = 13/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		15		
	3	Kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan (kelompok)	90	-			30	311,061,000		3,122,300			97,964,800		-	-		101,087,100		101,087,100	-	#DIV/0!			
	3	Pengembangan Kapasitas nelayan kecil	Jumlah nelayan yang dibina (orang)	1100	-			500	-		-			-		-	-		-		-	-	#DIV/0!			
	3	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan Pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah rembuk nelayan (Kali)	1500	-			500	-		-					-	-		-		-	-	#DIV/0!			
			jumlah revisitas kelompok nelayan (Kelompok)	160				55																		
			jumlah pembentukan kelompok nelayan (Kelompok)	165				55																		
	3	Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	Jumlah kelompok yang terfasilitasi bantuan pendanaan/ bantuan pembiayaan/ kemitraan usaha (Kelompok)	75	-			1310	311,061,000		3,122,300			97,964,800		-	-		101,087,100		101,087,100	-	#DIV/0!			
			Jumlah nelayan yang diasuransikan (Orang)	2600				25	-																	
	3	Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Jumlah Pengelolaan UPTD TPI (Unit)	3	-			1	57,749,800	1	8,700,000			10,140,000		-	-		18,840,000		18,840,000	-	#DIV/0!			
	3	Penetapan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	jumlah surat persetujuan berlayar (SPB)	150	-			50	-	-	-			-		-	-		-		-	-	#DIV/0!			
	3	Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Jumlah TPI yang beroperasi (unit)	6	-			2	57,749,800	1	8,700,000			10,140,000		-	-		18,840,000		18,840,000	-	#DIV/0!			
	3	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen tanda daftar kapal perikanan berukuran 10 GT yang terbit (Dokumen)	0	-			0	0		-			-					-		-					
	3	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	jumlah dokumen persyaratan penerbitan tanda daftar kapal perikanan yang memenuhi syarat berukuran sampai dengan 10 GT (dokumen)	0	-			0	0		-															
	3	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	jumlah Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT (Dokumen)	0	-			0	0		-															
	3	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan ukuran sampai dengan 10 GT yang terbit	0	-			0	0		-			-					-		-					
	3	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	jumlah dokumen persyaratan penerbitan tanda daftar kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang memenuhi syarat berukuran sampai dengan 10 GT (dokumen)	0	-			0	0		-															
	3	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	jumlah Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan Berukuran sampai dengan 10 GT (Dokumen)	0	-			0	0		-															

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				5	6	7	8	9		10		11		12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
	3	Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang terbit (Dokumen)	0	-			0	0		-		-						-		-			
	3	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT (dokumen)	0	-			0	0		-													
	3	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	jumlah Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT (Dokumen)	0	-			0	0		-													
	3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kelompok pengawasan yang dibina (Persen)	31	-			12	-		-		-		-		-		-		-	-	#DIV/0!	
	3	Kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ kota	persentase pengawasan sumber daya perikanan (Persen)	24	-			8	-		-		-		-		-		-		-	-	#DIV/0!	
	3	Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ kota	Jumlah pengawasan usaha perikanan tangkap (kecamatan)	0	-			0	-															
	3	Pengawasan usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ kota	jumlah pengawasan usaha perikanan budidaya (kecamatan)	24	-			8	-		-		-		-		-		-		-	-	#DIV/0!	
	3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	77.19	-			26	54,465,500		8,475,100		8,820,000		-		-		17,295,100		17,295,100	-	#DIV/0!	
	3	Kegiatan penertiban tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	jumlah promosi produk hasil olahan perikanan (produk)	95	-			30	-		-		-		-		-		-		-	-	#DIV/0!	
	3	Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah pameran produk hasil perikanan yang diikuti (pameran)	18	-			6					-		-		-		-		-	-	#DIV/0!	
	3	Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang dibina (Kelompok)	41	-			30	54,465,500		8,475,100		8,820,000		-		-		17,295,100		17,295,100		#DIV/0!	
			Jumlah kelompok pemasaran perikanan yang dibina (Kelompok)	41																				
	3	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah pelatihan kelompok pengolah hasil perikanan (kelompok)	41	-			30	54,465,500		8,475,100		8,820,000		-		-		17,295,100		17,295,100		#DIV/0!	
			Jumlah pelatihan kelompok pemasar perikanan (kelompok)	41																				
			Persentase peningkatan SDM kelompok pengolah hasil perikanan (%)	60																				
	3	Kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	jumlah sarpras pengolah pemasaran (Unit)	41	-			13	-		-		-		-		-		-		-	-	#DIV/0!	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8	9		10		11		12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
	3	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	174,2	-			57,37	-															
	3	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah alat pengolah yang dihibahkan ke kelompok pengolah (Unit)	52	-			17	-		-		-		-		-		-		-	-	#DIV/0!	
	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	300	-			100	2,914,516,284	25	474,261,034		672,106,782		-		-	25	1,146,367,816	50	-	17	#DIV/0!	
	3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	13	-			5	23,776,500	1	5,197,500		5,206,500		-		-		10,404,000		-	-	#DIV/0!	
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	0	-			0	-		-		-											
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA -SKPD (dokumen)	2	-			1	-		-		-											
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	0	-			0	-		-		-											
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD (dokumen)	0	-			0	-		-		-											
	3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA- Perubahan SKPD (dokumen)	2	-			1	-		-		-											
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan (dokumen)	9	-			3	23,776,500	1	5,197,500		5,206,500		-		-		10,404,000		-	-	#DIV/0!	
	3	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu (%)	300	-			100	2,523,079,484	25	408,426,536		595,846,578		-		-		1,004,273,114		-	-	#DIV/0!	
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN (Orang)	73	-			25	2,523,079,484	25	408,426,536		595,846,578		-		-		1,004,273,114		-	-	#DIV/0!	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun	3	-			1	-		-		-						-		-	-	#DIV/0!	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan triwulan/ semesteran	12	-			4	-		-		-						-		-	-	#DIV/0!	
	3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase aset dinas (%)	300	-			100	11,427,200	25	2,275,600		1,200,000		-		-		3,475,600		-	-	#DIV/0!	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah Kebutuhan Barang milik daerah SKPD (dokumen)	0	-			0	-		-		-											
	3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset dinas terinventarisir (dokumen)	201	-			1	11,427,200	1	2,275,600		1,200,000		-		-		3,475,600		-	-	#DIV/0!	
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah (Person)	200	-			100	0		-		-				-		-		-	-	#DIV/0!	
	3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN (orang)	0	-			0	-		-		-											
	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Data ASN (Dokumen)	0	-			0	-		-		-											
	3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	0	-			0	-		-		-											
	3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan (kali)	0	-			0	-		-		-											
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Perundang-undangan (orang)	0	-			0	-		-		-											
	3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian kantor (Person)	300	-			100	138,671,600	25	27,120,000		42,077,550		-		-		69,197,550		-	-	#DIV/0!	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				5		6		7		8		9		10		11						12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15													
	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik (unit)	36	-			12	2,146,600	3	750,000		-		-		-		750,000		-		-	#DIV/0!			
	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	8	-			6	-		-						-										
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga (unit)	0	-			0	-		-																
	3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/ majalah (exemplar)	17	-			6	4,680,000	2	1,000,000		1,000,000		-		-		2,000,000		-		-	#DIV/0!			
	3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi/ konsultasi SKPD (kali)	180	-			70	131,845,000	20	25,370,000		41,077,550		-		-		66,447,550		-		-	#DIV/0!			
	3	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip (Dokumen)	0	-			0	0		-																
	3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	20	-			9	0		-		-		-		-		-		-						
	3	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas (unit)	0	-			0	-		-																
	3	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (Unit)	11	-			5	-		-																
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan kantor (unit)	9	-			4	-		-		-		-		-										
	3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset lainnya (Unit)	0	-			0	-		-																
	3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud (Unit)	0	-			0	-		-																
	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	Persentase penyediaan jasa penunjang kantor dinas (Persen)	3	-			100	138,992,500	25	17,650,738		18,652,174		-		-		36,302,912		-		-	#DIV/0!			
	3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk (Lembar)	550	-			250	-		-																
	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (Rekening)	24	-			12	79,197,500	3	8,863,038		9,525,274		-		-		18,388,312		-		-	#DIV/0!			
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	4	-			2	-		-		-		-		-										
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor (orang)	27	-			12	59,795,000	3	8,787,700		9,126,900		-		-		17,914,600		-		-	#DIV/0!			
	3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan aset dinas (unit)	97	-			100	78,569,000	25	13,590,660		9,123,980		-		-		22,714,640		-		-	#DIV/0!			
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (unit)	54	-			18	73,669,000	2	11,790,660		9,123,980		-		-		20,914,640		-		-	#DIV/0!			
	3	Pemeliharaan mebel	Jumlah pemeliharaan mebel (Unit)	10	-			4	-		-																
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diperbaiki (unit)	30	-			12	4,900,000	8	1,800,000		-		-		-		1,800,000		-		-	#DIV/0!			
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehab kantor (unit)	3	-			1	-		-																
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	0	-			0	-		-		-		-		-		-		-		0	-			
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	0	-			0	-		-																
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)										Predikat Kinerja																	
Faktor pendukung keberhasilan Kinerja :																											
Faktor penghambat pencapaian Kinerja																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat daerah Kabupaten/Kota berikutnya																											
DINAS PARIWISATA																											

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Peningkatan Pelayanan administrasi dan capaian kinerja dinas pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian kinerja urusan pemerintahan	64%	2,781,876,917	257	7,155,786,365	86.88	2,416,796,745	19	463,623,202	26	620,827,697			17		75	2,081,965,460	166	9,230,995,125	25,943	331.83	Dinas Pariwisata
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	100%	24,743,290	829	205,153,500	97.26	24,065,600	6	1,500,000	31	7,367,000			34		73	18,003,000	451	216,399,800	45,094	874.58	Dinas Pariwisata
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok / Laporan	2	7,247,295	1199	86,881,600	93.76	6,795,000	0	-	73	4,967,000	23	1,553,000	3	200,000	93	6,720,000	646	93,601,600	32,288	1,291.54	Dinas Pariwisata
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dok / Laporan	4	11,712,800	952	111,515,200	96.33	11,283,000	13	1,500,000	21	2,400,000	48	5,449,000	17	1,934,000	96	11,283,000	524	122,798,200	13,105	1,048.41	Dinas Pariwisata
		Evaluasi Kinerja Pemagkat Daerah	Jumlah Dok / Laporan	1	5,783,195	117	6,756,700	103.53	5,987,600	-	-	-	-	-	-	100	5,987,600	104	5,987,600	110	12,744,300	11,018	220.37	Dinas Pariwisata
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100	2,060,904,293	268	5,521,455,961	100.99	2,081,264,521	18	381,056,216	26	532,504,082	25	523,376,723	15	317,542,091	85	1,754,479,112	177	7,275,935,073	177	353.05	Dinas Pariwisata
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN per bulan	12	1,950,000,000	265	5,172,636,942	102.50	1,998,815,171	18	351,781,816	25	509,597,082	25	504,795,573	15	305,855,291	86	1,672,029,762	176	6,844,666,704	1,463	351.01	Dinas Pariwisata
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ Bulanan	12	105,121,098	315	331,651,019	74.34	78,142,350	33	25,467,400	29	22,407,000	24	18,581,150	15	11,686,800	74	78,142,350	195	409,793,369	1,624	389.83	Dinas Pariwisata
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dok / Laporan	1	5,783,195	297	17,168,000	74.47	4,307,000	88	3,807,000	12	500,000	-	-	-	-	74	4,307,000	186	21,475,000	18,567	371.33	Dinas Pariwisata
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	4,800,000	92	4,399,800	87.25	4,187,800	24	1,000,000	12	500,000	-	-	64	2,684,000	87	4,184,000	89	8,583,800	8,941	178.83	Dinas Pariwisata
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dok. RKBU dan Laporan Asset	12	4,800,000	92	4,399,800	87.25	4,187,800.00	24	1,000,000	12	500,000	-	-	64	2,684,000	87	4,184,000	89	8,583,800	745	178.83	Dinas Pariwisata
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	286,158,781	253	722,984,320	53.44	152,925,600	24	36,089,414	27	41,750,000	26	40,327,887	23	34,636,980	53	152,804,281	153	875,788,601	15,302	306.05	Dinas Pariwisata
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi	1	9,183,389	414	37,978,500	82.69	7,593,600.00	31	2,360,000	33	2,540,000			15		83	7,593,600	248	45,572,100	24,812	496.24	Dinas Pariwisata
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	15	24,480,000	374	91,485,000	70.39	17,232,000.00	15	2,660,000	14	2,420,000	45	7,750,000	25	4,310,000	70	17,140,000	222	108,625,000	1,479	443.73	Dinas Pariwisata
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat/Koordinasi diikuti & dilaksanakan	160	252,495,392	235	593,520,820	50.73	128,100,000.00	24	31,069,414	29	36,790,000	24	31,034,887	23	29,176,380	51	128,070,681	143	721,591,501	89	285.78	Dinas Pariwisata
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang terlaksananya operasional kantor	100%	-	#DIV/0!	11,091,000	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	11,091,000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pariwisata
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan diadakan	0	-	#DIV/0!	11,091,000	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	11,091,000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pariwisata
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang terlaksananya operasional kantor	100%	100,784,651	227	228,983,392	58.32	58,772,624	21	12,169,072	22	12,997,615	28	16,207,003	27	15,978,177	57	57,351,867	142	286,335,259	14,205	284.11	Dinas Pariwisata
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Listrik, telepon, air	12	79,179,000	152	120,114,092	41.40	32,783,824.00	22	7,269,072	22	7,176,615	27	8,969,703	26	8,390,577	40	31,805,967	96	151,920,059	799	191.87	Dinas Pariwisata
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket bahan dan jasa kebersihan kantor	1	21,605,651	504	108,869,300	120.29	25,988,800.00	19	4,900,000	22	5,821,000	28	7,237,300	29	7,587,600	118	25,545,900	311	134,415,200	31,106	622.13	Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	304,485,902	157	477,209,192	32.77	99,768,400	32	31,808,500	26	25,709,000	18	18,266,000	24	23,543,700	33	99,327,200	95	576,536,392	9,467	189.35	Dinas Pariwisata
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	4	80,400,000	324	260,888,542	68.77	55,292,200.00	28	15,553,500	24	13,350,000			23		68	54,853,500	196	315,742,042	4,909	392.71	Dinas Pariwisata
														24		12,950,000								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13= 6 + 12	Rp	14 = 13/5x100%	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan	1	52,801,592	158	83,580,750	42.02	22,186,300.00	47	10,455,000	14	2,999,000	5	1,000,000	35	7,729,800	42	22,183,800	100	105,764,550	10,015	200.31	Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket unit pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja	1	43,291,585	19	8,140,000	13.74	5,950,000.00	67	4,000,000	25	1,500,000	8	450,000	-	-	14	5,950,000	16	14,090,000	1,627	32.55	Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung	1	115,266,375	49	56,034,900	6.77	7,799,900.00	8	650,000	62	4,850,000	17	1,316,000	13	983,900	7	7,799,900	28	63,834,800	2,769	55.38	Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Perlengkapan	11	12,726,350	539	68,565,000	67.10	8,540,000.00	13	1,150,000	35	3,010,000	29	2,500,000	22	1,880,000	67	8,540,000	303	77,105,000	2,754	605.87	Dinas Pariwisata
2	Meningkatnya Saran	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah objek wisata yang berdaya saing	3	9,191,832,104	132	12,090,822,332	14.11	1,296,837,860	18	233,689,940	27	353,970,367	31	406,794,993	23	299,873,896	3	233,689,940	67	12,324,512,272	2235	134.08	Dinas Pariwisata
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	100%	9,191,832,104	132	12,090,822,332	14.11	1,296,837,860	18	233,689,940	27	353,970,367	31	406,794,993	23	299,873,896	14	1,294,329,196	73	13,385,151,528	7281	145.62	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi pengembangan/ penunjang daerah tujuan wisata	1	620,012,437	3	16,550,048	2.28	14,124,400.00	0	-	92	12,939,400	6	795,000	3	390,000	2	14,124,400	2	30,674,448	247	4.95	Dinas Pariwisata
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	8,509,534,492	141	12,015,352,484	14.37	1,223,074,660.00	19	233,689,940	28	339,230,967	31	374,011,193	22	274,284,686	14	1,221,216,786	78	13,236,569,270	1,944	155.55	Dinas Pariwisata
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi, penerapan serta pengawasan standarisasi	2	62,285,175	95	58,919,800	95.75	59,638,800.00	0	-	3	1,800,000	54	31,988,800	42	25,199,210	95	58,988,010	95	117,907,810	4,733	189.30	Dinas Pariwisata
3		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	105151	549,576,875	148	810,934,631	51.97	285,598,920	0	1,314,800	37	105,139,319	19	55,424,211	31	88,310,190	46	250,188,520	97	1,061,123,151	0	193.08	Dinas Pariwisata
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemasaran pariwisata	100%	549,576,875	148	810,934,631	51.97	285,598,920	0	1,314,800	37	105,139,319	19	55,424,211	31	88,310,190	46	250,188,520	97	1,061,123,151	9,654	193.08	Dinas Pariwisata
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah paket Sistem Teknologi Informasi / Media Informasi dalam pemasaran pariwisata	1	57,881,250	78	44,862,729	288.15	166,787,130.00	1	1,314,800	45	75,724,319	16	25,998,211	38	63,010,700	287	166,048,030	182	210,910,759	18,219	364.39	Dinas Pariwisata
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah paket promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	1	164,093,344	249	407,818,162	56.61	92,894,930.00	0	-	14	13,215,000	27	24,918,000	22	20,159,430	36	58,292,430	142	466,110,592	14,203	284.05	Dinas Pariwisata
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah data dan informasi kepariwisataan yang disebar	3	102,487,000	302	309,034,600	15.33	15,713,160.00	0	-	59	9,280,000	23	3,538,000	18	2,866,360	15	15,684,360	158	324,718,960	5,281	316.84	Dinas Pariwisata
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi dan Investasi Pariwisata	1	225,115,281	22	49,219,140	4.53	10,203,700.00	0	-	68	6,920,000	10	970,000	22	2,273,700		10,163,700	11	59,382,840	1,093	26.38	Dinas Pariwisata
7		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia / Kepariwisataaan	5	1,606,580,876	295	4,736,032,510	142.69	2,292,387,000	22	500,000,000	46	1,046,196,576	9	200,000,000	24	546,000,000	143	2,292,196,576	219	7,028,229,086	4,375	437.47	Dinas Pariwisata
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Prsentase partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	100	1,606,580,876	295	4,736,032,510	142.69	2,292,387,000	22	500,000,000	46	1,046,196,576	9	200,000,000	24	546,000,000	143	2,292,196,576	219	7,028,229,086	219	437.47	Dinas Pariwisata
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kegiatan pengembangan kemitraan/kerjasama pariwisata	1	85,085,438	1020	868,031,965	822.70	700,000,000.00	29	200,000,000	43	300,000,000	29	200,000,000	-	-	823	700,000,000	921	1,568,031,965	92,145	1,842.89	Dinas Pariwisata

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4																				15	
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah pelatihan dasar SDM Kepariwisataan	1	146,410,000	2208	3,233,064,025	746.12	1,092,387,000.00	0	-	50	546,196,576	-	50	546,000,000	746	1,092,196,576	1,477	4,325,260,601	147,711	2,954.21	Dinas Pariwisata	
		Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi, DistribusiKonsumsi dan KonsevasiEkonomi Kreatif	Jumlah event yang difasilitasi / dilaksanakan	1	1,375,085,438	46	634,936,520	36.36	500,000,000.00	0	300,000,000	40	200,000,000	-	-	-	36	500,000,000	41	1,134,936,520	4,127	82.54	Dinas Pariwisata	
Rata - rata Capaian Kinerja (%)																		40.23661212				2,658		
Predikat Kinerja																						#DIV/0!		
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *) :																								
*) di isi oleh kepala Bappeda																								
DINAS PERTANIAN																								
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Menunjang pelaksanaan urusan sekretariat Dinas Pertanian																					
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lancarnya proses penyusunan perencanaan pembangunan pertanian																					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2023	100	Rp 200,000,000	99.63	Rp 552,746,000	100%	Rp 65,263,800	31.06	Rp 20,273,500	25.62	Rp 16,719,500	15.64	Rp 10,204,500	22.74	Rp 14,843,900	95.06	Rp 62,041,400	194.69	Rp 614,787,400	194.69	3.07	Dinas Pertanian
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	Rp -	100.00	Rp -		Rp 1,759,600	-	Rp -	27.74	Rp 488,200	41.16	Rp 724,200	21.65	Rp 380,900	90.55	Rp 1,593,300	190.55	Rp 1,593,300	190.55	-	Dinas Pertanian
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Rp 54,121,608	99.63	Rp 30,449,300	100%	Rp 19,009,700	1.88	Rp 358,200	8.37	Rp 1,591,600	31.83	Rp 6,050,000	18.38	Rp 3,494,900	60.47	Rp 11,494,700	160.10	Rp 41,944,000	160.10	0.77	Dinas Pertanian
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan Dinas Pertanian																					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN Dinas Pertanian	100		100	Rp 19,067,738,337	100%	Rp 9,323,132,408	20.21	Rp 1,884,581,866	26.67	Rp 2,486,575,227	27.70	Rp 2,582,168,275	21.31	Rp 1,986,771,584	95.89	Rp 8,940,096,952	195.89	Rp 28,007,835,289	195.89		Dinas Pertanian
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Rp 34,637,829	100	Rp 29,613,300	100%	Rp 19,036,800	5.25	Rp 1,000,000	27.06	Rp 5,151,700	24.66	Rp 4,695,400	30.89	Rp 5,881,100	87.87	Rp 16,728,200	187.87	Rp 46,341,500	187.87	133.79	Dinas Pertanian
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Rp -	100.00	Rp -		Rp 5,707,500	39.62	Rp 2,261,500	46.36	Rp 2,646,000	-	Rp -	14.02	Rp 800,000	100.00	Rp 5,707,500	200.00	Rp 5,707,500	200.00	-	Dinas Pertanian
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpeliharanya aset Dinas Pertanian																					
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	Rp 43,297,286	100.00	Rp 29,147,900		Rp 19,953,600	4.01	Rp 800,000	22.02	Rp 4,393,300	21.24	Rp 4,238,400	35.21	Rp 7,026,393	82.48	Rp 16,458,093	182.48	Rp 45,605,993	182.48	105.33	Dinas Pertanian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terperuhinya Kebutuhan Pelaksanaan Rapat Koordinasi																					
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			100%	Rp 6,560,000	-	Rp -	21.87	Rp 1,434,400	19.45	Rp 1,275,600	15.38	Rp 1,009,000	56.69	Rp 3,719,000	56.69	Rp 3,719,000	-		56.69	Dinas Pertanian	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Rp 270,608,049	100.00	Rp 196,867,514	100%	Rp 156,068,000	11.42	Rp 17,827,595	13.91	Rp 21,707,660	10.09	Rp 15,752,745	18.35	Rp 28,644,235	53.78	Rp 83,932,235	153.78	Rp 280,799,749	153.78	53.78	Dinas Pertanian
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lancarnya Pelayanan pada Dinas Pertanian																					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terperuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Rp 135,304,020	81.56	Rp 216,414,572	100%	Rp 67,500,200	20.88	Rp 14,093,097	23.96	Rp 16,176,144	24.49	Rp 16,531,366	27.89	Rp 18,828,310	97.23	Rp 65,628,917	178.79	Rp 282,043,489	178.79	208.45	Dinas Pertanian
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp -	76.92	Rp 117,986,336	100%	Rp 85,829,500	5.24	Rp 4,500,000	28.37	Rp 24,348,100	30.16	Rp 25,889,300	27.27	Rp 23,404,000	91.04	Rp 78,141,400	167.96	Rp 196,127,736	167.96		Dinas Pertanian

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV											
					5	6		7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%					15					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berfungsi Optimalnya Aset Dinas Pertanian																						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya Kebutuhan Pajak Kendaraan Dinas dan Terpeliharanya Kendaraan Dinas	100	Rp 75,770,251	76.92	Rp 71,309,056	100%	Rp 40,130,000	21.62	Rp 8,674,960	23.70	Rp 9,510,000	16.20	Rp 6,500,000	31.87	Rp 12,789,500	93.38	Rp 37,474,460	170.30	Rp 108,783,516	170.30	143.57	Dinas Pertanian	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung/Bangunan Kantor	100	Rp -	76.92	Rp 287,863,643	100%	Rp 8,061,100	-	Rp -	100.00	Rp 8,061,100	-	Rp -	-	Rp -	100.00	Rp 8,061,100	176.92	Rp 295,924,743	176.92		Dinas Pertanian	
2		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penggunaan Teknologi Pertanian																						
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian dengan Penggunaan Prasarana Pertanian																						
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	100	Rp 125,000,000	100.00	Rp 81,997,850	100%	Rp 81,686,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00	Rp -	100.00	Rp 81,997,850	100.00	65.60	Dinas Pertanian		
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100	255,000,000	100.00	Rp 4,012,891,600	100%	Rp 4,565,745,296	0.17	Rp 7,804,000	0.15	Rp 6,790,000	20.57	Rp 939,196,400		Rp 2,387,816,400	73.19	Rp 3,341,606,800	173.19	Rp 7,354,498,400	173.19	2.884	Dinas Pertanian	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produksi Pertanian TPH Bun																						
		Penjaminan Ketumuhan dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemunian	100	Rp 425,000,000	100.00	Rp 599,475,400	100%	Rp 398,098,800	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00	Rp -	100.00	Rp 599,475,400	100.00	141.05			
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	100	Rp 425,000,000	100.00	Rp 2,049,590,420	100%	Rp 222,796,521	-	Rp -	4.48	Rp 9,984,700	-	Rp -	84.75	Rp 188,817,250	89.23	Rp 198,801,950	189.23	Rp 2,248,392,370	189.23	529.03		
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman, Terlaksananya AUTP dan Operasional Pelaksanaan AUTP	100	Rp 350,000,000	100.00	Rp 447,692,100	100%	Rp 337,000,000	5.47	Rp 18,448,500	9.05	Rp 30,515,160	31.70	Rp 106,831,760	38.49	Rp 129,711,540	84.72	Rp 285,506,960	184.72	Rp 733,199,060	184.72	209.49		
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																						
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Terlaksananya Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	100	Rp -	-	Rp 68,220,325	100%	Rp 50,005,840	10.63	Rp 5,317,180	25.58	Rp 12,790,360	33.27	Rp 16,635,900	21.01	Rp 10,505,800	90.49	Rp 45,249,240	90.49	Rp 113,469,565	90.49			
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijaun Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembibitan ayam DOC, Terlaksananya Penangkaran Benih Tanaman Pangan dan Terlaksananya Pengembangan Bibit Kentang G0 dan Bawang Merah																						
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Terlaksananya Pelatihan Konservasi Anoprek Lokal	100	Rp -	-	Rp 368,169,325	100%	Rp 15,000,000	-	Rp -	-	Rp -	79.93	Rp 11,990,000	20.00	Rp 3,000,000	99.93	Rp 14,990,000	99.93	Rp 383,159,325	99.93			
		Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Terlaksananya Pengembangan Bawang Merah	100		-	Rp 514,589,700	100%	Rp 51,929,000	15.01	Rp 7,792,200	29.80	Rp 15,473,600	35.43	Rp 18,399,200	19.77	Rp 10,264,000	100.00	Rp 51,929,000	100.00	Rp 566,518,700	100.00			
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Tersedianya Calon Benih Varietas Berkualitas 3 Varietas dan Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Beredar dan Bersertifikasi 5 Ha				Rp 1,087,297,824	100%	Rp 120,588,700	5.88	Rp 7,085,000	18.74	Rp 22,604,000	48.89	Rp 58,950,900	16.17	Rp 19,495,000	89.67	Rp 108,134,900	89.67	Rp 1,195,432,724	-			
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak	Terlaksananya Benih/Bibit Ternak Kambing dan DOC	100			92.06	Rp 842,817,664	100%	Rp 94,104,000	16.62	Rp 15,642,640	30.73	Rp 28,918,610	28.02	Rp 26,369,900	24.62	Rp 23,172,850	100.00	Rp 94,104,000	192.06	Rp 936,921,664	192.06		Dinas Pertanian

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	
				5		6		7		8		9		10		11									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12		13= 6 + 12			14 = 13/5x100%
3		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Prasarana Pertanian																						
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Persentase Meningkatnya Produksi Pertanian dengan Dukungan Prasarana Pertanian yang Memadai																						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya SL-PHT dan Pengendalian OPT Tembakau	100	Rp 175,000,000	93.10	Rp 233,313,300	100%	Rp 130,290,384	2.00	Rp 2,600,000	18.41	Rp 23,991,500	47.95	Rp 62,473,000	18.18	Rp 23,692,284	86.54	Rp 112,756,784	179.64	Rp 346,070,084	179.64	197.75		
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Tersusunnya Updating Database Polygon Lahan Pertanian dan Study LiterisasiPembangunan Pertanian dan Peternakan untuk Penyusunan Perencanaan Pertanian			Rp 465,369,955		Rp 191,900,000	100.00	Rp 191,900,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	100.00	Rp 191,900,000	100.00	Rp 657,269,955					
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian dengan Dukungan Prasarana Pertanian yang memadai																						
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terbangunnya Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100	Rp -	64.56	Rp 8,524,992,400	100%	Rp 4,326,842,747	0.01	Rp 600,000	4.43	Rp 191,505,350	35.91	Rp 1,553,823,900	23.58	Rp 1,020,094,850	63.93	Rp 2,766,024,100	128.49	Rp 11,291,016,500	128.49			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung	Terbangunnya Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			Rp 2,146,674,260		Rp 208,521,376	-	Rp -	-	Rp -	4.44	Rp 9,257,750	-	Rp -	4.44	Rp 9,257,750	4.44	Rp 2,155,932,010					
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangunnya Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			Rp 4,510,377,965		Rp 4,080,570,304	1.47%	Rp 600,000	0.26	Rp 10,440,000		Rp 1,375,494,300		Rp 679,203,450	50.62	Rp 2,065,737,750	50.62	Rp 6,576,115,715	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						Rp 69,768,000	0.00%	Rp -	0.00	Rp -		Rp -		Rp 69,768,000	100.00	Rp 69,768,000							
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Populasi Ternak																						
4		Pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	Pengembangan Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	100	Rp 630,000,000	-	Rp 1,078,342,249	3%	Rp 839,609,000	0.86	Rp 7,214,320	14.34	Rp 120,373,000	2.30	Rp 19,348,900	44.03	Rp 369,644,100	61.53	Rp 516,580,320	61.53	Rp 1,594,922,569	61.53	253.16		
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan di Kabupaten Bantaeng																						
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pendampingan Kelompok Usaha Peternakan																						
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	100	Rp 247,847,738	-	Rp 965,170,500	80%	Rp 26,773,568	-	Rp -	4.17	Rp 1,115,900	95.83	Rp 25,657,668	-	Rp -	100.00	Rp 26,773,568	100.00	Rp 991,944,068	100.00	400.22	Dinas Pertanian	
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan diPerbatasan Lintas daerah Kabupaten/Kota																						
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp 155,000,000	-	Rp 145,244,000	80%	Rp 15,448,900	10.70	Rp 1,652,800	30.33	Rp 4,685,000	29.85	Rp 4,611,100	29.13	Rp 4,500,000	100.00	Rp 15,448,900	100.00	Rp 160,692,900	100.00	103.67	Dinas Pertanian	
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner																						
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner					80%	Rp 150,575,000	-	Rp -	-	Rp -	24.72	Rp 37,218,880	74.26	Rp 111,823,000	98.98	Rp 149,041,880	98.98	Rp 149,041,880	-	-	Dinas Pertanian	
5		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Melindungi Petani dari Gagal Panen																						

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	
				5	6	7	8	I		II		III		IV		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisai Pengendalian Pasca Bencana Alam TPH-BJN																						
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanmaan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	100	Rp 350,000,000	-	Rp 103,186,500	80%	Rp 19,052,100	11.19	Rp 2,132,000	12.05	Rp 2,295,000	9.45	Rp 1,800,000	67.32	Rp 12,825,100	100.00	Rp 19,052,100	100.00	Rp 122,238,600	100.00			Dinas Pertanian
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	100	Rp -	99.13	Rp 49,585,290	100%	Rp 28,943,300	11.20	Rp 3,241,400	26.36	Rp 7,630,000	31.34	Rp 9,071,900	31.10	Rp 9,000,000	100.00	Rp 28,943,300	199.13	Rp 76,528,590	199	#DIV/0!		Dinas Pertanian
6		Program Perizinan Usaha Pertanian	Layanan Rekomendasi Perizinan Pertanian																						
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengawalan Pasca Panen Hasil Pertanian																						
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	100	Rp 275,000,000	100.00	Rp 88,569,000	30%	Rp 260,009,300	1.58	Rp 4,118,000	2.83	Rp 7,366,500	6.31	Rp 16,400,000	87.30	Rp 226,981,500	98.02	Rp 254,866,000	198.02	Rp 343,435,000	198	124.89		Dinas Pertanian
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	100	Rp 1,750,000,000	100.00	Rp 116,178,700	30%	Rp 199,969,700	0.85	Rp 1,701,500	-	Rp -	14.06	Rp 28,110,600	83.34	Rp 166,648,000	98.24	Rp 196,460,100	198.24	Rp 312,638,800	198	17.87		Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Pertanian																						
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penyuluhan Pertanian																						
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	Rp 750,000,000	-	Rp 2,944,378,789	90%	Rp 539,187,168	11.56	Rp 62,330,000	16.75	Rp 90,295,061	30.92	Rp 166,713,000	38.66	Rp 208,459,607	97.89	Rp 527,797,668	97.89	Rp 3,472,176,457	98	462.96		Dinas Pertanian
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	Rp 250,000,000	-	Rp 93,568,350	100%	Rp 404,064,250	26.09	Rp 105,428,000	58.12	Rp 234,854,289	-	Rp -	1.34	Rp 5,400,000	85.55	Rp 345,682,289	85.55	Rp 439,250,639	86	175.70		Dinas Pertanian
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		#DIV/0!		#DIV/0!	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *) :																									
*) di isi oleh kepala Bappeda																									
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																									
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	9	450,000,000			3	28,099,600	2	18,519,600							2	18,519,600	2	18,519,600	22	4.115	BAPPEDA	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	9	450,000,000			1	26,097,000	1	23,247,000							1	23,247,000	1	23,247,000	11	5.166	BAPPEDA	
		Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/Kota	Berita Acara Musrembang Kabupaten/Kota	2	1,115,000,000			2	176,774,900	2	137,454,900	2	169,670,428					2	169,670,428	2	169,670,428	100	15.217	BAPPEDA	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrembang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		121,000,000			30	20,000,000	30	18,750,000							30	18,750,000	30	18,750,000	0	15.496	BAPPEDA	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang ditetapkan (RPJPD, RPJMD, dan RKPd)		4,400,000,000			3	1,383,068,700		181,868,610	1	634,501,610					1	634,501,610	1	634,501,610	1	14.420	BAPPEDA	
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah		425,000,000			1	167,999,800		11,713,300		30,648,300						30,648,300		30,648,300	-	7.211	BAPPEDA	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
										I		II		III		IV								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah d Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Dok	750,000,000			1	201,002,600		10,019,300		87,311,000					87,311,000		87,311,000	-	11.641	BAPPEDA	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kerja Pembangunan Daerah	4	1,152,000,000			4	99,999,900	1	18,642,800	2	44,022,500					2	44,022,500	2	44,022,500	50	3.821	BAPPEDA
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERA																								
4	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12	1,000,000,000			4	23,999,850	1	3,350,900								3,350,900		3,350,900	-	0.33509	BAPPEDA
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Pemerintahan	3	450,000,000			1	42,984,200		5,006,400								5,006,400		5,006,400	-	1.113	BAPPEDA
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	JumLah LaporanAsistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	425,000,000			1	24,998,500		9,549,900								9,549,900		9,549,900	-	2.247035294	BAPPEDA
		Pelaksanaan Montoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Montoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Pembangunan Manusia	12	800,000,000			4	23,140,000	1	5,289,000						1	5,289,000	1	5,289,000	8	0.661	BAPPEDA	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Pembangunan Manusia		21,000,000			1	264,216,000		8,609,900		96,665,800						96,665,800		96,665,800	-	460.313	BAPPEDA
5	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	12	750,000,000			1	44,539,100		10,266,000		12,942,700						12,942,700		12,942,700	-	1.726	BAPPEDA
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3	450,000,000			1	10,616,100		2,766,300		5,755,500						5,755,500		5,755,500	-	1.279	BAPPEDA
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3	300,000,000			4	11,936,000	1	1,209,500		4,143,300				1	4,143,300		4,143,300	-	1.381	BAPPEDA	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Perekonomian		21,000,000			1	60,262,700		11,722,100		14,601,200						14,601,200		14,601,200	-	69.530	BAPPEDA
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	12	750,000,000			1	30,000,000		4,888,500		19,903,521						19,903,521		19,903,521	-	2.654	BAPPEDA
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3	450,000,000			1	16,547,680		1,930,000		6,299,630						6,299,630		6,299,630	-	1.400	BAPPEDA

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5	6	7	8		9		10		11		12	13= 6 + 12				14 = 13/5x100%			15
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12	450,000,000	4	22,707,600	1	4,582,600	1	9,542,600					1	9,542,600	1	9,542,600	8	2.121	BAPPEDA	
6	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	12	1,200,000,000	1	93,507,900		4,005,800		33,680,800						33,680,800		33,680,800	-	2.807	BAPPEDA	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12	650,000,000	4	41,571,300	1	5,152,700	1	11,979,300					1	11,979,300	1	11,979,300	8	1.843	BAPPEDA	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	12	1,200,000,000	1	50,625,000		6,308,200		14,162,300						14,162,300		14,162,300	-	1.1802	BAPPEDA	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12	650,000,000	4	50,152,600	1	5,892,600	1	18,949,100					1	18,949,100	1	18,949,100	8	2.915	BAPPEDA	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		21,000,000	1	251,001,800		14,289,700		210,909,700						210,909,700		210,909,700	-	1004.3	BAPPEDA	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																							
7	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																				BAPPEDA		
8	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	6	1,500,000,000	3	275,259,500		7,303,700		95,826,800						95,826,800		95,826,800	-	6.388	BAPPEDA	
9	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan		10,500,000	1	28,865,630		6,078,630		10,837,630						10,837,630		10,837,630		103.22	BAPPEDA	
10	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		1,850,000,000	1	338,229,800		28,731,100		72,371,900						72,371,900		72,371,900		3.912	BAPPEDA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	165,000,000	3	21,874,800	1	4,814,200		7,881,100					1	7,881,100	1	7,881,100	50	4.776	BAPPEDA	
		Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	2	145,000,000	2	23,389,400	1	7,013,300		11,397,900					1	11,397,900	1	11,397,900	50	7.861	BAPPEDA	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	9	200,188,000	1	15,702,900	1	3,696,800		6,976,600						6,976,600		6,976,600	-	3.485	BAPPEDA	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan setiap Bulannya selama 1 Tahun	100	8,143,352,000	30	2,265,508,812	30	392,009,709	30	913,613,029					30	913,613,029	30	913,613,029	30	11.219	BAPPEDA	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II		III								
				5	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	36	300,382,500			12	33,022,900	3	8,363,400	3	15,371,100					3	15,371,100	3	15,371,100	8	5.117	BAPPEDA
13	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD SKPD	1	10,000,000			1	2,213,000	-	-		564,600						564,600		564,600	-	5.646	BAPPEDA
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	105,000,000			2	10,074,000		1,179,700		3,864,300						3,864,300		3,864,300	-	3.680	BAPPEDA
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Listrik	75	55,000,000			1	6,769,500	-	-		1,446,600						1,446,600		1,446,600	-	2.630	BAPPEDA
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	108	75,000,000			3	15,000,000	-	-		5,300,000						5,300,000		5,300,000	-	7.067	BAPPEDA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	1,345,328,000			100	190,474,000	25	38,425,000	25	78,455,000					25	78,455,000	25	78,455,000	25	5.832	BAPPEDA
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan					1	33,892,000	-	-											0.000	BAPPEDA	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	35	480,000,000			1	4,576,200	-	-											-	0	BAPPEDA
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1	50,000,000	-	-												0.000	BAPPEDA
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan yang Dibayarkan Setiap Bulannya selama 1 Tahun	4	525,000,000			4	90,483,504	1	19,449,020	1	37,704,735					1	37,704,735	1	37,704,735	25	7.182	BAPPEDA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100	1,414,052,000			100	202,954,300	25	42,098,600		80,849,700						80,849,700		80,849,700	-	5.718	BAPPEDA
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JumLah Kendaraan Roda 4 yang dipelihara	4	215,000,000			4	49,779,000	1	9,839,700	1	27,134,410					1	27,134,410	1	27,134,410	25	12.62065581	BAPPEDA
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	65	90,000,000			20	8,430,000	3	1,500,000	5	3,900,000					5	3,900,000	5	3,900,000	8	4.333	BAPPEDA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor yang dipelihara	1	700,000,000			1	18,533,100	-	-											-	0	BAPPEDA
								6,850,881,176	15.991205	1,095,538,469	42.080682	2,882,897,493												
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)										14														
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan																								
kerjasama antar mitra CSR (swasta/BUMN/BUMD) dengan Pemda																								
komitmen Bupati dan Perangkat Daerah yang bersama-sama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023																								
kerjasama antar perangkat daerah dan Bappeda																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja																								
Respon yang kurang dari mitra CSR																								
Belum konsistennya keterkaitan antar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah																								
Perangkat Daerah kurang memahami cara pengisian dalam pengendalian dan evaluasi																								
Perangkat Daerah Telambat dalam pengiriman data pelaporan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : percepatan kegiatan																								
Penyelesaian perbaikan lapooran akhir kegiatan pengembangan inovasi daerah																								
Penyusunan buku/dokumen data CSR/TJLSP																								
Penyusunan dan pembahasan perencanaan dilakukan lebih awal, agar proses perencanaan sesuai dengan ketentuan																								
Laporan evaluasi direkap per smester dan per triwulan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daeah Kabupaten/Kota berikutnya") :																								
Ada usulan CSR yang terealisasi																								
Perlu nya konsolidasi capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah agar capaian sasaran strategis Perangkat Daerah dapat tercapai																								
Dalam evaluasi pelaporan renja sesuai dengan indikatornya renstra/RPJMD																								
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH																								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		15
I.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100	3,175,920,359,029.00	90.96	13,731,516,563.00	100	14,432,481,664.00	16.33	2,356,109,264.00	35.79	5,165,052,177.00	52.36	7,556,884,802.00	80.01	11,547,006,831.00	80.01	11,547,006,831.00	118.92	25,278,523,394.00	118.92	0.36		
	1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	3,267,000,000.00	99.22	275,898,440.00	100	271,055,160.00	10.74	29,121,200.00	47.31	128,224,100.00	61.69	167,212,790.00	99.24	268,992,750.00	99.24	268,992,750.00	198.46	544,891,190.00	198.46	16.68	BPKD	
	2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	3,168,383,175,529.00	91.47	12,310,392,829.00	100	12,906,419,004.00	17.07	2,203,273,414.00	36.03	4,650,329,696.00	49.87	6,436,453,411.00	77.91	10,055,014,738.00	77.91	10,055,014,738.00	169.38	22,365,407,567.00	169.38	0.71	BPKD	
	3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	996,600,000.00	99.3	404,335,497.00	100	622,407,600.00	9.76	60,746,400.00	38.60	240,260,431.00	79.77	496,523,151.00	99.58	619,798,093.00	99.58	619,798,093.00	198.88	1,024,133,590.00	198.88	102.76	BPKD	
	4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah	100	2,699,823,500.00	100	209,392,900.00	100	285,708,300.00	0.00	-	0.00	-	92.92	265,470,000.00	99.99	285,678,300.00	99.99	285,678,300.00	98.76	495,071,200.00	98.76	18.34	BPKD	
	5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	189,200,000.00	62.47	348,894,350.00	100	202,460,600.00	18.25	36,949,250.00	41.51	84,035,450.00	49.23	99,677,450.00	90.77	183,773,050.00	90.77	183,773,050.00	153.24	532,667,400.00	153.24	281.54	BPKD	
	6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	384,560,000.00	98.7	182,602,547.00	100	144,431,000.00	18.01	26,019,000.00	43.07	62,202,500.00	63.39	91,548,000.00	92.60	133,749,900.00	92.60	133,749,900.00	191.30	316,352,447.00	191.30	34.78	BPKD	
II		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100	392,334,444,847.00	96.98	98,790,911,488.00	100	100,695,452,170.00	0.35	349,636,898.00	41.94	42,234,740,530.00	53.93	54,302,808,112.00	91.16	91,797,153,048.00	91.16	91,797,153,048.00	91.16	190,588,064,536.00	91.16	23.40		
	1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tercapainya persetujuan / penetapan dokumen penganggaran tepat waktu	100	24,040,258,880.00	92.85	1,817,294,106.00	100	1,929,463,860.00	11.11	214,368,500.00	26.24	506,226,000.00	40.04	772,521,100.00	87.11	1,680,775,548.00	87.11	1,680,775,548.00	179.96	3,498,069,654.00	179.96	14.55	BPKD	
	2.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tercapainya koordinasi, rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan	100	8,431,500,000.00	91.18	998,230,343.00	100	827,563,500.00	4.54	37,560,800.00	29.70	245,747,800.00	49.41	408,930,254.00	91.56	757,746,354.00	91.56	757,746,354.00	182.74	1,755,976,697.00	182.74	20.83	BPKD	
	3.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100	13,631,843,060.00	96.38	1,795,687,913.00	100	1,831,912,750.00	3.30	60,539,200.00	18.86	345,561,960.00	54.68	1,001,749,720.00	98.98	1,813,210,602.00	98.98	1,813,210,602.00	195.36	3,608,898,515.00	195.36	26.47	BPKD	
	4.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100	343,261,062,907.00	97.13	93,829,893,726.00	100	95,731,489,300.00	0.04	37,168,398.00	42.95	41,114,104,070.00	54.24	51,923,455,338.00	91.06	87,176,627,744.00	91.06	87,176,627,744.00	188.19	181,006,521,470.00	188.19	52.73	BPKD	
	5.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	100	2,969,780,000.00	100	349,805,400.00	100	375,022,760.00	-	-	6.16	23,100,700.00	52.30	196,151,700.00	98.34	368,792,800.00	98.34	368,792,800.00	198.34	718,598,200.00	198.34	24.20	BPKD	
III		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	100	21,269,050,000.00	99.51	1,173,628,664.00	100	1,327,213,934.00	6.47	85,805,930.00	38.37	441,782,510.00	54.86	728,079,875.00	93.40	1,239,595,792.00	280.59	1,239,595,792.00	192.91	2,413,224,456.00	192.91	11.35		
	1.	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang milik daerah	100	21,269,050,000.00	99.51	1,173,628,664.00	100	1,327,213,934.00	6.47	85,805,930.00	33.29	441,782,510.00	54.86	728,079,875.00	93.40	1,239,595,792.00	93.40	1,239,595,792.00	192.91	2,413,224,456.00	192.91	11.35	BPKD	
IV		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan yang berkelanjutan	100	123,011,913,750.00	53.99	2,685,619,839.00	100	6,395,279,828.00	2.36	150,925,510.00	28.25	1,806,534,542.00	53.76	3,438,268,061.00	65.95	4,217,431,161.00	233.45	4,217,431,161.00	65.95	6,903,051,000.00	65.95	5.61		
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan obyek dan potensi penerimaan daerah	100	123,011,913,750.00	53.99	2,685,619,839.00	100	6,395,279,828.00	2.36	150,925,510.00	28.25	1,806,534,542.00	53.76	3,438,268,061.00	65.95	4,217,431,161.00	65.95	4,217,431,161.00	65.95	6,903,051,000.00	65.95	5.61	BPKD	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										617.54%															
Predikat Kinerja																									
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																									
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *) :																									
*) di isi oleh kepala Bappeda																									
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM																									
	Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sipil	Program Kepegawaian Daerah																							
		Pengembangan Kompetensi ASN																							

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
										I		II		III		IV								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	negara	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan Pendidikan Tugas Belajar (3 Orann)	100.00%	1,240,000,000	0.00%	-	35,523,460	0.00%	-	5.63%	2,000,000	66.15%	23,500,000	83.11%	29,523,460	154.89%	55,023,460.00	4.44%	55,023,460.00	4.44%	55,023,460.00	Sub. Bid. Diklat dan Kompetensi	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia																						
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional																						
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompotensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabtan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikuti DiklatpimTk. III dan IV dan Diklatpim Tk. II/pola pengiriman. (13 orang)	100.00%	10,489,455,400	0.00%	-	740,061,560	0.00%	-	0.41%	3,000,000	23.64%	174,961,030	74.76%	553,235,180	98.80%	731,196,210.00	6.97%	731,196,210.00	6.97%	731,196,210.00	Sub. Bid. Diklat dan Kompetensi	
	Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standar operasional	Program Kepegawaian Daerah																						
		Mutasi dan Promosi ASN																						
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pejabat yang mengikuti Seleksi JPTP Eselon II (10 orang)	100.00%	1,449,880,100	0.00%	-	175,164,600	0.00%	-	72.29%	126,633,000	74.03%	129,676,800	95.93%	168,026,800	242.25%	424,336,600.00	29.27%	424,336,600.00	29.27%	424,336,600.00	Sub. Bid. Mutasi dan Promosi	
		Program Kepegawaian Daerah																						
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																						
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK	Jumlah CPNS/IPPPK yang diadakan (115 CPNS)	100.00%	865,000,000	0.00%	-	66,498,000	5.71%	3,800,000	11.91%	7,918,500	38.29%	25,465,200	99.65%	66,266,100	155.57%	103,449,800	11.96%	103,449,800	11.96%	103,449,800	Sub Bid. Pengadaan dan Pemberhenti an	
		Program Kepegawaian Daerah																						
		Mutasi dan Promosi ASN																						
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah pejabat yang dilantik pada jabatan struktural dan fungsional yang tersedia (150 Peiabat)	100.00%	281,947,150	0.00%	-	36,758,500	4.23%	1,556,150.00	43.56%	16,012,187	63.63%	23,388,237	90.23%	33,168,237	201.65%	74,124,811	26.29%	74,124,811	26.29%	74,124,811	Sub. Bid. Mutasi dan Promosi	
	Meningkatnya disiplin pegawai ASN	Program Kepegawaian Daerah																						
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																						
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus-kasus pelanggaran Disiplin yang tertangani (7 Kasus)	100.00%	640,755,450	0.00%	-	113,719,400	27.68%	31,476,600	23.91%	27,186,660	61.67%	70,135,760	72.93%	82,932,660	186.19%	211,731,680	33.04%	211,731,680	33.04%	211,731,680	Sub Bid. Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	
	Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN	Program Kepegawaian Daerah																						
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																						
		Pengelolaan Pemberiaan Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaa satya lencana 10, 20 dan 30 tahun (300 orang)	100.00%	630,909,800	0.00%	-	71,791,060	6.46%	4,636,400	15.61%	11,208,530	68.50%	49,179,760	75.52%	54,217,160	166.10%	119,241,850	18.90%	119,241,850	18.90%	119,241,850	Sub Bid. Kesejahteraa n dan Penghargaa n	
	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah																						
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																						
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah administrasi ASN yang memasuki masa pensiun (150 Orang)	100.00%	380,000,000	0.00%	-	47,596,000	16.43%	7,818,800	19.07%	9,075,000	61.75%	29,390,400	98.75%	47,000,400	195.99%	93,284,600	24.55%	93,284,600	24.55%	93,284,600	Sub Bid. Pengadaan dan Pemberhenti an	
		Program Kepegawaian Daerah																						

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%												
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
		Mutasi dan Promosi ASN																							
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang memperoleh SK Kenaikan Pangkat Otomatis Periode April dan Oktober (600 Orang)	100.00%	1,324,732,650	0.00%	-	103,752,000	4.75%	4,924,100	8.96%	9,300,000	91.34%	94,765,600	96.28%	99,892,500	201.33%	208,882,200	15.77%	208,882,200	15.77%	208,882,200	Sub. Bid. Mutasi dan Promosi		
	Tersediany akurasi data kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah																							
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																							
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah update data Kenaikan Pangkat PNSD dan Entry data PNS yang memasuki Pensiun (750 orang)	100.00%	213,222,300	0.00%	-	72,215,200	4.76%	3,436,400	11.22%	8,100,000	37.96%	27,416,000	81.26%	58,685,660	135.20%	97,638,060	45.79%	97,638,060	45.79%	97,638,060	Sub. Bid. Informasi Kepagawaia n		
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan Data Kepegawaian (4200 Dokumen/Arsip)	100.00%	168,328,000	0.00%	-	33,956,490	7.47%	2,536,550	20.91%	7,100,000	82.27%	27,936,350	99.20%	33,686,350	209.85%	71,259,250	42.33%	71,259,250	42.33%	71,259,250	Sub. Bid. Informasi Kepagawaia n		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota																							
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
		penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (4 dokumen)	100.00%	237,731,200	0.00%	-	27,902,260	25.09%	7,000,600	20.37%	5,684,900	72.39%	20,199,000	99.96%	27,890,900	217.82%	60,775,400	25.56%	60,775,400	25.56%	60,775,400	Sub Bag. Perencanaa n, Keuangan dan Pelaporan		
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun (5 dok/ Laporan)	100.00%	237,731,200	0.00%	-	28,699,160	25.70%	7,376,730	15.60%	4,476,000	66.41%	19,059,530	99.98%	28,693,530	207.69%	59,605,790	25.07%	59,605,790	25.07%	59,605,790	Sub Bag. Perencanaa n, Keuangan dan Pelaporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (14 bulan)	100.00%	16,516,080,000	0.00%	-	1,600,794,165	19.05%	304,992,731	23.95%	383,368,656	69.24%	1,108,352,947	91.85%	1,470,378,758	204.09%	3,267,093,092	19.78%	3,267,093,092	19.78%	3,267,093,092	Sub Bag. Perencanaa n, Keuangan dan Pelaporan		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (12 bulan)	100.00%	284,722,100	0.00%	-	35,034,300	23.60%	8,267,800	23.65%	8,284,700	67.54%	23,662,400	99.99%	35,029,300	214.77%	75,244,200	26.43%	75,244,200	26.43%	75,244,200	Sub Bag. Perencanaa n, Keuangan dan Pelaporan		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Administrasi Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (12 Bulan)	100.00%	38,947,500	0.00%	-	15,062,600	16.96%	2,554,600	19.59%	2,951,300	50.10%	7,546,400	99.54%	14,992,900	186.19%	28,045,200	72.01%	28,045,200	72.01%	28,045,200	Sub Bag. Umum dan Kepegawaia n		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase keikutsertaan pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi (100%)	100.00%	647,316,000	0.00%	-	151,731,000	26.20%	39,750,000	31.77%	48,209,307	66.57%	101,014,651	99.88%	151,549,896	224.43%	340,523,854	52.61%	340,523,854	52.61%	340,523,854	Sub Bag. Umum dan Kepegawaia n		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (5 Unit)	100.00%	748,199,800	0.00%	-	28,247,800	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	28,247,800	100.00%	28,247,800	3.78%	28,247,800	3.78%	28,247,800	Sub Bag. Umum dan Kepegawaia n		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
				5	6	7	8	9		10		11		12		13= 6 + 12			14 = 13/5x100%						
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Administrasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (12 Bulan)	100.00%	198,240,000	0.00%	-	54,288,000	21.62%	11,739,584	19.83%	10,767,624	63.13%	34,272,178	88.64%	48,119,698	193.23%	104,899,084	52.92%	104,899,084	52.92%	104,899,084		Sub Bag. Umum dan Kepegawaia n	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Kebersihan Kantor dan pengamanan kantor (12 Bulan)	100.00%	166,579,100	0.00%		73,878,080	23.97%	17,707,360	24.20%	17,875,760	70.21%	51,867,720	95.78%	70,758,920	214.15%	158,209,760	94.98%	158,209,760	94.98%	158,209,760		Sub Bag. Umum dan Kepegawaia n	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah																							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (3 Unit)	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (3 Unit)	100.00%	182,710,000	0.00%	-	41,230,000	28.03%	11,557,884	19.94%	8,220,000	67.62%	27,877,884	98.19%	40,483,884	213.78%	88,139,652	48.24%	88,139,652	48.24%	88,139,652		Sub Bag. Umum dan Kepegawaia n	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (18 Unit)	100.00%	70,720,000	0.00%	-	19,220,000	29.14%	5,600,000	23.67%	4,550,000	66.49%	12,780,000	99.53%	19,130,000	218.83%	42,060,000	59.47%	42,060,000	59.47%	42,060,000		Sub Bag. Umum dan Kepegawaia n	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (1 Unit)	100.00%	652,250,000	0.00%	-	67,925,000	0.00%	-	15.67%	10,647,000	69.00%	46,868,000	98.44%	66,868,000	183.12%	124,383,000.00	19.07%	124,383,000.00	19.07%	124,383,000.00		Sub Bag. Umum dan Kepegawaia n	
	Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan aset	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota																							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 Laporan/ Dokumen)	100.00%	57,116,050	0.00%	-	8,399,600	100.00%	8,399,600	0.00%	-	100.00%	8,399,600	100.00%	8,399,600	300.00%	25,198,800	44.12%	25,198,800	44.12%	25,198,800		Sub Bag. Perencanaa n, Keuangan dan Pelaporan	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										Predikat Kinerja															
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																									
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *) :																									
*) di isi oleh kepala Bappeda																									
SEKRETARIAT DPRD																									
	Meningkatkan Pelayanan Publik bagi anggota DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			49,698,218,000		29,478,575,692		15,131,126,370	18.55%	2,816,674,792	41.38	6,282,403,611			21%	3,143,796,454	0.90	44,609,702,062	0.90	44,609,702,062				
		Indikator Program : Indeks Kinerja Sekretariat DPRD	100 Persen																						
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 Persen	601,000,000	261,173,000	71,466,000	0.00%	-	92.21	65,900,000			48.31%	51,150,000	0.55	332,639,000	0.55	332,639,000						
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	7,097,118,000	4,022,203,890	1,892,879,368	13.55%	256,416,383	35.77	677,009,754			14.73%	297,537,855	0.83	5,915,083,258	0.83	5,915,083,258						
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 Persen	2,416,000,000	847,898,760	455,430,600	17.69%	80,555,000	25.79	117,461,700			26.28%	91,148,600	0.54	1,303,329,360	0.54	1,303,329,360						
		Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Adminstras Keuangani dan kesejahteraan DPRD yang dilayani	100 Persen	32,750,000,000	21,647,355,400	11,525,439,492	20.49%	2,361,386,872	43.3	5,221,506,160			23.28%	2,526,049,315	1.01	33,172,794,892	1.01	33,172,794,892						
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Bai	100 Persen	3,942,100,000	1,877,108,327	511,528,810	17.36%	88,815,000	20.46	104,655,000			20.99%	155,335,092	0.61	2,388,637,137	0.61	2,388,637,137						

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5	Rp	6	Rp	7	Rp	I		II		III		IV		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4																						
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	844,000,000		171,122,150		410,036,200	0	-	0	-					0	-	0.69	581,158,350	0.69	581,158,350		
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Lancar	Persentase Urusan Perangkat Daerah Berjalan Dengan Baik dan Lancar	100 Persen	1,243,000,000		563,442,176		249,901,200	10.79%	26,864,537		85,757,997					7.87%	21,446,592	0.65	813,343,376	0.65	813,343,376		
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	805,000,000		88,271,800		65,344,700	4.04%	2,637,000		10,113,000					4.57%	1,129,000	0.19	153,616,500	0.19	153,616,500		
	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			35,912,400,000		23,924,301,020		12,031,616,820	21.95%	2,409,195,626	53.43	5,864,002,247					25.78%	3,102,069,752	1.00	35,955,917,840	1.00	35,955,917,840		
			Indikator Program : Jumlah rancangan perda yang ditetapkan bersama (Legislatif dan Eksekutif)	44 Perda	-																-	0.00	-		
			Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas Anggota DPRD yang dilayani	100 Persen	15,212,234,000		10,510,776,410		5,206,767,200	26.79%	1,394,846,876	67.56	3,517,772,619					28.51%	1,414,855,800	1.03	15,717,543,610	1.03	15,717,543,610	
			Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Ranperda Yang dibahas	44 Perda	6,897,056,000		44,754,171,100		2,363,392,000	17.09%	403,877,250	50.55	1,194,698,193					17.32%	383,405,852	6.83	47,117,563,100	6.83	47,117,563,100	
			Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	4,750,000,000		2,923,269,500		882,519,800	0.00%	-	48.9	431,589,900					29.67%	423,868,500	0.80	3,805,789,300	0.80	3,805,789,300	
			Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	100 Persen	4,463,000,000		3,579,753,010		1,364,945,300	18.66%	254,676,000	24.29	331,520,945					23.18%	512,259,600	1.11	4,944,698,310	1.11	4,944,698,310	
			Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	95 Persen	4,590,110,000		2,435,085,000		1,157,910,000	30.73%	355,795,500	33.54	388,420,500					30.20%	367,680,000	0.78	3,592,995,000	0.78	3,592,995,000	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										14.51%		4132.15%		#REF!		#REF!		21.45%		#REF!					
Predikat Kinerja																									
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																									
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *) :																									
*) di isi oleh kepala Bappeda																									
SEKRETARIAT DAERAH																									
	1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Pelaksanaan Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum			98	9,961,832,710.00	#VALUE!	8,838,827,810.00	36.43	791,775,980.00	31.33	4,816,457,900.00				5,608,233,880.00	67.76	5,608,233,880.00	144	15,555,788,590.00	#DIV/0!	3,111,157,718.00		
		Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Jenis Pelayanan Dasar Pemerintah dan Penegasan Tapal Batas Wilayah			100.00	145,773,950	0	124,772,800	54.14	93,672,800	12.53	30,455,000					66.67	124,127,800	165.93	269,901,750	#DIV/0!	53,980,350		
1		Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Dokumen SPM			100.00	11,760,500	6 Dokumen	24,819,800	90.00	21,239,800	10.00	3,455,000.00					100.00	24,694,800	200	36,455,300	#DIV/0!	7,291,060.00		
2		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Berdinnya Pilar Batas Daerah/Wilayah antar Kabupaten			100.00	99,955,000	1 Dokumen	99,953,000	72.42	72,433,000	27.58	27,000,000.00					100.00	99,433,000	200	199,388,000	#DIV/0!	39,877,600.00		
3		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi			100.00	34,058,450	0.00	-	0.00		0	-					0.00	-	100	34,058,450	#DIV/0!	6,811,690.00		
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan - Kegiatan di Bidang Keagamaan			90.67	8,833,502,260	0	7,922,619,260	25.00	483,252,180	30.95	4,464,332,650					55.95	4,947,584,830	88	13,781,087,090	#DIV/0!	2,756,217,418		
4		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tersedianya Data Keagamaan dan Pelaksanaan Kegiatan Dibidang Keagamaan			100.00	970,659,610	12 Dokumen	1,523,052,060	25.00	36,464,160	27.84	568,256,200.00					52.84	604,720,360	100	1,575,379,970	#DIV/0!	315,075,994.00		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5	6	7	8	9		10		11		12		13= 6 + 12				14 = 13/5x100%				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
5		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Koordinasi dan Permusunan Kebijakan Pemerintah Dibidang Kesehatan, Penanganan Sosial dan Pendidikan serta Pemberian Bantuan Hibah Bidang Kesehatan			100.00	864,480,000	12 Dokumen	830,000,000	25.00	4,576,500	10.00	288,731,600.00			35.00	293,308,100	85	1,157,788,100	#DIV/0!	231,557,620.00			
6		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tersedianya Bahan Koordinasi dan Perencanaan Dibidang Kepemudaan, Budaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang Informatika			72.02	6,998,362,650	12 Dokumen	5,569,567,200	25.00	442,211,520	55.00	3,607,344,850.00			80.00	4,049,556,370	80	11,047,919,020	#DIV/0!	2,209,583,804.00			
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terkoordinirnya Penataan / Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Terfasilitasinya Bantuan Hukum			95.00	982,556,500	0	774,097,750	26.23	207,853,000	39.19	314,390,250			65.42	522,243,250	160	1,504,799,750	#DIV/0!	300,959,950			
7		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah, Jumlah Perda, Jumlah Keputusan Bupati yang Dianalisis, Jumlah Perjanjian Kerjasama MOU dan Kebijakan Lainnya			95.00	160,868,300	1200 Dokumen (Ranperda/ Ranperbup MOU/PKS)	137,731,000	29.55	40,694,700	25.8	35,265,000.00			55.33	75,959,700	150	236,828,000	#DIV/0!	47,365,600.00			
8		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Aparatur Pemerintah dan Desa yang Menerima Bantuan Hukum terkait Tugasnya dan Masyarakat yang Menerima Bantuan Hukum			95.00	690,701,300	50 Kasus	508,666,750	20.00	129,959,800	50.0	225,946,150.00			70.00	355,905,950	165	1,046,607,250	#DIV/0!	209,321,450.00			
9		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen Hukum yang telah di Himpun			95.00	130,986,900	1200 Dokumen (Ranperda/ Ranperbup MOU/PKS)	127,700,000	29.13	37,198,500	41.8	53,179,100.00			70.93	90,377,600	166	221,364,500	#DIV/0!	44,272,900.00			
		Fasilitasi Kerjasama Daerah				0.00	-	0	17,338,000	40.36	6,998,000	42.64	7,280,000			83.00	14,278,000	80	14,278,000	#DIV/0!	2,855,600			
		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			0.00	-	20 Dokumen	17,338,000	40.36	6,998,000	42.6	7,280,000.00			83.00	14,278,000	80	14,278,000	#DIV/0!	2,855,600.00			
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Pelaksanaan Perekonomian, Pembangunan dan Pengelolaan Barang dan Jasa			98.67	1,170,784,560.00	0.00	728,286,350.00	27.49	214,164,090.00	40.68	248,348,040.00			67.96	462,512,130.00	173	1,633,296,690.00	#DIV/0!	326,659,338.00			
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Perekonomian			99.00	220,782,640.00	0.00	148,286,600.00	24.19	36,208,900.00	53.48	76,824,300.00			77.67	113,033,200.00	177	333,815,840.00	#DIV/0!	66,763,168.00			
10		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kinerja BUMD dan BLUD lebih Maksimal			99.00	79,826,950	1 Dokumen	68,286,800	25.40	17,341,500	59.6	38,008,400.00			85.00	55,349,900	184	135,176,850	#DIV/0!	27,035,370.00			
11		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian Harga dan Sistribusi Bahan Pokok			99.00	95,443,590	1 Laporan	39,999,900	22.42	8,967,500	50.6	19,691,000.00			73.00	28,658,500	172	124,102,090	#DIV/0!	24,820,418.00			
12		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Adanya Rumusan dan Regulasi UMKM Bagi Para Pelaku Usaha Orano Kecil			99.00	45,512,100	1 Dokumen	39,999,900	24.75	9,899,900	50.3	19,124,900.00			75.00	29,024,800	174	74,536,900	#DIV/0!	14,907,380.00			
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan			100.00	198,916,660.00	0	139,999,760.00	16.44	16,738,000.00	36.56	53,999,100.00			53.00	70,737,100.00	153	269,653,760.00	#DIV/0!	53,930,752.00			
13		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			100.00	53,504,950	12 Dokumen	34,076,400	19.33	6,588,300	39.7	13,416,600.00			59.00	20,004,900	159	73,509,850	#DIV/0!	14,701,970.00			
14		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			100.00	75,418,400	12 Laporan	40,935,400	15.00	4,769,500	40.0	17,865,700.00			55.00	22,635,200	155	98,053,600	#DIV/0!	19,610,720.00			
15		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Data Objek Evaluasi dan Pelapoam			100.00	69,993,310	8 Laporan	64,987,960	15.00	5,380,200	30.0	22,716,800.00			45.00	28,097,000	145	98,090,310	#DIV/0!	19,618,062.00			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya Sistem Pelaksanaan dan Pengawasan Proses Pengadaan Barang dan Jasa			96.67	573,004,900.00	0	320,000,100.00	39.39	125,859,760.00	19.27	56,161,240.00					58.67	182,021,000.00	155	755,025,900.00	#DIV/0!	151,005,180.00	
16		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pelayanan Proses Pengadaan Barang Jasa melalui UKPBJ			95.00	211,051,900	580 Dokumen	116,347,500	39.49	45,943,100	20.5	19,847,000.00					60.00	65,790,100	155	276,842,000	#DIV/0!	55,368,400.00	
17		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara Elektronik (e-Procurement)			95.00	190,320,200	75 Dokumen	114,954,300	38.57	44,335,260	21.4	23,844,040.00					60.00	68,179,300	155	258,499,500	#DIV/0!	51,699,900.00	
18		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan serta Penyelesaian Sanggah atas Proses Pengadaan Barang/Jasa			100.00	171,632,800	7 Orang	88,698,300	40.12	35,581,400	15.9	12,470,200.00					56.00	48,051,600	156	219,684,400	#DIV/0!	43,936,880.00	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pelaksanaan Pemantauan terkait Kebijakan Sumber Daya Alam			99.00	178,080,360.00	0	119,999,890.00	29.92	35,357,430.00	53.41	61,363,400.00					82.50	96,720,830.00	182	274,801,190.00		54,960,238.00	
19		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Struktur Pertanian, Kelautan, Kehutanan dan Perikanan			99.00	43,100,800	1 Dokumen	30,000,000	32.45	9,736,300	52.55	14,926,000.00					85.00	24,662,300	184	67,763,100	#DIV/0!	13,552,620.00	
20		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Hasil Pemantauan dan Kebijakan Sektor Pertambangan dan Lingkungan Hidup			99.00	84,998,660	1 Dokumen	49,999,890	26.97	13,485,830	53.03	25,672,400.00					80.00	39,158,230	179	124,156,890	#DIV/0!	24,831,378.00	
21		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Wilayah yang memiliki energi dan air			99.00	49,980,900	1 Dokumen	40,000,000	30.34	12,135,300	54.66	20,765,000.00					85.00	32,900,300	184	82,881,200	#DIV/0!	16,576,240.00	
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelaksanaan Penunjang Urusan dan Administrasi Pemerintah Daerah			59.06	39,546,586,498.00	#VALUE!	33,628,782,065.00	24.54	7,109,804,712.00	27.16	9,735,130,308.00					52.90	16,844,935,020.00	#REF!	56,391,521,518.00	#DIV/0!	#####	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja tepat Waktu			37.80	489,879,253.00	0	481,410,050.00	29	164,955,988.00	18	61,323,800.00					47.00	226,279,788.00	85	716,159,041.00		143,231,808.20	
22		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun dan ditetapkan/Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan		4	89,220,200	4 Dokumen	104,436,490	35.00	34,685,760	16.00	16,055,400.00						51.00	50,741,160	55	139,961,360	#DIV/0!	27,992,272.00	
23		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perubahan yang Tersusun		9	122,387,300	9 Dokumen	117,634,160	35.00	37,025,930	15.00	18,892,900.00						50.00	55,918,830	59	178,306,130	#DIV/0!	35,661,226.00	
24		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dan DPA Perubahan yang Tersusun		12	65,702,300	9 Dokumen	72,087,200	0	0	0.00	-						0.00	-	12	65,702,300	#DIV/0!	13,140,460.00	
25		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Sekretariat Daerah		4	42,100,000	4 Laporan	38,785,700	18.52	7,183,200	32.48	12,615,500.00						51.00	19,798,700	55	61,898,700	#DIV/0!	12,379,740.00	
26		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen LKPJ yang Tersusun Dan dilaporkan - Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun Dan dilaporkan - Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun dan dilaporkan		160	170,469,453	60 Dokumen	148,466,500	57.97	86,061,098	25.03	13,760,000.00						83.00	99,821,098	243	270,290,551	#DIV/0!	54,058,110.20	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		39.00	7,886,006,265.00	33	9,114,937,287.00	53	1,672,988,657.00	12	2,218,604,323.00						65.00	3,891,592,980.00	104	11,777,599,245.00	#DIV/0!	2,355,519,849.00	
27		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan		12	7,713,360,825	12 Bulan	8,920,234,517	25.00	1,598,748,067	25.00	2,190,585,363.00						50.00	3,789,333,430	62	11,502,694,255	#DIV/0!	2,300,538,851.00	
28		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		100	138,235,240	100.00	160,428,070	35.00	43,965,890	10.00	24,018,960.00						45.00	67,984,850	145	206,220,090	#DIV/0!	41,244,018.00	
29		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang di susun		5	34,410,200	5 Jenis Laporan	34,274,700	100.00	30,274,700	0.00	4,000,000.00						100.00	34,274,700	105	68,684,900	#DIV/0!	13,736,980.00	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										I		II		III						IV				
					5	6		7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%					15				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertatanya pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100.00	674,525,121.00	100	651,632,900.00	30	145,878,400.00	15	147,395,580.00					45.00	293,273,980.00	145	967,799,101.00	#DIV/0!	193,559,820.20	
30		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			100.00	674,525,121	100.00	651,632,900.00	30.00	145,878,400.00	15.00	147,395,580.00					45.00	293,273,980	145	967,799,101	#DIV/0!	193,559,820.20	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian			12.50	448,672,850.00	0	90,818,500.00	9.75	11,982,000.00	19.06	25,261,500.00					43.22	37,243,500.00	42	485,916,350.00	#DIV/0!	97,183,270.00	
31		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas			13	353,097,500	6 Paket	44,960,000	20.26	9,109,000	51.17	22,925,000.00					71.43	32,034,000	84	385,131,500	#DIV/0!	77,026,300.00	
32		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peserta yang mengikuti Bimtek dan pendidikan			12	19,267,850	0.00	-	0.00	-	0.00	-					0.00	-		19,267,850		3,853,570.00	
33		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kecamatan /Desa/Kelurahan dan Sekolah dalam Pembinaan Hukum melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum			95	76,307,500	600 Orang	45,858,500	9.00	2,873,000	6.00	2,336,500.00					15.00	5,209,500	110	81,517,000	#DIV/0!	16,303,400.00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			95.00	8,484,094,087.00		8,690,275,000.00	25.14	1,878,099,035.00	22.56	2,443,571,006.00					47.70	4,321,670,041.00	143	12,805,764,128.00	#DIV/0!	2,561,152,825.60	
34		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			100.00	224,392,400	100.00	254,939,000	20.42	52,047,000	22.26	56,754,300.00					42.68	108,801,300	143	333,193,700	#DIV/0!	66,638,740.00	
35		Facilities Kunjungan Tamu	Pelayan Tamu Pemkab			100.00	5,152,321,157	100.00	4,789,350,000	25.00	1,143,132,364	28.41	1,414,822,919.00					53.41	2,557,955,283	153	7,710,276,440	#DIV/0!	1,542,055,288.00	
36		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas			85.00	3,107,380,530	12 Laporan	3,645,986,000	30.00	682,919,671	17.00	971,993,787.00					47.00	1,654,913,458	132	4,762,293,988	#DIV/0!	952,458,797.60	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Pemerintah Daerah			88.22	6,030,963,800.00	0	1,229,194,500.00	4.35	70,265,000.00	70.66	1,101,460,500.00					75.00	1,171,725,500.00	163	7,202,689,300.00	#DIV/0!	1,440,537,860.00	
37		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bertambahnya Jumlah Kendaraan			100.00	4,312,450,000	0.00	-	0.00		0.00	-					0.00	-	100	4,312,450,000	#DIV/0!	862,490,000.00	
38		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bertambahnya Jumlah Kendaraan			100.00	67,540,000	4 Unit	772,424,000	17.38	70,265,000	82.62	644,690,000.00					100.00	714,955,000	200.00	782,495,000	#DIV/0!	156,499,000.00	
39		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur pada Gedung kantor Dan Rumah Jabatan			92.86	879,298,400	10 Unit	11,500,000	0.00	0	100.00	11,500,000.00					100.00	11,500,000	193	890,798,400	#DIV/0!	178,159,680.00	
40		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Bertambah			60.00	771,675,400	10 Unit	445,270,500	0.00	0	100.00	445,270,500.00					100.00	445,270,500	160	1,216,945,900	#DIV/0!	243,389,180.00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			37.33	6,916,245,181.00	0	6,754,390,956.00	24.09	1,649,599,578.00	26.45	1,733,937,056.00					50.53	3,383,536,634.00	118	10,299,781,815.00	#DIV/0!	2,059,956,363.00	
41		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Pendukung Pelaksanaan Perkantoran			12	4,823,576,881	12 Laporan	5,249,975,056	30.00	1,339,540,578	20.79	1,326,973,056.00					50.79	2,666,513,634	63	7,490,090,515	#DIV/0!	1,498,018,103.00	
42		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pendukung Pelaksanaan Perkantoran			100.00	503,875,000	10 Laporan	504,422,500	22.70	114,500,000	36.04	181,821,000.00					58.74	296,321,000	159	800,196,000	#DIV/0!	160,039,200.00	
43		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia			91.39	1,588,793,300	12 Laporan	999,993,400	19.56	195,559,000	22.51	225,143,000.00					42.07	420,702,000	133	2,009,495,300	#DIV/0!	401,899,060.00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			0.00	2,913,907,471.00	0	2,008,295,770.00	14.89	381,092,872.00	36.84	665,927,682.00					51.74	1,047,020,554.00	144	3,960,928,025.00	#DIV/0!	792,185,605.00	
44		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pelayanan dan Perzinan Kendaraan Dinas Jabatan			96.32	487,454,861	12 Unit	521,100,000	17.38	90,556,952	35.57	185,376,210.00					52.95	275,933,162	149	763,388,023	#DIV/0!	152,677,604.60	
45		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Pelayanan dan Perzinan Kendaraan Dinas Jabatan			94.04	1,223,702,500	62 Unit	1,093,897,000	25.20	275,635,920	30.08	329,058,122.00					55.28	604,694,042	149	1,828,396,542	#DIV/0!	365,679,308.40	
46		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			95.28	94,900,000	10 Unit	87,700,000	16.99	14,900,000	45.09	39,540,000.00					62.08	54,440,000	157	149,340,000	#DIV/0!	29,868,000.00	
47		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			85.20	1,107,850,110	10 Unit	305,598,770	0.00	0	36.63	111,953,350.00					36.63	111,953,350	122	1,219,803,460	#DIV/0!	243,960,692.00	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Administrasi Keuangan dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			29.00	952,603,510.00	0	886,291,162.00	29.48	239,107,713.00	19.59	219,002,780.00					49.07	458,110,493.00	84	1,410,714,003.00	#DIV/0!	282,142,800.60	
48		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Menerima Gaji dan Tunjangan			12	165,511,510	12 Bulan	171,291,162	25.00	35,677,713	25.00	47,532,780.00					50.00	83,210,493	62	248,722,003	#DIV/0!	49,744,400.60	
49		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas			4	169,345,000	12 Paket	80,000,000	66.04	52,830,000	26.82	20,870,000.00					92.86	73,700,000	97	243,045,000	#DIV/0!	48,609,000.00	
50		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jaminan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati			23.73	17,747,000	2 Orang	35,000,000	1.88	600,000	1.55	600,000.00					3.43	1,200,000	27	18,947,000	#DIV/0!	3,789,400.00	
51		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Bupati			100.00	600,000,000	12 Bulan	600,000,000	25.00	150,000,000	25.00	150,000,000.00					50.00	300,000,000	150	900,000,000	#DIV/0!	180,000,000.00	
		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya Kebutuhan Rumah Tangga			98.28	2,991,250,000.00	0	2,509,350,000.00	27.50	663,200,000.00	28.74	717,000,000.00					56.24	1,380,200,000.00	155	4,371,450,000.00	#DIV/0!	874,290,000.00	
52		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Tersedia			96.55	1,785,050,000	1 Paket	1,608,900,000	25.00	393,900,000	26.86	440,450,000.00					51.86	834,350,000	148	2,619,400,000	#DIV/0!	523,880,000.00	
53		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Tersedia			100.00	1,206,200,000	1 Paket	900,450,000	30.00	269,300,000	30.62	276,550,000.00					60.62	545,850,000	161	1,752,050,000	#DIV/0!	350,410,000.00	
		Penataan Organisasi	Terbentuknya Unit Kerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Ketentuan Perundang - undangan			80.00	956,886,720.00	0	480,000,000.00	31.44	156,091,229.00	27.78	128,628,517.00					59.21	284,719,746.00	139	1,241,606,466.00	#DIV/0!	248,321,293.20	
54		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terselenggaranya Revisi Anjab sesuai Revisi Perubahan SOTK			80.00	432,397,091	38 Dokumen	170,000,000	38.35	65,199,760	37.97	63,287,680.00					76.32	128,487,440	156	560,884,531	#DIV/0!	112,176,906.20	
55		Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Prosentase SKPD yang Melaksanakan Tertib Tata Naskah Dinas Sesuai Peraturan Bupati dan Inovasi terhadap Layanan Publik			80.00	195,327,880	38 Laporan	100,000,000	49.28	49,279,300	24.40	23,210,900.00					73.68	72,490,200	154	267,818,080	#DIV/0!	53,563,616.00	
56		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Prosentase Pemkab Bantaeng dalam yang Menyusun Road Map dalam Pelaksanaan 8 Area Peubahan Reformasi Birokrasi			80.00	59,810,000	38 Dokumen	60,000,000	17.28	10,370,500	27.46	15,225,037.00					44.74	25,595,537	125	85,405,537	#DIV/0!	17,081,107.40	
57		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Prosentase SKPD yang Menyusun LKJ dan PK tepat waktu			80.00	269,351,749	38 Dokumen	150,000,000	20.83	31,241,669	21.28	26,904,900.00					42.11	58,146,569	122	327,498,318	#DIV/0!	65,499,663.60	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terselenggaranya Seluruh Kegiatan Pemkab Bantaeng			91.59	801,552,240.00	0	732,185,940.00	15.22	76,544,240.00	29.85	273,017,564.00					45.07	349,561,804.00	137	1,151,114,044.00	#DIV/0!	230,222,808.80	
58		Fasilitasi Keprotokolan	Terciptanya Pelayanan Keprotokoleran Pejabat dalam Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dengan tertib, aman dan lancar			85.36	512,094,200	12 Laporan	538,469,800	6.65	35,809,200	44.10	237,467,564.00					50.75	273,276,764	136	785,370,964	#DIV/0!	157,074,192.80	
59		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terkoordinasinya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			97.81	289,458,040	12 Laporan	193,716,140	23.78	40,735,040	15.60	35,550,000.00					39.38	76,285,040	137	365,743,080	#DIV/0!	73,148,616.00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja										29.49	8,115,744,782	33.05	14,799,936,248	-	-	-	5,608,233,880	62.87	22,915,681,030	#REF!	73,580,606,798	#DIV/0!	14,716,121,360	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya*:																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berikutnya*:																								
INSPEKTORAT DAERAH																								
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)																					

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				5	6	6	7	8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																															
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran :	20	63.083.108	20	192.192.420	20	59.347.000	27.9%	16.546.400	30.7%	18.236.200	18.8%	11.128.200	22.6%	13436200		59.347.000	251.539.420	0	50.307.884											
	Dok		Dok	Dok																													
	Hasil :		100	100																													
	Persentase dokumen dan perencanaan evaluasi yang telah dibuat		%	%																													
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																															
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran :	12	4.039.477.310	12	11.962.996.475	12	3.073.393.552	19.8%	607.021.656	25.4%	781.255.814	27.4%	840.995.068	23.0%	707346285		2.936.618.823	14.899.615.298	0	2.979.923.060											
	Bulan		Bulan	Bulan																													
	Hasil :		100	100																													
	Jumlah Dokumen SPJ dan SP2D Gaji dan Tunjangan ASN yang terbit		%	%																													
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran :	12	51.779.530	12	162.701.020	12	56.078.200	30.3%	16.981.000	25.2%	14.132.800	25.2%	14.108.600	19.4%	10855800		56.078.200	218.779.220	0	43.755.844											
	Bulan		Bulan	Bulan																													
	Hasil :		100	100																													
	Jumlah Dokumen SPJ dan SP2D GU, TU, LS yang terbit selama 12 bulan		%	%																													
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																															
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran :	45	112.520.320	45	322.853.933	45	642.214.600	4.5%	28.858.800	2.0%	12.756.500	14.2%	91.459.500	78.2%	502035290		635.110.090	957.964.023	0	191.592.805											
	Orang		Orang	Orang																													
	Hasil :		100	100																													
	Persentase terlaksananya Kegiatan PKS Inspektorat dan Terpenuhihnya Diklat Penempatan APJP		%	%																													
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Keluaran :	105	527.376.660	105	1.116.865.750	105	196.981.500	73.5%	144.738.400	26.4%	51.991.500	0.1%	250.600	0.0%	0		196.980.500	1.313.846.250	0	262.769.250											
	Orang		Orang	Orang																													
	Hasil :		100	100																													
	Persentase terlaksananya Diklat ASN OPD dan Diklat Substansial dan Non Substansial APJP		%	%																													
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																															
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran :	20		20		97	10.324.200	14.5%	1.500.000	33.9%	3.500.000	32.2%	3.324.300	19.4%	2000000		10.324.300	10.324.300	0	2.064.860											
	Paket		Paket	Kali																													
	Hasil :		100	100																													
	Persentase pemenuhan Peralatan rumah tangga		%	%																													
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran :	12		12		97	49.149.600	7.1%	3.500.000	13.4%	6.575.200	15.3%	7.500.000	64.2%	31574400		49.149.600	49.149.600	0	9.829.920											
	LAp		LAp	Kali																													
	Hasil :		100	100																													
	Persentase Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		%	%																													
			Keluaran :	95	337.953.000	95	1.039.248.095	97	298.870.000	21.9%	65.343.350	13.7%	41.090.000	36.7%	109.788.632	26.3%	78570000		294.791.982	1.334.040.077	0	266.808.015											

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
				5	6	7	8	I		II		III		IV		12	13= 6 + 12			14 = 13/5x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi yang dilaksanakan Hasil : Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali 100 %		Kali 100 %		Kali 100 %														
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah kendaraan dinas roda dua yang tersedia Hasil : Tersedianya Kendaraan Dinas barang milik daerah	5 Unit 100 %	121.000.000	5 Unit 100 %	33.770.000	5 Unit 100 %	60.000.000	0.0% 0 96.8% 58.068.000 0.0% 0 0.0% 0								58.068.000	91.838.000	0	18.367.600	
		Pengadaan Mebel	Keluaran : Jumlah peralatan kursi, meja lemari dan mebel lainnya yang tersedia Hasil : Tersedianya Peralatan Mebel Kantor barang milik daerah	10 unit 100 %	8.722.890	10 unit 100 %	7.209.000	10 unit 100 %	2.900.000	0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0							2900000	2.900.000	10.109.000	0	2.021.800	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah peralatan laptop, printer dan mesin lainnya yang tersedia Hasil : Tersedianya Peralatan dan Mesin barang milik daerah	15 unit 100 %	60.984.000	15 unit 100 %	305.289.900	15 unit 100 %	61.327.300	0.0% 0 0.0% 0 98.8% 60.577.100 0.8% 500000								61.077.100	366.367.000	0	73.273.400	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Terpenuhinya kewajiban pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik Hasil : Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan kantor	12 Bln 100 %	45.552.260	12 Bln 100 %	150.922.036	12 Bln 100 %	77.812.800	20.6% 16,064,765 12.5% 9,718,358 15.2% 11,823,556 20.0% 15587202								53,193,881	204,115,917	0	40,823,183	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Terpenuhinya peningkatan pelayanan administrasi umum kantor selama 12 bulan Hasil : Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan kantor	12 Bln 100 %	89.653.967	12 Bln 100 %	258.871.098	12 Bln 100 %	80.559.920	16.6% 13,375,000 33.6% 27,095,000 20.2% 16,262,520 29.3% 23633000								80,365,520	339,236,618	0	67,847,324	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah pemakaian bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan termasuk sopir dan jumlah kendaraan yang dioperasikan Hasil : Persentase pelaksanaan dan ketersediaan barang milik daerah	12 Bln 100 %	68.499.310	12 Bln 100 %	166.324.742	12 Bln 100 %	85.010.000	26.4% 22,444,217 29.5% 25,100,000 22.8% 19,418,000 21.2% 18029283								84,991,500	251,316,242	0	50,263,248	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara Hasil : Persentase pelaksanaan dan ketersediaan barang milik daerah	12 Bln 100 %	9.004.518	12 Bln 100 %	23.589.025	12 Bln 100 %	22.555.000	8.0% 1,800,000 34.2% 7,721,000 29.7% 6,710,000 28.0% 6324000								22.555.000	46.144.025	0	9.228.805	
			Keluaran :	1	272.335.426	1	556.042.743	1	179.668.800	0.0% 0 5.2% 9.325.000 0.0% 0 90.3% 162170300								171.495.300	727.538.043	0	145.507.609	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara dan direhabilitasi Hasil : Persentase pelaksanaan dan ketersediaan barang milik daerah	Keg 100 %		Keg 100 %		Keg 100 %															
	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berkinerja	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berkinerja																				
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal																					
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang diperiksa Hasil : Persentase terbitnya LHE dan LHP	8 Lap 100 %	246.324.540	8 Lap 100 %	418.726.600	8 Lap 100 %	37.940.000	0.0% - 0.0% -	0.0% - 0.0% -	1.8% 700.000	40.3% 15285000	15.985.000	434.711.600	0	86.942.320						
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang diaudit dan diopname kas Hasil : Persentase terbitnya LHE dan LHP	40 Lap 100 %	1.019.243.500	40 Lap 100 %	3.082.425.000	40 Lap 100 %	895.069.500	1.0% 9.340.000	0.8% 7.392.750	47.4% 423.996.000	49.7% 444785750	885.514.500	3.967.939.500	0	793.587.900						
		Reviu Laporan Kinerja	Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan yang direviu Hasil : Persentase terbitnya LHE dan LHP	1 Lap 100 %	20.530.070	1 Lap 100 %	44.967.100	1 Lap 100 %	19.093.000	0.0% - 2.2% 413.000	0.0% - 0.0% 0	94.3% 18010000	18.423.000	63.390.100	0	12.678.020							
		Reviu Laporan Keuangan	Keluaran : Jumlah LKPD yang di reviu Hasil : Persentase terbitnya LHE dan LHP	1 Lap 100 %	40.912.520	1 Lap 100 %	69.962.600	1 Lap 100 %	20.400.000	0.0% - 0.0% 0	0.0% - 0.0% 0	8.4% 1720000	-	69.962.600	0	13.992.520							
		Pengawasan Desa	Keluaran : Jumlah desa yang diaudit Hasil : Persentase terbitnya LHE dan LHP	46 Lap 100 %	1.114.754.850	46 Lap 100 %	3.255.230.965	46 Lap 100 %	838.282.200	80.0% 670.216.000	18.6% 155.826.200	0.0% 0	1.2% 10022863	836.065.063	4.091.296.028	0	818.259.206						
		Kerjasama Pengawasan Internal	Keluaran : Jumlah dokumen kapabilitas APIP Jumlah tim telaah seawat antar irban Jumlah tim telaah seawat antar kabupaten Hasil : Persentase terbitnya LHE dan LHP	12 Bln 100 %	579.965.291	12 Bln 100 %	1.418.996.503	12 Bln 100 %	424.149.900	0.0% - 33.3% 141.053.750	32.2% 136.459.900	36.1% 153220000	430.733.650	1.849.730.153	0	369.946.031							
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Keluaran : Jumlah Inventarisasi dan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK dan APIP dalam satu periode anggaran Hasil : Persentase terbitnya LHE dan LHP	12 Bln 100 %	344.850.000	12 Bln 100 %	283.790.700	12 Bln 100 %	513.087.000	0.9% 4.568.100	28.6% 146.738.600	13.0% 66.798.300	55.5% 284601406	502.706.406	786.497.106	0	157.299.421						
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																					
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Keluaran : Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pengawasan Hasil : persentase penanganan penyelesaian tindak lanjut Keluaran :	90 Lap 100 %	26.498.516	90 Lap 100 %	106.949.240	90 Lap 100 %	13.777.000	0.0% - 8.5% 1.177.000	31.9% 4.400.000	59.5% 8200000	13.777.000	120.726.240	0	24.145.248							
				40	1.181.430.110	40	2.985.360.700	40	1.092.237.500	5.1% 55.490.000	34.0% 371.631.500	26.0% 284.210.000	19.2% 209541000	920.872.500	3.906.233.200	0	781.246.640						

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5	6	7	8	I		II		III		IV		12	13= 6 + 12		14 = 13/5x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4																				15	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Monitoring dan Evaluasi serta pengaduan yang dilaksanakan Hasil : persentase penanganan penyelesaian tindak lanjut	Lap 100 %		Lap 100 %		Lap 100 %																
	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berkinerja	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berkinerja																					
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	tindak lanjut																					
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Keluaran : Peningkatan Persentase koordinasi hasil pengawasan Hasil : Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat	90 Lap 100 %	22,000,000	90 Lap 100 %	160,608,420	90 Lap 100 %	47,664,600	0.0% - 3.4%	1,600,000	4.9%	2,314,600	74.6%	35550000		39,464,600		200,073,020	0	40,014,604			
		Pendampingan dan Asistensi	Keluaran : Jumlah OPD yang di asistensi dan pendampingan Hasil : Terpenuhinya dokumen laporan dari pendampingan dan asistensi	1 Keg 100 %	22,000,000	1 Keg 100 %	115,320,960	1 Keg 100 %	69,502,400	0.0% 0 0.0%		0.0%	0	100.0%	69502400		69,502,400		184,823,360	0	36,964,672			
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Keluaran : Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Hasil : Terpenuhinya dokumen laporan dari pendampingan dan asistensi	1 Keg 100 %	61,500,000	1 Keg 100 %	64,097,400	1 Keg 100 %	6,833,000	0.0% - 0.0%		35.6%	2,433,000	23.4%	1600000		4,033,000		68,130,400	0	13,626,080			
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Keluaran : Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Hasil : Terpenuhinya dokumen laporan dari pendampingan dan asistensi	8 Keg 100 %	220,000,000	8 Keg 100 %	540,777,620	8 Keg 100 %	370,464,800	0.0% - 37.4%	138,514,800	20.1%	74,350,000	42.5%	157600000		370,464,800		911,242,420	0	182,248,484			
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Keluaran : Terlaksananya Pedampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Penegakan Integritas Hasil : Terpenuhinya dokumen laporan dari pendampingan dan asistensi	1 Keg 100 %	126,000,000	1 Keg 100 %	408,982,560	1 Keg 100 %	142,940,700	0.0% - 72.8%	104,101,500	3.2%	4,565,400	0.0%	31873800		140,540,700		549,523,260	0	109,904,652			
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)										3.6	1,677,787,688	5.5	2,135,014,472	5.7	2,193,573,276	11.5			38,276,202,020		7,655,240,404			
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
KECAMATAN BANTAENG																								
I	Dokumen Administrasi Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	6,711,586,000	87	5,491,776,157	100	6,324,018,506	17.6	1,111,312,568	45.6	2,884,761,717	-	-	-	-	17.6	1,111,312,568	104.7	6,603,088,725	1	98%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5	6	7	8		9		10		11		12	13= 6 + 12						14 = 13/5x100%		15	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	21,500,000	100	14,414,750	100	15,088,900	12.0	1,815,200	50.0	7,551,650	-	-	-	-	12.0	1,815,200	111.9	16,229,950	1	75%		
1	Terlaksananya Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	18,500,000	100	14,414,750	100	15,088,900	12.0	1,815,200	50.0	7,551,650	-	-	-	-	12.0	1,815,200	111.9	16,229,950	1	88%	Sub.Bagian Program dan Keuangan	
2	Terlaksananya Penyampaian Pelaporan Sakip Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD	100	3,000,000		-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub.Bagian Program dan Keuangan
B	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	6,273,360,000	88	5,278,988,368	100	6,137,697,786	17.7	1,084,741,868	45.4	2,788,538,667	-	-	-	-	17.7	1,084,741,868	105.2	6,363,730,236	1	101%		
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjanganannya	100	6,243,860,000	88	5,259,169,368	100	6,117,896,786	17.6	1,079,715,318	45.4	2,777,203,167	-	-	-	-	17.6	1,079,715,318	105.1	6,338,884,686	1	102%		
4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	Sub.Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	100	24,000,000	100	16,969,999	100	17,004,000	13.1	2,229,550	50.2	8,538,500	-	-	-	-	13.1	2,229,550	113.1	19,199,549	1	80%	Sub.Bagian Program dan Keuangan	
5	Penyampaian Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	100	5,500,000	100	2,850,000	100	2,797,000	100.0	2,797,000	100	2,797,000	-	-	-	-	100.0	2,797,000	200.0	5,647,000	2	103%	Sub.Bagian Program dan Keuangan	
C	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	177,800,000	85	118,926,000	100	73,050,000	21.6	15,780,000	56.0	40,900,000	-	-	-	-	21.6	15,780,000	106.5	134,706,000	1	76%		
6	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi/Bahan Bacaan Bagi ASN	Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	100	1,800,000	100	1,560,000	100	1,560,000	25.0	390,000	50.0	780,000	-	-	-	-	25.0	390,000	125.0	1,950,000	1	108%	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaia n	
7	Tercapainya Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas	Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang diikuti	100	176,000,000	85	117,366,000	100	71,490,000	21.5	15,390,000	56.1	40,120,000	-	-	-	-	21.5	15,390,000	106.2	132,756,000	1	75%	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaia n	
D	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	46,086,000	87	28,619,700	100	43,071,820	9.6	4,142,500	34.3	14,785,400	-	-	-	-	9.6	4,142,500	96.2	32,762,200	1	71%		
8	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	100	23,586,000	66	8,614,300	100	23,583,600	10.7	2,535,050	21.4	5,054,850	-	-	-	-	10.7	2,535,050	76.7	11,149,350	1	47%	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaia n	
9	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Pelayanan Administrasi Kesekretariatan/TU	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Kantor yang disediakan	100	22,500,000	100	20,005,400	100	19,488,220	8.2	1,607,450	49.9	9,730,550	-	-	-	-	8.2	1,607,450	108.2	21,612,850	1	96%	Seksi Pelayanan Umum	
E	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	77,000,000	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaia n
10	Pengadaan Kendaraan dinas	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	Jumlah Kendaraan Roda Dua	100	27,000,000	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaia n
11	Pengadaan Mebel Kantor	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	100	30,000,000	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaia n
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin kantor	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan/Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin yang diadakan	100	20,000,000	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaia n

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5	6	7	8		9		10		11		12	13= 6 + 12						14 = 13/5x100%		15	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
F	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kebutuhan sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	115,840,000	97	50,827,500	100	55,110,000	9	4,833,000	59.9	32,986,000	-	-	-	-	9	4,833,000	105.9	55,660,500	1	48%		
13	Kondisi Kendaraan Layak Pakai	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan kendaraan yang pajaknya terbayar	100	60,000,000	97	33,630,000	100	35,130,000	14	4,833,000	45.1	15,836,000	-	-	-	-	14	4,833,000	110.9	38,463,000	1	64%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
14	Kondisi Peralatan dan Mesin Layak Pakai	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara		3,840,000	100	2,460,000	100	3,830,000	-	-	26.1	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tercapainya Prosentase Rata-Rata Pemeliharaan Gedung Kantor	Sub.Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	100	52,000,000	100	14,737,500	100	16,150,000	-	-	100	16,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
II	Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan	100	1,721,000,000	85	1,650,082,467	100	1,132,858,148	31.0	351,469,679	47.9	542,486,474	-	-	-	-	31.0	351,469,679	116.0	2,001,552,146	1	116%		
G	Jumlah kelompok dan lembaga masyarakat yang aktif	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Kelompok dan Lembaga Masyarakat yang difasilitasi	100	121,000,000	97	77,715,400	100	67,368,500	8.9	6,019,250	48.0	32,328,250	-	-	-	-	8.9	6,019,250	105.9	83,734,650	1	69%		
16	Jumlah kelompok dan lembaga masyarakat yang aktif	Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kelompok dan Lembaga Masyarakat yang difasilitasi	100	121,000,000	97	77,715,400	100	67,368,500	8.9	6,019,250	48.0	32,328,250	-	-	-	-	8.9	6,019,250	105.9	83,734,650	1	69%	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
H	Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	100	1,600,000,000	85	1,572,367,067	100	1,065,489,648	32.4	345,450,429	47.9	510,158,224	-	-	-	-	32.4	345,450,429	116.9	1,917,817,496		120%		
17	Operasional Kelurahan	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	100	1,200,000,000	86	1,546,889,967	100	957,707,448	36.1	345,450,429	51.7	495,158,224	-	-	-	-	36.1	345,450,429	122.2	1,892,340,396	1	158%	Seksi Pemerintahan	
18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	100	400,000,000	40	25,477,100	100	107,782,200	-	-	13.9	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Pemerintahan
III	Jumlah Pelaksanaan Patroli Wilayah, Penyuluhan Keamanan	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	100	1,200,000,000	99	1,181,075,000	100	1,868,310,000	19.1	356,280,000	35.6	664,520,000	-	-	-	-	19.1	356,280,000	117.8	1,537,355,000	1	128%		
G	Keamanan dan Ketertiban Umum Yg Terkendali	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jenis Monitoring Keamanan dan Ketertiban Umum	100	1,200,000,000	99	1,181,075,000	100	1,868,310,000	19.1	356,280,000	35.6	664,520,000	-	-	-	-	19.1	356,280,000	117.8	1,537,355,000	1	128%		
19	Jumlah Kasus Yg dapat Diselesaikan	Sub.Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian NRI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dimonitoring	100	1,200,000,000	99	1,181,075,000	100	1,868,310,000	19.1	356,280,000	35.6	664,520,000	-	-	-	-	19.1	356,280,000	117.8	1,537,355,000	1	128%	Seksi Pemerintahan	
IV	Kelurahan dan desa yang dimonitoring dan difasilitasi	Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	99,000,000	100	89,217,000	100	90,284,100	15.7	14,173,350	50.0	45,133,600	-	-	-	-	15.7	14,173,350	115.7	103,390,350	1	104%		
H	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis Kegiatan yang dimonitoring dan difasilitasi	100	99,000,000	100	89,217,000	100	90,284,100	15.7	14,173,350	50.0	45,133,600	-	-	-	-	15.7	14,173,350	115.7	103,390,350	1	104%		
20	Kelurahan dan desa yang dimonitoring dan difasilitasi	Sub.Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dimonitoring dan difasilitasi	100	63,000,000	100	57,126,200	100	58,471,700	16.0	9,373,800	49.9	29,205,450	-	-	-	-	16.0	9,373,800	116.0	66,500,000	1	106%	Seksi Trantib	
21	Kelurahan dan Desa yang dimonitoring dan difasilitasi	Sub.Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dimonitoring dan difasilitasi	100	36,000,000	100	32,090,800	100	31,812,400	15.1	4,799,550	50.1	15,928,150	-	-	-	-	15.1	4,799,550	115.1	36,890,350	1	102%	Seksi Ekbang	
JUMLAH				100	9,731,586,000	88.2	8,412,150,785	100	9,415,470,754	19.5	1,833,235,597	43.9	4,136,901,791	-	-	-	-	19.5	1,833,235,597	107.7	10,245,386,382	1	105%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA PD kab Bantaeng berikutnya :																								
KECAMATAN BISSAPPU																								
1.	S1 : Meningkatkan Pelayanan Kecamatan		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	100	20,308,935,773	12.83	11,976,723,146	7.92	6,003,136,240	1.42	1,548,468,169	3.59	1,193,158,097	-	-	-	-	5.00	2,741,626,266	17.84	14,718,349,412	66.79%	72.47%	OPD Kecamatan Bissappu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	20,292,253,073	21.66	11,968,494,346	15.83	6,003,136,240	2.83	1,548,468,169	7.17	1,193,158,097	-	-	-	-	10.01	2,741,626,266	31.67	14,710,120,612	83.58%	72.49%	OPD Kecamatan Bissappu
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja PD	100	117,647,450	24.00	80,147,370	12.00	30,711,400	3.60	9,223,775	3.24	8,287,625	-	-	-	-	6.84	17,511,400	30.84	97,658,770	85.67%	83.01%	OPD Kecamatan Bissappu
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36	112,147,450	24.00	80,147,370	12	30,711,400	3.60	9,223,775	3.24	8,287,625	-	-	-	-	6.84	17,511,400	30.84	97,658,770	85.67%	87.08%	OPD Kecamatan Bissappu
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD	3	5,500,000													-	-	-	-	0.00%	0.00%	OPD Kecamatan Bissappu
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	18,992,539,141	17.00	11,127,431,386	8.50	5,763,822,640	2.52	1,505,098,319	1.70	1,134,772,072	-	-	-	-	4.22	2,639,870,391	21.22	13,767,301,777	84.12%	72.49%	OPD Kecamatan Bissappu
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjanganannya	36	18,883,255,591	24.00	11,066,746,896	12	5,743,849,040	3.13	1,497,484,719	2.36	1,130,612,072	-	-	-	-	5.49	2,628,096,791	29.49	13,694,843,687	81.92%	72.52%	OPD Kecamatan Bissappu
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	15	92,186,400	10.00	60,684,490	5	19,973,600	1.91	7,613,600	1.04	4,160,000	-	-	-	-	2.95	11,773,600	12.95	72,458,090	86.31%	78.60%	OPD Kecamatan Bissappu
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Pengelola Keuangan dan Penatausahaan yang tersusun	12	17,097,150	-	-			-				-			-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	OPD Kecamatan Bissappu
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administase Umum Kantor	100	276,309,310	19.32	132,223,400	13.00	37,450,600	4.16	13,697,500	1.72	3,980,200	-	-	-	-	5.88	17,677,700	25.21	149,901,100	60.68%	54.25%	OPD Kecamatan Bissappu
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang tersedia	36	23,146,900	24.00	13,877,500	12	4,845,800	3.18	1,286,000	2.82	1,136,900	-	-	-	-	6.00	2,422,900	30.00	16,300,400	83.33%	70.42%	OPD Kecamatan Bissappu
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	17	64,728,810	0.45	660,000	8	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45	660,000	2.64%	1.02%	OPD Kecamatan Bissappu
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang tersedia	36	8,635,000	24.00	2,640,000	12	1,200,000	4.00	400,000	2.00	200,000	-	-	-	-	6.00	600,000	30.00	3,240,000	83.33%	37.52%	OPD Kecamatan Bissappu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	55	179,798,600	28.85	115,045,900	20	25,404,800	9.46	12,011,500	2.08	2,643,300	-	-	-	-	11.54	14,654,800	40.39	129,700,700	73.43%	72.14%	OPD Kecamatan Bissappu
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	89,609,000	-	-	27.00	39,072,000	-	-	25.67	20,202,000	-	-	-	-	25.67	20,202,000	25.67	20,202,000	33.46%	22.54%	OPD Kecamatan Bissappu
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	150	70,488,000	-	-	50	10,656,000	-	-	50.00	10,656,000	-	-	-	-	50.00	10,656,000	50.00	10,656,000	33.33%	15.12%	OPD Kecamatan Bissappu
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin yang diadakan	4	19,121,000	-	-	4	28,416,000	-	-	1.34	9,546,000	-	-	-	-	1.34	9,546,000	1.34	9,546,000	33.59%	49.92%	OPD Kecamatan Bissappu
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	93,922,372	24.00	57,988,590	12.00	77,963,900	2.49	10,562,075	1.47	7,872,200	-	-	-	-	3.97	18,434,275	27.97	76,422,865	77.69%	81.37%	OPD Kecamatan Bissappu
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	36	31,420,476	24.00	15,685,775	12	12,116,400	3.76	3,791,575	1.85	1,872,200	-	-	-	-	5.61	5,663,775	29.61	21,349,550	82.25%	67.95%	OPD Kecamatan Bissappu
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan Jasa Pelayanan Kantor yang disediakan	36	62,501,896	24.00	42,302,815	12	65,847,500	1.23	6,770,500	1.09	6,000,000	-	-	-	-	2.33	12,770,500	26.33	55,073,315	73.13%	88.11%	OPD Kecamatan Bissappu
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100	722,225,800	24.00	570,703,600	6.67	54,115,700	1.39	9,886,500	2.06	18,044,000	-	-	-	-	3.45	27,930,500	27.45	598,634,100	76.25%	82.89%	OPD Kecamatan Bissappu

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n -1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5	6	7	8	9	10	11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	12	24,807,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	OPD Kecamatan Bissappu	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang pajaknya terbayar	36	161,661,450	24.00	80,441,575	5	28,945,700	0.72	4,146,500	1.84	10,636,500	-	-	-	-	2.55	14,783,000	26.55	95,224,575	73.76%	58.90%	OPD Kecamatan Bissappu
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	36	64,386,700	24.00	51,209,025	12	19,470,000	2.95	4,790,000	3.05	4,945,000	-	-	-	-	6.00	9,735,000	30.00	60,944,025	83.33%	94.65%	OPD Kecamatan Bissappu
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	36	471,370,350	24.00	439,053,000	3	5,700,000	0.50	950,000	1.30	2,462,500	-	-	-	-	1.80	3,412,500	25.80	442,465,500	71.66%	93.87%	OPD Kecamatan Bissappu
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENINGKATAN PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	16,682,700	4.00	8,228,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	8,228,800	50.00%	49.33%	OPD Kecamatan Bissappu
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Yang Dimonitoring Dan Difasilitasi	100	16,682,700	4.00	8,228,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	8,228,800	50.00%	49.33%	OPD Kecamatan Bissappu
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	8	16,682,700	4.00	8,228,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	8,228,800	50.00%	49.33%	OPD Kecamatan Bissappu
2.	S2 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan		Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan Kinerja kecamatan	100	181,496,350	24.00	94,568,650	12.00	35,796,000	5.32	17,509,350	4.11	10,371,650	-	-	-	-	9.43	27,881,000	33.43	122,449,650	92.86%	67.47%	OPD Kecamatan Bissappu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	94,488,300	24.00	51,702,200	12.00	22,338,500	7.53	14,022,500	1.57	2,916,000	-	-	-	-	9.10	16,938,500	33.10	68,640,700	91.94%	72.64%	OPD Kecamatan Bissappu
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja PD	100	94,488,300	24.00	51,702,200	12.00	22,338,500	7.53	14,022,500	1.57	2,916,000	-	-	-	-	9.10	16,938,500	33.10	68,640,700	91.94%	72.64%	OPD Kecamatan Bissappu
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja yang tersusun	36	94,488,300	24.00	51,702,200	12	22,338,500	7.53	14,022,500	1.57	2,916,000	-	-	-	-	9.10	16,938,500	33.10	68,640,700	91.94%	72.64%	OPD Kecamatan Bissappu
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	100	87,008,050	24.00	42,866,450	12.00	13,457,500	3.11	3,486,850	6.65	7,455,650	-	-	-	-	9.76	10,942,500	33.76	53,808,950	93.77%	61.84%	OPD Kecamatan Bissappu
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kelompok Dan Lembaga Masyarakat Yang Difasilitasi	100	87,008,050	24.00	42,866,450	12.00	13,457,500	3.11	3,486,850	6.65	7,455,650	-	-	-	-	9.76	10,942,500	33.76	53,808,950	93.77%	61.84%	OPD Kecamatan Bissappu
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan masyarakat dalam perencanaan yang terealisasi	12	16,360,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	OPD Kecamatan Bissappu
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Masyarakat yang difasilitasi	36	70,648,000	24.00	42,866,450	12	13,457,500	3.11	3,486,850	6.65	7,455,650	-	-	-	-	9.76	10,942,500	33.76	53,808,950	93.77%	76.16%	OPD Kecamatan Bissappu
3.	S3 : Meningkatkan Keamanan dan Keterlibatan Wilayah		Peningkatan Monitoring transtib pada wilayah tingkat bawah/ Desa dan Kelurahan	100	7,729,412,370	20.47	4,332,744,830	11.00	2,116,350,700	3.29	573,394,900	2.58	201,164,900	-	-	-	-	5.87	49,520,800	26.34	5,107,304,630	80.56%	66.08%	OPD Kecamatan Bissappu
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100	6,625,041,410	15.55	3,323,686,050	9.00	2,067,856,900	3.85	561,395,200	1.42	188,635,550	-	-	-	-	5.27	24,991,750	20.82	4,073,716,800	73.08%	61.49%	OPD Kecamatan Bissappu
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	100	181,107,560	21.69	137,058,280	12.00	35,671,000	6.10	18,127,500	2.31	6,864,250	-	-	-	-	8.41	24,991,750	30.10	162,050,030	91.22%	89.48%	OPD Kecamatan Bissappu
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	33	181,107,560	21.69	137,058,280	12	35,671,000	6.10	18,127,500	2.31	6,864,250	-	-	-	-	8.41	24,991,750	30.10	162,050,030	91.22%	89.48%	OPD Kecamatan Bissappu
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang Difasilitasi	100	6,443,933,850	9.40	3,186,627,770	6.00	2,032,185,900	1.60	543,267,700	0.54	181,771,300	-	-	-	-	2.14	725,039,000	11.54	3,911,666,770	54.94%	60.70%	OPD Kecamatan Bissappu

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	21	2.241.997,000	9.40	604,957,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.40	604,957,000	44.75%	26.98%	OPD Kecamatan Bissappu
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	21	4.201.936,850	9.40	2.581,670,770	12	2,032,185,900	3.21	543,267,700	1.07	181,771,300	-	-	-	-	4.28	725,039,000	13.68	3,306,709,770	65.13%	78.69%	OPD Kecamatan Bissappu
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENURUNAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	1,019,194,400	21.86	957,500,300	12.00	29,723,900	2.85	7,047,700	2.89	7,164,650	-	-	-	-	5.74	14,212,350	27.59	971,712,650	83.61%	95.34%	OPD Kecamatan Bissappu
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Monitoring Keamanan Dan Ketertiban Umum		1,019,194,400	21.86	957,500,300	12.00	29,723,900	2.85	7,047,700	2.89	7,164,650	-	-	-	-	5.74	14,212,350	27.59	971,712,650	83.61%	95.34%	OPD Kecamatan Bissappu
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dimonitoring	33	1,019,194,400	21.86	957,500,300	12	29,723,900	2.85	7,047,700	2.89	7,164,650	-	-	-	-	5.74	14,212,350	27.59	971,712,650	83.61%	95.34%	OPD Kecamatan Bissappu
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENINGKATAN PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	85,176,560	24.00	51,558,480	12.00	18,769,900	3.17	4,952,000	3.43	5,364,700	-	-	-	-	6.60	10,316,700	30.60	61,875,180	84.99%	72.64%	OPD Kecamatan Bissappu
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan yang dimonitoring dan difasilitasi	100	85,176,560	24.00	51,558,480	12.00	18,769,900	3.17	4,952,000	3.43	5,364,700	-	-	-	-	6.60	10,316,700	30.60	61,875,180	84.99%	72.64%	OPD Kecamatan Bissappu
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	36	85,176,560	24.00	51,558,480	12	18,769,900	3.17	4,952,000	3.43	5,364,700	-	-	-	-	6.60	10,316,700	30.60	61,875,180	84.99%	72.64%	OPD Kecamatan Bissappu
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100.00%	28,219,844,493	19.10	16,404,036,626	10.31	8,155,282,940	3.34	2,139,372,419	3.43	1,404,694,647	-	-	-	-	6.77	2,819,028,066	25.87	19,948,103,692	80.07%	70.69%	
Predikat Kinerja								SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR	S			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya*:																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berikutnya*:																								
KECAMATAN TOMPOBULU																								
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	13,041,699,320			100 %	3,693,430,195	25	720,714,684	50	1,669,208,641	9	2,436,135,887	12	6,449,189,460	30	11,275,248,672	30	11,275,248,672	3,000	86.46	
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD	100 %	71,279,000			100 %	10,239,100	3	889,500	6	5,303,900	9	7,942,000	12	9,942,000	30	24,077,400	30	24,077,400	3,000	33.78	
1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja PD	36	71,279,000			12 bln	10,239,100	3	889,500	6	5,303,900	9	7,942,000	12	9,942,000	30	24,077,400	30	24,077,400	83.33	33.78	
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	11,674,386,700			100 %	3,411,265,095	3	676,002,084	6	1,568,206,141	9	2,279,890,387	12	3,219,623,730	30	7,743,722,342	30	7,743,722,342	3,000	66.33	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang diterima ASN	36	11,618,250,000			12 bln	3,392,232,095	3	673,757,684	6	1,557,729,441	9	2,265,540,587	12	3,201,273,930	30	7,698,301,642	30	7,698,301,642	83.33	66.26	
2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan laporan keuangan yang dikerjakan setiap bulan	36	49,231,200			12 bln	15,345,900	3	731,000	6	6,789,600	9	10,662,700	12	14,662,700	30	32,846,000	30	32,846,000	83.33	66.72	
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	15	6,905,500			5 dokumen	3,687,100	3	1,513,400	6	3,687,100	9	3,687,100	12	3,687,100	30	12,574,700	30	12,574,700	200.00	182.10	
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	426,158,050			100 %	104,250,400	3	10,928,700	6	33,427,400	9	56,314,700	12	81,258,780	30	181,929,580	30	181,929,580	3,000	42.69	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan yang tersedia	36	2,028,050			12 bln	1,102,400	3	68,700	6	137,400	9	829,700	12	829,700	30	1,865,500	30	1,865,500	83.33	91.98	
2		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	72	12,192,000			24 exp	1,560,000	3	110,000	6	880,000	9	880,000	12	1,320,000	30	3,190,000	30	3,190,000	41.67	26.16	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									I		II		III		IV									
				5	Rp	6	Rp	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti	930	411,938,000			290 kali	101,588,000	3	10,750,000	6	32,410,000	9	54,605,000	12	79,109,080	30	176,874,080	30	176,874,080	3.23	42.94	
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	87,758,770			100 %	60,618,800	3	4,619,400	6	18,285,800	9	23,003,400	0	-	18	45,908,600	18	45,908,600	1,800	52.31	
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	36	39,267,620			12 bln	18,248,200	3	1,792,500	6	6,296,400	9	8,983,700	12	14,525,361	30	31,597,961	30	31,597,961	83.33	80.47	
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36	48,491,150			12 bln	42,370,600	3	2,826,900	6	11,989,400	9	14,019,700	12	28,294,700	30	57,130,700	30	57,130,700	83.33	117.82	
1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	558,884,800			100 %	107,056,800	3	28,275,000	6	43,985,400	9	68,985,400	12	85,198,859	9	130,734,659	9	130,734,659	900	23.39	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan kendaraan yang pajaknya terbayar	15	180,968,500			5 unit	36,433,000	3	5,115,000	6	13,700,000	9	22,800,000	12	28,757,400	30	70,372,400	30	70,372,400	200.00	38.89	
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	6	266,649,000			2 Unit	38,313,800	3	5,260,000	6	12,385,400	9	18,585,400	12	24,131,459	30	60,362,259	30	60,362,259	500.00	22.64	
4		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	41	21,025,300			13 unit	4,000,000	3	3,300,000	6	3,300,000	9	4,000,000	12	4,000,000	30	14,600,000	30	14,600,000	73.17	69.44	
5		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3	84,692,000			1 unit	28,310,000	3	14,600,000	6	14,600,000	9	23,600,000	12	28,310,000	30	81,110,000	30	81,110,000	1,000.00	95.77	
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100%	47,271,480			100%	14,928,500	3	677,000	6	5,287,300	9	7,283,800	12	7,283,800	30	20,531,900	30	20,531,900	3,000	43.43	
2.1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	100 %	47,271,480			100%	14,928,500	3	677,000	6	5,287,300	9	7,283,800	12	1,141,082,440	30	1,154,330,540	30	1,154,330,540	3,000	2,441.92	
1		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	36	47,271,480			12 bln	14,928,500	3	677,000	6	5,287,300	9	7,283,800	12	9,683,800	30	22,931,900	30	22,931,900	83.33	48.51	
III		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga yang aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan	100%	2,718,375,510			100%	592,026,940	25	55,367,340	50	120,893,665	75	357,381,895	12	377,132,880	162	910,775,780	162	910,775,780	16,200	33.50	
3.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kelompok lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	100 %	176,515,500			100%	24,681,500	3	3,484,400	6	7,639,700	9	12,610,800	12	17,360,800	30	41,095,700	30	41,095,700	3,000	23.28	
1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelompok lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	36	176,515,500			12 bln	24,681,500	3	3,484,400	6	7,639,700	9	12,610,800	12	17,360,800	30	41,095,700	30	41,095,700	83.33	23.28	
3.2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	100 %	2,541,860,010			100%	567,345,440	3	51,882,940	6	113,253,965	9	344,771,095	12	359,772,080	30	869,680,080	30	869,680,080	3,000	34.21	
1		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	4	2,541,860,010			4 Kel.	567,345,440	3	51,882,940	6	113,253,965	9	344,771,095	12	359,772,080	30	869,680,080	30	869,680,080	750.00	34.21	
IV		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	100%	1,537,032,370			100%	489,920,700	25	87,721,100	50	210,931,800	75	331,001,800	12	481,221,800	162	1,110,876,500	162	1,110,876,500	16,200	72.27	
4.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jenis monitoring ketentraman dan ketertiban umum	100 %	1,537,032,370			100%	489,920,700	3	87,721,100	6	210,931,800	9	331,001,800	12	481,221,800	30	1,110,876,500	30	1,110,876,500	3,000	72.27	
1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa/Kelurahan yang di monitoring	36	1,537,032,370			12 bln	489,920,700	3	87,721,100	6	210,931,800	9	331,001,800	12	481,221,800	30	1,110,876,500	30	1,110,876,500	83.33	72.27	
V		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	261,766,000			100%	59,655,200	25	4,537,200	50	17,839,000	75	38,015,300	12	54,115,300	162	114,506,800	162	114,506,800	16,200	43.74	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8	9	10	I		II		III		IV		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
5.1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis kegiatan yang dimonitoring dan difasilitasi	100 %	261,766,000			100%	59,655,200	3	4,537,200	6	17,839,000	9	38,015,300	12	54,115,300	30	114,506,800	30	114,506,800	3,000	43.74	
1		Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi tata pemerintahan desanya	36	121,581,000			12 bln	32,381,200	3	1,397,200	6	8,622,000	9	21,552,300	12	29,692,300	30	61,263,800	30	61,263,800	83.33	50.39	
2		Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desanya	36	140,185,000			12 bln	27,274,000	3	3,140,000	6	9,217,000	9	16,463,000	12	24,423,000	30	53,243,000	30	53,243,000	83.33	37.98	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan dana di Kasda																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan pencairan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : percepatan kegiatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daeah Kabupaten/Kota berikutnya*) :																								
KECAMATAN ULUERE																								
I	Dokumen Administrasi Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100	1,558,605,230	95	1,558,482,880	95	1,490,630,755	25	264,072,877	50	646,235,747	75	-	100	-	60	646,235,747	155	2,204,718,627	31	440,943,725	
A	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	100	22,601,750	95	22,601,750	95	7,890,900	25	1,581,000	50	4,230,500	75	-	100	-	60	-	155	22,601,750	31	4,520,350	
2	Terlaksananya Penyampaian Pelaporan Sakip Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Pelaporan Sakip Tepat Waktu	100	22,601,750	95	22,601,750	95	7,890,900	25	1,581,000	50	4,230,500	75	-	100	-	60	-	155	22,601,750	31	4,520,350	Sub.Bagian Program dan Keuangan
B	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	1,165,262,000	95	1,165,262,000	95	1,215,810,355	25	212,310,377	50	504,762,147	75	-	100	-	60	-	155	1,165,262,000	31	233,052,400	
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Lancarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,165,262,000	95	1,165,262,000	95	1,215,810,355	25	212,310,377	50	504,762,147	75	-	100	-	60	-	155	1,165,262,000	31	233,052,400	Sub.Bagian Program dan Keuangan
C	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kebutuhan Sarana Penunjang Pelayanan Administrasi Umum	100	126,373,000	95	126,373,000	95	56,127,000	25	7,970,000	50	23,865,000	75	-	100	-	60	-	155	126,373,000	31	25,274,600	
8	Tercapainya Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas	Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Persentase Tercapainya Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas	100	126,373,000	95	126,373,000	95	56,127,000	25	7,970,000	50	23,865,000	75	-	100	-	60	-	155	126,373,000	31	25,274,600	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaia n
D	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Jumlah Unit Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	100	28,978,430	95	28,978,430	95	17,338,000	25	3,338,500	50	10,546,000	75	-	100	-	60	-	155	28,978,430	31	5,795,686	
9	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kebutuhan Rata-Rata Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100	7,771,200	95	7,771,200	95	8,066,400	25	1,573,500	50	5,125,000	75	-	100	-	60	-	155	7,771,200	31	1,554,240	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaia n
10	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Pelayanan Administrasi Kesekretariatan/TU	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kebutuhan Rata-Rata Pelayanan Administrasi Kesekretaritan /TU	100	21,207,230	95	21,207,230	95	9,271,600	25	1,765,000	50	5,421,000	75	-	100	-	60	-	155	21,207,230	31	4,241,446	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaia n
E	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kebutuhan sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	215,390,050	95	215,267,700	95	193,464,500	25	38,873,000	50	102,832,100	75	-	100	-	60	-	155	215,267,700	31	43,053,540	
11	Kondisi Kendaraan Layak Pakai	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kondisi Kendaraan Layak Pakai 1 Tahun	100	76,512,400	95	76,390,050	95	75,389,400	25	18,319,000	50	47,006,500	75	-	100	-	60	-	155	76,390,050	31	15,278,010	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaia n

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11			12		13= 6 + 12			14 = 13/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15											
12	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kebutuhan Transportasi Masyarakat Wilayah Terpencil	100	80,407,650	95	80,407,650	95	79,363,400	25	15,237,600	50	42,192,800	75	-	100	-	60	-	155	80,407,650	31	16,081,530	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	
13	Tercapainya Prosentase Rata-Rata Pemeliharaan Gedung Kantor	Sub.Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Gedung 1 Tahun	100	58,470,000	95	58,470,000	95	38,711,700	25	5,316,400	50	13,632,800	75	-	100	-	60	-	155	58,470,000	31	11,694,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	
II	Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan DiKecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Yg Sesuai Standar Pelayanan	100	1,222,000	95	1,222,000	95	9,659,200	25	1,909,500	50	5,444,500	75	-	100	-	60	-	155	1,222,000	31	244,400		
F	Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yg Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Pemerinrah Daerah Yg ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan DiKecamatan	100	1,222,000	95	1,222,000	95	9,659,200	25	1,909,500	50	5,444,500	75	-	100	-	60	-	155	1,222,000	31	244,400		
14	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan DiKecamatan	Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan DiKecamatan	100	1,222,000	95	1,222,000	95	9,659,200	25	1,909,500	50	5,444,500	75	-	100	-	60	-	155	1,222,000	31	244,400	Seksi Pelayanan Publik	
III	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW Yg Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat Yg Aktif	100	28,061,500	95	28,061,500	95	23,806,050	25	2,635,000	50	8,036,500	75	-	100	-	60	-	155	28,061,500	31	5,612,300		
G	RPJM Desa dan RKPDesa	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW Yg Difasilitasi	100	28,061,500	95	28,061,500	95	23,806,050	25	2,635,000	50	8,036,500	75	-	100	-	60	-	155	28,061,500	31	5,612,300		
15	Jumlah Desa Yg Menyusun RKPDesa Yg Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Desa Yg Menyusun RKPD Desa Yg Tepat Waktu	100	2,136,500	95	2,136,500	95	6,921,050	25	1,265,000	50	4,178,500	75	-	100	-	60	-	155	2,136,500	31	427,300	Seksi Pemberdaya an Masyarakat	
16	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Desa Yg Aktif	Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa Yg Aktif	100	25,925,000	95	25,925,000	95	16,885,000	25	1,370,000	50	3,858,000	75	-	100	-	60	-	155	25,925,000	31	5,185,000	Seksi Pemberdaya an Masvarakat	
V	Jumlah Desa Yg Pengelolaan Keuangan Yg Sesuai Regulasi	Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	59,831,000	95	59,831,000	95	46,998,700	25	3,443,000	50	16,977,000	75	-	100	-	60	-	155	59,831,000	31	11,966,200		
i	Administrasi Desa	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengelolaan Keuangan Desa Yg Efektif	100	59,831,000	95	59,831,000	95	46,998,700	25	3,443,000	50	16,977,000	75	-	100	-	60	-	155	59,831,000	31	11,966,200		
18	Jumlah Desa Yg Menyelor SPJ Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yg Menyelor SPJ Tepat Waktu	100	24,227,000	95	24,227,000	95	19,280,100	25	1,698,500	50	8,004,000	75	-	100	-	60	-	155	24,227,000	31	4,845,400	Seksi Pemerintaha n	
19	Jumlah Pos Kamling/Pos Ronda Yg Aktif	Sub.Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan kelerbitan Umum	Jumlah Pos Kamling / Pos Ronda Yg Aktif	100	35,604,000	95	35,604,000	95	27,718,600	25	1,744,500	50	8,973,000	75	-	100	-	60	-	155	35,604,000	31	7,120,800	Seksi Tranrib	
JUMLAH					1,647,719,730		1,647,597,380		1,571,094,705		272,060,377		676,693,747		-		-								
Rata-rata capaian kinerja (%)				Predikat kinerja																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA PD kab.Bantaeng berikutnya :																									
KECAMATAN SINOA																									
I	Dokumen Administrasi Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100	1,818,795,864	95	1,663,624,885	95	1,564,747,365	25	224,405,639	50	569,257,721	75	-	100	-	60	1,563,407,365	155	3,227,032,250	31	385,995,936		
A	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	100	15,774,000	95	15,135,500	95	10,570,530	25	3,025,130	50	4,532,730	75	-	100	-	60	9,230,530	155	24,366,030	31	4,873,206		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				5		6		7		8		9		10		11						12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13= 6 + 12	Rp	14 = 13/5x100%	Rp	15			
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu.	Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Target Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	1,474,000	95	4,420,000	95	1,340,000	25	1,340,000	100	-	-	-	-	100	1,340,000	195	5,760,000	39	1,152,000	Sub.Bagian Program dan Keuangan				
2	Terlaksananya Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyampaian laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Target Pelaporan Realisasi Keuangan Paling Lambat TGL 10 Bulan Berikutnya	100	14,300,000	95	10,715,500	95	9,230,530	25	1,685,130	50	4,532,730	75		100	60	9,230,530	155	19,946,030	31	3,989,206	Sub.Bagian Program dan Keuangan				
B	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	1,536,095,864	95	1,357,290,785	95	1,337,075,275	25	178,113,295	50	462,827,923	75		100	60	1,337,075,275	155	2,694,366,060	31	278,978,698					
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Lancarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,487,695,864	95	1,304,050,785	95	1,304,050,785	25	172,303,335	50	446,855,533	75		100	60	1,304,050,785	155	1,308,629,000	31	261,725,800					
4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	Sub.Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Lancarnya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	100	27,500,000	95	30,250,000	95	17,251,060	25	3,165,230	50	8,855,960	75		100	60	17,251,060	155	47,501,060	31	9,500,212	Sub.Bagian Program dan Keuangan				
5	Penyampaian Laporan Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester/ SKPD	Persentase Penyampaian Laporan Tepat Waktu	100	20,900,000	95	22,990,000	95	15,773,430	25	2,644,730	50	7,116,430	75		100	60	15,773,430	155	38,763,430	31	7,752,686	Sub.Bagian Program dan Keuangan				
C	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	116,006,000	95	127,606,600	95	106,539,750	25	21,250,000	50	45,710,000	75		100	60	106,539,750	155	234,146,350	31	46,829,270					
6	Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik	Sub.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik atau Penerangan yang tersedia	100	2,970,000	95	3,267,000	95	2,700,000	25	-	100	2,700,000	-	-	-	60	2,700,000	155	5,967,000	31	1,193,400	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian				
7	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi/Bahan Bacaan Bagi ASN	Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	3,036,000	95	3,339,600	95	2,760,000	25	500,000	50	1,250,000	75		100	60	2,760,000	155	6,099,600	31	1,219,920	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian				
8	Tercapainya Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas	Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi yang diikuti	100	110,000,000	95	121,000,000	95	101,079,750	25	20,750,000	50	41,760,000	75		100	60	101,079,750	155	222,079,750	31	44,415,950	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian				
D	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	24,970,000	95	25,047,000	95	22,699,810	25	5,481,814	50	11,551,838	75		100	60	22,699,810	155	47,746,810	31	10,033,362					
9	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Terbayar	100	9,570,000	95	10,527,000	95	8,700,000	25	1,982,564	50	4,052,028	75		100	60	8,700,000	155	19,227,000	31	3,845,400	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian				
10	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan disediakan	100	2,200,000	95	2,420,000	95	2,000,000	25	-	50	-	75		100	60	2,000,000	155	4,420,000	31	884,000	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian				
11	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Pelayanan Administrasi Kesekretariatan/TU	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100	13,200,000	95	14,520,000	95	11,999,810	25	3,499,250	50	7,499,810	75		100	60	11,999,810	155	26,519,810	31	5,303,962	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian				
E	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100	125,950,000	95	138,545,000	95	87,862,000	25	16,535,400	50	44,635,230	75		100	60	87,862,000	155	226,407,000	31	45,281,400					
12	Kondisi Kendaraan Layak Pakai dan Pajaknya terbayar	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan Kendaraan yang Pajaknya Terbayar	100	82,500,000	95	90,750,000	95	66,362,000	25	16,535,400	50	32,140,230	75		100	60	66,362,000	155	157,112,000	31	31,422,400	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian				

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				5		6		7		8		9		10		11						12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13= 6 + 12	Rp	14 = 13/5x100%	15				
13	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100	2,750,000	95	3,025,000	95	2,500,000	25	-	50	2,500,000	75	-	100	-	60	2,500,000	155	5,525,000	31	1,105,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
14	Tercapainya Prosentase Rata-Rata Pemeliharaan Gedung Kantor	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	100	40,700,000	95	44,770,000	95	19,000,000	25	-	50	9,995,000	75	-	100	-	60	19,000,000	155	63,770,000	31	12,754,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
II	Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan DiKecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Yg Sesuai Standar Pelayanan	100	5,500,000	95	-	95	1,063,050	25	1,063,050	50	-	75	-	100	-	60	580,000	155	580,000	31	116,000				
F	Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yg Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Yg ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan DiKecamatan	100	5,500,000	95	-	95	1,063,050	25	1,063,050	50	-	75	-	100	-	60	580,000	155	580,000	31	116,000				
15	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan DiKecamatan	Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Yg Tepat Waktu	100	2,750,000	95	-	95	483,050	25	483,050	50	-	75	-	100	-	60	483,050	155	483,050	31	96,610	Seksi Pelayanan Publik			
16	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan DiKecamatan	Sub Kegiatan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan DiKecamatan	100	2,750,000	95	-	95	580,000	25	580,000	50	-	75	-	100	-	60	580,000	155	580,000	31	116,000	Seksi Pelayanan Publik			
III	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW Yg Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat Yg Aktif	100	68,200,000	95	60,500,000	95	51,880,000	25	9,900,000	50	38,080,000	75	-	100	-	60	43,180,000	155	103,680,000	31	20,736,000				
I	RPJM Desa dan RKPDesa	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Yg Difasilitasi	100	68,200,000	95	60,500,000	95	51,880,000	25	9,900,000	50	38,080,000	75	-	100	-	60	43,180,000	155	103,680,000	31	20,736,000				
17	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Desa Yg Aktif	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Menyusun RKPDesa yang tepat waktu	100	13,200,000	95	-	95	8,700,000	25	8,700,000	50	8,700,000	75	-	100	-	60	8,700,000	155	8,700,000	31	1,740,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
18	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Desa Yg Aktif	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa Yg Aktif	100	55,000,000	95	60,500,000	95	43,180,000	25	1,200,000	50	29,380,000	75	-	100	-	60	43,180,000	155	103,680,000	31	20,736,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
IV	Jumlah Pelaksanaan Patroli Wilayah, Penyuluhan Keamanan	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	100	11,000,000	95	-	95	9,999,700	25	411,400	50	4,911,400	75	-	100	-	60	4,911,400	155	4,911,400	31	982,280				
J	Keamanan dan Ketertiban Umum Yg Terkendali	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jenis Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	11,000,000	95	-	95	9,999,700	25	411,400	50	4,911,400	75	-	100	-	60	4,911,400	155	4,911,400	31	982,280				
19	Jumlah Kasus Yg dapat Diselesaikan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian NRI, TNI dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah Kasus Yg dapat Diselesaikan	100	11,000,000	95	-	95	9,999,700	25	411,400	50	4,911,400	75	-	100	-	60	4,911,400	155	4,911,400	31	982,280	Seksi Trantib			
V	Jumlah Desa Yg Pengelolaan Keuangan Yg Sesuai Regulasi	Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	77,000,000	95	84,700,000	95	30,938,960	25	5,588,230	50	15,007,630	75	-	100	-	60	30,938,960	155	115,638,960	31	23,127,792				
K	Administrasi Desa	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengelolaan Keuangan Desa Yg Efektif	100	77,000,000	95	84,700,000	95	30,938,960	25	5,588,230	50	15,007,630	75	-	100	-	60	30,938,960	155	115,638,960	31	23,127,792				
20	Jumlah Desa Yg Menytor SPJ Tepat Waktu	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yg Menytor SPJ Tepat Waktu	100	38,500,000	95	42,350,000	95	20,539,000	25	3,494,200	50	10,153,500	75	-	100	-	60	20,539,000	155	62,889,000	31	12,577,800	Seksi Pemerintahan			
21	Jumlah Pos Kamling/Pos Ronda Yg Aktif	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Pos Kamling / Pos Ronda Yg Aktif	100	38,500,000	95	42,350,000	95	10,399,960	25	2,094,030	50	4,854,130	75	-	100	-	60	10,399,960	155	52,749,960	31	10,549,992	Seksi Trantib			
JUMLAH					1,980,495,864		1,808,824,885		1,658,629,075		241,368,319	14.552278	627,256,751					1,658,629,075		3,446,931,210		429,975,728					
Rata-rata capaian kinerja (%)																											

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8	I		II		III		IV		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA PD kab.Bantaeng berikutnya :																								
KECAMATAN EREMERASA																								
I	Dokumen Administrasi Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100	2,209,204,718	95	2,332,772,700	95	2,237,368,208	25	454,989,283	50	566,823,523	75	582,293,258	100	461,918,136	80	2,066,024,200	175	4,398,796,900	35	879,759,380	
A	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	100	35,500,000	95	20,000,000	95	20,743,200	25	5,737,200	50	5,397,500	75	5,302,500	100	4,306,000	80	20,743,200	175	40,743,200	35	8,148,640	
1	Terlaksananya Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 100%	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyampaian laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Target Pelaporan Realisasi Keuangan Paling Lambat TGL 10 Bulan Berikutnya	100	35,500,000	95	20,000,000	95	20,743,200	25	5,737,200	50	5,397,500	75	5,302,500	100	4,306,000	80	20,743,200	175	40,743,200	35	8,148,640	Sub.Bagian Program dan Keuangan
B	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	1,898,704,718	95	2,166,012,400	95	2,092,127,308	25	416,724,835	50	529,044,047	75	550,414,170	100	432,292,766	80	1,928,475,818	175	4,094,488,218	35	818,897,644	
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Lancarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,889,704,718	95	2,128,844,400	95	2,053,356,208	25	404,626,635	50	519,076,347	75	540,778,470	100	425,223,266	80	1,889,704,718	175	1,889,704,718	35	377,940,944	
3	Terlaksananya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	Sub.Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Lancarnya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	100	6,000,000	95	35,000,000	95	36,976,600	25	10,303,700	50	9,967,700	75	9,635,700	100	7,069,500	80	36,976,600	175	71,976,600	35	14,395,320	Sub.Bagian Program dan Keuangan
4	Penyampaian Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyampaian Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu	100	3,000,000	95	2,168,000	95	1,794,500	25	1,794,500	50	-	75	-	100	-	80	1,794,500	175	3,962,500	35	792,500	Sub.Bagian Program dan Keuangan
C	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	119,000,000	95	62,696,000	95	43,186,000	25	14,525,900	50	14,620,900	75	5,405,900	100	8,164,980	80	42,717,680	175	105,413,680	35	21,082,736	
5	Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik	Sub.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik atau Penerangan yang tersedia	100	7,000,000	95	3,232,000	95	3,048,000	25	905,900	50	905,900	75	905,900	100	330,300	80	3,048,000	175	6,280,000	35	1,256,000	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
6	Terpenuhiya Kebutuhan Informasi/Bahan Bacaan/Bagi ASN	Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	8,000,000	95	6,000,000	95	6,000,000	25	1,500,000	50	1,500,000	75	1,500,000	100	1,500,000	80	6,000,000	175	12,000,000	35	2,400,000	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
7	Tercapaiya Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas	Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi yang diikuti	100	104,000,000	95	53,464,000	95	34,138,000	25	12,120,000	50	12,215,000	75	3,000,000	100	6,334,680	80	33,669,680	175	87,133,680	35	17,426,736	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
D	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	-	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	80	-	175	-	35	-	
8	Terpenuhiya Kebutuhan pengadaan Roda Dua	Sub.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Dua Yang diadakan	100	-	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	80	-	175	-	35	-	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
9	Terpenuhiya Kebutuhan Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin yang diadakan	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	100	-	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	80	-	175	-	35	-	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
10	Tercapaiya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub.Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	-	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	80	-	175	-	35	-	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
E	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	51,000,000	95	24,874,300	95	29,285,700	25	5,942,348	50	5,994,076	75	6,031,688	100	5,358,890	80	23,327,002	175	48,201,302	35	9,640,260	
11	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Terbayar	100	6,000,000	95	11,412,000	95	12,888,000	25	2,370,048	50	2,421,776	75	2,459,388	100	2,658,890	80	9,910,102	175	21,322,102	35	4,264,420	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n
12	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Pelayanan Administrasi Kesekretariatan/TU	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100	45,000,000	95	13,462,300	95	16,397,700	25	3,572,300	50	3,572,300	75	3,572,300	100	2,700,000	80	13,416,900	175	26,879,200	35	5,375,840	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n
F	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100	105,000,000	95	59,190,000	95	52,026,000	25	12,059,000	50	11,767,000	75	15,139,000	100	11,795,500	80	50,760,500	175	109,950,500	35	21,990,100	
13	Kondisi Kendaraan Layak Pakai dan Pajaknya terbayar	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan Kendaraan yang Pajaknya Terbayar	100	75,000,000	95	59,190,000	95	52,026,000	25	12,059,000	50	11,767,000	75	15,139,000	100	11,795,500	80	50,760,500	175	109,950,500	35	21,990,100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n
14	Tercapainya Prosentase Rata-Rata Pemeliharaan Gedung Kantor	Sub.Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	100	30,000,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	80	-	175	-	35	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n
II	Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan Dikecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Yg Sesuai Standar Pelayanan	100	125,000,000	95	43,930,000	95	36,666,000	25	8,958,000	50	11,091,000	75	8,166,000	100	8,447,600	80	36,662,600	175	80,592,600	35	16,118,520	
F	Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yg Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Pemerinh Daerah Yg ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan Dikecamatan	100	125,000,000	95	43,930,000	95	36,666,000	25	8,958,000	50	11,091,000	75	8,166,000	100	8,447,600	80	36,662,600	175	80,592,600	35	16,118,520	
15	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan Dikecamatan	Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan Dikecamatan	100	125,000,000	95	43,930,000	95	36,666,000	25	8,958,000	50	11,091,000	75	8,166,000	100	8,447,600	80	36,662,600	175	80,592,600	35	16,118,520	Seksi Pelayanan Publik
III	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW Yg Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat Yg Aktif	100	90,000,000	95	29,463,500	95	28,700,000	25	2,700,000	50	10,100,000	75	10,000,000	100	5,900,000	80	28,700,000	175	58,163,500	35	11,632,700	
H	PKK, Safari Ramadhan dan MTQ	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Yg Difasilitasi	100	90,000,000	95	29,463,500	95	28,700,000	25	2,700,000	50	10,100,000	75	10,000,000	100	5,900,000	80	28,700,000	175	58,163,500	35	11,632,700	
16	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Desa Yg Aktif	Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa Yg Aktif	100	90,000,000	95	29,463,500	95	28,700,000	25	2,700,000	50	10,100,000	75	10,000,000	100	5,900,000	80	28,700,000	175	58,163,500	35	11,632,700	Seksi Pemberdaya an Masyarakat
I	Administrasi Desa	Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengelolaan Keuangan Desa Yg Efektif	100	200,000,000	95	126,808,200	95	104,400,000	25	26,100,000	50	26,100,000	75	26,100,000	100	26,100,000	80	104,400,000	175	231,208,200	35	46,241,640	
17	Jumlah Desa yang di Fasilitas Tata Pemerintahan Desanya	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitas Tata Pemerintahan Desanya	100	50,000,000	95	20,200,000	95	36,000,000	25	9,000,000	50	9,000,000	75	9,000,000	100	9,000,000	80	36,000,000	175	36,000,000	35	7,200,000	Seksi Pemerintaha n
18	Jumlah Desa Yg Menyetor SPJ Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yg Menyetor SPJ Tepat Waktu	100	70,000,000	95	49,008,200	95	43,200,000	25	10,800,000	50	10,800,000	75	10,800,000	100	10,800,000	80	43,200,000	175	92,208,200	35	18,441,640	Seksi Pemerintaha n
19	Jumlah Pos Kamling/Pos Ronda Yg Aktif	Sub.Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentrman dan keletriban Umum	Jumlah Pos Kamling / Pos Ronda Yg Aktif	100	80,000,000	95	57,600,000	95	25,200,000	25	6,300,000	50	6,300,000	75	6,300,000	100	6,300,000	80	25,200,000	175	82,800,000	35	16,560,000	Seksi Tranrib
JUMLAH					2,624,204,718		2,532,974,400		2,407,134,208		492,747,283		614,114,523		626,559,258		502,365,736		2,235,786,800		4,768,761,200		953,752,240	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA PD kab Bantaeng berikutnya :																								
KECAMATAN PA'JUKUKANG																								
I	Dokumen Administrasi Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100	2,344,546,100	95	1,884,919,190	95	1,778,195,200	25	332,596,543	50	406,846,763	75	-	100	-	60	1,778,195,200	155	3,663,114,390	31	732,622,878	
A	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	100	16,542,000	95	9,665,900	95	13,327,800	25	3,616,300	50	3,969,100	75	-	100	-	60	13,327,800	155	22,993,700	31	4,598,740	
1	Terlaksananya Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyampaian laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Target Pelaporan Realisasi Keuangan Paling Lambat TGL 10 Bulan Berikutnya	100	14,026,500	95	8,150,400	95	13,327,800	25	3,616,300	50	3,969,100	75	-	100	-	60	13,327,800	155	21,478,200	31	4,295,640	Sub.Bagian Program dan Keuangan
2	Terlaksananya Penyampaian Pelaporan Sakip Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Pelaporan Sakip Tepat Waktu	100	2,515,500	95	1,515,500	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	1,515,500	31	303,100	Sub.Bagian Program dan Keuangan
B	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	2,019,066,250	95	1,678,501,630	95	1,583,695,100	25	294,243,081	50	364,129,997	75	-	100	-	60	1,583,695,100	155	3,262,196,730	31	652,439,346	
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Lancarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	2,000,000,000	95	1,665,427,100	95	1,571,413,700	25	291,202,281	50	360,017,497	75	-	100	-	60	1,571,413,700	155	3,236,840,800	31	647,368,160	
4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	Sub.Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Lancarnya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	100	16,566,250	95	11,211,030	95	10,737,700	25	2,575,600	50	3,034,000	75	-	100	-	60	10,737,700	155	21,948,730	31	4,389,746	Sub.Bagian Program dan Keuangan
5	Penyampaian Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyampaian Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu	100	2,500,000	95	1,863,500	95	1,543,700	25	465,200	50	1,078,500	75	-	100	-	60	1,543,700	155	3,407,200	31	681,440	Sub.Bagian Program dan Keuangan
C	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesentase Pengadministrasian Kepegawaian Pada PD	100	6,000,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	
6	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang tersedia	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang tersedia	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang tersedia	100	6,000,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaia n
D	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	146,807,177	95	97,962,000	95	74,536,600	25	16,475,000	50	19,465,100	75	-	100	-	60	74,536,600	155	172,498,600	31	34,499,720	
7	Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik	Sub.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik atau Penerangan yang tersedia	100	1,672,177	95	1,470,000	95	2,716,600	25	540,000	50	490,100	75	-	100	-	60	2,716,600	155	4,186,600	31	837,320	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaia n
8	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi/Bahan Bacaan Bagi ASN	Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	4,500,000	95	3,120,000	95	3,120,000	25	675,000	50	675,000	75	-	100	-	60	3,120,000	155	6,240,000	31	1,248,000	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaia n
9	Tercapainya Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas	Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi yang diikuti	100	140,635,000	95	93,372,000	95	68,700,000	25	15,260,000	50	18,300,000	75	-	100	-	60	68,700,000	155	162,072,000	31	32,414,400	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaia n
E	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	28,286,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	#VALUE!	
10	Terpenuhinya Kebutuhan pengadaan Roda Dua	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Dua Yang diadakan	100	20,000,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaia n

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				5		6		7		8		9		10		11						12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15			
11	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	100	-	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
12	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin yang diadakan	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	100	8,286,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
F	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	42,664,673	95	35,219,660	95	35,114,200	25	8,528,162	50	7,017,566	75	-	100	-	60	35,114,200	155	70,333,860	31	14,066,772				
13	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Terbayar	100	21,580,000	95	16,220,000	95	19,672,000	25	5,769,362	50	4,242,566	75	-	100	-	60	19,672,000	155	35,892,000	31	7,178,400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
14	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Pelayanan Administrasi Kesekretariatan/TU	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100	21,084,673	95	18,999,660	95	15,442,200	25	2,758,800	50	2,775,000	75	-	100	-	60	15,442,200	155	34,441,860	31	6,888,372	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
G	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100	85,180,000	95	63,570,000	95	71,521,500	25	9,734,000	50	12,265,000	75	-	100	-	60	71,521,500	155	135,091,500	31	27,018,300				
15	Kondisi Kendaraan Layak Pakai dan Pajaknya terbayar	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan Kendaraan yang Pajaknya Terbayar	100	60,010,000	95	52,010,000	95	52,010,000	25	9,254,000	50	12,265,000	75	-	100	-	60	52,010,000	155	104,020,000	31	20,804,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
16	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100	2,000,000	95	1,110,000	95	1,000,000	25	480,000	50	-	75	-	100	-	60	1,000,000	155	2,110,000	31	422,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
17	Tercapainya Prosentase Rata-Rata Pemeliharaan Gedung Kantor	Sub.Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yag dipelihara	100	23,170,000	95	10,450,000	95	18,511,500	25	-	50	-	75	-	100	-	60	18,511,500	155	28,961,500	31	5,792,300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
II	Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan DiKecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Yg Sesuai Standar Pelayanan Publik	100	2,500,000	95	8,200,000	95	8,268,130	25	2,212,930	50	2,265,200	75	-	100	-	60	8,268,130	155	16,468,130	31	3,293,626				
H	Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yg Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Pemerinnah Daerah Yg ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Yg Diselesaikan DiKecamatan	100	2,500,000	95	8,200,000	95	8,268,130	25	2,212,930	50	2,265,200	75	-	100	-	60	8,268,130	155	16,468,130	31	3,293,626				
18	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan DiKecamatan	Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Yg Dilaksanakan DiKecamatan	100	2,500,000	95	8,200,000	95	8,268,130	25	2,212,930	50	2,265,200	75	-	100	-	60	8,268,130	155	16,468,130	31	3,293,626	Seksi Pelayanan Publik			
III	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW Yg Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat Yg Aktif	100	70,373,900	95	52,463,050	95	48,193,100	25	20,782,600	50	7,285,500	75	-	100	-	60	48,193,100	155	100,656,150	31	20,131,230				
I	RPJM Desa dan RKPDesa	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Yg Difasilitasi	100	70,373,900	95	52,463,050	95	48,193,100	25	20,782,600	50	7,285,500	75	-	100	-	60	48,193,100	155	100,656,150	31	20,131,230				
19	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Desa Yg Aktif	Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa Yg Aktif	100	70,373,900	95	52,463,050	95	48,193,100	25	20,782,600	50	7,285,500	75	-	100	-	60	48,193,100	155	100,656,150	31	20,131,230	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
IV	Jumlah Pelaksanaan Patroli Wilayah, Penyuluhan Keamanan	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	100	3,750,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-				

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab						
							I		II		III		IV											
							5	6	7	8	9	10	11	12					13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
J	Kemamanan dan Ketertiban Umum Yg Terkendali	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jenis Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	3,750,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	
20	Jumlah Kasus Yg dapat Diselesaikan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian NRI, TNI dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah Kasus Yg dapat Diselesaikan	100	3,750,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	Seksi Tranrib
V	Jumlah Desa Yg Pengelolaan Keuangan Yg Sesuai Renulasi	Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	102,567,500	95	79,836,930	95	67,090,030	25	16,200,000	50	16,200,000	75	-	100	-	60	67,090,030	155	146,926,960	31	29,385,392	
K	Administrasi Desa	Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengelolaan Keuangan Desa Yg Efektif	100	102,567,500	95	79,836,930	95	67,090,030	25	16,200,000	50	16,200,000	75	-	100	-	60	67,090,030	155	146,926,960	31	29,385,392	
21	Jumlah Desa yang di Fasilitas Tata Pemerintahan Desarwa	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitas Tata Pemerintahan Desanya	100	3,500,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	Seksi Pemerintaha n
22	Jumlah Desa Yg Menyelor SPJ Tepat Waktu	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yg Menyelor SPJ Tepat Waktu	100	45,767,500	95	37,567,350	95	33,468,200	25	8,100,000	50	8,100,000	75	-	100	-	60	33,468,200	155	71,035,550	31	14,207,110	Seksi Pemerintaha n
23	Jumlah Pos Kamling/Pos Ronda Yg Aktif	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Pos Kamling / Pos Ronda Yg Aktif	100	50,300,000	95	42,269,580	95	33,621,830	25	8,100,000	50	8,100,000	75	-	100	-	60	33,621,830	155	75,891,410	31	15,178,282	Seksi Tranrib
24	Jumlah Desa yang di monitoring dan di Fasilitas	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang di monitoring dan di Fasilitas	100	3,000,000	95	-	95	-	25	-	50	-	75	-	100	-	60	-	155	-	31	-	Seksi Pemberdaya an Masyarakat
JUMLAH					2,523,737,500		2,025,419,170		1,901,746,460		371,792,073	19.550034	432,597,463	22.747378				1,901,746,460		3,927,165,630		785,433,126		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA PD kab Bantaeng berikutnya :																								
KECAMATAN GANTARANGKEKE																								
1	Dokumen Administrasi Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100	3,278,619,900	100	2,642,162,432	100	2,830,237,758	21	593,060,843	19	528,648,243	-	-	-	-	19	528,648,243	120	3,170,810,675	31	97	
A	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	100	20,086,900	100	17,667,100	100	18,221,200	17	3,137,400	32	5,836,000	-	-	-	-	32	5,836,000	133	23,503,100	31	117	
1	Terlaksananya Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Target Pelaporan Realisasi Keuangan Paling Lambat TGL 10 Bulan Berikutnya	100	20,086,900	100	17,667,100	100	18,221,200	17	3,137,400	32	5,836,000	-	-	-	-	32	5,836,000	133	23,503,100	31	117	Sub.Bagian Program dan Keuangan
B	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	2,829,822,000	100	2,405,752,650	100	2,629,909,558	21	554,374,791	18	481,618,811	-	-	-	-	18	481,618,811	120	2,887,371,461	31	102	
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Lancarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	2,749,822,000	100	2,362,613,809	100	2,600,702,858	21	549,124,791	18	472,221,261	-	-	-	-	18	472,221,261	120	2,834,835,070		103	
3	Terlaksananya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Lancarnya Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan	100	50,000,000	100	31,148,891	100	16,266,600	12	1,978,000	36	5,872,000	-	-	-	-	36	5,872,000	119	37,020,891	31	74	Sub.Bagian Program dan Keuangan
4	Penyampaian Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyampaian Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu	100	30,000,000	100	11,989,950	100	12,940,100	25	3,272,000	27	3,525,550	-	-	-	-	27	3,525,550	129	15,515,500	31	52	Sub.Bagian Program dan Keuangan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
										I		II		III		IV								
				5		6		7		8		9		10		11			12		13= 6 + 12			14 = 13/5x100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
C	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesentase Pengadministrasian Kepegawaian Pada PD	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	
5	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang tersedia	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang tersedia	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang tersedia	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n
D	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	160,000,000	100	79,348,825	100	65,369,100	32	21,002,100	25	16,405,000	-	-	-	-	25	16,405,000	121	95,753,825	31	60	
6	Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik atau Penerangan yang tersedia	100	5,000,000	100	2,378,000	100	1,359,100	100	1,359,100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2,378,000	31	48	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n
7	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi/Bahan Bacaan Bagi ASN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	5,000,000	100	2,784,000	100	1,560,000	25	390,000	25	390,000	-	-	-	-	25	390,000	114	3,174,000	31	63	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n
8	Tercapainya Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi yang diikuti	100	150,000,000	95	74,186,825	95	62,450,000	31	19,253,000	26	16,015,000	-	-	-	-	26	16,015,000	122	90,201,825	31	60	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n
E	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	70,000,000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	
9	Terpenuhinya Kebutuhan pengadaan Roda Dua	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Dua Yang diadakan	100	40,000,000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n
10	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	100	20,000,000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n
11	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	100	10,000,000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n
F	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	58,711,000	100	48,307,817	100	34,599,900	14	4,791,552	27	9,193,432	-	-	-	-	27	9,193,432	119	57,501,249	31	98	
12	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Terbayar	100	8,000,000	95	9,950,749	95	5,340,000	34	1,791,552	31	1,653,532	-	-	-	-	31	1,653,532	117	11,604,281	31	145	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n
13	Terpenuhinya Kebutuhan Rata-Rata Pelayanan Administrasi Kesekretariatan/TU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100	50,711,000	100	38,357,068	100	29,259,900	10	3,000,000	26	7,539,900	-	-	-	-	26	7,539,900	120	45,896,968	31	91	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n
G	Kinerja Keuangan dan Administrasi Kecamatan	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100	140,000,000	100	91,086,040	100	82,138,000	12	9,755,000	19	15,595,000	-	-	-	-	19	15,595,000	117	106,681,040	31	76	
14	Kondisi Kendaraan Layak Pakai dan Pajaknya terbayar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan Kendaraan yang Pajaknya Terbayar	100	90,000,000	95	61,606,040	95	56,058,000	17	9,755,000	28	15,595,000	-	-	-	-	28	15,595,000	125	77,201,040	31	86	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n
15	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100	-	-	-	-	1,380,000	0	-	-	300,000	-	300,000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	31	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n
16	Tercapainya Prosentase Rata-Rata Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yag dipelihara	100	50,000,000	100	29,480,000	100	24,700,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	29,480,000	31	59	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
II	Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	-	12,002,000	22	2,622,000															
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	#REF!	Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-	0	-	0	12,002,000	22	2,622,000													
	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	#REF!	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	0	-	0	12,002,000	22	2,622,000		3,949,000											
III	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW Yang Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat Yang Aktif	100	1,073,000,000	100	674,759,927	100	272,803,200	3	7,163,772	54	146,524,608	-	-	-	-	54	146,524,608	122	821,284,535	31	77	
H	RPJM dan RKPD Desa/Kelurahan	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Yg Difasilitasi	100	73,000,000	100	60,004,672	100	41,873,500	11	4,400,000	52	21,867,500	-	-	-	-	52	21,867,500	136	81,872,172	31	112	
17	RPJM dan RKPD Desa/Kelurahan	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa Yang Aktif	100	73,000,000	100	60,004,672	100	41,873,500	11	4,400,000	52	21,867,500	-				52	21,867,500	136	81,872,172	31	112	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
I	RPJM dan RKPD Desa/Kelurahan	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Yg Difasilitasi	100	1,000,000,000	100	614,755,255	100	230,929,700	1	2,763,772	54	124,657,108	-	-	-	-	54	124,657,108	120	739,412,363	31	74	
18	RPJM dan RKPD Desa/Kelurahan	Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana yang terbangun	100	600,000,000	100	394,864,525	100	95,370,000	0	-	35	33,280,000	-				35	33,280,000	108	428,144,525		71	
19	RPJM dan RKPD Desa/Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yg terevaluasi penyelenggaraan operasional pemerintahannya	100	400,000,000	100	219,890,730	100	135,559,700	2	2,763,772	67	91,377,108	-				67	91,377,108	142	311,267,838		78	
IV	Jumlah Pelaksanaan Patroli Wilayah, Penyuluhan Keamanan	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	100	200,000,000	100	219,600,000	100	261,000,000	0	-	40	105,150,000	-	-	-	-	40	105,150,000	148	324,750,000	31	162	
J	Keamanan dan Ketertiban Umum Yg Terkendali	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jenis Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	200,000,000	100	219,600,000	100	261,000,000	0	-	40	105,150,000	-	-	-	-	40	105,150,000	148	324,750,000	31	162	
18	Jumlah Kasus Yg dapat Diselesaikan	Sinergitas dengan Kepolisian NRI, TNI dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah Kasus Yg dapat Diselesaikan	100	200,000,000	100	219,600,000	100	261,000,000	0	-	40	105,150,000	-				40	105,150,000	148	324,750,000	31	162	Seksi Trantib
V	Jumlah Desa Yg Pengelolaan Keuangan Yg Sesuai Regulasi	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	105,000,000	100	41,519,600	100	39,415,820	16	6,177,260	26	10,250,300	-	-	-	-	26	10,250,300	125	51,769,900	31	49	
K	Administrasi Desa	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengelolaan Keuangan Desa Yg Efektif	100	105,000,000	100	41,519,600	100	39,415,820	16	6,177,260	26	10,250,300	-	-	-	-	26	10,250,300	125	51,769,900	31	49	
19	Jumlah Desa Yg Menyeter SPJ Tepat Waktu	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yg Menyeter SPJ Tepat Waktu	100	50,000,000	-	-	-	11,002,260	0	2,000,000	-	3,564,000	-	3,564,000			-	#DIV/0!	-	31			Seksi Pemerintahan
1	Jumlah Pos Kamling/Pos Ronda Yg Aktif	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Pos Kamling / Pos Ronda Yg Aktif	100	30,000,000	100	22,535,300	100	13,684,000	17	2,370,000	32	4,443,300	-				32	4,443,300	120	26,978,600	31	90	Seksi Trantib
20	Jumlah Desa/Kelurahan yang di monitoring dan di Fasilitasi	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan di Fasilitasi Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang di monitoring dan di Fasilitasi	100	25,000,000	100	18,984,300	100	14,729,560	12	1,807,260	39	5,807,000	-				39	5,807,000	131	24,791,300	31	99	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
JUMLAH					4,258,379,827	-	3,176,085,232	-	3,415,458,778	18	606,401,875	23	790,573,151	-	-	-	-		-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA PD kab.Bantaeng berikutnya :																								
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																								
A.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2,354,312,528.00		2,110,859,709.00		2,098,416,070.00	17.67	415,890,335.00		554,586,154.00		-			415,890,335.00		2,526,750,044.00		107.32		
1		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prasentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi		34,240,630.00		19,400,000.00		21,832,860.00	27.65	9,466,400.00		9,655,300.00					9,466,400.00		24,365,000.00		71.16		
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90	8,800,800.00						4,501,400.00		2,080,900.00					4,501,400.00		4,501,400.00		51.15		
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKP dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	90	4,174,400.00		-		4,850,000.00	23.96	1,000,000.00		2,174,400.00					1,000,000.00		1,000,000.00		23.96		
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	90	4,671,700.00		-		4,114,530.00	21.41	1,000,000.00		1,900,000.00					1,000,000.00		1,000,000.00		21.41		
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bidang Penanggulangan bencana	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	-		-		-		-							-		-	-	-	0.00	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuang an
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bidang Penanggulangan bencana	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan	0	-		-		-		-							-		-	-	-	0.00	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuang an
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bidang Penanggulangan bencana	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	0	-		-		-									-		-	-	-	0.00	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuang an
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bidang Penanggulangan bencana	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan RKA	0	-		-		-		-							-		-	-	-	0.00	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuang an
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bidang Penanggulangan bencana	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DokumenPenyusunan DPA-SKPD	0	-		-		-		-							-		-	-	-	0.00	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuang an

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
9	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bidang Penanggulangan bencana	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan	
10	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bidang Penanggulangan bencana	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan	
11	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	16,593,730.00	2.53	19,400,000.00	1 Paket	12,868,330.00	2,965,000.00	3,500,000.00					2,965,000.00	0.49	22,365,000.00			134.78	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan		
12	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bidang Penanggulangan bencana	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan	
II	Tercapainya Perunjuk urusan Pemerinatah Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prasentase Capaian Penunjang Urusan Pemerinatahan daerah	100	1,900,654,698.00	7.33	1,644,489,600.00	8.60	1,746,567,100.00	36.40	347,927,919.00		457,934,742.00			346,083,519.00		1,990,573,119.00			104.73			
1	Tercapainya Perunjuk urusan Pemerinatah Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1,871,512,468.00	7.21	1,627,565,100.00	12 bln	1,733,041,920.00	36.10	342,223,819.00		448,528,942.00			342,223,819.00	0.24	1,969,788,919.00			105.25	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan		
2	Meningkatnya Penatausahaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	17,282,830.00		13,101,250.00	1 Paket	11,295,230.00	22.34	3,859,700.00		4,581,200.00			3,859,700.00	0.18	16,960,950.00	0.04		98.14	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan		
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	5 Dokumen	2,026,600.00	-	-	-	-	712,900.00	831,800.00					-	-	-	-	0.00	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan			
4		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	5,169,300.00	-	-	-	-	433,900.00	1,842,000.00													

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	4,663,500.00		3,823,250.00	1 Paket	2,229,950.00	41.96	697,600.00		2,150,800.00					-	0.07		3,823,250.00	0.01	81.98	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
III		Administrasi Umum Perangkat Daerah			159,870,400.00	4.76	174,308,000.00	5.56	90,093,980.00	26.03	19,130,120.00		44,538,811.00				19,130,120.00		193,438,120.00				121.00	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
1		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi Keuangan	0	-	-	-	-	-		-		-				-		-		-			Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
2		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	0	-		-		-		-		-				-		-		-			Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	17,128,900.00	6.10	-		-		-		3,719,300.00				-	0.16		-				Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
4		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	2,000,000.00		-		-		-		600,000.00				-		-		-			Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	0	2,721,500.00		-		729,980.00		906,300.00						906,300.00				906,300.00		33.30	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
6		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	0	-		-		-		-		-				-		-		-			Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kenerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	4,800,000.00		-		-		1,200,000.00		1,200,000.00						1,200,000.00	-	1,200,000.00			Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuang an
8		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang di Fasilitasi	0	-		-		-		-								-	-	-			Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuang an
9	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Paket	133,220,000.00	3.68	174,308,000.00	1 Paket	89,364,000.00	14.40	17,023,820.00		39,019,511.00					6.30	17,023,820.00	0.43	191,331,820.00			Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuang an
10		Fasilitas Pelayanan administrasi Kesekretariatan/tata usaha	Lancarnya Operasional kantor	0	-	-	-		-		-								-		-			Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuang an
VI		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,700,000.00	18.20	-	4.57	13,835,200.00		-		-						-		-		-	
1		Pembangunan Gedung Kantor (Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir)		0			-												-		-			
2		Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	0	-	7.26	-		-		-								-	0.14	-			Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuang an
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Meubeleur	Jumlah mebel yang diadakan	0	-		-	5.33	-		-								-	-	-	-		Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuang an
4		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0	-		-		-		-								-	-	-	-		Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuang an

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Paket	2,700,000.00	-	0.33	13,835,200.00	-									-	-	-	-	-	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan	
V		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah		92,440,400.00	3.76	77,064,344.00	3.25	76,144,930.00	20.34	18,950,896.00		18,647,301.00					18,950,896.00		96,015,240.00			103.87	
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		4,982,800.00	-	-	-	-	1,118,300.00		449,900.00						1,118,300.00	-	1,118,300.00	-	-	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan	
2		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan Kantor		-	-	-	-	-	-		-						-	-	-	-	-	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan	
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	55,856,000.00	3.23	57,654,000.00	3 Paket	56,736,000.00	11.99	12,932,396.00		11,609,201.00					3.31	12,932,396.00	0.61	70,586,396.00	0.12	126.37	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	31,601,600.00		19,410,344.00	1 Paket	19,408,930.00		4,900,200.00		6,588,200.00					6.00	4,900,200.00	0.17	24,310,544.00	0.03	76.93	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
VI		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik		164,406,400.00	2.01	195,597,765.00	1.24	149,942,000.00	6.94	20,415,000.00		23,810,000.00					20,415,000.00		216,012,765.00	0.23	131.39		
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Kendaraan	49,993,000.00		49,630,000.00	2 Paket	49,630,000.00	3.76	8,115,000.00		8,250,000.00					1.20	8,115,000.00	0.83	57,745,000.00	0.17	115.51	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Kendaraan	99,412,000.00	0.98	119,590,000.00	3 Paket	99,412,000.00	6.18	11,600,000.00		14,860,000.00					1.20	11,600,000.00	1.85	131,190,000.00	0.37	131.97	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional																-	-	-	-	-		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara	5 Paket	2,875,000.00		2,795,000.00	1 paket	900,000.00	8.67	700,000.00		700,000.00					4.64	700,000.00	0.22	3,495,000.00	0.04	121.57	Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	1 Paket	12,126,400.00	16.81	23,582,765.00	1 Paket	-	17.74	-								-		23,582,765.00	0.09		Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
6		Pemeliharaan Rutin Berkala /Berkala Kendaraan Dinas Operasional			-				-		-								-		-			
7		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor			-				-		-								-		-			
8		Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	100	-				-		-								-	-	-	-		Kesekretariat an BPBD dan Sub Bagian Program sub Bag.Keuangan
B.		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Capaian Layanan Penanggulangan Bencana		23,384,279,801.00	1.90	4,256,543,116.00	1.88	5,860,589,457.00	15.72	26,327,400.00		1,144,635,652.00						26,327,400.00		5,620,552,542.00		0.00	
I		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		34,221,700.00		-		10,599,850.00										-		-		-	
1	Meningkatnya Informasi Pelayanan Publik	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	100	-		-		-		-								-		-	0.00		Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2	Meningkatnya Pelayanan Publik	Sosialisasi ,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis bencana)	Jumlah orang yang mendapat Sosialisasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada dikawasan tempat tinggalnya	50 Orang	34,221,700.00		-		10,599,850.00		-								-		-	0.00	-	Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
II		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		23,240,527,101.00	11.24	4,142,483,366.00	0.87	5,735,750,757.00	7.13	19,900,000.00		1,126,235,652.00						19,900,000.00		4,126,736,866.00		17.76	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	50 Orang	11,226,700.00		5,000,000.00	2 kali	10,123,900.00	47.19	-								-		5,000,000.00	0.004	44.54	Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	1 Dokumen	224,561,100.00		1,947,394,202.00	1 tahun	1,081,815,282.00	0.59	18,700,000.00		91,142,700.00					0.21589069	18,700,000.00	4.63	1,966,094,202.00	0.926	875.53	Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	3 Paket	20,360,100.00		-	3 Paket	9,514,250.00		1,200,000.00								1,200,000.00		1,200,000.00		5.89	Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Resiko Bencana	1 Dokumen	15,310,000.00		7,185,000.00	1 Paket	4,785,000.00	31.34	-						-		7,185,000.00		46.93		Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Peserta Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan kesiapsiagaan	50 Orang	56,041,800.00		35,646,500.00	1 Paket	-		-						-		-				Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6		Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana		-		-		-		-						-		-				Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
7		Pemantauan Potensi Bencana	Jumlah Pemantauan Potensi Bencana		-	-	-		-		-						-		-				Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
8		Operasionalisasi Pos Komando/Siaga Tanggap Darurat Bencana			-				-								-		-				
9	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	100	22,874,279,901.00	28.17	2,147,257,664.00	7 Paket	4,585,655,525.00	40.61	-		1,034,518,352.00			16.0927119	-	0.10	2,147,257,664.00	0.020	9.39		Bidan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
10		Fasilitas Perbaikan (Rehabilitasi)Sarpras Umum,Fasilitas Pemerintah,Lingkungabn dan Rumah Penduduk	Terlaksananya Fasilitas Perbaikan (Rehabilitasi)Sarpras Umum,Fasilitas Pemerintah,Lingkungabn dan Rumah Penduduk		-	-	-		-		-						-		-				Bidan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
11		Fasilitas Pembangunan(Rekonstruksi)Sarpras umum,fasilitas Pemerintah dan sarana sosial Pasca Bencana	Terlaksananya Fasilitas Pembangunan(Rekonstruksi)Sarpras umum,fasilitas Pemerintah dan sarana sosial Pasca Bencana		-	-	-		-		-						-		-				Bidan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
12	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Berkembangnya Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	29 Orang	38,747,500.00		-	10.81	43,856,800.00		-		574,600.00				-		-				Bidan Kedaruratan dan Logistik
III		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		59,962,400.00	0.08	101,192,750.00	2.93	70,004,700.00	45.55	4,177,400.00		16,400,000.00				4,177,400.00		3,812,003,092.00		6,357.32		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	25 Orang	5,800,000.00	#DIV/0!	-	11.70	3,750,000.00		-						-	0.00	0.00	0.00	-		Bidan Kedaruran dan Logistik
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Paket	54,162,400.00	1.38	101,192,750.00	3 Paket	66,254,700.00	35.23	4,177,400.00		16,400,000.00			3.2823607	4,177,400.00	1.03	246,146,050.00	0.21	454.46		Bidan Kedaruran dan Logistik
3		Pengadaan Logistik dan Peralatan Perlengkapan PB			-				-								-						Bidan Kedaruran dan Logistik
4		Program Kedaruratan dan Logistik penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Program Kedaruratan dan Logistik penanggulangan Bencana		-	-	-		-		-						-		3,565,857,042.00				Bidan Kedaruran dan Logistik
5		Pengadaan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik	Jumlah Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik		-		-		-		-						-		0.00				Bidan Kedaruran dan Logistik
6		Penyebartluasan Informasi Kebencanaan melalui media massa dan media sosial	Jumlah Penyebarluasan Informasi Kebencanaan melalui media massa dan media sosial		-		-		-		-						-		0.00				Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
IV		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		49,568,600.00	5.07	12,867,000.00	11.45	44,234,150.00		2,250,000.00		2,000,000.00				2,250,000.00		130,331,900.00		262.93		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	I		II		III		IV		12		13= 6 + 12		14 = 13/5x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4																				15	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Regulasi Penanggulangan bencana	1 Dokumen	20,668,600.00		-		11,594,200.00		-							-	0.00	0.00	0.00	-	Bidan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	30 Orang	-		6,000,000.00	1 Dok	8,722,950.00		-							-	0.00	0.00	0.00		Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kerjasama antar Lembaga dan Mitra dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	100	28,900,000.00	3.19	6,867,000.00	1 kali	23,917,000.00		2,250,000.00		2,000,000.00				2,250,000.00	0.33	91,176,750.00	0.07	315.49		Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
4		Penyusunan Profil BPBD	Jumlah Profil BPBD		-		-		-		-							-		14,061,100.00			Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
5		Penyusunan Perda ,SOP dan SPM Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Perda ,SOP dan SPM Penanggulangan Bencana		-		-		-		-							-					Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
6		Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana		-		-		-		-							-		25,094,050.00			Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
7	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan dan Pemanpaatan Sistem Imformasi Bencana	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Imformasi Bencana	100	-		-		-		-							-	0.00	0.00			Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100	-		-		-		-							-	0.00	0.00	0.00		Bidan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
Jumlah					25,738,592,329.00		6,367,402,825.00		7,959,005,527.00		442,217,735.00		1,699,221,806.00					442,217,735.00		6,809,620,560.00		26.46		
Rata-rata Capaian Kinerja																								
Predikat Kinerja																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA PD Kab.bantaeng Berikutnya																								
BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS																								
1		Program penunjang urusan pemerintahan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100	3,535,000,000	100	2,008,942,483	100	1,940,933,925	0.1913301	371,358,998.00	42.72	829,110,579.00	83.088173	1,612,686,536	87.47033	1,697,741,311	42.9084246	4,455,237,424	142.9084246	6,461,879,907	-		
1		Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	100	150,000,000	100	21,139,705	100	42,346,500	0.1911374	8,094,000.00	49.40	20,920,600.00	84.297876	35,697,200	83.39969	39,551,500	49.5945119	104,263,300	149.5945119	125,403,005	-		
		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100	50,000,000	100		5	8,477,900	0.2152656	1,825,000.00	54.54	4,623,600	54.537091	4,623,600	100	8,477,900	54.7523561	19,550,100	154.7523561	19,550,105	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100	50,000,000	100	3,907,800	100	-	0			-		0		0	0	0	100	3,907,800	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11			12		13= 6 + 12			14 = 13/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4																				15		
		Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	50,000,000	100	17,231,900	100	33,868,600	0.1850977	6,269,000	48.12	16,297,000.00	91.747518	31,073,600	91.74752	31,073,600	48.3034138	84,713,200	148.3034138	101,945,100	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2		Administrasi keuangan perangkat daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100	2,030,000,000	100	1,822,454,878	100	1,599,493,725	0.1929607	308,639,398.00	43.97	703,299,208.00	88.385557	1,413,721,436	88.38556	1,413,721,436	44.1630743	3,839,381,478	144.1630743	5,661,836,356	-	-		
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	2,000,000,000	100	1,819,230,878	100	1,594,668,425	0.1905187	303,814,098	43.80	698,473,908	88.350413	1,408,896,136	88.35041	1,408,896,136	43.9910917	3,820,080,278	143.9910917	5,639,311,156	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	30,000,000	100	3,224,000	100	4,825,300	1	4,825,300	100.00	4,825,300.00	100	4,825,300	100	4,825,300	101	19,301,200	201	22,525,200	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3		Administrasi umum perangkat daerah	jumlah administrasi umum perangkat daerah	100	350,000,000	100	111,257,000	100	182,511,700	0.1835691	33,503,500.00	34.27	62,546,871.00	1.8598808	3,394,500	76.79797	140,165,275	34.4536301	239,610,146	134.4536301	348,567,146	-	-		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	50,000,000	100	2,300,000	100	3,394,500	0.2670496	906,500	57.79	1,961,600	100	3,394,500	100	3,394,500	58.0546472	9,657,100	158.0546472	11,957,100	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan di adakan	100	50,000,000	100	2,300,000	100	16,335,200		-		-		0		0								
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	250,000,000	100	106,657,000	100	162,782,000	0.2002494	32,597,000	37.22	60,585,271	0	-	84.02082	136,770,775	37.4189044	229,953,046	137.4189044	336,610,046	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Luar provinsi	
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan barang milik daerah	100	550,000,000	0	-	100	33,892,000	0				82.113773	27,830,000	82.11377	27,830,000								
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	550,000,000	0	-	1	33,892,000	0	-		-	82.113773	27,830,000	82.11377	27,830,000								
4		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	150,000,000	0	15,553,600	100	35,228,900	0.2150819	7,577,100.00	46.41	16,350,500.00	127.0474	44,757,400	88.08138	31,030,100	46.6272606	99,715,100	46.62726057	115,268,700	-	-		
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	75,000,000	0	13,679,750	100	13,727,300	0.1972711	2,708,000	46.80	6,425,000	226.04664	31,030,100	100	13,727,300	47.0018139	53,890,400	0	67,570,150	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	75,000,000	43861100	16,992,000	100	21,501,600	0.2264529	4,869,100	46.16	9,925,500	63.843156	13,727,300	80.47215	17,302,800	46.3881339	45,824,700	43861146.39	62,816,700	-	-	Badan Kesatu	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13= 6 + 12	Rp	14 = 13/5x100%	Rp	
1	2	3	4	K		K		K		K		K		K		K		K		K		K		
5		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100	130,000,000	100	38,537,300	100	47,461,100	0.2853916	13,545,000.00	54.77	25,993,400.00	183.91061	87,286,000	95.74789	45,443,000	55.0531909	172,267,400	155.0531909	210,804,700	-		
		Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	100	75,000,000	100	34,437,300	100	43,861,100	0.2816847	12,355,000	52.16	22,878,000	103.60661	45,443,000	95.39888	41,843,000	52.4417992	122,519,000	152,4417992	156,956,300	-		Badan Kesatuan Bangsa dan
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	55,000,000	100	4,100,000	100	3,600,000	0.3305556	1,190,000	86.54	3,115,400	1162.3056	41,843,000	100	3,600,000	86.8694444	49,748,400	186.8694444	53,848,400	-		Badan Kesatu
6		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengadaan pengadaan barang milik daerah	100	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah aset kantor	100	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah paket pembangunan kantor	100	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah paket sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	100	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-		Badan Kesatu
7		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	100	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah bimtek	100	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-		Badan Kesatu
8		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100	450,000,000	0	33,441,800	80	138,073,600	0.2257405	31,168,800.00	28.05	38,726,300.00	66.100906	91,267,900	36.17505	49,948,200	28.273318	211,111,200	28.273318	244,553,000	-		
		Perumusan Kebijakan teknis dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	100	200,000,000	0	15,078,800	80	75,674,600	0.3935772	29,783,800	46.47	35,168,800	66.003917	49,948,200	54.60181	41,319,700	46.867295	156,220,500	46.86729497	171,299,300	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	250,000,000	0	18,363,000	80	62,399,000	0.0221959	1,385,000	5.70	3,557,500.00	66.218529	41,319,700	13.82795	8,628,500	5.72340903	54,890,700	5.723409029	73,253,700	-		Badan Kesatu

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6 + 12	14 = 13/5x100%	15										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
9		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etnis serta budaya politik	Persentase peningkatan peran partai politik	100	6,600,000,000	0	724,717,430	85	11,591,656,450	0	-	3.08	357,318,105.00	195.44219	22,654,987,410	98.29775	11,394,337,755	3.08254568	34,406,643,270	3.082545679	35,131,360,700	-	-	
		Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	100	5,000,000,000	0	649,785,000	85	11,451,636,150	0		2.79	319,810,205	99.499649	11,394,337,755	98.33223	11,260,649,655	2.79270316	22,974,797,615	2.792703163	23,624,582,615	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	750,000,000	0			140,020,300			26.79	37,507,900	8042.1551	11,260,649,655		133,688,100							
		Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	100	850,000,000	0	74,932,430	0	-	0	0	0.00	-	0		0	0	0	0	0	74,932,430	-	-	Badan Kesatu
10		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase pemenuhan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100	650,000,000	0	152,372,000	0	133,216,200	0	22,750,000.00	0.00	49,363,600.00	100	133,216,200	100	133,216,200	0	338,546,000	0	490,918,000	-	-	
		Penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	100	300,000,000	0	7,484,000	80	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	7,484,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	100	350,000,000	0	144,888,800	80	133,216,200	0.170775	22,750,000	37.06	49,363,600	100	133,216,200	100	133,216,200	37.2260281	338,546,000	37.22602807	483,434,000	-	-	Badan Kesatu

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n - 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13= 6 + 12	Rp	14 = 13/5x100%	Rp	
1	2	3	4	K		K		K		K		K		K		K		K		K				
11		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100	920,000,000	0	116,557,200	80	233,887,000	0.0051307	1,200,000.00	29.47	68,937,400.00	76.078192	177,937,000	53.38262	124,855,000	29.4797915	372,929,400	29.47979152	489,486,600	-		
		Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	100	570,000,000	0	43,653,200	80	81,552,000	0		35.46	28,917,800	153.09864	124,855,000	65.08976	53,082,000	35.4593388	206,854,800	35.45933883	250,508,000	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	100	350,000,000	0	72,904,000	100	152,335,000	0.0078774	1,200,000	26.27	40,019,600	34.845571	53,082,000	47.11524	71,773,000	26.2786622	166,074,600	26.27866216	238,978,600	-		Badan Kesat
12		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase penanganan konflik Ipoeksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan	100	980,200,000	0	239,454,200	100	926,420,100	0.1290591	119,562,900.00	40.39	374,191,402.00	101.2702	938,187,462	70.25255	650,833,732	40.5201734	1,353,822,592	40.52017341	1,593,276,792	-		
		penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	100	380,200,000	0	111,618,000	100	112,030,100	0.1691063	18,945,000	45.54	51,022,000	580.94542	650,833,732	80.44064	90,117,730	45.7122238	810,918,462	45.71222377	922,536,462	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	100	350,000,000	0	67,550,000	100	114,495,000	0.153011	17,519,000	48.01	54,966,000	78.708878	90,117,730	96.37539	110,345,000	48.1603476	272,947,730	48.16034761	340,497,730	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	100	250,000,000	0	60,286,200	100	104,978,000	0.1987502	20,864,400	49.40	51,856,000	105.1125	110,345,000	82.77068	86,891,000	49.5957667	269,956,400	49.59576673	330,242,600	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PelaksanaanForum Koordinasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksan	100	2,000,000,000	-	594,917,000		62,234,500		216,347,402		86,891,000	61.0976	363,480,002		728952904					-		
					13,135,200,000		3,275,485,113	75	14,964,187,275	0.0364898	546,040,698.00	11.48	1,717,647,386.00	171.13046	25,606,282,508	93.89706	14,050,932,198	11.51	41,138,289,886	11.51487723	44,411,474,999	-		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya aparat yang berkinerja yang bisa menunjang keberhasilan sebuah program/kegiatan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Perlu bimbingan/pelatihan pada aparat terkait serta anggaran yang mencukupi																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								

1 Perangkat Daerah kabupaten /Kota berikutnya :



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEUANGAN DAERAH

Pembangunan Kabupaten Bantaeng berada pada pertengahan pelaksanaan periode pembangunan daerah tahun 2024 - 2026. Pelaksanaan pembangunan tahun 2025 ini diupayakan akselerasi dalam pencapaian target pembangunan periode 2024-2026. Oleh karena itu, dalam hal perencanaan pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya pemahaman bahwa anggaran memiliki fokus dalam pencapaian prioritas-prioritas pembangunan khususnya dalam menyelesaikan pelaksanaan tahap akhir pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantaeng.

Pada dasarnya, perencanaan pembangunan perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah disekitarnya. Strategi pembangunan perlu memerhatikan kekhasan daerah yang menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah, perlu mengkaji pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai aspek. Menentukan kebijakan perekonomian Kabupaten Bantaeng akan menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan “besaran anggaran” yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada pembangunan periode berikutnya.

Penataan ‘besaran keuangan’ berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah secara menyeluruh.

Pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya akan menjadi pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Pembelajaran tersebut akan menjadi titik tolak perumusan kebijakan pembangunan yang lebih akuntabel sehingga diharapkan terjadi akselerasi capaian pembangunan untuk mewujudkan target kinerja pembangunan Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, hasil dari pelaksanaan perencanaan pembangunan periode sebelumnya sudah tentu menunjukkan hasil-hasil yang dirumuskan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Positif maupun negatifnya hasil pembangunan tersebut akan menjadi tolok ukur pelaksanaan pembangunan tahunan periode ini maupun ke depan baik melalui penyempurnaan program dan kegiatan maupun penggantian program dan kegiatan yang lebih baik.



Rumusan perencanaan pembangunan 2025 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026. Selain itu, penyusunan dokumen ini juga melihat bagaimana perencanaan tahun 2025 baik pada level Provinsi Sulawesi Selatan maupun perencanaan Nasional. Selain itu, rancangan kerangka ekonomi makro daerah diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkirakan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2025 untuk mewujudkan target pembangunan pada tahun berkenaan.

Guna melihat arah kebijakan perekonomian yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, analisis ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan pada tahapan pembangunan daerah. Analisis ekonomi melalui indikator makro ekonomi daerah dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah, apakah sudah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah atau belum sepenuhnya terlaksana. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah merujuk pada strategi dan rencana yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan ekonomi lokal. Berbagai potensi daerah menjadi modal dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantaeng. Secara umum, arah kebijakan ekonomi Bantaeng dapat dijabarkan sebagai berikut.

3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1 Prospek Perekonomian

A. Prospek Perekonomian Nasional

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000-Rp15.400 per US\$.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan



masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor utamanya produk industri. Sementara impor juga diperkirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Dari sisi keuangan negara, kebijakan Fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*well-being*), serta mendorong pemerataan antardaerah.

Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan dengan cara optimalisasi Pendapatan Negara (*collecting more*), peningkatan kualitas Belanja Negara (*spending better*), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara prudent dan kredibel.

Pendapatan Negara dan Hibah ditargetkan mencapai 13,21–14,20 persen Produk Domestik Bruto, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar 10,70–11,20 persen Produk Domestik Bruto dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 2,50–3,00 persen Produk Domestik Bruto. Optimalisasi Pendapatan Negara diarahkan pada upaya perbaikan administrasi dan pemungutan perpajakan yang lebih efektif sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan kelembagaan penerimaan negara, percepatan implementasi core tax system, penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak, penajaman *tax incentive* tepat sasaran untuk mendorong sektor prioritas, serta reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara, pemanfaatan aset Barang Milik Negara, serta inovasi layanan.

Selain itu, upaya peningkatan penerimaan perpajakan juga dilakukan di daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, antara lain didukung oleh Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Belanja Negara ditargetkan mencapai 15,66–17,01 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 11,61–12,74 persen Produk Domestik Bruto dan Transfer ke Daerah



sebesar 4,05–4,27 persen Produk Domestik Bruto. Kebijakan Belanja Negara, baik Belanja Kementerian/Lembaga, Belanja Non-Kementerian/Lembaga, dan Belanja Transfer ke Daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan tetap mendorong peningkatan Kualitas Belanja Negara (*spending better*) supaya lebih produktif untuk mendukung prioritas pembangunan (antara lain pendidikan, kesehatan, subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran, infrastruktur/konektivitas, serta pembenahan kelembagaan dan regulasi) dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

Defisit dan Pembiayaan Anggaran dalam pelaksanaan keuangan nasional sangat diperhatikan dengan seksama sebagai upaya peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 diarahkan mendorong produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dimana Defisit Anggaran ditargetkan sebesar (2,45)–(2,80) persen Produk Domestik Bruto, dan belanja investasi *below the line* sebesar satu persen Produk Domestik Bruto. Dengan kebijakan tersebut, upaya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan diarahkan pada upaya penyediaan pembiayaan yang kredibel untuk mendukung kebutuhan pembangunan baik melalui pembiayaan utang dan non-utang (optimalisasi Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha dan *blended finance*). Fokus pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, proyek-proyek yang menghasilkan imbal hasil serta memberikan efek pengganda besar terhadap perekonomian, serta diarahkan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai *agent of development* yang mendukung prioritas pembangunan nasional.

Sebagai bentuk sinergi kebijakan fiskal nasional, perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan juga perlu dilakukan di tingkat pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut di antaranya melalui pemanfaatan instrumen pinjaman daerah dan obligasi/sukuk daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

B. Prospek Perekonomian Sulawesi Selatan

Posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki secara struktural dimana Sulawesi selatan merupakan episentrum perekonomian Sulampua, hal ini menyebabkan



pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan relatif stabil dibandingkan dengan perekonomian sulampua. Dalam kaitan itu Sulawesi selatan dapat mengambil langkah langkah strategis untuk menjadi basis perekonomian utama di Kawasan Indonesia Timur.

Prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2024. Pemerintah berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian yang diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi.

Sekaitan dengan tema pembangunan Tahun 2025, peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

Rezim ekonomi mengalami perlambatan, Kemunduran, membutuhkan penyesuaian. Ditengah upaya tata ulang prioritas pembangunan, satu agenda akan tetap digenjot. Selain penguatan inovasi, pemantapan hilirisasi pengolahan sumber daya alam juga menjadi fokus pembangunan tahun 2025. Hilirisasi bukan isu baru. Hilirisasi bahan mentah yang berasal dari industri ekstraktif diwilayah Sulawesi selatan harus dilakukan besar-besaran. Mulai produk pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, hingga migas.

Ada tiga rasionalitas dalam upaya mewujudkan hilirisasi SDA. Dalam jangka pendek, hilirisasi SDA bertujuan memperbaiki neraca perdagangan. Selama ini, neraca perdagangan memang kedodoran. Meskipun kaya SDA, namun industri domestik masih sangat ekstraktif. Produk SDA langsung diekspor –sebagai komoditas nir nilai tambah-



membuat tak mampu mendongkrak nilai ekspor. Ironisnya, pengolahan bahan mentah dari SDA kemudian diimpor dalam bentuk barang jadi. Dampak lanjutannya menghasilkan devisa minimalis. Konsekuensinya, Sulawesi selatan terus mengalami defisit transaksi berjalan.

Dalam jangka menengah. Hilirisasi sangat penting untuk mewujudkan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menciptakan berbagai industri pengolahan bahan baku yang melimpah. Selain akan menciptakan nilai tambah produk, multiplier effect-nya akan menciptakan berbagai peluang usaha lainnya. Mendatangkan investasi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan meningkatkan pendapatan. Pada akhirnya hilirisasi bisa menjadi pintu masuk terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai kawasan di Sulawesi selatan.

Dalam jangka panjang, hilirisasi SDA akan membawa Sulawesi selatan menjadi Kawasan industri, menjadi daerah eksportir- produsen dengan produk akhir bernilai tinggi, dan berkembang menjadi daerah industry maju di bidang pertanian, demikian pula dengan perikanan, perkebunan, pertambangan dan industry berbasis SDA lainnya.

Inovasi dan hilirisasi bidang pertanian sangat diperlukan mengingat pandemi menjadi momentum meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk lokal. Hilirisasi pertanian bersifat renewable lebih muda untuk dapat sustainable dan environmental friendly serta dapat mendukung kampanye global green economy,

Upaya Pemulihan Ekonomi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2023 dan dengan mencermati perkembangan ekonomi yang ada, maka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan kembali. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 antara lain; komoditas ekspor Sulawesi Selatan tidak terdampak perang dagang Amerika dan Tiongkok, peningkatan konsumsi rumah tangga, berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah pada peningkatan infrastruktur di luar daerah, serta berlangsungnya beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang ikut mendorong lapangan usaha konstruksi.

C. Prospek Perekonomian Kabupaten Bantaeng

Dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian Kabupaten Bantaeng di tahun 2025, pemulihan perekonomian disertai dengan penguatan kapabilitas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM menjadi prioritas pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan tema pembangunan Kabupaten Bantaeng di Tahun 2025



adalah Kesejahteraan Bantaeng Berbasis Kemandirian Ekonomi Kerakyatan.

Tema ini difokuskan pada kemandirian ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kualitas usaha mikro kecil dan menengah serta perekonomian sektor informal yang mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Bantaeng untuk segera pulih kembali.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pertumbuhan suatu daerah dalam satu periode. Di masa pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng pada tahun 2020 sebesar 0,52 persen. Persentase pertumbuhan ekonomi tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,75 persen. Adapun berbagai kebijakan telah diupayakan dan memberi dampak positif hingga memberikan hasil pertumbuhan ekonomi yang cukup melesat hingga mencapai 15,45 persen di tahun 2022, meskipun pada akhirnya kembali pada kondisi normal dengan perlambatan perekonomian dengan capaian 5,56 persen pada tahun 2023.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah

A. Tantangan Perekonomian Global

Dinamika perekonomian global tidak terlepas dari situasi terkini terkait kondisi pasca pandemi Covid-19, situasi perang Rusia-Ukraina, dan situasi kekurangan yang sangat kompleks. Sampai dengan akhir Tahun 2023, kondisi pandemi Covid-19 global terus membaik dan menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Banyak negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, yang tidak menggunakan kembali kebijakan pembatasan sosial. Meskipun demikian, varian baru Covid-19 EG.5 atau Eris sudah masuk ke beberapa negara termasuk Indonesia. Antisipasi dan tindak lanjut dari adanya varian baru ini secara umum dilakukan baik di Indonesia maupun di wilayah negara lain agar tidak menyebar secara masif seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi perekonomian global masih diliputi ketidakpastian sampai dengan akhir tahun 2023. Risiko dan ketidakpastian global ini dipicu dinamika negara-negara maju yang berdampak ke global. Amerika Serikat masih dihadapkan pada inflasi yang berada di atas target, tingginya suku bunga, peningkatan tekanan fiskal, dan tergerusnya excess saving yang membayangi pelemahan ekonomi. Sementara itu, negara maju lainnya yakni RRT masih bergulat dengan pelemahan ekonomi pasca Covid-19 dan Eropa yang kondisi



ekonominya melemah dengan defisit fiskal yang meningkat diiringi oleh *core inflation* yang masih tinggi.

Kondisi geopolitik juga menunjukkan resiko yang makin tinggi. Adanya kondisi perang di Ukraina maupun di Timur Tengah, terutama Palestina yang tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir menimbulkan *downside risk* terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Sentimen global juga akan dipengaruhi sehingga menimbulkan volatilitas di sektor keuangan dan prospek dari perang yang belum berakhir dan bahkan mungkin akan melebar akan menimbulkan tekanan proteksionisme dan melemahkan perdagangan global. Di sisi lain, prospek pertumbuhan global diperkirakan masih akan lemah dimana pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 direvisi turun oleh IMF menjadi hanya 3 persen dan oleh Bank Dunia hanya 2,1 persen. Inflasi juga diprediksi mencapai level 5,8 persen, lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi. Kondisi inipun berdampak hingga nasional maupun Kabupaten Bantaeng khususnya terhadap gejolak ekonomi baik makro maupun mikro daerah.

B. Tantangan Perekonomian Nasional

Pandemi COVID-19 yang lebih lama dan berdampak besar dari perkiraan menyebabkan proses pemulihan ekonomi Indonesia masih akan berlanjut pada tahun 2025. Pada saat yang sama, pemerintah akan melanjutkan agenda reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19. Upaya akselerasi pemulihan dan reformasi struktural perekonomian diarahkan untuk mendorong perekonomian kembali ke tingkat sebelum krisis pandemi dan terus mengalami pertumbuhan dengan lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,94 persen (yoy), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17 persen (yoy). Ke depan pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh permintaan domestik, baik konsumsi swasta dan Pemerintah, maupun investasi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2023 tetap pada kisaran 4,5-5,3 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh permintaan domestik yang solid. Konsumsi rumah tangga tumbuh



sebesar 5,06 persen (yoy), seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang masih tinggi. Sementara itu, konsumsi Pemerintah tumbuh negatif 3,76 persen (yoy) disebabkan terutama oleh belanja pegawai yang mengalami pergeseran sehubungan penyaluran gaji ke-13 ke triwulan II. Pertumbuhan investasi secara keseluruhan meningkat menjadi 5,77 persen (yoy) seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur Pemerintah di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, meski ekspor secara keseluruhan berkontraksi sebesar 4,26 persen (yoy) akibat turunnya ekspor barang sejalan dengan perlambatan ekonomi global, ekspor jasa tetap tumbuh kuat didukung kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tercermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU pada triwulan III 2023 tetap mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi. Pertumbuhan LU tersebut ditopang permintaan domestik yang tetap kuat, termasuk pembangunan infrastruktur Pemerintah di berbagai wilayah. Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2023 yang tetap kuat juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).

Kondisi Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2023 tetap terjaga dan berada pada kisaran sasaran $3,0 \pm 1$ persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IHK November 2023 tercatat inflasi sebesar 0,38 persen (mtm) sehingga inflasi IHK secara tahunan menjadi 2,86 persen (yoy), meningkat dari inflasi IHK bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,56 persen (yoy). Sepanjang tahun berjalan, inflasi IHK tercatat sebesar 2,19 persen (ytd). Perkembangan ini tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran $3,0 \pm 1$ persen pada sisa tahun 2023.



C. Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan III 2023 tumbuh 4,05% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,00%; yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh normalisasi permintaan masyarakat yang menahan kinerja konsumsi domestik. Namun demikian, permintaan global yang masih terjaga menahan perlambatan ekonomi yang lebih dalam.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada triwulan III 2023 dipengaruhi oleh kinerja konsumsi rumah tangga (RT) yang melambat karena normalisasi puncak HBKN. Lebih lanjut, konsumsi pemerintah pada triwulan III 2023 juga lebih tertahan disebabkan oleh realisasi gaji ke-13 yang telah dilakukan pada triwulan II 2023. Namun demikian, permintaan ekspor komoditas yang masih tinggi menekan perlambatan ekonomi Sulawesi Selatan yang lebih dalam.

Dari sisi penawaran, perlambatan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan III 2023 terutama bersumber dari kontraksi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan karena fenomena El Nino yang berdampak pada kualitas produksi padi dan rumput laut. Lebih lanjut, pengaruh normalisasi dampak low based effect tanur nikel pada periode sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan LU Perdagangan, Konstruksi, dan Industri Pengolahan menahan perlambatan ekonomi yang lebih dalam.

Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp6,25 triliun (61,71% dari pagu anggaran 2023), lebih rendah dibandingkan nominal realisasi di 2022 sebesar Rp6,54 triliun (70,77% dari pagu anggaran 2022). Di lain sisi, realisasi belanja pada 2023 tercatat sebesar Rp5,59 triliun (55,57% dari pagu anggaran 2023), lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,22 triliun (56,70% dari pagu anggaran 2022). Dengan perkembangan tersebut, anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencatat surplus sebesar Rp656,70 miliar, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat surplus Rp1,31 triliun. Realisasi pendapatan 24 Kabupaten/Kota hingga triwulan III 2023 di Sulawesi Selatan lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022. Lebih lanjut, realisasi belanja untuk keseluruhan 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan meningkat, terutama dikonstruksikan oleh peningkatan belanja operasional.

Kemandirian fiskal Sulawesi Selatan hingga triwulan III 2023



meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2022. Hal ini tercermin pada rasio jumlah PAD seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 24 Kabupaten/Kota) terhadap total pendapatannya yang meningkat, dari 25,29% menjadi 25,66%. Realisasi PAD juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meningkat dari 58,03% menjadi 69,15%. Peningkatan kemandirian fiskal daerah didorong oleh pengelolaan pendapatan belanja keuangan daerah yang lebih baik serta optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan insentif fiskal bagi kendaraan bermotor. Selain itu, beberapa faktor yang mendorong perbaikan tersebut adalah optimalisasi pendapatan daerah melalui inovasi dan digitalisasi layanan perpajakan, serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Perkembangan harga secara umum di Sulawesi Selatan semakin terkendali pada triwulan III 2023. Hal tersebut tercermin oleh inflasi gabungan 5 Kota IHK di Sulawesi Selatan yang mencapai 2,33% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan 4,43% (yoy) pada triwulan II 2023 dan terjaga di rentang sasaran $3\pm 1\%$ (yoy). Capaian ini tidak lepas dari upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan berbagai strategi pengendalian inflasi melalui implementasi program-program yang mengacu pada kerangka strategi 4K (kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif). Upaya tersebut juga mendukung terjaganya inflasi Oktober 2023 (2,89%; yoy) pada rentang sasaran, meski di tengah peningkatan intensitas El Nino.

Inflasi tahunan pada triwulan III 2023 terutama disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya pada komoditas beras, rokok kretek filter, bawang putih, dan ikan layang, diikuti oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, Transportasi, khususnya komoditas emas perhiasan, popok bayi, dan parfum. Kenaikan harga makanan, tembakau, dan emas tersebut secara tahunan dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kebijakan kenaikan cukai rokok sejak awal tahun 2023, dan pergerakan harga emas dunia sebagai aset safe haven. Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga cabai rawit, bawang merah, tomat, cabai merah, jagung manis, minyak goreng, dan beberapa jenis sayuran seiring kondisi pasokan yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.



D. Tantangan Perekonomian Daerah

Dinamika perekonomian di Bantaeng mengalami penurunan pasca pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang masih berlanjut di tahun 2023 termasuk didalamnya adanya gejolak geopolitik sebagai dampak peperangan antara Rusia dan Ukraina serta konflik di Palestina saat ini. Rencana untuk memulihkan dan mempertahankan kualitas perekonomian yang sinergis dengan rencana provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Pusat dilakukan salah satunya dengan pengembangan investasi di Kabupaten Bantaeng terutama berkaitan dengan pengembangan industri logam dasar sebagai upaya pemerintah untuk mendorong sentra pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Selatan sekaligus mendorong hilirisasi pertambangan di Sulawesi Selatan. Adapun pemulihan ekonomi di Kabupaten Bantaeng, provinsi maupun nasional yang dilakukan sejak tahun 2020 mulai tampak hasilnya pada tahun 2023 yang terlihat dari peningkatan capaian indikator makro pembangunan sebagai berikut:

Tabel III.1
Capaian dan Target Indikator Ekonomi Makro Pembangunan
Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

No	Indikator	Realisasi 2023			Target 2025		
		Kabupate n Bantaeng	Sulawes i Selatan	Nasiona l	Kabupate n Bantaeng	Sulawes i Selatan	Nasional
1	Tingkat Kemiskinan (%)	9,18	8,70	9,36	8,08	8,2	7,0-8,0
2	Tingkat Penganggura n Terbuka (%)	3,71	4,33	5,32	3,19	4,03	4,5-5,0
3	Indeks Gini	0,336	0,377	0,388	0,306	0,352	0,379- 0,382
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,56	4,51	5,05	9,25	5,67- 6,82	5,3-5,6
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)	62,78	69,70	75,00	66,32	74,55	US\$5.500 –5.520

Sumber: BPS Kabupaten Bantaeng, 2024

Dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Bantaeng dibutuhkan indikator kinerja utama baik IPM, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan



pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi, income per kapita dan instrumen ekonomi lainnya dalam suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak.

Relevansi data-data tersebut akan membantu pengambilan kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi perekonomian daerah sehingga pembangunan terarah. Angka PDRB dapat digunakan sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan sekaligus sebagai barometer untuk mengukur hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja pembangunan perekonomian di wilayah tersebut.

Sebagai wilayah agraris, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Bantaeng tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya, hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembentukan PDRB Bantaeng.

Kontribusi sektor lapangan usaha terbesar pada perekonomian Bantaeng pada tahun 2023 adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Meskipun mengalami penurunan, namun masih mendominasi hingga mencapai 22,85 persen. sektor lain yang mendominasi perekonomian Bantaeng adalah sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan dengan kontribusi masing-masing 17,71 persen dan 17,27 persen. Sedangkan sektor lapangan usaha yang minim kontribusi terhadap perekonomian daerah adalah sektor jasa perusahaan (0,14%) dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,06%).



Tabel III.2
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Bantaeng, Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,5	28,37	27,08	23,72	22,85
B	Pertambangan dan Penggalian	3,4	3,63	3,5	3,21	3,59
C	Industri Pengolahan	7,70	6,91	9,76	18,47	17,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,11	0,18	0,34	0,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1	0,07	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	17,8	17,79	18,3	16,83	17,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,0	14,65	14,25	13,52	13,95
H	Transportasi dan Pergudangan	1,1	1,05	1,06	1,08	1,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,9	0,9	0,85	0,83	0,83
J	Informasi dan Komunikasi	2,2	2,49	2,37	2,13	2,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,2	2,41	2,34	2,11	2,00
L	Real Estate	4,6	4,85	4,54	4,06	4,26
M,N	Jasa Perusahaan	0,2	0,15	0,15	0,14	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,0	6,93	6,27	5,2	5,01
P	Jasa Pendidikan	5,0	5,2	4,84	4,24	4,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,5	3	2,97	2,69	2,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,6	1,49	1,48	1,38	1,37
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

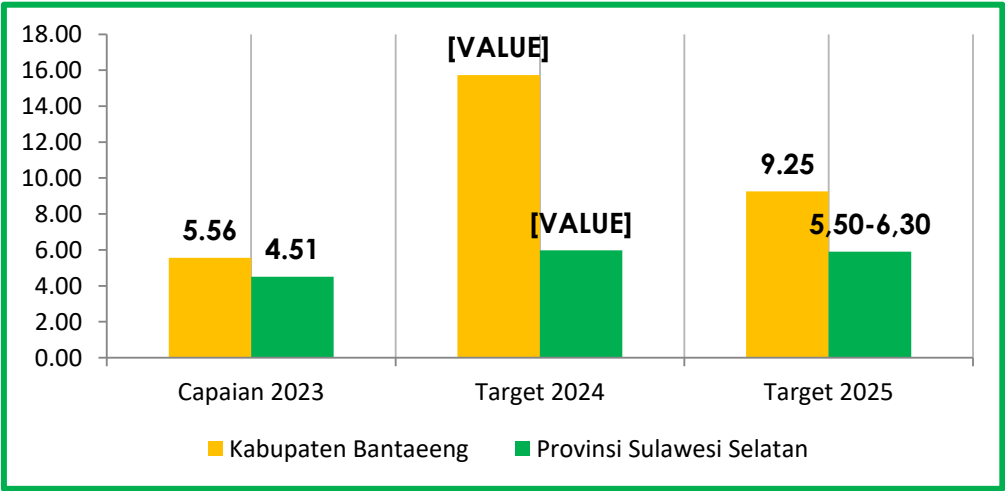
Salah satu tolak ukur pembangunan suatu daerah yaitu dengan mengamati pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat memang menjadi syarat utama atau indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga keberhasilan pembangunan daerah secara umum dapat terukur. Oleh karena itu, indikator ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ke



depannya, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi secara periodik maupun pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor lapangan usaha yang potensial.

Laju pertumbuhan ekonomi di Bantaeng mengalami peningkatan secara bertahap dalam kurun waktu empat tahun terakhir dengan pola perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Bantaeng mencapai 8,13 persen, angka tersebut meningkat hingga pada tahun tahun 2019 mencapai 10,75 persen. Peningkatan ini tidak bertahan pada tahun 2020 dimana terjadi perlambatan yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 0,52 persen pada tahun 2020. Kondisi ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang menyerang di setiap sendi-sendi perekonomian dan berdampak negatif pada hampir seluruh sektor pembangunan daerah. Kemudian, sebagai hasil dari upaya penanganan dan pemulihan perekonomian daerah selama masa Pandemi COVID-19, maka pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dengan capaian 8,86 persen dan 15,45 persen yang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Adapun pada tahun 2023, Kabupaten Bantaeng mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dimana pencapaian pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 5,56 persen.

Gambar III.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan
Capaian 2023, Target Pembangunan 2024 dan 2025



Sumber Data : BPS, 2024 (diolah)

Pada tahun 2023, penanganan dan pemulihan dampak Pandemi terhadap perekonomian Bantaeng terus dilakukan.



Progres positif dialami hampir seluruh kategori lapangan usaha dalam pergerakan bidang di sektor pembangunan masing-masing. Sebagai sektor yang terdampak cukup berat pada tahun 2020, kategori industri pengolahan mampu bangkit dari keterpurukan dengan capaian pertumbuhan ekonomi sektoral tahun 2022 mencapai 122,89 persen. Adapun pada sektor dominan lainnya yakni pertanian, konstruksi dan perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor memiliki pertumbuhan ekonomi sektoral sebesar 0,35 persen; 4,60 persen dan 9,54 persen.

Pada tahun 2023, Kabupaten Bantaeng memiliki pertumbuhan ekonomi peringkat kelima dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang mencapai 5,56 persen. Angka ini tentu saja jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang mencapai 4,51 persen.

Di tahun 2023, perkiraan target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran angka 8,84-9,66 persen di atas perkiraan capaian target pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,10-5,55 persen. Di tahun 2023 ini, dibandingkan dengan target tahun 2023, capaian pertumbuhan ekonomi tidak terwujud sesuai target. Sedangkan di tahun 2025, diharapkan pandemi covid-19 angka penyebarannya sudah berkurang dikarenakan program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah pusat sudah hampir merata di seluruh Indonesia, sehingga optimisme untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

b. PDRB per Kapita

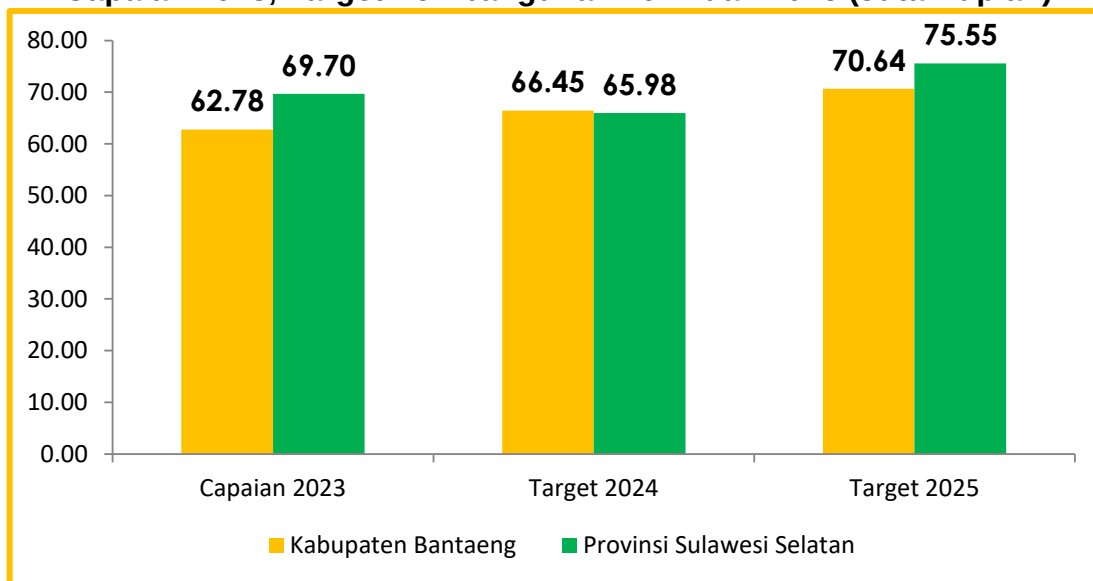
PDRB merupakan suatu gambaran perekonomian makro suatu wilayah yang identik dengan peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat berdasarkan PDRB per kapita, yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.



PDRB per kapita di Bantaeng mengalami peningkatan signifikan yang mengindikasikan tingginya peningkatan PDRB yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2019, PDRB per kapita Bantaeng sebesar Rp.46,64 juta dan meningkat dalam waktu lima tahun sebanyak lebih dari 6 juta hingga mencapai Rp.62,78 juta pada tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan target PDRB per Kapita pada dokumen RPJMD, maka capaian PDRB per Kapita tahun 2023 sudah jauh di atas target RPJMD sehingga tingkat capaian mencapai lebih dari 100 persen dengan status capaian “Sangat Tinggi”.

Gambar III.2
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan
Capaian 2023, Target Pembangunan 2024 dan 2025 (Juta Rupiah)



Sumber Data : BPS, 2024 (diolah)

c. Indeks Gini

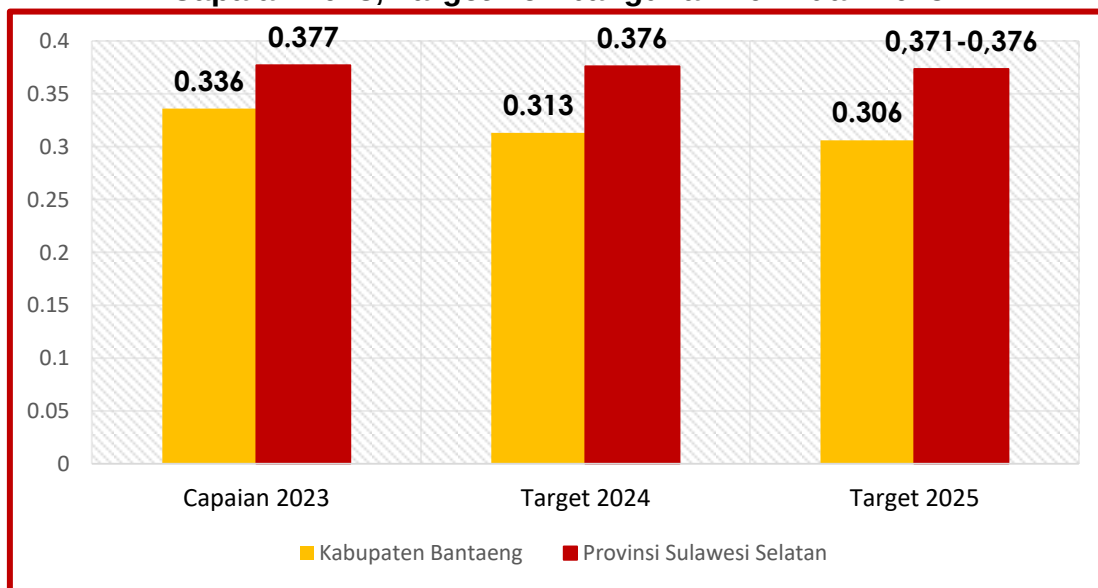
Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain kesempatan, kualitas pendidikan, dan lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini”, rasio



ini menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1, maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Pemerataan kesejahteraan di Bantaeng masih fluktuatif dan tergolong belum merata secara baik yang terlihat pada tingginya angka indeks gini sebesar 0,320 pada tahun 2022. Pemerataan kesejahteraan di Bantaeng secara umum lebih baik dibandingkan seluruh Provinsi Sulawesi Selatan (0,377). Untuk perkiraan target pembangunan, Kabupaten Bantaeng merumuskan angka dengan menurunkan selama beberapa tahun hingga tahun 2024 menjadi sebesar 0,313 dan 2025 mencapai 0,306. Hal ini diasumsikan bahwa pemerataan kesejahteraan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat secara menyeluruh, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.

Gambar III.3
Indeks Gini Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan
Capaian 2023, Target Pembangunan 2024 dan 2025



Sumber Data : BPS, 2024 (diolah)

d. Angka Kemiskinan

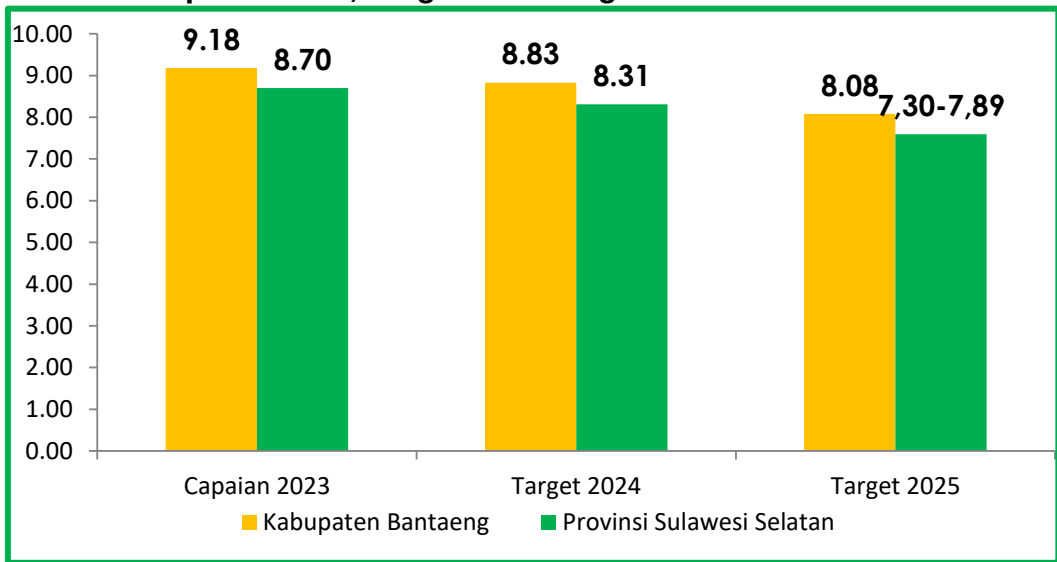
Salah satu indikator berhasilnya Pemerintah yaitu ketika Pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 9,18 persen dimana angka ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan kemiskinan tahun 2022.



Untuk di tahun 2025, angka kemiskinan di kabupaten Bantaeng diperkirakan turun secara signifikan. Hal ini sejalan dengan provinsi, dimana tahun 2025 diharapkan mengalami penurunan dengan asumsi perekonomian kembali berjalan normal.

Gambar III.4
Angka Kemiskinan Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan
Capaian 2023, Target Pembangunan 2024 dan 2025



Sumber Data : BPS, 2024 (diolah)

e. Angka Pengangguran

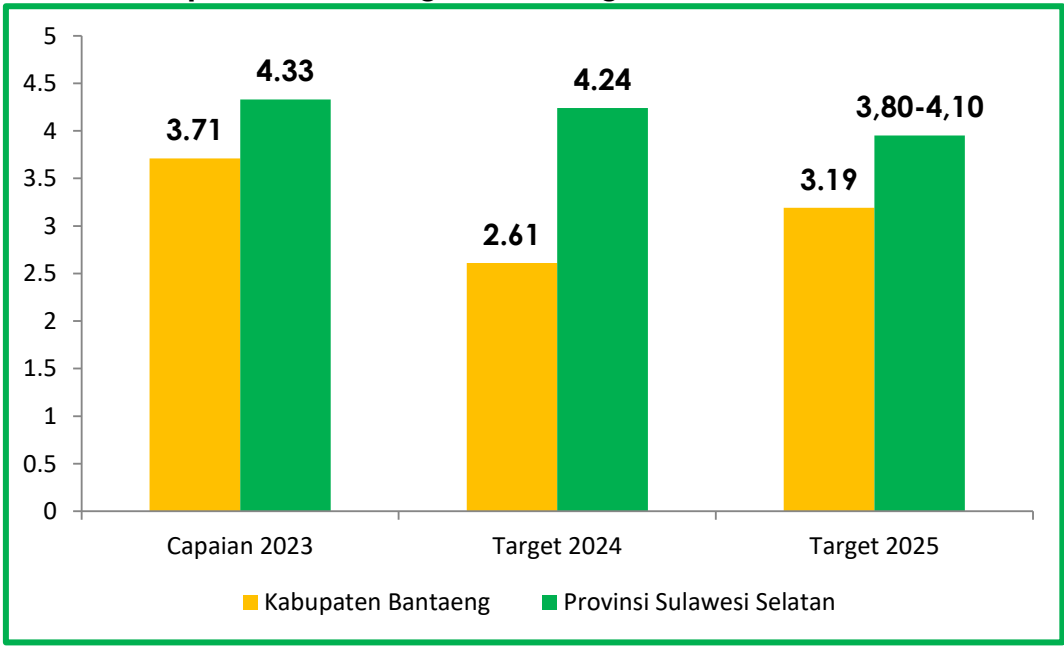
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bantaeng memiliki tren fluktuatif naik turun dalam setiap periodenya.

TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran. Angka pengangguran Kabupaten Bantaeng sebesar 3,98 persen pada tahun 2019, namun dikarenakan Pandemi COVID-19, maka pengangguran meningkat kembali hingga mencapai 4,27 persen pada tahun 2020. Setelah adanya penanganan dan pemulihan pasca pandemi, pengangguran berangsur turun kembali hingga mencapai angka 2,72 persen pada tahun 2022, meskipun mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 3,71 persen. Secara nilai angka pengangguran Bantaeng lebih rendah dibandingkan angka Provinsi Sulawesi Selatan maupun Nasional pada tahun 2023. Diperkirakan di tahun-tahun mendatang pengangguran di Bantaeng mengalami



penurunan dikarenakan lapangan usaha baru yang berkaitan dengan pertambangan yang akan dibangun di Bantaeng.

Gambar III.5
Tingkat Pengangguran Kabupaten Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan
Capaian 2023, Target Pembangunan 2024 dan 2025



Sumber Data : BPS, 2024 (diolah)

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 - 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - 2. Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi daerah khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Dan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, dan



Kabupaten Bantaeng menerima pendapatan transfer pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan, dan

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya.
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Bantaeng diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD dan Dana Perimbangan agar proporsi dana dari pemerintah pusat dapat diturunkan, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.



3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi system perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, dan Peraturan daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah menyusul ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta upaya penambahan obyek retribusi berdasarkan potensi perkembangan Kabupaten Bantaeng.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terakhir, Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi



hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara professional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyerderhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan pendapatan tahun anggaran 2025 diarahkan pada:

1. Penggalian potensi pendapatan daerah melalui updating data base potensi pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan dis-insentif.
3. Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola PAD
4. Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan.
5. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban.
6. Peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada.
7. Penguatan keberadaan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan.
8. Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD.

Perbandingan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2022-2023, APBD 2024 serta proyeksi 2025 dan prognosis 2026 dari masing-masing jenis pendapatan daerah Kabupaten Bantaeng secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel III.3
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2022-2026
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 (Juta Rupiah)

URAIAN	REALISASI		APBD 2024	PROYEKSI 2025	PROGNOSIS 2026
	2022	2023			
PENDAPATAN	1.001.963	973.423	1.071.582	1.013.310	1.082.530
PENDAPATAN ASLI DAERAH	175.816	191.247	217.546	207.789	197.650
Pendapatan Pajak Daerah	52.949	66.588	103.684	97.898	73.798
Pendapatan Retribusi Daerah	7.003	9.288	14.596	10.529	34.273
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.193	6.312	13.000	6.812	17.515
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	108.670	109.058	86.266	92.550	72.063
PENDAPATAN TRANSFER	789.928	764.360	842.343	792.204	868.900
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	689.973	641.216	730.074	751.204	705.070
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	44.938	58.358	40.283		51.877
Transfer Pemerintah Provinsi	55.016	64.786	71.986	41.000	111.954
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	36.219	17.817	11.692	13.317	15.980
Pendapatan Hibah	21.689	5.324	1.488	1.488	5.467
Pendapatan Lainnya	14.530	12.493	10.204	11.829	10.514

sumber: BPKD Kab.Bantaeng Tahun 2024



Pendapatan Daerah pada tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBD tahun 2024. Penurunan pendapatan daerah sebagian besar diproyeksikan berasal dari penurunan pendapatan transfer dari 842.343 milyar rupiah menjadi 792,29 milyar rupiah. Selain itu, asumsi proyeksi pendapatan asli daerah juga menurun kurang lebih 10 milyar rupiah.

Meskipun begitu, untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng, antara lain sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan di antaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif pemungutan;
- b. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada masyarakat;
- c. Pemberian *Reward* dan *Punishment*;
- d. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- e. Meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui Sosialisasi pajak daerah kepada WP dengan memanfaatkan Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
- f. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah
- g. Melakukan analisa terhadap potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pratisi dan akademisi.
- h. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- i. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD penghasil PAD;
- j. Penguatan kelembagaan BUMD dalam mengembangkan potensi usaha;



- k. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil;
- l. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya; dan
- m. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara itu, pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan diharapkan terus meningkat meskipun untuk sementara proyeksi dana transfer APBD tahun 2025 menurun dibandingkan APBD 2024 tetapi meningkat jika dibandingkan realisasi APBD tahun 2023. Namun dengan adanya koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat termasuk kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kabupaten Bantaeng dan Provinsi, diharapkan mengalami peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya dalam penentuan variabel/komponen berpengaruh terhadap penghitungan jumlah DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi yang dinilai tidak efektif dan selanjutnya dialihkan kepada DAK dan diperkirakan akan meningkatkan target pendapatan Dana Perimbangan. Selain itu juga diharapkan terjadi peningkatan pendapatan daerah yang bersumber Lain-Lain pendapatan Daerah Yang Sah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada



Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Dengan berpedoman pada prinsip - prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2025 tetap disusun dengan pendekatan anggaran berbasis prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2025 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
- 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan terbitnya PP No. 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan struktur belanja daerah. Belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi yang terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai



- Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN, mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji ASN
 - Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas ASN dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan "accres" gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;
 - Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dapat diberikan berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dalam keputusan kepala daerah, termasuk pegawai yang dipekerjakan pada pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa dalam rangka program Pemerintah Daerah yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga
- 3) Belanja Bunga
- Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman
- 4) Belanja Subsidi
- Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.



5) Belanja Hibah

- Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepadabadan/ lembaga/ organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat/ perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi dibutuhkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/ atau kelompok masyarakat/ perorangan.

6) Belanja Bantuan Sosial

- Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun diupayakan semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrument pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana



APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja Tidak Terduga

Tujuan pembiayaan untuk Belanja Tidak Terduga yang disediakan adalah untuk kegiatan yang sifatnya tanggap darurat, serta dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah.

d. Belanja Transfer

- 1) Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah dan Parpol

Peningkatan pada proyeksi belanja di Tahun 2025 sebagian besar dikarenakan peningkatan belanja operasi, khususnya pada belanja pegawai dan belanja barang. Pada belanja pegawai untuk keperluan ASN maupun SDM lainnya, meningkat lebih dari 30 milyar rupiah di tahun 2025 dibandingkan APBD tahun 2024. Sedangkan belanja barang menurun sebesar 36 milyar rupiah dibandingkan APBD tahun 2024.

Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2025 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini



Tabel III.4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022-2026
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 (Juta Rupiah)

URAIAN	REALISASI		APBD 2024	PROYEKSI 2025	PROGNOSIS 2026
	2022	2023			
BELANJA	991.148	975.046	1.076.545	1.011.810	1.080.985
BELANJA OPERASI	722.068	744.361	796.763	752.064	803.322
Belanja Pegawai	396.802	421.231	452.172	482.359	450.507
Belanja Barang	311.257	292.562	297.863	261.545	301.494
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	10.597	29.554	41.617	7.561	50.014
Belanja Bantuan Sosial	3.412	1.013	5.111	600	1.308
BELANJA MODAL	175.254	139.188	183.982	163.947	182.014
Belanja Tanah	2.900	1.272	521	2.000	2.040
Belanja Peralatan dan Mesin	50.843	19.858	23.036	9.622	15.455
Belanja Gedung dan Bangunan	30.930	20.283	96.557	38.568	38.805
Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	90.533	96.474	62.121	112.163	124.853
Belanja Aset Tetap Lainnya	47	1.300	1.647	1.593	861
BELANJA TAK TERDUGA	750	793	3.000	3.000	3.091
Belanja Tak Terduga	750	793	3.000	3.000	3.091
TRANSFER	93.077	90.704	92.799	92.799	92.557
Transfer Bagi Hasil	-	-	527	527	544
Transfer Bantuan Keuangan	93.077	90.704	92.272	92.272	92.014

Sumber : BPKD Kab. Bantaeng Tahun 2024



3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada tahun 2025, diproyeksikan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pemerintahan daerah sebesar 1,5 milyar rupiah.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 diharapkan sebanyak Rp. 0,-, namun secara umum, penerimaan pembiayaan dapat diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2025;
- 2) Menggunakan SiLPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
- 3) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
- 4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah



Tabel III.5
Analisis Pembiayaan Kabupaten Bantaeng Tahun 2022-2026

URAIAN	REALISASI		APBD 2024	PROYEKSI 2025	PROGNOSIS 2026
	2022	2023			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	19.846	6.462	-	-
Penggunaan SILPA	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	19.846	6.462	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500	1.500	1.500	1.500	1.545
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.500	1.500	1.500	1.500	1.545
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-	-

Sumber : BPKD Kab. Bantaeng 2024



3.2.4. Kapasitas Riil Pendanaan Tahun 2025

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Secara rinci kapasitas riil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.6
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng
Tahun 2022-2026 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2022	Realisasi 2023	APBD 2024	Proyeksi th 2025	Prognosis th 2026
1.	Pendapatan	1.001.962,67	973.423	1.071.582	1.013.310	1.082.530
2.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	19.846	6.462	0,00	0,00
	TOTAL PENERIMAAN					
	(Dikurangi):					
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	410.811	451.798	498.900	490.520	501.829
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	591.151,67	541.471,00	579.144,00	522.790,00	580.701,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bantaeng, 2024 (diolah)

Kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-5886 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019,



Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan.

Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan berbeda, untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel III.7
Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Pagu
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng
Tahun 2022-2026 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	APBD 2024	Proyeksi 2025	Prognosis 2026
1	Pendapatan	1.001.962,67	973.423	1.071.582	1.013.310	1.082.530
2	Penerimaan Pembiayaan	0,00	19.846	6.462	0,00	0,00
Kapasitas Riil Pagu OPD		1.001.962,67	953.577	1.078.044	1.013.310	1.082.530

Sumber: BPKAD Kabupaten Bantaeng, 2024 (diolah)

3.2.5. Anggaran Program Standar Pelayanan Minimal

Belanja daerah untuk program Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah alokasi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa layanan publik dasar yang diamanatkan oleh undang-undang dapat terpenuhi secara efektif. SPM adalah tolak ukur kinerja yang digunakan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menyediakan layanan dasar yang esensial bagi warga negara. Belanja untuk program SPM adalah bagian penting dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, dan memastikan bahwa semua warga mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan publik yang berkualitas. Berikut adalah belanja daerah Kabupaten Bantaeng untuk melaksanakan program pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2025.



Tabel III.8
Belanja Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Program Pembangunan Daerah	Anggaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	72.770.647.874	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kurikulum	30.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	5.101.099.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	47.311.683.518	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.138.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	125.000.000	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.591.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	20.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.111.927.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.667.462.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	32.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	173.430.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	49.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	313.204.700	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
	Program Kawasan Permukiman	50.400.000	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Program Pembangunan Daerah	Anggaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	194.000.000	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	888.994.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.465.184.200	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.513.275.500	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	96.402.100	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	923.817.700	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	605.328.100	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	359.339.600	Dinas Sosial
Total Anggaran		252.080.797.892	

Sumber: BPKAD Kabupaten Bantaeng, 2024 (diolah)



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026 khususnya pada agenda pembangunan tahun pertama. RKPD 2025 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dimaksud harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPD.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bantaeng mempertimbangkan dari hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Prioritas pembangunan daerah ini harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun optional sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Dalam penyusunan prioritas RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026 dalam mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Memedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis Program Provinsi (RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025) dan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP tahun 2025;
3. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2025; serta;
4. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantaeng

RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 merupakan pelaksanaan pembangunan RPD 2024-2026. Pembangunan tahun 2025 memedomani tujuan, sasaran pembangunan tahun 2025 dari dokumen RPD Kabupaten Bantaeng 2025-2026. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan



melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD). Sesuai dengan penjabaran rumusan Tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bantaeng tahun 2024-2026. Berikut penjabaran tujuan dan sasaran sesuai dokumen RPD sebagai berikut:

Tabel IV.1
Tujuan, Sasaran dan Target RPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2023	PRAKIRAAN 2024	TARGET 2025
Tujuan 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	44,65	50,67	55,73 (CC)
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	Indeks Persepsi Anti Korupsi (poin)	86,21	87,51	88,30
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (poin)	75,847	77,34	79,311
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	71,28	71,37	71,56
	Tingkat Kemiskinan (%)	9,18	9,09	8,08
Meningkatnya kualitas pendidikan dan kepribadian masyarakat	Indeks Pendidikan (poin)	58,44	59,20	60,35
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (poin)	81,03	81,79	82,33
Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	PDRB per Kapita (Juta/Kapita)	62,78	64,59	66,32
	Inflasi (poin)	4,12	3,51	2,91
	Indeks Gini (poin)	0,336	0,322	0,306
Meningkatnya kualitas	Tingkat Pengangguran	3,71	3,56	3,19



TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	CAPAIAN 2023	PRAKIRAAN 2024	TARGET 2025
	ketenagakerjaan daerah	Tebuka (%)			
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,56	8,84	9,25
	Meningkatnya kapasitas sektor ekonomi unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian (%)	-2,33	1,57	2,34
		LPE Kategori Industri Pengolahan (%)	15,91	20,99	55,00
		LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	4,99	7,24	11,39
Meningkatnya layanan aksesibilitas dan infrastruktur wilayah		Indeks Infrastruktur	62,67	68,33	72,5
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Bantaeng		Tingkat penurunan emisi gas rumah kaca (%)	NA	1	1

Capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel IV.2
Target Indikator Makro Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2025
1	IPM	-	70,57	71,56
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,18	8,08
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,71	3,19
4	Indeks Gini	-	0,326	0,306
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,56	9,25
6	PDRB per Kapita	Juta Rp	61	66,32

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

RKPD Tahun 2025 merupakan pelaksanaan RPD Kabupaten Bantaeng 2024-2026 pada tahapan ke-2 (dua). RKPD ini disusun berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2025 yang dirumuskan dalam RPD Kabupaten Bantaeng 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Bantaeng harus memedomani prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (RKPD Provinsi Sulawesi Selatan) dan prioritas pembangunan nasional (RKP 2025).

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Pembangunan Kabupaten Bantaeng harus mampu mendukung dan sejalan dengan pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pusat (Nasional). Pada tahun ini Pemerintah Pusat menyikapi adanya isu global dan kebijakan nasioanl terkait dengan transformasi pembangunan, yang secara langsung akan berdampak pada kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan memahami gejolak dinamika pemerintahan, sesuai keputusan Pemerintah Pusat maka tema pembangunan Nasional tahun 2025 ini adalah

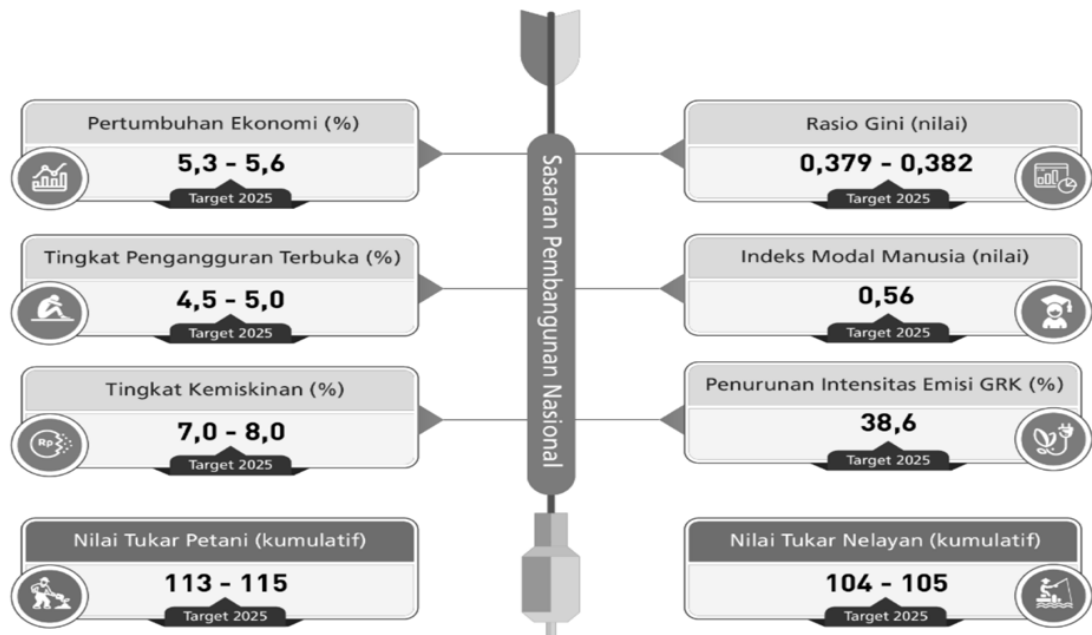


“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelaniutan”

Dengan tema diatas, memiliki sasaran pembangunan tahun 2025 yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Gambar IV-1
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025



Merujuk pada tema dan sasaran pembangunan pada RKP 2025 diatas, maka berikut disajikan pprioritas 8 pembangunan, sebagai agenda Pembangunan pada Tahun 2025 yang harus didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Bantaeng yang dijabarkan sebagai berikut.

- **PRIORITAS NASIONAL 1**
Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- **PRIORITAS NASIONAL 2**
Memantapkan System Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru
- **PRIORITAS NASIONAL 3**
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industry Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industry Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
- **PRIORITAS NASIONAL 4**
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) , Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas



➤ **PRIORITAS NASIONAL 5**

Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industry Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri

➤ **PRIORITAS NASIONAL 6**

Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan

➤ **PRIORITAS NASIONAL 7**

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan

➤ **PRIORITAS NASIONAL 8**

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Dalam mewujudkan keselarasan pembangunan dan memaksimalkan pencapaian pembangunan wilayah Kabupaten Bantaeng yang berada didalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan maka keberhasilan pembangunan Provinsi juga dipengaruhi oleh dukungan dan keberhasilan pembangunan dari daerah Kab/Kota. Dengan berdasarkan permasalahan dan isu yang berkembang saat ini kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan mengusung tema pembangunan pada tahun 2025 ini adalah



“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”

Dengan tema tersebut maka prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif;
- 2) Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
- 3) Peningkatan Produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
- 4) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata
- 5) Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan



Tabel IV.3
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Satuan	Capaian 2023	Target RKPD 2025
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1 Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ angka	74,21 (BB)	74,67
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2 Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ angka	68,78 (B)	69,27 (B)
		Optimalnya Kualitas pelayanan publik	3 Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ angka	A-(4,34)	A-(4,35-4,50)
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata	4 Indeks Williamson	Angka	0,567 (2022)	0,462
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5 Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	80,39 (2022)	82,34
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	6 Produktifitas Total Daerah	Rp/- Angkatan Kerja	79.149.920,77 (2022)	84.248.042,86
		Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	7 Pertumbuhan Ekonomi	%	4,51	5,67-6,82
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	8 PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	65,59 (2022)	74,55
			9 Gini Rasio	%	0,377 (Maret 2023)	0,356
		Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	10 Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,33	4,03
		Menurunya angka kemiskinan	11 Tingkat Kemiskinan	Angka	8,70 (Maret 2023)	8,20
		Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	12 IPM	Angka	74,60	74,80
		Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	13 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,14 (2022)	93,78
5	Peningkatan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang	14 IKLH	poin	74,17 (2022)	74,54



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Satuan	Capaian 2023	Target RKPD 2025
	Pelestarian lingkungan hidup	Berkelanjutan				
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	15 Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)	Juta Ton CO2Eq	1.360.000 (2022)	2.075.597

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantaeng

Pada tahun 2025 pembangunan Kabupaten Bantaeng menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang diharapkan mampu berdampak pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Memahami bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya pada satu bidang namun juga perlu kolaborasi antar bidang lainnya seperti SDM, Sosial, dan Infrastruktur serta pemerintahan. Dengan kolaborasi pembangunan antar diharapkan nantinya akan memberikan dukungan pada bidang yang lain, sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ditahun 2025. Dengan ini pemerintah bersama masyarakat dapat bergerak cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng.

A. Tema Pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

Berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Bantaeng dalam RPD Tahun 2024-2026 dan mengacu pada arah pembangunan tahun pertama maka tema pembangunan Kabupaten Bantaeng pada tahun 2025 adalah



“Kesejahteraan Bantaeng Berbasis Kemandirian Ekonomi Kerakyatan”

Pembangunan tahun pertama (2025), berorientasi pada pembangunan pemerintahan dan SDM maka tema pembangunan tahun ini adalah “Kesejahteraan Bantaeng Berbasis Kemandirian Ekonomi Kerakyatan”. Berdasarkan tema tersebut, maka tahun 2025 pembangunan Kabupaten Bantaeng fokus utama pembangunannya adalah pada beberapa sector pembangunan yaitu SDM, Sosial, Infrastruktur, dan ekonomi Masyarakat yang didukung dengan reformasi birokrasi. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka tahun kedua ini pembangunan diarahkan pada kualitas ekonomi masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi. Sehingga pembangunan ekonomi mampu



menjadi fondasi yang kuat dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bantaeng.

B. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPD 2024-2026 khususnya pada poin sasaran dan target pembangunan, dokumen RKPD perlu memperhatikan kondisi terupdaate capaian kinerja pembangunan, permasalahan, isu dan kebijakan pemerintah pusat (Nasional) dalam dokumen RKP 2025. Selanjutnya dokumen RKPD juga harus selaras dengan pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tercantum dalam RKPD 2025 Provinsi Sulawesi Selatan. Memahami hal tersebut maka kerangka logis perumusan sasasan dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Bantaeng ditunjukan dengan gambar bagan sebagai berikut.

Gambar IV-2
Kerangka Perumusan Sasasan Dan Prioritas Pembangunan
RKPD Kabupaten Bantaeng



Dengan memahami dinamika pembangunan, permasalahan daerah, isu dan menelaah RPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026 khususnya tahun 2025 beserta tema pembangunan Kabupaten Bantaeng maka prioritas pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 diadopsi langsung strategi dan arah kebijakan (Fokus Pembangunan) keterkaitanya disajikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel IV.4
Keterkaitan Isu, Permasalahan, Sasaran, Prioritas dan Fokus Pembangunan
Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

ISU	PERMASALAHAN	TUJUAN/SASARAN (RPD)	STRATEGI (RPD)/PRIORITAS 2025	ARAH KEBIJAKAN (RPD)/FOKUS PEMBANGUNAN 2025
		Tujuan 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		
Transformasi Pelayanan Publik Berbasis It	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	Pemantapan implementasi reformasi birokrasi	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah			Digitalisasi tata kelola keuangan daerah
		Tujuan 2 Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat		
Pemantapan Sdm Maju, Berbudaya Dan Berdikari	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kepribadian masyarakat	Akselerasi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan	Penguatan pendidikan akhlak dan budaya
	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Pemerataan kualitas layanan kesehatan
Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Belum optimalnya peningkatan pendapatan masyarakat	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat
				Pengendalian harga dan ketersediaan barang



ISU	PERMASALAHAN	TUJUAN/SASARAN (RPD)	STRATEGI (RPD)/PRIORITAS 2025	ARAH KEBIJAKAN (RPD)/FOKUS PEMBANGUNAN 2025
	Tingginya potensi tenaga kerja berpendidikan rendah dan minim keterampilan			Pengembangan desa sebagai komunitas yang maju dan mandiri
		Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah		Peningkatan kualitas dan keterampilan angkatan kerja
		Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan		
Antisipasi Resesi Ekonomi Dalam Pembangunan Berbasis Ekonomi Unggulan Daerah	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah	Meningkatnya kapasitas sektor ekonomi unggulan daerah	Perwujudan transformasi ekonomi	Optimalisasi hilirisasi ekonomi dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian
				Pengembangan iklim investasi yang kondusif
	Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan			Peningkatan kompetensi UMKM
				Mendorong berkembangnya kewirausahaan daerah
Perekonomian Hijau Sebagai Alternatif Pembangunan Berkelanjutan	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya layanan aksesibilitas dan infrastruktur wilayah	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar pembangunan
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Bantaeng	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan



Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka sasaran pembangunan beserta indikator dan target pembangunan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.5
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
		Tujuan 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	44,65	50,67	55,73 (CC)
Pemantapan implementasi reformasi birokrasi	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	Indeks Persepsi Anti Korupsi (poin)	86,21	87,51	88,30
	Digitalisasi tata kelola keuangan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (poin)	75,847	77,34	79,311
		Tujuan 2 Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	71,28 (2023)	71,37	71,56
			Tingkat Kemiskinan (%)	9,18 (2023)	9,09	8,08
Akselerasi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan	Penguatan pendidikan akhlak dan budaya	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kepribadian masyarakat	Indeks Pendidikan (poin)	58,44	59,20	60,35
	Pemerataan kualitas layanan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (poin)	81,03	81,79	82,33
Akselerasi pengentasan	Optimalisasi perlindungan sosial dan	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan	PDRB per Kapita (Juta/Kapit	62,78	64,59	66,32



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
kemiskinan ekstrem	pemberdayaan masyarakat	masyarakat	a)			
	Pengendalian harga dan ketersediaan barang		Inflasi (poin)	4,12	3,51	2,91
	Pengembangan desa sebagai komunitas yang maju dan mandiri		Indeks Gini (poin)	0,336	0,322	0,306
	Peningkatan kualitas dan keterampilan angkatan kerja	Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,71 (2023)	3,56	3,19
		Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,56	8,84	9,25
Perwujudan transformasi ekonomi	Optimalisasi hilirisasi ekonomi dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian	Meningkatnya kapasitas sektor ekonomi unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian (%)	-2,33	1,57	2,34
	Pengembangan iklim investasi yang kondusif		LPE Kategori Industri Pengolahan (%)	15,91	20,99	55,00
	Peningkatan kompetensi UMKM		LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	4,99	7,24	11,39
	Mendorong berkembangnya kewirausaha					



PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
	an daerah		Mobil dan Sepeda Motor (%)			
Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Meningkatnya layanan aksesibilitas dan infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur	62,67	68,33	72,5
Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Bantaeng	Tingkat penurunan emisi gas rumah kaca (%)	NA	1	1

*: Data 2021

¹: Data pendekatan Bulukumba

C. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Dengan rumusan tujuan, sasaran, tema dan prioritas pembangunan, sebagai pelaksanaan prioritas pembangunan dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan daerah yang tersusun pada tabel berikut:

Tabel IV.6
Keterkaitan Prioritas, tujuan, sasaran dan program prioritas Pembangunan Kabupaten Bantaeng 2025

PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	OPD PENANGGUNGJAWAB
		Tujuan 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			
Pemanfaatan implementasi reformasi birokrasi	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindak Lanjuti (Dengan Satuan:Persen)	Inspektorat Daerah
	Digitalisasi tata kelola keuangan daerah		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Dan Pengembangan	Badan Pengelola Keuangan Daerah



PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	OPD PENANGGUNGJAWAB
				n Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penganggaran Keuangan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	
				Persentase Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (Sp2d) Tepat Waktu (Dengan Satuan:Persen)	
				Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Menyampaika n Keuangan Tepat Waktu (Dengan Satuan:Persen)	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dan Perencanaan Awal (Dengan Satuan:Persen)	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Tujuan 2 Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat			
Akselerasi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan	Penguatan pendidikan akhlak dan budaya	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kepribadian masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Sd/Mi/Paket A (Dengan Satuan:Persen)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Sekolah (Aps)	



PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	OPD PENANGGUNGJAWAB
				Smp/Mts/Paket B (Dengan Satuan:Persen)	
				Angka Partisipasi Penduduk Usia 5-6 Tahun Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Dengan Satuan:Persen)	
				Angka Partisipasi Penduduk Pada Pendidikan Non Formal Usia 7-18 Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:Persen)	
	Pemerataan kualitas layanan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru Paud,Sd/Mi,Smp/Mts Yang Memenuhi Kualifikasi Si/D-iv (Dengan Satuan:Persen)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rata-Rata Pelayanan Ukm Dan Ukp (Dengan Satuan:Persen)	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Cakupan Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	Dinas Kesehatan
Akselerasi	Optimalisasi perlindungan	Meningkatnya pemerataan	Program Hubungan	Persentase Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja Dan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	OPD PENANGGUNGJAWAB
pengentasan kemiskinan ekstrem	n sosial dan pemberdayaan masyarakat	kesejahteraan masyarakat	Industrial	Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Pp/Pkb, Lks Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan).	Perindustrian
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pmks Yang Memperoleh Bantuan Sosial (Dengan Satuan:%)	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pmks Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Dengan Satuan:%)	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Cacat fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial (Dengan Satuan:%)	Dinas Sosial
	Pengendalian harga dan ketersediaan barang		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Perekonomian, Pembangunan Dan Pengelolaan Barang Dan Jasa (Dengan Satuan:Persen)	Sekretariat Daerah
			Program	Persentase	Dinas



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	OPD PENANGGUNGJAWAB
	Pengembangan desa sebagai komunitas yang maju dan mandiri		Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Penunjang Pangan Utama (Dengan Satuan:Persen)	Ketahanan Pangan
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berprestasi (Dengan Satuan:Persen)	DINAS Pemberdayaan Masyarakat Dan DESA , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Yang Baik (Dengan Satuan:Persen)	DINAS Pemberdayaan Masyarakat Dan DESA , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (Mkjp) (Dengan Satuan:Persen)	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KELUARGA Berencana
	Peningkatan kualitas dan keterampilan angkatan kerja	Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Dengan Satuan:Persen)	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian



PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	OPD PENANGGUNGJAWAB
				(Dengan Satuan:Persen)	
		Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan			
Perwujudan transformasi ekonomi	Optimalisasi hilirisasi ekonomi dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian	Meningkatnya kapasitas sektor ekonomi unggulan daerah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kontribusi Sektor Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan Terhadap Pdrb (Dengan Satuan:%)	Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kontribusi Sektor Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan Terhadap Pdrb (Dengan Satuan:Persen)	Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten (Dengan Satuan:Persen)	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (Iui) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait (Dengan	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian



PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	OPD PENANGGUNGJAWAB
				Satuan:Persen)	
	Pengembangan iklim investasi yang kondusif		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi Yang Dimanfaatkan Oleh Investor (Dengan Satuan:Persen)	Dinas Penanaman Modal D A N Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi (Dengan Satuan:Persen)	Dinas Penanaman Modal D A N Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Peningkatan kompetensi UMKM		Program Pengembangan Umkm	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro (Dengan Satuan:%)	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan
	Mendorong berkembangnya kewirausahaan daerah		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Rasio Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Dengan Satuan:%)	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Di Wilayah Kerjanya	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	OPD PENANGGUNGJAWAB
Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Meningkatnya layanan aksesibilitas dan infrastruktur wilayah		(Dengan Satuan:%)	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Dengan Satuan:%)	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan (Dengan Satuan:Persen)	Dinas Perhubungan
				Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Yang Terpasang Dan Dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)	
				Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Angka)	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase Kondisi Jalan, Jembatan Dan Gorong-Gorong Baik (Dengan Satuan:%)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (Dengan Satuan:Persen (%))	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan
			Program Kawasan Permukiman	Persentase Pemukiman Yang Tertata (Dengan Satuan:Persen (%))	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan	Persentase Psu Perumahan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan



PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	OPD PENANGGUNGJAWAB
			Utilitas Umum (Psu)	Yang Ditingkatkan Kualitasnya (Dengan Satuan:Persen (%))	Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Dengan Satuan:%)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Peningkatan kualitas poengelolaan lingkungan hidup	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Bantaeng	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota (Dengan Satuan:Persen)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Ditangani (Dengan Satuan:Persen)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan	Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Prosedur (Dengan	Dinas Lingkungan Hidup



PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	OPD PENANGGUNGJAWAB
			Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Satuan:Persen)	

4.3 Keselarasan Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bantaeng

Pencapaian pembangunan daerah memberikan kontribusi dalam pencapaian pembangunan Provinsi dan nasional. Kontribusi yang diberikan akan berdampak pada seberapa besar capaian yang akan tercapai dalam pembangunan.

➤ Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

Dengan beberapa kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2025 yang sudah dituangkan sebelumnya, dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan maka perlu dipastikan pembangunan daerah mampu memberikan dukungan dalam kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Memahami hal tersebut, maka perlu dilihat keterkaitan antara tema pembangunan dan prioritas pembangunan daerah.

Gambar IV-3
Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

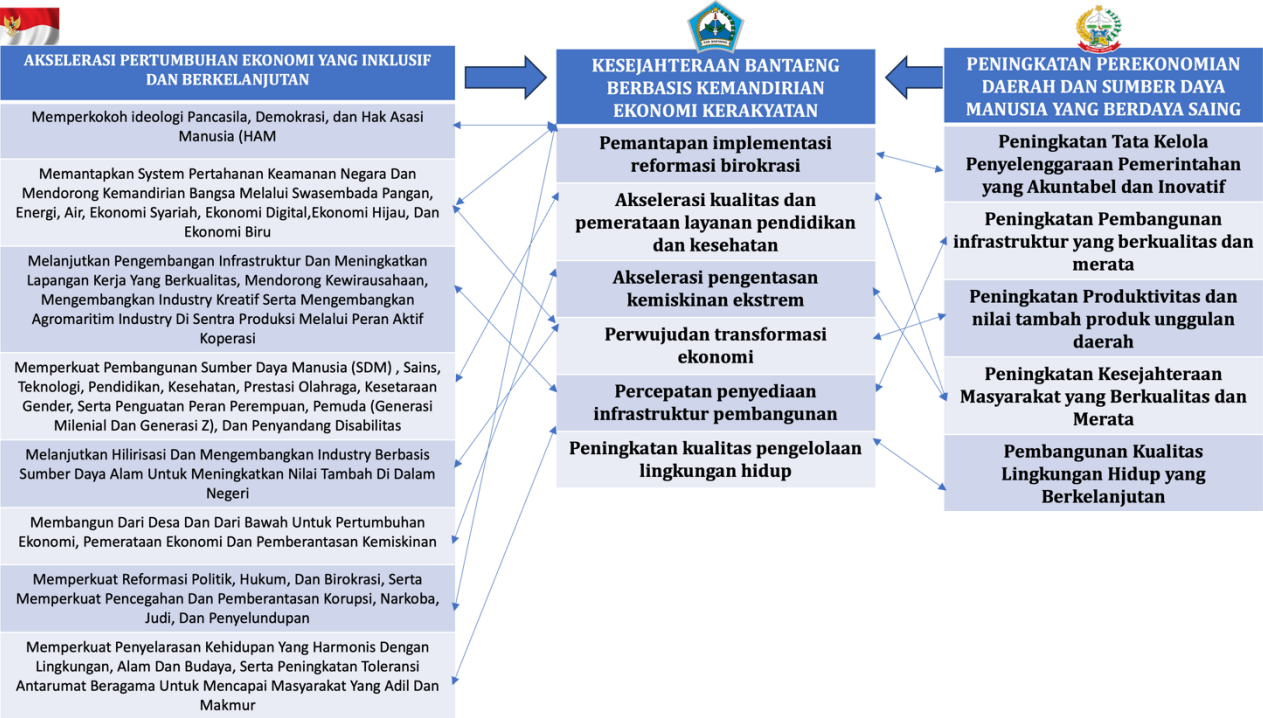




➤ **Keselarasan kebijakan/Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025**

Kebijakan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan pusat (nasional) dan Provinsi Sulawesi Selatan (RKPD 2025). Dalam rangka melihat dan memastikan dukungan Kabupaten Bantaeng terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi maka disajikan tabel keterkaitan kebijakan/prioritas pembangunan antara Nasional (RKP 2025), prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (RKPD 2025) dan RKPD Kabupaten Bantaeng yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar IV-4
Keselarasan Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025



Dalam RKP Tahun 2025 telah ditetapkan pula sejumlah intervensi untuk mendukung pencapaian prioritas nasional di Sulawesi Selatan, beberapa poin yang cukup relevan menjadi highlight indikasi di Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut.

Tabel IV.7
Highlight Indikasi Intervensi di Sulawesi Selatan dan relevan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bantaeng

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	• Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	• Pengembangan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan di 12 kabupaten • Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di 12 kabupaten untuk meningkatkan ketahanan bencana • Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial • Pembangunan jaringan distribusi utama Sistem Penyediaan Air Minum Regional Mamminasata • Fasilitasi <i>business matchmaking startup digital</i> • Fasilitasi <i>digital technopreneur</i> • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian
	• Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	• Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim • Peningkatan cakupan layanan infrastruktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital • Pengadaan sarana prasarana dalam rangka pengembangan sentra usaha kecil dan menengah • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	• Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya (rabies) • Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana olahraga • Pembangunan kualitas keluarga • Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
	pendidikan perempuan, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Fasilitasi literasi digital
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	• Hilirisasi industri kakao • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	• Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	

➤ **Dukungan/keselarasan Program Prioritas Kabupaten Bantaeng terhadap Prioritas Provinsi**

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu adanya penyelarasan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dengan prooritas dan program prioritas pembangunan Kabupaten Tahun 2025 yang dapat dilihat keselarasannya dalam tabel sebagai berikut.



Tabel IV.8
Keselarasan Program Prioritas Kabupaten Bantaeng terhadap
Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan

PRIORITAS PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS KAB.BANTAE NG 2025	FOKUS PEMBANGU NAN	SASARAN	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan Tata Kelola Penyelengga raan Pemerintaha n yang Akuntabel dan Inovatif	Pemantapan implementas i reformasi birokrasi	Peningkatan sistem pengawasa n dan pengendalia n internal penyelengg araan pemerintaha n	Meningkat nya pengelolaa n keuangan daerah berkualitas	Program Penyeleng garaan Pengawas an	Inspektorat Daerah
		Digitalisasi tata kelola keuangan daerah		Program Pengelola an Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah
				Program Pengelola an Pendapat an Daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Peningkatan kesejahteraa n Masyarakat yang berkualitas dan merata	Akselerasi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan	Penguatan pendidikan akhlak dan budaya	Meningkat nya kualitas pendidikan dan kepribadia n masyaraka t	Program Pengelola an Pendidika n	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidi kan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Pemerataan kualitas layanan kesehatan	Meningkat nya derajat kesehatan masyaraka t	Program Pemenuh an Upaya Kesehatan Peroranga n Dan Upaya Kesehatan Masyarak at	Dinas Kesehatan
				Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
Peningkatan kesejahteraa n	Akselerasi pengentasan kemiskinan	Optimalisasi perlindunga n sosial dan	Meningkat nya pemerataa	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian



PRIORITAS PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS KAB.BANTAE NG 2025	FOKUS PEMBANGU NAN	SASARAN	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
Masyarakat yang berkualitas dan merata	ekstrem	pemberdaya an masyarakat	n kesejahter aan masyaraka t	Program Pemberda yaan Sosial	Dinas Sosial
				Program Rehabilita si Sosial	Dinas Sosial
				Program Perlindung an Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Pengendalia n harga dan ketersediaa n barang		Program Perekono mian Dan Pembang unan	Sekretariat Daerah
				Program Peningkat an Diversifika si Dan Ketahana n Pangan Masyarak at	Dinas Ketahanan Pangan
		Pengemban gan desa sebagai komunitas yang maju dan mandiri		Program Pemberda yaan Lembaga Kemasyar akatan , Lembaga Adat Dan Masyarak at Hukum Adat	D I N A S Pemberdayaan Masyarakat Dan D E S A , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Program Administra si Pemerinta han Desa	D I N A S Pemberdayaan Masyarakat Dan D E S A , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Program Pembinaa n Keluarga Berencan a (Kb)	Dinas Pengendalian Penduduk Dan K E L U A R G A Berencana



PRIORITAS PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS KAB.BANTAE NG 2025	FOKUS PEMBANGU NAN	SASARAN	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	
		Peningkatan kualitas dan keterampil an angkatan kerja	Meningkat nya kualitas ketenagak erjaan daerah	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivit as Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	
				Program Penempat an Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	
Peningkatan Produktivita s dan nilai tambah produk unggulan daerah	Perwujudan transformasi ekonomi	Optimalisasi hilirisasi ekonomi dalam meningkatk an nilai tambah produk pertanian	Meningkat nya kapasitas sektor ekonomi unggulan daerah	Program Penyediaa n Dan Pengemb angan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng	
				Program Penyediaa n Dan Pengemb angan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng	
				Program Perencan aan Dan Pembang unan Industri	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	
				Program Pengendal ian Izin Usaha Industri Kabupate n/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	
				Pengemban gan iklim investasi yang konduusif		Program Pengemb angan Iklim Penanam an Modal
		Program Promosi Penanam an Modal				Dinas Penanaman Modal D A N Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengemb angan Umkm				Dinas Koperasi U K M D A N
		Peningkatan kompetensi UMKM				



PRIORITAS PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS KAB.BANTAE NG 2025	FOKUS PEMBANGU NAN	SASARAN	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Mendorong berkembang nya kewirausaha an daerah			Perdagangan
				Program Pemberda yaan Usaha Menengah , Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan
				Program Pendidika n Dan Latihan Perkopera sian	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan
				Program Peningkat an Sarana Distribusi Perdagan gan	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuha n Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan
Peningkatan Pembanguna n infrastruktur yang berkualitas dan merata	Percepatan penyediaan infrastruktur pembanguna n	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar pembangun an	Meningkat nya layanan aksesibilita s dan infrastrukt ur wilayah	Program Penyeleng garaa n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
				Program Penyeleng garaan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Program Pengemb angan Perumaha n	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan
				Program Kawasan	Dinas Perumahan,



PRIORITAS PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS KAB.BANTAE NG 2025	FOKUS PEMBANGU NAN	SASARAN	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
				Permukiman	Pemukiman Dan Pertanahan
				Program Peningkatan Prasarana , Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas poengelolaan lingkungan hidup	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Bantaeng	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan	Dinas Lingkungan Hidup



PRIORITAS PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS KAB.BANTAE NG 2025	FOKUS PEMBANGU NAN	SASARAN	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
				Beracun (Limbah B3)	

➤ **Dukungan/keselarasan Program Prioritas Kab. Bantaeng terhadap Program Prioritas Tematik Provinsi. Target kinerja Program Prioritas Tematik untuk Kab. Bantaeng**

Pengembangan kawasan Bulukumba dilakukan melalui pendekatan pemerataan dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, seiring dengan ditetapkannya KPPN Selayar dan KSPN Takabonerate sebagai bagian dari daerah Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) Baru. Untuk itu sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional, maka dilakukan strategi pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan promosi wisata dan peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata, khususnya di kabupaten Kepulauan Selayar dan kabupaten Bulukumba yang diiringi dengan pengembangan kapasitas usaha ekonomi melalui penguatan kapasitas kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas.

Selain strategi peningkatan pertumbuhan perkonomian daerah, dalam mewujudkan pencapaian sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata maka strategi pengembangan kawasan Bulukumba dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja yang dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan khususnya komoditas garam secara terpadu dan pengembangan sentra UKM di kabupaten Jeneponto, peningkatan investasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah, khususnya peningkatan kapasitas **Kawasan Industri Bantaeng** yang merupakan kawasan industry prioritas nasional.

Kawasan Bulukumba merupakan salah kawasan yang akan diprioritaskan penanganannya pada Tahun 2025 dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang yang kompetitif dan inklusif untuk meningkatkan capaian IPM kabupaten Tahun 2023 di Kawasan Bulukumba di bawah rata rata capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan menurunkan angka kemiskinan yang diprioritaskan pada Kabupaten Banteng, Kepulauan Selayar dan kabupaten Jeneponto yang angka



kemiskinannya masih di atas provinsi Sulawesi Selatan.

Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata diprioritaskan pada pemenuhan akses dan layanan dasar, khususnya pemenuhan kebutuhan air minum, penanganan permukiman kumuh dan penyelenggaraan jalan berupa peningkatan kualitas dan kemantapan jalan provinsi khususnya pada ruas jalan yang mendukung distribusi logistic guna meningkatkan konektivitas antara Kawasan Bulukumba sebagai pusat produksi komoditas pertanian dan perikanan dengan pusat distribusi.

Memahami bahwa Kabupaten Bantaeng berada diwilayah Kawasan Bulukumba, maka sasaran utama pembangunan wilayah Kawasan Bulukumba khususnya pada Kabupaten Bantaeng tahun 2025 adalah peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas, menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif serta peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja dengan target sebagai berikut.

Tabel IV.9
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

Kabupaten	Indikator Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
Bantaeng	Pertumbuhan Ekonomi	%	9,25
	Tingkat Kemiskinan	%	8,08
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,19
	Gini Ratio	Nilai	0,306
	IPM	Nilai	71,56

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2024

Sebagai penjabaran arah kebijakan, disajikan intervensi program pembangunan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan baik sasaran pembangunan provinsi Sulawesi Selatan maupun sasaran pembangunan nasional. Beberapa intervensi program pembangunan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional yang juga diharapkan dapat dikontribusikan melalui pembangunan kabupaten/kota di Kawasan Bulukumba yang memiliki relevansi dengan Kabupaten Bantaeng disajikan pada tabel sebagai berikut.



Tabel IV.10
Dukungan Kabupaten Bantaeng terhadap Program Pembangunan Prioritas
Kawasan Pembangunan Bulukumba Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Prioritas Pembangunan Bantaeng 2025
1.	PN: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik	Pemantapan implementasi reformasi birokrasi
			Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat	
			Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	
			Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	
4.	PN. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Akselerasi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan Kesehatan
			Pengembangan bidang keahlian jenjang SMK yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan	
			Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria)	
			Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya	
			Pembangunan kualitas keluarga	
			Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan pendidikan perempuan, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan	
	PN : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Prioritas	Prioritas Pembangunan Bantaeng 2025
			percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini	
			Fasilitasi literasi digital	
5.	PN : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengembangan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan	Peningkatan kualitas poengelolaan lingkungan hidup
			Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetative untuk meningkatkan ketahanan bencana	
			Pengembangan kawasan hortikultura	
			Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	
			Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi	

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 dan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Bappelitbangda diolah Tahun 2024.

Selain kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui Prioritas Nasional, pembangunan sasaran pembangunan juga diarahkan melalui kebijakan pembangunan tematik provinsi terhadap target pembangunan Kabupaten Bantaeng, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel IV.11
Sasaran Pembangunan Tematik Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan Tematik	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
Bantaeng	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	10,8
	Penurunan Gizi Buruk	%	1,8
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	11,07
	Realisasi Investasi	Rp. Miliar	150
	Produktivitas Pertanian	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	76,12

Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulsel, diolah Tahun 2024

4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam rangka penyusunan R-APBD 2025 terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berbasis pada RPD Kabupaten Bantaeng. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 harus selaras dan berkesinambungan dengan RKPD sebelumnya sehingga pembangunan jangka panjang daerah dapat direalisasikan secara bertahap. Mekanisme tersebut ditentukan dengan jelas dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Terkait dengan penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025, DPRD perlu memberikan input. Masukan ini penting artinya agar materi yang direncanakan oleh Pemda tidak menyimpang dari RPJPD. Oleh karena itu, penelaahan Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bantaeng yang tertuang pada Keputusan DPRD Kabupaten Bantaeng tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bantaeng dilakukan dalam rangka memenuhi ranah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Penelaahan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bantaeng dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2025 berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Adapun hasil pokok-pokok pikiran DPRD antara lain:

1. Bidang Pendidikan:

- a. Peningkatan kualitas Pendidikan berkarakter.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah

2. Bidang Kesehatan:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.



- b. Peningkatan pelayanan Kesehatan.
- c. Menekan jumlah bayi terkena gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan
- d. Meningkatkan kewaspadaan penyakit menular

3. Bidang Sosial Ekonomi:

- a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat
- b. Penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial
- c. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif.
- d. Pengembangan ekonomi kreatif UMKM
- e. Pengadaan alat dan mesin pertanian untuk kelompok tani
- f. Bantuan bibit tanaman dan ternak bagi masyarakat
- g. Pengadaan alat tangkap dan bibit rumput laut untuk kelompok nelayan

4. Bidang Infrastruktur dan Pemukiman:

- a. Peningkatan pembangunan drainase, jalan tani dan normalisasi sungai
- b. Peningkatan keamanan akses jalan untuk meminimalisir kecelakaan
- c. Peningkatan jalan/pengaspalan jalan
- d. Peningkatan pemukiman perumahan dan lingkungan
- e. Pembangunan Talud
- f. Pengadaan sarana air bersih

5. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan:

- a. Pembahasan APBD yang tepat waktu
- b. Peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan latihan serta perbaikan kinerja OPD dalam rangka pelayanan publik



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD 2025 berisikan program dan kegiatan beserta pendanaannya untuk melaksanakan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025. Melalui program dan kegiatan ini diharapkan mampu mengimplementasikan secara sinergi terhadap penjabaran dan pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Bantaeng 2024 - 2026.

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Sesuai dengan hasil perumusan kerangka pendanaan yang tersaji pada bab III, maka dilihat kerangka pendanaan dari sisi proyeksi belanja daerah di tahun 2025, khususnya pendapatan dan belanja yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel V.1
Rincian Kerangka Pendanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Proyeksi Pagu Tahun 2025
(Jutaan Rupiah)

Uraian Pendapatan Dan Belanja	Proyeksi 2025
Pendapatan Daerah	
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	207.789
Pendapatan Transfer	792.204
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.317
Jumlah Pendapatan	1.013.310
Belanja	
Belanja Operasi	752.064
Belanja Modal	163.947
Belanja Tidak Terduga	3.000
Belanja Transfer	92.799
Jumlah Belanja	1.011.810

5.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 akan menyajikan daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi nama program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, indikator kinerja program (*outcome*), kegiatan dan sub kegiatan (*output*), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/Perangkat Daerah



penanggungjawab program, kegiatan dan sub kegiatan. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2025, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah. Sesuai dengan arahan Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa Highlight Intervensi Prioritas Tahun 2025 yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut.

1. Prevalensi perkawinan anak di Jeneponto tertinggi ke 6 di Sulawesi Selatan atau sebesar 12,30%. Prioritaskan kegiatan pendataan perkawinan anak melalui pendamping desa dan PKK, sinkronisasi advokasi perkawinan anak dengan isu anak tidak sekolah, pendidikan kespro di jenjang SD dan SMP, perbaikan akses layanan pencegahan perkawinan anak, dan penegakan kebijakan pencegahan perkawinan.
2. Produksi Jagung di Bantaeng merupakan 5 tertinggi di Sulawesi Selatan. Prioritaskan program/kegiatan dan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana petani jagung, peningkatan kualitas hasil tanam, dan pengembangan olahan jagung yang bernilai jual tinggi.
3. Produksi kopi Bantaeng merupakan 7 tertinggi di Sulawesi Selatan. Optimalkan potensi kopi Bantaeng dengan memprioritaskan program/kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas produksi kopi, sarana prasarana pengolahan biji kopi, teknologi pengolahan kopi, dan perluas jaringan pemasaran kopi Bantaeng.
4. Prevalensi ketidakcukupan pangan Kab. Bantaeng masih berada diatas provinsi. Untuk itu, prioritaskan program/kegiatan pemberian bantuan pangan dan bahan pangan kepada masyarakat khususnya anak sekolah, balita dan ibu hamil, pengadaan sarana dan prasarana alat pertanian, dan pemanfaatan pekarangan.
5. Akses sanitasi layak di Banteng terendah di Sulawesi Selatan. Prioritaskan program/kegiatan dan anggaran untuk peningkatan sanitasi layak yang lebih tepat sasaran.
6. PERUMDA Tirta Eremerasa, Kab. Bantaeng kinerjanya “kurang sehat”. Untuk mendukung peningkatan akses air minum aman di Bantaeng, lakukan koordinasi dan kegiatan yang meningkatkan kinerja perumda air minum. Selain itu Kab. Bantaeng agar melakukan penyempurnaan



dokumen RISPAM karena termasuk kabupaten dengan skor RISPAM di bawah 75%

Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Kabupaten Bantaeng. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Selanjutnya, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kabupaten Bantaeng beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 terlampir pada lampiran Tabel V.2

Merujuk pada tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang dituangkan pada bab sebelumnya (Bab IV) maka berikut disajikan program prioritas berserta target dan pagu anggaran tahun 2025.



Tabel V.2
Program Prioritas Berserta Target Dan Pagu Anggaran Tahun 2025

PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	OPD PENANGGUNGJAWAB
		Tujuan 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		..			
Pemantapan implementasi reformasi birokrasi	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	Program Penyelenggaraa n Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindak Lanjuti (Dengan Satuan:Persen)	88 Persen	4.018.479.000,00	Inspektorat Daerah
	Digitalisasi tata kelola keuangan daerah		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penganggaran Keuangan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	100.195.347.600,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
				Persentase Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (Sp2d) Tepat Waktu (Dengan Satuan:Persen)			
				Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Menyampaikan			



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	OPD PENANGGUNGJAWAB
				Keuangan Tepat Waktu (Dengan Satuan:Persen)			
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dan Perencanaan Awal (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	4.304.670.031,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Tujuan 2 Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat					
Akselerasi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan	Penguatan pendidikan akhlak dan budaya	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kepribadian masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Sd/Mi/Paket A (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen 96,87Persen 83,91Persen 98,23Persen	72.770.647.874,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Smp/Mts/Paket B (Dengan Satuan:Persen)			
				Angka Partisipasi Penduduk Usia 5-6 Tahun Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Dengan Satuan:Persen)			
				Angka Partisipasi Penduduk Pada Pendidikan Non			



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	OPD PENANGGUNGJAWAB
				Formal Usia 7-18 Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:Persen)			
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru Paud,Sd/Mi,Smp/Mts Yang Memenuhi Kualifikasi Si/D-Iv (Dengan Satuan:Persen)	95 Persen	5.101.099.600,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Pemerataan kualitas layanan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rata-Rata Pelayanan Ukm Dan Ukp (Dengan Satuan:Persen)	93 Persen	47.311.683.518,00	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Cakupan Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	93 Persen	2.138.000.000,00	Dinas Kesehatan
Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Pp/Pkb, Lks Bipartit, Struktur	80 Persen	80.497.400,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	OPD PENANGGUNGJAWAB
				Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan).			
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pmks Yang Memperoleh Bantuan Sosial (Dengan Satuan:%)	33,33%	96.402.100,00	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pmks Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Dengan Satuan:%)	33,33%	923.817.700,00	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Cacat fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial (Dengan Satuan:%)	33,33%	605.328.100,00	Dinas Sosial
	Pengendalian harga dan ketersediaan barang		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Perekonomian, Pembangunan Dan Pengelolaan Barang Dan Jasa (Dengan Satuan:Persen)	96 Persen	766.998.000,00	Sekretariat Daerah



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	OPD PENANGGUNGJAWAB
		Pengembangan desa sebagai komunitas yang maju dan mandiri	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Penunjang Pangan Utama (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	207.945.900,00	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berprestasi (Dengan Satuan:Persen)	90 Persen	1.314.000.000,00	D I N A S Pemberdayaan Masyarakat Dan D E S A , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Yang Baik (Dengan Satuan:Persen)	90 Persen	96.000.000,00	D I N A S Pemberdayaan Masyarakat Dan D E S A , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (Mkjp) (Dengan Satuan:Persen)	17,85 Persen	3.727.886.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan K E L U A R G A Berencana
	Peningkatan kualitas dan	Meningkatnya kualitas	Program Pelatihan	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	18,47 Persen	34.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	OPD PENANGGUNGJAWAB
	keterampilan angkatan kerja	ketenagakerjaan daerah	Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	(Dengan Satuan:Persen)			Perindustrian
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	70 Persen	59.999.900,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
		Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan					
Perwujudan transformasi ekonomi	Optimalisasi hilirisasi ekonomi dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian	Meningkatnya kapasitas sektor ekonomi unggulan daerah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kontribusi Sektor Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan Terhadap Pdrb (Dengan Satuan:%)	5 Persen	200.100.000,00	Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kontribusi Sektor Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan Terhadap Pdrb (Dengan Satuan:Persen)	5 Persen	362.120.000,00	Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng
			Program Perencanaan	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan	0,5 Persen	269.999.500,00	Dinas Tenaga Kerja Dan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	OPD PENANGGUNGJAWAB
			Dan Pembangunan Industri	Menengah Di Kabupaten (Dengan Satuan:Persen)			Perindustrian
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (lui) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait (Dengan Satuan:Persen)	70 Persen	38.535.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi Yang Dimanfaatkan Oleh Investor (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	109.999.200,00	Dinas Penanaman Modal D A N Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Program Promosi Penanaman Modal		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi (Dengan Satuan:Persen)	100 Persen	280.000.000,00	Dinas Penanaman Modal D A N Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Peningkatan kompetensi UMKM		Program Pengembangan Umkm	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro (Dengan Satuan:%)	1,10 Persen	27.134.000,00	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan
	Mendorong		Program	Rasio Usaha Mikro	1 Persen	489.969.800,00	Dinas



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	OPD PENANGGUNGJAWAB
	berkembangnya kewirausahaan daerah		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Dengan Satuan:%)			Koperasi U K M D A N Perdagangan
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	48 Persen	529.255.000,00	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Di Wilayah Kerjanya (Dengan Satuan:%)	60 Persen	240.000.900,00	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Dengan Satuan:%)	5 Persen	80.000.000,00	Dinas Koperasi U K M D A N Perdagangan
Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	Meningkatnya layanan aksesibilitas dan infrastruktur wilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan (Dengan Satuan:Persen)	250 Angka 90 Persen 85 Persen	4.783.763.300,00	Dinas Perhubungan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	OPD PENANGGUNGJAWAB
	pembangunan		Jalan (Llaj)	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Yang Terpasang Dan Dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)			
				Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Angka)			
			Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase Kondisi Jalan, Jembatan Dan Gorong- Gorong Baik (Dengan Satuan:%)	73 Persen	49.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (Dengan Satuan:Persen (%))	68 Persen	313.204.700,00	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan
			Program Kawasan Permukiman	Persentase Pemukiman Yang Tertata (Dengan Satuan:Persen (%))	99,85 Persen	50.400.000,00	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan
			Program Peningkatan Prasarana,	Persentase Psu Perumahan Permukiman Yang	58 Persen	194.000.000,00	Dinas Perumahan, Pemukiman



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	OPD PENANGGUNGJAWAB
			Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Ditingkatkan Kualitasnya (Dengan Satuan:Persen (%))			Dan Pertanahan
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	4 Persen	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Dengan Satuan:%)	83 Persen	1.667.462.600,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Peningkatan kualitas poengelolaan lingkungan hidup	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Bantaeng	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota (Dengan Satuan:Persen)	59,00 Persen	4.729.707.700,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau	Persentase Kasus Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang	100 Persen	735.552.800,00	Dinas Lingkungan Hidup



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	OPD PENANGGUNGJAWAB
			Kerusakan Lingkungan Hidup	Ditangani (Dengan Satuan:Persen)			
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Prosedur (Dengan Satuan:Persen)	45 Persen	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAB. BANTAENG

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						308,646,032,243.00							323,427,269,529.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						308,356,032,243.00							323,108,269,529.00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						308,356,032,243.00							323,108,269,529.00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	230,454,284,769.00						100 Persen	253,528,260,796.00	
	1.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan,penganggara n dan evaluasi kinerja	-			100 Persen	90,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	-	99,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	43,155,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		47,471,090.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	30,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		33,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	16,844,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		18,528,950.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-			100 Persen	229,918,504,469.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	-	252,921,704,916.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1618 Orang/bula n	229,857,004,469.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		252,842,704,916.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		35,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	16,500,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		22,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		22,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	-			100 Persen	25,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	-	30,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		30,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Kepegawaian pada Perangkat Daerah	-			100 Persen	27,319,200.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	-	33,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	27,319,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		33,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	-			100 Persen	104,601,500.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	-	122,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,997,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		5,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		7,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	99,604,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		110,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	17,678,800.00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	-	22,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	17,678,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		22,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	225,050,800.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	-	247,555,880.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	130,050,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		143,055,880.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	95,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		104,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-			100 Persen	46,130,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	-	52,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	42,130,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		47,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	4,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		5,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Penduduk Pada Pendidikan Non Formal Usia 7-18 yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket B Angka partisipasi Penduduk Usia 5-6 Tahun Pada Pendidikan Anak Usia Dini Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen 96,87 Persen 83,91 Persen 98,23 Persen	72,770,647,874.00						100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	63,885,798,909.00	
	1.01.02.2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	-			98,29 Persen 100 Persen 0 Persen	40,906,888,934.00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik	-	33,476,168,009.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKREASI	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		385,011,330.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		350,073,653.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				25 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		2,635,312,460.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		89,160,771.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		252,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		310,240,954.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.0 1.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				14 Paket	840,750,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		955,350,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	150,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		165,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				150 Satuan Pendidikan	155,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		170,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				150 Satuan Pendidikan	18,573,920,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		20,431,312,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.0 1.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				150 Orang	100,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		110,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				4 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		800,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		220,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				500 Paket	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		180,807,220.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	14,956,096,934.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		400,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		227,513,413.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				150 Satuan Pendidikan	45,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		49,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Ruang	4,950,248,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		3,560,892,838.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				15 Paket	1,135,873,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		1,932,993,370.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	-			100 Persen 97,83 Persen 100 Persen 0 Persen	22,525,761,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik	-	18,099,985,100.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YANG BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YANG BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YANG BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0006	Pembangunan Laboratorium														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				13 Ruang	4,420,081,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		4,862,089,100.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		220,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruan g	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		220,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Pa ket	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	70,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		77,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				43 Satuan Pendidikan	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		22,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				43 Satuan Pendidikan	7,950,680,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		8,327,396,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				86 Orang	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		55,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				6550 Satuan Pendidikan	15,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		16,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	10,000,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.0 2.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				300 Paket	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		1,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0067	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar PAUD Angka Partisipasi Murni PAUD	-			93,80 Persen 83,91 Persen	5,312,997,940.00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik	-	8,014,145,800.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				12 Unit	1,299,478,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		1,429,425,800.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				10 Paket	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YANG BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				164 Satuan Pendidikan	827,009,940.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YANG BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		215,600,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				164 Satuan Pendidikan	3,101,510,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YANG BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		3,315,620,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				164 Orang	70,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YANG BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		77,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		1,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				200 Paket	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		110,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				10 Paket	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				6500 Satuan Pendidikan	15,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		16,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	-			98,04 Persen	4,025,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik	-	4,295,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 4.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				9 Satuan Pendidikan	30,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		33,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 4.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				9 Satuan Pendidikan	3,995,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		4,262,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase muatan lokal Yang di tetapkan sebagai bahan ajar	100 Persen			100 Persen	30,000,000.00						100 Persen	83,000,000.00	
	1.01.03.2.0 1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Muatan Lokal sebagai bahan ajar di tingkat Pendidikan Dasar	-			3 Muatan Lokal	30,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik	-	83,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.0 1.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				50 Orang	30,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		33,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.0 1.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Sekolah dan Peserta Didik		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TENAGA KEPENDIDIKAN Guru Paud,SD/MI,SMP/MTS yang memenuhi Kualifikasi SI/D-IV	95 Persen			95 Persen	5,101,099,600.00						95 Persen	5,611,209,824.00	
	1.01.04.2.0 1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	-			9 Angka	5,101,099,600.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Tenaga Pendidik	-	5,611,209,824.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.0 1.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	963,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Tenaga Pendidik		1,059,300,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.0 1.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Laporan	4,138,099,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Tenaga Pendidik		4,551,909,824.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						290,000,000.00							319,000,000.00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						290,000,000.00							319,000,000.00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Budaya yang dipelihara	100 Persen			100 Persen	50,000,000.00						100 Persen	55,000,000.00	
	2.22.02.2.0 1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah situs budaya yang dikelola dan dilestarikan oleh masyarakat	-			3 Unit	50,000,000.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Kabupaten Bantaeng	-	55,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.0 1.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				2 Objek	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Kabupaten Bantaeng		55,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan	100 Persen			100 Persen	70,000,000.00						100 Persen	77,000,000.00	
	2.22.03.2.0 1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sanggar seni yang di bina	-			100 Persen	70,000,000.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Kabupaten Bantaeng		77,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.0 1.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	70,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Kabupaten Bantaeng		77,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100 Persen			100 Persen	25,000,000.00						100 Persen	27,500,000.00			
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar budaya yang ditetapkan	-			100 Persen	25,000,000.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Kabupaten Bantaeng	-	27,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Kabupaten Bantaeng		27,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
4.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum Yang di Kelola dengan baik	100 Persen			100 Persen	145,000,000.00						100 Persen	159,500,000.00			
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang di kelola	-			1 Unit	145,000,000.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	-	159,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				5 Unit	145,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		159,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		DINAS KESEHATAN						111,922,690,286.00									69,792,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						111,922,690,286.00							69,792,000,000.00			
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						111,922,690,286.00							69,792,000,000.00			
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	62,348,006,768.00						100 Persen	61,000,000,000.00			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD	95 Persen			100 Persen	100,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	95 Persen	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	100,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	95 persen			95 Persen	60,695,633,968.00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	95 persen	61,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/bula n	60,495,633,968.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		61,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	200,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	95 persen			100 Persen	54,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	95 persen	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	54,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administراسي Umum Kantor	95 persen			95 Persen	265,806,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	95 persen	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	15,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	12,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	238,806,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 persen			100 Persen	629,866,800.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	95 persen	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Laporan	232,057,200.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	397,809,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATA N TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	95 persen			100 Persen	602,700,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	95 persen	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	602,700,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rata-Rata Pelayanan UKM dan UKP	93 Persen			93 Persen	47,311,683,518.00						93 Persen	7,942,000,000.00	
	1.02.02.2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	95 persen			93 persen	1,600,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat	95 persen	200,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK- BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGUL ER- PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK- BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGUL ER- PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK- BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGUL ER- PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				100 Unit	100,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- BOKKB-B OK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		200,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				10 Paket	1,500,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil yang mendapatka pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen			100 persen	45,711,683,518.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	100 persen	7,742,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	200,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	250,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	200,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	150,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	150,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	150,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				5 Orang	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		0.00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.0 2.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	100,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	800,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	200,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	350,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKBOK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		360,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				2 Dokumen	300,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			<i>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				10 Orang	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		22,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				2 Dokumen	644,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				12 Dokumen	33,923,004,218.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			<i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan</i>				1 Paket	45,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		55,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				5 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	5,094,429,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		7,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	2,425,250,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				13 Unit	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	35,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKBOK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		45,000,000.00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.0 2.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				2 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	150,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKBOK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		170,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	75,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKBOK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		90,000,000.00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Cakupan Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	93 Persen			93 Persen	2,138,000,000.00						93 Persen	820,000,000.00	
	1.02.03.2.0 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	95 persen			93 persen	1,338,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	95 persen	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.0 2.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				50 Orang	1,188,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layana n Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.0 2.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.0 3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	800,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	-	820,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.0 3.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				50 Orang	800,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB, BOK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		820,000,000.00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian Survei Mawas Diri	80 Persen			80 Persen	125,000,000.00						80 Persen	30,000,000.00	
	1.02.05.2.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pola hidup sehat di masyarakat	85 persen			85 Persen	50,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	85 persen	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 1.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterlibatan Lintas Sektor dalam Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	85 persen			85 Persen	50,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	85 persen	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 2.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-			100 Persen	25,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	-	30,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		30,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		RSUD PROF. DR. ANWAR MAKKATUTU						85,000,000,000.00							90,000,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						85,000,000,000.00							90,000,000,000.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						85,000,000,000.00							90,000,000,000.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RSUD Prof. Dr Anwar Makkatutu	100 Persen			100 Persen	85,000,000,000.00						100 Persen	90,000,000,000.00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji ASN	95 persen			100 Persen	0.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	95 persen	0.00	RSUD PROF. DR. ANWAR MAKKATUTU
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Pallantikang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	RSUD PROF. DR. ANWAR MAKKATUTU
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	-			100 Persen	85,000,000,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat	-	90,000,000,000.00	RSUD PROF. DR. ANWAR MAKKATUTU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	85,000,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Pallantikang	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		90,000,000,000.00	RSUD PROF. DR. ANWAR MAKKATUTU
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di RSUD Prof. Dr. Dr. Anwar Makkatutu	100 Persen			100 Persen	0.00						100 Persen	0.00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	95 persen			100 Persen	0.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat	95 persen	0.00	RSUD PROF. DR. ANWAR MAKKATUTU
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				2 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Pallantikang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		0.00	RSUD PROF. DR. ANWAR MAKKATUTU
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				60 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Pallantikang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		0.00	RSUD PROF. DR. ANWAR MAKKATUTU
	1	RSUD BANYORANG						6,130,088,000.00							12,720,000,000.00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6,130,088,000.00							12,720,000,000.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						6,130,088,000.00							12,720,000,000.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Capaian Indikator Sasaran RSUD Banyorang	70 Persen			70 Persen	4,613,240,000.00						70 Persen	10,520,000,000.00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	95 persen			75 Persen	0.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	95 persen	5.020,000,000.00	RSUD BANYORANG
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bula n	0.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		5,020,000,000.00	RSUD BANYORANG
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 persen			80 Persen	213,240,000.00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	95 persen	300,000,000.00	RSUD BANYORANG
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	213,240,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		300,000,000.00	RSUD BANYORANG

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	95 persen			85 Persen	0.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	95 persen	0.00	RSUD BANYORANG
	1.02.01.2.0 9.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	RSUD BANYORANG
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang terlaksana	-			70 Persen	4,400,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	-	5,200,000,000.00	RSUD BANYORANG
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4,400,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N DARI BLUD	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		5,200,000,000.00	RSUD BANYORANG
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di RSUD Banyorang	70 Persen			70 Persen	384,848,000.00						70 Persen	1,000,000,000.00	
	1.02.02.2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia untuk UKM dan UKP	95 persen			90 Persen	0.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	-	95 persen	600,000,000.00	RSUD BANYORANG
	1.02.02.2.0 1.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	-		0.00	RSUD BANYORANG
	1.02.02.2.0 1.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	-		0.00	RSUD BANYORANG
	1.02.02.2.0 1.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	-		0.00	RSUD BANYORANG
	1.02.02.2.0 1.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	-		600,000,000.00	RSUD BANYORANG
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan yang Tersedia untuk UKM dan UKP Rujukan	100 persen			80 Persen	384,848,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat	100 persen	400,000,000.00	RSUD BANYORANG
	1.02.02.2.0 2.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	384,848,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		400,000,000.00	RSUD BANYORANG	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Banyorang	70 Persen			70 Persen	1,132,000,000.00						70 Persen	1,200,000,000.00		
	1.02.03.2.0 3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	-			80 Persen	1,132,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	-	1,200,000,000.00	RSUD BANYORANG	
	1.02.03.2.0 3.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				14 Orang	1,132,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		1,200,000,000.00	RSUD BANYORANG	
		PUSKESMAS KOTA						3,050,541,727.00								3,000,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,050,541,727.00							3,000,000,000.00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,050,541,727.00							3,000,000,000.00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97 Persen			97 Persen	3,050,541,727.00						97 Persen	3,000,000,000.00		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	3,050,541,727.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	-	3,000,000,000.00	PUSKESMAS KOTA	
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3,050,541,727.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Pallantikang	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATA N DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		3,000,000,000.00	PUSKESMAS KOTA
	1	PUSKESMAS BISSAPPU						2,580,871,403.00							2,700,000,000.00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,580,871,403.00							2,700,000,000.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,580,871,403.00							2,700,000,000.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97 Persen			97 Persen	2,580,871,403.00						97 Persen	2,700,000,000.00	
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	2,580,871,403.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	-	2,700,000,000.00	PUSKESMAS BISSAPPU
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,580,871,403.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATA N DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		2,700,000,000.00	PUSKESMAS BISSAPPU
		PUSKESMAS LASEPANG						1,484,121,564.00							1,600,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,484,121,564.00							1,600,000,000.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,484,121,564.00							1,600,000,000.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97 Persen			97 Persen	1,484,121,564.00						97 Persen	1,600,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	1,484,121,564.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	-	1,600,000,000.00	PUSKESMAS LASEPANG
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,484,121,564.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATA N DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		1,600,000,000.00	PUSKESMAS LASEPANG
		PUSKESMAS ULUGALUNG						1,646,498,351.00							1,800,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,646,498,351.00							1,800,000,000.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,646,498,351.00							1,800,000,000.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1,646,498,351.00						-	1,800,000,000.00	
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	1,646,498,351.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	-	1,800,000,000.00	PUSKESMAS ULUGALUNG
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,646,498,351.00	Kab. Bantaeng, Eremerasa, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATA N DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		1,800,000,000.00	PUSKESMAS ULUGALUNG
		PUSKESMAS CAMPAGALOE						1,642,643,696.00							1,800,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,642,643,696.00							1,800,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,642,643,696.00							1,800,000,000.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97 Persen			97 Persen	1,642,643,696.00						97 Persen	1,800,000,000.00	
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	1,642,643,696.00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	-	1,800,000,000.00	PUSKESMAS CAMPAGALOE
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,642,643,696.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATA N DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		1,800,000,000.00	PUSKESMAS CAMPAGALOE
		PUSKESMAS DAMPANG						1,774,839,308.00							1,900,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,774,839,308.00							1,900,000,000.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,774,839,308.00							1,900,000,000.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	1,774,839,308.00						100 Persen	1,900,000,000.00	
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	1,774,839,308.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	-	1,900,000,000.00	PUSKESMAS DAMPANG
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,774,839,308.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATA N DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		1,900,000,000.00	PUSKESMAS DAMPANG

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SINOA						1,732,554,414.00							1,800,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,732,554,414.00							1,800,000,000.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,732,554,414.00							1,800,000,000.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97 Persen			97 Persen	1,732,554,414.00						97 Persen	1,800,000,000.00	
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	1,732,554,414.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat	-	1,800,000,000.00	PUSKESMAS SINOA
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,732,554,414.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		1,800,000,000.00	PUSKESMAS SINOA
		PUSKESMAS LOKA						1,681,390,539.00							1,800,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,681,390,539.00							1,800,000,000.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,681,390,539.00							1,800,000,000.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97 Persen			97 Persen	1,681,390,539.00						97 Persen	1,800,000,000.00	
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	1,681,390,539.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat	-	1,800,000,000.00	PUSKESMAS LOKA
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,681,390,539.00	Kab. Bantaeng, Uluere, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATA N DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		1,800,000,000.00	PUSKESMAS LOKA
	1	PUSKESMAS MOTI						2,337,845,724.00							2,400,000,000.00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,337,845,724.00							2,400,000,000.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,337,845,724.00							2,400,000,000.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97 Persen			97 Persen	2,337,845,724.00						97 Persen	2,400,000,000.00	
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	2,337,845,724.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	-	2,400,000,000.00	PUSKESMAS MOTI
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,337,845,724.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATA N DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		2,400,000,000.00	PUSKESMAS MOTI
		PUSKESMAS KASSI-KASSI						2,241,477,166.00							2,300,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,241,477,166.00							2,300,000,000.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,241,477,166.00							2,300,000,000.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97 Persen			97 Persen	2,241,477,166.00						97 Persen	2,300,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	2,241,477,166.00			Memperkua t Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	-	2,300,000,000.00	PUSKESMAS KASSI-KASSI
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,241,477,166.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		2,300,000,000.00	PUSKESMAS KASSI-KASSI
		PUSKESMAS LABBO						1,907,884,346.00							2,000,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,907,884,346.00							2,000,000,000.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,907,884,346.00							2,000,000,000.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97 Persen			97 Persen	1,907,884,346.00						97 Persen	2,000,000,000.00	
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	1,907,884,346.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	-	2,000,000,000.00	PUSKESMAS LABBO
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,907,884,346.00	Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		2,000,000,000.00	PUSKESMAS LABBO
		PUSKESMAS PABENTENGANG						1,889,426,177.00							2,000,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,889,426,177.00							2,000,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,889,426,177.00							2,000,000,000.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97 Persen			97 Persen	1,889,426,177.00						97 Persen	2,000,000,000.00	
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	1,889,426,177.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		2,000,000,000.00	PUSKESMAS PABENTENGANG
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,889,426,177.00	Kab. Bantaeng, Eremerasa, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATA N DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		2,000,000,000.00	PUSKESMAS PABENTENGANG
		PUSKESMAS BARUGA						2,304,821,892.00							2,400,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,304,821,892.00							2,400,000,000.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,304,821,892.00							2,400,000,000.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97 Persen			97 Persen	2,304,821,892.00						97 Persen	2,400,000,000.00	
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	2,304,821,892.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		2,400,000,000.00	PUSKESMAS BARUGA
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,304,821,892.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		2,400,000,000.00	PUSKESMAS BARUGA	
	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							120,675,002,488.00							124,110,000,000.00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						120,675,002,488.00							124,110,000,000.00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						120,675,002,488.00							124,110,000,000.00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	5,480,581,688.00						100 Persen	6,660,000,000.00		
	1.03.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	100 Persen			100 Persen	117,623,700.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengem- bangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningkatan Tata Kelola pengelenggaraan pemerinta- han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	30,610,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengem- bangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningkatan Tata Kelola pengelenggaraan pemerinta- han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		40,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengem- bangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD		30,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n Pengemb angsan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		30,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	43,444,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n Pengemb angsan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		40,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	43,568,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n Pengemb angsan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		60,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	100 Persen			100 Persen	4,940,469,388.00			Melanjutka n Pengemb angsan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	5,220,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bula n	4,890,469,388.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angsan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		5,100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	Melanjutka n Pengemb angsan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		30,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD		50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	30,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		40,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang - undangan	100 Persen			100 Persen	20,000,000.00			Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD	100 Persen	30,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD		30,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100 Persen			100 Persen	149,600,000.00			Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	-	100 Persen	270,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	12,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	-		50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	107,600,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	-		170,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	30,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	-		50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	15,795,000.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD	100 Persen	630,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		600,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	15,795,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		30,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 Persen			100 Persen	144,083,600.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD	100 Persen	220,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	17,909,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		30,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	106,174,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		160,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		30,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	100 Persen			100 Persen	93,010,000.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	90,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	93,010,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		60,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		30,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	40 Persen			40 Persen	10,591,600,000.00						40 Persen	5,050,000,000.00	
	1.03.02.2.0 1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kondisi Infrastruktur Sungai, Embung, Mata Air dan bangunan Penampung Air Lainnya dalam Kondisi Baik	68 Persen			67 Persen	150,000,000.00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat	68 Persen	2,650,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 1.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		60,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 1.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				10 Lembaga	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 1.0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		60,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 1.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai														
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				4 KM	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 1.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	0.00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		300,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 1.0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam														
			-				-	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		400,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 1.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	0.00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 1.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				8 KM	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		400,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 1.0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				3 KM	100,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		120,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 1.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		60,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 1.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				4 Unit	0.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		400,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 1.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi														
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				2 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	68 Persen			67 Persen	10,441,600,000.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat	68 Persen	2,400,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 2.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				3 KM	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 2.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				5 KM	10,000,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		1,100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 2.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,2 KM	441,600,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 2.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				12 Lembaga	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.0 2.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		300,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	4 Persen			4 Persen	20,000,000,000.00						4 Persen	23,650,000,000.00	
	1.03.03.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan layanan Air Bersih/Air Minum Masyarakat	68 Persen			67 Persen	20,000,000,000.00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat	68 Persen	23,650,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.0 1.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				10 Lembaga	0.00	-	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.0 1.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				30 Liter/Detik	20,000,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATA N TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		21,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.0 1.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				40 Liter/Detik	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATA N HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		600,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.0 1.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				50 SR	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATA N HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT, PENDAPATA N TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		2,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Ragonal	-			100 Persen	1,111,927,600.00						-	1,200,000,000.00	
	1.03.04.2.0 1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya sistem dan pengelolaan persampahan regional	-			100 Persen	1,111,927,600.00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat	-	1,200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.0 1.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dibangun				3 Ton/hari	1,111,927,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		1,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.0 1.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATA N TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	83 Persen			83 Persen	1,667,462,600.00						83 Persen	600,000,000.00	
	1.03.05.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	85 Persen			83 Persen	1,667,462,600.00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat	85 Persen	600,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.0 1.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi				3 M³/Hari	1,488,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATA N HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.0 1.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				2 M³/Hari	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.0 1.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				2 M³/Hari	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.0 1.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				20 Rumah Tangga	179,462,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N BAGI HASIL PAJAK	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.0 1.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang dilaksanakan dalam satu tahun	68 Persen			68 Persen	32,000,000,000.00						68 Persen	33,200,000,000.00	
	1.03.06.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten dalam keadaan Baik	70 Persen			68 Persen	32,000,000,000.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat	70 Persen	33,200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.0 1.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				400 M	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.0 1.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				12 Sistem Drainase Perkotaan	32,000,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		33,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	100 Persen			100 Persen	173,430,600.00						100 Persen	30,000,000.00	
	1.03.08.2.0 1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Prosentase pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya	100 Persen			100 Persen	173,430,600.00			-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat	100 Persen	30,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.0 1.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.0 1.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				100 Orang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.0 1.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				12 Dokumen	123,430,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		30,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Kondisi Jalan, jembatan dan gorong- gorong Baik	73 Persen			73 Persen	49,000,000,000.00						73 Persen	52,500,000,000.00	
	1.03.10.2.0 1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	455 KM			435 KM	49,000,000,000.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat	455 KM	52,500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.0 1.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				3 KM	10,000,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN N TRANSFER ANTAR DAERAH, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		11,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.0 1.0033	Rekonstruksi Jalan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				10 KM	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.0 1.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				10 KM	38,000,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		39,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.0 1.0040	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				2 Jembatan	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		1,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.0 1.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				10 KM	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		300,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.0 1.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	1,000,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		1,200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 Persen			100 Persen	350,000,000.00						100 Persen	490,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.0 1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelaksanaan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dalam satu tahun	100 Persen			100 Persen	250,000,000.00			Melanjutkan Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur r Pembang unan	Masya rakat	100 Persen	370,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.0 1.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				50 Orang	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur r Pembang unan	Masya rakat		70,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.0 1.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Lembaga	200,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur r Pembang unan	Masya rakat		300,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.0 2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	50,000,000.00			Melanjutkan Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur r Pembang unan	-	100 Persen	60,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.0 2.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Diooperasikan				1 Layanan Informasi	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur r Pembang unan	-		60,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.0 4	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase Pelaksanaan Konstruksi yang sesuai NSPK	100 Persen			100 Persen	50,000,000.00			Melanjutkan Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur r Pembang unan	Masya rakat	100 Persen	60,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.0 4.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				0 Paket Pekerjaan	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		60,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Perentase Pembangunan Infrastruktur yang Sesuai RTRW	96 Persen			96 Persen	300,000,000.00						96 Persen	730,000,000.00	
	1.03.12.2.0 1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	RTRW yang ditetapkan	1 Dokumen			1 Dokumen	50,000,000.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat	1 Dokumen	470,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.0 1.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		300,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.0 1.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		70,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.0 1.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang														
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				10 Publikasi	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi pemamfaatan ruang yang di kelola	1 Sistem			1 Sistem	250,000,000.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	1 Sistem	260,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.0 3.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				2 Dokumen	250,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		260,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN						5,125,081,845.00							3,287,700,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,925,081,845.00							3,078,000,000.00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						2,925,081,845.00							3,078,000,000.00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90 Persen			90 Persen	2,367,477,145.00						90 Persen	2,502,500,000.00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 %			90 %	55,323,400.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD	95 %	65,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	11,972,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD		18,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	12,006,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD		14,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	31,344,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD		33,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	95 %			90 %	1,941,213,725.00			Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	-	95 %	2,045,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1,898,841,925.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	-		2,000,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				23 Dokumen	36,855,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	-		38,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,516,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	-		7,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	95 %			90 %	113,435,800.00			Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD	95 %	127,500,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	3,889,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD		4,500,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD		12,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	3,600,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD		4,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				25 Laporan	105,846,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD		107,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	95 %			90 %	207,374,220.00			Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD	95 %	211,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	171,934,920.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD		175,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	11,340,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	SKPD		12,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	24,099,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	SKPD		24,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	50,130,000.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	SKPD	1 Dokumen	54,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	50,130,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	SKPD		54,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	68 Persen			68 Persen	313,204,700.00						68 Persen	325,800,000.00	
	1.04.02.2.0 1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Data Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %			100 %	68,633,800.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masyarakat	100 %	75,500,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.0 1.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	15,985,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktu r Pembang unan	Masya rakat		17,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.0 1.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	16,504,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		18,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.0 1.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana														
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	10,998,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		12,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.0 1.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	11,212,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		13,500,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.0 1.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	13,932,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		15,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.0 2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	5 kali			5 kali	200,000.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat	5 kali	400,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.0 2.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator														
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				10 Orang	100,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		200,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.0 2.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	100,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		200,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>					15,665,900.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat	100 %	17,400,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>				2 Unit Rumah	15,365,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		16,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>				2 Unit Rumah	100,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		1,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan</i>				80 Unit Rumah	100,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		200,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL						DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				20 Unit Rumah	100,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		200,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus	85 %			80 %	228,205,000.00			Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat	85 %	230,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun															
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				3 Laporan	228,205,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		230,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan				2 Izin	500,000.00			Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat	2 Izin	2,500,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.2.06.0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman															
			Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara				1 Sistem Informasi	500,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		2,500,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pemukiman yang tertata	99,85 Persen			99,85 Persen	50,400,000.00						99,85 Persen	52,700,000.00		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.0 2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha di Kabupaten/kota yang ditangani	99.85 %			99.85 %	25,000,000.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat	99.85 %	26,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.0 2.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		26,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.0 3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha yang sudah ditingkatkan kualitasnya	5,37 Ha			1,75 Ha	25,400,000.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat	2,05 Ha	26,700,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.0 3.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				20 Unit Rumah	400,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		700,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.0 3.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU														
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		26,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan Permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	58 Persen			58 Persen	194,000,000.00						58 Persen	197,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.2.0 1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	21 Perumahan			19 Perumahan	194,000,000.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat	21 Perumahan	197,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.0 1.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		26,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.0 1.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				2 Lokasi	169,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		171,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,200,000,000.00							209,700,000.00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						2,200,000,000.00							209,700,000.00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase tertanganinya sengketa tanah PEMDA secara litigasi / non litigasi	80 Persen			80 Persen	34,991,000.00						80 Persen	37,000,000.00	
	2.10.04.2.0 1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan Melalui Mediasi	5 kasus			4 kasus	34,991,000.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat	5 kasus	37,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.0 1.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	17,996,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		19,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	16,995,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		18,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	85 Persen			85 Persen	2,030,191,900.00						85 Persen	32,200,000.00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	90 %			80 %	2,030,191,900.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat	90 %	32,200,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				1 Dokumen	2,000,100,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		200,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	18,095,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		19,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0006	Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah				1 Laporan	11,996,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		13,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Lahan PEMDA yang terdataa	-			96 Persen	14,829,100.00						-	16,000,000.00	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase terinventarisasinya tanah PEMDA	-			96 Persen	14,829,100.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat	-	16,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong														
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				1 Laporan	14,829,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		16,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-			-	119,988,000.00						-	124,500,000.00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-			48 Persen	119,988,000.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat	-	124,500,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	106,992,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		110,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	12,995,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		14,500,000.00	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						3,141,454,997.00							5,955,810,614.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,141,454,997.00							5,955,810,614.00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3,141,454,997.00							5,955,810,614.00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	85 Persen			85 Persen	2,252,460,797.00						85 Persen	4,373,373,294.00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketetapan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD	90 persen			75 undefined	4,300,000.00			Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD	90 persen	6,555,300.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1,800,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		2,424,800.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	2,500,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		4,130,500.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu	95 persen			85 Persen	1,847,830,757.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD	95 persen	3,694,504,814.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bula n	1,842,330,757.00	-	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		3,684,661,514.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	3,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		5,693,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				6 Dokumen	2,500,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		4,150,300.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administراسي Umum Kantor	90 persen			75 Persen	137,180,600.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD	90 persen	204,095,200.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4,263,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		4,263,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	875,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		1,714,200.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	7,200,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		12,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	124,842,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		186,118,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	85 persen			75 Persen	19,279,600.00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD	85 persen	25,778,940.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	19,279,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		25,778,940.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	90 persen			75 Persen	139,165,440.00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD	90 persen	250,949,440.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	57,037,440.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		93,893,440.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	82,128,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		157,056,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 persen			75 Persen	104,704,400.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		191,489,600.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	44,178,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		87,308,600.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	40,045,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		80,101,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	7,230,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		10,830,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	13,250,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		13,250,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100 Persen			100 Persen	888,994,200.00						100 Persen	1,582,437,320.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.0 1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	202482 oran g			202482 Orang	17,520,800.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masyarakat	202482 oran g	31,665,100.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 1.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				80 Orang	17,520,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat		31,665,100.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	202482 oran g			202482 Orang	409,619,400.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat	202482 oran g	666,466,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 2.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	59,619,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat		71,994,400.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 2.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				30 Orang	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat		66,363,500.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 2.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	300,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat		528,108,100.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.05.03.2.0 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	200 orang			300 Orang	256,473,400.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat	200 orang	315,593,340.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.0 3.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota															
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				200 Orang	256,473,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat		315,593,340.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.0 4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah wilayah yang direhabilitasi pasca bencana	100 persen			100 Persen	205,380,600.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat	100 persen	568,712,880.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.0 4.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota															
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	205,380,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masyarakat		568,712,880.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						10,841,262,137.00								12,077,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10,841,262,137.00							12,077,000,000.00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10,841,262,137.00							12,077,000,000.00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Bidang dalam SKPD yang terlayani administrasi perkantoran nya dengan baik	100 Persen			100 Persen	4,862,802,437.00						100 Persen	5,632,000,000.00		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	40,734,000.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-	100 Persen	55,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	12,008,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-		15,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	6,531,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-		7,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3,045,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-		7,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,569,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-		6,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3,007,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-		6,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	12,570,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-		14,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen			100 Persen	4,176,503,944.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	4,216,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bula n	4,161,546,944.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		4,200,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13 Dokumen	12,957,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		12,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		4,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen			100 Persen	2,405,500.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-	100 Persen	3,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,405,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-		3,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Kepegawaian pada Perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	2,000,700.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	3,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2,000,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		3,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 Persen			100 Persen	118,775,800.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	169,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	3,699,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		6,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	6,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		8,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	105,076,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		150,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	27,027,000.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	650,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		100,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		500,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	27,027,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		50,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	68,795,493.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	67,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,585,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		4,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	57,920,793.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		58,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8,289,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 Persen			100 Persen	426,560,000.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	469,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39,878,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		41,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	369,682,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		400,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	6,740,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		8,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,260,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		20,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen			100 Persen	3,465,184,200.00						100 Persen	3,840,000,000.00	
	1.05.02.2.0 1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan Baik dan Sesuai Regulasi	100 Persen			100 Persen	3,288,982,500.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 Persen	3,575,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.0 1.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	46,055,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		60,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.0 1.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	41,296,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		70,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.0 1.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				181 Orang	74,113,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		100,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.0 1.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	64,328,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		80,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.0 1.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas														
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				1 Orang	100,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		50,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.0 1.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				1 laporan	584,452,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		550,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.0 1.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	2,438,505,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		2,500,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.0 1.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah														
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.0 1.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				1 Unit	39,121,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		60,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.0 1.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas				1 Dokumen	10,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		100,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.0 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani dengan baik dan sesuai regulasi yang berlaku	100 Persen			100 Persen	176,191,700.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	100 Persen	260,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.0 2.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 dokumen	4,370,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		20,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.0 2.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	58,721,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		70,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.0 2.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				1 Laporan	86,278,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		150,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.0 2.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	26,821,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		20,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.0 3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah PPNS yang bersertifikat	100 Persen			100 Persen	10,000.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	100 Persen	5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.0 3.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS														
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				1 Dokumen	10,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Bencana Kebakaran, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Yang Terlaksana Dengan Baik dan seseuai Regulasi yang Berlaku	100 Persen			100 Persen	2,513,275,500.00						100 Persen	2,605,000,000.00	
	1.05.04.2.0 1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupeten/Kota yang dilaksanakan dengan Baik sesuai regulasi yang berlaku	100 Persen			100 Persen	2,502,629,400.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	100 Persen	2,585,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.0 1.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	18,654,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		20,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.0 1.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	2,419,273,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		2,500,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.0 1.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	29,700,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		15,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.0 1.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				3 Unit	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		30,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.0 1.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				2 Dokumen	15,002,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		20,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran yang dilaksanakan dengan baik dan sesuai regulasi	100 Persen			100 Persen	4,800,000.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 Persen	10,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	4,800,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		10,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh informasi rawan bencana	150 Orang			50 Orang	5,846,100.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	50 Orang	10,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				30 Orang	5,846,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		10,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
		DINAS SOSIAL						5,409,076,232.00							5,916,695,329.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5,409,076,232.00							5,916,695,329.00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						5,409,076,232.00							5,916,695,329.00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %			100 %	3,297,387,932.00						100 %	3,650,424,679.00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100 %			100 %	32,270,800.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	SKPD	100 %	35,448,250.00	DINAS SOSIO

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6,649,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		7,314,010.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	499,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		499,600.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	499,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		549,560.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	1,135,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		1,248,610.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	950,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		1,045,000.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	15,839,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		17,423,890.00	DI N AS S O SI AL
	1.06.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	6,697,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		7,367,580.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu				100 %	2,735,963,228.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD	100 %	3,009,559,555.00	DI N AS S O

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				448 Orang/bula n	2,709,708,128.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		2,980,678,945.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	20,077,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		22,084,810.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	1,530,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		1,683,880.00	DI N AS S O SI AL
	1.06.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	4,099,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		4,509,780.00	DI N AS S O SI AL
	1.06.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	547,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		602,140.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan				100 %	1,124,500.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD	100 %	1,237,060.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	624,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		687,170.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	499,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		549,890.00	DI N AS S O SI

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Kepegawaian pada Perangkat Daerah				100 %	500,000.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD	100 %	550,000.00	DI N AS S O
	1.06.01.2.0 5.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	500,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		550,000.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Pemenuhaan Administrasi Umum Kantor				100 %	141,009,400.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD	100 %	131,946,430.00	DI N AS S O
	1.06.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1,496,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		1,647,580.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	6,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		6,600,000.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				204 Laporan	133,513,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		123,698,850.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	161,299,004.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD	100 %	137,669,624.00	DI N AS S O
	1.06.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,763,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		2,877,490.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	65,265,904.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		71,792,494.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	93,269,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		62,999,640.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100 %	225,221,000.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD	100 %	334,013,760.00	DI N AS S O
	1.06.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	43,830,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		39,600,000.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	131,421,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		197,654,160.00	DI N AS S O SI
	1.06.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	49,970,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		96,759,600.00	DI N AS S O SI
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	33.33 %			33.33 %	96,402,100.00						33.33 %	106,042,530.00	
	1.06.02.2.0 3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	100 %			30 %	96,402,100.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat	40 %	106,042,530.00	DI N AS S O
	1.06.02.2.0 3.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	85,177,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		93,695,800.00	DI N AS S O SI AL
	1.06.02.2.0 3.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Sertifikat	11,224,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		12,346,730.00	DI N AS S O SI AL

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	33.33 %			33.33 %	923,817,700.00						33.33 %	1,016,200,130.00	
	1.06.04.2.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %			30 %	347,818,000.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat	40 %	382,600,130.00	DI N AS S O SI AL
	1.06.04.2.0 1.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				310 Orang	287,917,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		316,708,700.00	DI N AS S O SI AL
	1.06.04.2.0 1.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	59,901,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		65,891,430.00	DI N AS S O SI
	1.06.04.2.0 2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100 %			30 %	575,999,700.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat	40 %	633,600,000.00	DI N AS S O SI AL
	1.06.04.2.0 2.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				2000 Orang	575,999,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		633,600,000.00	DI N AS S O SI
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penyandang cacat u s i k serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	33.33 %			33.33 %	605,328,100.00						33.33 %	598,883,500.00	
	1.06.05.2.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %			30 %	605,328,100.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat	40 %	598,883,500.00	DI N AS S O
	1.06.05.2.0 2.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				67 Orang	49,123,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan an Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		33,000,000.00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				8000 Keluarga	556,205,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan an Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		565,883,500.00	DINAS SOSIAL	
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	33.33 %			33.33 %	359,339,600.00						33.33 %	405,662,950.00		
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan	100 %			30 %	359,339,600.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan an Kemiskinan Ekstrem	-	40 %	405,662,950.00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana															
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				55 Orang	359,339,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan an Kemiskinan Ekstrem	-		405,662,950.00	DINAS SOSIAL	
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-			-	126,800,800.00						-	139,481,540.00		
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 %			33.33 %	126,800,800.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan an Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat	33.33 %	139,481,540.00	DINAS SOSIAL	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota															
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	114,432,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan an Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		125,875,970.00	DINAS SOSIAL	
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Laporan	12,368,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan an Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		13,605,570.00	DINAS SOSIAL	
		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN							3,315,125,220.00							5,685,500,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,006,590,720.00							4,135,500,000.00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3,006,590,720.00							4,135,500,000.00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	90 Persen			90 Persen	2,832,093,420.00						90 Persen	3,405,500,000.00	
	2.07.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100 persen			100 persen	49,998,800.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 persen	60,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	24,999,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		30,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	24,999,800.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		30,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 persen			100 persen	2,350,435,356.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 persen	2,440,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bula n	2,320,435,356.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		2,400,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		20,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		20,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Sesuai Peraturan Perundang Undangan	100 persen			90 persen	20,000,000.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 persen	25,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		25,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 persen			90 persen	182,472,300.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 persen	445,500,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	3,146,600.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		5,500,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	14,885,700.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		11,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	4,500,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		9,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	144,940,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		400,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		20,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	13,513,500.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 persen	40,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	13,513,500.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		40,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	152,135,664.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 persen	300,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	90,135,864.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		110,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	12,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		110,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	49,999,800.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		80,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100 persen			100 persen	63,537,800.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 persen	95,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	58,540,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		80,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4,997,800.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		15,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	18,47 Persen			18,47 Persen	34,000,000.00						18,47 Persen	540,000,000.00	
	2.07.03.2.0 1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	84,5 persen			80,5 persen	34,000,000.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	84,5 persen	540,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.0 1.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				25 Orang	34,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PAJAK DAERAH	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		40,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.0 1.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				500 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		500,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	70 Persen			70 Persen	59,999,900.00						70 Persen	80,000,000.00	
	2.07.04.2.0 3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah bursa kerja khusus wilayah kabupaten/Kota	8 bursa			8 bursa	30,000,000.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat	8 bursa	40,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.0 3.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				5000 Orang	30,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		40,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.0 4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Migran Indonesi (PMI) Yang mendapatkan Fasilitas Kepulangan	20 orang			25 orang	29,999,900.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	-	20 orang	40,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.0 4.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				25 Orang	29,999,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	-		40,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	80 Persen			80 Persen	80,497,400.00						80 Persen	110,000,000.00	
	2.07.05.2.0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Yang telah memiliki Peraturan Perusahaan Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	60 persen 465 persen			55 persen 80 persen	49,999,700.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat	60 persen 100 persen	60,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.0 1.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				50 Laporan	49,999,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		60,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.0 2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah perusahaan Yang Berselisih	3,63 persen			5,45 persen	30,497,700.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat	3,63 persen	50,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.0 2.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselasaikan				0 Perkara	30,497,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		50,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						308,534,500.00							1,550,000,000.00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						308,534,500.00							1,550,000,000.00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	0,5 Persen			0,5 Persen	269,999,500.00						0,5 Persen	1,450,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	2400 Unit			2300 Unit	269,999,500.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat	2400 Unit	1,450,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.0 1.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	199,999,800.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		350,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.0 1.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	69,999,700.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		100,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.0 1.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		1,000,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	70 Persen			70 Persen	38,535,000.00						70 Persen	100,000,000.00	
	3.31.03.2.0 1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Yang Diterbitkan Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI Menengah yang diterbitka	100 persen			90,5 persen	38,535,000.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat	100 persen	100,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.0 1.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			~Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	38,535,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	Masyarakat		100,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN						6,156,280,543.00							5,793,000,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6,156,280,543.00							5,793,000,000.00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						616,185,000.00							880,000,000.00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga yang melakukan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	90 Persen			90 Persen	521,185,000.00						90 Persen	660,000,000.00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PUG	100 Persen			90 Persen	11,185,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat	100 Persen	50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		20,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				67 Orang	6.185.000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		30.000.000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang berpartisipasi dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	100 Persen			90 Persen	500,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	100 Persen	550,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				26 Organisasi	500,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		550,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang diberikan penguatan dan pengembangan	100 Persen			90 Persen	10,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	100 Persen	60.000.000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				21 Lembaga	5,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		30.000.000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	5,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perlindungan perempuan yang mendapatkan pelayanan perlindungan	90 Persen			90 Persen	58,000,000.00						90 Persen	100,000,000.00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100 Persen			90 Persen	8,000,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat	100 Persen	40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Perangkat Daerah	8,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-			90 Persen	50,000,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat	-	60,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				20 Orang	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		60,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga dan Perangkat Daerah dalam peningkatan kualitas keluarga	90 Persen			90 Persen	12,000,000.00						90 Persen	50,000,000.00	
	2.08.04.2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraaan gender dan hak anak	100 Persen			90 Persen	12,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	100 Persen	50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.0 2.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				21 Lembaga	6,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.0 2.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				67 Orang	6,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		20,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Sistem data gender dan anak	90 Persen			90 Persen	15,000,000.00						90 Persen	30,000,000.00	
	2.08.05.2.0 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender & anak	100 Persen			95 Persen	15,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	100 Persen	30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.0 1.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga yang menyediakan layanan pemenuhan hak anak	90 Persen			90 Persen	10,000,000.00						90 Persen	40,000,000.00	
	2.08.06.2.0 1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang melakukan Pelembagaan PHA	100 Persen			90 Persen	10,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	100 Persen	40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.0 1.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				32 Organisasi	10,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						5,540,095,543.00							4,913,000,000.00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90 Persen			90 Persen	3,130,314,071.00						90 Persen	3,393,000,000.00	
	2.13.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen			90 Persen	41,000,000.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	100 Persen	100,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	21,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	10,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselasaikan tepat waktu	100 Persen			90 Persen	2,795,297,531.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	100 Persen	2,880,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bula n	2,765,297,531.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		2,800,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	10,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian kepegawaian pada perangkat daerah	100 Persen			90 Persen	7,104,000.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	100 Persen	10,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	7,104,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		10,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 Persen			90 Persen	119,235,700.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	100 Persen	190,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	5,143,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		10,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	114,092,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		180,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			90 Persen	87,136,840.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	100 Persen	98,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Paket Laporan	46,604,640.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		48,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	40,532,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 Persen			90 Persen	80,540,000.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	100 Persen	115,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	60,440,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		65,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,100,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang difasilitasi penataannya	-			90 Persen	985,781,472.00						-	1,000,000,000.00	
	2.13.02.2.0 1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang menyelenggarakan penataan dan kewenangan desanya	-			90 Persen	985,781,472.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat	-	1,000,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.02.2.0 1.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				46 Desa	985,781,472.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		1,000,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah desa yang di fasilitasi kerjasamanya	100 Desa			100 Desa	14,000,000.00						100 Desa	80,000,000.00	
	2.13.03.2.0 1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah perjanjian kerjasama desa yang di fasilitasi	10 Desa			10 Desa	14,000,000.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	10 Desa	80,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.03.2.0 1.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				6 Dokumen	7,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.03.2.0 1.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				6 Dokumen	7,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik	90 Persen			90 Persen	96,000,000.00						90 Persen	270,000,000.00	
	2.13.04.2.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desanya	46 Desa			46 Desa	96,000,000.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	46 Desa	270,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.0 1.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				46 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.0 1.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				46 Dokumen	30,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		60,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.0 1.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				46 Orang	15,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.0 1.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				46 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.0 1.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				12 Laporan	6,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.0 1.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				46 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang berprestasi	90 Persen			90 Persen	1,314,000,000.00						90 Persen	170,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.0 1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	100 Persen			90 Persen	1,314,000,000.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	100 Persen	170,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.0 1.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.0 1.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.0 1.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				67 Lembaga	23,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		60,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.0 1.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				67 Dokumen	1,246,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), RETRIBUSI DAERAH	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.13.05.2.0 1.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	5,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		DINAS KETAHANAN PANGAN							2,595,194,514.00								2,740,095,511.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,595,194,514.00							2,740,095,511.00			
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						2,595,194,514.00							2,740,095,511.00			
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Uurusan Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	2,295,194,514.00						100 Persen	2,378,095,511.00			
	2.09.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100 Persen			100 Persen	36,148,300.00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 Persen	57,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	22,413,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		30,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	13,734,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		27,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu	100 Persen			100 Persen	1,990,591,214.00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 Persen	2,003,595,511.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bula n	1,971,595,514.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		1,971,595,511.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	15,996,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		25,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,999,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		7,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen			100 Persen	10,600,000.00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 Persen	18,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.0 3.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10,600,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		18,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administراسي Umum Kantor	100 Persen			100 Persen	136,753,500.00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 Persen	171,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	13,513,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		15,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	3,240,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		6,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	120,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		150,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	59,814,300.00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 Persen	65,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				23 Laporan	23,868,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		25,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	35,946,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATA N TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		40,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100 Persen			100 Persen	61,287,200.00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 Persen	63,500,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	52,630,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		55,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		2,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	1,220,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukturu r Pembang unan	SKPD		3,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7,437,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		3,500,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase desa yang masuk dalam kategori mandiri pangan	100 Persen			100 Persen	3,710,100.00						100 Persen	5,000,000.00	
	2.09.02.2.0 1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur Lumbung Pangan yang tersedia	100 persen			100 persen	3,710,100.00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng	100 persen	5,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.0 1.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	3,710,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		5,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan penunjang pangan utama	100 Persen			100 Persen	207,945,900.00						100 Persen	247,000,000.00	
	2.09.03.2.0 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Angka ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/Hari)	2200 Kkal/K apita/Hari			2200 Kkal/Ka pita/Hari	105,764,800.00			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng	2200 Kkal/K apita/Hari	117,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 1.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		30,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 1.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	18,582,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		30,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 1.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan</i>				1 Unit	26,377,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		30,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 1.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan														
			<i>Informasi Harga dan Pasokan Pangan</i>				1 Dokumen	35,804,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		27,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (Persen)</i>	100 Persen			100 Persen	20,763,500.00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	30,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 2.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				20 Ton	20,763,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		30,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	<i>Persentase Cakupan Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai angka Kecukupan Gizi (100)</i>	100 Persen			100 Persen	81,417,600.00			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	100,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 4.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			<i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</i>				1 Dokumen	49,999,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		60,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 4.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				1 Laporan	31,417,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		40,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<i>Persentase Daerah Rawan Pangan yang tertangani</i>	100 Persen			100 Persen	38,344,000.00						100 Persen	50,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.09.04.2.0 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	38,344,000.00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng	1 Dokumen	50,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.04.2.0 1.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan															
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	38,344,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		50,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
5.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan yang bersertifikat	100 Persen			100 Persen	50,000,000.00						100 Persen	60,000,000.00		
	2.09.05.2.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Segar yang diawasi	100 Persen			100 Persen	50,000,000.00			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	60,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.2.0 1.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		60,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						11,022,998,018.00								12,224,400,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11,022,998,018.00							12,224,400,000.00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						11,022,998,018.00							12,224,400,000.00		
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerinahan Daerah	100 Persen			100 Persen	3,791,638,018.00						100 Persen	3,846,400,000.00		
	2.11.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	100 Persen			100 Persen	38,099,700.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD	100 Persen	39,500,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8,849,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		9,500,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	14,650,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		15,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	14,600,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		15,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase palayanan administrasi keuangan	100 Persen			100 Persen	3,218,396,658.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD	100 Persen	3,221,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bula n	3,198,197,158.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		3,200,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				11 Dokumen	13,699,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		14,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6,499,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		7,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	4,679,100.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD	100 Persen	4,200,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	4,679,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		4,200,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	174,536,500.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	-	100 Persen	187,100,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,994,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	-		3,200,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	-		5,700,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				19 Dokumen	9,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	-		9,200,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	-		15,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	132,542,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	-		140,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	13,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	-		14,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur memadai	70 Persen			65 Persen	14,911,700.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD	70 Persen	18,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	14,911,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		18,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	229,091,560.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD	100 Persen	255,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	99,998,460.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		120,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	129,093,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK- PEMBAYARAN IURAN JKN	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		135,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen			100 Persen	111,922,800.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD	100 Persen	121,600,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	59,972,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		61,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	24,900,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		30,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	7,050,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	SKPD		8,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	SKPD		22,600,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dokumen Lingkungan Hidup	ada Ada / Tidak Ada			ada Ada / Tidak Ada	50,000,000.00						ada Ada / Tidak Ada	60,000,000.00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten yang Ditetapkan	1 Dokumen			1 Dokumen	50,000,000.00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	0 Dokumen	60,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat		60,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditangani	100 Persen			100 Persen	735,552,800.00						100 Persen	905,000,000.00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Pencemaran dan Kerusakan yang dapat dicegah	13 Dokumen			12 Dokumen	624,353,000.00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	13 Dokumen	775,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	341,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat		408,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat		60,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.0 1.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				25 Dokumen	233,353,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat		307,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.0 2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencemaran/kerusakan yang ditindaki	70 Persen			60 Persen	36,200,000.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat	70 Persen	40,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.0 2.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	36,200,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat		40,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.0 3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Rehabilitasi Lahan	50 Persen			40 Persen	74,999,800.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat	50 Persen	90,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.0 3.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat		10,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.0 3.0009	Pelaksanaan rehabilitasi														
			Iluas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Ha	69,999,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat		80,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tingkat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	12,25 Persen			12,25 Persen	1,447,999,700.00						12,25 Persen	1,688,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.2.0 1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Keanekaragaman Hayati yang dikelola	18 Lokasi			17 Lokasi	1,447,999,700.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat	18 Lokasi	1,688,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.0 1.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				26,5 Ha	677,999,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat		853,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.0 1.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya														
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				4,4 Unit	769,999,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat		835,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Proporsi Limbah B3 yang Diolah Sesuai Prosedur	45 Persen			45 Persen	20,000,000.00						45 Persen	30,000,000.00	
	2.11.05.2.0 1	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang memenuhi syarat	50 Persen			40 Persen	20,000,000.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat	50 Persen	30,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.0 1.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				3 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat		15,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.0 1.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	10,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat		15,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 Persen			100 Persen	57,100,000.00						100 Persen	70,000,000.00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang dilakukukan pembinaan dan pengawasan	45 Persen			35 Persen	57,100,000.00			Memperkua t Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat	45 Persen	70,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				3200 Dokumen	17,100,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat		20,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				12 Badan Usaha	40,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat		50,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	1 Lembaga			1 Lembaga	13,499,800.00						1 Lembaga	15,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.07.2.0 1	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	3 Lembaga			1 Lembaga	13,499,800.00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Lembaga	15,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.0 1.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				2 Dokumen	13,499,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masyarakat		15,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga pendidikan atau kelompok masyarakat pemerhati lingkungan yang memperoleh pelatihan lingkungan hidup	25 Persen			25 Persen	7,500,000.00						25 Persen	15,000,000.00	
	2.11.08.2.0 1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan	75 Persen			25 Persen	7,500,000.00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masyarakat	25 Persen	15,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.0 1.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				2 Lembaga	7,500,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masyarakat		15,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada Ada /Tidak Ada			Ada Ada /Tidak Ada	150,000,000.00						Ada Ada /Tidak Ada	200,000,000.00	
	2.11.09.2.0 1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan	8 Kegiatan			2 Kegiatan	150,000,000.00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masyarakat	2 Kegiatan	200,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.09.2.0 1.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				2 Entitas	150,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat		200,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	20,000,000.00						100 Persen	30,000,000.00	
	2.11.10.2.0 1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat dibidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 Persen			100 Persen	20,000,000.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat	100 Persen	30,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.0 1.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				5 Pengaduan	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat		30,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	59,00 Persen			59,00 Persen	4,729,707,700.00						59,00 Persen	5,365,000,000.00	
	2.11.11.2.0 1	Pengelolaan Sampah	Jumlah timbulan sampah yang terkelola	17737 Ton			17441 Ton	4,729,707,700.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masya rakat	17737 Ton	5,365,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.0 1.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				9720 Ton	4,729,707,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5. Peningka tan Kualitas Pengelolaa n Lingkungan Hidup	Masyarakat		5,365,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4,002,821,183.00								4,370,081,093.00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,002,821,183.00							4,370,081,093.00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4,002,821,183.00							4,370,081,093.00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	3,390,085,383.00						100 Persen	3,663,081,093.00	
	2.12.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	-			95 Persen	11,809,300.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	13,400,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2,512,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		3,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,341,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		3,800,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,438,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		2,700,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	3,516,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		3,900,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	-			100 Persen	2,346,130,733.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	2,580,581,093.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bula n	2,333,619,433.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		2,566,981,093.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	3,095,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		3,600,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,646,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		2,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	7,769,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		8,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Disdukcapil yang Difasilitasi Administrasi Kepegawaian	-			100 Persen	6,027,100.00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	7,100,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2,532,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		2,800,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 5.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	3,494,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		4,300,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kesekretariatan yang Disediakan	-			100 Persen	123,532,800.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	128,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,292,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		3,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	122,240,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		125,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			80 Persen	74,158,900.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	60,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	6,279,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	67,879,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		60,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Difasilitasi	-			100 Persen	728,462,550.00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	757,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	74,915,650.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		92,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	13,660,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		15,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	639,886,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		650,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik	-			100 Persen	99,964,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	117,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	53,130,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		54,500,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	20,500,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		22,500,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	26,334,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan elenggaran pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		40,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase identitas kependudukan digital dari total perekaman Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP Elektronik Persentase Penduduk Usia 0-16 Tahun yang memiliki KIA	95 Persen 60 Persen 63,98 Persen			45 Persen 95 Persen 58,98 Persen	225,516,800.00						95 Persen 60 Persen 63,98 Persen	257,000,000.00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Laporan Layanan Pendaftaran Penduduk	-			12 Dokumen	225,516,800.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan elenggaran pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	257,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				12 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan elenggaran pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				12 Dokumen	199,455,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan elenggaran pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		235,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	26,061,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		22,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-			90 Persen	0.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-			80 undefined	0.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	99,96 Perse n 80 Persen			60 Persen 99,78 Persen	50,007,200.00						99,96 Perse n 80 Persen	56,000,000.00	
	2.12.03.2.0 1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Laporan Layanan Akta Kelahiran	-			12 Laporan	50,007,200.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	56,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.0 1.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				12 Dokumen	25,208,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		32,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.0 1.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				23 Layanan	24,798,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		24,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.0 2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Laporan Layanan Buku Pokok Pemakaman	-			12 Laporan	0.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	-	0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.0 2.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				12 Laporan	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.0 2.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				12 Laporan	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.0 3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-			85 Persen	0.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.0 3.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data layanan informasi administrasi kependudukan	98 Persen			98 Persen	318,181,600.00						98 Persen	364,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.0 1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Kependudukan Yang Akurat	-			100 Persen	25,579,300.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	26,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 1.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				12 Dokumen	25,579,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		26,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 1.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				38 Dokumen	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 2	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			100 Persen	20,432,500.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	18,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 2.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				2 Dokumen	20,432,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		18,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.0 3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>persentase Cakupan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	-			95 Persen	272,169,800.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	-	320,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 3.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				12 Laporan	272,169,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		320,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 3.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan</i>				38 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 3.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				12 Laporan	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	-			85 Persen	0.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	-	0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 4.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Profil Kependudukan yang Disajikan	98 Persen			98 Persen	19,030,200.00						98 Persen	30,000,000.00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Ketersediaan Dokumen Informasi data Kependudukan Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	19,030,200.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	30,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	19,030,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		30,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						7,726,318,034.00							8,217,225,000.00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7,726,318,034.00							8,217,225,000.00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						7,726,318,034.00							8,217,225,000.00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	2,538,632,034.00						100 Persen	2,707,225,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	100 Persen			100 Persen	24,292,590.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	SKPD	100 Persen	30,225,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	24,292,590.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	SKPD		30,225,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 Persen			100 Persen	2,132,539,334.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	SKPD	100 Persen	2,243,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2,092,775,242.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	SKPD		2,200,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	16,812,620.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	SKPD		17,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	22,951,472.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	SKPD		26,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 Persen			100 Persen	153,278,640.00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	SKPD	100 Persen	189,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,714,350.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	SKPD		2,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	6,864,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	SKPD		7,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	144,700,290.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	SKPD		180,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa <i>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	98,016,270.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD	100 Persen	110,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	43,586,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		50,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12,210,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		15,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	42,219,870.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATA N TRANSFER	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		45,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik</i>	100 Persen			100 Persen	130,505,200.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD	100 Persen	135,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	118,139,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan kemiskinan Ekstrem	SKPD		120,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12,366,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan kemiskinan Ekstrem	SKPD		15,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	1,4 Persen			1,4 Persen	182,200,000.00						1,4 Persen	195,000,000.00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Pengendalian Lapangan & Pelayanan KB yang diolah untuk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	100 Persen			100 Persen	182,200,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan kemiskinan Ekstrem	Masyarakat	100 Persen	195,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	64,200,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		70,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				2 Dokumen	88,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		90,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.0 2.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				12 Laporan	30,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		35,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	17,85 Persen			17,85 Persen	3,727,886,000.00						17,85 Persen	3,930,000,000.00	
	2.14.03.2.0 1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	100 Persen			100 Persen	976,800,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat	100 Persen	1,020,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 1.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	80,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		85,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 1.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	396,800,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		400,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 1.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				12 Laporan	124,500,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		150,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 1.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	180,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- BOKB-KB	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		185,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 1.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				3 Organisasi	195,500,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		200,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 Persen			100 Persen	1,657,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat	100 Persen	1,750,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 2.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				100 Orang	1,032,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		1,100,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.0 2.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
			<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</i>				1 Organisasi	625,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		650,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 Persen			100 Persen	449,336,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat	100 Persen	455,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 3.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>				2 Laporan	18,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		20,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 3.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>				100 Orang	408,336,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		410,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 3.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				2 Unit	5,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		6,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 3.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	18,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		19,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 Persen			100 Persen	644,750,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat	100 Persen	705,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 4.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	4,420,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		5,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 4.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				1 Unit	420,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		450,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 4.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				5 Kampung	220,330,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan an Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		250,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketahanan Keluarga	90 Persen			90 Persen	1,277,600,000.00						90 Persen	1,385,000,000.00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga yang Dibina	90 Persen			90 Persen	320,000,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan an Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat	90 Persen	375,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				3 Laporan	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan an Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		25,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	300,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan an Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		350,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.0 2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Cakupan Peran Organisasi Masyarakat dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	90 Persen			90 Persen	957,600,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat	90 Persen	1,010,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.0 2.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	456,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		500,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.0 2.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	501,600,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		510,000,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN						8,394,593,665.00							9,089,699,800.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8,394,593,665.00							9,089,699,800.00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						8,394,593,665.00							9,089,699,800.00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Bidang dalam SKPD yang Dilayani Administrasi Perkantoran	100 Persen			100 Persen	3,610,830,365.00						100 Persen	3,830,802,946.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi	90 Persen			90 Persen	32,234,200.00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD	90 Persen	54,734,700.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	16,794,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		31,794,700.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	15,439,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		22,940,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	3,042,807,182.00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD	12 Bulan	3,107,807,182.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bula n	3,012,265,582.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		3,062,265,582.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	30,541,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD		45,541,600.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	144,919,900.00			Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD	12 Bulan	166,312,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1,839,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD		3,450,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4,338,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD		4,120,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	138,742,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	SKPD		158,742,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			80 Persen	32,994,000.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD	90 Persen	116,700,980.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		77,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	32,994,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		39,700,980.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Daerah	100 Persen			100 Persen	85,802,283.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD	100 Persen	106,809,284.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	23,020,583.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		39,020,584.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	62,781,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		67,788,700.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen			80 Persen	272,072,800.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD	100 Persen	278,438,800.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	54,880,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		56,380,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Un it	200,040,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		199,906,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Un it	17,152,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	SKPD		22,152,800.00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang Terpasang dan Dalam Kondisi Baik Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan	90 Persen 100 Persen 250 Angka			250 Angka 90 Persen 85 Persen	4,783,763,300.00						90 Persen 100 Persen 250 Angka	5,258,896,854.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.0 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang Tersedia	85 Persen			80 Persen	3,538,422,100.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat	85 Persen	3,892,264,614.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 2.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				50 Unit	2,855,422,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		3,140,964,614.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 2.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				50 Unit	683,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		751,300,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersediannya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C	95 Persen			90 Persen	182,999,900.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat	95 Persen	201,300,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 3.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				30 Dokumen	182,999,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		201,300,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.0 5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	100 Persen			90 Persen	96,638,400.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat	100 Persen	106,302,240.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 5.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2500 Dokumen	96,638,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		106,302,240.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	80 Persen			80 Persen	936,802,900.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat	80 Persen	1,026,514,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 6.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				800 Laporan	663,815,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		721,380,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 6.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	41,547,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastrukt u r Pembang unan	Masya rakat		50,550,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 6.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				300 Laporan	231,440,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		254,584,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Trayek yang di Awasi	85 Persen			75 Persen	28,900,000.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat	85 Persen	32,516,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				160 Laporan	28,900,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		32,516,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						5,857,390,278.00							6,648,500,000.00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5,857,390,278.00							6,648,500,000.00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						5,797,752,278.00							6,503,500,000.00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	2,533,946,078.00						100 Persen	2,828,500,000.00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD	100 Persen			100 Persen	7,862,900.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	12,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	1,138,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penganggaran pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		2,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1,051,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penganggaran pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	735,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penganggaran pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				6 Laporan	4,937,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penganggaran pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		7,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu</i>	100 Persen			100 Persen	2,204,350,885.00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penganggaran pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	2,370,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2,190,041,585.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		2,350,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	10,573,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		15,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,735,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		5,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 Persen			100 Persen	11,094,800.00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	14,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	9,346,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		11,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	734,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		2,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1,013,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	180,062,300.00			Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	187,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Pa ket	3,004,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		5,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Pa ket	37,103,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		30,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	139,220,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		150,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	734,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	9.540,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	9.540,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	53,333,193.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	72,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,826,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		6,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	22,078,293.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		33,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	25,428,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		33,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 Persen			90 Persen	67,702,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	72,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	59,792,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		60,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	1,830,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		2,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6,080,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		10,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	100 Persen			100 Persen	1,133,820,000.00						100 Persen	1,140,000,000.00	
	2.16.02.2.0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	1,133,820,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	100 Persen	1,140,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.0 1.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				40 Komunitas	12,243,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		30,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.0 1.0017	Pelayanan Informasi Publik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				3 Permohonan	26,139,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat rakyat		100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.0 1.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomendasi	62,122,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat rakyat		60,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.0 1.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				99 Media	785,646,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat rakyat		800,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.0 1.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				120 Konten	247,668,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat rakyat		150,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kematangan SPBE Pada Domain Kebijakan SPBE	2,97 Indeks			2,97 Indeks	2,129,986,200.00						2,97 Indeks	2,535,000,000.00	
	2.16.03.2.0 2	Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	2,129,986,200.00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat rakyat	100 Persen	2,535,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.0 2.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				5 Aplikasi	138,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		150,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.0 2.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	175,999,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		180,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.0 2.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	1,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		5,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.0 2.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	1,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		5,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.0 2.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				3 Aplikasi	2,999,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		5,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.0 2.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				6 unit	34,998,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		40,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.0 2.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				31 Perangkat Daerah	40,997,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.0 2.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				31 Perangkat Daerah	1,734,991,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		2,100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						39,790,200.00							50,000,000.00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 Persen			100 Persen	39,790,200.00						100 Persen	50,000,000.00	
	2.20.02.2.0 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	39,790,200.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.0 1.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	21,620,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		20,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.0 1.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	18,170,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		30,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						19,847,800.00							95,000,000.00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	94 Persen			94 Persen	19,847,800.00						94 Persen	95,000,000.00	
	2.21.02.2.0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	12,789,200.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	65,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.0 1.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	8,689,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		30,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.0 1.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	4,099,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		35,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat	100 Persen			100 Persen	7,058,600.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	30,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				3 Perangkat Daerah	7,058,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		30,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN						4,727,236,347.00							5,369,263,347.00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,332,134,547.00							4,714,263,347.00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						4,332,134,547.00							4,714,263,347.00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	3,225,775,747.00						100 Persen	3,324,263,347.00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD					36,118,300.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD	100 %	50,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen Dokumen	19,893,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		25,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Bulan Laporan	16,225,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		25,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselasaikan tepat waktu					2,746,962,747.00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 %	2,755,723,347.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bula n	2,725,723,347.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		2,725,723,347.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan Dokumen	17,259,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		25,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen Laporan	3,980,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD		5,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor					117,671,900.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD	100 %	157,500,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	945,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD		2,500,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan Dokumen	4,680,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD		5,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	112,046,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD		150,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					13,513,500.00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 %	20,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 U n i t	13,513,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		20,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185,759,300.00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 %	215,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	114,260,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		115,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	71,499,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATA N TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		100,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik					125,750,000.00			Melanjutka n Pengemb angsan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 %	126,040,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 U n i t	53,130,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angsan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		53,130,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	67,910,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angsan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		67,910,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	4,710,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angsan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		5,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
2.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	32 Porsen			32 Porsen	60,000,000.00						32 Porsen	120,000,000.00	
	2.17.04.2.0 1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	90 Unit			30 Un it	60,000,000.00			Melanjutka n Pengemb angsan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Koperasi	30 Un it	120,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.04.2.0 1.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>				30 Koperasi Unit Usaha	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angsan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Koperasi		40,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.0 1.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>				30 Unit Usaha	40,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angsan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Koperasi		80,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</i>	48 Persen			48 Persen	529,255,000.00						48 Persen	600,000,000.00	
	2.17.05.2.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</i>	90 orang			30 orang	529,255,000.00			Melanjutka n Pengemb angsan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Koperasi	30 orang	600,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.0 1.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>				30 Orang	529,255,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- PK2UKM	Melanjutka n Pengemb angsan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Koperasi		600,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
4.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan</i>	1 Persen			1 Persen	489,969,800.00						1 Persen	620,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.0 1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	4 %			1 %	489,969,800.00			Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	UMKM	1 %	620,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.0 1.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				10 Unit Usaha	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	UMKM		0.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.0 1.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				200 Unit Usaha	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	UMKM		60,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.0 1.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				75 Unit Usaha	449,969,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	UMKM		500,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.0 1.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				4 KALI Orang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	UMKM		0.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.0 1.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi</i>				50 UKM Unit Usaha	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	UMKM		60,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.0 1.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>				75 UKM Orang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	UMKM		0.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
5.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<i>Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro</i>	1,10 Persen			1,10 Persen	27,134,000.00						1,10 Persen	50,000,000.00	
	2.17.08.2.0 1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Skala Usahanya</i>				1.10%	27,134,000.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	UMKM	1.10%	50,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.0 1.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan														
			<i>Jumlah yang Difasilitasi</i>				200 UMKM Orang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	UMKM		0.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.0 1.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				100 UMKM Unit Usaha	27,134,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	UMKM		50,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						395,101,800.00							655,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						395,101,800.00							655,000,000.00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perizinan dan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan untuk izin	100 Persen			100 Persen	25,100,900.00						100 Persen	55,000,000.00	
	3.30.02.2.0 1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderen	8 izin			3 izin	0.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masyarakat	3 izin	25,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.0 1.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				3 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masyarakat		25,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.0 1.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik														
			Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				1 laporan	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		0.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.0 2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan TDG	12 Dokumen			4 Dokumen	25,100,900.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Masya rakat	4 Dokumen	30,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.0 2.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				3 Dokumen	25,100,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Masya rakat		30,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	60 Persen			60 Persen	240,000,900.00						60 Persen	300,000,000.00	
	3.30.03.2.0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	3 Unit			1 Unit	240,000,900.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat	1 Unit	300,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.0 1.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		0.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.0 1.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				7 Unit	240,000,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		300,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5 Persen			5 Persen	80,000,000.00						5 Persen	100,000,000.00	
	3.30.04.2.0 1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	26 Bapak			26 Bapak	0.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	26 Bapak	0.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.0 1.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		0.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.0 2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	26 Dokumen			26 Dokumen	80,000,000.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masyarakat	26 Dokumen	100,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.0 2.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				35 Bapak Laporan	80,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masyarakat		100,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.0 3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	- Kg			0 Kg	0.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat	- Kg	0.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.0 3.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				1 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		0.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.0 3.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi															
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				1 Laporan	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		0.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN	
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	15 Persen			15 Persen	0.00						15 Persen	0.00		
	3.30.05.2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang (	1 Kali			1 Kali	0.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat	1 Kali	0.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN	
	3.30.05.2.0 1.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan															
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				2 Pelaku Usaha	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		0.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN	
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	10 Persen			10 Persen	50,000,000.00						10 Persen	200,000,000.00		
	3.30.06.2.0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah total UTTP yang ditera dan di tera ulang	63 Unit			63 Unit	50,000,000.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat	63 Unit	200,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.2.0 1.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang															
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				40 Unit	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masyarakat		200,000,000.00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						5,004,453,400.00								5,424,000,000.00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5,004,453,400.00							5,424,000,000.00		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						5,004,453,400.00							5,424,000,000.00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	3,777,351,600.00						100 Persen	4,104,000,000.00	
	2.18.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	59,519,200.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 Persen	90,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	9,999,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20,949,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		35,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	22,569,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	6,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		10,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen			100 Persen	2,643,504,400.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 Persen	2,740,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bula n	2,570,658,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		2,650,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	9,999,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	12,334,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	25,511,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian barang milik daerah pada perangkat daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen			100 Persen	123,545,900.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 Persen	164,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	108,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		144,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	15,545,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		20,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian kepegawaian pada perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	18,908,900.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 Persen	25,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	18,908,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		25,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 Persen			100 Persen	220,382,300.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 Persen	240,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	13,024,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	21,808,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		25,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	185,550,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		200,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen			100 Persen	47,325,400.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 Persen	85,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	2,221,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		20,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	45,103,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-	SKPD		65,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen			100 Persen	499,035,500.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 Persen	570,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	15,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		20,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	284,035,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		300,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	200,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		250,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100 Persen			100 Persen	159,130,000.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-	SKPD	100 Persen	180,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	55,130,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-	SKPD		60,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	54,600,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		60,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	24,400,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-	SKPD		30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-	SKPD		30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Persentase ketersediaan laporan kinerja daerah	100 Persen			100 Persen	6,000,000.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-	SKPD	100 Persen	10,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.1 3.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	6,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-	SKPD		10,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan pengelolaan potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor	100 Persen			100 Persen	109,999,200.00						100 Persen	140,000,000.00	
	2.18.02.2.0 1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor yang mendapatkan pemberian insentif/fasilitas	10 Invetor			8 Investor	49,999,800.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng	10 Invetor	60,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.0 1.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	24,999,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.0 1.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.0 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase wilayah Kabupaten Bantaeng yang telah disusun kedalam peta potensi investasi	100 Persen			100 Persen	59,999,400.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	80,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.0 2.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	24,999,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.0 2.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	34,999,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		50,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase pelaksanaan kegiatan promosi	100 Persen			100 Persen	280,000,000.00						100 Persen	300,000,000.00	
	2.18.03.2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi yang terlaksana	7 Kegiatan			7 Kegiatan	280,000,000.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng	7 Kegiatan	300,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.0 1.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				7 Dokumen	280,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		300,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai SOP	85 Persen			85 Persen	373,999,900.00						85 Persen	380,000,000.00	
	2.18.04.2.0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Jumlah Izin yang diterbitkan sesuai SOP Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	2500 izin dan non izin			100 Indeks 2500 Izin 2500 Izin	373,999,900.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng	2500 izin dan non izin	380,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.0 1.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2300 Pelaku Usaha	344,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		350,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.0 1.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	29,999,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal</i>	25 Persen			25 Persen	433,102,700.00						25 Persen	470,000,000.00	
	2.18.05.2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM</i>	50 Perusaha an			48 Perusahaa n	433,102,700.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng	50 Perusaha an	470,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.0 1.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				7 Kegiatan Usaha.	12,256,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		20,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.0 1.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				100 Pelaku Usaha	151,196,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		170,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.0 1.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				12 Kegiatan Usaha	269,649,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		280,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Cakupan Jumlah Izin yg diterbitkan Persentase ketersediaan data dan informasi yang valid</i>	100 Persen			100 Persen	30,000,000.00						100 Persen	30,000,000.00	
	2.18.06.2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Perizinan Berusaha</i>	100 Persen			100 Persen	30,000,000.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.0 1.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	30,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Kabupaten Bantaeng		30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						2,890,665,512.00							10,555,994,600.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,890,665,512.00							10,555,994,600.00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						2,890,665,512.00							10,555,994,600.00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	2,272,796,674.00						100 Persen	3,075,994,600.00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokuman	50,734,200.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	-	78,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	19,376,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		30,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	13,613,700.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		23,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	17,743,700.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Bonto Atu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		25,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-			100 Persen	1,914,189,274.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	-	2,057,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1,875,067,974.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Bonto Atu	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		2,000,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	13,452,600.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Bonto Atu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		15,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11,941,500.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Bonto Atu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		22,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	13,727,200.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		20,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Kantor yang dapat dipenuhi / dilaksanakan	-			95 Persen	155,314,600.00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	-	195,494,600.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,923,100.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Bonto Atu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		10,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6,240,000.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Bonto Atu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		7,200,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	121,192,000.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Bonto Atu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		150,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	23,959,500.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Bonto Atu	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		28,294,600.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			5 Unit	27,027,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	-	270,500,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				4 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Bonto Atu	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		166,500,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	27,027,000.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Bonto Atu	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		104,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dipenuhi/dilaksanakan</i>	-			90 Persen	65,113,600.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	-	105,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	21,953,600.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Bonto Atu	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		30,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	43,160,000.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Bonto Atu	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		75,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	-			8 Unit	60,418,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	-	370,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	52,288,000.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Bonto Atu	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		65,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	3,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Bonto Atu	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		5,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5,130,000.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Bonto Atu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		300,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan kapasitas pemuda dalam bidang organisasi dan kewirausahaan yang terpenuhi	100 Persen			100 Persen	185,000,000.00						100 Persen	2,180,000,000.00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda kader dan Pemuda Pelopor	-			50 Orang	85,000,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat	-	1,700,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				500 Orang	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		300,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				500 Orang	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		500,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	10,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		300,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.0 1.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				100 Orang	10,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		300,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.0 1.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				5 Orang	15,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		300,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.0 2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	-			35 Orang	100,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat	-	480,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.0 2.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				5 Organisasi	100,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Bonto Atu	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masya rakat		180,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.0 2.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				10 Orang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		300,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	100 Persen			100 Persen	427,035,400.00						100 Persen	3,000,000,000.00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan, Pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga pendidikan dan prestasi yang memadai dan memenuhi standar	-			5 Unit	303,043,700.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		700,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				5 Unit	303,043,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		700,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan atlet dan pelatih di daerah pada berbagai event olahraga	-			100 Persen	123,991,700.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat	-	1,000,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		700,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.0 2.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				20 Orang	123,991,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		300,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.0 3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet berbakat yang dihasilkan dari berbagai event	-			30 Orang	0.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat	-	300,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.0 3.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				20 Orang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		300,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.0 4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Organisasi Olahraga Jumlah atlet yang mengikuti berbagai Kejuaraan	-			30 Orang	0.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat	-	1,000,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.0 4.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		1,000,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepramukaan	4 Kegiatan			4 Kegiatan	5,833,438.00						4 Kegiatan	2,300,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	-			4 Kegiatan	5,833,438.00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat	-	2,300,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.0 1.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Orang	5,833,438.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		2,000,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.0 1.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan														
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		300,000,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						2,624,755,185.00								
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,624,755,185.00							60,000,000.00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						2,524,763,285.00							60,000,000.00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	2,399,763,285.00						100 Persen	20,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD</i>	90 Persen			85 Persen	27,999,900.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	90 Persen	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				12 Bulan Laporan	27,999,900.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PAJAK DAERAH	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu</i>	90 Persen			85 Persen	2,018,839,684.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	90 Persen	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 BULAN Orang/bula n	1,993,839,984.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Bulan Dokumen	24,999,700.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PAJAK DAERAH	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrtasi Umum Kantor	90 Persen			85 Persen	156,632,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	90 Persen	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan Laporan	7,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PAJAK DAERAH	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100% Laporan	149,632,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen			85 Persen	0.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	90 Persen	20,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		20,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen			90 Persen	83,061,701.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	-	95 Persen	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	31,247,801.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	-		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	51,813,900.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	-		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	95 Persen			90 Persen	113,230,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	95 Persen	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	103,400,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan Unit	9,830,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	88 Persen			88 Persen	125,000,000.00						88 Persen	40,000,000.00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibangun Terlaksananya Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	90 Persen 90 Persen			88 Persen YA 88 Persen	125,000,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat	90 Persen 90 Persen	40,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				1 Perpustakaan	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				1 Layanan	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		40,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Orang	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.0 1.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				400 Eksamplar Eksemplar	21,200,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.0 1.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				90 Layanan Perpustaka a n	53,800,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.0 2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Jumlah Sosialisasi budaya Baca dan Literasi yang di Laksanakan	1 kali YA YA/TIDA K			YA YA/TIDAK 1 kali	0.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	1 kali YA YATIDA K	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.0 2.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				7 Orang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.0 2.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustaka an	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.0 2.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				24 Orang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						99,991,900.00							0.00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	90 Persen			90 Persen	99,991,900.00						90 Persen	0.00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian pengelolaan arsip dinamis	75 Persen			79 Persen	55,000,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	75 Persen	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis														
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis				12 BULAN Unit	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan				12 BULAN Laporan	10,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.0 3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	75 Persen			70 Persen	44,991,900.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	75 Persen	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.0 3.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				12 BULAN Pengguna	44,991,900.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN						3,927,023,174.00							4,499,197,500.00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3,927,023,174.00							4,499,197,500.00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						3,927,023,174.00							4,499,197,500.00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	3,014,091,474.00						100 Persen	3,564,197,500.00	
	3.25.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			100 Persen	20,223,700.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD	-	145,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		40,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		25,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		25,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		25,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	20,223,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		30,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	-			100 Persen	2,648,771,474.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD	-	2,750,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	2,635,163,274.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Penguatan an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		2,650,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Penguatan an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		40,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Penguatan an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		30,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	13,608,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Penguatan an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		30,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian BMD pada Perangkat Daerah yang sesuai Peraturan Perundangundangan	-			100 Persen	8,715,500.00			Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Penguatan an Kemiskinan Ekstrem	SKPD	-	25,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8,715,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Penguatan an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		25,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	-			100 Persen	106,997,000.00			Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Penguatan an Kemiskinan Ekstrem	SKPD	-	365,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Pa ket	1,665,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		25,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Pa ket	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		25,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		15,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	103,332,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		300,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	127,730,800.00			Memperkua t Penyelara san kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD	-	169,197,500.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		25,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	64,570,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		79,197,500.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	63,160,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		65,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik	-			100 Persen	101,653,000.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD	-	110,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	95,513,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		85,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	6,140,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	SKPD		25,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	6662 Ton			6662 Ton	409,334,800.00						6662 Ton	275,000,000.00	
	3.25.03.2.0 1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-			100 Persen	36,685,800.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat	-	160,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.03.2.0 1.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	36,685,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		100,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.03.2.0 1.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				20 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		30,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.03.2.0 1.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				10 Un it	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		30,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.03.2.0 2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan	-			120 Kelompok	322,249,000.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat	-	55,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.03.2.0 2.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				400 Orang	322,249,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		30,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.03.2.0 2.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				50 Unit Usaha	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		25,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.03.2.0 3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pengelolaan UPTD TPI	-			2 Unit	50,400,000.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat	-	60,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.0 3.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				2 Layanan	50,400,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		60,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan Budidaya	98085 Ton			98085 Ton	451,054,100.00						98085 Ton	610,000,000.00	
	3.25.04.2.0 2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang diberdayakan	-			1500 Kelompok	304,142,100.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat	-	380,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.04.2.0 2.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				20 Kelompok	292,327,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		300,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.04.2.0 2.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahnya				30 Kelompok	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		30,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.04.2.0 2.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				3 Kelompok	11,815,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		50,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.04.2.0 4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pengelolaan pembudidayaan ikan	-			100 Persen	146,912,000.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat	-	230,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.04.2.0 4.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		30,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.04.2.0 4.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Un it	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		30,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.04.2.0 4.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30 Un it	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		30,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.04.2.0 4.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				30 Unit	146,912,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat		140,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Perikanan	27,39 Ton			27,39 Ton	52,542,800.00						27,39 Ton	50,000,000.00	
	3.25.06.2.0 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah POKLAHSAR yang dibina	-			5 Kelompok	52,542,800.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masya rakat	-	50,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	3.25.06.2.0 2.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				30 Unit Usaha	52,542,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Akselerasi Pengentas an Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat		50,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PARIWISATA						3,952,836,604.00							4,113,000,000.00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3,952,836,604.00							4,113,000,000.00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						3,952,836,604.00							4,113,000,000.00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	2,862,614,074.00						100 Persen	2,970,000,000.00	
	3.26.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	19,589,500.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 persen	24,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5,853,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		7,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	9,642,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		11,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4,093,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		6,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 persen			100 persen	2,215,953,274.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 persen	2,265,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bula n	2,162,235,574.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		2,200,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	50,243,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		60,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,473,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		5,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian barang milik daerah pada perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 persen			100 persen	3,160,800.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 persen	4,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,160,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		4,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 persen			100 persen	107,751,700.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 persen	118,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,039,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		4,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12,912,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		14,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	91,800,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		100,000,000.00	DINAS PARIWISATA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen			100 persen	15,028,400.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 persen	16,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15,028,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		16,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen			100 persen	401,434,400.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 persen	430,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	371,116,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		390,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	30,317,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		40,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100 persen			100 persen	99,696,000.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD	100 persen	113,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	53,130,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		60,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	27,426,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		30,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	4,760,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		6,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9,500,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		11,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4,880,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	SKPD		6,000,000.00	DINAS PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata yang memiliki Fasilitas standar pariwisata	48 Persen			48 Persen	895,425,000.00						48 Persen	908,000,000.00	
	3.26.02.2.0 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah	52 objek wisata			51 objek wisata	895,425,000.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Objek Wisata	52 objek wisata	908,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.0 3.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				220 Unit	792,184,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Objek Wisata		800,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.0 3.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	96,944,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Objek Wisata		100,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.0 3.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	6,295,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Objek Wisata		8,000,000.00	DINAS PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara	37 Persen			37 Persen	106,744,630.00						37 Persen	125,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Angka Kunjungan Wisatawan Nusantara	666022 oran g			482625 orang	106,744,630.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masyarakat	666022 oran g	125,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.0 1.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	23,587,930.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masyarakat		30,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.0 1.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	25,741,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		30,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.0 1.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	39,590,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		45,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.0 1.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	17,824,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		20,000,000.00	DINAS PARIWISATA
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata yang dikembangkan	79 Persen			79 Persen	88,052,900.00						79 Persen	110,000,000.00	
	3.26.05.2.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sumber daya pariwisata yang dilatih	450 orang			400 orang	88,052,900.00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat	450 orang	110,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.0 1.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				2 Laporan	27,384,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		30,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.0 1.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				8 Orang	60,668,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	Masyarakat		80,000,000.00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN						12,978,753,856.00							90,000,000.00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						12,978,753,856.00							90,000,000.00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						12,978,753,856.00							90,000,000.00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80 Persen			80 Persen	11,885,533,856.00						80 Persen	90,000,000.00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD	85 Persen			90 Persen	100,000,000.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD	85 Persen	90,000,000.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen Dokumen	80,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD		60,000,000.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	20,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD		30,000,000.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	85 Persen			83 Persen	11,351,834,256.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD	85 Persen	0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				127 Orang/bulan	11,306,834,256.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	45,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	85 Persen			80 Persen	5,000,000.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD	85 Persen	0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	5,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	85 Persen			80 Persen	160,650,000.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD	85 Persen	0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10,650,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	150,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	218,049,600.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD	100 Persen	0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	132,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	86,049,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	30 Persen			30 Persen	50,000,000.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD	30 Persen	0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	SKPD		0.00	DINAS PERTANIAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	5 Persen			5 Persen	200,100,000.00						5 Persen	0.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	85 Persen			80 Persen	100,050,000.00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masyarakat	85 Persen	0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.0 1.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				3 Laporan	50,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masyarakat		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.0 1.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				5 Ton	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.0 1.0015	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				1 Ton	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.0 2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase sarana produksi pertanian yang mendukung peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang tersedia	5 Persen			5 Persen	50,050,000.00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat	5 Persen	0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.0 2.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	50,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.0 2.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	Masyarakat		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan dan Peningkatan Mutu /Peredaran Benih / Bibit Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,5 Persen			3,4 Persen	50,000,000.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	Masyarakat	3,5 Persen	0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				12 Laporan	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Baruga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	Masyarakat		0.00	DINAS PERTANIAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kontribusi sektor Sarana Prasarana pertanian/perkebunan terhadap PDRB	5 Persen			5 Persen	362,120,000.00						5 Persen	0.00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	85 Persen			80 Persen	241,920,000.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	Masyarakat	85 Persen	0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2 Laporan	50,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	Masyarakat		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan				2 Ha	62,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	Masyarakat		0.00	DINAS PERTANIAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.0 1.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan														
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				2 Unit	179,870,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	Masyarakat		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.0 2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Presentase prasarana pertanian yang memadai	5 Persen			4 Persen	200,000.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat	5 Persen	0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.0 2.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian														
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	50,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.0 2.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	50,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.0 2.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	50,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.0 2.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	50,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan	Masyarakat		0.00	DINAS PERTANIAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.0 3	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Melalui IB	10 Persen			8 Persen	120,000,000.00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat	10 Persen	0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.0 3.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak														
			Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				4 Laporan	120,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		0.00	DINAS PERTANIAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	3,87 Persen			3,87 Persen	107,000,000.00						3,87 Persen	0.00	
	3.27.04.2.0 1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan hewan	85 Persen			83 Persen	50,000,000.00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat	85 Persen	0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.0 1.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				2 Laporan	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.0 3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			80 Persen	57,000,000.00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transforma si Ekonomi	Masya rakat	-	0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.0 3.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				4 Laporan	57,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	Masyarakat		0.00	DINAS PERTANIAN
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	75 Persen			75 Persen	50,000,000.00						75 Persen	0.00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Presentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	50 Persen			40 Persen	50,000,000.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	Masyarakat	50 Persen	0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				3000 Ha	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	Masyarakat		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				2 Laporan	25,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	Masyarakat		0.00	DINAS PERTANIAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kontribusi subsektor penyuluhan terhadap peningkatan produktivitas pertanian (Dengan Satuan:Persen)	70 Persen			70 Persen	374,000,000.00						70 Persen	0.00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kontribusi subsektor penyuluhan terhadap peningkatan produktivitas pertanian	75 Persen			70 Persen	374,000,000.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	Masyarakat	75 Persen	0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Unit	324,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Sosial, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	Masyarakat rakyat		0.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.0 1.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Unit	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Sosial, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Perwujudan Transformasi Ekonomi	Masyarakat rakyat		0.00	DINAS PERTANIAN
		SEKRETARIAT DAERAH						37,761,512,004.00							41,197,000,000.00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						37,761,512,004.00							41,197,000,000.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						37,761,512,004.00							41,197,000,000.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Penunjang Urusan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	32,523,324,254.00						100 Persen	35,535,000,000.00	
	4.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen			98 Persen	564,408,100.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	99 Persen	600,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	104,435,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		110,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	117,633,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		120,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	63,086,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		70,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	40,785,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		50,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	238,466,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		250,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	98 Persen			96 Persen	9,646,159,058.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-	98 Persen	9,820,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/bulan	9,451,456,358.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-		9,600,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	160,428,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-		180,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	34,274,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-		40,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	95 Persen			95 Persen	145,000,000.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-	95 Persen	160,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	145,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-		160,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Kepegawaian pada Perangkat Daerah	98 Persen			96 Persen	91,608,600.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	98 Persen	110,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	44,950,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		60,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 5.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	46,658,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		50,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	97 Persen			95 Persen	8,325,036,400.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	97 Persen	8,670,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	154,936,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		170,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4,913,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		5,100,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	3,257,100,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		3,400,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen			94 Persen	48,000.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	95 Persen	1,700,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	12,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		700,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	12,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		700,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	12,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		200,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	12,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		100,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	7,535,328,652.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	7,720,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5,909,911,452.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		6,000,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	304,422,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		320,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,320,995,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,400,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	82 Persen			82 Persen	1,802,613,000.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	82 Persen	1,915,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	521,089,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		600,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	1,093,884,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,100,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	87,700,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		95,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	99,940,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		120,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	98 Persen			98 Persen	897,564,744.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	98 Persen	1,050,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 1.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bula n	162,564,744.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		180,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 1.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Pa ket	100,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		120,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 1.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Or an g	35,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		50,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 1.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Or ang/Bula n	600,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		700,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 2	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<i>Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan</i>	100 Persen			98 Persen	2,508,900,000.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	99 Persen	2,700,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 2.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				1 Paket	1,608,900,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,700,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 2.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				1 Paket	900,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,000,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 3	Penataan Organisasi	<i>Tingkat Capaian Pelaksanaan Penataan Organisasi</i>	98 Persen			96 Persen	339,999,700.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	98 Persen	370,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 3.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>				1 Dokumen	129,999,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		130,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 3.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				12 Laporan	54,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		50,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 3.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	80,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		90,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 3.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	75,999,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		90,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 4	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat Capaian Pelaksanaan Kegiatan Protokol Pemda	100 Persen			100 Persen	666,658,000.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	720,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 4.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	455,950,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		500,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 4.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	210,708,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		220,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tata Pemerintahan	98 Persen			98 Persen	4,471,189,750.00						98 Persen	4,855,000,000.00	
	4.01.02.2.0 1	Administrasi Tata Pemerintahan	Tingkat Capaian Administrasi Tata Pemerintahan	98 persen			96 persen	72,772,600.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	98 persen	105,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.0 1.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	32,819,800.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		35,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.0 1.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	39,952,800.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		50,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.0 1.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		20,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.0 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	95 persen			94 persen	3,640,981,600.00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	95 persen	3,860,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.0 2.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	2,551,740,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		2,700,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.0 2.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		60,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.0 2.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1,039,240,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		1,100,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.0 3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Hukum yang Difasilitasi	98 persen			93 persen	730,097,750.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	94 persen	860,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.0 3.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				40 Dokumen	117,731,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		130,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.0 3.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				10 Kasus	499,666,750.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		600,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.0 3.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen	112,700,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		130,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.0 4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti	3 Dokumen			3 Dokumen	27,337,800.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	3 Dokumen	30,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.0 4.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	27,337,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		30,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Perekonomian, Pembangunan dan Pengelolaan Barang dan Jasa	96 Persen			96 Persen	766,998,000.00						96 Persen	807,000,000.00	
	4.01.03.2.0 1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	95 Persen			93 Persen	129,999,100.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	94 Persen	150,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.0 1.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	49,999,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		60,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.0 1.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				12 Laporan	39,999,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		40,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.0 1.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	39,999,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		50,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.0 2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tingkat Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	95 Persen			94 Persen	139,999,500.00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	95 Persen	152,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.0 2.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	34,076,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		37,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.0 2.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	40,935,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		45,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.0 2.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	64,987,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		70,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.0 3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	95 Persen			95 Persen	377,000,100.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	95 Persen	385,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.0 3.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	159,347,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		160,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.0 3.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	128,954,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		135,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.0 3.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				30 Orang	88,698,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		90,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.0 4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Terkaid Kebijakan Sumber Daya Alam	95 Persen			94 Persen	119,999,300.00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	95 Persen	120,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.0 4.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	29,999,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		35,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.0 4.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	49,999,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		40,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.01.03.2.0 4.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	39,999,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapn an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		45,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH	
		SEKRETARIAT DPRD							23,497,896,085.00							29,375,366,444.00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						23,497,896,085.00							29,375,366,444.00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						23,497,896,085.00							29,375,366,444.00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan layanan kesejahteraan Anggota Dewan	100 Persen			100 Persen	14,429,750,085.00						100 Persen	18,575,768,964.00		
	4.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD	100 Persen			100 Persen	125,138,400.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	100 Persen	130,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Laporan Dokumen	59,590,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		60,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan Laporan	65,547,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		70,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	1,936,126,386.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	1,940,768,964.00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan Orang/bulan	1,858,427,486.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,859,268,964.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	61,927,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		62,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6,039,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		7,500,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Dokumen Laporan	9,731,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		12,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi Kepegawaian	100 Persen			95 Persen	60,210,000.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	65,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				9 Orang	60,210,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		65,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 Persen			95 Persen	235,100,200.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	275,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	23,720,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		30,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	21,138,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		25,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	140,832,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		145,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	49,410,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		75,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 Persen			95 Persen	99,938,200.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	250,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				30 Unit	55,741,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		200,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				30 Unit	44,197,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		50,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	90 Persen			85 Persen	288,684,000.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	90 Persen	330,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	122,484,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		130,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	166,200,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		200,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah dalam kondisi baik	100 Persen			90 Persen	315,238,000.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-	100 Persen	670,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	256,148,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-		270,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29,450,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-		200,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29,640,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	-		200,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.1 5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen			95 Persen	11,369,314,899.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	DPRD DAN SKPD	100 Persen	14,915,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.1 5.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bula n	11,133,742,899.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	DPRD DAN SKPD		14,500,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.1 5.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				30 Paket	201,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	DPRD DAN SKPD		250,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.1 5.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	34,572,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	DPRD DAN SKPD		165,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Persentase tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Persentase muatan integrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100 Persen 100 Persen 15 Dokumen			5 Dokumen 92 Persen 100 Persen	9,068,146,000.00						100 Persen 100 Persen 5 Dokumen	10,799,597,480.00	
	4.02.02.2.0 1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase program legislasi daerah yang ditetapkan	100 Persen			95 Persen	1,822,324,500.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 Persen	1,912,397,480.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 1.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	1,822,324,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		1,912,397,480.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 Persen			95 Persen	867,894,000.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 Persen	892,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 3.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	425,938,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		456,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 3.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	441,956,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		436,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Rencana Kerja DPRD yang terealisasi	100 Persen			90 Persen	1,246,650,200.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 Persen	1,300,200,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 4.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	740,592,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		745,200,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 4.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	184,419,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		185,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 4.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	68,803,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		70,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 4.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Laporan Dokumen	252,835,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		300,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.02.02.2.0 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pokok-Pokok pikiran DPRD yang terakomodir dalam APBD	100 Persen			85 Persen	1,321,442,400.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	100 Persen	1,495,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.0 5.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Bulan Laporan	38,400,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		45,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.0 5.0003	Pelaksanaan Reses															
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	1,283,042,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		1,450,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.0 8	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas DPRD yang difasilitasi	100 Persen			93 Persen	3,809,834,900.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	100 Persen	5,200,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.0 8.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				2 Laporan Dokumen	1,653,366,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		2,700,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.0 8.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				2 Laporan Dokumen	2,156,468,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		2,500,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						5,564,646,823.00								5,534,500,000.00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						5,564,646,823.00							5,534,500,000.00		
	5.01	PERENCANAAN						5,207,069,923.00							5,274,500,000.00		
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	3,342,946,623.00						100 Persen	3,375,500,000.00		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD	100 Persen			100 Persen	60,001,367.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	64,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			0				0 0	23,001,567.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		25,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			0				0 0	20,000,000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		22,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			0				0 0	16,999,800.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		17,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen			100 Persen	2,440,475,620.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	2,535,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				0 0	2,408,343,320.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		2,500,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			0				0 0	32,132,300.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		35,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen			100 Persen	19,999,600.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	24,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	9,999,900.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		12,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			0				0 0	9,999,700.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		12,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 Persen			100 Persen	238,718,300.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	252,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			0				0 0	9,992,300.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		15,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			0				0 0	15,000,000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		17,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			0				0 0	213,726,000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		220,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	103,995,500.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	85,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			0				0 0	103,995,500.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		85,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	388,543,736.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	310,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			0				0 0	188,537,236.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		100,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			0				0 0	200,006,500.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		210,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 Persen			100 Persen	91,212,500.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	105,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			0				0 0	48,120,000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		50,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			0				0 0	18,000,000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		25,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			0				0 0	25,092,500.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		30,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah tepat waktu	100 Persen			100 Persen	1,464,224,300.00						100 Persen	1,498,000,000.00	
	5.01.02.2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Penyusunan dan pendanaan yang disusun tepat waktu	100 Persen			100 Persen	1,222,224,300.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	1,248,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.0 1.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	56,487,300.00	-	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		65,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.0 1.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			0				0 0	29,737,500.00	-	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		30,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.0 1.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			0				0 0	215,999,900.00	-	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		220,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.0 1.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			0				0 0	19,999,700.00	-	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		23,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.0 1.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			0				0 0	899,999,900.00	-	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		910,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.0 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen			100 Persen	110,000,000.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	115,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.0 2.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			0				0 0	110,000,000.00	-	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		115,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.0 3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Pengendalian ,evaluasi dan Pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundangan	100 Persen			100 Persen	132,000,000.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	135,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.0 3.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	132,000,000.00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeledupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		135,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	399,899,000.00						100 Persen	401,000,000.00	
	5.01.03.2.0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Dokumen perencanaan Perangkat daerah dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen			100 Persen	90,001,300.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeledupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	97,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.0 1.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	32,662,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeledupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		33,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.0 1.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	25,353,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeledupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		32,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.0 1.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	31,985,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeledupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		32,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian Dokumen perencanaan perangkat daerah dengan RPJMD bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen			100 Persen	129,999,100.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeledupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	119,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.0 2.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	29,441,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeledupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		28,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.0 2.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	16,076,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		22,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.0 2.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	10,348,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		13,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.0 2.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	24,132,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		23,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.0 2.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	49,999,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		32,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase kesesuaian Dokumen perencanaan dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Wilayah	100 Persen			100 Persen	179,898,600.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	185,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.0 3.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	28,428,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		25,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.0 3.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	43,150,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		48,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.0 3.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	30,857,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		25,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.0 3.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	31,807,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		25,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.0 3.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	45,654,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		62,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						357,576,900.00							260,000,000.00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan hasil Kelitbangan	100 Persen			100 Persen	357,576,900.00						100 Persen	260,000,000.00	
	5.05.02.2.0 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan	100 Persen			100 Persen	173,576,900.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	55,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.0 2.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	173,576,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		55,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.0 3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan	100 Persen			100 Persen	50,000,000.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	55,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.0 3.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		55,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.0 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah	100 Persen			100 Persen	134,000,000.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	150,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.0 4.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	134,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		150,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH						121,844,127,412.00							153,383,093,544.00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						121,844,127,412.00							153,383,093,544.00	
	5.02	KEUANGAN						121,844,127,412.00							153,383,093,544.00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	16,305,591,581.00						100 Persen	17,976,237,330.00	
	5.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	100 Persen			100 Persen	424,357,644.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	347,994,680.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	68,500,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		75,350,000.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	65,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		71,500,000.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	61,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		67,100,000.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	75,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		55,000,000.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	82,998,844.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	71,858,800.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		79,044,680.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu</i>	100 Persen			100 Persen	14,657,122,137.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	16,106,195,090.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				0 Orang/bulan	14,481,995,537.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		15,930,195,090.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	98,165,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		110,000,000.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				5 Laporan	76,961,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	SKPD		66,000,000.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor</i>	100 Persen			100 Persen	702,570,000.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	778,800,000.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		8,800,000.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	702,570,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		770,000,000.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	205,591,400.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	275,000,000.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	205,591,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		275,000,000.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	216,590,400.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	303,590,760.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	72,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		79,641,320.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	144,590,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		223,949,440.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100 Persen			100 Persen	99,360,000.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	164,656,800.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	99,360,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		115,156,800.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		49,500,000.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menyampaikan Keuangan tepat waktu	100 Persen			100 Persen	100,195,347,600.00						100 Persen	129,513,513,600.00	
	5.02.02.2.0 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 Persen			100 Persen	1,569,699,800.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	1,726,669,780.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	84,236,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		93,986,750.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	83,666,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		92,125,550.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	63,557,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		66,159,830.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	60,208,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		66,191,180.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	98,632,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		87,150,800.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	156,137,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		164,101,080.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.0 1.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				5 Dokumen	487,897,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		536,895,590.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	345,716,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		416,008,670.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	50,307,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		51,835,630.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	51,186,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		55,985,820.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	54,538,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		60,343,030.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	33,616,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		35,885,850.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rasdio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	100 Persen			100 Persen	734,561,000.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	877,008,850.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				2 Dokumen	75,927,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		165,014,850.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				2 Laporan	47,424,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		47,274,700.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	31,628,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		34,360,480.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				3 Dokumen	61,095,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		66,771,100.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				2 Dokumen	39,568,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		41,382,520.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				4 Laporan	64,319,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		68,706,000.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	56,743,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		61,686,900.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	95,451,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		104,996,650.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	53,422,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		58,924,250.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	208,979,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		227,891,400.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen			100 Persen	1,637,768,300.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	2,489,576,580.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	215,213,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		236,735,070.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			-				-	49,230,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		54,153,000.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	98,672,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		108,539,750.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 3.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				39 Laporan	444,635,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		774,692,050.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 3.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				39 Dokumen	529,210,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		992,998,750.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 3.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	126,729,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kabupaten Bantaeng		139,402,780.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 3.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	7,672,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 3.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	82,176,400.00	-	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kabupaten Bantaeng		90,403,500.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 3.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				60 Orang	84,228,500.00	-	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kabupaten Bantaeng		92,651,680.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.0 4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Dana Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan Dana Bagi Hasil	100 Persen			100 Persen	95,799,324,800.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	123,880,299,500.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 4.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	92,271,779,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		120,000,000,000.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 4.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	3,000,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		3,300,000,000.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 4.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	527,545,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		580,299,500.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 Persen			100 Persen	453,993,700.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	539,958,890.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 5.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				3 Dokumen	181,303,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		240,000,000.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 5.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				80 Orang	272,689,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		299,958,890.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang di kelola oleh Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	1,038,518,200.00						100 Persen	1,267,127,730.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.0 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	100 Persen			100 Persen	1,038,518,200.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	1,267,127,730.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	268,260,900.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		302,821,530.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	41,496,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		44,000,770.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			0				5 0	96,958,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		138,294,750.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	125,876,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		147,547,070.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	94,045,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		143,520,850.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	101,297,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		123,122,780.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	138,922,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		155,019,810.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.0 1.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	101,410,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		126,443,900.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	70,250,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		86,356,270.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kredibitas penerimaan pendapatan dan perencanaan awal	100 Persen			100 Persen	4,304,670,031.00						100 Persen	4,626,214,884.00	
	5.02.04.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentse Penerimaan Pendapataan Daerah	100 Persen			100 Persen	4,304,670,031.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	4,626,214,884.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	122,039,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		137,577,110.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				2 Laporan	1,222,578,298.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		1,544,574,621.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				100 Obyek Pajak	835,734,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		1,848,517,272.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		56,768,690.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		78,173,095.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		74,478,470.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	2,124,318,733.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		886,125,626.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							4,652,619,142.00							0.00
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						4,652,619,142.00							0.00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						3,204,168,942.00							0.00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90 Persen			90 Persen	2,547,644,342.00						90 Persen	0.00	
	5.03.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100 %			100 Persen	42,876,100.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 %	0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	18,217,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	9,614,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	15,044,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu				100 Persen	1,968,279,362.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 %	0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bula n	1,933,564,262.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	25,562,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9,152,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				90 Persen	58,416,000.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 %	0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	58,416,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	90 %			90 Persen	156,358,100.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	90 %	0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,186,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	149,172,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %			90 Persen	41,901,500.00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	95 %	0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	30,087,800.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	11,813,700.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lembang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %			90 Persen	198,653,200.00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	95 %	0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	70,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lembang	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	128,653,200.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lamalaka	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	90 %			90 Persen	81,160,080.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	90 %	0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	44,830,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	11,330,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	25,000,080.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian daerah</i>	90 Persen			90 Persen	656,524,600.00						90 Persen	0.00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<i>Persentase pelaksanaan pengadaan, fasilitasi pensiun dan layanan informasi kepegawaian</i>	95 %			90 Persen	204,999,680.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	95 %	0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>				2 Dokumen	74,999,580.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>				2 Dokumen	40,000,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				2 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.0 1.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	40,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaanmutasi dan promosi ASN	90 %			90 Persen	145,000,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	90 %	0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	45,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 3	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kompetensi ASN yang dikembangkan	7 Orang			50 Orang	153,835,000.00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	7 Orang	0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 3.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	153,835,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	90 %			90 Persen	152,689,920.00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	90 %	0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	52,689,920.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				30 Orang	22,986,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				2 Dokumen	22,536,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				350 Orang	22,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				2 Laporan	32,477,700.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1,448,450,200.00							0.00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Sumber Daya Manusia	80 Persen			80 Persen	1,448,450,200.00						80 Persen	0.00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pelaksanaan kegiatan sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	95 %			90 Persen	1,448,450,200.00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	95 %	0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				1 Dokumen	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1,448,450,200.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH							10,725,060,102.00						0.00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						10,725,060,102.00							0.00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						10,725,060,102.00							0.00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen			95 Persen	5,787,457,702.00						95 Persen	0.00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD	100 Persen			100 Persen	55,000,000.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan			6 Laporan	55,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	7 Laporan	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	97 Persen			94 Persen	3,888,583,254.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	97 Persen	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan			40 Orang/bulan	3,818,583,254.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	45 Orang/bulan	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen			45 Dokumen	55,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	50 Dokumen	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	6 Laporan			4 Laporan	15,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	6 Laporan	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Kepegawaian pada Perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	496,219,748.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket			10 Paket	35,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	45 Paket	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18 Dokumen			12 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	18 Dokumen	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang			38 Orang	379,917,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	45 Orang	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang			55 Orang	66,302,548.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	45 Orang	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 Persen			100 Persen	423,189,700.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	12,011,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	25,594,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan			12 Laporan	64,980,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	20 Laporan	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan			95 Laporan	320,604,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	125 Laporan	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			85 Persen	568,947,600.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			-				-	419,033,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	50,020,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit			15 Unit	99,894,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	15 Unit	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	198,947,400.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	97,860,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	101,087,400.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 Persen			100 Persen	156,570,000.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	130,370,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	15,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11,200,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	88 Persen			88 Persen	4,018,479,000.00						88 Persen	0.00	
	6.01.02.2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pesentase laporan pengawasan internal yang selesai di buat	100 Persen 90 Persen 100 Persen			80 Persen	3,004,646,200.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen 90 Persen 100 Persen	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.0 1.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan			4 Laporan	35,208,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.0 1.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan			40 Laporan	942,507,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	1 Laporan	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.0 1.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	19,896,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.0 1.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan			1 Laporan	19,950,600.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	1 Laporan	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.0 1.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	46 Laporan			46 Laporan	949,439,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	46 Laporan	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.0 1.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan			2 Kesepakatan	481,734,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	3 Kesepakatan	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.0 1.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen			4 Dokumen	555,910,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	4 Dokumen	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yg selesai di buat	90 Persen 97 Persen			85 Persen	1,013,832,800.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	90 Persen 97 Persen	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.0 2.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan			2 Laporan	13,600,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	5 Laporan	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.0 2.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan			25 Laporan	1,000,232,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	30 Laporan	0.00	INSPEKTORAT DAERAH		
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD Yang Telah Menerapkan SPIP	100 Persen			100 Persen	919,123,400.00						100 Persen	0.00			
	6.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan Pengawasan yang rampung	100 Persen			100 Persen	80,777,600.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	100 Persen	0.00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.03.2.0 1.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	7 Rekomen d asi			5 Rekomend asi	80,777,600.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	7 Rekomend asi	0.00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.03.2.0 2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Pendampingan dan Asistensi	95 Persen			95 Persen	838,345,800.00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	95 Persen	0.00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.03.2.0 2.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	39 perangka t daerah			40 perangkat daerah	198,373,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	39 perangkat daerah	0.00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.03.2.0 2.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	39 perangka t daerah			40 perangkat daerah	9,917,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	39 perangkat daerah	0.00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.03.2.0 2.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan			3 Kegiatan	420,054,700.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng	5 Kegiatan	0.00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.03.2.0 2.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				40 perangkat daerah	210,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bantaeng		0.00	INSPEKTORAT DAERAH		
		KECAMATAN BANTAENG						9,198,261,725.00								11,240,262,028.00		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						9,198,261,725.00							11,240,262,028.00	
	7.01	KECAMATAN						9,198,261,725.00							11,240,262,028.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	6,827,577,365.00						100 Persen	7,832,645,928.00	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Bantaeng	-			100 Persen	17,098,000.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	18,098,200.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	17,098,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		18,098,200.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	-			100 Persen	6,623,069,025.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	7,625,070,028.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/bula n	6,602,733,025.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		7,602,733,028.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	19,291,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		20,291,000.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	1,045,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		2,046,000.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Bantaeng	-			100 Persen	73,493,500.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD	-	80,630,000.00	KECAMATAN BANTAENG

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 Dokumen	1,560,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Akselerasi Kualitas Dan Pemer ataan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	SKPD		2,560,000.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	71,933,500.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		78,070,000.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	13,513,500.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	12,000,000.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	13,513,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		12,000,000.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	55,003,340.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	57,497,700.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17,495,640.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		18,583,600.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	37,507,700.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		38,914,100.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	-			100 Persen	45,400,000.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	39,350,000.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	43,180,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		36,130,000.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2,220,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		3,220,000.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	KECAMATAN BANTAENG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2,303,550,260.00						-	3,306,596,900.00	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga yang Aktif dalam kegiatan pemberdayaan di desa	-			100 Persen	78,034,600.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	79,211,900.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	78,034,600.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		79,211,900.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kinerja Kelurahan	-			82 Persen	2,225,515,660.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	-	3,227,385,000.00	KECAMATAN BANTAENG
	7.01.03.2.0 2.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	2,225,515,660.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		3,227,385,000.00	KECAMATAN BANTAENG
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa se kecamatan Bantaeng	92 Persen			92 Persen	67,134,100.00						92 Persen	101,019,200.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang di Fasilitasi dan Mendapat rekomendasi	-			100 Persen	67,134,100.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	-	101,019,200.00	KECAMATAN BANTAENG	
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	40,712,600.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		59,292,600.00	KECAMATAN BANTAENG	
	7.01.06.2.0 1.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				0 Dokumen	26,421,500.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		41,726,600.00	KECAMATAN BANTAENG	
		KECAMATAN BISSAPPU						9,108,309,247.00								9,347,000,000.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						9,108,309,247.00							9,347,000,000.00		
	7.01	KECAMATAN						9,108,309,247.00							9,347,000,000.00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	7,090,189,147.00						100 Persen	7,307,000,000.00		
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	-			100 Persen	59,353,600.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	70,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU	
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	26,641,900.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		30,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU	
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	32,711,700.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		40,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU	
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu	-			100 Persen	6,862,021,647.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	7,030,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU	
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	6,840,809,047.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		7,000,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	21,212,600.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		30,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	-			100 Persen	44,204,800.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	60,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	44,204,800.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		60,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	69,960,800.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	70,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	69,960,800.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		70,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	-			100 Persen	54,648,300.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	77,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	28,908,300.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		40,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	20,040,000.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		30,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	5,700,000.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		7,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bissappu	100 Persen			100 Persen	63,548,800.00						100 Persen	70,000,000.00	
	7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	-			100 Persen	25,879,000.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	30,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
	7.01.02.2.0 1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	25,879,000.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		30,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Sesuai Standar Pelayanan	-			100 Persen	37,669,800.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	40,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	37,669,800.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Bonto Lebang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		40,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terberdayakan	100 Persen			100 Persen	1,899,097,000.00						100 Persen	1,900,000,000.00	
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga yg Aktif dalam Proses Perencanaan dan Pembangunan di Tingkat Desa dan Kelurahan	-			100 Persen	1,899,097,000.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	1,900,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
	7.01.03.2.0 2.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	1,899,097,000.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		1,900,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum dan Keamanan wilayah	100 Persen			100 Persen	33,683,600.00						100 Persen	40,000,000.00	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Gangguan Keamanan yang di Tangani Bersama TNI dan POLRI	-			15 Kasus	33,683,600.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	-	40,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	33,683,600.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		40,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Persen			100 Persen	21,790,700.00						100 Persen	30,000,000.00	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi dan Mendapat Rekomendasi	-			4 Rekomend asi	21,790,700.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	-	30,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
	7.01.06.2.0 1.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	21,790,700.00	Kab. Bantaeng, Bissappu, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		30,000,000.00	KECAMATAN BISSAPPU
		KECAMATAN TOMPOBULU						5,499,276,873.00							5,578,020,000.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5,499,276,873.00							5,578,020,000.00	
	7.01	KECAMATAN						5,499,276,873.00							5,578,020,000.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	4,374,941,593.00						100 Persen	4,385,020,000.00	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD	100 Persen			100 Persen	18,248,800.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	15,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	18,248,800.00	Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		15,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen			100 Persen	4,083,970,093.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 Persen	4,111,100,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	4,069,324,593.00	Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		4,100,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				19 Dokumen	12,760,200.00	Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		9,200,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	1,885,300.00	Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		1,900,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 Persen			100 Persen	120,423,500.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	120,920,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	895,300.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		920,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	119,528,200.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		120,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	14,815,600.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	15,500,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	14,815,600.00	Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		15,500,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	38,523,600.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	42,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14,608,000.00	Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		19,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	23,915,600.00	Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		23,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 Persen			100 Persen	98,960,000.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	80,500,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	56,990,000.00	Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		47,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	37,970,000.00	Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		29,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	4,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		4,500,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 Persen			100 Persen	16,253,700.00						100 Persen	17,000,000.00	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase pelayanan yg sesuai standar pelayanan	100 Persen			100 Persen	16,253,700.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 Persen	17,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	16,253,700.00	Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		17,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Desa yang terberdayakan	90 Persen			90 Persen	1,051,889,580.00						90 Persen	1,119,000,000.00	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga yang aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan di desa	100 Persen			80 Persen	18,401,600.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 Persen	19,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	18,401,600.00	Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		19,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>persentase lembaga yg aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan di desa</i>	100 Persen			80 Persen	1,033,487,980.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	100 Persen	1,100,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU	
	7.01.03.2.0 2.0004	Evaluasi Kelurahan															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>				4 Laporan	1,033,487,980.00	Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		1,100,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</i>	100 Persen			100 Persen	56,192,000.00						100 Persen	57,000,000.00		
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi dan mendapat rekomendasi</i>	6 Rekomen d asi			6 Rekomend asi	56,192,000.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	6 Rekomend asi	57,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU	
	7.01.06.2.0 1.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				6 Dokumen	23,328,000.00	Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		24,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU	
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				1 Dokumen	32,864,000.00	Kab. Bantaeng, Tompo Bulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		33,000,000.00	KECAMATAN TOMPOBULU	
	7	KECAMATAN PAJUKUKANG						2,137,536,700.00								2,138,153,930.00	
		UNSUR KEWILAYAHAN						2,137,536,700.00							2,138,153,930.00		
	7.01	KECAMATAN						2,137,536,700.00							2,138,153,930.00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 Persen			100 Persen	1,991,884,500.00						100 Persen	1,992,362,700.00		
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	90 Persen			87 Persen	12,540,000.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	90 Persen	12,540,000.00	KECAMATAN PAJUKUKANG	
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12,540,000.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		12,540,000.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen			100 Persen	1,796,248,500.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	1,796,248,400.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1,785,592,800.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,785,592,800.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				17 Dokumen	9,576,700.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		9,576,700.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	1,079,000.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,078,900.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	95 Persen			90 Persen	90,243,400.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	90 Persen	92,202,800.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1,518,400.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,507,800.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2,400,000.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		2,400,000.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	86,325,000.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		88,295,000.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen			86 Persen	32,992,000.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	90 Persen	32,979,600.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20,442,500.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		20,440,000.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			0				12 0	12,549,500.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		12,539,600.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	97 Persen			96 Persen	59,860,600.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	97 Persen	58,391,900.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	51,450,600.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		50,000,000.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	1,000,000.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,000,000.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7,410,000.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		7,391,900.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang dilaksanakan di kecamatan pajukukang	100 Persen			100 Persen	7,802,000.00						100 Persen	7,802,200.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan Publik yang dilakukan di Kecamatan Pajukukang	12 Persen			12 Layanan	7,802,000.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	12 Persen	7,802,200.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	7,802,000.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		7,802,200.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Desa yang Terberdayakan	100 Persen			100 Persen	70,899,000.00						100 Persen	70,899,000.00	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan di desa	90 Persen			90 Persen	70,899,000.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	90 Persen	70,899,000.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	70,899,000.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		70,899,000.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen			100 Persen	66,951,200.00						100 Persen	67,090,030.00	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi dan mendapat rekomendasi	10 Rekomendasi			10 Rekomendasi	66,951,200.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	10 Rekomendasi	67,090,030.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	33,469,900.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		33,468,200.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10 Dokumen	33,481,300.00	Kab. Bantaeng, Pajukukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		33,621,830.00	KECAMATAN PAJUKUKANG
		KECAMATAN EREMERASA						2,812,361,227.00							2,865,964,427.00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						2,812,361,227.00							2,865,964,427.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	KECAMATAN						2,812,361,227.00							2,865,964,427.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	2,644,784,027.00						100 Persen	2,715,044,427.00	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	-			92 Persen	17,729,900.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	20,000,000.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	17,729,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		20,000,000.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang selesaikan tepat waktu	-			100 Persen	2,445,653,127.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	-	2,550,497,427.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bula n	2,415,380,427.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		2,515,380,427.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				19 Dokumen	27,774,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		30,563,000.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	2,498,600.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		4,554,000.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrtasi umum Kantor	-			100 Persen	62,832,700.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	58,052,000.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1,421,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		5,000,000.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		7,000,000.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	55,410,900.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		46,052,000.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	0.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	0.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	25,222,300.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	31,000,000.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	10,482,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		12,000,000.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 Laporan	14,740,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		19,000,000.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-			100 Persen	93,346,000.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	55,495,000.00	KECAMATAN EREMERASA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	93,346,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		55,495,000.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	KECAMATAN EREMERASA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraaan pemerintahan dan pelayanan yang dilaksanakan	100 Persen			100 Persen	0.00						100 Persen	0.00	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	presentase pelayanan yang sesuai sttanddar pelayanan	-			100 Persen	0.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	-	0.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		0.00	KECAMATAN EREMERASA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase lembaga yang aktif dalam proses perencanaan dan pemberdayaan	100 Persen			100 Persen	63,177,200.00						100 Persen	62,795,000.00	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kelompok dan lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	-			100 Persen	63,177,200.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	-	62,795,000.00	KECAMATAN EREMERASA
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	63,177,200.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		62,795,000.00	KECAMATAN EREMERASA
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen			100 Persen	104,400,000.00						100 Persen	88,125,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	umlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang difasilitasi dan mendapat rekomendasi	-			9 Rekomendasi	104,400,000.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	88,125,000.00	KECAMATAN EREMERASA	
	7.01.06.2.0 1.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 Dokumen	36,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		15,925,000.00	KECAMATAN EREMERASA	
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	43,200,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		45,000,000.00	KECAMATAN EREMERASA	
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9 Dokumen	25,200,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		27,200,000.00	KECAMATAN EREMERASA	
		KECAMATAN ULUERE							1,781,455,296.00								1,794,470,596.00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1,781,455,296.00							1,794,470,596.00		
	7.01	KECAMATAN						1,781,455,296.00							1,794,470,596.00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1,663,949,596.00						-	1,671,964,296.00		
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 Persen			87 Persen	7,887,600.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	90 Persen	8,887,900.00	KECAMATAN ULUERE	
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	7,887,600.00	Kab. Bantaeng, Uluere, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		8,887,900.00	KECAMATAN ULUERE	
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen			100 Persen	1,386,044,996.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 Persen	1,387,044,996.00	KECAMATAN ULUERE	
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1,386,044,996.00	Kab. Bantaeng, Uluere, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		1,387,044,996.00	KECAMATAN ULUERE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	95 Persen			90 Persen	56,127,000.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	95 Persen	57,127,000.00	KECAMATAN ULUERE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	56,127,000.00	Kab. Bantaeng, Uluere, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		57,127,000.00	KECAMATAN ULUERE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen			86 Persen	20,451,200.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	90 Persen	22,445,900.00	KECAMATAN ULUERE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8,072,000.00	Kab. Bantaeng, Uluere, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		9,066,400.00	KECAMATAN ULUERE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12,379,200.00	Kab. Bantaeng, Uluere, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		13,379,500.00	KECAMATAN ULUERE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	97 Persen			96 Persen	193,438,800.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	97 Persen	196,458,500.00	KECAMATAN ULUERE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	75,375,200.00	Kab. Bantaeng, Uluere, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		76,389,400.00	KECAMATAN ULUERE
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	79,358,300.00	Kab. Bantaeng, Uluere, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		80,363,400.00	KECAMATAN ULUERE

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	38,705,300.00	Kab. Bantaeng, Uluere, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		38,705,300.00	KECAMATAN ULUERE
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	86 Persen			86 Persen	9,655,200.00						86 Persen	10,655,200.00	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan Publik yang dilakukan di Kecamatan	12 Layanan Publik			12 Layanan	9,655,200.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	12 Layanan Publik	10,655,200.00	KECAMATAN ULUERE
	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
3.			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	9,655,200.00	Kab. Bantaeng, Uluere, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		10,655,200.00	KECAMATAN ULUERE
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Desa yang terberdayakan	90 Persen			90 Persen	56,048,200.00							56,048,300.00	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan di desa	90 Persen			90 Persen	56,048,200.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	90 Persen	56,048,300.00	KECAMATAN ULUERE
	7.01.03.2.0 1.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Masyarakat	12,498,300.00	Kab. Bantaeng, Uluere, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		13,498,400.00	KECAMATAN ULUERE
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	43,549,900.00	Kab. Bantaeng, Uluere, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		44,549,900.00	KECAMATAN ULUERE
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	92 Persen			92 Persen	51,802,300.00						92 Persen	53,802,800.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi dan mendapat rekomendasi	64 Rekomendasi			64 Persen	51,802,300.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	64 Rekomendasi	53,802,800.00	KECAMATAN ULUERE
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	27,629,300.00	Kab. Bantaeng, Uluere, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		28,629,600.00	KECAMATAN ULUERE
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3 Dokumen	24,173,000.00	Kab. Bantaeng, Uluere, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		25,173,200.00	KECAMATAN ULUERE
		KECAMATAN SINOA						1,593,589,073.00								1,709,162,973.00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1,593,589,073.00							1,709,162,973.00	
	7.01	KECAMATAN						1,593,589,073.00							1,709,162,973.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	1,478,518,233.00						100 Persen	1,587,520,773.00	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD	100 Persen			100 Persen	12,861,800.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	15,290,300.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2,090,300.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		2,290,300.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	10,771,500.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		13,000,000.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen			100 Persen	1,265,738,573.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	1,368,668,073.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				15 0	1,240,349,073.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,340,349,073.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	15,042,400.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		16,628,800.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	10,347,100.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		11,690,200.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 Persen			100 Persen	82,204,600.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	84,099,800.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,943,800.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		2,519,000.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	1,200,000.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,520,000.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	79,060,800.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		80,060,800.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	13,513,500.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	10,529,400.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	13,513,500.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		10,529,400.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	34,574,360.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	35,595,400.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	10,667,760.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		9,500,000.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	23,906,600.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		26,095,400.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 Persen			100 Persen	69,625,400.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 Persen	73,337,800.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	59,525,400.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		60,737,800.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	2,500,000.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		2,600,000.00	KECAMATAN SINOA
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7,600,000.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		10,000,000.00	KECAMATAN SINOA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang dilaksanakan oleh kecamatan sinoa	100 Persen			100 Persen	1,589,240.00						100 Persen	1,620,200.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100 Persen			100 Persen	1,589,240.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	100 Persen	1,620,200.00	KECAMATAN SINO A
	7.01.02.2.0 2.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1,589,240.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		1,620,200.00	KECAMATAN SINO A
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Desa yang terbedayakan	90 Persen			90 Persen	69,577,100.00						90 Persen	74,058,300.00	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga yang Aktif dalam kegiatan pemberdayaan di desa	100 Persen			100 Persen	69,577,100.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	100 Persen	74,058,300.00	KECAMATAN SINO A
	7.01.03.2.0 1.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga K emasyarak at an	10,088,600.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		11,088,600.00	KECAMATAN SINO A
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	59,488,500.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		62,969,700.00	KECAMATAN SINO A
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa se kecamatan sinoa	92 Persen			92 Persen	43,904,500.00						92 Persen	45,963,700.00	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang di Fasilitasi dan Mendapat rekomendasi	100 Persen			100 Persen	43,904,500.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	100 Persen	45,963,700.00	KECAMATAN SINO A
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	29,879,600.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		30,938,800.00	KECAMATAN SINO A
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS							
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				6 Dokumen	14,024,900.00	Kab. Bantaeng, Sinoa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		15,024,900.00	KECAMATAN SINOA		
		KECAMATAN GANTARANGKEKE							3,544,095,772.00								3,575,731,584.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3,544,095,772.00							3,575,731,584.00			
	7.01	KECAMATAN						3,544,095,772.00							3,575,731,584.00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	2,890,990,892.00						100 Persen	2,916,694,284.00			
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			85 Persen	17,953,900.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	18,953,900.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE		
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	17,953,900.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		18,953,900.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE		
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-			96 Persen	2,678,409,584.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	2,679,609,884.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE		
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	2,644,347,984.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		2,644,347,984.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE		
	7.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	21,313,300.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		21,513,300.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE		
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12,748,300.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		13,748,600.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	-			100 Persen	77,049,900.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	87,251,800.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,328,700.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,530,000.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	1,560,000.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,560,000.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	74,161,200.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		84,161,800.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			90 Persen	15,765,100.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	25,000,000.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15,765,100.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		25,000,000.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			85 Persen	45,591,408.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	39,047,500.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	16,978,008.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		10,434,000.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	28,613,400.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		28,613,500.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	-			90 Persen	56,221,000.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	-	66,831,200.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	55,221,000.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		55,236,000.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	1,000,000.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		1,000,000.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		10,595,200.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang dikasnakan oleh Kecamatan	100 Persen			100 Persen	11,999,200.00						100 Persen	12,500,000.00	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan Publik yang dilakukan di Kecamatan Gantarangkeke	-			12 Layanan Publik	11,999,200.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	12,500,000.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	11,999,200.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		12,500,000.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Desa yang terberdayakan	100 Persen			100 Persen	344,709,580.00						100 Persen	348,640,600.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa	-			90 Persen	68,683,900.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	-	72,612,500.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	68,683,900.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		72,612,500.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase lembaga aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan di Kelurahan	-			80 Persen	276,025,680.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	-	276,028,100.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	80,000,000.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		80,000,000.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.03.2.0 2.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	196,025,680.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		196,028,100.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan keamanan dan ketertiban umum Kecamatan Gantarangkeke	100 Persen			100 Persen	264,000,000.00						100 Persen	264,000,000.00	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Gangguan Keamanan yang ditangani bersama TNI dan POLRI	-			5 Kasus	264,000,000.00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	-	264,000,000.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	264,000,000.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	01.Peningk atan Tata Kelola perny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		264,000,000.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Kecamatan Gantarangkeke	90 Persen			90 Persen	32,396,100.00						90 Persen	33,896,700.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi dan mendapat rekomendasi Kecamatan Gantarangkeke	-			4 Rekomendasi	32,396,100.00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	33,896,700.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE	
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	10,720,300.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		10,720,300.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE	
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				6 Dokumen	9,257,300.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		9,757,700.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE	
	7.01.06.2.0 1.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				6 Dokumen	12,418,500.00	Kab. Bantaeng, Gantarang Keke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		13,418,700.00	KECAMATAN GANTARANGKEKE	
	8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						3,747,455,241.00								20,000,000.00	
		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						3,747,455,241.00							20,000,000.00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						3,747,455,241.00							20,000,000.00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			100 Persen	2,115,611,141.00						100 Persen	20,000,000.00		
	8.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD	100 persen			100 Persen	76,618,300.00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 persen	20,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	25,907,900.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lembang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7,152,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lembang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		20,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	8,558,400.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lembang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	35,000,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lembang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 persen			100 Persen	1,806,044,941.00			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 persen	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bula n	1,801,043,941.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,001,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Lembang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	5 jumlah/u nit			100 Persen	2,785,500.00			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	5 jumlah/unit	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,785,500.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administراسي Umum Kantor	2 jumlah dokumen			100 Persen	109,783,600.00			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	4 jumlah dokumen	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4,670,600.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	105,113,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 jumlah/u nit			2 Unit	9,399,800.00			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	2 jumlah/unit	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	9,399,800.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			96 Persen	54,678,100.00			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	100 persen	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	16,706,600.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	37,971,500.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	5 jumlah/u nit			100 Persen	56,300,900.00			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD	5 jumlah/unit	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	51,189,300.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	5,111,600.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	SKPD		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 Persen			100 Persen	744,442,100.00						100 Persen	0.00	
	8.01.02.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kebijakan peningkatan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara	100 persen			97 Persen	744,442,100.00			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 persen	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.0 1.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	44,225,000.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.0 1.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				350 Orang	700,217,100.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik	100 Persen			100 Persen	107,112,200.00						100 Persen	0.00	
	8.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi yang disusun	1 dokumen			1 Dokumen	107,112,200.00			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat	1 dokumen	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.0 1.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	24,999,900.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.0 1.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	79,237,500.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2. Pemanta pan Implem entasi Reformasi Birokrasi	Masya rakat		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.0 1.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	2,874,800.00	Kab. Bantaeng, Bantaeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang terdaftar kemasyarakatan	95 Persen			95 Persen	168,660,000.00						95 Persen	0.00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah ormas yang diawasi	29 ormas			20 Ormas	168,660,000.00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	29 ormas	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				25 Orang	45,000,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	123,660,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100 Persen			100 Persen	110,150,000.00						100 Persen	0.00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kebijakan teknis dan pemantapan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang berjalan dengan efektif	2 kebijakan			1 kebijakan	110,150,000.00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1 kebijakan	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				30 Orang	0.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.0 1.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				35 Orang	110,150,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan dan penanganan kewaspadaan nasional	95 Persen			95 Persen	501,479,800.00						95 Persen	0.00	
	8.01.06.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	tingkat pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang disusun	1 dokumen			1 Dokumen	501,479,800.00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1 dokumen	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.0 1.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	71,001,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.0 1.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				10 Orang	69,698,800.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.0 1.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				10 Orang	67,300,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.0 1.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	66,900,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.0 1.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	226,580,000.00	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		J U M L A H							1,011,810,252,790.00							1,027,425,157,849.00	



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar peran pemerintah daerah dapat menyentuh kehidupan masyarakat. Peran pemerintah tersebut menjadi pusat layanan bagi berbagai keperluan masyarakat. Pelayanan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagian besar mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan hasil yang dicapai atas penyelenggaraan pelayanan tersebut menunjukkan tingkat peradaban masyarakatnya. Dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bantaeng yang terus berkembang maka hal ini juga akan menuntut pemerintah daerah harus mampu mengikuti perkembangan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Bantaeng. Sehingga ini berimplikasi pada kompleksitas layanan jasa yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan kompleksitas layanan yang semakin tinggi maka hal ini harus diiringi oleh peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Untuk dapat melihat keberhasilan dan kegagalan kinerja maka perlu adanya alat ukur capaian pembangunan daerah yang dinyatakan dalam Indikator kinerja daerah.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.



6.1 Indikator Makro Pembangunan Daerah

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel VI. 1.
Target Indikator Makro Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2025	Target Akhir RPD
1	IPM	-	71,28	71,56	72,09
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,18	8,08	7,76
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,71	3,19	3,04
4	Indeks Gini	-	0,326	0,306	0,301
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,56	9,25	9,66
6	PDRB per Kapita	Juta Rp	62,78	66,32	75,00

Sumber: BPS dan RPD Bantaeng 2024-2026

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel VI. 2.
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
1	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	44,65 (C)	55,73 (CC)	60,46 (B)
2	Nilai SAKIP	poin	63,28 (B)	67,88 (B)	70,59 (BB)
3	Indeks Pembangunan Manusia	poin	71,28	71,56	72,09
4	Tingkat Kemiskinan	%	9,18	8,08	7,76
5	PDRB per Kapita	Juta/ Kapita	62,78	66,32	75



NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
6	Inflasi	-	2,78	2,91	2,5
7	Indeks Gini	-	0,336	0,306	0,301
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,71	3,19	3,04
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,56	9,25	9,66
10	Indeks Infrastruktur	-	62,67	72,5	75
11	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	NA	1	1

Sumber: BPS dan RPD Kabupaten Bantaeng 2024-2026

Sasaran pembangunan nasional melalui Prioritas Nasional, pembangunan sasaran pembangunan juga diarahkan melalui kebijakan pembangunan tematik provinsi, yang dituangkan pada indikator yang harus diperhatikan oleh Kabupaten Bantaeng sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel VI. 3.
Sasaran Pembangunan Tematik Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Indikator Pembangunan Tematik	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
Bantaeng	Tingkat Inflasi	%	Menurun
	Prevalensi Stunting	%	10,8
	Penurunan Gizi Buruk	%	1,8
	Penurunan Anak Tidak Sekolah	%	Menurun
	Prevalensi Perkawinan Anak	%	11,07
	Realisasi Investasi	Rp. Miliar	150
	Produktivitas Pertanian	%	Meningkat
	Prevalensi Ketidacukupan Pangan	%	Menurun
	Indeks SPBE	Nilai	Meningkat
	Persentase Kemantapan Jalan	%	Meningkat
	Sanitasi Layak	%	100
	Air Minum Layak	%	100
	IKLH	Nilai	76,12

Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulsel, diolah Tahun 2024.



6.3 Indikator Kinerja Kunci

Dengan penetapan kinerja pemerintah untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Daerah. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- 2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
- 3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
- 4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara umum, Indikator Kinerja merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Indikator ini merupakan adalah indikator *outcome* yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja merupakan capaian pembangunan Tahun 2025 yang berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen RKPD diuraikan tabel sebagai berikut:

Tabel VI. 4.
Capaian dan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bantaeng
Tahun 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,56	9,25	9,66
2	PDRB per Kapita	Juta/ Kapita	62,78	66,32	75
3	Inflasi**	%	2,78	2,91	2,5
4	Indeks Gini	-	0,336	0,306	0,301
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,71	3,19	3,04
6	Indeks Pembangunan Manusia	poin	71,28	71,56	72,09
7	Tingkat Kemiskinan	%	9,18	8,08	7,76
8	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	44,65 (C)	55,73 (CC)	60,46 (B)
9	Nilai SAKIP	poin	62,55 (B)	67,88 (B)	70,59 (BB)
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	poin	86,21*	88,3	89,18



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
11	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	75,847	79,311	80,501
12	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	poin	81,29*	98,75	99
13	Indeks Pendidikan	-	58,44	60,35	58,3
14	Indeks Kesehatan	-	81,03	82,33	79,4
15	LPE Kategori Pertanian	%	0,35	2,34	3
16	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	122,89	55	60
17	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	9,54	11,39	12
18	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	NA	1	1
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	954.570	1.160.286	1.218.300
2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	427.088	519.128	545.085
3	Indeks Infrastruktur		NA	72,5	75
4	Rasio ketergantungan	-	43,83	42,1	41,68
III	ASPEK PELAYANAN UMUM				
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
Pendidikan					
1	Harapan Lama Sekolah	TAHUN	12,53	13.50	14.00
2	Rata-rata Lama Sekolah	TAHUN	7,09	7.50	8.00
3	Angka Partisipasi Sekolah penduduk Usia 5-18 Tahun	Persen	94.57	100	100
4	Guru PAUD,SD/MI dan SMP/MTS yang Bersertifikat Pendidik	Persen	40,58	52	55
5	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Predikat (Nilai)	B (62)	B (68)	BB (71)
6	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	90	100	100
7	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	90	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
8	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	86,27	99,11	100,00
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	114,02	98,43	100,00
10	Angka partisipasi Penduduk Usia 5-6 Tahun Pada Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	87,13	91,95	100,00
11	Angka Partisipasi Penduduk Pada Pendidikan Non Formal Usia 7-18 yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar	Persen	99,88	100,00	100,00
12	Persentase muatan lokal Yang ditetapkan sebagai bahan ajar	Persen	100	100	100
13	Guru Paud,SD/MI,SMP/MTS yang memenuhi Kualifikasi SI/D-IV	Persen	93,77	97,00	100
14	Persentase Izin Operasional Pendidikan Dasar Yang di Terbitkan	Persen	100	100	100
15	Persentase Bahasa lokal dan sastra daerah yang dikembangkan	Persen	75	100	100
Kesehatan					
1	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Predikat (Nilai)	B (62)	B (67)	BB (71)
2	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Kesehatan	%	89,59	91	92
3	Angka Harapan Hidup	Angka	70,60	71,50	71,82
4	Angka Kesakitan	%	24	22	21
5	Persentase Penerapan PHBS	%	71,01	79	80
6	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	90	93	95
7	Persentase Rata-Rata Pelayanan UKM dan UKP	Persen	90	93	95
8	Persentase Cakupan Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persen	90	93	95



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
9	Persentase IRTP yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	90	93	95
10	Persentase Capaian Survei Mawas Diri	Persen	80	82	85
RSUD Prof. Dr. dr. Anwar Makkatutu					
1	Nilai SAKIP RSUD Prof. Dr Anwar Makkatutu	Predikat (Nilai)	B (62)	B (68)	BB (71)
2	Tingkat capaian indikator sasaran RSUD Prof. Dr Anwar Makkatutu	Persen	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu	Nilai	80	85	90
4	Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu	Persen	65	68	70
5	Rasio Daya Tampung RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu	persen	0.14	0.14	0.15
6	Rata-rata waktu tunggu pelayanan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu	Menit	60	55	50
7	Tercapainya prosentase administrasi perkantoran	persen	100	100	100
8	Peningkatan jumlah kunjungan pasien	persen	100	100	100
RSUD Banyorang					
1	Nilai SAKIP RSUD Banyorang.	Nilai Predikat	B (62)	B (68)	BB (71)
2	Tingkat Capaian Indikator Sasaran RSUD Banyorang	Nilai Predikat	63,73	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan	Persen	75	80	80
4	Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD Banyorang	persen	70	75	75
5	Rasio Daya Tampung RSUD Banyorang	persen	0,25	0,75	1
6	Rata-rata waktu tunggu pelayanan RSUD Banyorang	persen	60	45	40



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
7	Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah RSUD Banyorang	persen	70	70	75
8	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di RSUD Banyorang	persen	65	70	75
9	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Banyorang	persen	70	70	75
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
1	Persentase pembangunan infrastruktur wilayah yang terbangun	%	69	71	72
2	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	69	72	75
3	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (satuan:%)	%	60	73	75
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	67,98	69	70
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	68	72	75
6	Persentase implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal	%	100	100	100
7	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	91	96	100
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
9	Prosentase kesesuaian Pembangunan dengan RTRW dan RDTR yang ditetapkan	%	100	100	100
10	Luas daerah irigasi dalam kondisi baik	%	87	89	90
11	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	91	93	95
12	Persentase jalan perkotaan yang memiliki drainase yang baik	%	80	84	85
13	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai	B (62)	B (68)	BB (70)
14	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai	80	95	100
15	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	100
16	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen	20	40	50
17	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	persen	86	95	100
18	Persentase rumah tinggal bersanitasi	persen	80	83	85
19	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang dilaksanakan dalam satu tahun	persen	65	68	70



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
20	Persentase infrastruktur di kawasan strategis	persen	100	100	100
21	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	persen	100	100	100
22	Presentase Kondisi Jalan, jembatan dan gorong- gorong Baik	persen	68	70	71
23	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	persen	N/a	100	100
24	Perentase Pembangunan Infrastruktur yang Sesuai RTRW	persen	90	96	100
Perumahan, Permukiman dan Pertanian					
1	Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian	Predikat (Nilai)	B (62)	B (68)	BB (71)
2	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian	Persen	95,87	97,25	98,05
3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen (%)	0,03	0,02	0,01
4	Rasio Rumah Layak Huni	rasio	0,142	0,142	0,141
5	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaann	Persen (%)	19,39	33,54	43,24
6	Persentase Luas Lahan PEMDA yang Berlegalitas	Persen (%)	46,61	50,66	52,69
7	Persentase jumlah kasus sengketa tanah PEMDA yang ditangani	persen (%)	100	100	100
8	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	Persen	80	90	90
9	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	62	68	70
10	Persentase pemukiman yang tertata	Persen	99	99,85	100
11	Persentase PSU Perumahan Permukiman yang ditingkatkan	Persen	45	58	64



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	kualitasnya				
12	Persentase tertanganinya sengketa tanah PEMDA secara litigasi / non litigasi	Persen	70	80	85
13	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	75	85	90
14	Persentase Luas Lahan PEMDA yang bersertiifkat	Persen	46	50	52
15	Persentase Lahan Pemda yang terdata	Persen	94	98	100
Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
Satpol PP & Pemadam Kebakaran					
1	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	9,96	15	15
2	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100
3	Persentase Penegakan PERDA	persen	100	100	100
4	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100
5	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Predikat	B	B	BB
6	rata-rata tingkat capaian indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persen	100	100	100
7	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
8	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100
9	Persentase Bencana Kebakaran, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Yang Terlaksana Dengan Baik dan sesuai Regulasi	Persen	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	yang Berlaku				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
1	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Predikat (Nilai)	B (60)	B (67)	BB (71)
2	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100	100	100
3	Indeks Resiko Bencana	Nilai	102,20	97	95
4	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Bencana Alam	Jam	20	10	5
5	Persentase Capaian Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persen	100	90	100
6	Persentase Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen	100	100	100
7	Persentase korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Persen	0,01	100	100
Sosial					
1	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Predikat (Nilai)	B (62)	B (68)	BB (70)
2	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran perangkat daerah	%	100	100	100
3	Tingkat penurunan jumlah PPKS	%	3.50	11.02	15.01
4	Persentase PPKS yang tertangani	%	3,5	11,02	15,01
5	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100
6	Peresentase Capaian	Persen	80	100	100



NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
7	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	80	33,33	33,33
8	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	80	33,33	33,33
9	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	80	33,33	33,33
10	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	80	33,33	33,33
11	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	80	33,33	33,33
12	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	80	33,33	33,33
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
Tenaga Kerja dan Perindustrian					
1	Tingkat Produktivitas tenaga kerja (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	persen	21,95	22,5	22,55
2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (rekomendasi indikator sasaran perangkat daerah)	persen	50	54	56
3	Rata-rata pendapatan masyarakat (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	Rupiah	3.165.876	3.385.144	3.400.000
4	persentase pelaku usaha yang menerapkan upah	persentase	11	12	12,5



NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	minimum provinsi				
5	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang naik skala usaha (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	persen	0,2	0,2	0,2
6	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang naik skala usaha (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah).	persen	2	2	2
7	Nilai SAKIP (rekomendasi indikator sasaran daerah).	Predikat (Nilai)	B (60)	B (68)	BB(71)
8	rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah (rekomendasi indikator sasaran perangkat daerah)	persen	90	93	95
9	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	persen	80	90	100
10	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	persen	8,6	18,47	18,47
11	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	persen	50	70	80
12	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	persen	68	80	100
13	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	persen	0,5	0,5	0,5
14	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri	persen	10	70	80



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	(IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
15	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,7875	0,8200	0,8332
2	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	15	17	18
3	Persentase desa yang difasilitasi penataannya	persen	70	90	100
4	Jumlah desa yang di fasilitasi kerjasamanya	Desa	3	10	10
5	Persentase desa yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik	persen	80	90	100
6	Persentase lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang berprestasi	persen	70	90	100
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	95,76	95,92	96,10
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	81,20	82,15	82,70
3	Persentase Anak Korban Kekerasan yan ditangani	Persentase	100	100	100
4	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	598	670	690
5	Nilai SAKIP Dinas PMD,PPPA	Predikat	B (62)	B (65)	BB (71)
6	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas PMD,PPPA	persen	75	85	90
7	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	80	90	100
8	Persentase Lembaga yang melakukan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	persen	80	90	100
9	Persentase perlindungan	persen	80	90	100



NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	perempuan yang mendapatkan pelayanan perlindungan				
10	Persentase Lembaga dan Perangkat Daerah dalam peningkatan kualitas keluarga	persen	80	90	100
11	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Sistem data gender dan anak	persen	80	90	100
12	Persentase lembaga yang menyediakan layanan pemenuhan hak anak	persen	80	90	100
13	Persentase Perangkat Daerah dalam Perlindungan Khusus untuk Anak	persen	80	90	100
Ketahanan Pangan					
1	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Predikat (Nilai)	B (62,15)	B (65,21)	BB (70)
2	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Ketahanan Pangan	Persen	98	100	100
3	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	76,6	79,3	80,07
4	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	44,382	44,777	44,803
5	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
6	Persentase desa yang masuk dalam kategori mandiri pangan	Persen	100	100	100
7	Persentase ketersediaan penunjang pangan utama	Persen	100	100	100
8	Persentase Daerah Rawan Pangan yang tertangani	Persen	100	100	100
9	Persentase produk pangan yang bersertifikat	Persen	100	100	100
Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67.912	68.322	68.512
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	94.380	94.949	95.080
3	Indeks Kualitas Air	Angka	60.00	60.36	60.45



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	32.55	32.75	32.79
5	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	Angka	54	62	65
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3	Persen	22	25	27
6	Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah	Persen	0	0.21	0,22
7	Persentase Rekomendasi KLHS yang Diakomodir dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100
8	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Predikat (Nilai)	BB (74.31)	BB (77)	BB (80)
9	Tingkat Capaian Indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100%	100%	100%
10	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100
11	Tersusnya Dokumen Perencanaan Dokumen Lingkungan Hidup	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
12	Persentase Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditangani	Persen	100	100	100
13	Persentase Tingkat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen	11	12,25	12,50
14	Proporsi Limbah B3 yang Diolah Sesuai Prosedur	Persen	30	45	50
15	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	99,95	100	100
16	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Lembaga	0	1	1
17	Persentase lembaga pendidikan atau	Pelatihan	25	25	25



NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	kelompok masyarakat pemerhati lingkungan yang memperoleh pelatihan lingkungan hidup				
18	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
19	Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
20	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Persen	57,65	59,00	60,00
Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat (Nilai)	B (62)	B (70)	BB (71)
2	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	70	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	Nilai	89,98	95	97
4	Persentase penduduk yang memiliki identitas Kependudukan	Persen	46,80	67,97	74,65
5	Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil	Persen	59,50	59,89	89,98
6	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	OPD	16	30	38
7	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	95	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	Daerah Kabupaten/ Kota yang terpenuhi				
8	Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP Elektronik	Persen	95	95	95
9	Persentase identitas kependudukan digital dari total perekaman	Persen	0,72	45	60
10	Persentase Penduduk Usia 0-16 Tahun yang memiliki KIA	Persen	41,87	58,98	63,98
11	Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	Persen	99	99,78	99,96
12	Persentase Kompleks Pemakaman Memiliki Buku Pokok Pemakaman	Persen	20	60	80
13	Persentase ketersediaan data layanan informasi administrasi kependudukan	Persen	90	98	100
14	Persentase Profil Kependudukan yang Disajikan	Persen	95	98	100
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Predikat (Nilai)	B(65)	B(67)	BB (70)
2	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persen	90	100	100
3	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	100	100	100
4	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	Persen	1,6	1,4	1,3
5	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
6	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>)	Persen	1,6	1,4	1,3
7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	16,05	17,85	18,05
8	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam	Persen	90	90	90



NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	Ketahanan Keluarga				
Perhubungan					
1	Indeks angkutan jalan	Angka	2,5	2,08	1,92
2	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi darat	Persen	50%	54%	56%
3	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	Persen	15 %	16 %	17%
4	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Predikat	B (62)	B (68)	BB (71)
5	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Perhubungan	Persen	84,83%	90%	100%
6	Persentase Bidang dalam SKPD yang Dilayani Administrasi Perkantorannya	Persen	100%	100%	100%
7	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan	Persen	75%	85%	90%
8	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang Terpasang dan Dalam Kondisi Baik	Persen	70%	90%	100%
9	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Angka	250	250	250
Komunikasi, Informatika, dan Persandian					
1	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Predikat (Nilai)	B (62)	B (67,88)	BB (70,59)
2	Tingkat capaian indikator sasaran Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
3	Indeks SPBE	Predikat (Nilai)	Cukup (2,29)	Cukup (2,5)	Baik (2,6)
4	Persentase Rilis Data statistik akurat dan tepat waktu	%	40	80	85
5	Indeks KAMI	Nilai	435	470	490
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Persen	82	95	100



NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
7	Persentase OPD yang menyediakan data sektoral yang valid dan tepat waktu sesuai format yang di sediakan	Persen	61	79	100
8	Skor Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi	Predikat (Nilai)	Kurang Informatif (46)	Kurang Informatif (65)	Kurang Informatif (75)
9	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
10	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	100	100	100
11	Indeks Kematangan SPBE pada Domain Kebijakan SPBE	Indeks	2,90	2,97	2,99
12	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100
13	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	87	94	98
Koperasi, UKM, dan Perdagangan					
1	Persentase UMKM Yang Naik Skala Usaha	%	1	1	1
2	Persentase Koperasi Yang Aktif	%	77	78,3	78,9
3	Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah Baru	%	1	1	1
4	Pertumbuhan Nilai Ekspor Perdagangan	%	284,27	35	40
5	Eksport Bersih Perdagangan	Nilai	6.80	11,5	14,91
6	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat (Nilai)	B (62)	B (68)	BB (71)
7	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Koperasi	%	75	75	75



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	UKM dan Perdagangan				
8	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
9	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	43,5%	45%	46%
10	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	31	32	32,5
11	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	31	32	32,5
12	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	48	48	48
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi	Persen	1	1	1
14	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	1	1	1
15	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persen	1	1,10	1,15
16	Persentase perizinan dan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan untuk izin	Persen	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
17	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	50	60	60
18	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persen	0	5	5
19	Ekspor Bersih Perdagangan	Persen	0	15	20
20	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	unit	9%	10	10
21	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persen	0	25	24
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
1	Persentase peningkatan investasi daerah	Persen	50	58	60
2	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Milyar	650	750	800
3	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat (Nilai)	B(62)	B(67)	BB (71)
4	Tingkat capaian indikator sasaran	Persen	93	95	95
5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan	Persen	83	85	86
6	rata-rata waktu penerbitan izin dan non izin usaha	hari	7	6	6
7	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100
8	Persentase peningkatan pengelolaan potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor	Persen	85	100	100
9	Persentase pelaksanaan kegiatan promosi	Persen	85	100	100
10	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai	Persen	80	90	95



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	SOP				
11	persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal	Persen	25	30	35
12	Persentase ketersediaan data dan informasi yang valid	Persen	100	100	100
Pemuda dan Olahraga					
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	1,11	1,12	1,13
2	Jumlah Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan	Orang	340	360	370
3	Pertumbuhan Wirausaha Muda	Persen	3	3	3
4	Nilai SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	Predikat (Nilai)	B (62)	BB (70)	BB (72)
5	Tingkat Capaian Indikator sasaran Dinas pemuda dan Olahraga	Persen	66	100	100
6	Persentase Peningkatan Atlet berprestasi	Persen	25	25	25
7	Jumlah Atlet berprestasi terhadap ajang yang di ikuti	Orang	15	19	21
8	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persen	80	90	95
9	Persentase pengembangan kapasitas pemuda dalam bidang organisasi dan kewirausahaan yang terpenuhi	Persen	1	1,002	1,003
10	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen	100	100	100
11	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepramukaan	Jumlah	2	2	2
Kebudayaan					
1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	52,44	85	100
2	Jumlah Cagar Budaya yang dipelihara	Cagar Budaya	43	70	82



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
3	Persentase Objek Budaya yang dipelihara	Persen	92	100	100
4	Persentase Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan	Persen	100	100	100
5	Persentase Sejarah Lokal cagar budaya yang dilestarikan	Persen	NA	10	10
6	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	20	25	30
7	Persentase Museum Yang di Kelola dengan baik	Persen	100	100	100
Perpustakaan dan Kearsipan					
1	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Predikat (Nilai)	B (60)	BB (70)	BB (75)
2	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Predikat (Nilai)	B (60)	B (65)	BB (75)
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	75	80	90
4	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	69	65	70
5	Persentase Dokumen yang telah diarsipkan dengan baik	%	60	70	75
6	Persentase Pengelolaan Kearsipan di OPD yang sesuai standar	%	60	70	75
7	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	10	10
8	Persentase Perpustakaan yang terkelola dengan Baik	Persen	80	88	90
9	Persentase Perpustakaan yang diBina	Perpustakaan	80	88	90
10	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Persen	70	85	90
11	persentase Perangkat	Persen	0	90	90



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	daerah yang mengelola arsip secara baku				
12	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	80	88	90
13	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang dikeluarkan	Persen	0	85	90
Perikanan dan Kelautan					
1	LPE Subkategori Perikanan	Nilai	2,98	4,5	5,0
2	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap, Budidaya dan Olahan Hasil Perikanan)	Ton	95770,65	104776,40	106480,42
3	Nilai SAKIP Dinas Perikanan dan Kelautan	Predikat (Nilai)	B (62)	B (67)	BB (71)
4	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Perikanan dan Kelautan	Persen	100	100	100
5	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100
6	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	6382,4	6829,3	7000,0
7	Produksi perikanan Budidaya	Ton	294,016	99622,27	101184,01
9	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	17,4	27,81	28,22
Pariwisata					
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	1,66	1,78	1,89
2	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	0,35	0,38	0,4
3	Rata-rata lama kunjungan	hari	1,75	1,85	1,90
4	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	predikat (nilai)	B (62)	B (67)	BB (70)
5	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Pariwisata	persen	91,31	94	95
6	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	unit usaha	279	307	322
7	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif yang telah memperoleh izin	unit usaha	147	155	160
8	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100



NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	Kabupaten. Kota				
9	Persentase Objek Wisata yang memiliki Fasilitas standar pariwisata	Persen	44	48	50
10	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara	Persen	35	37	38
11	Sumber Daya Pariwisata yang memperoleh pengembangan kapasitas	Persen	77	79	80
Pertanian					
1	LPE subkategori pertanian	Persen	4.8 %	4,8 %	5,0%
2	Persentase Peningkatan Mutu Produk Olahan Hasil Pertanian	Persen	10 Persen	18 Persen	20 Persen
3	Produktivitas Pertanian	Kwintal/Ha	53.25 Kw/ha	54.95 Kw/ha	55.25 Kw/ha
4	Persentase Kenaikan Populasi Ternak	Persen	20.25 Persen	24.52 Persen	25.53 Persen
5	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Predikat (Nilai)	BB (72)	BB (75)	A (81)
6	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Pertanian	Persen	80 Persen	90 Persen	95 Persen
7	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	Persen	75 %	80 %	85%
8	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	5	5	5
9	Kontribusi sektor Sarana Prasarana pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen
10	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	4,79%	3,87%	3,46%
11	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	25 %	75 %	85%
12	Persentasi Penerbitan izin usaha pertanian terhadap mutu produk hasil pertanian	Persen	75	80	85
13	Kontribusi subsektor	Persen	60 Persen	70 Persen	75 Persen



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	penyuluhan terhadap peningkatan produktivitas pertanian				
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
Sekretariat Daerah					
1	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Predikat (Nilai)	B (62,09)	BB (70)	BB (70)
2	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	Persen	95	95	96
3	Nilai LPPD	Status (Skor)	Tinggi (3.5)	Sangat Tinggi (4)	Sangat Tinggi (4)
4	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	Persen	90	92	95
5	Tingkat Inflasi	persen	3.54	3	2,3
6	Jumlah komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga	Komoditas	10	8	7
7	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kota	Persen	92	100	200
8	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tata Pemerintahan	Persen	98	98	98
9	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Perekonomian, Pembangunan dan Pengelolaan Barang dan Jasa	Persen	95	96	96
Sekretariat Dewan					
1	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Predikat (Nilai)	B (62)	A (80)	A (85)
2	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Sasaran Sekretariat DPRD	Persentase	85	95	100
3	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Predikat (Nilai)	Cukup Baik (41-60)	Sangat Baik (81)	Samgat Baik (91)
4	Persentase Prolegda yang berhasil diselesaikan	Persen	60	85	100
5	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
6	Persentase Pemenuhan layanan kesejahteraan Anggota Dewan	Persen	100	100	100
7	Jumlah Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	3	5	5
8	Persentase tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM)	Persen	80	92	10
9	Persentase muatan integrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Persen	80	85	100
Perencanaan Pembangunan					
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	90	95	100
2	rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	Persen	92.66	100	100
3	Persentase konsistensi program RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100
4	Indeks Inovasi Daerah	Persen	48,31	48,42	48,5
5	Persentase kemanfaatan inovasi daerah	Persen	100	85	95
6	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat	B (67.85)	B (70)	B (71,54)
7	Tingkat capaian indikator sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat	97,61	98.86	100
8	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	kabupaten / Kota				
9	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah tepat waktu	Persen	100	100	100
10	Persentase Kesesuaian Dokomen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
11	Persentase Pemanfaatan hasil Kelitbangan	Persen	71,42	100	100
Keuangan Daerah					
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan APBD Pokok dan Perubahan	Tepat/Tidak Tepat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
4	Persentase Tingkat Pertumbuhan PAD	Persen	76,50	76,60	76,70
5	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Nilai	51,75	95,00	100
6	Nilai SAKIP Badan Pengelola Keuangan Daerah	Predikat (Nilai)	B (62)	B (65.01)	BB (70,01)
7	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Badan Pengelola keuangan Daerah	Persen	100	100	100
8	Persentase Capaian Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persen	100	100	100
9	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penganggaran Keuangan Daerah	Persen	100	100	100
10	Persentase Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tepat waktu	Persen	100	100	100
11	Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menyampaikan Keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
12	Persentase Barang Milik Daerah yang di Kelola oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
13	Kredibilitas Penerimaan Pendapatan dan Perencanaan Awal	Persen	98,18	100	100
Kepegawaian dan Pengembangan SDM					
1	Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Predikat (Nilai)	B (62)	B (69)	BB (75)
2	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	80,00	90,00	95,00
3	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	55,32	68.56	71,43
4	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	%	65	75	80
5	Indeks Sistem Merit	Nilai	174	249	255
6	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	%	45	65	75
7	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Persen	90	90	95
8	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Persen	90	90	90
9	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	65	75	80
Pengawasan					
1	Nilai SAKIP (rekomendasi indikator sasaran daerah)	Predikat	B	B	BB
2	Tingkat Capaian Indikator sasaran Program Inspektorat Daerah	%	92	95	97
3	Persentase Peningkatan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Persen	87	90	91
4	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3
5	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 4



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
6	Penurunan jumlah temuan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal	Temuan	50	30	20
7	Penurunan Jumlah Aduan Masyarakat Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Aduan	4	2	1
8	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	95	97	100
9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	Persen	87	90	91
10	Persentase SKPD Yang Telah Menerapkan SPIP	Persen	100	100	100
11	Persentase Tingkat Pemenuhan Kapabilitas APIP	Persen	100	100	100
Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Persentase konflik Ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan	persen	80	95	100
2	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	persen	90	98	100
3	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	persen	90	98	100
4	Nilai Sakip Kesbangpol	Predikat (Nilai)	B (62)	B (67)	B (70)
5	Tingkat capaian indikator sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	90	97	100
6	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	persen	100	100	100
7	persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	persen	100	100	100
8	Persentase peningkatan peran partai politik (Dengan Satuan:persen)	persen	100	100	100
9	persentase ormas yang terdaftar kemasyarakatan	persen	90	97	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
10	Presentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persen	95	100	100
11	Persentase Peningkatan dan penanganan kewaspadaan nasional	Rupiah	90	98	100
Kewilayahan					
	Kec. Bantaeng				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bantaeng	Predikat	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)
2	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bantaeng	Persen	100	100	100
3	Persentase permasalahan dan Pengaduan Masyarakat yang ditangani di Kecamatan Bantaeng	Persen	100	100	100
4	Nilai SAKIP Kecamatan Bantaeng	Predikat (Nilai)	B (62)	B (67)	B (71)
5	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Kecamatan Bantaeng	Persen	100	100	100
6	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
7	Persentase Kelompok Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terbedayakan	Persen	90	90	90
8	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum Kecamatan Bantaeng	Persen	20	20	20
9	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa se kecamatan Bantaeng	Persen	90	94	95
	Kec. Bisappu				
1	Nilai SAKIP Kecamatan Bissappu	Predikat (Nilai)	B (65)	B (67)	BB (71)
2	Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Sasaran di Kecamatan Bissappu	Nilai	B	B	BB



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
3	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bissappu	Persen	75	77	80
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bissappu	Persen	100	100	100
	Persentase Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat Yang di Tangani di Kecamatan Bissappu	Persen	100	100	100
5	Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
6	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bissappu	Persen	100	100	100
7	Persentase Kelompok Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terberdayakan	Persen	100	100	100
8	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum dan Keamanan wilayah	Persen	100	100	100
9	Persentase Peningkatan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100
	Kec. Tompobulu				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tompobulu	persen	75	77	80
2	persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Tompobulu	persen	95	95	96
3	persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yg ditangani dikecamatan Tompobulu	persen	95	95	96
4	Nilai Sakip Kecamatan Tompobulu	Predikat (Nilai)	B (62)	B (67)	BB (71)
5	rata-rata tingkat capaian indikator sasaran di	Angka	B	B	BB



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	kecamatan Toppobulu				
6	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kab/Kota	persen	100	100	100
7	Jumlah anak sekolah dan masyarakat yang dilayani	persen	100	100	100
8	Kelompok masyarakat di wilayah kecamatan toppobulu	persen	100	90	100
9	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah kecamatan toppobulu	persen	100	100	100
10	Terselenggaranya pemerintahan desa yang efektif	persen	100	100	100
	Kec. Pajukukang				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan pajukukang	Predikat	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)
2	Persentase penyelenggaraan Kinerja pemerintahan Kecamatan Pajukukang	%	100	100	100
3	Persentase permasalahan dan pengaduan Masyarakat yang di Tangani di Kecamatan pajukukang	%	100	100	100
4	Nilai Sakip Kecamatan pajukukang	Predikat (Nilai)	B (62)	B (67)	BB (71)
5	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Kecamatan pajukukang	%	100	100	100
6	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	100
7	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan yang dilaksanakan di kecamatan pajukukang	persen	100	100	100
8	Persentase Kelompok Masyarakat Desa yang	persen	100	100	100



NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	Terberdayakan				
9	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	persen	20	20	100
10	Persentase Peningkatan pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan	persen	100	100	100
	Kec. Eremerasa				
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan Eremerasa	Persen	85	88	90
2	Persentase penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Eremerasa	Persen	100	100	100
3	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang di tangani	persen	100	100	100
4	Nilai Sakip Kecamatan Eremerasa	Predikat (Nilai)	B (62)	B (67)	B (71)
5	Tingkat Capaian Indikator sasaran Kecamatan Eremerasa	Persen	100	100	100
6	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	100
7	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan yang dilaksanakan di kecamatan	persen	100	100	100
8	Presentase lembaga yang aktif dalam proses perencanaan dan pemberdayaan	persen	100	100	100
9	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum kec. Eremerasa	persen	100	100	100
10	Persentase Peningkatan pembinaan	persen	85	87	90



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
	Kec. Uluere				
1	Nilai SAKIP Kecamatan Ulu Ere	Predikat (Nilai)	B (62)	B (67)	BB (71)
2	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Kecamatan Ulu Ere	Persen	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan Ulu Ere	Predikat	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ulu Ere	Persen	100	100	100
5	Persentase permasalahan dan Pengaduan Masyarakat yang ditangani di Kecamatan Ulu Ere	Persen	100	100	100
6	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	90	93	95
7	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan yang dilaksanakan di kecamatan	persen	85	87	90
8	Persentase Kelompok Masyarakat Desa yang terberdayakan	persen	90	90	90
9	Persentase Peningkatan pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	90	93	95
	Kec. Sinoa				
1	Nilai Sakip Kecamatan Sinoa	Predikat (Nilai)	B (62)	B (67)	BB (71)
2	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Kecamatan Sinoa	Persen	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan Sinoa	Predikat	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)
4	Persentase Penyelenggaraan	Persen	100	100	100



NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	Pemerintahan Kecamatan Sinoa				
	Persentase permasalahan dan Pengaduan Masyarakat yang ditangani di Kecamatan Sinoa	Persen	100	100	100
5	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
6	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang dilaksanakan oleh kecamatan sinoa	Persen	100	100	100
7	Presentase lembaga yang aktif dalam proses perencanaan dan pemberdayaan	Persen	90	90	90
8	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum kecamatan sinoa	Persen	20	20	20
9	Persentase Peningkatan pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan kecamatan sinoa	Persen	90	93	95
	Kec. Gantarangkeke				
1	Nilai Sakip Kecamatan Gantarangkeke	Predikat (Nilai)	B (62)	B (65)	BB (71)
2	1.1. Tingkat Capaian Indikator Sasaran Kecamatan Gantarangkeke	Predikat (Nilai)	B (65)	B (65)	BB (71)
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Gantarangkeke	Predikat	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)	B (Memuaskan)
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Gantarangkeke	Persen	95	97	98
5	Persentase Permasalahan dan pengaduan masyarakat	Persen	100	100	100



NO	IKK OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	TARGET AKHIR RPD
	yang ditangani Kec. Gantarangeke				
6	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
7	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang dilaksanakan oleh kecamatan sinoa	Persen	100	100	100
8	Persentase Kelompok Masyarakat Desa yang terberdayakan	Persen	100	100	100
9	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum kecamatan Gantarangeke	Persen	100	100	100
10	Persentase Peningkatan pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan kecamatan Gantarangeke	Persen	100	100	100

Sumber: BPS dan RPD Kabupaten Bantaeng 2024-2026



Tabel VI. 5.
Target Indikator Kinerja Kunci
(Permendagri 18 Tahun 2020)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian	Target 2025
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar				
a) Pendidikan				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	6.715 (78,99)	100,00%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	20.541 (99,99)	110,00%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	93,99%	100,00%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	31,340	40,00%
b) Kesehatan				
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	15%	15%
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	1%	1%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	118%	100,00%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	116%	100,00%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100%	100,00%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100%	100,00%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	40,14%	45,00%
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	58,62%	60,00%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94,18%	100,00%



No	IKK Outcome	Satuan	Capaian	Target 2025
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100,00%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100,00%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100%	100,00%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100%	100,00%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100%	100,00%
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	51,83%	60,00%
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	41,21%	50,00%
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	9,11%	15,00%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	90,53%	100,00%
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	69,17%	75,00%
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100%	100,00%
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	65%	75,00%
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	45%	50,00%



No	IKK Outcome	Satuan	Capaian	Target 2025
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100%	100,00%
d) Perumahan Rakyat				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	0,04%	10,00%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	0,085%	0,090%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	50,23	51,00%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	37,15	40,00%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	45,45	50,00%
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100%	100,00%
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100%	100,00%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	0	350
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	350
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	0	0
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%	100,00%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	9,5 menit	9 menit
f) Sosial				
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang	%	100%	100,00%



No	IKK Outcome	Satuan	Capaian	Target 2025
	terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)			
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100%	100,00%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
a) Tenaga Kerja				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100%	100%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	%	94,24%	100%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	102,50%	104%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	55,38%	60,00%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	50,60%	60,00%
g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	84%	85,00%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,09%	0%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	19,60%	15%
h) Pangan				
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	508%	100%
i) Pertanian				
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin	%	100%	100,00%



No	IKK Outcome	Satuan	Capaian	Target 2025
	lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100%	100,00%
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100%	100,00%
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanab Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0%	0%
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0%	0%
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	60%	100,00%
j) Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	-	82,56	85,00
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	91,60%	100,00%
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	0%	60%
k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	perekaman KTP elektronik	%	99,37%	100,00%
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	15,56%	30,00%
3	kepemilikan akta kelahiran	%	94,63%	100,00%
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	%	16,22%	30,00%
l) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	0%	50%
2	Persentase peningkatan satatus desa mandiri'	%	66,66%	100,00%
m) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana				
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		59,92	45
2	Persentase pemakaian kontrasepsi	%	86%	100,00%



No	IKK Outcome	Satuan	Capaian	Target 2025
	Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	0	0%
n) Perhubungan				
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	-	178	200
2.	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	-	33,69%	50,00%
o) Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	82%	100,00%
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100%	100,00%
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	100%	100%
p) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	32%	50,00%
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	1,00%	10,00%
q) Penanaman Modal				
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	64,20%	70,00%
r) Kepemudaan dan Olahraga				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,26%	2,50%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,37%	2,50%
3	Peningkatan prestasi olahraga	medali	17 medali	25
s) Statistik				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100,00%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik	%	100%	100,00%



No	IKK Outcome	Satuan	Capaian	Target 2025
	dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			
t) Persandian				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	4,10%	15,00%
u) Kebudayaan				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	42,68%	50,00%
v) Perpustakaan				
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	-	98	100
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	71	75%
w) Kearsipan				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	520	530
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	Tidak Dilaksanak an	-
Urusan Pilihan				
a) Kelautan dan Perikanan				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	92,536 ton	94.000
b) Pariwisata				
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	76,66	77%
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	88,40%	89%
3	Tingkat hunian akomodasi	%	91,23%	70%
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	%	0,80%	3,00%
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3,29	3,50%
c) Pertanian				



No	IKK Outcome	Satuan	Capaian	Target 2025
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	5865%	5910%
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	11,65%	12%
d) Kehutanan				
e) Energi dan Sumber Daya Mineral				
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	0%	0%
f) Perdagangan				
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	95,02%	100,00%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	30,84%	50,00%
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	1,30%	5,00%
g) Perindustrian				
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	0,41%	2,50%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	0%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	24,50%	25,00%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0%	0%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan	%	0%	0%



No	IKK Outcome	Satuan	Capaian	Target 2025
	Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota			
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-		tersedia
h) Transmigrasi				
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				
a) Perencanaan dan Keuangan				
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	34,39%	34,39%
2	Rasio PAD	%	85,24	86
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	level 3	level 3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	level 2	level 3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	83,78%	83,78%
6	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WTP
b) Pengadaan				
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0%	0%
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	14,93%	15,00%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	27,66%	30%
c) Kepegawaian				
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	400%	400%
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	ASN	10%	11,00%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100%	100,00%
d) Manajemen Keuangan				
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	100%	100%



No	IKK Outcome	Satuan	Capaian	Target 2025
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	100%	100%
3	Manajemen Aset	-	ya	ya
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	0%	0%
e) Transparansi dan Partisipasi Publik				
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100%	100%
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100%	100,00%

Sumber: BPS dan Perubahan RPJMD Kabupaten Bantaeng 2018-2023

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktupencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencanapemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- 1. Pendidikan;
- 2. Kesehatan;
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 6. Sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel VI. 6.
Target Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Bantaeng 2025

NO.	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SAT UAN	CAPAIAN	TARGET 2025
1	PENDIDIKAN			
1	Pendidikan Dasar:			
	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (APS)		98,81	100
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerisasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional		51,09	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya
	Literasi SD		57,13	60,64
	Numerasi SD		45,06	47,08
2	Pendidikan Kesetaraan:			
	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan		6,78	100
	Rata-rata kemmpuan literasi dan numerisasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional		63,54	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya
	Numerasi SMP		59,78	68,56
	Literasi SMP		67,31	73,60
3	Pendidikan Anak Usia Dini:			
	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD		50,99	100
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B		64,41	68,03
	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4		58,78	60,78
4	Iklim inklusivitas SD dan SMP			
	Iklim inklusivitas SD		53,07	62,64
	Iklim inklusivitas SMP		56,35	64,74
	Iklim Keamanan SD dan SMP			
	Iklim Keamanan SD		70,37	76,05
	Iklim Keamanan SMP		69,68	75,63
	Iklim Kebhinekaan SD dan SMP			
	Iklim Kebhinekaan SD		70,85	77,48
	Iklim Kebhinekaan SMP		71,65	76,05
2	KESEHATAN			
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	99,67	100
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	105,94	106
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	110,57	112



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO.	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SAT UAN	CAPAIAN	TARGET 2025
4	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	108,88	109
5	Jumlah anak pada usia Pendidikan Dasar yang mendapatlkan Pelayanan Kesehatan	%	99,49	100
6	Jumah warga negara usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	97,49	100
7	Jumlah usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	97,22	100
8	Jumlah warga negara Penderita Hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	99,59	100
9	Jumlah warga negara Diabetes Melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	101,88	102
10	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	84,21	100
11	Jumlah warga negara yang terduga TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	102,26	103
12	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100
3	URUSAN SOSIAL			
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	85	100
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	85	100
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	85	100
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	45	100
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	%	95	100
4	URUSAN PEKERJAAN UMUM			
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN			



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO.	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN	TARGET 2025
	PENATAAN RUANG			
1	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	%	86,00	100
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota	%	68,00	100
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT			
	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100
2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100
5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota	%	100	100
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100
05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	Jumlah warga negara yang memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	0.6	10,00
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	61.23	100
	Jumlah warga negara yang	%	72.13	100



NO.	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN	TARGET 2025
	memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Bantaeng 2018-2023

6.5 CAPAIAN PEMBANGUNAN TPB/SDG's

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan Dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2025, maka berikut dijabarkan capaian pembangunan indikator TPB yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel VI. 7.
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal		Target	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2025	
	Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN						
	Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Pusat Statistik (BPS)	%	9,03	8,26	8,08	Dinas Sosial.
	1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan .	Dinas Sosial	KPM	7,72	7,74	8	Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata.
	Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro						



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

Kode Indikat	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal		Target	Instansi Pelaksana
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	%	117	118	120	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi pengguna metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 14-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	%	72,68	75	79	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
1.4.1.(d)	Indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Dinas PUPR	%	83,67	85	87	Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Dinas PUPR	%	88,01	90	92	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan
1.4.1.(h)	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	BPS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	97,12	74,18	76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, Dinas PUPR.
Target 1.5 : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tahun	BPBD	%	61,62	61,78	62	BPBD, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian
Target 1.a : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumberdaya, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara							



Kode Indikat	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal		Target	Instansi Pelaksana
	kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi						
1.a.1*	Proporsi sumberdaya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Dinas Sosial	%	20	20	20	Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Dinas Sosial	Rp	##### ####	Na	NA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan.
TUJUAN 02 : TANPA KELAPARAN							
	Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN						
	Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun						
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Dinas Ketahanan Pangan	Kkal	1617,2	1619,3	1620	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas PUPR.
	Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula						
2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan asi eksklusif	Dinas Kesehatan	%	64,5	64,56	65	Dinas Kesehatan
2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	%	75,2	78,4	79	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas



Kode Indikat	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal		Target	Instansi Pelaksana
	Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan						Perikanan dan Kelautan.
TUJUAN 03 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
	Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA						
	Target 3.1 : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000						
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	%	240,6	97,3	0	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesmelahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.1.2 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Target 3.2 : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan angka kematian balita 25 per 1000						
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	%	2,4	0,3	0	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	%	2,1	0,3	0	Dinas Kesehatan
3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	%	2,4	0,3	0	Dinas Kesehatan
	Target 3.3 : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya						
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	%	0,11	0,1	0,1	Dinas Kesehatan
	Target 3.4 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta						



Kode Indikat	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal		Target	Instansi Pelaksana
	meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan						
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	35,2	35,3	35	Dinas Kesehatan
	Target 3.7 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional						
3.7.1 (b)	Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara modern	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	12,38	73,12	75	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	BPS	%	36,01	37,77	36	Dinas Kesehatan
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR)	BPS	%	2,12	1,99	2	Dinas Kesehatan
	Target 3.8 : Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang						
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	%	87,8	95	100	Dinas Kesehatan, BPJS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
TUJUAN 04 : PENDIDIKAN BERKUALITAS							
	Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA						
	Target 4.1 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif						
4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	111,94	114,02	115	Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, PUPR
	Target 4.2 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga						



Kode Indikat	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal		Target	Instansi Pelaksana
mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar							
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	90,7	86,13	87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD PPPA, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Target 4.6 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi di kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi							
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	97,84	96,8	97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PMD PPPA
4.6.1 (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 - 24 tahun, dan umur 15 - 59 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	97,06	96,83	97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PMD PPPA
Target 4.c : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil							
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB yang bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	45,29	40,58	41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
TUJUAN 05 : KESETARAAN GENDER							
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN							
Target 5.6 : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development at the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut							
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	%	13,92	9,7	10	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
TUJUAN 08 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							



Kode Indikat	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal		Target	Instansi Pelaksana
	Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA						
	Target 8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto pertahun di negara kurang berkembang						
8.1.1 (a)	PDRB Perkapita	BPS	%	52,16	62,78	63	Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Dinas Pariwisata
	Target 8.3 : Manggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreatifitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan						
8.3.1 (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	%	28,31	29,30	30	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
	Target 8.9 : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk local						
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Dinas Pariwisata	%	0,85	0,86	0,87	Dinas Pariwisata. Dinas PUPR
8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	OR	97412	264289		Dinas Pariwisata, Dinas PUPR
	Target 8.10 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua						
8.10.1 (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	%	24,72	24,93	25	Dinas Koperasi, Dinas Pertanian
TUJUAN 09 : INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
	Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI						
	Target 9.2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	9,65	9,80	10	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas



Kode Indikat	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal		Target	Instansi Pelaksana
	dan perkapita						Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal PTSP
9.2.1 (a)	Laju Pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	44,31	45,77	46	Dinas Koperasi, BPKD, Dinas Sosial
Target 9.3 : Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar							
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	0	0	2%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Sosial
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	0	0	1%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Sosial
TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN							
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA- DAN ANTAR NEGARA							
Target 10.1 : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional							
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Dinas Sosial	%	9,03	8,26	8,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas PMD PPPA
10.1.1 (b)	Jumlah desa mandiri	Dinas PMD, PP dan PA	%	11	21		Dinas PMD, PPPA, Dinas Koperasi dan



Kode Indikat	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal		Target	Instansi Pelaksana
							Perdagangan, Dinas Sosial
TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
	Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN						
	Target 11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh						
11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanian	%	41,71	40,62	42	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal PTSP



BAB VII PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu: Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan kebijakan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dan kebijakan/prioritas pembangunan tahunan pusat (RKP) Tahun 2025.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2025. Penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 sekaligus juga dimaksudkan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan disusunnya RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025, akan didapatkan serangkaian program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu, juga akan terdapat acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/APBD (KUA) Kabupaten Bantaeng Tahun 2025, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bantaeng Tahun 2025, dan tersedianya acuan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2025. Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Dokumen RKPD menjadi jembatan dalam harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2025.
- b. OPD dan masyarakat termasuk di dalamnya dunia usaha berkewajiban



untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2025 dengan sebaik baiknya.

- c. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
- d. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- e. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2 Kesimpulan

Kesimpulan dalam RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 ini dijabarkan sebagai berikut:

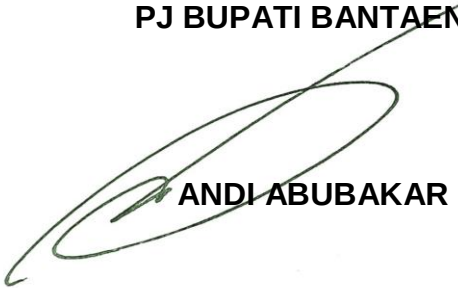
1. RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2025.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2025 yaitu: **“KESEJAHTERAAN BANTAENG BERBASIS KEMANDIRIAN EKONOMI KERAKYATAN”** sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
4. RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional.



Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.

5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

PJ BUPATI BANTAENG



ANDI ABUBAKAR